RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

TAHUN 2025

TABALONG SMART

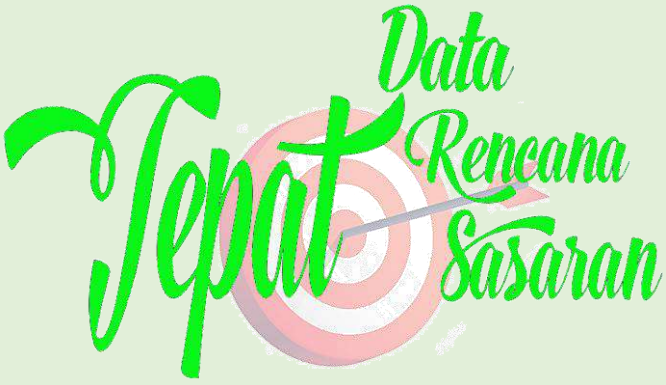

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025

BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);

9. Peraturan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 142);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABALONG

dan

BUPATI TABALONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Tabalong.
6. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tabalong adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tabalong untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
15. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output), dalam bentuk barang/jasa.
25. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

26. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
27. Keluaran *(output)* adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.
28. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
30. Tabalong Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan yang selanjutnya disebut Tabalong SMarT adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN secara sinergis dan terpadu.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
   a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;
   b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
   c. pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD; dan
   d. acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Daerah.

(3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan Program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB II
TATA PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan:
a. teknokratik;
b. partisipatif;
c. politis; dan
d. atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom up*).

Pasal 5

Perencanaan pembangunan Daerah berorientasi pada substansi, dengan menggunakan pendekatan:
a. holistik-tematik;
b. integratif; dan
c. spasial.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 6

(1) Penyusunan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran umum Daerah;
   c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
   d. program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   e. penutup.

(2) Ketentuan mengenai penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika RPJMD Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
VISI DAN MISI

Pasal 7

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 menuju Tabalong SMarT.

Pasal 8

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:
a. mewujudkan masyarakat yang sejahtera;
b. mendorong kemajuan Daerah;
c. mengembangkan kehidupan yang religius; dan
d. menjadi daerah yang terdepan.

BAB V
PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 9

(1) RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 10

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan.

(3) pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan jangka menengah Daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Daerah dan pembangunan jangka menengah nasional.

(4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 11

Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan;
b. adanya ketidakcocokan antara kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD dengan kebijakan nasional, yang memerlukan penyesuaian agar sejalan dengan arah pembangunan nasional; dan
c. terjadinya perubahan mendasar.

Pasal 12

Perubahan mendasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non alam;
c. goncangan politik;
d. krisis ekonomi;
e. konflik sosial budaya;
f. gangguan keamanan;
g. pemekaran daerah; atau
h. perubahan kebijakan nasional yang mempengaruhi arah dan prioritas pembangunan daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Dalam hal terjadi kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian target tahunan pada indikator, sasaran dan program dalam RPJMD tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, maka penyesuaian dapat dilaksanakan pada saat:
a. penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. kebijakan umum APBD; dan
c. prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 14

RPJMD dapat disesuaikan dalam hal RTRW dan RPJPD yang menjadi pedoman penyusunan RPJMD telah mengalami perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 4) masih tetap berlaku sampai ditetapkannya RPJMD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
a. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021); dan
b. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2024),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal **20 Agustus 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

HAMIDA MUNAWARAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR **3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (3-62/2025).

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan Kabupaten Tabalong sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan perencanaan yang digunakan adalah: (1) Teknokratik, dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan; (2) Partisipatif, melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan; (3) Politis, merupakan penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah; dan (4) Atas-bawah *(top-down)* dan bawah-atas *(bottom-up),* yaitu menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang mempengaruhi capaian beberapa indikator sasaran dan target dalam RPJMD periode sebelumnya perlu dilakukan peningkatan dan penguatan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan sasaran misi RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029.

Kabupaten Tabalong merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, sehingga periode RPJMD yang disusun mulai dari tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Pilkada serentak bukan hanya sekadar proses pemilihan pemimpin daerah, tetapi juga menjadi titik awal untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang. Selain itu Pilkada serentak dapat menciptakan keselarasan dalam perencanaan pembangunan baik dari segi isi maupun waktu, antara pusat dan daerah. Hal ini karena kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dalam pilkada serentak dapat mengimplementasikan visi dan misi mereka secara serentak dalam jangka pendek dan menengah sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terarah dan efisien. Pemilu serentak juga

diharapkan dapat memperkuat hubungan antara legislatif dan eksekutif, serta menciptakan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Kabupaten Tabalong berkewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, mulai dari Rancangan Teknokratik (Rantek) RPJMD, di mana sebagian substansinya menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029.

Penyusunan RPJMD harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Penyusunan RPJMD juga harus memperhatikan RTRW yaitu pada kebijakan pola dan struktur ruang. Kebijakan tersebut digunakan sebagai pedoman penetapan lokasi program pembangunan yang selaras dengan pemanfaatan ruang di Kabupaten Tabalong, berpedoman dan memperhatikan RPJPD dan RPJM Nasional, Provinsi, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD SDGs, RAD Pangan dan Gizi, RAD Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca), Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Kajian Lingkungan Hidup Startegis (KLHS) serta Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD karena sebagian substansi Renstra PD merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Mengingat perencanaan pembangunan di daerah merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, diperlukan penyelarasan yang mencakup penyelarasan kinerja dan periodisasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas, dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat *(Quick Wins)* yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029.

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah yang memiliki visi *"MENUJU TABALONG SMaRT"*. Visi ini diharapkan akan menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tema pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah: *"Penguatan Pondasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif"*.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

huruf a

yang dimaksud dengan "teknokratik" adalah dilaksanakan berdasarkan metode dan kerangka ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk perencanaan.

huruf b

yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan.

huruf c

yang dimaksud dengan "politis" adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah

huruf d

yang dimaksud dengan "atas bawah (*top-down*) dan bawah atas (*bottom up*)" adalah menurut jenjang pemerintahan dan rencana hasil proses atas-bawah serta bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah

Pasal 5

huruf a

yang dimaksud dengan "holistik-tematik" adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/ kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya

huruf b

yang dimaksud dengan "integratif" adalah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

huruf c

yang dimaksud dengan "spasial" adalah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam Perencanaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 1

DAFTAR MATERI ISI
LAMPIRAN PERDA RPJMD KAB. TABALONG 2025-2029

Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025-2029 ii
Daftar Isi xvi
Daftar Tabel xix
Daftar Gambar xxix

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-3
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya I-8
1.4. Maksud dan Tujuan I-10
1.5. Sistematika Penulisan I-11

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1
2.1.1. Aspek Umum II-1
2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi II-3
2.1.2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah II-3
2.1.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah II-18
2.1.2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup II-18
2.1.2.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan II-43
2.1.2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas II-45
2.1.2.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim II-48
2.1.2.7. Demografi II-66
2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-69
2.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi II-69
2.1.3.2. Kesehatan Untuk Semua II-88
2.1.3.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata II-92
2.1.3.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif II-101
2.1.3.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju II-102
2.1.3.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif II-102
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah II-106
2.1.4.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) II-106
2.1.4.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi II-107
2.1.4.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru II-114
2.1.4.4. Transformasi Digital II-114
2.1.4.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global II-114
2.1.4.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi II-115
2.1.4.7. Stabilitas Ekonomi Makro II-116
2.1.5. Aspek Pelayanan Umum II-118
2.1.5.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif II-118

2.1.5.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial II-121
2.1.5.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan II-123
2.1.5.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah II-124
2.1.5.5. Layanan Urusan Pilihan II-203
2.1.5.6. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan II-216
2.1.5.7. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-217
2.1.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) II-239
2.1.6.1. Bidang Urusan Pendidikan II-239
2.1.6.2. Bidang Urusan Kesehatan II-241
2.1.6.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum II-243
2.1.6.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat II-245
2.1.6.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat II-246
2.1.6.6. Bidang Urusan Sosial II-248
2.1.7. Kerjasama Daerah II-251
2.2. Gambaran Keuangan Daerah II-263
2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir II-263
2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD II-264
2.2.1.2. Neraca Daerah II-275
2.2.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu II-284
2.2.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran II-288
2.2.1.5. Proporsi Pembiayaan Daerah II-300
2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan II-304
2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja II-304
2.2.2.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah II-308
2.2.2.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan II-310
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis II-320
2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah II-320
2.3.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan II-320
2.3.1.2. Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah II-322
2.3.2. Isu Strategis Daerah II-336
2.3.2.1. Telaahan Isu Internasional II-336
2.3.2.2. Telaahan Isu/Kebijakan Nasional II-337
2.3.2.3. Telaahan Isu/Kebijakan Regional (Provinsi) II-341
2.3.2.4. Telaahan Isu/Kebijakan Kabupaten Tabalong II-343

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran III-1
3.1.1. Visi dan Misi III-1
3.1.2. Tujuan dan Sasaran III-6
3.1.3. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2025-2029 ..... III-14
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-38

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan III-38
3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah III-104
3.2.3. Pelaksanaan Program Strategis Nasional III-164

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah IV-119
4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) IV-119
4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD) IV-123

BAB V PENUTUP V-1
5.1. Kaidah Pelaksanaan V-1
5.2. Pedoman Transisi V-3

oo O oo

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Tidak Ada Tabel

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Tabel 2.1 Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-4
Tabel 2.2 Curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-11
Tabel 2.3 Sebaran DAS berdasarkan Kecamatan II-14
Tabel 2.4 Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Penggunaan Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (ha) II-17
Tabel 2.5 Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong II-18
Tabel 2.6 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tabalong setiap Kecamatan Tahun 2024 ..... II-20
Tabel 2.7 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tabalong setiap Kecamatan Tahun 2029 ..... II-21
Tabel 2.8 Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tabalong setiap Kecamatan Tahun 2030 ..... II-22
Tabel 2.9 Perubahan Status Beras di Kabupaten Tabalong setiap Kecamatan Akibat Perubahan Pola Ruang II-23
Tabel 2.10 Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kecamatan berdasarkan Kepmen LHK II-29
Tabel 2.11 Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis II-30
Tabel 2.12 Perhitungan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan II-35
Tabel 2.13 Perhitungan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan Tahun 2023 ..... II-36
Tabel 2.14 Perhitungan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan Tahun 2030 ..... II-37
Tabel 2.15 Perhitungan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan Tahun 2041 ..... II-38
Tabel 2.16 Perubahan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan Tahun 2019 dan 2041 ..... II-39
Tabel 2.17 Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Eksisting Permukiman Tahun 2023 ..... II-41
Tabel 2.18 Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kesesuaian Permukiman Tahun 2023 ..... II-41
Tabel 2.19 Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kesesuaian Permukiman Tahun 2041 ..... II-42
Tabel 2.20 Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Pola Ruang untuk Permukiman Tahun 2041 ..... II-42
Tabel 2.21 Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-44
Tabel 2.22 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-45

Tabel 2.23 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-46
Tabel 2.24 Sebaran Potensi Risiko Bencana Banjir Menurut Kecamatan .. II-51
Tabel 2.25 Sebaran Potensi Risiko Bencana Banjir Bandang Menurut Kecamatan II-52
Tabel 2.26 Sebaran Potensi Risiko Bencana Karhutla Menurut Kecamatan II-53
Tabel 2.27 Sebaran Potensi Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Menurut Kecamatan II-54
Tabel 2.28 Sebaran Potensi Risiko Bencana Kekeringan Menurut Kecamatan II-55
Tabel 2.29 Sebaran Potensi Risiko Bencana Tanah Longsor Menurut Kecamatan II-56
Tabel 2.30 Kondisi Lahan Kritis Kabupaten Tabalong..... II-57
Tabel 2.31 Tutupan Lahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022 ..... II-58
Tabel 2.32 Luas Area PIPPIB di Kabupaten Tabalong..... II-62
Tabel 2.33 Luas dan persentase FOLU per kecamatan di Kabupaten Tabalong II-64
Tabel 2.34 Jumlah, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-67
Tabel 2.35 Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-68
Tabel 2.36 Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2.37 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tabalong Tahun 2024..... II-69
Tabel 2.38 PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024..... II-71
Tabel 2.39 PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024..... II-72
Tabel 2.40 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-74
Tabel 2.41 Peran PDRB ADHB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024..... II-76
Tabel 2.42 PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-78
Tabel 2.43 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.44 Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024 II-84
Tabel 2.45 Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.46 Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)..... II-88
Tabel 2.47 Perbandingan UHH Laki–Laki dan Perempuan (tahun) Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan..... II-89
Tabel 2.48 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-90
Tabel 2.49 Prevalensi Stunting (%) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-91
Tabel 2.50 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024..... II-94

Tabel 2.51 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024 ..... II-94
Tabel 2.52 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024 ..... II-95
Tabel 2.53 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Tabalong Tahun 2020- 2024 ..... II-96
Tabel 2.54 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-96
Tabel 2.55 Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.56 Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.57 IDG, IPG dan Status Kota Layak Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-104
Tabel 2.58 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-105
Tabel 2.59 Rasio Ketergantungan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2.60 Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-107
Tabel 2.61 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.62 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-110
Tabel 2.63 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.65 Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2020-2024 Kabupaten Tabalong II-113
Tabel 2.66 Angka Kriminalitas dan Persentase Kasus Tertangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024 ..... II-122
Tabel 2.67 Skor Daya Saing Daerah di Kalimantan Selatan Tahun 2024 ..... II-124
Tabel 2.68 Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-125
Tabel 2.69 Angka Kelulusan (AL) Sekolah SD/MI di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2.70 Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-126
Tabel 2.71 Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMA/SMK di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-127
Tabel 2.72 Jumlah dan Persentase Guru dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-128
Tabel 2.73 Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.74 Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-129

Tabel 2.75 Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Tabalong 2020-2024 ..... II-130
Tabel 2.76 Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Dasar Di Kabupaten Tabalong 2020-2024 ..... II-131
Tabel 2.77 Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tabalong 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.78 Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK) Di Kabupaten Tabalong 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.79 Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SD/MI Di Kabupaten Tabalong 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.80 Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SMP/MTs Di Kabupaten Tabalong 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.81 Persentase Angka Melanjutkan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2.82 Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Buruk di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-135
Tabel 2.83 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2.84 Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.85 Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-137
Tabel 2.86 Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2.87 Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-139
Tabel 2.88 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2.89 Jumlah Dokter Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-140
Tabel 2.90 Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II-141
Tabel 2.91 Jumlah Tenaga Medis Tahun 2020-2024 ..... II-142
Tabel 2.92 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2.93 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-143
Tabel 2.94 Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.95 Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-144
Tabel 2.96 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-145
Tabel 2.97 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.98 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Tahun 2020-2024 ..... II-146
Tabel 2.99 Cakupan Kunjungan/Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2020-2024 ..... II-147
Tabel 2.100 Persentase Faskes dengan Ketersediaan Obat Esensial di Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024 ..... II-147

Tabel 2.101 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2024 ..... II-149
Tabel 2.102 Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-150
Tabel 2.103 Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 151
Tabel 2.104 Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 . II-152
Tabel 2.105 Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2024 ..... II-153
Tabel 2.106 Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-153
Tabel 2.107 Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-155
Tabel 2.108 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024 ..... II-155
Tabel 2.109 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2020-2024 ..... II-156
Tabel 2.110 Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-157
Tabel 2.111 Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2020-2024 ..... II-157
Tabel 2.112 Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-159
Tabel 2.113 Persentase Pemukiman Yang Tertata di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-160
Tabel 2.114 Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-160
Tabel 2.115 Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-161
Tabel 2.116 Rasio Jumlah Linmas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-162
Tabel 2.117 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2.118 Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-163
Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-164
Tabel 2.120 Perkembangan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-165
Tabel 2.121 Persentase Penanganan PPKS di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2.122 Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-167
Tabel 2.123 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2020-2024 ..... II-168
Tabel 2.124 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-169
Tabel 2.125 Rasio Lulusan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ... II-170
Tabel 2.126 Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-171
Tabel 2.127 Rasio KDRT di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-172
Tabel 2.128 Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-172

Tabel 2.129 Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-173
Tabel 2.130 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 ..... II-173
Tabel 2.131 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-176
Tabel 2.132 Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-177
Tabel 2.133 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2020-2024 di Kabupaten Tabalong II-177
Tabel 2.134 Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-178
Tabel 2.135 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Tahun 2020-2024 di Kabupaten Tabalong..... II-179
Tabel 2.136 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang digunakan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-179
Tabel 2.137 Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-180
Tabel 2.138 Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-181
Tabel 2.139 Status Kepemilikan Akte Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-182
Tabel 2.140 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 ..... II-183
Tabel 2.141 Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-184
Tabel 2.142 Capaian Kinerja PKK di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-184
Tabel 2.143 Jumlah LSM yang Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-185
Tabel 2.144 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024..... II-185
Tabel 2.145 Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-187
Tabel 2.146 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024..... II-187
Tabel 2.147 Pelayanan Angkutan Umum Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-188
Tabel 2.148 Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024... II-189
Tabel 2.149 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-190
Tabel 2.150 Perkembangan Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-191
Tabel 2.151 Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-191
Tabel 2.152 Jumlah Investor Berskala Nasional di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-192

Tabel 2.153 Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-194
Tabel 2.154 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN dan PMA di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2.155 Perkembangan Organisasi Olahraga di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-195
Tabel 2.156 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-196
Tabel 2.157 Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.158 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024 ..... II-197
Tabel 2.159 Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-198
Tabel 2.160 Jumlah Perpustakaan Tahun 2020-2024 ..... II-198
Tabel 2.161 Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-199
Tabel 2.162 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024 .. II-201
Tabel 2.163 Jumlah Penataan Arsip Dinamis Tahun 2020-2024 ..... II-202
Tabel 2.164 Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku Tahun 2021-2024 ..... II-202
Tabel 2.165 Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024..... II-203
Tabel 2.166 Perkembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-204
Tabel 2.167 Perkembangan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya perhektar di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-206
Tabel 2.168 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-209
Tabel 2.169 Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2020-2024 II-210
Tabel 2.170 Produksi dan Produktivitas Peternakan Tahun 2020-2024 II-211
Tabel 2.171 Perkembangan Penerbitan NIB di Kabupaten Tabalong Tahun 2020 - 2024 ..... II-211
Tabel 2.172 Perkembangan Penerbitan TDP di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-212
Tabel 2.173 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 .... II-212
Tabel 2.174 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-214
Tabel 2.175 Jumlah Unit Usaha Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-215
Tabel 2.176 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024... II-215
Tabel 2.177 Rincian Penilaian SAKIP Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-216
Tabel 2.178 Nilai SAKIP dan Nilai LPPD Pemda Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-217
Tabel 2.179 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-217
Tabel 2.180 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024..... II-219
Tabel 2.181 Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2020-2024..... II-220

Tabel 2.182 Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-220
Tabel 2.183 Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-221
Tabel 2.184 Perkembangan Survey Penilaian Integritas Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024 ..... II-222
Tabel 2.185 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-224
Tabel 2.186 Capaian Pelaksanaan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan Tahun 2024 ..... II-242
Tabel 2.187 Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Tahun 2024 ..... II-242
Tabel 2.188 Rekapitulasi Capaian Layanan Air Minum Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-244
Tabel 2.189 Rekapitulasi Capaian Layanan Air Minum dan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong Tahun 2024 ..... II-245
Tabel 2.190 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024 ..... II-246
Tabel 2.191 Realisasi Capaian untuk SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024 ..... II-246
Tabel 2.192 Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024 II-247
Tabel 2.193 Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024 ..... II-247
Tabel 2.194 Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Tahun 2024 ..... II-248
Tabel 2.195 Rekapitulasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong II-252

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Tabel 2.196 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-266
Tabel 2.197 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-269
Tabel 2.198 Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-272
Tabel 2.199 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-274
Tabel 2.200 Neraca Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-277
Tabel 2.201 Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-283
Tabel 2.202 Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-290
Tabel 2.203 Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-297
Tabel 2.204 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-298
Tabel 2.205 Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-299
Tabel 2.206 Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-301

Tabel 2.207 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-303
Tabel 2.208 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030..... II-305
Tabel 2.209 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 ..... II-307
Tabel 2.210 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030..... II-309
Tabel 2.211 Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030 ..... II-312
Tabel 2.212 Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ..... II-314
Tabel 2.213 Proyeksi Anggaran untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030..... II-316

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Tabel 2.214 Hasil Pemeringkatan Permasalahan Pokok Daerah Kabupaten Tabalong II-320
Tabel 2.215 Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong. II-335
Tabel 2.216 Kerusakan Lingkungan dan Risiko Bencana II-373
Tabel 2.217 Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah II-373
Tabel 2.218 Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM)..... II-374
Tabel 2.219 Ekonomi Tidak Merata dan Kurang Inovasi..... II-378
Tabel 2.220 Kurangnya Sinergi dan Kolaborasi II-380
Tabel 2.221 Kota Tidak Berkelanjutan..... II-381
Tabel 2.222 Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ..... II-395

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Tabel 3.1 Target Indikator Makro Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030..... III-8
Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong 2025-2030 ..... III-9

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 3.3 Tema Tahap I RPJPD (2025-2029)..... III-38
Tabel 3.4 Penahapan Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030 ..... III-39
Tabel 3.5 Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 ..... III-40
Tabel 3.6 Langkah-Langkah Strategis Permasalahan Prioritas Daerah di Kabupaten Tabalong III-54
Tabel 3.7 Langkah-Langkah Strategis Pengembangan Sektor/Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Tabalong III-63
Tabel 3.8 Indikasi Program Destinasi Parawisata..... III-84
Tabel 3.9 Indikasi Program Industri Pariwisata III-87
Tabel 3.10 Indikasi Program Pasar Pariwisata III-89
Tabel 3.11 Indikasi Program Kelembagaan Pariwisata III-93
Tabel 3.12 Penjabaran Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati ke dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten

Tabalong III-104
Tabel 3.13 Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 ..... III-107

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030 ..... IV-2
Tabel 4.2 Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan IV-109
Tabel 4.3 Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan IV-110
Tabel 4.4 Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum IV-111
Tabel 4.5 Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat IV-114
Tabel 4.6 Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum) IV-116
Tabel 4.7 Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Bencana) IV-117
Tabel 4.8 Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Sub Urusan Kebakaran) IV-117
Tabel 4.9 Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial IV-118

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 4.10 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 ..... IV-120
Tabel 4.11 Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030 ..... IV-124

BAB V PENUTUP

Tidak Ada Tabel

oo O oo

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya I-8

BAB II Gambaran Umum Daerah

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Tabalong II-5
Gambar 2.2 Peta Topografi Hidrologi Kabupaten Tabalong II-6
Gambar 2.3 Peta Jenis Tanah Kabupaten Tabalong II-8
Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Tabalong II-10
Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kabupaten Tabalong II-12
Gambar 2.6 Pola Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong II-13
Gambar 2.7 Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong II-15
Gambar 2.8 Perubahan produksi pangan di Kabupaten Tabalong setiap kecamatan akibat perubahan pola ruang II-24
Gambar 2.9 Peta Status Pangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023 ..... II-26
Gambar 2.10 Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2023 Secara Administrasi II-29
Gambar 2.11 Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Administrasi II-30
Gambar 2.12 Status Air Kepmen 146 Tahun 2023 Kabupaten Tabalong .. II-31
Gambar 2.13 Status Air Analisis Kabupaten Tabalong II-32
Gambar 2.14 Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-49
Gambar 2.15 Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024 ..... II-50
Gambar 2.16 Tutupan Lahan Kabupaten Tabalong II-59
Gambar 2.17 Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Tabalong II-60
Gambar 2.18 Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) II-63
Gambar 2.19 *Forest and Other Land Use* (FOLU) II-65
Gambar 2.20 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong, ... II-76
Gambar 2.21 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..... II-81
Gambar 2.22 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..... II-82
Gambar 2.23 Indeks Gini Kabupaten Tabalong Terhadap Daerah Lain dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ..... II-83
Gambar 2.24 Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2024 ..... II-84
Gambar 2.25 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-87
Gambar 2.26 Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (tahun) II-89

Gambar 2.27 Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Tabalong Tahun 2020- 2024 (tahun) II-93
Gambar 2.28 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tabalong ... II-97
Gambar 2.29 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender II-103
Gambar 2.30 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-109
Gambar 2.31 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020, 2022 dan 2023 ..... II-112
Gambar 2.32 Perbandingan Inflasi Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 ..... II-118
Gambar 2.33 Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 ..... II-119
Gambar 2.34 Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2023 ..... II-120
Gambar 2.35 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong II-121
Gambar 2.36 Realisasi Anggaran Belanja Tabalong Tahun 2020-2024 ... II-289
Gambar 2.37 Proyeksi SiLPA Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 .... II-310
Gambar 2.38 Visi dan Misi Presiden Tahun 2025-2029 ..... II-337

BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Gambar 3.1 *Cascading* Kinerja RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ..... III-7

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Tidak Ada Gambar

BAB V PENUTUP

Tidak Ada Gambar

oo O oo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

TABALONG SMART

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah. Adapun dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Hal ini bermakna bahwa visi, misi, dan program prioritas yang disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sewaktu kampanye dijabarkan ke dalam dokumen RPJMD.

Pelantikan **H Muhammad Noor Rifani** sebagai **Bupati Tabalong** dan **Habib Muhammad Taufani Alkaf** sebagai **Wakil Bupati Tabalong** periode tahun 2025-2030 pada tanggal 20 Februari 2025 menjadi awal bagi penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029. Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong ditempuh dengan tahapan: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Mengingat pentingnya RPJMD sebagai pedoman pembangunan, maka dalam proses penyusunannya melibatkan pemangku kepentingan sesuai dengan peran dan kewenangannya masing-masing.

Penyusunan RPJMD dilakukan sesuai tata cara dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, menggunakan beberapa pendekatan. Adapun pendekatan perencanaan yang dimaksud, meliputi:

1. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan.
5. Pendekatan Holistik-Tematik: dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

6. Pendekatan Integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
7. Pendekatan Spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Dokumen RPJMD disusun bersamaan dengan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2025-2029, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah merupakan rencana operasional dari RPJMD, yang menjabarkan kebijakan dalam RPJMD ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangan masing-masing.

Dokumen ini disusun dengan mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, sebagaimana diamanatkan oleh Pemerintah Pusat. Tujuan dari pengintegrasian agar perencanaan pembangunan yang dihasilkan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi dari KLHS menjadi bagian dalam substansi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. RKPD akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi tahap awal pembahasan anggaran di pemerintah daerah, yang pada akhirnya akan ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksananya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02); dan
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dokumen tersebut sangat penting sebab merupakan pelaksanaan tahapan pembangunan lima tahunan dari RPJPD, dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Pada saat penyusunannya, RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan seluruh Renstra Perangkat Daerah.

Keterkaitan penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dengan dokumen lainnya digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya

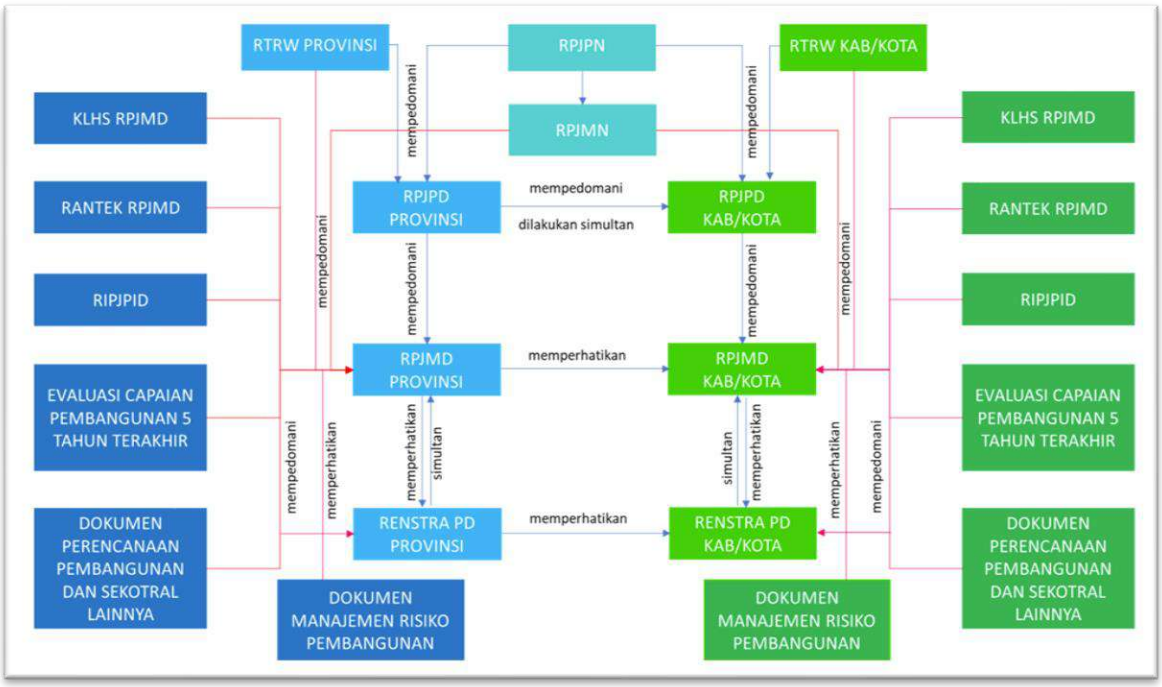

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Penjelasan lebih rinci mengenai hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagai berikut:

a. RPJMD Kabupaten Tabalong dengan RPJPD Kabupaten Tabalong

   Penyusunan RPJMD kabupaten berpedoman pada RPJPD kabupaten yakni dengan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

b. RPJMD Kabupaten Tabalong dengan RTRW Kabupaten Tabalong

   Penyusunan RPJMD kabupaten berpedoman pada RTRW kabupaten yakni dengan menyelaraskan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

c. RPJMD Kabupaten Tabalong dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

   Penyusunan RPJMD kabupaten berpedoman pada RPJMD provinsi dilakukan dengan cara menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota dengan arah serta prioritas pembangunan daerah provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

d. RPJMD Kabupaten Tabalong dengan RPJMN

   Penyusunan RPJMD kabupaten berpedoman pada RPJMN dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan sasaran, agenda pembangunan, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional dengan memperhatikan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.

e. RPJMD Kabupaten Tabalong dengan RKPD Kabupaten Tabalong

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, sehingga dalam penyusunan berpedoman pada RPJMD pada tahun berkenaan. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah dalam penyusunan RKPD, sesuai dengan sasaran, arah kebijakan dan program perangkat daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

f. RPJMD Kabupaten Tabalong dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada RPJMD dalam mewujudkan visi dan misi daerah serta tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

g. RPJMD Kabupaten Tabalong dengan dokumen perencanaan lainnya

Penyusunan RPJMD memperhatikan dokumen lainnya seperti Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah (KLHS) RPJMD, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek di Daerah (RIPJPID) dan dokumen perencanaan sektoral lainnya yang terkait.

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 disusun dengan maksud menjabarkan visi dan misi bupati dan wakil bupati ke dalam rencana jangka menengah yang menjadi pedoman pembangunan di Kabupaten Tabalong untuk periode 5 (lima) tahunan ke depan.

Dalam mewujudkan maksud tersebut, maka tujuan yang akan dicapai, yaitu:

1. Tersedianya analisis gambaran umum kondisi daerah;
2. Teridentifikasinya gambaran keuangan daerah dan proyeksi keuangan daerah untuk pembangunan jangka menengah;
3. Teridentifikasinya permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah;

4. Tersusunnya tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran visi dan misi;
5. Teridentifikasinya strategi dan arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah dan program perangkat daerah; dan
6. Teridentifikasinya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, dengan penjelasan secara umum sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat rumusan latar belakang penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya RPJMD Tahun 2025-2029, identifikasi dasar hukum yang relevan, hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya dan uraian maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029.

Bab II Gambaran Umum Daerah

Dalam Bab ini memuat:

1. Kondisi daerah kabupaten yang disajikan dalam 4 (empat) aspek yaitu: 1). Aspek Geografi dan Demografi; 2). Aspek Kesejahteraan Masyarakat; 3). Aspek Daya Saing; dan 4). Aspek Pelayanan Umum. Kondisi daerah disajikan dengan dukungan data dan informasi pembangunan daerah selama beberapa tahun ke belakang.
2. Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2026-2030 yang disusun berdasarkan kinerja keuangan 5 tahun sebelumnya.

3. Permasalahan dan Isu Strategis yang disajikan secara ringkas dengan mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dalam dokumen KLHS, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi.

Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat rumusan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih serta menguraikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan, disertai target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan pembangunan, Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menguraikan Rencana Program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan daerah dimulai tahun 2025 hingga tahun 2030 yang secara eksplisit ditegaskan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034. Program tersebut menjadi upaya dalam mencapai target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.

Bab V Penutup

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

TABALONG SMART

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Umum

Hasil Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Periode sebelumnya (2019-2024)

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 memberikan gambaran capaian pembangunan selama 5 (lima) tahun.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong periode berikutnya :

1. Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melakukan evaluasi hasil RPJMD tidak hanya 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJMD, namun juga pertahun anggaran. Hal ini bertujuan memberikan gambaran capaian pembangunan jangka pendek pertahun sehingga hasil evaluasi dapat menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD.
2. Evaluasi hasil RPJMD selama 5 (lima) tahun menjadi input bagi capaian pembangunan pertahunnya. Dengan demikian terdapat keselarasan informasi pembangunan antara jangka menengah (RPJMD) dengan jangka pendek (RKPD).
3. Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melakukan percepatan pencapaian target pada misi ke 3 yaitu Mewujudkan Kemandirian Daerah, dimana sektor ini menjadi pedoman aspek daya saing daerah yang berarti menunjukkan seberapa mampu daerah Kabupaten Tabalong dalam bersaing dengan daerah Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia dalam pencapaian pembangunan daerahnya. Ini juga berarti kinerja pimpinan daerah menjadi terlihat lebih jelas melalui indeks daya saing daerah yang dicapai pada akhir masa periode jabatannya.

4. Selain kemandirian daerah, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu memberikan prioritas bagi penyediaan sarana dan prasarana sehingga dapat mendorong perekonomian dan pengembangan daerah, sekaligus pemenuhan pelayanan dasar.

5. Pemerintah Kabupaten Tabalong diharapkan mampu Menyusun RPJMD periode berikutnya dengan memperhatikan beberapa hal untuk substansi meliputi :

a. Memberi prioritas dan pemilihan strategi serta kebijakan yang tepat bagi penanganan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan;

b. Berdasarkan capaian indikator kinerja RPJMD Tahun 2019-2024, pembangunan periode berikutnya perlu mengedepankan pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, pengurangan ketimpangan pendapatan, pengurangan pengangguran, peningkatan layanan infrastruktur jalan dan air minum, peningkatan kualitas air untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang lestari, dan peningkatan tata kelola dan kinerja pemerintahan daerah;

c. Pembangunan periode berikutnya perlu memprioritaskan beberapa poin sebagai berikut :

1) Mendorong berkembangnya sektor-sektor non pertambangan dan penggalian, sehingga bertahap perekonomian Kabupaten Tabalong dapat bertransformasi dan tidak hanya bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian.

2) Lebih banyak kebijakan pemerintah daerah yang melibatkan dunia usaha dan masyarakat supaya secara bertahap terjadi pengembangan potensi daerah secara maksimal.

3) Memberi prioritas bagi upaya penguatan sosial ekonomi masyarakat ke seluruh wilayah Kabupaten Tabalong.

4) Memberi prioritas bagi penyediaan dan kualitas layanan sarana dan prasarana wilayah.

d. Bersama dengan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), mengingat posisi strategis Kabupaten Tabalong terhadap IKN.

6. Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong periode berikutnya dilakukan dengan:

a. Berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tabalong.
b. Memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Tabalong.
c. Selaras dan bersinergi dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan periode berikutnya, sehingga dapat saling mendukung.
d. Memerhatikan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025- 2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045.

2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah administrasi Kabupaten Tabalong berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong adalah ± 3.946 Km² atau ± 394.600 Ha. Namun setelah dilakukan penataan batas dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan serta terakhir dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Batas Daerah dan Batas Indikatif Menurut Peta Rupa Bumi Indonesia antara Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah, luas wilayah Kabupaten Tabalong berubah menjadi ± 3.553,421 Km² atau ± 355.342,1 Ha. Adapun luasan tersebut berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Kabupaten Tabalong

Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Tabalong dengan Kabupaten Balangan Provinisi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan serta Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Tahun 1999. Kabupaten Tabalong terbagi atas 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 121 desa.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)	Kelurahan (buah)	Desa (buah)
1	Banua Lawas	150,86	4,25	0	15
2	Pugaan	31,87	0,90	0	7
3	Kelua	53,39	1,50	1	12
4	Muara Harus	26,78	0,75	0	7
5	Tanta	149,72	4,21	0	14
6	Tanjung	191,69	5,39	4	15
7	Murung Pudak	172,48	4,86	5	10
8	Haruai	271,97	7,65	0	13
9	Bintang Ara	1.170,19	32,93	0	9
10	Upau	183,01	5,15	0	6
11	Muara Uya	877,13	24,68	0	14
12	Jaro	274,26	7,72	0	9
	Jumlah	**3.553,36**	**100**	**10**	**121**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024

Kabupaten Tabalong dengan ibukota Tanjung, secara geografis terletak antara $1,18^0$-$2,25^0$ Lintang Selatan dan $115,9^0$-$115,47^0$ Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah

Sebelah Timur : Kabupaten Paser Provinsi Kalimatan Timur dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan

Selatan

Sebelah Selatan : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

Sebelah Barat : Kabupaten Barito Timur dan sebagian Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tabalong

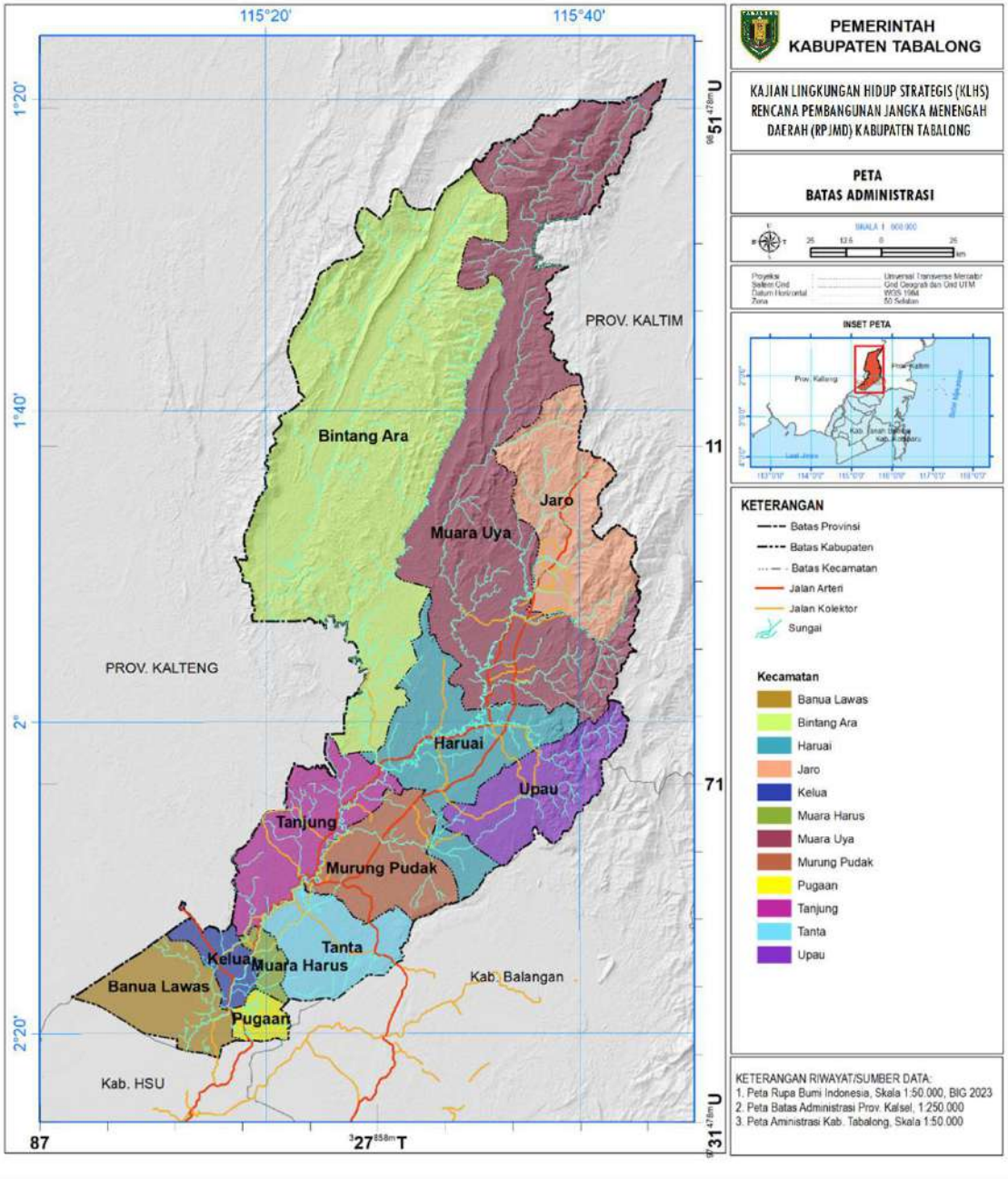

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

B. Topografi

Ditinjau dari Topografinya, bagian utara Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari pegunungan Meratus yang terbentang dari arah utara ke selatan bagian timur. Pada bagian tengah merupakan dataran dan bergelombang, sedangkan wilayah bagian selatan merupakan batas timur cekungan Barito didominasi oleh dataran rendah dan rawa.

Gambar 2.2
Peta Topografi Hidrologi Kabupaten Tabalong

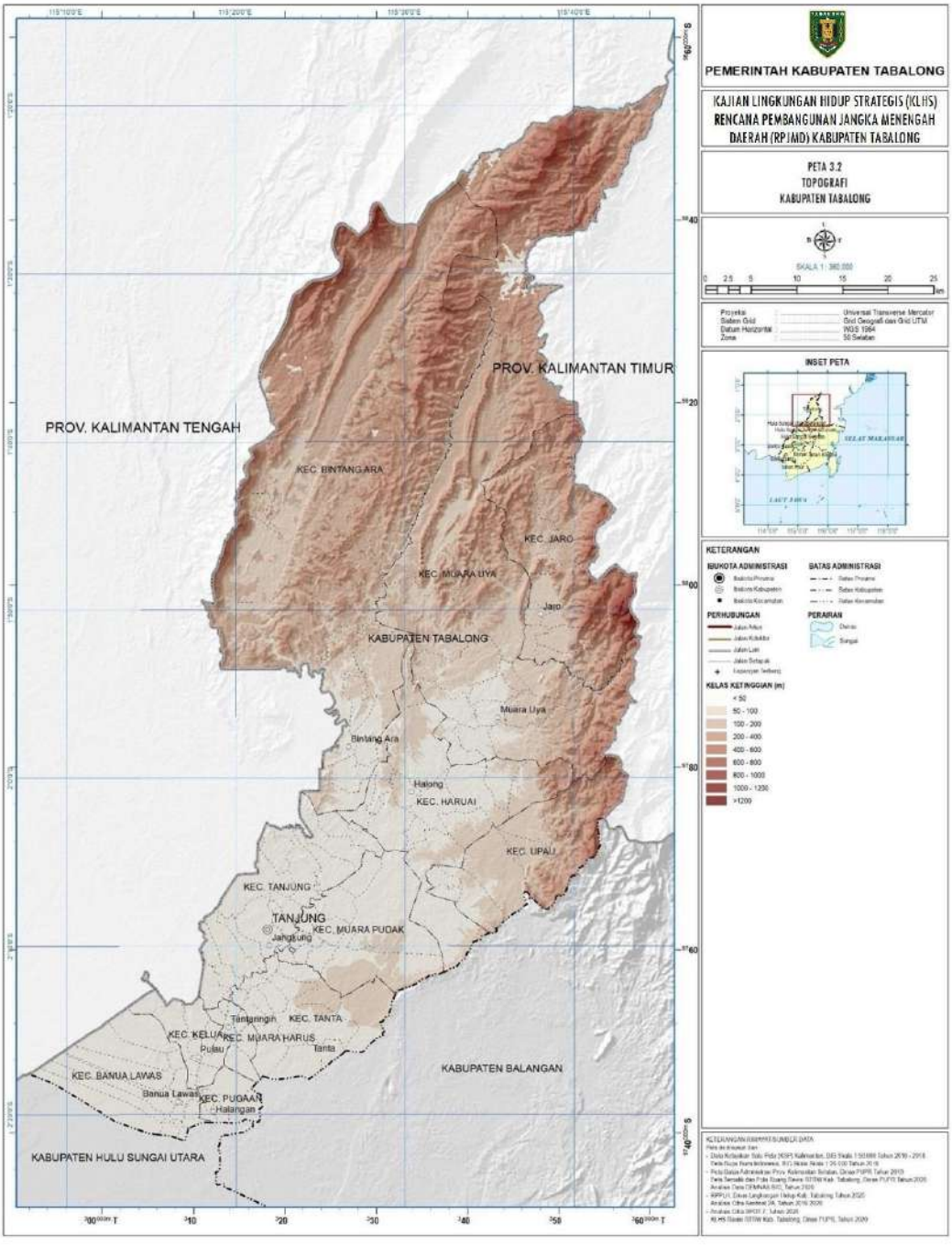

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

C. Jenis Tanah

Tanah di Kabupaten Tabalong terdiri dari lima jenis yaitu Aluvial, Podsolik, Potsol, Organosol, Glei Humus dan Komplek Podsolik Merah Kuning, Laterit, Litosol dan Latosol. Jenis yang terbanyak adalah adalah tanah Podsolik sebanyak 41,99% atau 151.168 Ha yang terdapat di sembilan kecamatan, kecuali Kecamatan Banua Lawas dan Kelua. Tanah Komplek Merah Kuning, Laterit Litosol dan Latosol seluas 106.766 Ha (29,66%) hanya terdapat di Kecamatan Muara Uya dan Haruai.

Kemiringan lerengnya didominasi oleh lahan dengan kemiringan rendah (0-5%), sisanya memiliki kemiringan sedang (15- 40%) dan lebih dari 40%. Kedalaman efektif tanah rata-rata lebih dari 90 cm (97,8%), dan sebagian besar tanahnya bertekstur halus. Lebih jelas jenis tanah di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Lampiran 3 (Sebaran Jenis Tanah di Kabupaten Tabalong).

Berdasarkan jenis tanahnya Kabupaten Tabalong sesuai untuk budidaya tanaman pangan lahan kering, perkebunan dan kehutanan berbasis agroforestri karena sebesar ± 43,17% dari luas wilayahnya tanah berjenis podsolik merah kuning. Jenis tanah podsolik merah kuning ini memiliki sifat yang sangat rentan yaitu mudah tercuci, peka erosi, permeabilitas rendah dan agregat kurang stabil. Jenis tanah ini tingkat kesuburannya sangat tergantung pada jenis vegetasi yang menjadi penutupnya, dan penggunaan jenis tanah ini harus dengan sistem siklus unsur hara tertutup. Pola yang sesuai untuk dikembangkan adalah agroforestri yaitu pola pengkombinasian tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Untuk pertanian lahan basah cocok pada tanah berjenis aluvial dan organosol glei humus yang melingkupi ± 5,13% wilayah Kabupaten Tabalong.

Gambar 2.3
Peta Jenis Tanah Kabupaten Tabalong

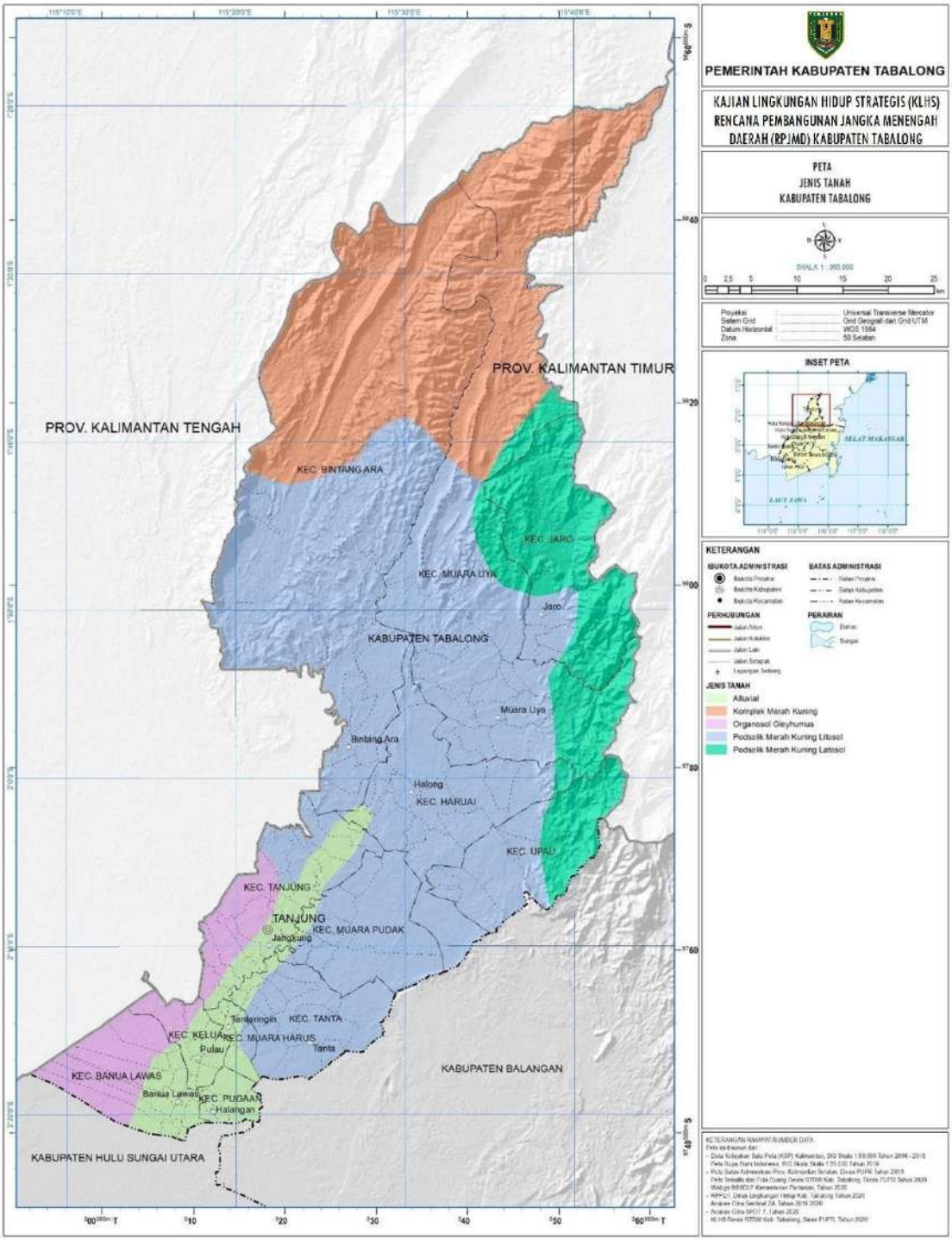

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

D. Geologi

Wilayah Kabupaten Tabalong secara geologi termasuk ke dalam zona cekungan Barito pada bagian utara dan zona pegunungan meratus pada bagian sayap sebelah barat, memanjang dari sebelah timur sampai dengan utara. Berdasarkan peta geologi Lembar Buntok, Balikpapan, Sampanahan, dan Amuntai skala 1: 250.000 yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Maka wilayah Kabupaten Tabalong tersusun oleh beberapa formasi batuan yaitu: Formasi Pitap, Olistolit Kintap, Formasi Gunung Api Haruyan, Batuan Terobosan, Formasi Tanjung, Formasi Berai, Formasi Warukin, dan Formasi Dohor. Selanjutnya berdasarkan umur Formasi Batuan, diurutkan menjadi tujuh urutan dan satu kelompok batuan terobosan.

Struktur geologi yang dijumpai pada wilayah Kabupaten Tabalong adalah struktur perlipatan yang berupa Struktur Antiklin dan Sinklin serta patahan berupa Struktur Sesar. Struktur Antiklin dan Sinklin dengan arah sumbu relatif Utara – Selatan hingga Timur laut – Barat Daya. Struktur Sesar secara relatif berarah Barat Laut– Tenggara pada bagian barat wilayah Kabupaten Tabalong, Berarah Utara – Selatan sampai dengan Timur Laut - Barat Daya pada bagian utara wilayah kabupaten Tabalong. Selain ketiga struktur tersebut perlu diperhatikan adanya Struktur Sesar Adang-Patenoster yang memanjang dari wilayah Serawak Malaysia sampai dengan Selat Makasar. Struktur ini bidang sesarnya diperkirakan berada pada bagian Utara Kabupaten Tabalong yang berbatasan dengan Kabupaten Paser. Sesar Adang – Patenoster merupakan sesar normal yang mengalami reaktivasi dan menjadi kawasan rawan gempa apabila Paternoster mengalami pergerakan.

Sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis adalah minyak bumi yang terdapat disekitar daerah Tanjung pada formasi Tanjung. Batubara pada Formasi Tanjung dan Formasi Warukin, batu gamping pada Formasi Berai, batu lempung pada Formasi Tanjung, batupasir kuarsa pada Formasi Warukin dan Formasi Dohor yang dapat diusahakan pada bidang industri (R. Haryanto dan P. Sanyoto, 1994. Peta Geologi

Lembar Amuntai).

Gambar 2.4
Peta Geologi Kabupaten Tabalong

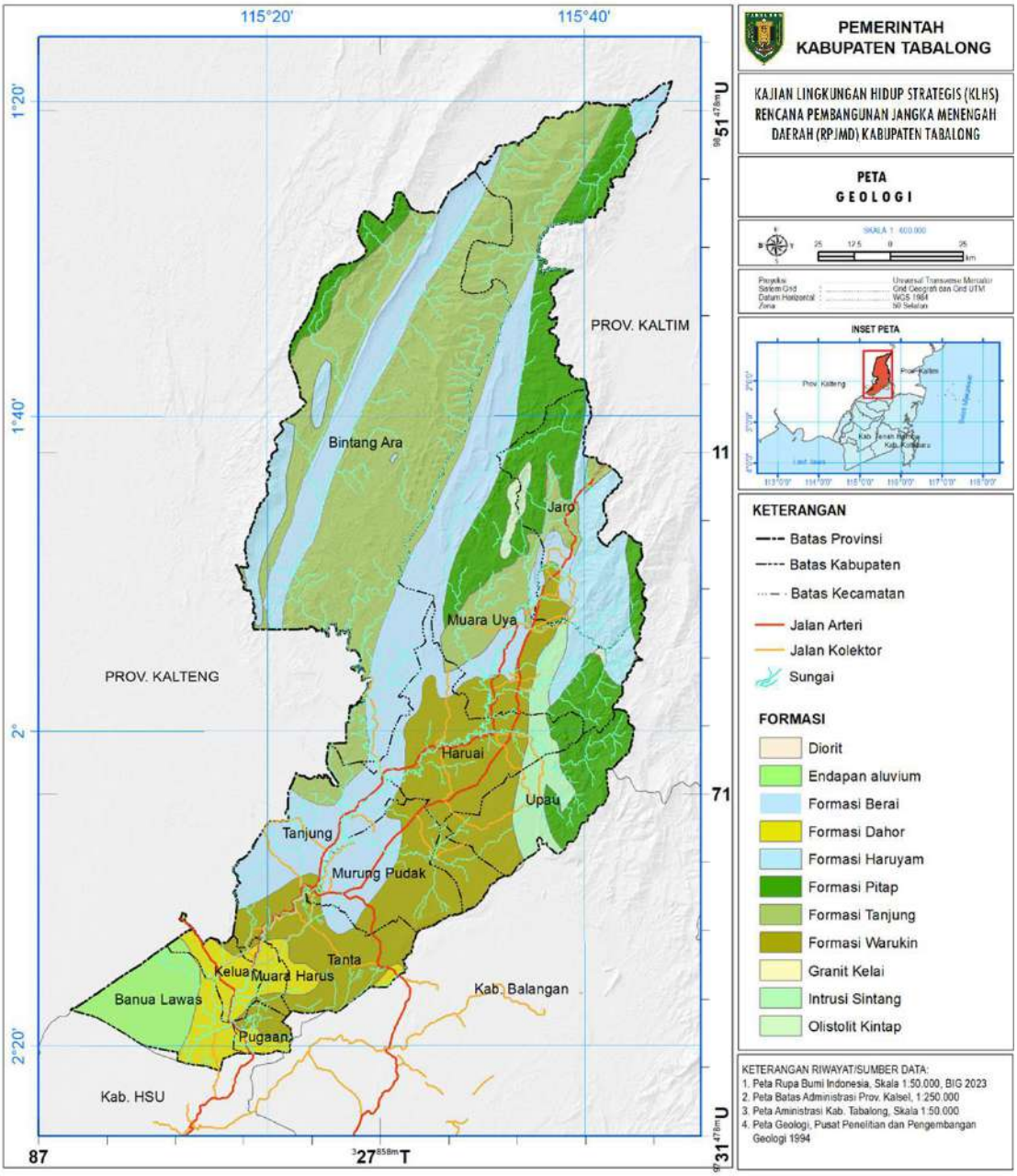

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

E. Klimatologi

Iklim di Kabupaten Tabalong beriklim panas (tropis), Kelembapan udara maksimum pada tahun 2023 berkisar antara 93% – 100% dan kelembaban udara minimum antara 34% - 59%, sementara kelembaban udara rata-rata setiap bulan adalah 59,1% – 83%.

Temperatur udara di suatu tempat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dari permukaan laut dan jarak dari pantai. Temperatur maksimum di Kabupaten Tabalong 34,10° C sampai dengan 37,40° C, temperatur udara minimum berkisar antara 19,80° sampai 23,00° C dan temperatur udara rata-rata 27,40°C sampai 31,30° C.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Oleh karena itu curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Curah hujan maksimum pada tahun 2024 terjadi pada bulan Februari yaitu 404,60 mm sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan September yaitu 8,30 mm. Jumlah seluruh curah hujan selama tahun 2024 adalah 2.170 mm dan jumlah hari hujan adalah 181 hari.

Tabel 2.2
Curah hujan dan hari hujan
di Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Bulan	Jumlah Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
Januari	237,30	24
Februari	404,60	21
Maret	328,50	20
April	96,60	17
Mei	121,80	14
Juni	96,80	15
Juli	117,60	11
Agustus	25,20	4
September	8,30	6
Oktober	71,50	12
November	295,80	17
Desember	366,00	20

Sumber: Kabupaten Tabalong dalam Angka, BPS 2025

Gambar 2.5
Peta Curah Hujan Kabupaten Tabalong

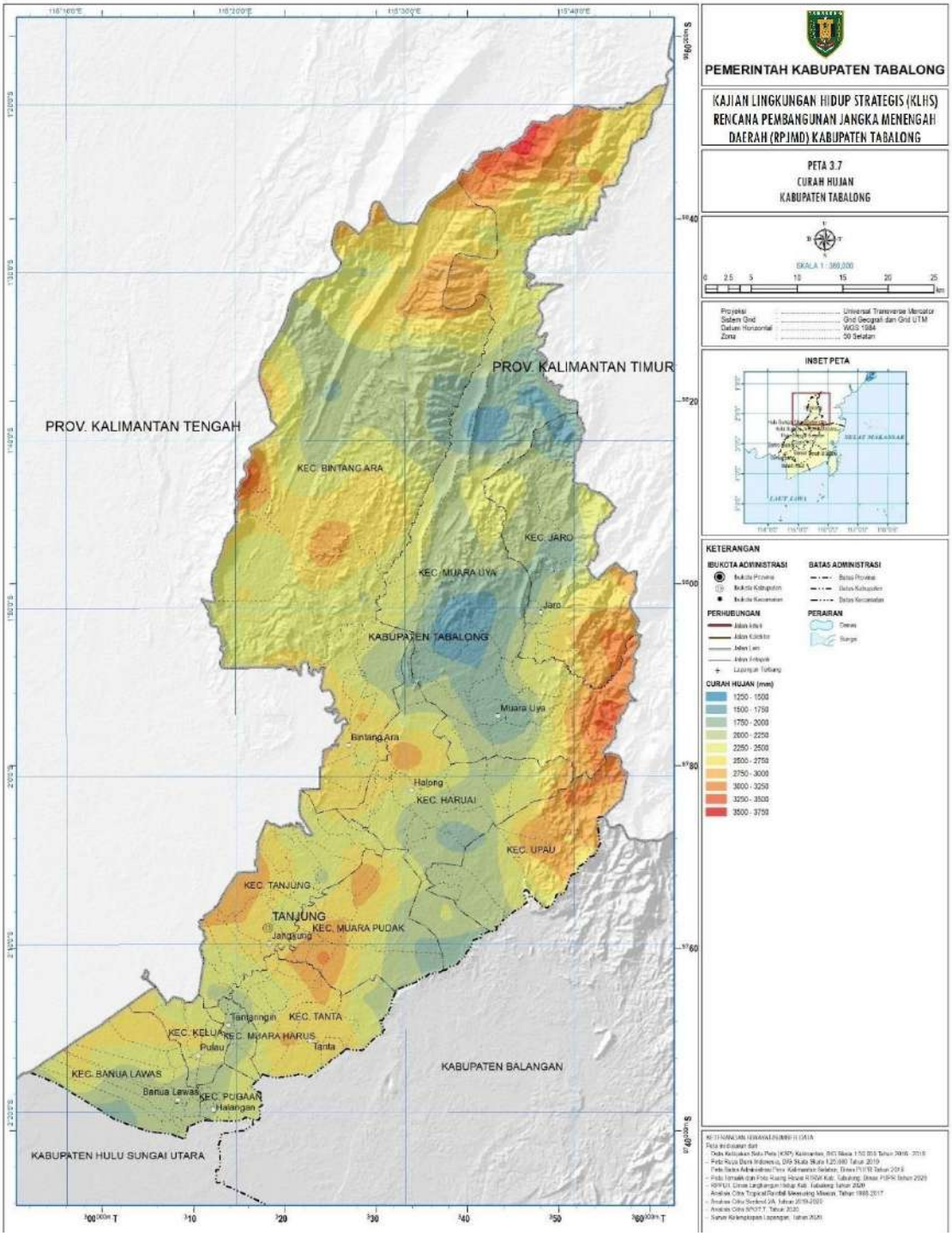

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

Dari hasil pantauan stasiun meteorologi, selama tahun 2023 kelembapan udara rata – rata perbulan berkisar antara 59,1% sampai 83,0% dengan kelembapan maksimum tertinggi sebesar 100% terjadi di

bulan Februari, Maret, November dan Desember. Sedangkan kelembapan minimum terendah sebesar 34% terjadi di bulan September. Temperatur udara rata – rata per bulan selama tahun 2023 berkisar antara 27,4° C hingga 31,3° C, dengan suhu udara maksimum tertinggi pada bulan Oktober sebesar 37,4° C dan minimum terendah sebesar 19,8° C di bulan Agustus.

F. Hidrologi

Daerah Kabupaten Tabalong sebagian besar dilalui oleh sungai, sekitar 89% desa-desa yang ada di Kabupaten Tabalong dilalui aliran sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Tabalong sepanjang ± 75 Km dengan lebar maksimum 60 meter. Sungai ini merupakan gabungan dari Sungai Tabalong Kiwa dan Sungai Tabalong Kanan yang berhulu di Pegunungan Meratus. Debit air rata-rata sebesar 124,5 m^3/detik. Curah hujan yang tinggi seringkali menyebabkan *over capacity* di sungai Tabalong dan kejadian banjir pada daerah rendah seperti Banua Lawas, Kelua, Pugaan, Muara Harus dan Tanta.

Gambar 2.6
Pola Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong

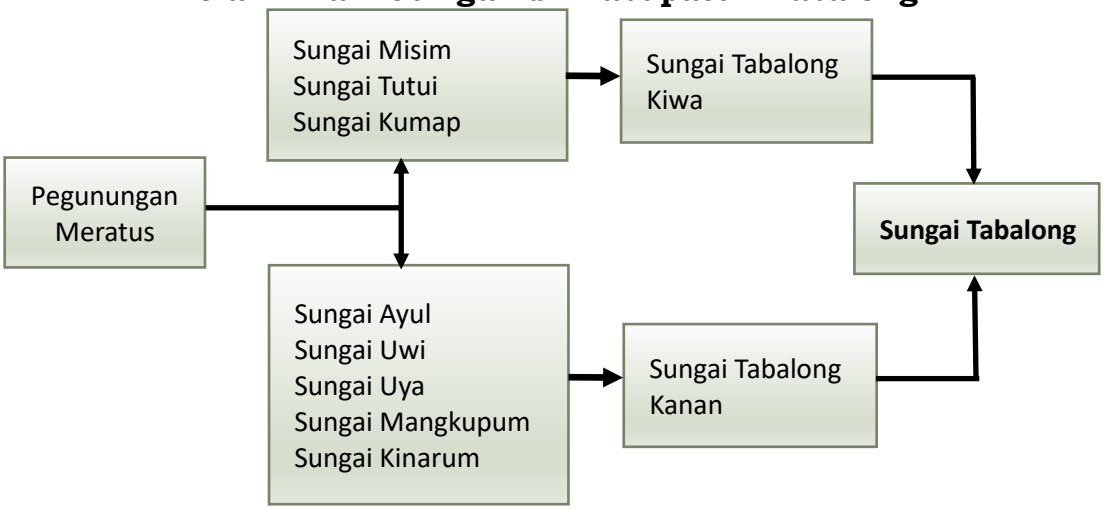

Berdasarkan pola aliran sungai di Kabupaten Tabalong terdapat dua DAS utama yakni DAS Barito mencakup 94,54% dan DAS Kendilo hanya mencakup 5,46%. DAS Barito terbagi atas dua sub DAS yakni sub DAS Barito dan sub Nagara. Sub DAS Barito terbagi atas 2 sub-sub DAS, sedangkan sub DAS Nagara terbagi 4 sub-sub DAS.

Tabel 2.3
Sebaran DAS berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Nama Sub DAS						
		Sub DAS Balangan	Sub DAS Danau Panggang	Sub DAS Kendilo	Sub DAS Luang	Sub DAS Mea	Sub DAS Tab. Kanan	Sub DAS Tab. Kiwa
1	Banua Lawas	-	15.084,68	-	-	-	-	-
2	Bintang Ara	-	-	689,50	242,43	211,44	318,98	107.688,76
3	Haruai	-	-	-	-	-	24.736,50	2.460,58
4	Jaro	-	-	-	-	-	27.497,85	-
5	Kelua	-	4.218,93	-	-	-	1.117,10	-
6	Muara Harus	-	409,68	-	-	-	2.271,02	-
7	Muara Uya	-	-	18.279,36	6.689,35	-	54.409,55	8.076,31
8	Murung Pudak	-	-	-	-	-	17.239,23	8,94
9	Pugaan	-	443,28	-	-	-	2.744,83	-
10	Tanjung	-	4.118,11	-	-	-	1.917,50	13.121,63
11	Tanta	-	1,03	-	-	-	14.975,83	0,47
12	Upau	347,30	-	-	-	-	1.7943,11	-
Tabalong		347,30	24.275,71	18.968,87	6.931,78	211,44	165.171,50	131.356,69
Persentase		0,10	6,99	5,46	2,00	0,06	47,56	37,83

Sumber: Hasil analisis peta tematik Revisi RTRW Kabupaten Tabalong, tahun 2020

Berdasarkan tabel dan peta tersebut, sub-sub DAS Tabalong Kanan adalah yang terluas yakni 47,56%, selanjutnya sub-sub DAS Tabalong Kiwa seluas 37,83% dan yang terkecil adalah sub-sub DAS Mea hanya 0,06%. Sub-sub DAS Tabalong Kanan tersebar di 11 kecamatan, hanya Kecamatan Banua Lawas yang tidak termasuk didalamnya. Sub-sub DAS Kiwa hanya tersebar di 6 kecamatan.

Sungai Tabalong mempunyai beberapa anak sungai antara lain Sungai Tabalong Kiwa, Tabalong Kanan, Sungai Jaing, Sungai Uya, Sungai Ayul, Sungai Kumap, Sungai Tutui dan Sungai Misim. Sungai-sungai lain yang terdapat di Kabupaten Tabalong antara lain sungai Anyar, sungai Jaing, dan sungai Kinarum.

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tabalong

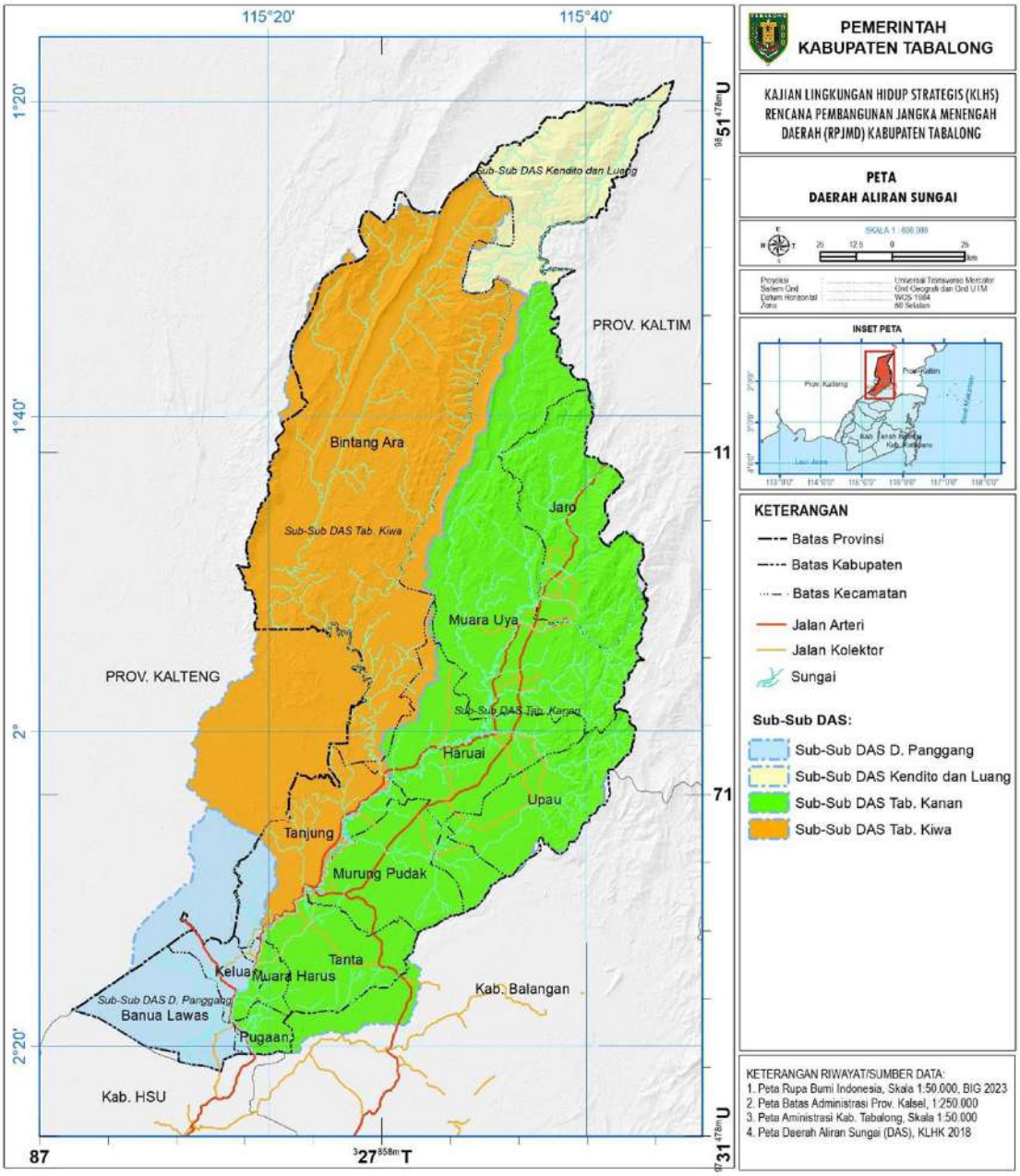

Sumber: KLHS RPJPD 2025-2045, 2024

G. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong sebagian besar masih berupa hutan sebesar 65,62% dari luas wilayah, lahan perkebunan sebesar 21,47%, lahan pertanian sebesar 6,19%, permukiman 5,49%, dan yang lainnya berupa lahan perkantoran,

perikanan, perairan dan lain-lain sebesar 1,22%. Penyebaran kawasan hutan terutama terdapat di bagian utara wilayah Kabupaten Tabalong yang merupakan daerah pegunungan dan perbukitan.

Arah perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong masih tergantung pada sektor usaha pertanian dan usaha pertambangan dan penggalian. Hal itu dapat dilihat dari peranan sektor usaha tersebut dalam menyumbang pendapatan daerah yang sangat besar dan berkembang secara signifikan dari waktu ke waktu. Sedangkan arah perkembangan penggunaan lahan untuk pemukiman/pedesaan mengarah pada pola aliran sungai, hal tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah pedesaan yang dilalui oleh sungai dan banyaknya kegiatan dan pegerakan barang dan orang yang terjadi diatas sungai. Sungai telah menjadi budaya bagi masyarakat setempat. Untuk itu sumber daya air ini harus di jaga termasuk volume air agar tetap dapat bertahan sepanjang masa dan tidak merupakan sebagai sumber bencana pada musim hujan dan hambatan pada musim kemarau.

Penggunaan lahan di Kabupaten Tabalong berdasarkan luas terbanyak yaitu berupa Hutan Lebat, Hutan Sejenis, Kebun Campuran, Hutan Belukar, dan Tegalan/Ladang. Adapun komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.4
Luas Wilayah Berdasarkan Jenis Penggunaan Tanah Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022 (ha)

No.	Kecamatan	Penggunaan Tanah											Jumlah	%
		Hutan Belukar	Hutan Lebat	Hutan Sejenis	Kebun Campuran	Perkebunan Besar	Pertam-bangan	Perumahan	Sawah Pasang Surut	Semak	Sungai/ Danau/ Waduk/ Telaga	Tegalan/ Ladang		
1	Banua Lawas	10.914,97	-	-	94,32	66,78	135,04	1.084,63	433,45	1.165,75	72,35	460,43	16.550,78	4,58
2	Pugaan	-	-	-	659,81	-	-	160,28	1.976,93	678,38	95,96	–	3.571,36	0,99
3	Kelua	601,88	-	310,141	123,84	-	22,89	404,99	2.072,79	216,33	98,03	43,59	4.894,48	1,35
4	Muara Harus				1.245,24	-	-	51,54	1.107,98	350,23	24,84	115,5	2.895,33	0,8
5	Tanta				9.356,03	-	947,215	520,44	1.224,56	430,12	28,46	577,9	13.084,71	3,62
6	Tanjung	3.768,54	–	2.044,73	10.690,59	2.805,84	-	750,78	529,48	1.642,32	146,78	572,43	22.906,5	6,33
7	Murung Pudak	0,54	–	3.701,54	6.211,23	4.785,23	1 531,2	1.409,43	195,24	275,61	58,87	2.308,59	20.477,48	5,66
8	Haruai	5.116,96	9,57	11.916,53	4.121,76	2.691,55	135,04	1.084,63	433,45	1.165,75	156,37	5.114,17	31.945,78	8,83
9	Bintang Ara	2.065,16	78.423,16	22.536,96	837,823	1,07	-	120,74	–	9.622,53	319,3	136,81	114.064,19	31,55
10	Upau	6.916,79	4.060,89	2.518,42	525,77	-	-	160,13	74,29	368,81	-	840,13	15.465,24	4,28
11	Muara Uya	3.972,51	56.851,69	12.511,28	11.381,55	-	-	1.387,86	81,37	645,63	498,65	3.200,69	90.531,25	25,04
12	Jaro	297,19	12.435,88	2.155,45	1.564,21	-	-	58,41	786,37	3.973,15	53,01	3.852,87	25.176,55	6,96
	Jumlah	**33.654,53**	**151.781,18**	**57.695,05**	**47.812,18**	**10.350,47**	**2 636,35**	**6 418,09**	**12.421,51**	**20.017,32**	**1.553,26**	**17.223,13**	**361.563,07**	**100**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2023

2.1.2.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042, potensi pengembangan wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Kawasan Strategis Kabupaten Tabalong

No	Kawasan	Lokasi	Arah Pengembangan
1.	Kawasan Perkotaan Tanjung	Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak dan Kecamatan Tanta	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
2.	Kawasan Peruntukkan Industri Seradang	Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau	
3	Kawasan minyak dan gas bumi	Kecamatan Tanjung, Kecamatan Murung Pudak, dan Kecamatan Tanta	Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
4	Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong	Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya	Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
5.	Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kanan Bagian Hulu Sungai Tabalong	Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya	

Sumber: RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042

2.1.2.3. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian ini mengukur kemampuan suatu ekosistem untuk mendukung satu/rangkaian aktivitas dan ambang batas kemampuannya berdasarkan kondisi yang ada. Daya Dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat energi, danatau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya

dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan: Kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan ruang dan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

A. Analisis Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan pangan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pangan pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung pangan adalah untuk mengetahui apakah daya dukung pangan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung pangan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan pangan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut, sedangkan kondisi daya dukung surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Berdasarkan data yang tersedia untuk produktivitas padi setiap kecamatan hanya tersedia dalam Tabalong dalam Angka 2020 (BPS) dan *landuse* tahun 2019, menunjukkan bahwa terdapat 42.059 ha lahan sawah di wilayah Kabupaten Tabalong. Produktivitas padi di wilayah ini berkisar 2,81 – 5,46 ton/ha dengan produksi total sebesar 180.836 ton gabah untuk padi sawah dan padi ladang dengan asumsi konversi gabah kering ke beras adalah 62,74%, maka total produksi beras di Kabupaten Tabalong adalah 113.111 ton.

Dengan jumlah penduduk 264.694 jiwa maka angka konsumsinya adalah sebesar 32.566 ton atau Daya Dukung Pangan (DDL) sebesar 3,14 atau surplus sebesar 69.545 ton atau masih mampu

bertahan selama 2,14 tahun, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.6
Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tabalong setiap Kecamatan
Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (62,74%)	Jumlah Penduduk	Angka Konsumsi Beras (kg/ per kapita /per tahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Banua Lawas	37.804	23.718	21.220	124	2.618	9,06	21.100
Bintang Ara	6.803	4.268	7.819	124	1.175	3,63	3.093
Haruai	11.618	7.289	25.818	124	3.036	2,40	4.253
Jaro	19.523	12.249	7.209	124	1.951	6,28	10.298
Kelua	17.043	11.693	24.013	124	3.187	3,36	7.506
Muara Harus	6.695	4.201	37.577	124	891	4,71	3.309
Muara Uya	17.750	11.136	58.451	124	3.059	3,64	8.077
Murung Pudak	2.596	1.628	24.567	124	7.157	0,23	-5.529
Pugaan	14.661	9.198	9.638	124	969	9,50	8.230
Tanjung	8.927	5.601	7.776	124	4.634	1,21	967
Tanta	12.326	7.734	24.771	124	2928	2,64	4.805
Upau	7.007	4.396	15.835	124	961	4,57	3.435
TABALONG	162.752	102.111	264.694	124	32.566	3,14	69.545

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Untuk akhir tahun perencanaan RPJMD (tahun 2029), berdasarkan tren data beberapa tahun sebelumnya, dimana produksi pangan mengalami tren penurunan. Oleh karena itu, jika diasumsikan bahwa produksi pangan hanya 90% dari tahun dasar 2023, maka produksi padi hanya tinggal 146.477 ton pada tahun 2029. Jika prediksi jumlah penduduk tahun 2029 bertambah menjadi 285.106, maka konsumsi beras menjadi 35.353 ton atau DDL menjadi 2,60 atau masih surplus 56.547 ton atau masih mampu bertahan selama 1,60 tahun, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.7
Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tabalong setiap Kecamatan
Tahun 2029

Kecamatan	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (62,74%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Angka Konsumsi Beras (kg/per kapita /per tahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Banua Lawas	34.023	21.346	22.633	124	2.807	7,61	18.540
Bintang Ara	6.123	3.841	8.420	124	1.044	3,68	2.797
Haruai	10.456	6.560	27.154	124	3.367	1,95	3.193
Jaro	17.571	11.024	7.812	124	969	11,38	10.055
Kelua	15.339	9.624	25.974	124	3.221	2,99	6.403
Muara Harus	6.026	3.780	39.564	124	4.943	0,76	-1.163
Muara Uya	15.975	10.023	65.688	124	8.145	1,23	1.877
Murung Pudak	2.336	1.466	26.174	124	3.246	0,45	-1.780
Pugaan	13.195	8.278	10.085	124	1.251	6,62	7.028
Tanjung	8.034	5.041	8.345	124	1.035	4,87	4.006
Tanta	11.094	6.960	26.144	124	3.242	2,15	3.718
Upau	6.306	3.956	16.813	124	2.085	1,90	1.871
TABALONG	**146.477**	**91.900**	**285.106**	124	**35.353**	**2,60**	**56.547**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Untuk akhir tahun SDGs (tahun 2030) menggunakan asumsi dari rencana peruntukan ruang sebesar 90%. Dalam perencanaan Perubahan pola ruang RTRW, peruntukan lahan pertanian tanaman pangan diasumsi bahwa produktivitas tetap setiap kecamatan dan jumlah penduduk terus naik menjadi 289.294 jiwa pada tahun 2030, maka DDL pangan akan terus menurun. Pada tahun 2030 akhir SDGs, maka DDL pangan menjadi 2,50 atau surplus beras hanya sebesar 53.985 ton atau hanya mampu mencukupi selama 1,5 tahun, sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.8
Daya Dukung Pangan di Kabupaten Tabalong setiap Kecamatan Tahun 2030

Kecamatan	Jumlah Produksi Padi (ton)	Konversi Gabah Kering Giling/GKG ke Beras (62,74%)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Angka Konsumsi Beras (kg/per kapita /per tahun)	Jumlah Beras Di Konsumsi (ton)	DDL (Daya Dukung Lahan untuk Pangan)	Surplus Beras (ton)
Banua Lawas	33.267	20.872	22.942	124	2.845	7,34	18.207
Bintang Ara	5.978	3.756	8.543	124	1.059	3,55	2.697
Haruai	10.224	6.415	27.435	124	3.402	1,89	3.013
Jaro	17.181	10.779	7.942	124	985	10,95	9.794
Kelua	14.998	9.410	26.447	124	3.279	2,87	6.130
Muara Harus	5.892	2.696	40.367	124	5.006	0,74	-1.309
Muara Uya	15.620	9.800	66.984	124	8.306	1,18	1.494
Murung Pudak	2.284	1.433	26.484	124	3.284	0,44	-1.851
Pugaan	12.902	8.095	10.201	124	1.265	6,40	6.830
Tanjung	7.855	4.928	8.474	124	1.051	4,69	3.878
Tanta	10.847	6.805	26.434	124	3.278	2,08	3.527
Upau	6.166	3.868	17.041	124	2.113	1,83	1.1755
TABALONG	143.222	89.858	289.294	124	35.872	2,50	53.985

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Data tersebut di atas menunjukkan jumlah produksi dan konsumsi beras di berbagai kecamatan di Kabupaten Tabalong untuk tahun 2023 dan proyeksi tahun 2029, serta menghitung surplus beras (selisih antara produksi dan konsumsi). Secara umum, terlihat bahwa total produksi beras mengalami penurunan dari 102.110,86 ton pada tahun 2023 menjadi 91.899,77 ton pada tahun 2029. Sebaliknya, konsumsi beras meningkat dari 32.566,24 ton menjadi 35.353,14 ton. Hal ini menyebabkan total surplus beras menurun dari 69.544,61 ton menjadi 56.546,63 ton.

Beberapa kecamatan seperti Banua Lawas, Kelua, dan Pugaan tetap menunjukkan surplus yang besar meskipun produksi mereka sedikit menurun. Di sisi lain, kecamatan Muara Harus dan Murung Pudak mengalami defisit beras pada tahun 2029, yang berarti konsumsi mereka melebihi produksi. Contoh ekstrim adalah Murung Pudak, yang dari defisit sebesar -5.528,92 ton pada 2023 hanya membaik sedikit menjadi -1.779,94 ton pada 2029, menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada pasokan beras dari luar wilayah.

Secara keseluruhan, meskipun Tabalong masih memiliki surplus beras secara total hingga tahun 2029, tren penurunan produksi dan peningkatan konsumsi menunjukkan pentingnya strategi untuk mempertahankan ketahanan pangan, seperti peningkatan produktivitas pertanian atau diversifikasi sumber pangan. Perencanaan logistik dan distribusi juga menjadi penting untuk mengatasi ketimpangan antar kecamatan dalam hal surplus dan defisit beras.

Tabel 2.9
Perubahan Status Beras di Kabupaten Tabalong setiap Kecamatan Akibat Perubahan Pola Ruang

Kecamatan	Surplus Beras (ton)		Kecamatan	Persentase Penurunan/ Kenaikan (%)	Keterangan
	Tahun 2023	Tahun 2029			
Banua Lawas	21.100	18.540	-2.560	-13,81	Menurun
Bintang Ara	3.093	2.797	-296	-10,56	Menurun
Haruai	4.253	3.193	-1.060	-33,19	Menurun
Jaro	10.298	10.055	-243	-2,42	Menurun
Kelua	7.506	6.403	-1.103	-17,23	Menurun
Muara Harus	3.309	-1.163	-4.472	384,62	Naik
Muara Uya	8.077	1.877	-6.200	-330,26	Menurun
Murung Pudak	-5.529	-1.780	3.749	-210,62	Menurun
Pugaan	8.230	7.028	-1.202	-17,1	Menurun
Tanjung	967	4.006	3.039	75,85	Naik
Tanta	4.805	3.718	-1.087	-29,23	Menurun
Upau	3.435	1.871	-1.564	-83,53	Menurun
TABALONG	**69.545**	**56.547**	**-12.998**	**-22,99**	**Menurun**

Gambar 2.8
Perubahan produksi pangan di Kabupaten Tabalong setiap kecamatan akibat perubahan pola ruang

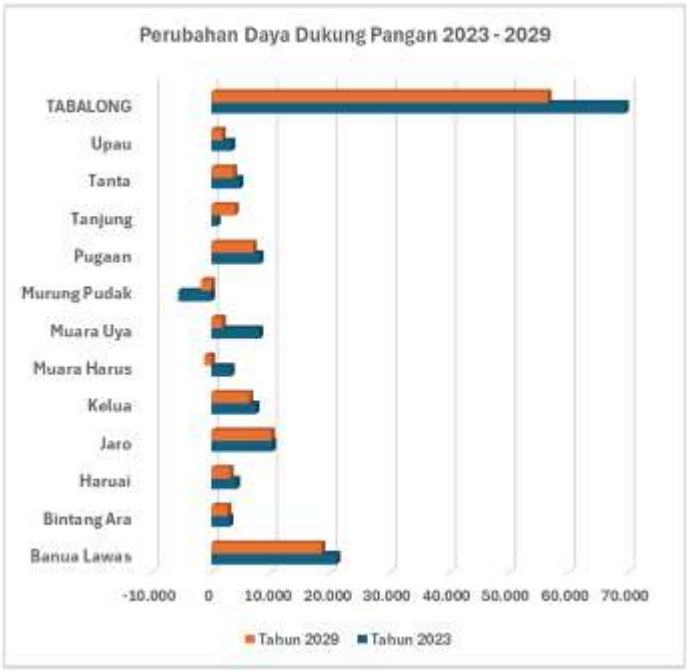

Tabel dan grafik tersebut menunjukkan perubahan surplus beras di setiap kecamatan di Kabupaten Tabalong antara tahun 2023 dan 2029. Mayoritas kecamatan mengalami penurunan surplus beras, baik dari sisi jumlah tonase maupun persentase. Penurunan paling besar secara persentase terjadi di Muara Uya (-330,26%) dan Haruai (-33,19%), sedangkan secara tonase, Muara Uya juga mengalami penurunan tertinggi sebesar 6.200 ton.

Bahkan beberapa kecamatan yang sebelumnya surplus, seperti Muara Harus, mengalami perubahan drastis menjadi defisit beras pada 2041 dengan angka -1.163 ton, menunjukkan potensi krisis pasokan pangan lokal.

Namun, tidak semua kecamatan mengalami penurunan. Dua kecamatan yaitu Tanjung dan Muara Harus menunjukkan peningkatan surplus beras. Tanjung naik sebesar 3.039 ton atau 75,85%, yang menunjukkan potensi pertumbuhan produksi atau efisiensi konsumsi. Sementara itu, meskipun Murung Pudak masih defisit, nilai defisitnya menurun secara signifikan, dari -5.529 ton menjadi -1.780 ton, yang

bisa dianggap sebagai perbaikan. Secara keseluruhan, Kabupaten Tabalong mengalami penurunan total surplus beras sebesar 12.998 ton atau 22,99%, menandakan perlunya intervensi strategis dalam sektor pertanian untuk mempertahankan ketahanan pangan jangka panjang.

Strategi untuk menjaga ketersediaan pangan di Kabupaten Tabalong perlu diarahkan pada penguatan ketahanan pangan berbasis lokal melalui peningkatan produktivitas pertanian, diversifikasi tanaman pangan, serta perlindungan terhadap lahan pertanian dari alih fungsi. Pemerintah daerah dapat mendorong penggunaan teknologi pertanian modern, penyediaan sarana dan prasarana irigasi yang memadai, serta pelatihan bagi petani agar lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, pengembangan sistem distribusi dan pasar lokal juga penting untuk menjaga stabilitas harga dan akses pangan. Upaya kolaboratif dengan berbagai pihak termasuk swasta dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pertanian serta pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif juga menjadi bagian integral dalam strategi jangka panjang untuk memastikan ketersediaan pangan yang berkelanjutan di Tabalong.

Gambar 2.9
Peta Status Pangan Kabupaten Tabalong Tahun 2023

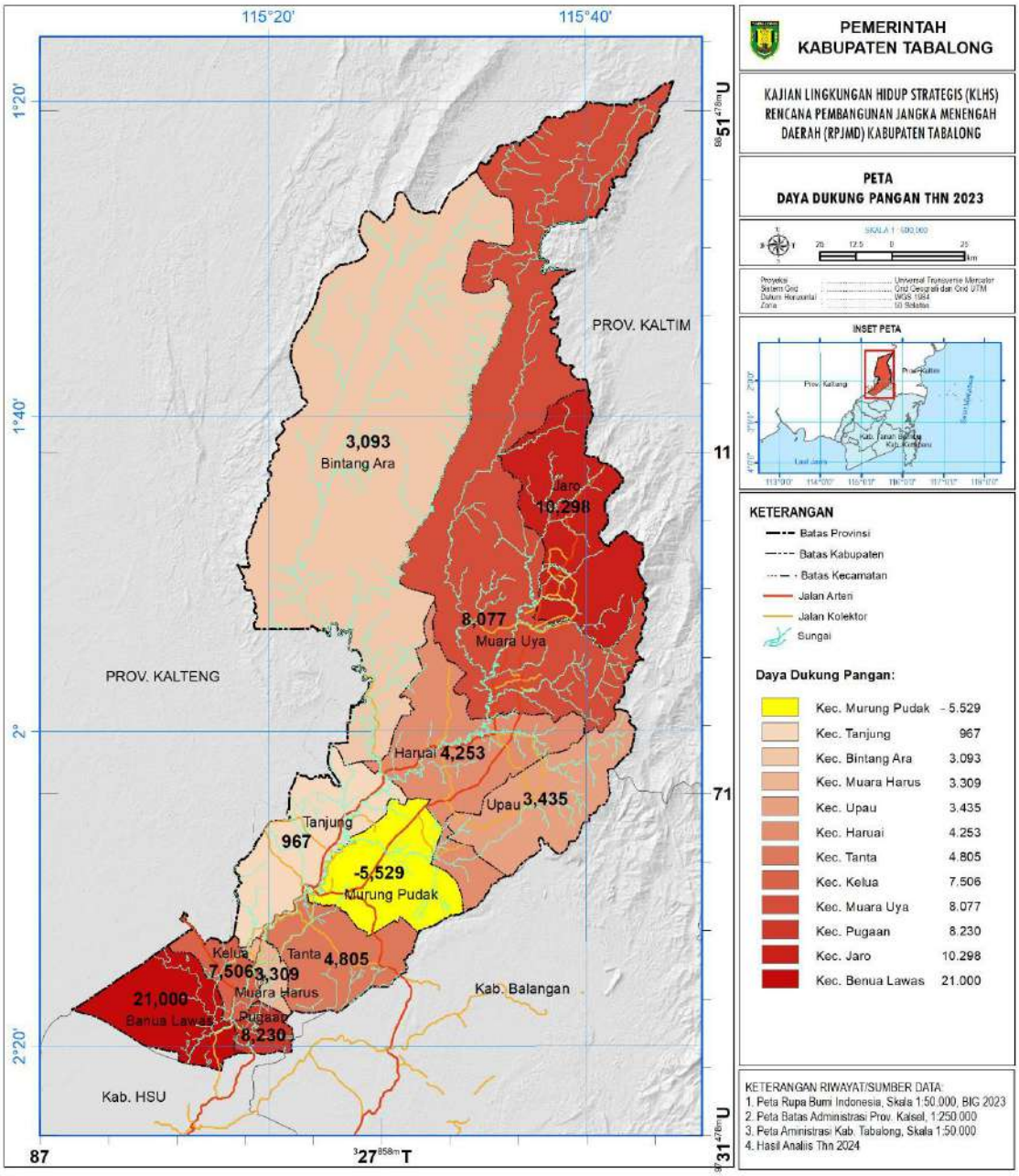

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

B. Daya Dukung Air

Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup

orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagai amanat dalam Pasal 33 Ayat (21) dan Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pada saat ini, air menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Untuk mendapat air yang baik sesuai dengan standar tertentu, saat ini menjadi barang yang mahal, karena air sudah banyak tercemar oleh bermacam-macam limbah dari berbagai hasil kegiatan manusia. Sehingga secara kualitas, sumberdaya air telah mengalami penurunan. Demikian pula secara kuantitas, yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat.

Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antar wilayah, antar sektor, dan antar generasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan rencana detail tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air *(water supply)* dan kebutuhan air (*water demand*) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air dengan mengikuti pedoman dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009. Status daya dukung air

diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA).

Bila SA > DA , daya dukung air dinyatakan surplus.

Bila SA < DA , daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr-Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), membagi menjadi:

DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK. 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Kabupaten Tabalong masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 340.606,88 ha atau 98,06% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 6.731,40 ha atau 1,94%.

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat tiga wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kecamatan Banua Lawas seluas 3.270,32 Ha (48,58% dari total wilayah melampaui), selanjutnya Kelua 963,69 Ha (14,32%) dan Tanta 848,89 Ha (12,61%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kecamatan Bintang Ara seluas 109.253,30 Ha (32,08% dari total wilayah belum melampaui), selanjutnya Muara Uya 87.544,39 Ha (25,70%), sebagaimana disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.10
Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kecamatan berdasarkan Kepmen LHK

Kecamatan	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Banua Lawas	11.836,00	3.270,32
Bintang Ara	109.253,30	-
Haruai	27.154,42	80,52
Jaro	27.274,89	256,25
Kelua	4.380,03	963,69
Muara Harus	2.330,05	354,65
Muara Uya	87.544,39	4,90
Murung Pudak	17.273,65	-
Pugaan	2.249,06	610,50
Tanjung	18.926,78	256,27
Tanta	14.151,47	848,89
Upau	18.232,84	85,41
KABUPATEN TABALONG	340.606,88	6.731,40
Persentase (%)	98,06	1,94

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Gambar 2.10
Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2023 Secara Administrasi

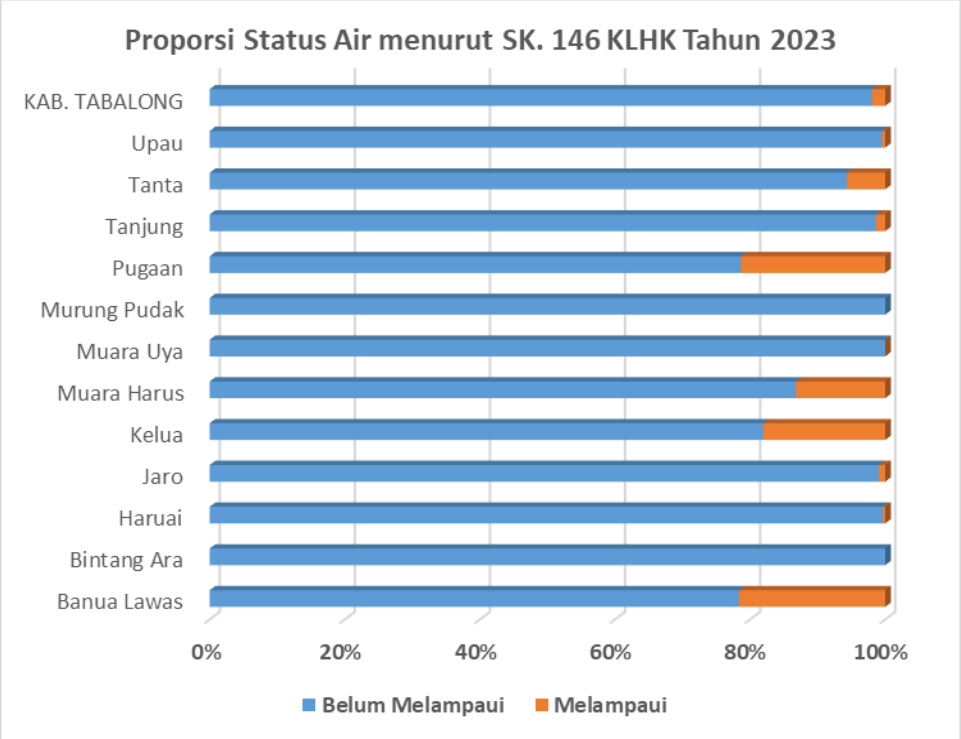

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 2.11
Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis

Kecamatan	Status Air (Ha)	
	Belum Melampaui	Melampaui
Banua Lawas	12.812,75	2.271,93
Bintang Ara	109.183,86	0,05
Haruai	24.010,55	3.239,00
Jaro	26.916,36	581,50
Kelua	4.395,87	940,16
Muara Harus	2.286,14	394,56
Muara Uya	87.218,74	282,81
Murung Pudak	15.707,98	1.559,69
Pugaan	2.516,44	671,66
Tanjung	17.311,94	1.900,40
Tanta	14.212,37	764,96
Upau	18.153,42	163,83
TABALONG	334.726,42	12.770,55
Persentase	96,32	3,68

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Gambar 2.11
Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Administrasi

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

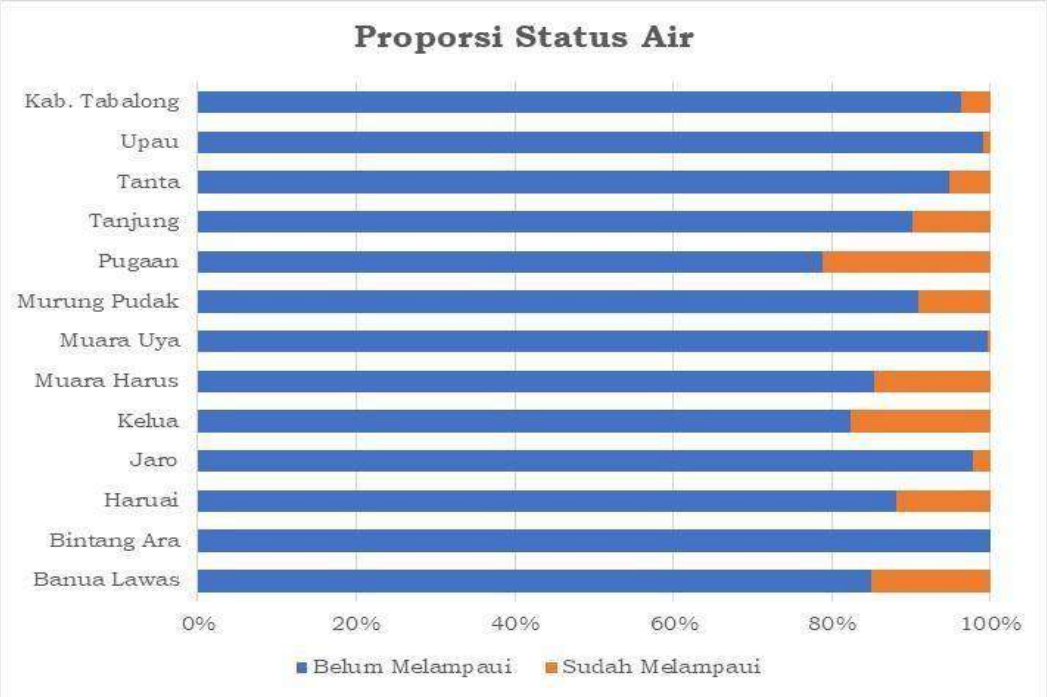

Gambar 2.12
Status Air Kepmen 146 Tahun 2023 Kabupaten Tabalong

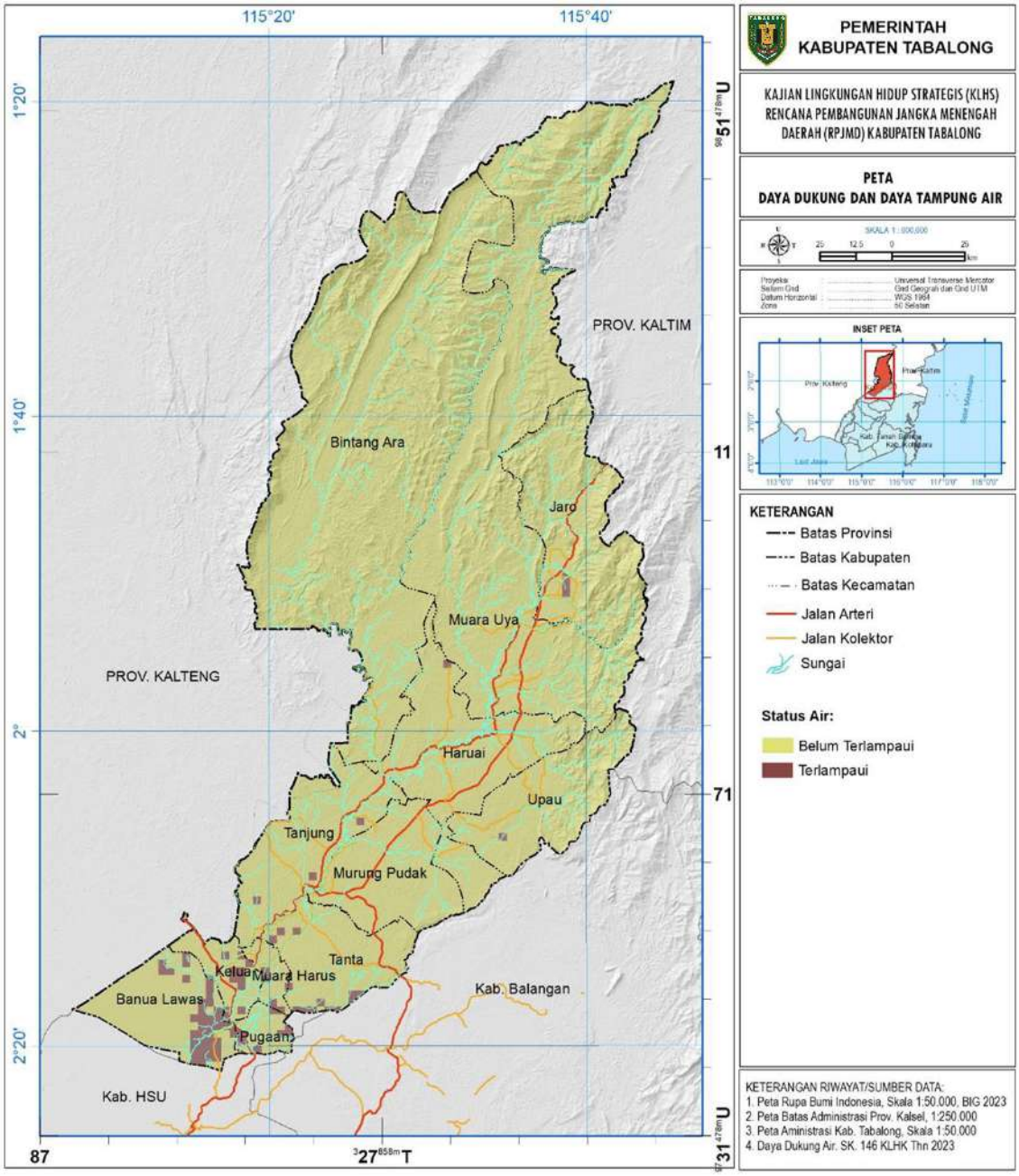

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Gambar 2.13
Status Air Analisis Kabupaten Tabalong

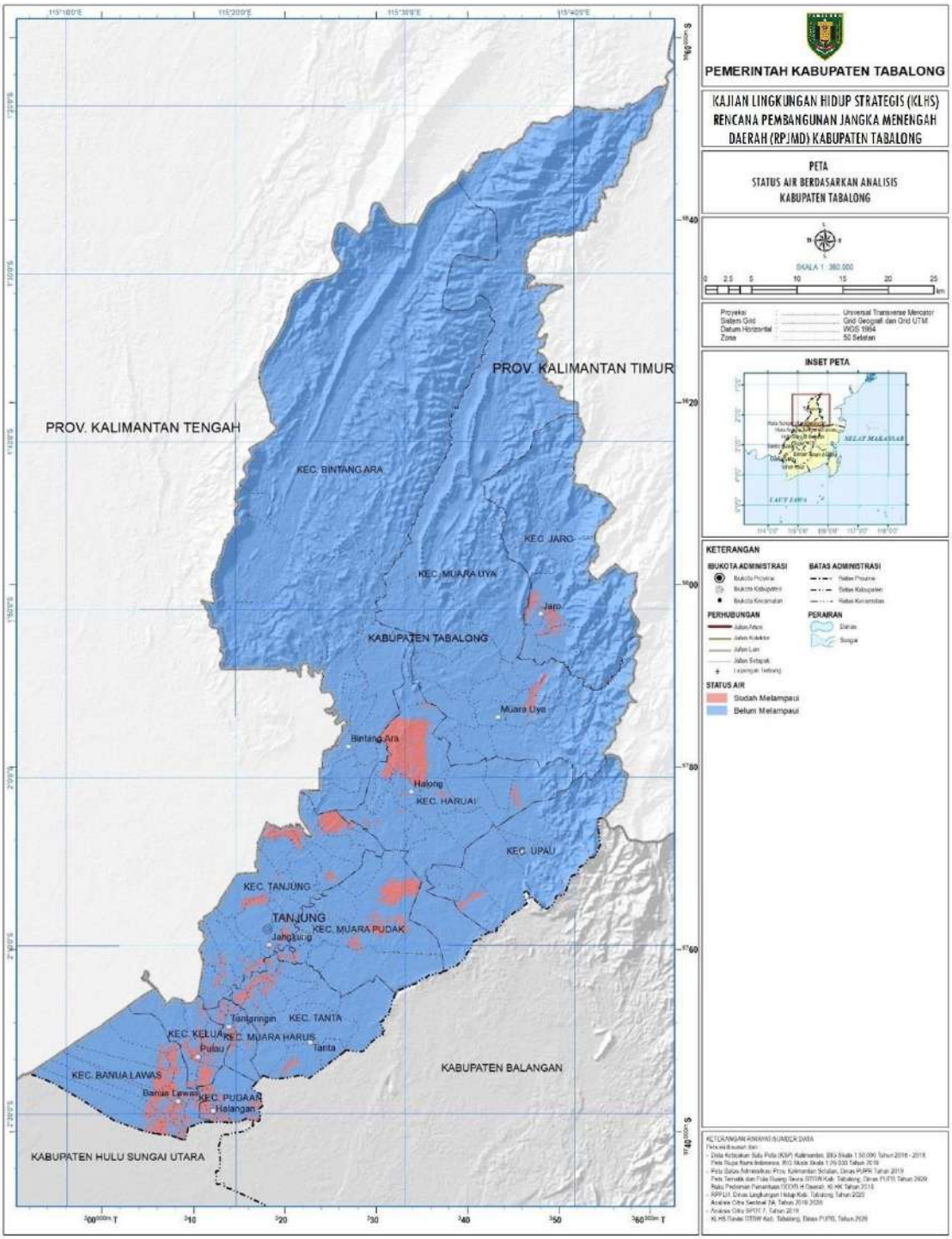

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan volume air, maka hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Kabupaten Tabalong adalah sebesar 59.899.670.569 m^3/tahun. Kebutuhan air total sebesar 736.560.911 m^3/tahun yang terdiri atas domestik sebesar 7.378.329 m^3/tahun dan 812.244.351 m^3/tahun, sehingga diperoleh selisih 59.080.047.889 m^3/tahun.

Dengan membandingkan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) menunjukkan bahwa masih dalam posisi surplus, akan tetapi jika mengacu pendapat Dr-Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), menunjukkan bahwa status air di Kabupaten Tabalong cukup tinggi yakni 81,32 atau berada pada interval DDA > 3 atau termasuk daya dukung air aman atau baik.

Secara administrasi 4 wilayah yang daya dukung air <10 adalah Kecamatan Kelua (3,80), Banua Lawas (4,62), Pugaan (5,04) dan Kecamatan Tanta (6,71), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.33, sedangkan 8 kecamatan lainnya cukup tinggi seperti Kecamatan Muara Uya (451,26) dan Kecamatan Jaro (185,17). Akan tetapi secara keseluruhan wilayah masih dalam kategori aman atau baik.

Jika diasumsikan bahwa ketersediaan air tetap dan faktor kebutuhan seperti jumlah penduduk maupun perubahan lahan, maka pada akhir tahun RPJMD (2024), kebutuhan air domestik menjadi 8.110.750 m^3, non domestik 974.693.221 m^3 dengan total 982.803.971 m^3 atau selisih menjadi 58.916.866.598 m^3, sehingga DDA menjadi 60,95 dengan kategori masih aman.

Tahun 2030 (akhir SDGs) kebutuhan air domestik menjadi 8.480.262 m^3 dan non domestik 1.197.398.371 m^3 atau total 1.205.878.633 m^3, sehingga diperoleh selisih menjadi 58.693.791.936 m^3 dan DDA menurun menjadi 49,67 meskipun masih dalam kategori aman atau baik.

Selanjutnya dengan data tersebut dapat dilakukan prediksi terhadap daya dukung air domestik dan non domestik di akhir

perencanaan berdasarkan asumsi prediksi penambahan jumlah penduduk, sedangkan ketersediaan air dianggap tetap. Berdasarkan hal tersebut diperoleh bahwa di wilayah Tabalong kebutuhan air total menjadi 1.855.353.829 m^3/tahun atau selisih 58.044.316.740 m^3/tahun dengan DDA sebesar 33,65 atau mengalami penurunan sebesar -40,80%, meskipun masih dalam kategori aman atau baik.

Secara administrasi terdapat 3 kecamatan yang mengalami status bersyarat atau sedang yakni Kecamatan Kelua (1,67), Banua Lawas (1,76) dan Kecamatan Pugaan (1,77), sedangkan 9 kecamatan lainnya masih dalam kondisi aman atau baik. Akan tetapi 11 kecamatan yang mengalami penurunan berkisar -42,09 sampai 83,54, sedangkan Kecamatan Upau mengalami kenaikan sebesar 10,31.

Hasil ini menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan air secara berkelanjutan melalui pembuatan waduk, irigasi maupun embung untuk mengantisipasi kekurangan air dan banjir.

Tabel 2.12
Perhitungan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)			Selisih (m3/tahun)	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik	Total			
Banua Lawas	260.606.384	571.794	55.893.950	56.465.745	204.140.639	4,62	Aman atau Baik
Bintang Ara	3.336.673.599	265.428	66.374.186	66.639.614	3.270.033.985	50,07	Aman atau Baik
Haruai	17.519.795.816	684.156	233.389.422	234.073.578	17.285.722.238	74,85	Aman atau Baik
Jaro	2.720.077.269	431.401	14.257.956	14.689.356	2.705.387.912	185,17	Aman atau Baik
Kelua	100.306.656	716.977	25.665.657	26.382.634	73.924.022	3,80	Aman atau Baik
Muara Harus	213.297.645	197.947	17.927.314	18.125.261	195.172.384	11,77	Aman atau Baik
Muara Uya	19.493.228.350	676.914	42.520.660	43.197.574	19.450.030.776	451,26	Aman atau Baik
Murung Pudak	2.454.994.246	1.503.012	93.610.139	95.113.151	2.359.881.096	25,81	Aman atau Baik
Pugaan	75.683.120	210.882	14.813.541	15.024.423	60.658.697	5,04	Aman atau Baik
Tanjung	5.415.688.520	1.302.247	121.180.176	122.482.423	5.293.206.097	44,22	Aman atau Baik
Tanta	297.642.898	601.257	43.765.895	44.367.153	253.275.746	6,71	Aman atau Baik
Upau	8.011.676.066	216.314	82.845.455	83.061.769	7.928.614.298	96,45	Aman atau Baik
TABALONG	59.899.670.569	7.378.329	812.244.351	819.622.680	59.080.047.889	73,08	Aman atau Baik

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 2.13
Perhitungan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)			Selisih (m3/tahun)	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik	Total			
Banua Lawas	260.606.384	616.743	67.072.741	67.689.483	192.916.901	3,85	Aman atau Baik
Bintang Ara	3.336.673.599	282.113	79.649.024	79.931.137	3.256.742.463	41,74	Aman atau Baik
Haruai	17.519.795.816	732.400	280.067.306	280.799.706	17.238.996.110	62,39	Aman atau Baik
Jaro	2.720.077.269	449.835	17.109.547	17.559.381	2.702.517.887	154,91	Aman atau Baik
Kelua	100.306.656	754.840	30.798.789	31.553.629	68.753.027	3,18	Aman atau Baik
Muara Harus	213.297.645	209.513	21.512.777	21.722.289	191.575.356	9,82	Aman atau Baik
Muara Uya	19.493.228.350	721.785	51.024.792	51.746.576	19.441.481.773	376,71	Aman atau Baik
Murung Pudak	2.454.994.246	1.819.015	112.332.167	114.151.182	2.340.843.064	21,51	Aman atau Baik
Pugaan	75.683.120	229.312	17.776.249	18.005.560	57.677.560	4,20	Aman atau Baik
Tanjung	5.415.688.520	1.362.438	145.416.211	146.778.648	5.268.909.871	36,90	Aman atau Baik
Tanta	297.642.898	713.947	52.519.074	53.233.021	244.409.877	5,59	Aman atau Baik
Upau	8.011.676.066	218.811	99.414.546	99.633.357	7.912.042.709	80,41	Aman atau Baik
TABALONG	59.899.670.569	8.110.750	974.693.221	982.803.971	58.916.866.598	60,95	Aman atau Baik

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 2.14
Perhitungan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan Tahun 2030

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)			Selisih (m3/tahun)	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik	Total			
Banua Lawas	260.606.384	644.840	95.895.519	96.540.359	164.066.025	2,70	Aman atau Baik
Bintang Ara	3.336.673.599	294.966	117.089.357	117.384.323	3.219.289.276	28,43	Aman atau Baik
Haruai	17.519.795.816	765.767	262.129.291	262.895.058	17.256.900.758	66,64	Aman atau Baik
Jaro	2.720.077.269	470.328	32.052.551	32.522.879	2.687.554.389	83,64	Aman atau Baik
Kelua	100.306.656	789.230	38.400.930	39.190.160	61.116.496	2,56	Aman atau Baik
Muara Harus	213.297.645	219.058	22.805.606	23.024.664	190.272.981	9,26	Aman atau Baik
Muara Uya	19.493.228.350	754.668	169.817.825	170.572.493	19.322.655.856	114,28	Aman atau Baik
Murung Pudak	2.454.994.246	1.901.887	104.529.145	106.431.031	2.348.563.215	23,07	Aman atau Baik
Pugaan	75.683.120	239.759	27.610.580	27.850.339	47.832.781	2,72	Aman atau Baik
Tanjung	5.415.688.520	1.424.508	215.069.334	216.493.842	5.199.194.677	25,02	Aman atau Baik
Tanta	297.642.898	746.473	63.275.389	64.021.862	233.621.036	4,65	Aman atau Baik
Upau	8.011.676.066	228.779	48.722.842	48.951.621	7.962.724.445	163,67	Aman atau Baik
TABALONG	59.899.670.569	8.480.262	1.197.398.371	1.205.878.633	58.693.791.936	49,67	Aman atau Baik

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 2.15
Perhitungan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan Tahun 2041

Kecamatan	Ketersediaan Air (m3/tahun)	Kebutuhan Air (m3/tahun)			Selisih (m3/tahun)	DDA	Status
		Domestik	Non Domestik	Total			
Banua Lawas	260.606.384	843.338	147.531.568	148.374.905	112.231.479	1,76	Bersyarat atau Sedang
Bintang Ara	3.336.673.599	396.331	180.137.473	180.533.804	3.156.139.796	18,48	Aman atau Baik
Haruai	17.519.795.816	918.920	403.275.833	404.194.753	17.115.601.063	43,34	Aman atau Baik
Jaro	2.720.077.269	762.053	49.311.617	50.073.670	2.670.003.598	54,32	Aman atau Baik
Kelua	100.306.656	1.144.852	59.078.354	60.223.206	40.083.450	1,67	Bersyarat atau Sedang
Muara Harus	213.297.645	258.851	35.085.548	35.344.399	177.953.246	6,03	Aman atau Baik
Muara Uya	19.493.228.350	1.108.138	261.258.193	262.366.330	19.230.862.019	74,30	Aman atau Baik
Murung Pudak	2.454.994.246	3.971.765	160.814.069	164.785.833	2.290.208.413	14,90	Aman atau Baik
Pugaan	75.683.120	287.924	42.477.816	42.765.740	32.917.380	1,77	Bersyarat atau Sedang
Tanjung	5.415.688.520	2.152.243	330.875.899	333.028.142	5.082.660.378	16,26	Aman atau Baik
Tanta	297.642.898	1.020.762	97.346.752	98.367.514	199.275.384	3,03	Aman atau Baik
Upau	8.011.676.066	337.314	74.958.219	75.295.532	7.936.380.534	106,40	Aman atau Baik
TABALONG	**59.899.670.569**	**13.202.488**	**1.842.151.341**	**1.855.353.829**	**58.044.316.740**	**32,28**	**Aman atau Baik**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 2.16
Perubahan Daya Dukung Air Setiap Kecamatan Tahun 2019 dan 2041

Kecamatan	Kebutuhan Air Tahun(m3/tahun)		DDA Tahun		Persentase Penurunan/ Kenaikan DDA (%)	Keterangan
	2019	2041	2019	2041		
Banua Lawas	204.140.639	112.231.479	4,62	1,76	-61,94	Menurun
Bintang Ara	3.270.033.985	3.156.139.796	50,07	18,48	-63,09	Menurun
Haruai	17.285.722.238	17.115.601.063	74,85	43,34	-42,09	Menurun
Jaro	2.705.387.912	2.670.003.598	185,17	54,32	-70,66	Menurun
Kelua	73.924.022	40.083.450	3,80	1,67	-56,19	Menurun
Muara Harus	195.172.384	177.953.246	11,77	6,03	-48,72	Menurun
Muara Uya	19.450.030.776	19.230.862.019	451,26	74,30	-83,54	Menurun
Murung Pudak	2.359.881.096	2.290.208.413	25,81	14,90	-42,28	Menurun
Pugaan	60.658.697	32.917.380	5,04	1,77	-64,87	Menurun
Tanjung	5.293.206.097	5.082.660.378	44,22	16,26	-63,22	Menurun
Tanta	253.275.746	199.275.384	6,71	3,03	-54,90	Menurun
Upau	7.928.614.298	7.936.380.534	96,45	106,40	10,31	Naik
TABALONG	**59.080.047.889**	**58.044.316.740**	**73,08**	**32,28**	**-40,80**	**Menurun**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

C. Daya Dukung Permukiman

Peningkatan jumlah penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan akan perumahan, karena perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Untuk dapat melangsungkan kehidupan dan penghidupan, penduduk membutuhkan tempat atau sarana berupa lahan untuk bermukim. Analisis daya dukung permukiman merupakan unit analisis yang memperhatikan area pengembangan permukiman yang aman.

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika DDP>1, mampu menampung penduduk untuk bermukim, DDP=1, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan DDP<1, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Dalam kajian daya dukung permukiman di Kabupaten Tabalong dilakukan terhadap 4 analisis yakni kondisi eksisting, kesesuaian lahan permukiman tahun 2023, kondisi rencana pola ruang dan kesesuaian lahan permukiman tahun 2029. Berdasarkan luas lahan eksisting untuk permukiman sebesar 42.607.162 m2, jika jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah sebesar 262.631 jiwa, maka diperoleh DDPm sebesar 1,62 atau masih dalam kategori mampu. Akan tetapi secara administrasi terdapat 4 kecamatan yang tidak seimbang karena DDPm<1 yakni Kecamatan Banua Lawas (0,97), Muara Harus (0,19), Muara Uaya (0,79) dan Pugaan (0,71), sedangkan 8 kecamatan lainnya dalam kategori mampu dengan nilai DPPm berkisar 1,31 – 5,48.

Hasil analisis kajian kelayakan untuk pengembangan permukiman di wilayah Kabupaten Tabalong adalah sebesar 2.210.807.537 m^2. Dengan jumlah penduduk sebesar 262.631 jiwa, maka DDPm 84,18 masih dalam kategori mampu menampung jumlah

penduduk pada Tahun 2023.

Tabel 2.17
Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Eksisting Permukiman Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Layak Permukiman/LPm (m^2)	DDPm	Status
Banua Lawas	21.112	1.900.194	0,90	Tidak Seimbang
Bintang Ara	7.811	1.448.979	1,86	Mampu
Haruai	25.702	4.850.370	1,89	Mampu
Jaro	7.188	2.697.125	3,75	Mampu
Kelua	23.614	3.083.875	1,31	Mampu
Muara Harus	37.367	722.267	0,19	Tidak Seimbang
Muara Uya	57.721	4.549.301	0,79	Tidak Seimbang
Murung Pudak	24.486	12.396.682	5,06	Mampu
Pugaan	9.479	672.524	0,71	Tidak Seimbang
Tanjung	7.752	4.248.061	5,48	Mampu
Tanta	24.668	3.672.991	1,49	Mampu
Upau	15.731	2.364.794	1,50	Mampu
TABALONG	**262.631**	**42.607.162**	**1,62**	**Mampu**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 2.18
Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kesesuaian Permukiman Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Layak Permukiman/LPm (m^2)	DDPm	Status
Banua Lawas	21.112	84.247.059	39,90	Mampu
Bintang Ara	7.811	608.779.097	779,39	Mampu
Haruai	25.702	260.473.330	101,34	Mampu
Jaro	7.188	125.377.795	174,43	Mampu
Kelua	23.614	52.520.749	22,24	Mampu
Muara Harus	37.367	26.622.974	7,12	Mampu
Muara Uya	57.721	399.488.816	69,21	Mampu
Murung Pudak	24.486	171.950.311	70,22	Mampu
Pugaan	9.479	31.729.695	33,47	Mampu
Tanjung	7.752	189.984.426	245,08	Mampu
Tanta	24.668	149.459.310	60,59	Mampu
Upau	15.731	110.173.974	70,54	Mampu
TABALONG	**262.631**	**2.210.807.537**	**84,18**	**Mampu**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Selanjutnya untuk melihat daya dukung permukiman (DDPm) pada akhir tahun perencanaan, maka dilakukan analisis kebutuhan jumlah penduduk terhadap kesesuaian lahan dan sesuai rencana pola ruang. Berdasarkan jumlah proyeksi penduduk tahun 2041 sebanyak 437.399 jiwa, maka DDPmnya masih sebesar 50,54 atau masih mampu

untuk menampung penduduk. Jika melihat rencana yang diperuntukan ruang untuk permukiman sebesar 212.495.373 m2, maka DDPmnya sebesar 4,86 atau masih kategori mampu. Akan tetapi jika melihat berdasarkan distribusi wilayah, terdapat 3 kecamatan masuk kategori tidak seimbang yakni Kecamatan Pugaan (0,27), Jaro (0,84) dan Kecamatan Kelua (0,86).

Tabel 2.19
Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Kesesuaian Permukiman Tahun 2041

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Layak Permukiman/LPm (m2)	DDPm	Status
Banua Lawas	28.881	84.247.059	29,17	Mampu
Bintang Ara	13.573	608.779.097	448,52	Mampu
Haruai	31.470	260.473.330	82,77	Mampu
Jaro	26.098	125.377.795	48,04	Mampu
Kelua	39.207	52.520.749	13,40	Mampu
Muara Harus	8.865	26.622.974	30,03	Mampu
Muara Uya	37.950	399.488.816	105,27	Mampu
Murung Pudak	136.019	171.950.311	12,64	Mampu
Pugaan	9.860	31.729.695	32,18	Mampu
Tanjung	58.966	189.984.426	32,22	Mampu
Tanta	34.958	149.459.310	42,75	Mampu
Upau	11.552	110.173.974	95,37	Mampu
TABALONG	**437.399**	**2.210.807.537**	**50,54**	**Mampu**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 2.20
Analisis Daya Dukung Lahan Berdasarkan Pola Ruang untuk Permukiman Tahun 2041

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Layak Permukiman/LPm (m2)	DDPm	Status
Banua Lawas	28.881	5.695.964	1,97	Mampu
Bintang Ara	13.573	3.173.359	2,34	Mampu
Haruai	31.470	23.091.635	7,34	Mampu
Jaro	26.098	2.201.731	0,84	Tidak Seimbang
Kelua	39.207	3.366.555	0,86	Tidak Seimbang
Muara Harus	8.865	6.475.721	7,31	Mampu
Muara Uya	37.950	8.751.003	2,31	Mampu

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Lahan Layak Permukiman/LPm (m2)	DDPm	Status
Murung Pudak	136.019	43.243.302	3,18	Mampu
Pugaan	9.860	269.027	0,27	Tidak Seimbang
Tanjung	58.966	15.407.263	2,61	Mampu
Tanta	34.958	99.601.724	28,49	Mampu
Upau	11.552	1.218.090	1,05	Mampu
TABALONG	**437.399**	**212.495.373**	**4,86**	**Mampu**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Potensi pengembangan Kabupaten Tabalong dapat difokuskan pada pengelolaan lahan permukiman yang lebih seimbang, dengan memperhatikan kecamatan yang memiliki DDPm rendah seperti Pugaan dan Jaro, yang memerlukan perhatian khusus dalam penyediaan lahan layak huni. Untuk kecamatan dengan status "Mampu" seperti Murung Pudak, Tanjung, dan Haruai, yang memiliki DDPm tinggi, pengembangan infrastruktur dan pemukiman dapat lebih difokuskan pada peningkatan kualitas perumahan dan fasilitas publik yang mendukung pertumbuhan populasi yang pesat. Sementara itu, kecamatan dengan ketidakseimbangan seperti Kelua dan Pugaan membutuhkan perencanaan tata ruang yang lebih matang untuk mengatasi keterbatasan lahan permukiman, mungkin dengan mendorong pengembangan permukiman vertikal atau memanfaatkan lahan yang kurang produktif untuk perumahan.

2.1.2.4. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

A. Kapasitas Air Baku

Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.

B. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Aman

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum

Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

C. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan adalah ukuran kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah yang dihasilkan dari beberapa indikator yang meliputi ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan.

Indeks ketahanan pangan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi, dengan capaian pada tahun 2024 yaitu sebesar 85,94 atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya 79,79.

Tabel 2.21
Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	80,6	81,82	82,12	79,79	85,94

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 2023, LkjIP Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dan BPS RI Tahun 2025

D. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan

Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of*

Undernourishment/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Tabel 2.22
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	2,05	2,26	3,21	4,15	3,06

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 2023, LkjIP Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dan BPS RI Tahun 2025

Data pada tabel diatas menunjukkan kecenderungan peningkatan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada tahun 2023 mencapai 4,15 yang berarti meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di bawah angka 4. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan maka makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya. Namun kondisi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi hanya 3,06.

2.1.2.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan data sebagaimana dimuat pada tabel di bawah, diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu mencapai 73,98 atau naik dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya sebesar 69,52. Peningkatan IKLH tahun 2024 dipengaruhi oleh seluruh komponen IKLH yang juga mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya. Dari tabel di bawah, komponen yang masih perlu diperhatikan agar tetap terjaga dan semakin baik kondisinya adalah kualitas air yang hanya mencapai 52,26 di tahun 2024.

Tabel 2.23
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,86	69,52	70,08	71,56	73,98
2	Indeks Kualitas Air	56,94	51,87	51,7	55,19	52,26
3	Indeks Kualitas Udara	88,97	87,69	89,05	93,79	96,78
4	Indeks Tutupan Lahan	65,84	66,23	66,53	69,85	72,66

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong, 2024 dan LPPD Tahun 2024

B. Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah

Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah adalah ukuran atas capaian aksi pengelolaan keanekaragaman hayati yang dilakukan per provinsi. Pengelolaan keanekaragaman hayati adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan tujuan akhir untuk mempertahankan keberadaan seluruh bentuk kehidupan di bumi, melalui pengurangan ancaman dan peningkatan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Pengurangan ancaman adalah upaya pengayaan keanekaragaman hayati melalui perlindungan, konservasi, dan restorasi, baik di tingkat ekosistem, spesies, berkelanjutan maupun adalah genetik. Pemanfaatan komponen keanekaragaman hayati secara optimal yang sebesar-besarnya untuk masyarakat dan generasi yang akan datang.

C. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman

Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

D. Pengelolaan Sampah:

1. Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, Kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb; b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini

melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

2. Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:

a. Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
b. Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

2.1.2.6. Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

A. Indeks Risiko Bencana

Indeks risiko bencana adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Indeks ini mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi suatu

wilayah akibat ancaman bencana, seperti banjir, gempa bumi, dan angin topan. Indeks ini dihitung dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk ancaman bencana, kerentanan masyarakat, dan kapasitas penanggulangan bencana.

Berdasarkan publikasi BNPB, diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 nilainya yaitu sebesar 152,40 dan menurun hingga 2022 menjadi 130,06, namun mengalami peningkatan kembali pada tahun berikutnya menjadi 157,77 pada tahun 2024. Adapun Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tabalong Tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.14
Perkembangan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

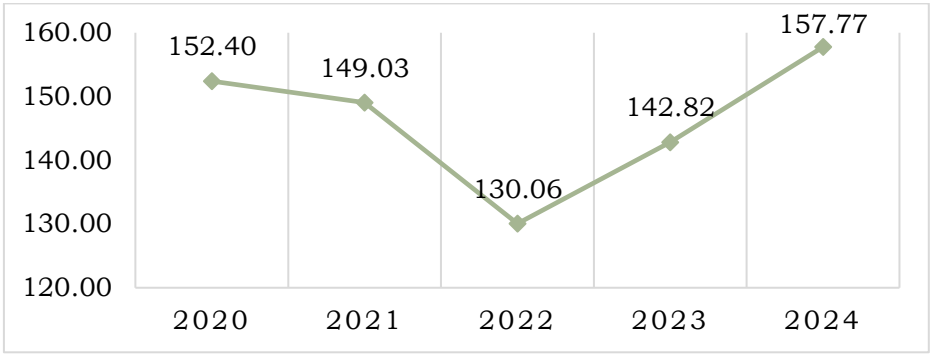

Sumber: INARISK BNPB, 2025

B. Indek Ketahanan Daerah (IKD)

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kemampuan atau kapasitas suatu daerah dalam menghadapi dan menanggulangi bencana. IKD mengukur sejauh mana suatu wilayah mampu memitigasi risiko bencana, beradaptasi terhadap perubahan kondisi, serta meminimalkan dampak kerusakan dan pulih secara sosial, ekonomi, dan lingkungan pasca bencana. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,53 dan menurun pada tahun 2024 menjadi hanya 0,50.

Gambar 2.15
Perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

Sumber: BNPB, 2025

C. Penurunan Emisi GRK

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihasilkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Persentase penurunan emisi GRK daerah tahunan adalah perbandingan angka penurunan emisi GRK daerah di titik tahun tertentu terhadap angka baseline emisi daerah di titik tahun yang sama. Persentase penurunan emisi GRK daerah kumulatif adalah perbandingan akumulasi penurunan emisi GRK daerah selama periode *base year* hingga tahun tertentu terhadap akumulasi emisi GRK baseline daerah untuk periode yang sama.

D. Perkiraan Mengenai Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Kajian ini mengukur besar dan pentingnya dampak dan/atau risiko suatu kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap perubahan-perubahan lingkungan hidup dan kelompok masyarakat

yang terkena dampak dan/atau risiko.

1. Risiko Bencana Banjir

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023, Kabupaten Tabalong memiliki indeks risiko bencana banjir sebesar 36 atau termasuk dalam kategori tinggi. Hasil analisis dari data https://inarisk.bnpb.go.id/ untuk wilayah Kabupaten Tabalong menunjukkan terdapat 40,69% wilayah yang memiliki potensi banjir dari total keseluruhan wilayah, dimana terbagi atas kategori tinggi sebanyak 0,04% atau 0,09% dari wilayah banjir, kategori sedang sebanyak 20,45% atau 50,25% dan 20,21% atau 49,66%.

Dari hasil tersebut jika dilihat dari proporsi administrasi menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki potensi tinggi terbesar terdapat di Kecamatan Tanjung, Banua Lawas dan Murung Pudak. Kategori sedang yang memiliki proporsi >50% adalah Kecamatan Muara Harus, Pugaan, Kelua, Banua Lawas, Tanjung, Jaro dan Tanta.

Tabel 2.24
Sebaran Potensi Risiko Bencana Banjir Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Banua Lawas	28,54	9.861,22	5.117,37	15.007,13
Bintang Ara		5.113,78	11.621,17	16.734,96
Haruai	1,98	10.087,08	11.675,64	21.764,70
Jaro		1.906,18	1.588,79	3.494,98
Kelua	8,10	3.790,60	1.371,59	5.170,29
Muara Harus	9,98	2.162,11	471,05	2.643,14
Muara Uya		6.971,99	11.396,34	18.368,33
Murung Pudak	26,15	7.818,98	8.382,74	16.227,87
Pugaan		2.357,99	772,34	3.130,32
Tanjung	47,17	10.816,15	5.684,15	16.547,47
Tanta		7.815,42	6.666,13	14.481,56
Upau		2.315,79	5.428,89	7.744,68
TABALONG	**121,92**	**71.017,31**	**70.176,20**	**141.315,43**
Persentase Risiko Banjir	0,09	50,25	49,66	100,00
Persentase Total	0,04	20,45	20,21	40,69

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

2. Risiko Bencana Banjir Bandang

Hasil analisis dari data https://inarisk.bnpb.go.id/ untuk wilayah Kabupaten Tabalong menunjukkan terdapat 0,69% wilayah

yang memiliki potensi banjir bandang dari total keseluruhan wilayah, dimana terbagi atas kategori tinggi sebanyak 0,36% atau 51,65% dari wilayah banjir, kategori sedang sebanyak 0,32% atau 46,39% dan 0,01% atau 1,96%. Dari hasil tersebut jika dilihat dari proporsi administrasi menunjukkan bahwa hanya 3 wilayah yang memiliki potensi banjir bandang yakni Kecamatan Bintang Ara (68%), Muara Uya (43%) dan Jaro (41%) dalam kategori tinggi.

Tabel 2.25
Sebaran Potensi Risiko Bencana Banjir Bandang Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Bintang Ara	779,50	330,93	26,55	1.136,98
Jaro	247,51	506,41	17,65	771,57
Muara Uya	211,97	275,35	2,86	490,17
TABALONG	1.238,98	1.112,68	47,06	2.398,72
Persentase Risiko Banjir Bandang	51,65	46,39	1,96	100,00
Persentase Total	0,36	0,32	0,01	0,69

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Oleh karena itu untuk mengantisipasi banjir terutama di kawasan perkebunan maupun pertanian perlu ada pemasangan tanggul/pematang maupun sempadan sungai demikian halnya di kawasan permukiman perlu penataan sempadan sungai melalui relokasi permukiman maupun penanaman dan perbaikan sepanjang sempadan sungai melalui penanaman pohon dengan akar yang kuat untuk mencegah longsoran dan banjir bandang.

3. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Kabupaten Tabalong memiliki indeks risiko bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar 36 atau termasuk dalam kategori tinggi. Hasil analisis dari data https://inarisk.bnpb.go.id/ untuk wilayah Kabupaten Tabalong menunjukkan terdapat 64,04% wilayah yang memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan dari total keseluruhan wilayah, dimana terbagi atas kategori tinggi sebanyak 16,88% atau 26,36% dari

wilayah bencana kebakaran hutan dan lahan, kategori sedang sebanyak 47% atau 73,39% dan 0,16% atau 0,25%.

Dari hasil tersebut jika dilihat dari proporsi administrasi menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki potensi tinggi terbesar terdapat di Kecamatan Pugaan (54%), Banua Lawas dan Upau masing-masing 42%. Kategori sedang yang memiliki proporsi >50% adalah terjadi di seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Pugaan.

Tabel 2.26
Sebaran Potensi Risiko Bencana Karhutla Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Banua Lawas	3.819,13	4.970,56	129,19	8.918,88
Bintang Ara	27.024,44	72.516,22	102,17	99.642,84
Haruai	3.564,43	6.189,68	35,22	9.789,33
Jaro	4.440,21	12.954,92	127,35	17.522,48
Kelua	91,80	214,34	44,66	350,79
Muara Uya	15.442,54	57.615,25	50,16	73.107,95
Murung Pudak	352,65	2.823,19		3.175,83
Pugaan	114,67	97,25	3,92	215,83
Tanjung	56,36	606,01	7,99	670,35
Tanta	33,60	118,26	33,81	185,68
Upau	3.681,05	5.096,56	23,25	8.800,85
TABALONG	**58.620,87**	**163.202,23**	**557,72**	**222.380,82**
Persentase Risiko Karhutla	26,36	73,39	0,25	100,00
Persentase Total	16,88	47,00	0,16	64,04

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

4. Risiko Bencana Cuaca Ekstrim

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Kabupaten Tabalong memiliki indeks risiko bencana cuaca ekstrim sebesar 13,6 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Hasil analisis dari data https://inarisk.bnpb.go.id/ untuk wilayah Kabupaten Tabalong menunjukkan terdapat 58,56% wilayah yang memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan dari total keseluruhan wilayah, dimana terbagi atas kategori tinggi sebanyak 9,81% atau 16,75% dari wilayah cuaca ekstrim, kategori sedang

sebanyak 48,69% atau 83,15% dan 0,06% atau 0,11%.

Dari hasil tersebut jika dilihat dari proporsi administrasi menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki potensi tinggi terbesar terdapat di Kecamatan Kelua (48%) dan Muara Harus (40%), selebihnya memiliki proporsi <30%.

Tabel 2.27
Sebaran Potensi Risiko Bencana Cuaca Ekstrim Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Banua Lawas	2.236,07	12.833,41	10,25	15.079,73
Bintang Ara	2.045,33	37.046,34		39.091,67
Haruai	5.079,05	20.835,23		25.914,28
Jaro	2.353,06	11.989,35		14.342,42
Kelua	2.515,91	2.548,55	209,38	5.273,85
Muara Harus	1.077,84	1.602,86		2.680,70
Muara Uya	4.577,50	29.794,45		34.371,95
Murung Pudak	5.075,99	12.172,19		17.248,18
Pugaan	923,20	2.264,90		3.188,10
Tanjung	3.579,40	14.360,70		17.940,10
Tanta	3.637,74	11.339,59		14.977,33
Upau	951,99	12.301,84		13.253,84
TABALONG	**34.053,08**	**169.089,42**	**219,63**	**203.362,14**
Persentase Risiko Cuaca Ekstrim	16,75	83,15	0,11	100,00
Persentase Total	9,81	48,69	0,06	58,56

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

5. Risiko Bencana Kekeringan

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Kabupaten Tabalong memiliki indeks risiko bencana kekeringan sebesar 24 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Hasil analisis dari data https://inarisk.bnpb.go.id/ untuk wilayah Kabupaten Tabalong menunjukkan hampir 99,38% wilayah yang memiliki potensi bencana kekeringan dari total keseluruhan wilayah, dimana terbagi atas kategori tinggi sebanyak 18,17% atau 18,28% dari wilayah bencana kekeringan, kategori sedang sebanyak

70,03% atau 70,47% dan 11,18% atau 11,25%.

Dari hasil tersebut jika dilihat dari proporsi administrasi menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki potensi tinggi terbesar terdapat di Kecamatan Haruai (58%), Upau dan Muara Pudak masing-masing 40% dan 38%. Kategori sedang yang memiliki proporsi >50% adalah terjadi di seluruh Kecamatan kecuali Kecamatan Haruai.

Tabel 2.28
Sebaran Potensi Risiko Bencana Kekeringan Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Banua Lawas	1.062,13	11.242,52	2.772,41	15.077,06
Bintang Ara	8.457,91	88.808,10	11.604,19	108.870,19
Haruai	15.560,12	6.069,07	5.567,88	27.197,07
Jaro	4.256,24	22.071,53	1.028,74	27.356,51
Kelua	448,74	3.232,74	1.593,51	5.274,99
Muara Harus	80,11	2.309,35	291,24	2.680,70
Muara Uya	13.799,93	68.099,89	5.100,94	87.000,76
Murung Pudak	6.555,12	5.457,53	5.235,53	17.248,18
Pugaan	695,60	1.793,86	698,64	3.188,10
Tanjung	2.083,41	14.593,25	1.262,97	17.939,63
Tanta	2.750,82	9.263,50	2.963,01	14.977,33
Upau	7.333,08	10.250,05	704,11	18.287,23
TABALONG	**63.083,20**	**243.191,38**	**38.823,18**	**345.097,75**
Persentase Risiko Kekeringan	18,28	70,47	11,25	100,00
Persentase Total	18,17	70,03	11,18	99,38

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

6. Risiko Bencana Tanah Longsor

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2020, Kabupaten Tabalong memiliki indeks risiko bencana tanah longsor sebesar 24 atau termasuk dalam kategori tinggi.

Hasil analisis dari data https://inarisk.bnpb.go.id/ untuk wilayah Kabupaten Tabalong menunjukkan sekitar 28,22% wilayah yang memiliki potensi bencana tanah longsor dari total keseluruhan wilayah, dimana terbagi atas kategori tinggi sebanyak 25,43% atau 90,12% dari wilayah bencana tanah longsor, kategori sedang sebanyak 2,73% atau

9,68% dan 0,05% atau 0,19% kategori rendah.

Dari hasil tersebut jika dilihat dari proporsi administrasi menunjukkan bahwa terdapat 5 wilayah kecamatan yang memiliki potensi tinggi terbesar terdapat di Kecamatan Muara Uya, Bintang Ara, Jaro, Upau dan Haruai. Kategori sedang terjadi di seluruh Kecamatan Tanjung, sedangkan Kecamatan Tanta dan Muara Pudak dalam kategori rendah.

Tabel 2.29
Sebaran Potensi Risiko Bencana Tanah Longsor Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas Kelas Risiko Bencana (Ha)			
	Tinggi	Sedang	Rendah	Total
Bintang Ara	38.198,61	3.041,05	18,42	41.258,09
Haruai	744,78	409,48	38,51	1.192,78
Jaro	12.803,26	2.902,83	21,99	15.728,07
Muara Uya	31.947,07	1.436,95		33.384,02
Murung Pudak			98,39	98,39
Tanjung		0,68		0,68
Tanta			13,57	13,57
Upau	4.616,31	1.698,01		6.314,32
TABALONG	**88.310,03**	**9.489,00**	**190,89**	**97.989,92**
Persentase Risiko Tanah Longsor	90,12	9,68	0,19	100,00
Persentase Total	25,43	2,73	0,05	28,22

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

7. Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan, sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai pada batas yang ditentukan atau diharapkan, sedangkan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air, menyebutkan bahwa lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi, baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan maupun yang tidak dibudidayakan.

Berdasarkan hasil analisis Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) pada tahun 2022, kondisi Tingkat lahan kritis di Kabupaten Tabalong dalam status Sangat Kritis 4,55%, Kritis 14,23%, Agak Kritis 35,57% dan Potensial Kritis 19,35%.

Tabel 2.30
Kondisi Lahan Kritis Kabupaten Tabalong

No.	Tingkat Kekritisan	Luas (ha)	Persentse (%)
1	Tidak Kritis	91.213,70	26,31
2	Potensial Kritis	67.085,86	19,35
3	Agak Kritis	123.310,31	35,57
4	Kritis	49.336,61	14,23
5	Sangat Kritis	15.767,13	4,55
	BALANGAN	**346.713,61**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Potensi pengembangan lahan dengan kondisi lahan yang tidak kritis (26,31%) dan potensial kritis (19,35%) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau permukiman dengan perencanaan yang cermat, dengan mengutamakan pengelolaan yang ramah lingkungan. Sementara itu, untuk lahan yang agak kritis dan kritis, pengembangan harus dilakukan dengan pendekatan restorasi, seperti rehabilitasi hutan, konservasi tanah, dan pengelolaan air, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Di sisi lain, lahan yang sangat kritis memerlukan upaya pemulihan, seperti penanaman kembali vegetasi dan pengurangan konversi lahan.

E. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

1. Tutupan Lahan

Penggunaan yang optimal memerlukan keterkaitan dengan karakteristik dan kualitas lahannya. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan dalam penggunaan lahan sesuai dengan karakteristik dan kualitas lahannya, bila dihubungkan dengan pemanfaatan lahan secara lestari dan berkesinambungan. Sebagai wilayah yang didominasi lahan dataran rendah dan berawa, sehingga mempengaruhi karakteristik pemanfaatan lahan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil analisis citra, tutupan lahan didominasi oleh perkebunan seluas 28,19%, selanjutnya hutan lahan kering sekunder (26,12%).

Tabel 2.31
Tutupan Lahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2022

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Bandara/Pelabuhan	57,48	0,02
2	Hutan lahan kering primer	652,03	0,19
3	Hutan lahan kering sekunder	133.337,98	38,46
4	Hutan rawa sekunder	2.886,91	0,83
5	Hutan tanaman	6.569,41	1,89
6	Pemukiman	5.434,48	1,57
7	Perkebunan	55.321,62	15,96
8	Pertanian lahan kering	4.561,26	1,32
9	Pertanian lahan kering campur semak	51.901,94	14,97
10	Rawa	403,99	0,12
11	Sawah	11.049,79	3,19
12	Semak belukar	57.655,24	16,63
13	Semak belukar rawa	6.452,83	1,86
14	Tambak	90,14	0,03
15	Tambang	7.219,79	2,08
16	Tanah terbuka	2.203,74	0,64
17	Transmigrasi	372,18	0,11
18	Tubuh air	542,80	0,16
Kabupaten Tabalong		489.030,00	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Gambar 2.16
Tutupan Lahan Kabupaten Tabalong

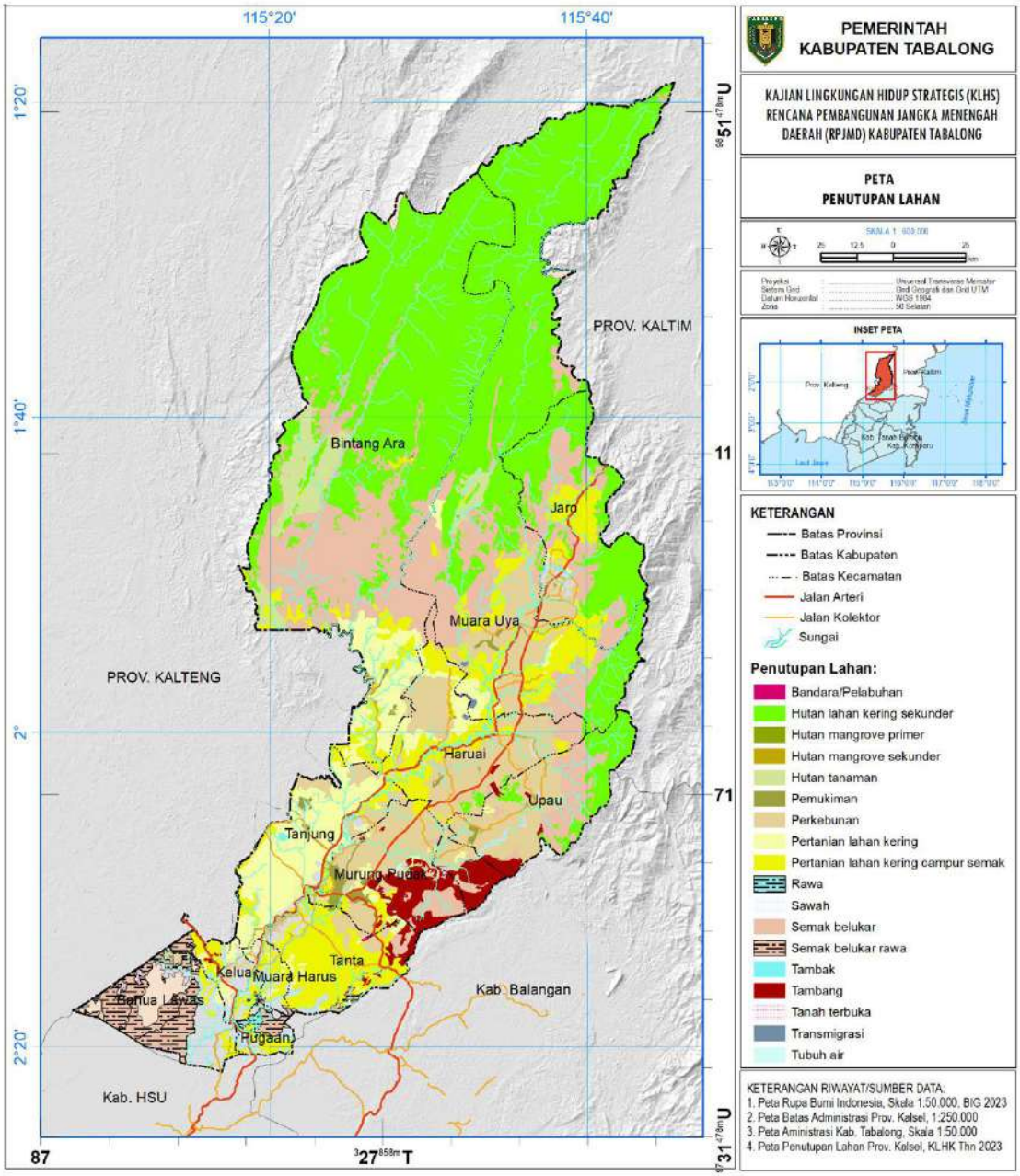

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

2. Peta Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK)

Peta Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia merupakan sebuah alat penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di Indonesia. SIDIK bertujuan untuk mengidentifikasi dan memetakan tingkat kerentanan berbagai wilayah

terhadap dampak perubahan iklim, khususnya yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Metode yang digunakan oleh SIDIK mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber, termasuk data satelit, data cuaca, data topografi, dan data vegetasi. Integrasi data ini memungkinkan SIDIK untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kondisi lingkungan dan tingkat kerentanannya.

Berdasarkan data SIDIK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018, Tingkat kerentanan di Kabupaten Tabalong sebesar 4, seperti ditampilkan pada gambar di bawah. Nilai kerentanan 4 dalam konteks penilaian kerentanan terhadap perubahan iklim mengindikasikan tingkat kerentanan yang tinggi atau sangat rentan.

Gambar 2.17
Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Tabalong

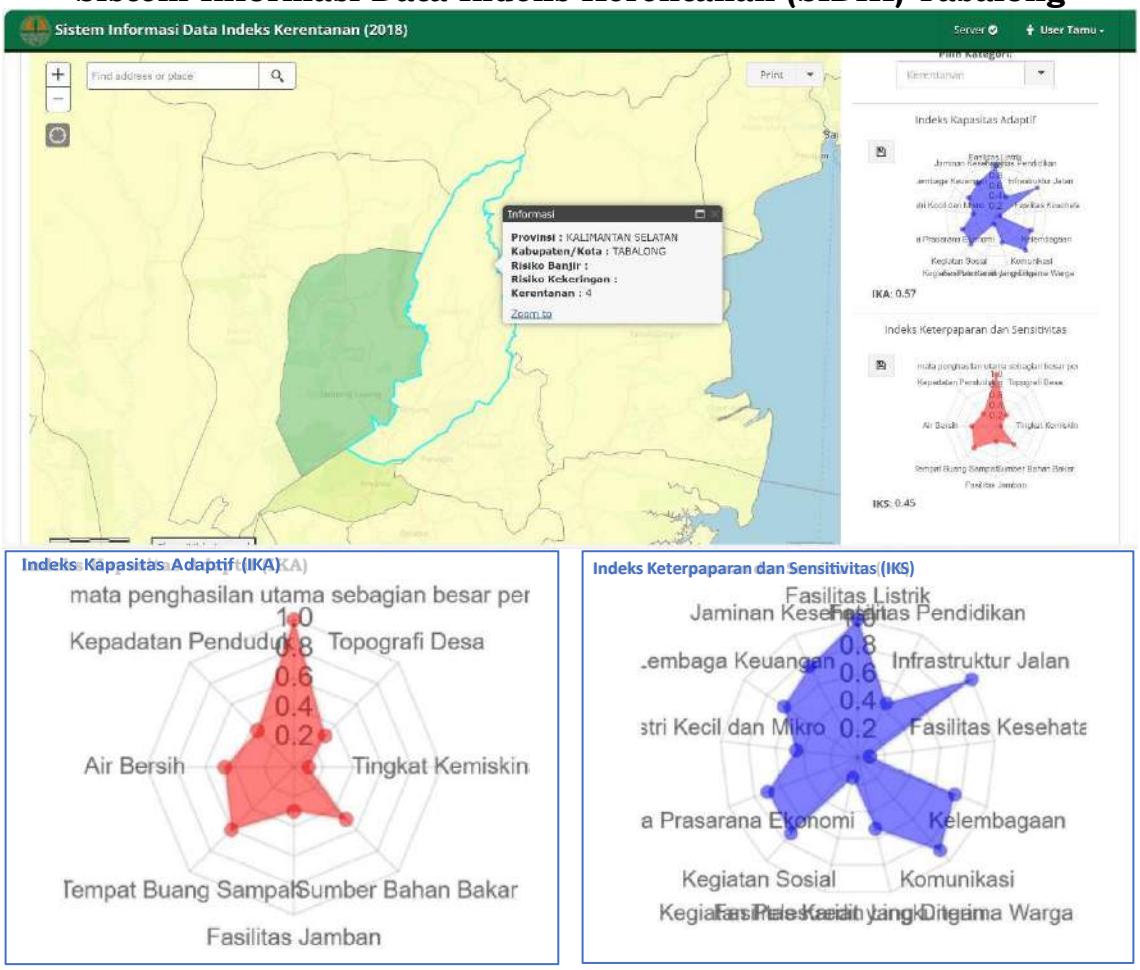

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) Kabupaten Tabalong berada pada nilai 0,45, dimana parameter paling rendah adalah tingkat kemiskinan bernilai 0,1; fasilitas jamban dan topografi desa bernilai 0,3; serta kepadatan penduduk bernilai 0,4. Kemudian Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) Kabupaten Tabalong berada pada nilai 0,57, dimana parameter yang rendah adalah lingkungan dan fasilitas kesehatan masih berada dibawah 0,2.

Indeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu wilayah atau entitas terpapar terhadap dampak perubahan iklim berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Dengan demikian, nilai IKS 0,45 menggambarkan gambaran bahwa Kabupaten Tabalong memiliki tantangan dalam menghadapi perubahan iklim, namun masih memungkinkan untuk mengimplementasikan langkah-langkah adaptasi yang tepat guna mengurangi dampaknya bagi masyarakat dan lingkungan.

Indeks Kapasitas Adaptif (IKA) adalah alat penilaian yang digunakan untuk mengukur kapasitas suatu wilayah atau entitas dalam menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim. Dengan demikian, nilai IKA 0,57 adalah indikasi bahwa Kabupaten Tabalong memiliki dasar yang kuat untuk menghadapi perubahan iklim, namun tetap memerlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan dan adaptasi terhadap tantangan masa depan yang lebih intens akibat perubahan iklim.

3. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB)

Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan wilayah-wilayah yang memiliki potensi konflik penggunaan lahan atau potensi kerugian ekologis yang signifikan. Tujuan utama dari PIPPIB adalah untuk memberikan panduan kepada pemerintah dalam mengatur pemberian izin baru di wilayah-wilayah yang rentan terhadap

konflik atau kerugian ekologis yang dapat muncul akibat pembangunan atau perubahan penggunaan lahan.

Peta PIPPIB yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang merupakan salah satu instrumen untuk mengatur penggunaan lahan yang berkelanjutan dan melindungi kawasan kawasan penting dari potensi kerusakan lingkungan, tidak ada yang berada dalam wilayah kabupaten Tabalong.

Tabel 2.32
Luas Area PIPPIB di Kabupaten Tabalong

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Banua Lawas	861,05	1,12
2	Bintang Ara	26.361,59	34,25
3	Haruai	797,97	1,04
4	Jaro	7.907,44	10,27
5	Kelua	4,57	0,01
6	Muara Uya	34.987,80	45,46
7	Upau	6.050,40	7,86
	Kabupaten Tabalong	**76.970,83**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Gambar 2.18
Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB)

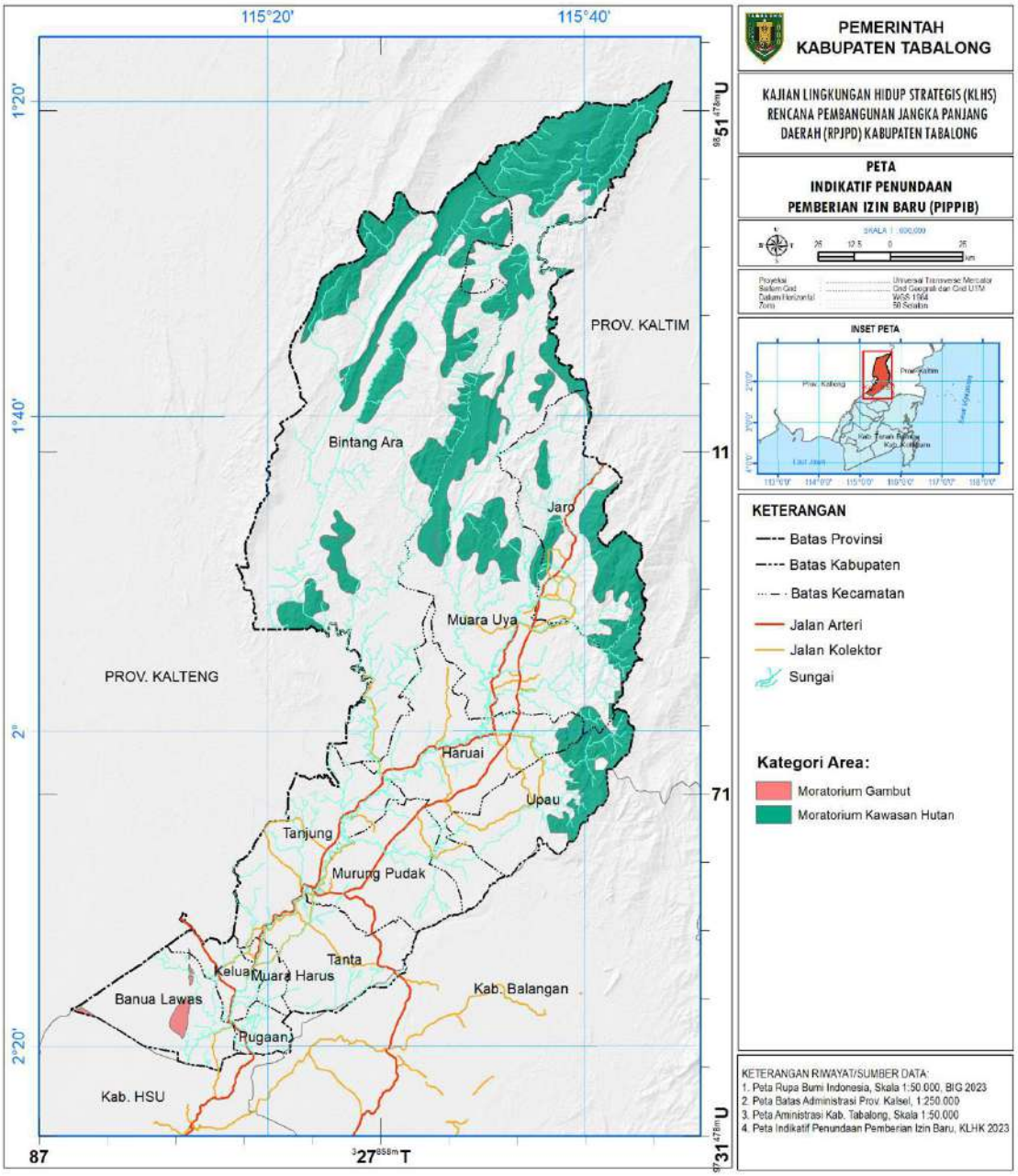

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

4. *Forest and Other Land Use* (FOLU)

Forest and Other Land Use (FOLU) adalah konsep yang berkaitan erat dengan pengelolaan hutan dan lahan secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan ramah lingkungan. FOLU mengakui pentingnya hutan dan lahan dalam menyediakan berbagai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan,

termasuk sebagai habitat satwa liar, penyerap karbon, sumber air, serta sumber daya alam yang penting. Pengelolaan yang bijaksana terhadap hutan dan lahan melalui pendekatan FOLU bertujuan untuk menjaga fungsi-fungsi tersebut sambil memenuhi kebutuhan manusia.

Kabupaten Tabalong mendukung kegiatan FOLU seluas 412.075,04 hektar seperti dirincikan per kecamatan pada tabel di bawah.

Tabel 2.33
Luas dan persentase FOLU per kecamatan di Kabupaten Tabalong

No.	Kecamatan	Luas (ha)	Persentase (%)
1	Banua Lawas	8.407,13	4,63
2	Bintang Ara	84.551,01	46,57
3	Haruai	1.990,49	1,10
4	Jaro	17.548,17	9,66
5	Kelua	170,57	0,09
6	Muara Uya	59.603,75	32,83
7	Tanjung	2.682,21	1,48
8	Tanta	245,23	0,14
9	Upau	6.368,16	3,51
Kabupaten Tabalong		**181.566,73**	**100,00**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Data di atas menunjukkan distribusi luas FOLU di Kabupaten Tabalong, dengan total luas mencapai 181.566,73 Ha. Kecamatan Bintang Ara mencatatkan persentase terbesar dengan 46,57%, yang berarti hampir setengah dari luas wilayah Kabupaten Tabalong berada di kecamatan ini. Sementara itu, Kecamatan Kelua dan Tanta memiliki luas yang sangat kecil, masing-masing hanya 0,09% dan 0,14%. Kecamatan lain seperti Muara Uya, Jaro, dan Banua Lawas juga memiliki kontribusi signifikan terhadap total luas, masing-masing dengan persentase 32,83%, 9,66%, dan 4,63%. Distribusi ini memberikan gambaran tentang karakteristik geografis Kabupaten Tabalong dengan beberapa kecamatan memiliki luas yang lebih besar, memungkinkan mereka untuk mengelola sumber daya alam dan potensi pembangunan yang lebih luas, sedangkan kecamatan dengan luas kecil mungkin memerlukan pendekatan khusus dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Gambar 2.19
***Forest and Other Land Use* (FOLU)**

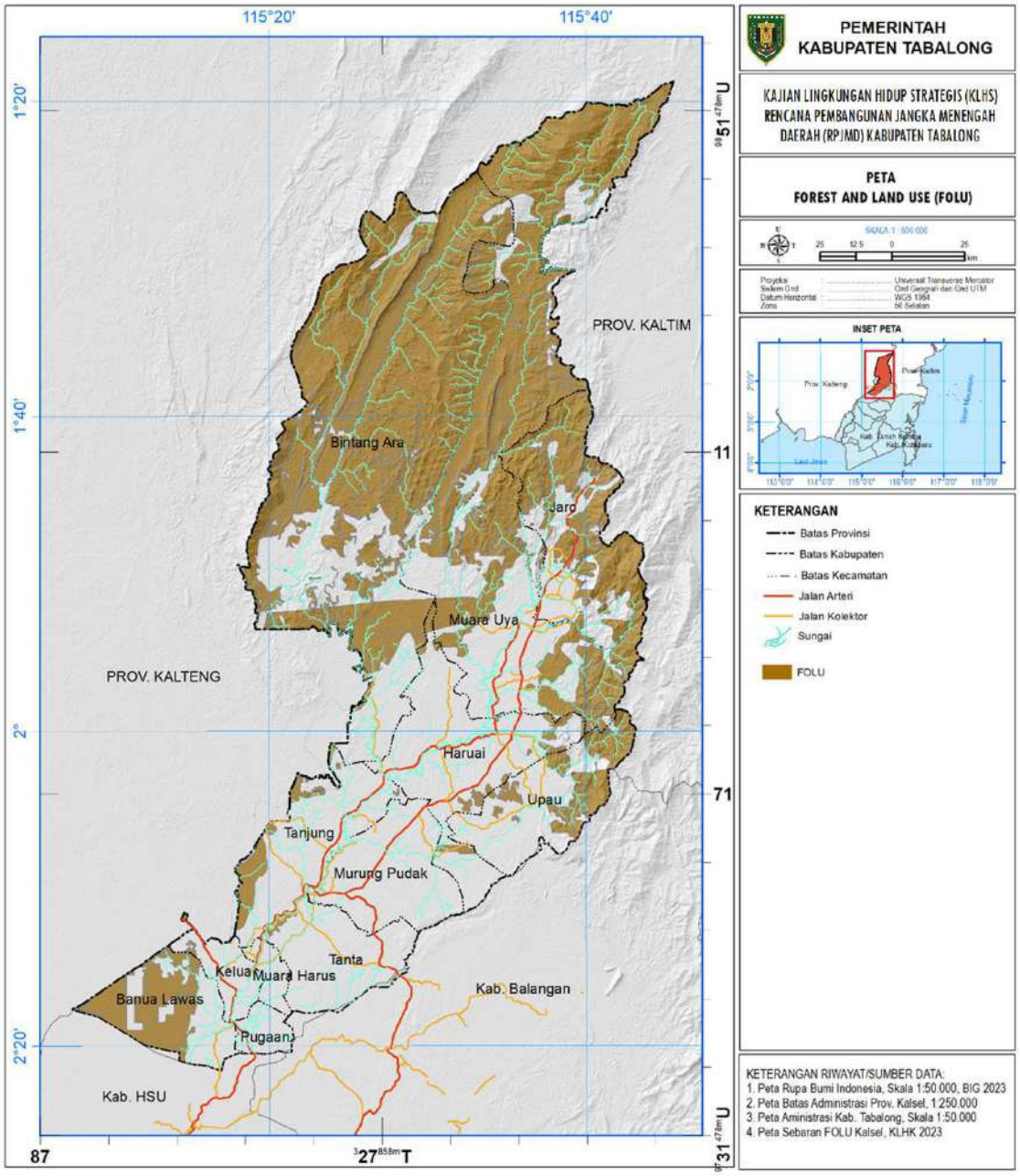

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

5. Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG)

Wilayah Kabupaten Tabalong bagian Selatan berada pada Kesatuan Hidrologi Gambut berada pada bagian Selatan, tepatnya pada kecamatan Banua Lawas. Luas keseluruhan wilayah KHG di Kabupaten Tabalong sebesar 12.383,84 Ha. Kesatuan hidrologi gambut di Tabalong adalah KHG Sungai Utar - Sungai Serapat yang memiliki karakteristik yang unik dan penting bagi ekosistem regional. Daerah ini dipengaruhi oleh sejumlah sungai besar, seperti Sungai Barito dan Sungai Tabalong, yang memainkan peran utama dalam siklus air dan hidrologi gambut di wilayah tersebut.

Pemahaman yang mendalam tentang kesatuan hidrologi gambut di Kabupaten Tabalong penting untuk mendukung upaya konservasi, restorasi, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Perlunya pemantauan terus-menerus terhadap perubahan hidrologi, pembatasan eksploitasi lahan gambut yang berlebihan, dan perlindungan terhadap ekosistem gambut yang semakin terancam adalah aspek-aspek penting dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kabupaten Tabalong.

2.1.2.7. Demografi

Penduduk Kabupaten Tabalong berdasarkan hasil sensus penduduk oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 berjumlah 264.694 jiwa yang terdiri atas 133.747 jiwa penduduk laki-laki dan 130.947 jiwa penduduk perempuan. Dari 12 kecamatan, penduduk terbanyak ada di Kecamatan Murung Pudak yaitu sebanyak 58.451 jiwa atau sebesar 22,08% dari total penduduk Kabupaten Tabalong. Sedangkan jumlah penduduk terkecil yaitu di Kecamatan Muara Harus sebanyak 7.209 jiwa atau sebesar 2,72% dari total penduduk di Kabupaten Tabalong.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tabalong tahun 2024 mencapai 74,46 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk di 12 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi pada wilayah

Kecamatan Kelua dengan kepadatan sebesar 483,57 jiwa/km^2 dan terendah di Kecamatan Bintang Ara sebesar 8,24 jiwa/km^2. Jumlah persentase dan kepadatan penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2024 per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.34
Jumlah, Persentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa per km^2)
1.	Banua Lawas	21.220	8,02	140,66
2.	Pugaan	7.819	2,95	245,34
3.	Kelua	25.818	9,75	483,57
4.	Muara Harus	7.209	2,72	269,19
5.	Tanta	24.013	9,07	160,39
6.	Tanjung	37.577	14,20	196,03
7.	Murung Pudak	58.451	22,08	338,89
8.	Haruai	24.567	9,28	90,33
9.	Bintang Ara	9.638	3,64	8,24
10.	Upau	7.776	2,94	42,49
11.	Muara Uya	24.771	9,36	28,24
12.	Jaro	15.835	5,98	57,74
	Kabupaten Tabalong	**264.694**	**100**	**74,46**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, Indikator Kesejahteraan Rakyat Tahun 2024

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Indikator laju pertumbuhan penduduk berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan.

Tabel 2.35
Perkembangan Penduduk Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Jumlah Rumah Tangga	Kepadatan org/km²	Laju pertum-buhan (%)
		Laki2	Perempuan	Total			
1.	2020	128.547	124.758	253.305	67.613	64,19	1,48
2.	2021	130.327	126.576	256.903	68.330	65,10	1,48
3	2022	132.537	128.816	261.353	69.514	69,38	1,50
4	2023	132.569	130.062	262.631	86.929	74,00	4,47
5	2024	133.747	130.947	264.694	87.826	74,46	1,20

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

Kepadatan penduduk selama beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 kepadatan penduduk Tabalong sebesar 64,19 orang/km^2 dan bertambah hingga mencapai 74,46 orang/km^2 pada tahun 2024.

Tabel 2.36
Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk					Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)			
	2020	2021	2022	2023	2024	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Banua Lawas	20.201	20.420	20.704	21.112	21.220	0,81	0,90	1,93	0,26
Pugaan	7.443	7.541	7.663	7.811	7.819	0,99	1,02	1,98	0,05
Kelua	24.911	25.134	25.436	25.702	25.818	0,67	0,66	4,48	0,23
Muara Harus	6.795	6.886	6.999	7.188	7.209	1,00	0,98	1,28	0,15
Tanta	22.168	22.710	23.335	23.614	24.013	1,83	1,99	6,42	0,84
Tanjung	35.899	36.239	36.692	37.367	37.577	0,71	0,9	10,29	0,28
Murung Pudak	56.790	58.099	59.622	57.721	58.451	1,72	1,81	4,91	0,63
Haruai	23.688	24.022	24.434	24.486	24.567	1,06	0,88	3,81	0,17
Bintang Ara	9.146	9.269	9.422	9.479	9.638	1,01	1,09	1,67	0,83
Upau	7.366	7.395	7.446	7.752	7.776	0,30	0,32	2,35	0,15
Muara Uya	23.839	24.049	24.334	24.668	24.771	0,66	0,71	1,95	0,21
Jaro	15.059	15.139	15.266	15.731	15.835	0,40	0,36	1,64	0,33
Tabalong	**253.305**	**256.903**	**261.353**	**262.631**	**264.694**	**1,06**	**1,50**	**4,47**	**1,20**

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2024, dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Murung Pudak yaitu 58.451 jiwa. Kemudian disusul oleh

Kecamatan Tanjung sebanyak 37.577 jiwa. Berdasarkan struktur usia penduduk, penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 didominasi oleh kelompok usia 10-14 tahun yaitu sebanyak 24.532 jiwa. Sedangkan kelompok usia produktif 15-64 tahun didominasi oleh kelompok usia 20-24 tahun sebanyak 22.902 jiwa.

Tabel 2.37
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Total
0-4	8.937	8.409	17.382
5-9	12.219	11.260	23.479
10-14	12.688	11.844	24.532
15-19	10.289	9.702	19.991
20-24	11.831	11.071	22.902
25-29	10.508	10.019	20.527
30-34	10.527	10.918	21.445
35-39	10.896	11.062	21.958
40-44	10.464	10.288	20.752
45-49	9.608	9.303	18.911
50-54	8.496	8.130	16.626
55-59	6.497	6.527	13.024
60-64	4.809	4.957	9.766
65-69	3.043	3.305	6.348
70-74	1.651	1.969	3.620
75+	1.248	2.183	3.431
Total	**133.747**	**130.062**	**264.694**

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

2.1.3. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.3.1. Kesejahteraan Ekonomi

A. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk PDRB, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB ADHK digunakan untuk

menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun, PDRB ADHB menunjukkan kemampuan sumberdaya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah.

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun terakhir berfluktuasi. Pada tahun 2020, perekomian dunia mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19. Mulai tahun 2021, aktivitas ekonomi mulai meningkat. Berbagai upaya pemulihan ekonomi dimasa pandemi terus dilakukan. Hal ini berdampak positif, dimana hampir semua lapangan usaha terus menunjukkan arah positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Nilai PDRB ADHB pada tahun 2024 mencapai 32,64 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,84 triliun rupiah dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 31,02 triliun rupiah. Peningkatan nilai PDRB ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Tabalong semakin berkembang dan maju di tahun 2024. Selanjutnya, PDRB ADHK 2010 juga mengalami kenaikan dari 16,51 triliun rupiah pada tahun 2023 menjadi 17,32 triliun rupiah pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan selama tahun 2024, Kabupaten Tabalong mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 4,87%. Pertumbuhan ini murni disebabkan meningkatnya produksi di setiap kategori lapangan usaha tanpa memperhatikan efek inflasi.

Lebih rinci data perkembangan PDRB ADHB dan ADHK di Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.38
PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Tahun (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.487,52	1.527,86	1.571,80	1.611,25	1.656,15
B	Pertambangan dan Penggalian	7.174,65	7.273,42	7.678,51	8.044,23	8.395,98
C	Industri Pengolahan	1.116,88	1.176,05	1.234,89	1.243,92	1.290,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,20	6,49	7,00	7,58	8,03
E	Pengadaan Air	41,49	43,34	44,79	46,86	48,95
F	Konstruksi	794,20	836,59	874,13	943,45	1.016,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi	1.047,58	1.139,74	1.232,38	1.326,22	1.387,46
H	Transportasi dan pergudangan	284,93	297,63	314,71	339,06	368,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	216,80	233,26	250,56	275,20	295,79
J	Informasi dan Komunikasi	696,57	755,19	820,59	877,70	936,21
K	Jasa Keuangan	251,92	258,12	261,69	275,71	290,03
L	Real Estat	178,79	188,15	199,94	212,17	228,98
M,N	Jasa Perusahaan	36,59	39,46	41,45	44,83	47,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	481,51	483,78	482,42	505,73	540,44
P	Jasa Pendidikan	471,86	486,20	506,97	524,74	555,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	99,73	109,42	117,41	123,90	130,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	94,10	99,61	106,47	114,40	124,06
PDRB		**14.481,31**	**14.954,31**	**15.745,72**	**16.516,95**	**17.320,79**

Sumber: Kabupaten Tabalong dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.39
PDRB Sektoral Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Tahun (Miliar Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.961,31	2.086,04	2.255,36	2.391,86	2.533,16
B	Pertambangan dan Penggalian	7.266,73	8.686,32	16.937,22	17.705,90	18.299,53
C	Industri Pengolahan	1.587,70	1.723,91	1.846,56	1.832,73	1.946,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,41	11,19	12,17	13,26	14,10
E	Pengadaan Air	58,58	61,84	64,38	69,40	72,81
F	Konstruksi	1.167,74	1.259,58	1.352,73	1.507,75	1.663,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi	1.594,14	1.755,79	2.001,16	2.328,05	2.484,29
H	Transportasi dan pergudangan	419,68	441,82	495,19	598,67	686,72
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	316,37	346,21	380,46	423,94	464,92
J	Informasi dan Komunikasi	876,37	954,72	1.062,02	1.152,73	1.231,14
K	Jasa Keuangan	380,21	406,44	442,00	472,75	501,28
L	Real Estat	247,75	265,36	287,70	312,97	349,30
M,N	Jasa Perusahaan	59,50	65,18	71,22	81,07	88,56
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	780,26	794,43	807,67	880,14	965,90
P	Jasa Penidikan	714,13	750,95	792,87	841,10	897,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	152,18	170,48	185,22	201,36	218,42
R,S,T,U	Jasa lainnya	149,36	159,69	178,36	201,59	226,43
PDRB		**17.742,46**	**19.939,94**	**29.172,29**	**31.015,26**	**32.643,48**

Sumber: Kabupaten Tabalong dalam Angka Tahun 2025

Ritme ekonomi global membawa dampak yang menyebar ke berbagai negara/wilayah. Hal ini disebabkan semakin terintegrasinya perekonomian antar negara sebagai konsekuensi dari semakin terbukanya perekonomian negara di dunia. Perekonomian Kabupaten Tabalong sebagai salah satu bagian dari perekonomian nasional juga menerima dampak dari pergerakan ekonomi global. Kategori lapangan usaha pertambangan (batubara dan minyak bumi) yang menjadi lapangan usaha dominan dalam perekonomian Kabupaten Tabalong sangat dipengaruhi oleh arus perdagangan (ekspor) sehingga rentan terhadap krisis global.

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Tabalong selama 5 tahun terakhir berfluktuasi. Pada 2020, perekonomian dunia mengalami *shock* akibat adanya pandemi COVID-19. Mulai tahun 2021, aktivitas ekonomi mulai mengalami peningkatan, berbagai upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini terus dilakukan. Pemerintah pun turut berperan serta aktif mendorong pelaku usaha untuk terus meningkatkan produksinya. Hal ini berdampak positif dimana hampir semua lapangan usaha terus menunjukkan arah positif dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pertumbuhan Kabupaten Tabalong tahun 2024 sebesar 4,87%.

Jika kita lihat menurut lapangan usaha, hampir semua kategori lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2024. Meningkatnya komoditas ekspor luar negeri yang utamanya batubara, karet, CPO menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tabalong. Selain itu kontribusi peningkatan aktivitas sektor lain turut serta meningkatkan perekonomian Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 seperti pertanian, sektor industri lain, pengadaan listrik, pengadaan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi komunikasi, jasa keuangan, real estat, jasa perusahaan, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

Lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang

memberikan kontribusi terbesar masih tumbuh positif walaupun mengalami perlambatan di tahun 2024. Hal tersebut disebabkan pertumbuhan produksi batu bara 2024 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2023. Harga batu bara pada tahun 2024 juga kembali mengalami penurunan. Kondisi tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap produksi batu bara karena permintaan batu bara masih cukup tinggi di pasar global.

Pada sektor pertanian menunjukkan kinerja yang semakin membaik di tahun 2024. Pada tahun 2024, sektor tersebut tumbuh lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini didukung dengan dari meningkatnya produksi yang signifikan pada komuditas peternakan, kehutanan dan perikanan.

Jika dilihat dari pertumbuhannya, tiga lapangan usaha yang tumbuh positif dan memiliki pertumbuhan terbesar adalah Transportasi dan Pergudangan (8,68%); Jasa Lainnya (8,45%); dan Real Estat (7,92%).

Tabel 2.40
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Pertumbuhan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	-1,99	2,71	2,88	2,51	2,79
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,13	1,38	5,57	4,76	4,37
C	Industri Pengolahan	-3,50	5,30	5,00	0,73	3,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,71	4,74	7,85	8,29	5,91
E	Pengadaan Air	7,52	4,46	3,34	4,63	4,46
F	Konstruksi	-1,83	5,34	4,49	7,93	7,75
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi	-2,30	8,80	8,13	7,61	4,62
H	Transportasi dan pergudangan	-4,47	4,45	5,74	7,74	8,68
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,91	7,59	7,42	9,83	7,48
J	Informasi dan Komunikasi	8,02	8,41	8,66	6,96	6,67
K	Jasa keuangan	2,52	2,46	1,38	5,36	5,20
L	Real Estat	3,16	5,24	6,26	6,12	7,92
M,N	Jasa Perusahaan	-1,35	7,85	5,06	8,15	6,13
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,77	0,47	-0,28	4,83	6,86

Lapangan Usaha		Pertumbuhan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024
P	Jasa Pendidikan	-0,78	3,04	4,27	3,50	5,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,22	9,71	7,30	5,53	5,54
R,S,T,U	Jasa lainnya	-2,53	5,86	6,88	7,45	8,45
Pertumbuhan Ekonomi Tabalong		**-2,50**	**3,27**	**5,29**	**4,90**	**4,87**

Sumber: Kabupaten Tabalong dalam Angka Tahun 2025

Peningkatan kinerja di sektor Transportasi dan Pergudangan disebabkan oleh telah beroperasinya layanan LANGSAT MANIS secara penuh dalam setahun di Kabupaten Tabalong. Fenomena lain yang juga mendukung peningkatan aktivitas di bidang Jasa Lainnya adalah adanya festival kesenian dan acara keolahragaan baru yang lebih megah di Kabupaten Tabalong, seperti Tabalong Fun Run dan Kejuaraan renang Tirta Samudra.

Pertumbuhan signifikan juga terjadi di sektor Real Estat pada tahun 2024. Peningkatan aktivitas ini terjadi karena banyaknya penyewaan ruko di Kabupaten Tabalong. Sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh juga berpengaruh pada sektor Real Estat karena mayoritas pekerja sektor tersebut tinggal di asrama atau rumah kos. Penjualan unit rumah juga makin berkembang di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024.

Bila pertumbuhan ekonomi Tabalong dibandingkan dengan provinsi dan nasional, maka data menunjukkan pada kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 selalu berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Namun untuk tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebesar 4,90%, sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan hanya 4,84% dan Nasional berada sedikit lebih tinggi di angka 5,04%. Kondisi tersebut mengalami perubahan pada tahun 2024, dimana pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tabalong yang hanya sebesar 4,87%, capaiannya juga berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi

Kalimantan Selatan yang mencapai 5,05% dan nasional yang juga mencapai 5,03%.

Gambar 2.20
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia Tahun 2020-2024

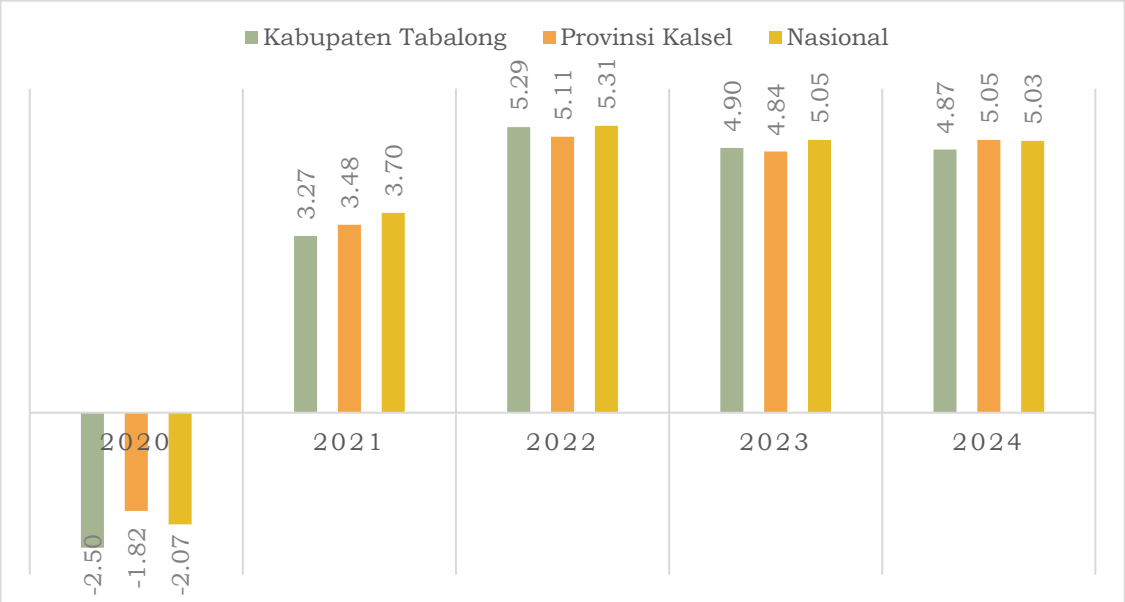

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, BPS Kalsel dan BPS RI tahun 2025

Tabel 2.41
Peran PDRB ADHB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	11,05	10,46	7,73	7,71	7,76
B	Pertambangan dan Penggalian	40,96	43,55	58,06	57,09	56,06
C	Industri Pengolahan	8,95	8,65	6,33	5,91	5,96
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04
E	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,33	0,31	0,22	0,22	0,22
F	Konstruksi	6,58	6,32	4,64	4,86	5,10
G	Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi	8,98	8,81	6,86	7,51	7,61
H	Transportasi dan Pergudangan	2,37	2,22	1,70	1,93	2,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,78	1,74	1,30	1,37	1,42
J	Informasi dan Komunikasi	4,94	4,79	3,64	3,72	3,77
K	Jasa Keuangan dan asuransi	2,14	2,04	1,52	1,52	1,54
L	Real Estat	1,40	1,33	0,99	1,01	1,07
M,N	Jasa Perusahaan	0,34	0,33	0,24	0,26	0,27

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,40	3,99	2,77	2,84	2,96
P	Jasa Pendidikan	4,03	3,77	2,72	2,71	2,75
Q	Jasa Kesehatan danKegiatan Sosial	0,86	0,86	0,63	0,65	0,67
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,84	0,80	0,61	0,65	0,69
PDRB		**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Sumber: Kabupaten Tabalong dalam Angka Tahun 2025

Selanjutnya, struktur perekonomian Kabupaten Tabalong pada periode 2020 sampai 2024 menunjukkan 3 (tiga) Lapangan Usaha yang paling besar kontribusinya meliputi Pertambangan dan Penggalian; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan Perdagangan Besar, Eceran dan Reparasi. Kategori pertambangan dan penggalian merupakan kategori yang memberikan sumbangan terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Tabalong selama lima tahun terakhir (2020-2024). Kategori tersebut sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Kabupaten Tabalong dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas pertambangan yang diproduksi Kabupaten Tabalong mengalir melalui keran ekspor ke Cina, India dan Jepang.

Sektor pertanian merupakan kategori yang menyumbang terbesar kedua setelah pertambangan dan penggalian terhadap perekonomian di Kabupaten Tabalong. Sumbangan sektor pertanian terhadap perekonomian Tabalong di tahun 2024 sebesar 7,76% sedikit meningkat dibanding tahun 2023 yang sebesar 7,71%.

Data distribusi PDRB Kabupaten Tabalong memperlihatkan bahwa kategori perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian; dan pertanian. Sejak 2020 kategori lapangan usaha perdagangan menggeser lapangan usaha indsutri pengolahan yang sebelumnya berada di urutan ketiga sampai dengan tahun 2019. Kontribusi kedua kategori tersebut memang pada tahun 2024 memiliki gap yang cukup signifikan, kontribusi lapangan usaha industri pengolahan adalah 5,96% dan

lapangan usaha perdagangan adalah 7,61%.

Gap antara kontribusi kategori perdagangan dan pertanian terhadap PDRB Kabupaten Tabalong juga perlu menjadi perhatian karena perbedaan yang semakin kecil di setiap tahunnya. Jika kebijakan pembangunan di lapangan usaha pertanian tidak ditingkatkan secara optimal, potensi pergeseran struktur ekonomi akan terjadi di beberapa tahun ke depan.

B. PDRB Per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tabalong selama tahun 2021-2024 terus meningkat. Pasca pandemi COVID-19 PDRB per kapita Kabupaten Tabalong terus mengalami kenaikan. PDRB per kapita harga berlaku pada tahun 2024 sebesar 122,31 juta rupiah dengan jumlah penduduk sebesar 266,89 ribu jiwa. Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 117,75 juta rupiah. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan aktivitas perekonomian pada hampir seluruh sektor di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024. Berdasarkan nilai ini, Kabupaten Tabalong masuk ke dalam kategori daerah berpendapatan menengah tinggi.

Dari sisi PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan, pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Tabalong selalu tumbuh positif selama periode 2021-2024. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika perekonomian Kabupaten Tabalong yang semakin baik dan terus berkembang sejak pasca adanya pandemi COVID-19 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 2.42
PDRB Per Kapita Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023*	2024**
Nllai PDRB (Juta Rupiah)					
- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	17.742,46	19.934,94	29.172,29	31.015,26	32.643,48
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK2010)	14.481,31	14.954,31	15.745,72	16.516,95	17.320,79
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					

Tahun	2020	2021	2022	2023*	2024**
- Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	70.285,25	77.829,88	112.269,78	117.748,32	122.312,89
- Atas Dasar Harga Konstan (ADHK2010)	57.366,49	58.369,89	60.597,54	62.706,01	64.899,83
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK2010	-2,58	1,75	3,82	3,48	3,50
Jumlah Penduduk (ribu orang)	**252,44**	**256,20**	**259,84**	**263,40**	**266,89**
Pertumbuhan Penduduk (%)	**0,08**	**1,49**	**1,42**	**1,37**	**1,32**

Sumber: Produk Dometik Regional Bruto Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha 2020-2024

C. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran Terbuka (PT) terdiri dari (a). Mereka yang mencari pekerjaan; (b). Mereka yang mempersiapkan usaha; (c). Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

Kesempatan kerja di Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun terjadi fluktuasi untuk persentase penduduk yang bekerja. Demikian juga dengan angka pengangguran yang persentasenya ikut berfluktuasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan persentase penduduk yang bekerja, berbanding lurus dengan meningkatnya persentase angka pengangguran, demikian juga sebaliknya.

Dari data terlihat bahwa pada tahun 2024 TPT di Kabupaten Tabalong sebesar 3,44%, angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2022 yang besarnya 4,46%. Menurut penjelasan BPS Kabupaten Tabalong, diketahui bahwa jumlah penduduk angkatan kerja meningkat dari 129.928 orang pada tahun 2020 menjadi 145.224 orang pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi penduduk yang semula bukan angkatan kerja bergeser menjadi angkatan kerja yang merupakan salah satu penyebab menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 2.43
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, TPAK, dan TPT
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (jiwa)	129.928	136.032	139. 542	140.493	145.224
Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	125.937	131.366	133 .323	135.441	140.224
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69,27	71,49	72,32	72,94	74,17
Jumlah Penduduk Pengangguran/Mencari Kerja (Jiwa)	3.991	4.666	6.219	5.052	5.000
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,07	3,43	4,46	3,60	3,44

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2023 dan Kabupaten Tabalong Dalam Angka 2025

Berdasarkan gambar di bawah, dapat dijelaskan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu tahun 2020-2024 apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, maka TPT Kabupaten Tabalong selalu berada paling rendah.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan maka TPT Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 berada pada peringkat ke-7. Adapun Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Selatan yang memiliki TPT paling rendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan (2,11%), Kabupaten Balangan (2,69%) dan Kabupaten Banjar (2,71%).

Gambar 2.21
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia Tahun 2020-2024

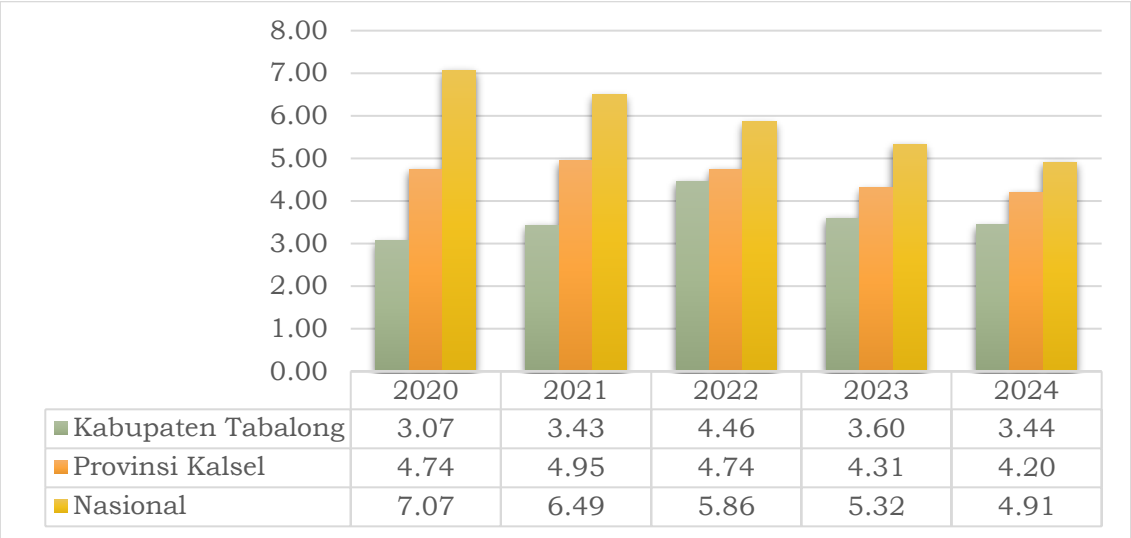

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tabalong	3.07	3.43	4.46	3.60	3.44
Provinsi Kalsel	4.74	4.95	4.74	4.31	4.20
Nasional	7.07	6.49	5.86	5.32	4.91

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, BPS Kalsel dan BPS RI, 2025

D. Indeks Gini

Pada Tahun 2020-2024 ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tabalong masih dalam kategori ketimpangan rendah. Angka Gini Ratio tahun 2021 sebesar 0,288 menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk tahun 2022, gini ratio mengalami peningkatan dibanding tahun 2021. Berdasarkan penjelasan BPS Kabupaten Tabalong, meskipun meningkat, namun berdasarkan standar penilaian ketimpangan di atas, masih termasuk sebagai ketimpangan yang rendah. Peningkatan Indeks Gini ini dimulai sejak Presiden RI Joko Widodo resmi mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia. Pencabutan PPKM ini mendorong penduduk khususnya penduduk kelompok 20% teratas untuk melakukan berbagai aktivitas seperti perjalanan dan peningkatan pengeluaran non makan secara signifikan. Selanjutnya pada tahun 2023 ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tabalong kembali mengalami penurunan hingga menjadi 0,284. Namun meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 0,300.

Selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tabalong selalu berada

dibawah ketimpangan distribusi pendapatan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional. Hanya pada tahun 2022 dan 2024 ketimpangan distribusi pendapatan Kabupaten Tabalong berada diatas Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Gambar 2.22
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Tabalong,
Provinsi Kalimantan Selatan, dan Indonesia Tahun 2020-2024

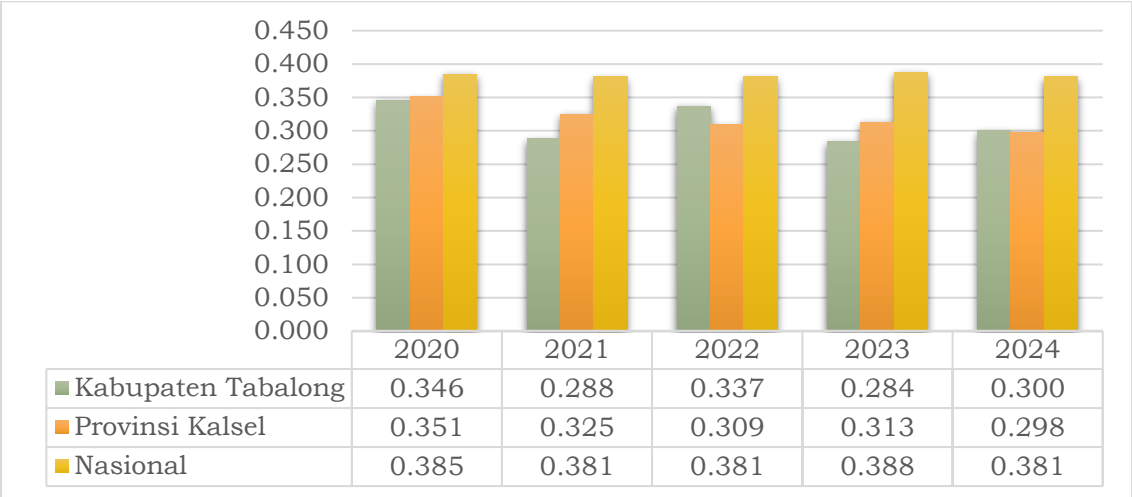

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tabalong	0.346	0.288	0.337	0.284	0.300
Provinsi Kalsel	0.351	0.325	0.309	0.313	0.298
Nasional	0.385	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, BPS Kalsel, BPS RI tahun 2025 dan LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Pada tahun 2023 Indeks gini Kabupaten Tabalong yang sebesar 0,284 terhadap Indeks gini kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan berada di posisi ke-7 dengan Indeks gini terendah. Adapun Indeks gini paling rendah yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah (0,225), Kabupaten Balangan (258), Kabupaten Tanah Laut (0,259), Kabupaten Hulu Sungai Utara (0,271), Kabupaten Tanah Bumbu (0,280), dan Kabupaten Tapin (281). Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.23
Indeks Gini Kabupaten Tabalong Terhadap Daerah Lain dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

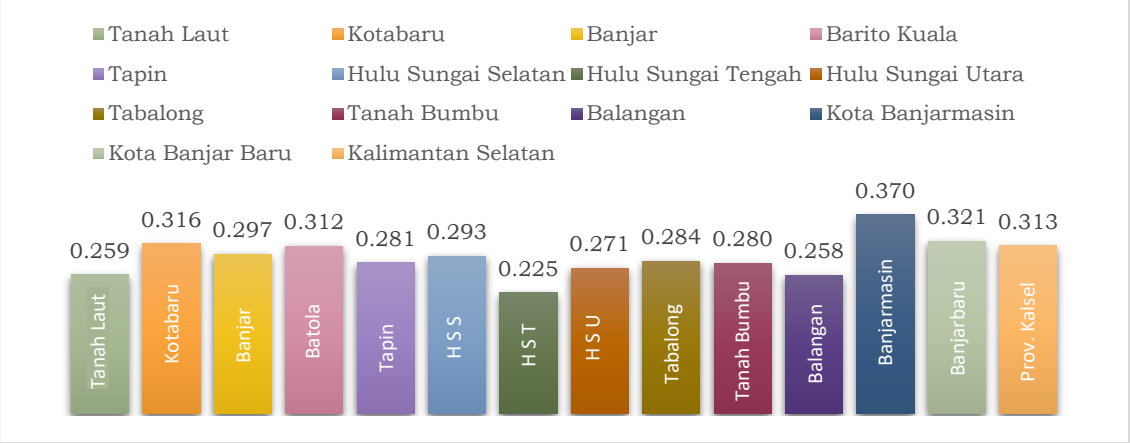

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, BPS Kalsel dan BPS RI tahun 2024

E. Kemiskinan

Apabila dilihat dari perkembangannya selama beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin selama periode 2020-2024 berfluktuasi dengan garis kemiskinan yang semakin meningkat. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin yaitu 14.700 jiwa, sedangkan garis kemiskinan yaitu sebesar Rp531.190,00/kapita/bulan, namun pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin naik menjadi 16.130 jiwa, seiring meningkatnya garis kemiskinan menjadi Rp542.800,00/perkapita/bulan, sehingga banyak penduduk yang pada tahun 2020 berada diposisi hampir miskin, masuk menjadi penduduk miskin, bahkan ada penduduk yang semula tidak masuk kategori miskin menjadi penduduk miskin. Pada tahun 2022 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 15.240 jiwa, padahal angka garis kemiskinan meningkat menjadi Rp573.018,00/perkapita/bulan dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 15.150 jiwa dengan angka garis kemiskinan yang kembali meningkat menjadi Rp615.912,00/perkapita/bulan. Selanjutnya pada tahun 2024 jumlah penduduk miskin kembali turun menjadi 14.970 jiwa, sedangkan angka garis kemiskinan kembali meningkat menjadi Rp637.132,00/perkapita/bulan.

Tabel 2.44
Indikator Kemiskinan Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	531.190	542.800	573.018	615.912	637.132
Penduduk Miskin (jiwa)	14.700	16.130	15.240	15.150	14,970
Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,72	6,27	5,87	5,77	5,64
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,72	1,08	0,70	0,46	0,95
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,21	0,24	0,15	0,09	0,20

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2025

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabalong selama periode tahun 2020-2024 selalu berada diatas apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan. Namun apabila dibandingkan dengan persentase penduduk miskin nasional, angkanya selalu berada dibawah persentase penduduk miskin nasional. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.24
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan dan Indonesia Tahun 2020-2024

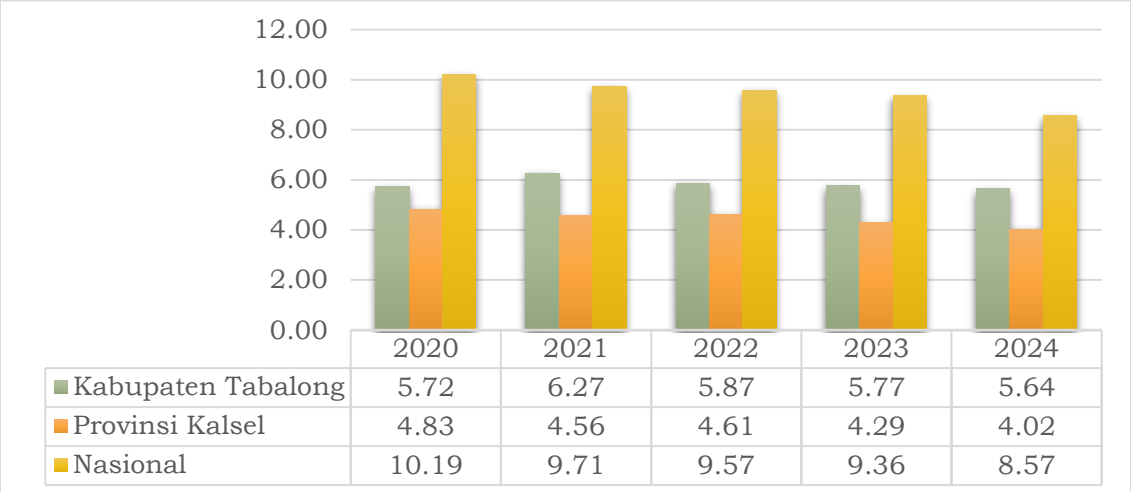

Sumber: BPS RI, BPS Kalimantan Selatan dan BPS Tabalong 2025

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, maka pada tahun 2024 Angka Kemiskinan di Kabupaten Tabalong sebesar 5,64% berada pada posisi ketiga tertinggi

di Provinsi Kalimantan Selatan dan lebih tinggi dari angka kemiskinan provinsi yang mencapai 4,02%. Namun angka kemiskinan Tabalong masih lebih rendah jika dibandingkan persentase Nasional yaitu 8,57%.

Indikator kemiskinan lainnya adalah P1 atau Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah koefisien yang menyatakan jarak atau kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin besar nilai koefisien tersebut maka semakin lebar kesenjangan antara rata–rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah 0,95. Indeks ini lebih tinggi dari indeks pada tahun 2023 yang sebesar 0,46.

Strategi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tabalong sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020, terdiri dari (1) Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin; (2) Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; (3) Pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; (4) Sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan. Strategi tersebut diformulasikan menjadi 3 kelompok program yaitu:

1. Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu Berbasis Rumah Tangga, Keluarga, atau Individu Yang Bertujuan Untuk Melakukan Pemenuhan Hak Dasar, Pengurangan Beban Hidup, dan Perbaikan Kualitas Hidup Masyarakat Miskin.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Yang Bertujuan Untuk Memperkuat Kapasitas Kelompok Masyarakat Miskin Untuk Terlibat dan Mengambil Manfaat dari Proses Pembangunan.
3. Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

F. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu alat ukur yang dianggap dapat merefleksikan status pembangunan manusia adalah *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Komponen Indeks Pembangunan Manusia adalah umur harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak. IPM Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang terus meningkat, dari 73,84 pada tahun 2020 menjadi 75,97 pada tahun 2024. Bahkan pada periode pandemi COVID-19 tahun 2020 lalu, capaian IPM Kabupaten Tabalong tetap meningkat dari tahun sebelumnya.

Capaian IPM tahun 2020 sampai 2024 merupakan hasil publikasi terbaru BPS pada akhir tahun 2024 sebagai hasil Long Form Sensus Penduduk Tahun 2020. BPS mempublikasikan perhitungan terbaru IPM seluruh daerah di Indonesia mulai tahun 2020. Hal ini menyebabkan lebih besarnya nilai IPM Kabupaten Tabalong mulai tahun 2020 sampai dengan 2024. Adapun perkembangan IPM Kabupaten Tabalong dan komponen pembentuknya selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.45
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	73,99	74,09	74,45	74,63	74,76
2	Indeks Pendidikan					
	a. Harapan lama sekolah	12,72	12,89	12,90	12,91	12,92
	b. Rata-rata lama sekolah	9,10	9,11	9,12	9,14	9,15
3	Pengeluaran per kapita disesuaikan (Ribu Rp.)	11.283	11.470	11.914	12.507	13.097
Indeks Pembangunan Manusia IPM)		**73,84**	**74,25**	**74,82**	**75,43**	**75,97**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, BPS Kalsel dan BPS RI, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di bawah, nilai IPM Kabupaten Tabalong pada periode tahun 2020-2024 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, IPM Tabalong mencapai 75,97 sementara IPM Kalimantan Selatan sebesar 75,19. Lebih lanjut, capaian IPM Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 menempati posisi 3 (tiga) besar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, setelah Kota Banjarbaru yaitu 81,65 dan Kota Banjarmasin yaitu 80,53.

Gambar 2.25
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional
Tahun 2020-2024

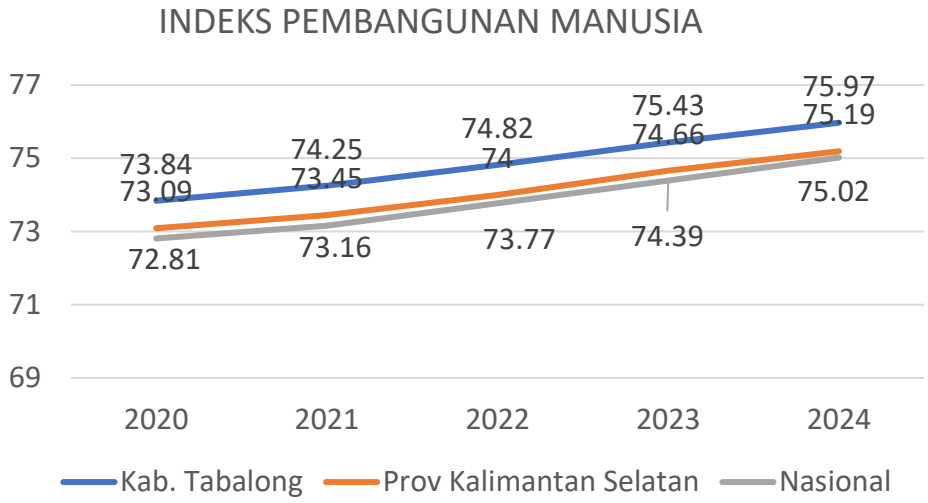

Sumber: BPS Kalsel, 2025

G. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Dalam metode penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Data pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita disesuaikan penduduk Tabalong selama kurun waktu 2020

sampai dengan 2024 mengalami peningkatan. Pada Tahun 2020 mencapai 11.283.000/orang/tahun sementara tahun 2024 mencapai 13.097.000/orang/tahun. Hal ini seiring dengan peningkatan di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.46
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kabupaten Tabalong	11.283	11.470	11.914	12.507	13.097
2	Provinsi Kalimantan Selatan	12.032	12.143	12.469	12.953	13.399

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, dan Provinsi Kalsel 2025

2.1.3.2. Kesehatan Untuk Semua

A. Umur Harapan Hidup

Tren UHH Kabupaten Tabalong tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan peningkatan dari 73,99 tahun pada tahun 2020 hingga mencapai 74,76 tahun pada tahun 2024. Data selengkapnya disajikan pada gambar di bawah. Selama kurun waktu tersebut, UHH Tabalong selalu berada di atas UHH provinsi.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan maka UHH Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 menempati peringkat ke-3 setelah Kota Banjarbaru yaitu 75,11 tahun dan Kota Banjarmasin yaitu 75,07 tahun.

Gambar 2.26
Perkembangan Umur Harapan Hidup Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (tahun)

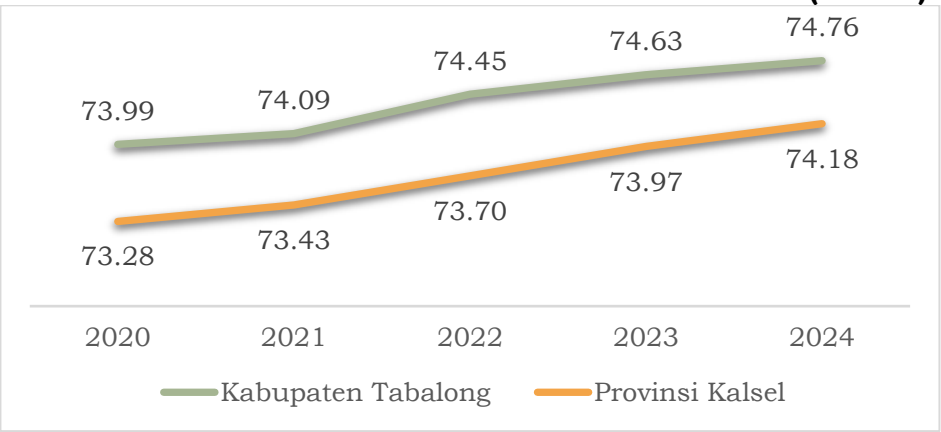

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka UHH perempuan di Tabalong lebih tinggi daripada laki–laki. Pola tersebut juga terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, Nasional bahkan di dunia. Lebih tingginya AHH pada perempuan berdasarkan referensi disebabkan dengan resiko pekerjaan yang menyebabkan kecelakaan pada laki – laki lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan, resiko penyakit kardiovaskuler yang lebih tinggi pada laki–laki, gaya hidup dan juga faktor genetik.

Tabel 2.47
Perbandingan UHH Laki–Laki dan Perempuan (tahun)
Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Lk2	Pr	Lk2	Pr	Lk2	Pr	Lk2	Pr	Lk	Pr
Tabalong	68,46	72,36	71,71	76,58	68,85	72,81	69,34	73,31	69,52	73,50
Kalimantan Selatan	66,76	70,62	71,28	75,68	67,23	71,13	67,49	71,45	67,72	71,67

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2024

B. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH

Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 146 dan mengalami

peningkatan di tahun 2021 menjadi 275 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan hingga menjadi 87. Namun pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 161. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48
Angka Kematian Ibu di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	146	275	135	87	161

Sumber: Lakip Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

C. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan 1995/MENKES/SK/XII/2010.

Berdasarkan data yang tersedia, diketahui bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 sebesar11,50% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 28,2%. Namun pada tahun berikutnya terus menurun sampai mencapai 7,49% di tahun 2024. Perkembangan prevalensi stunting di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 lebih rendah apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.49
Prevalensi Stunting (%) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tabalong	11,50	28,2	19,7	18,1	7,49%
Kalimantan Selatan	12,20*	30,0	24,6	24,7	24,7%

Sumber: Survey Status Gizi Indonesia, Kementerian Kesehatan, 2024

D. Insidensi Tuberkulosis

1. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis adalah Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Adapun Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 yaitu sebesar 39,6%.

2. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis

Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis adalah Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh menyelesaikan pengobatan lengkap. Indikator ini penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah. Adapun Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu sebesar 90%.

E. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional

Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting:

1. Akses Pelayanan Kesehatan:

Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan.

2. Kesadaran Masyarakat:
   Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
3. Komitmen Pemerintah Daerah:
   Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional.
4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC):
   Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Adapun Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 yaitu sebesar 99,4%.

2.1.3.3. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

A. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Tingginya angka RLS menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Angka RLS di Kabupaten Tabalong dari tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan, seperti yang tercantum dalam gambar di bawah ini. Peningkatan dari tahun ke tahun menjadikan rata-rata lama sekolah Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 berada di angka

9,15 tahun. Angka ini menggambarkan bahwa penduduk Tabalong rata-rata telah menyelesaikan pendidikan kelas IX atau tingkat SLTP.

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan maka RLS di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 menempati peringkat ke-3 setelah Kota Banjarbaru yaitu 11 tahun dan Kota Banjarmasin yaitu 10,35 tahun. Selanjutnya, Angka RLS di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 hingga 2024 lebih tinggi dari angka RLS Provinsi Kalimantan Selatan.

Gambar 2.27
Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten Tabalong Tahun 2020- 2024 (tahun)

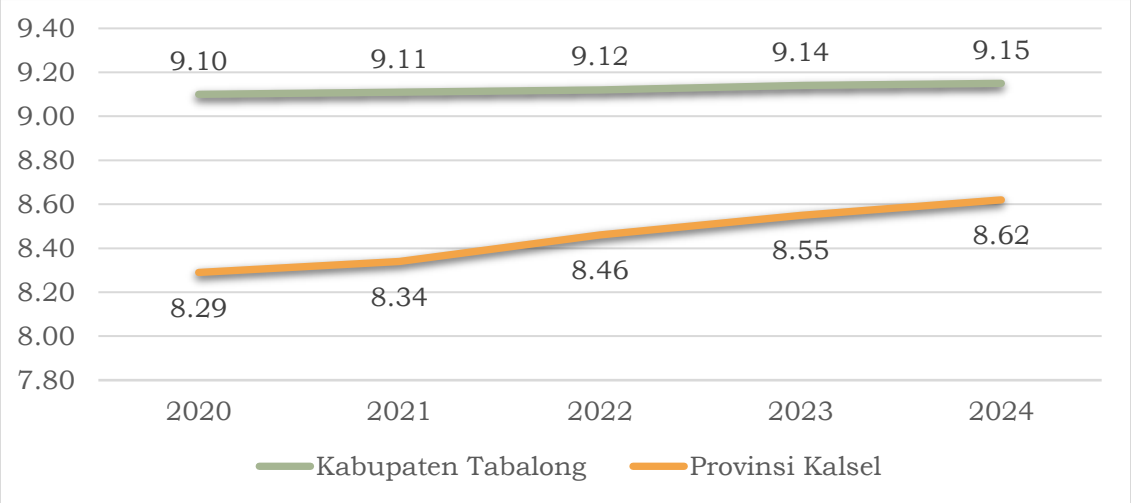

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu (termasuk yang mungkin tidak sesuai usia sekolah) dengan total penduduk usia sekolah pada jenjang tersebut. APK menunjukkan seberapa banyak penduduk secara umum yang berpartisipasi dalam pendidikan di suatu tingkat.

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI

Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Kabupaten Tabalong tahun 2020–2024, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 105,97 dan menurun hingga tahun 2022 menjadi 103,76. Meskipun sempat

meningkat pada tahun 2023, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi hanya 105,27. Perkembangan APK SD/MI di Kabupaten Tabalong tahun 2020–2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Tabalong
Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APK SD/MI	105,97	105,24	103,76	108,66	105,27

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024 dan Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 94,37 dan mengalami kenaikan serta penurunan di tahun berikutnya hingga menjadi 96,17 di tahun 2024. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APK SMP/MTs	94,37	93,15	98,18	94,92	96,17

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024 dan Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

3. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Kasar SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang berfluktuasi. Dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 87,77 dan mengalami kenaikan serta penurunan pada tahun berikutnya menjadi 81,85 di tahun 2024. Perkembangan APK SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK
Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APK SMA/MA/SMK	87,77	89,12	88,75	88,75	81,85

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024 dan Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

C. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni atau APM adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah.

1. Angka Partisipasi Murni SD/MI

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,82 dan mengalami penurunan serta kenaikan di tahun berikutnya hingga menjadi 98,74 pada tahun 2024. Adapun secara lengkap perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.53
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Kabupaten Tabalong
Tahun 2020- 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APM SD/MI	99,82	99,77	99,77	99,52	98,74

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024 dan Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs di Kabupaten Tabalong pada periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. APM SMP/MTs pada tahun 2024 mencapai 82,01 atau menurun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang mencapai 85,70, dengan demikian berdasarkan angka tersebut bahwa penduduk yang berusia 13–15 tahun di Kabupaten Tabalong bersekolah di jenjang SMP/MTs.

Tabel 2.54
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APM SMP/MTs	79,70	78,78	79,36	85,70	82,01

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024 dan Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

3. Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK

Angka Partisipasi Murni SMA/MA/SMK di Kabupaten Tabalong tahun 2020 adalah 61,09, kemudian berdasarkan data terakhir yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, APM SMA/MA/SMK adalah 68,02. Berdasarkan data ini maka pada tahun 2024, penduduk Kabupaten Tabalong berusia 16-18 tahun sekolah di jenjang SMA/MA/SMK.

Tabel 2.55
Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
APM SMA/MA/SMK	61,09	61,55	61,28	65,58	68,02

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024 dan Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2025

D. Angka Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Angka HLS di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren peningkatan. Angka HLS tahun 2020 sebesar 12,72 tahun terus meningkat sehingga mencapai 12,92 tahun pada tahun 2024. Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.28
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 (tahun)

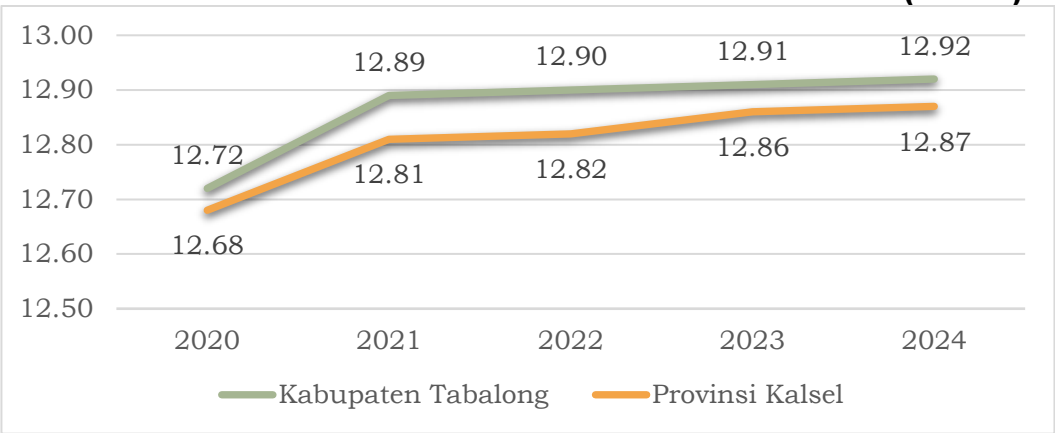

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Bila dibandingkan dengan angka HLS kabupaten/kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, maka HLS Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 menempati peringkat ke-5 setelah Kota Banjarbaru yaitu 14,86 tahun, Kota Banjarmasin yaitu 14,01 tahun, Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu 13,21 dan Kabupaten Banjar yaitu 13,04 Tahun. Selanjutnya, angka HLS di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 ini lebih tinggi daripada HLS Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya 12,87 tahun.

E. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan pendidikan tinggi). Jenjang pendidikan tinggi mencakup: Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3.

F. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

G. Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi.

Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi merupakan jumlah kabupaten/kota di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota di provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasinal untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir

Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada kecamatan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".

H. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi.

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi membaca dan Numerasi merupakan jumlah satuan pendidikan di provinsi X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di

provinsi X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".

I. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Indikator ini menjadi salah satu alat ukur daya saing SDM di Kabupaten Tabalong.

Pada tahun 2023, pencapaian nilai IPLM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 71,29 dan masuk ke dalam kategori Sedang. Tiga kabupaten/kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara 82,34, Kabupaten Tapin 79,60, dan Kabupaten Tabalong 79,04. Selanjutnya, pada tahun 2024, pencapaian IPLM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 81,16 dan masuk dalam kategori Sedang. Pada tahun ini, Kabupaten Tabalong memiliki capaian IPLM sebesar 87,66. Bila dibandingkan dengan tahun 2023, maka IPLM Tabalong tahun 2024 lebih tinggi, yang juga dialami oleh seluruh daerah di Kalimantan Selatan termasuk provinsi.

J. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Melek Huruf adalah 100%.

Dari data pada tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 AMH di Kabupaten Tabalong mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 menjadi 99,51, kemudian pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 98,79 di tahun 2024. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.56
Perkembangan Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Melek Huruf	99.51	98,52	98,87	98,79	98,79

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024

2.1.3.4. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.

B. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu

atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.

2.1.3.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

A. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan.

2.1.3.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

A. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IBANGGA)

Pembangunan kualitas keluarga diarahkan untuk menanamkan dan menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, dan pemenuhan hak anak. Indeks Kualitas Keluarga yang dibahas dalam publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam perencanaan dan evaluasi keberhasilan pembangunan keluarga guna mewujudkan kesetaraan gender serta

pemenuhan hak perempuan dan anak. Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga. Adapun Nilai Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu 66,42.

B. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakoptimalan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender dilihat dari tiga aspek pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, Dimana kondisi pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,523 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,529, namun pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 0,421 di tahun 2024.

Gambar 2.29
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender
Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional
Tahun 2020-2024

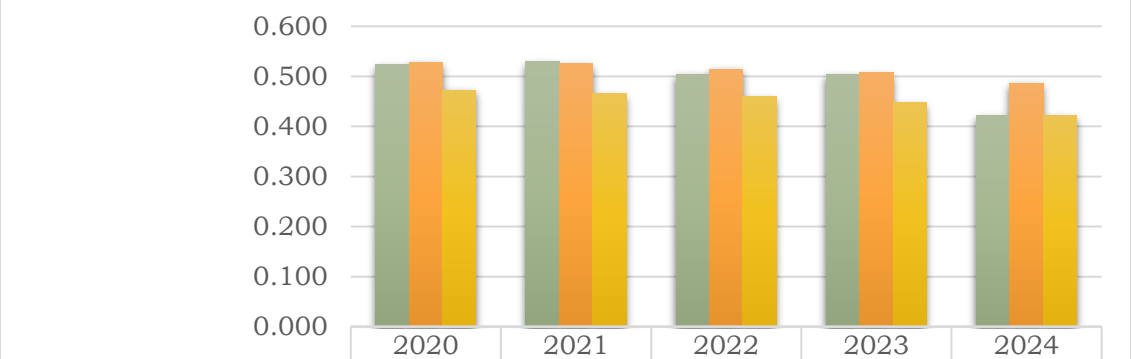

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tabalong	0.523	0.529	0.504	0.503	0.421
Provinsi Kalsel	0.528	0.525	0.514	0.507	0.486
Nasional	0.472	0.465	0.459	0.447	0.421

Sumber: BPS RI, 2025

Capaian Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi

Kalimantan Selatan yang sebesar 0,486 dan nilainya sama dengan Indeks Ketimpangan Gender Nasional yang juga 0,421.

C. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Data IPG dan IDM di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Peningkatan IPG ini sejalan dengan tren peningkatan IPM Kabupaten Tabalong. IPG Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah 87,61 lebih rendah jika dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 90,55. Sedangkan IDG tahun 2024 adalah 75,83 dan lebih tinggi jika dibandingkan dengan IDG Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 75,01.

Selain IPG dan IDG, indikator kinerja DP3AP2KB lain adalah Predikat Kota Layak Anak. Pada tahun 2021 sampai 2024 Kabupaten Tabalong berhasil menjadi Kabupaten/Kota satu–satunya di Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil mencapai Kota Layak Anak dengan predikat Nindya. Kota Layak Anak merupakan kota dengan sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Tabel 2.57
IDG, IPG dan Status Kota Layak Anak di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)					
	- Kabupaten Tabalong	73,39	74,65	74,60	72,54	75,83
	- Prov. Kalsel	74,48	74,58	74,80	75,97	75,01
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)					
	- Kabupaten Tabalong	85,86	86,05	86,72	87,18	87,61
	- Prov. Kalsel	89,15	89,25	89,89	90,17	90,55

No	Indikator	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
3	Status Kota Layak Anak	Tidak Ada	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Sumber: BPS RI, 2025

D. Kontribusi Sektor Pertambangan

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong mencakup komoditas yang dicakup dalam kategori pertambangan dan penggalian, yang dikelompokkan dalam empat sub kategori yaitu, pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam, serta pertambangan dan penggalian lainnya. Sektor pertambangan merupakan sektor utama dalam pemberian kontribusi perekonomian di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.58
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Pertambangan Terhadap PDRB	40,96	43,56	58,06	57,09	56,06

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong memiliki perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Pada awal periode tahun 2020 yaitu sebesar 40,96%dan mengalami peningkatan menjadi 58,06%pada tahun 2022, kemudian pada tahun berikutnya kembali mengalami penurunan hingga menjadi 56,06%pada tahun 2024.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun dan penduduk usia 65 tahun atau lebih) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15–64 tahun). Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Tabalong pada rentang tahun 2020–2024 menunjukkan fluktuasi dan cenderung menurun. Rasio ketergantungan Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah sekitar 42,38 yang berarti bahwa terdapat sekitar 42-43 orang penduduk usia belum/tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif atau dapat dikatakan setiap dua orang tidak produktif ditanggung oleh satu orang produktif.

Tabel 2.59
Rasio Ketergantungan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketergantungan (%)	47,71	46,38	46,51	46,64	42,38

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2021-2025

2.1.4.2. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perindustrian berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100%. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 juga mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 kontribusi sektor perindustrian sebesar 8,95%dan menurun hingga tahun 2023 menjadi 5,91%, namun pada tahun 2024 sedikit mengalami peningkatan menjadi 5,96%.

Tabel 2.60
Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Perindustrian Terhadap PDRB	8,95	8,65	6,33	5,91	5,96

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

B. Pengembangan Pariwisata

1. PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara

Badam Pusat Statistik mendefinisikan wisatawan mancanegara (wisman) adalah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi dan lamanya kunjungan tersebut tidak lebih dari satu tahun (12 bulan).

Kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Tabalong pada sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebanyak 861.065 dan tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan menjadi 3.892.671, lalu pada tahun 2022 sempat menurun menjadi

1.993.088 dan kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 3.137.656. Pada tahun 2024 kunjungan wisatawan mencapai 4.282.224. Data kunjungan wisatawan tersebut direkapitulasi berdasarkan jumlah kunjungan ke obyek wisata yang dilaporkan oleh Kelompok Sadar Wisata (pokdarwis) yang ada di Kabupaten Tabalong. Data wisatawan yang berkunjung ke Tabalong sejak tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.61
Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik Tahun 2020-2024

No.	Jumlah Wisatawan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Wisatawan Mancanegara	3.315	15.904	30.415	44.754	59.093
2.	Wisatawan Domestik	857.760	3.876.767	1.962.673	3.092.902	4.223.131
Jumlah		**861.065**	**3.892.671**	**1.993.088**	**3.137.656**	**4.282.224**

Sumber: (https://pariwisatakalsel.id/kunjungan-wisatawan-2024)

C. Produktivitas UMKM dan Koperasi

1. Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.

2. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.

3. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama.

Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Gambar 2.30
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

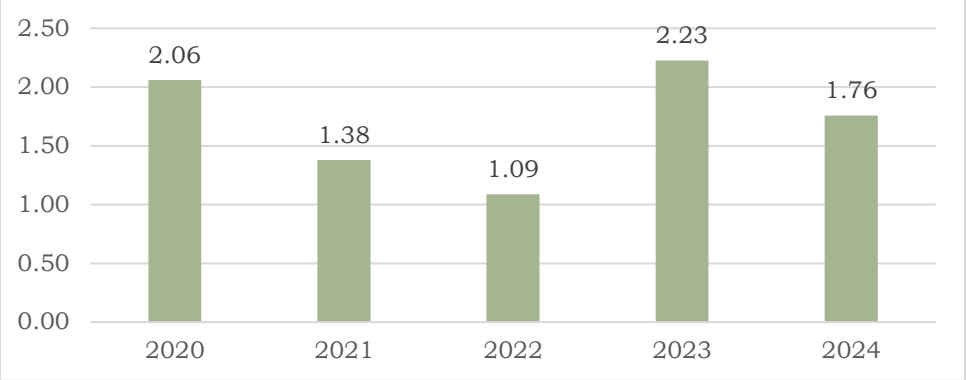

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2021-2025

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa rasio Kewirausahaan di Tabalong mengalami fluktuasi. Nilai Rasio Kewirausahaan sempat mengalami penurunan akibat dampak pandemi COVID-19 sampai dengan tahun 2022. Namun pada tahun 2023 meningkat sampai ke skor 2,23 yang berarti mencapai nilai tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Selanjutnya rasio Kewirausahaan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi hanya 1,76.

4. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah1. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB

atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

D. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. TPAK dihitung dengan menghitung persentase banyaknya Angkatan Kerja terhadap penduduk yang berumur lima belas tahun ke atas.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,27 dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 74,17 di tahun 2024. Perkembangan TPAK di Kabupaten Tabalong dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.62
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,27	71,49	72,32	72,94	74,17

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong dan BPS Provinsi Kalsel, 2024

Jika melihat TPAK menurut kelompok umur biasanya memiliki pola huruf ”U” terbalik. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (di atas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Tabel 2.63
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Golongan Umur	2020	2021	2022	2023	2024
15-19	21,59	24,98	26,99	29,00	31,01
20-24	65,18	76,87	67,98	59,09	50,2
25-29	73,61	78,05	76,56	75,07	73,58
30-34	77,93	81,52	76,68	71,84	67
35-39	83,55	84,04	79,23	74,42	69,61
40-44	87,75	83,79	81,69	79,59	77,49
45-49	84,99	86,58	81,97	77,36	72,75
50-54	87,37	87,34	80,96	74,58	68,2
55-59	82,87	83,59	76,52	69,45	62,38
60-64	57,70	59,54	55,73	51,92	48,11
65+	39,07	37,95	69,06	69,06	69,06
TPAK	**69,27**	**71,49**	**72,32**	**69,32**	**68,33**

Sumber: BPS Sakernas Agustus Tahun 2020 – 2024, diolah

Selanjutnya untuk Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 sampai 2024, dapat dijelaskan bahwa TPAK laki-laki selalu lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan, dimana pada tahun 2024 TPAK laki-laki mencapai 85,03, sedangkan perempuan hanya 63,08. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.64
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	Perempuan
2020	81,07	57,28
2021	83,01	59,82
2022	85,42	59,04
2023	86,55	59,03
2024	85,03	63,08

Sumber: BPS RI, diolah

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah

penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.

F. Indeks Inovasi Daerah

Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai sebuah daerah inovatif atau tidak, yaitu menggunakan Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan hasil publikasi Kementerian Dalam Negeri, Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan sejak tahun 2020 sampai dengan 2023.

Indeks inovasi tahun 2020 sebesar 47 dengan kriteria Tkurang Inovastif, meningkat signifikan di tahun 2022 dan 2023 menjadi Sangat Inovatif dan masing-masing berada di urutan ke-4 dan ke-8 se-Indonesia pada kategori kabupaten.

Gambar 2.31
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2020, 2022 dan 2023

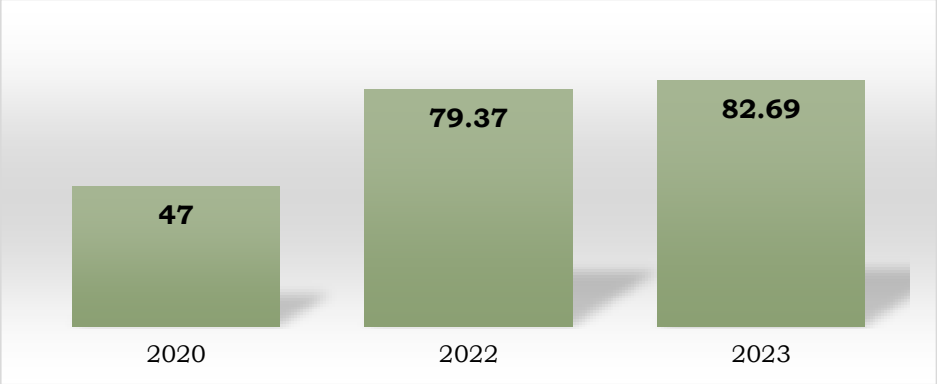

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2024

G. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Tabalong, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan

konsumsi rumah tangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Tabalong maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumah tangga.

Pada periode tahun 2020–2024 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 2.65
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2020-2024
Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Pengeluaran RT	3.640.390	3.711.050	3.927.590	4.166.390	4.434.760
2	Jumlah RT	71.716	68.330	80.994	86.929	92.864
3	Jumlah Penduduk	253.305	256.903	261.353	262.631	264.694
4	Pertumbuhan:					
	a. Konsumsi RT	-0,45	1,94	5,84	6,08	6,32
	a. Per Rumah Tangga	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b.Perkapita	3,93	3,97	3,87	N/A	N/A

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024

Data di atas menunjukkan bahwa pada periode tahun 2020–2024 pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan. Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selama periode 2020–2024 perkembangan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap

total PDRB selalu meningkat. Hal ini terjadi karena semakin melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

2.1.4.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian

Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu sebesar 42,91%.

2.1.4.4. Transformasi Digital

A. Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi merupakan Indeks komposit yang mengkombinasikan 11 indikator dan dikelompokan kedalam tiga subindeks (Akses dan infrastruktur TIK, Penggunaan TIK, dan Keahlian TIK). Indikator ini menjadi suatu tolok ukur yang dapat digunakan untuk: a. Memantau dan memperbandingkan perkembangan TIK antarwilayah dan antarwaktu; b. Mengukur kesenjangan digital antarwilayah; dan c. Mengukur potensi pembangunan TIK untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan berdasarkan kemampuan dan keahlian yang tersedia. Adapun nilai Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu 6,82.

2.1.4.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup

bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi. Berdasarkan data dapat dijelaskan bahwa Pembentukan Modal Tetap Bruto di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu sebesar 12,03%.

B. Net Ekspor Barang dan Jasa

Ekspor didefiniskan sebagai transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen suatu perekonomian dengan nonresiden. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Ekspor barang menggunakan prinsip pencatatan dengan basis akrual di mana untuk barang dicatat saat terjadi alih kepemilikan yang pendekatannya menggunakan waktu pencatatan pada dokumen kepabeanan, sedangkan untuk ekspor jasa dicatat saat jasa tersebut disediakan atau diberikan. Net Ekspor Barang dan Jasa di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu sebesar 59,93%.

2.1.4.6. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan

1. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni,

terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: a. Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat b. Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: 1. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat, 2. Kecukupan luas tempat tinggal (sufficient living space) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m2. 3. Memiliki akses air minum layak 4. Memiliki akses sanitasi layak.

2. Persentase Desa Mandiri

Persentase Desa Mandiri merupakan Indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa yang dikelola oleh Kementerian Desa PDTT. Adapun Persentase Desa Mandiri di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu sebesar 35%.

2.1.4.7. Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio PAD terhadap PDRB

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Adapun Rasio PAD terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu sebesar 0,71%.

B. Tingkat Inflasi

Indikator inflasi merupakan indikator yang menggambarkan perubahan harga komoditi di level konsumen. Pada dasarnya inflasi di suatu daerah sebagai konsekuensi logis dari adanya transaksi atau kegiatan ekonomi di daerah tersebut. Inflasi terjadi jika secara rata-rata harga barang mengalami kenaikan. Nilai inflasi rata-rata adalah ukuran yang dapat menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat.

Selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 Inflasi di Kabupaten Tabalong mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 sebesar 2,06 dan sempat mengalami angka inflasi yang sangat tinggi di tahun 2022 sebesar 5,01, namun pada tahun 2024 kembali menurun menjadi hanya 2,24. Adapun Perbandingan Inflasi Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.32
Perbandingan Inflasi Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

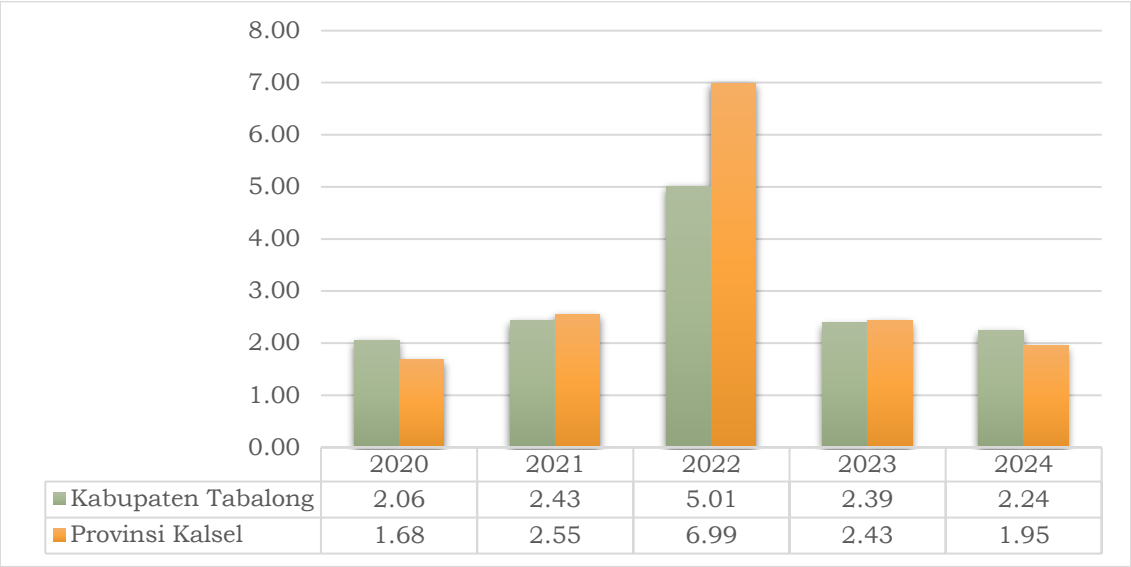

	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Tabalong	2.06	2.43	5.01	2.39	2.24
Provinsi Kalsel	1.68	2.55	6.99	2.43	1.95

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong dan Kalsel, 2025

Secara umum angka inflasi Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 hingga tahun 2024 berada di bawah inflasi Provinsi Kalimantan Selatan, hanya pada tahun 2020 dan 2024 inflasi Kabupaten Tabalong berada diatas inflasi Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.5. Aspek Pelayanan Umum

2.1.5.1. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi adalah Nilai hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB yang diberikan kepada instansi pemerintah atau pemerintah daerah. Hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian ini memberi informasi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah terjadi peningkatan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan dengan kondisi pada tahun 2024 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Tabalong mencapai kategori BB dengan nilai 80,76. Perkembangan Nilai RB sejak tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2.33
Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

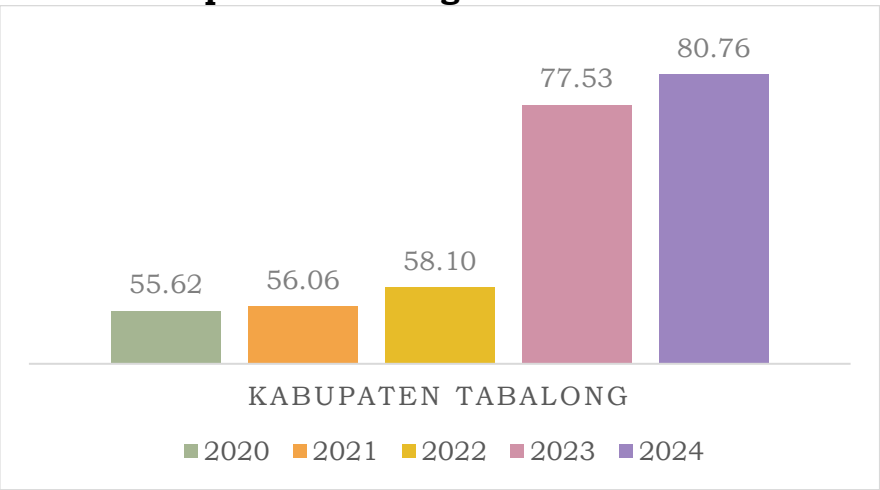

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, 2024 dan LPPD Tahun 2024

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Perkembangan nilai SPBE di Kabupaten Tabalong beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya dinamika. Kondisi selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan, kecuali pada tahun 2022 sempat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2023, nilai SPBR meningkat menjadi 3,21 dengan kategori Baik.

Gambar 2.34
Perkembangan Indeks SPBE Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2023

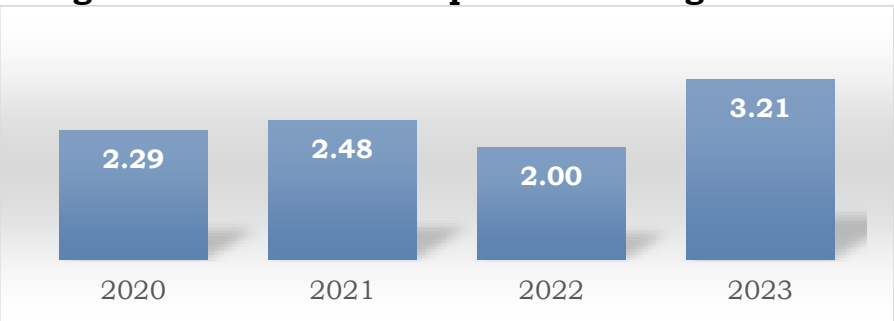

Sumber: Dinas Kominfo Kabupaten Tabalong, 2025

C. Indeks Pelayanan Publik

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas atau prima merupakan salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Indeks Pelayanan Publik atau IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PAN RB, diperoleh nilai IPP Kabupaten Tabalong seperti pada gambar di bawah. Selama beberapa tahun terkahir nilai IPP Tabalong meningkat dan mencapai 4,60 dengan makna pelayanan prima di tahun 2022, namun pada tahun 2023 terjadi penurunan IPP menjadi sebesar 4,25 atau dengan makna sangat baik dan mengalami peningkatan kembali tahun 2024 sebesar 4,49.

Gambar 2.35
Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong

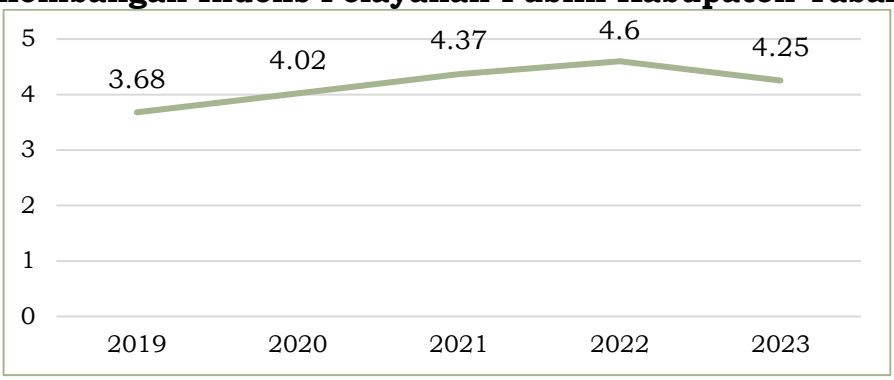

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong, 2024

D. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Indeks Reformasi Hukum di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu sebesar 80,76.

E. Indeks Integritas

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Indeks Integritas di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu sebesar 72,87.

2.1.5.2. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Kriminalitas

Upaya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk

mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Angka kriminalitas di Kabupaten Tabalong dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.66
Angka Kriminalitas dan Persentase Kasus Tertangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2020–2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kriminalitas	195	157	164	270	171
Jumlah Penduduk	253.305	256.903	261.353	262.631	264.694
Angka Kriminalitas per 10.000 penduduk (JK/JP x 10.000)	7,70	6,11	6,28	10,28	6,46
Jumlah Kasus yang tertangani	164	157	164	174	171
Persentase kasus tertangani	83	100	100	85,71	100

Sumber: Website Polres Tabalong, 2024 dan BPS Kabupaten Tabalong, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah kasus kriminalitas di Kabupaten Tabalong cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2024 jumlah kasus kriminalitas yang terjadi adalah 270 kasus mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022 yaitu 164 kasus. Persentase penanganan kasus kriminalitas pada tahun 2023 adalah 85,71% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yang mencapai 100%, kemudian pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 100%.

B. Jumlah Konflik Bernuansa SARA

Kabupaten Tabalong secara umum merupakan wilayah yang relatif kondusif dan minim konflik bernuansa SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan). Berdasarkan laporan resmi dari pemerintah daerah dan kepolisian setempat, konflik yang terjadi lebih sering berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, pertanahan, dan sosial ekonomi, bukan karena isu SARA. Hingga saat ini, tidak ditemukan data yang menunjukkan adanya konflik SARA yang bersifat sistematis atau meluas di wilayah Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong bersama aparat keamanan terus berupaya menjaga stabilitas sosial melalui mediasi,

pembentukan tim terpadu, dan koordinasi lintas instansi guna mencegah potensi konflik sejak dini, termasuk yang berpotensi bernuansa SARA.

C. Persentase Penegakan PERDA dan Perkada

Kegiatan penegakan perda/perkada dilakukan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) secara humanis sehingga tidak ada warga yang terkena dampak baik dampak ganti rugi maupun pengobatan. Setiap kegiatan dimulai dengan melakukan deteksi dini dengan cermat guna meminimalisir dampak dari penegakan perda. Berdasarkan data yang tersedia dapat dijelaskan bahwa Persentase Penegakan PERDA dan Perkada di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu sebesar 90%.

2.1.5.3. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

IDSD Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebesar 2,95, meningkat pada tahun 2024 menjadi 3,34. Angka ini masih di bawah IDSD Provinsi Kalimantan Selatan yang mencapai 3,56.

Tabel 2.67
Skor Daya Saing Daerah di Kalimantan Selatan Tahun 2024

PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. KALIMANTAN SELATAN	4,62	3,09	3,98	4,12	3,71	4,23	2,31	3,73	2,80	4,40	2,63	3,11	3,56
RATA-RATA KAB/KOTA	4,64	3,39	4,37	3,81	3,69	4,03	3,21	3,60	2,48	4,10	3,85	1,94	3,59
TANAH LAUT	4,76	3,36	4,58	3,90	3,76	3,94	3,07	3,30	2,87	4,17	4,03	2,21	3,66
KOTABARU	4,50	2,99	4,21	3,65	3,73	3,63	1,87	2,91	2,04	4,40	3,61	1,84	3,28
BANJAR	4,69	3,67	4,22	3,70	3,59	4,09	1,50	3,76	2,55	4,23	3,50	2,02	3,46
BARITO KUALA	4,69	3,84	4,63	3,66	3,49	3,93	3,98	3,94	2,60	3,91	4,01	1,75	3,70
TAPIN	4,57	3,93	4,56	3,99	3,85	4,03	2,85	3,83	2,81	3,96	4,17	1,35	3,66
HULU SUNGAI SELATAN	4,69	3,16	4,54	3,94	3,50	4,19	3,97	3,71	1,88	3,82	3,63	1,35	3,53
HULU SUNGAI TENGAH	4,77	3,13	3,93	3,96	3,49	3,99	4,87	3,66	1,89	3,83	4,86	1,56	3,66
HULU SUNGAI UTARA	4,51	2,97	4,34	3,77	3,33	4,13	5,00	3,44	2,40	3,66	3,70	1,83	3,59
TABALONG	4,81	3,24	3,87	3,50	3,86	4,20	1,55	2,92	1,81	4,33	3,94	2,04	3,34
TANAH BUMBU	4,66	3,47	4,27	3,81	3,83	3,80	1,76	3,01	2,97	4,36	3,47	1,16	3,38
BALANGAN	4,70	3,17	4,03	3,85	3,62	4,31	1,27	3,33	0,84	4,12	3,52	1,68	3,20
KOTA BANJARMASIN	4,45	3,68	4,79	4,06	3,91	4,04	5,00	4,48	4,11	4,52	4,20	4,03	4,27
KOTA BANJARBARU	4,48	3,47	4,89	3,72	3,97	4,12	5,00	4,53	3,41	3,96	3,36	2,42	3,95

Sumber: BRIN - Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2024.

2.1.5.4. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar

A. Pendidikan

1. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Selama kurun waktu 2020 sampai 2024, persentase lulusan SD/setara relatif lebih besar dibandingkan dengan SMP/setara dan SMA/setara. Pada tingkat SD/setara, persentase pendidikan yang ditamatkan dari tahun 2020-2024 berfluktuasi, namun masih di kisaran 24 s/d 25%. Di tingkat SMP/setara dan tingkat SMA, persentase pendidikan yang ditamatkan juga berfluktuasi, namun dengan tren meningkat hingga akhir 2024.

Berdasarkan data pada tabel di bawah, pada tahun 2024 diketahui bahwa pendidikan yang ditamatkan pada tingkat SMP lebih tinggi dari pada SD sederajat yaitu berada pada angka 50,30, namun

lebih rendah dari angka SMA sederajat yang berada angka 110%. Hal ini pada bagian pendidikan dasar perlu penanganan yang lebih lanjut.

Tabel 2.68
Perkembangan Angka Pendidikan yang ditamatkan
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SD	23,58	29,73	28,82	17,62	27,91
2	SMP	16,03	21,84	23,00	49,70	50,30
3	SMA	19,13	33,36	40,23	108	110
4	Perguruan Tinggi	6,34	N/A	N/A	6,76	6,84

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 2024

2. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah persentase kelulusan yang dicapai setiap tahunnya pada setiap jenjang pendidikan. Angka kelulusan dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di sekolah serta kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan daerah. Sedangkan Angka melanjutkan (AM) sekolah adalah perbandingan antara jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya dengan jumlah lulusan pada tahun sebelumya pada jenjang pendidikan sebelumnya. Angka melanjutkan merupakan cerminan keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

a. Angka Kelulusan SD/MI

Angka Kelulusan SD/MI adalah jumlah siswa/i yang lulus ujian tingkat SD/MI dibagi jumlah siswa/i yang mengikuti ujian tingkat SD/MI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, indikator Angka Kelulusan untuk sekolah SD/MI di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 telah mecapai 100%, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua murid yang mengikuti ujian tingkat SD/MI di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 semuanya lulus ujian tersebut. Dari Angka Kelulusan yang 100% ini dapat

disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di sekolah tingkat SD/MI di Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan berhasil. Angka Kelulusan SD/MI di Kabupaten Tabalong tahun 2020–2024 selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.69
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SD/MI di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, 2023

b. Angka Kelulusan SMP/MTs

Angka Kelulusan SMP/MTs adalah jumlah siswa/i yang lulus ujian tingkat SMP/MTs dibagi jumlah siswa/i yang mengikuti ujian tingkat SMP/MTs. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, indikator Angka Kelulusan untuk sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 telah mecapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di tingkat SMP/MTs di Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan berhasil. Angka Kelulusan untuk SMP/MTs di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan (AL)SMP/MTs (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, 2023

c. Angka Kelulusan SMA/SMK

Angka Kelulusan SMA/SMK adalah jumlah siswa/i yang lulus ujian tingkat SMA/SMK dibagi jumlah siswa/i yang mengikuti ujian tingkat SMA/SMK. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, indikator Angka Kelulusan untuk sekolah SMA/SMK di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 telah mecapai 100% sehingga dapat disimpulkan bahwa proses belajar mengajar di tingkat SMA/SMK di Kabupaten Tabalong dapat dikategorikan berhasil. Angka Kelulusan SMA/SMK di Kabupaten Tabalong 2020-2024 selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.71
Angka Kelulusan (AL) Sekolah SMA/SMK di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, 2023

3. Kualifikasi Pendidikan Guru

Guru sebagai pendidik profesional memegang peran yang sangat besar dalam menentukan mutu pendidikan. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar.

Data tahun 2024 menunjukkan guru dengan kualifikasi D4/S1 di setiap jenjang Pendidikan di Kabupaten Tabalong sudah cukup baik. Hanya untuk guru TK yang masih perlu ditingkatkan kualifikasinya sebab masih 68,35% yang tamat pendidikan D4/S1. Dalam tabel berikut disajikan data tentang jumlah dan persentase guru dengan kualifikasi pendidikan D4/S1 di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024.

Tabel 2.72
Jumlah dan Persentase Guru dengan Kualifikasi Pendidikan D4/S1 Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Jumlah Guru Seluruhnya	Jumlah Guru dengan Pendidikan D4/S1	Persentase Guru dengan Pendidikan D4/S1
TK	1.128	771	68,35%
SD	2.900	2.698	93,03%
SLTP	1.433	1.356	94,63%
Total	5.461	4.825	88,35%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KabupatenTabalong, 2024

4. Rasio Guru

Rasio guru adalah perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa dalam suatu lingkungan pembelajaran. Rasio ini penting karena mempengaruhi kualitas pembelajaran, interaksi guru-siswa, perhatian individual, dan ketersediaan sumber daya. Secara umum, rasio guru yang ideal adalah 1:18, namun ini bisa bervariasi tergantung pada jenjang pendidikan dan kebutuhan siswa.

a. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Dasar

Rasio guru terhadap murid sekolah dasar adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.73
Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sekolah Dasar (SD/MI)					
1.1.	Jumlah Guru	2.550	2.416	2.330	2.773	2.900
1.2.	Jumlah Murid	29.920	28.409	29.831	29.566	29.518
1.3.	Rasio Per 10.000	852	850	780	757	982

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rasio guru terhadap murid sekolah dasar di Kabupaten Tabalong 2020-2024 berfluktuasi

dengan kondisi terakhir pada tahun 2024 adalah 982 per 10.000 murid atau terdapat 982 orang guru per 10.000 murid. Dengan demikian setiap orang guru menangani 10–11 orang murid. Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota yang menyebutkan bahwa setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik maka rasio guru terhadap murid SD/MI di Kabupaten Tabalong telah memenuhi standar.

b. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama

Rasio guru terhadap murid sekolah menengah pertama adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah pertama per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah pertama. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.74
Rasio Guru terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMP/MTs					
1.1.	Jumlah Guru	1.235	1.340	1.197	1.356	1.433
1.2	Jumlah Murid	11.901	14.778	12.374	12.448	13.880
1.3	Rasio Per 10.000	1.037	906	967	882	1.032

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, 2024 dan Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2024 rasio guru terhadap murid SMP/MTs adalah 1.032 per 10.000 atau dapat disimpulkan bahwa setiap guru menangani ±9 orang murid. Namun demikian jika merujuk

kepada Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota maka untuk tingkat SMP/MTs tidak memakai rasio guru terhadap siswa sebagai indikator melainkan tersedianya 1(satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran.

c. Rasio Guru Terhadap Murid Sekolah Menengah Atas

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah atas per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah atas. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar untuk jenjang pendidikan sekolah memengah atas. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.75
Rasio Guru terhadap Murid Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tabalong 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	SMA/MA/SMK					
1.1.	Jumlah Guru	861	953	909	970	944
1.2.	Jumlah Murid	11.681	10.829	9.177	10.455	12.233
1.3	Rasio per 10.000	737	880	990	927	771

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rasio guru terhadap Murid Sekolah Menengah Atas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 mencapai rasio tertinggi pada tahun 2022 yaitu 990 guru terhadap 10.000 murid. Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru maka standar rasio guru terhadap murid untuk jenjang SMA/SMK telah dihapuskan.

5. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah angka yang menunjukkan berapa banyak sekolah yang tersedia dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu daerah dalam menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dan remaja.

a. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Dasar

Rasio ketersediaan sekolah SD adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan seluruh SD/MI yang ada untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah dasar di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 berfluktuatif dan berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong maka pada tahun 2024 rasio tersebut adalah 86,72%. Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar (SD/MI) di Kabupaten Tabalong tahu 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.76
Rasio Ketersediaan Sekolah Usia Sekolah Dasar
Di Kabupaten Tabalong 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar (SD/MI)	94,07	89,62	89,76	88,54	86,72

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, 2025

b. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong maka Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2024 kecenderungan penurunan. Pada tahun 2024 Rasio Ketersediaan SMP (SMP/MTs) di Kabupaten Tabalong adalah 63,40% meningkat dari rasio tahun 2023 yaitu 63,27%.

Tabel 2.77
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tabalong 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Ketersediaan Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs)	66,38	58,19	91,40	63,27	63,40

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, 2024

c. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah atas per 10.000 jumlah usia pendidikan menengah atas. Rasio ini mengindikasikan kemampuan semua SMA/MA/SMK untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah atas. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menengah atas di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.78
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)Di Kabupaten Tabalong 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Sekolah terhadap Murid Sekolah Menengah Atas(SMA/MA/SMK)	30,31	31,40	50,40	32,30	27,79

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong, 2024

6. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah (APS) merupakan proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan di bidang pendidikan dan untuk melihat keterjangkauan pendidikan maupun pemerataan pendidikan pada masing-masing kelompok umur. Semakin tinggi angka putus sekolah menunjukkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitupun sebaliknya, jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

a. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SD/MI di Kabupaten Tabalong 2020-2024 cenderung menurun, terakhir di tahun 2024 di angka 0,03%. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Perkembangan Angka Putus Sekolah SD/MI tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SD/MI Di Kabupaten Tabalong 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Putus Sekolah (APS)SD/MI (%)	0,01	0,35	1,06	0,04	0,03

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong,2024

b. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Indikator Angka Putus Sekolah (APS) untuk sekolah SMP/MTs di Kabupaten Tabalong mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2020 sebesar 0,37%, sempat turun 0,29% pada tahun 2021 namun kembali meningkat pada angka 0,47% di tahun 2022 dan menurun kembali menjadi 0,18% di tahun 2023. Pada tahun 2024 Indikator Angka Putus Sekolah (APS) meningkat menjadi 0,21%. Data selengkapnya sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.80
Angka Putus Sekolah (APS) Sekolah SMP/MTs Di Kabupaten Tabalong 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%)	0,37	0,29	0,47	0,18	0,21

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 2023

7. Angka Melanjutkan

Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu sebesar 99,49% atau naik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang mencapai 77,72%.

Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama pada tahun 2024 yaitu sebesar 94,79% atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 sebesar 105,59%.

Tabel 2.81
Persentase Angka Melanjutkan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah dasar	90,28	95,25	77,72	99,49	99,49
Persentase angka melanjutkan pada satuan sekolah menengah pertama	100,92	96,64	105,59	94,79	94,79

Sumber: Lakip Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong 2020-2024

B. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu hal prioritas yang sangat mempengaruhi berbagai macam hal lainnya dalam kehidupan masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mampu menjangkau semua elemen masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Di Kabupaten Tabalong, fasilitas kesehatan yang tersedia beragam, antara lain rumah sakit, puskesmas, poskesdes, posyandu, maupun klinik/praktek dokter.

1. Persentase Balita Gizi Buruk

Permasalahan gizi pada anak balita mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang menjadi perhatian utama bidang kesehatan maupun lintas sektor. Status gizi diukur berdasarkan umur, berat badan (BB) dan tinggi badan (TB). Variabel BB dan TB tersebut disajikan dalam bentuk tiga indikator antropometri, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan Berat Badan menurut tinggi badan (BB/TB). Angka berat badan dan tinggi badan setiap balita dikonvensikan ke dalam bentuk nilai terstandar (Z-score) dengan menggunakan baku antropometri WHO 2006.

Gizi buruk merupakan salah satu kriteria status gizi balita berdasarkan indikator BB/U. Balita Gizi Buruk adalah Balita yang

penimbangan berat badannya menunjukkan nilai Z-score < -3,0 sedangkan Balita Gizi Kurang adalah Balita yang hasil penimbangan berat badannya menunjukkan nilai Z-score ≥ -3 s/d <-2.

Dari data, diketahui bahwa berdasarkan indikator BB/U persentase balita gizi kurang pada tahun 2021 terus mengalami penurunan hingga 2024 menjadi menjadi 6,54% balita.

Tabel 2.82
Persentase Balita dengan Gizi Kurang dan Buruk
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Kondisi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Balita	18.203	18.029	19.605	20.265	18.551
2	Jumlah Balita Gizi Kurang	1.148	1.124	1.436	1.439	1.214
	% Balita Gizi Kurang	6,31	6,23	7,32	7,10	6,54
3	Jumlah Balita Gizi Buruk	218	188	193	167	139
	% Balita Gizi Buruk	1,19	1,04	0,98	0,82	0,74

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2023

Sehubungan dengan usaha menurunkan angka persentase balita gizi kurang dan gizi buruk tersebut, maka telah dilakukan upaya perbaikan gizi balita antara lain melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), pemberian multivitamin A mineral, pendampingan balita gizi buruk yang dirawat, konseling, kunjungan rumah, sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Selain indicator BB/U, indikator TB/U juga merupakan indikator gizi balita yang saat ini mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Indikator TB/U menggambarkan status gizi yang dipengaruhi kondisi yang sifatnya kronis (akibat kondisi yang berlangsung dalam waktu lama). Berdasarkan indikator TB/U disebut maka balita dikatakan stunting atau pendek dan sangat pendek jika Z-score ≤ -2.

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = 1 – angka kematian bayi. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah bayi mati usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000

kelahiran hidup pada tahun yang sama. Perkembangan angka kelangsungan hidup bayi tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.83
Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kematian Bayi (AKB/1000 Kelahiran Hidup)	10,2	10,0	10,0	10,0	12
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	989,8	990,0	991,0	992,8	1000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa AKB di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 sampai dengan 2024 secara umum cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan periode sebelumnya. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 AKB adalah 10 per 1000 kelahiran hidup, sedikit lebih rendah dibandingkan AKB tahun 2020 yaitu 10,2 per 1000 kelahiran hidup, namun meningkat di tahun 2024 menjadi 12 per 1000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 itu masih tergolong rendah dibawah 20 per 1.000 kelahiran hidup, dikategorikan tinggi bila angka melebihi 20 per 1.000 kelahiran hidup.

Selain AKB, indikator yang tidak kalah pentingnya dalam penilaian terhadap derajat kesehatan di suatu daerah adalah Angka Kematian Ibu (AKI). Indikator ini sangat terkait dengan pelayanan kesehatan khususnya pada masa kehamilan dan melahirkan. Adapun AKI di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah 161 per 100.000 kelahiran hidup.

3. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Posyandu sebagai wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan

pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan KN mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Jumlah posyandu dan Balita di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.84
Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Posyandu	282	282	282	282	290
2.	Jumlah Balita	18.548	19.465	17.528	3.702	18.551
3.	Rasio	1,51	1,45	1,40	7,61	1,56

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

Dari data rasio posyandu terhadap jumlah bayi seperti di atas dapat dikatakan bahwa jumlah posyandu di Kabupaten Tabalong sudah melampaui rasio yang ditetapkan yaitu 1,56 posyandu untuk 100 (seratus) balita. Sedangkan jumlah posyandu dan balita tahun 2024 berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.85
Jumlah Posyandu dan Balita
Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Kecamatan	Posyandu	Balita	Rasio
1.	Banua Lawas	26	1.458	1,8
2.	Bintang Ara	17	647	2,6
3.	Haruai	31	1.775	1,7
4.	Jaro	9	1.015	0.88
5.	Kelua	31	1.851	1,7
6.	Muara Harus	10	570	1,8
7.	Muara Uya	39	1.495	2,6
8.	Murung Pudak	34	4.266	0,8
9.	Pugaan	17	576	3
10.	Tanjung	34	2.525	1,3
11.	Tanta	34	1.922	1,8
12.	Upau	8	451	1,8
Jumlah		**281**	**290**	**18.551**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

4. Rasio Puskesmas dan Pustu Per Satuan Penduduk

Melalui puskesmas dan puskesmas pembantu, masyarakat baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan akan dengan mudah memperoleh berbagai pelayanan dan informasi kesehatan. Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu bermanfaat untuk mengetahui cakupan pelayanan kesehatan dalam memenuhi pelayanannya kepada penduduk. Rasio puskesmas, poliklinik dan puskesmas pembantu di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.86
Jumlah Puskesmas, Klinik dan Pustu Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Puskesmas	18	18	18	18	18
2.	Jumlah Klinik	20	20	24	24	26
3.	Jumlah Pustu	34	34	34	34	22
4.	Jumlah Penduduk	253.305	256.903	261.353	260.555	264.694
5.	Rasio Puskesmas per satuanpenduduk	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
6.	Rasio Poliklinik per satuan penduduk	0,08	0,08	0,08	0,08	0,1
7.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,01	0,14	0,14	0,14	0,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

Puskesmas saat ini telah menjangkau seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tabalong, dimana jumlah Puskesmas yang ada sejak tahun 2020-2024 sebanyak 18 buah. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong tahun 2024, maka 1 (satu) buah Puskesmas dapat melayani 14.705 jiwa penduduk. Sedangkan jumlah puskesmas, poliklinik dan pustu secara kewilayahan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Menurut Kecamatan Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk*	Puskesmas		Klinik		Pustu	
			Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
1.	Banua Lawas	21.220	1	0,05	0	0	3	0,14
2.	Bintang Ara	7.819	2	0,21	0	0	1	0,1
3.	Haruai	25.818	2	0.08	1	0,04	2	0,08
4.	Jaro	7.209	1	0,06	0	0	0	0
5.	Kelua	24.013	2	0,08	2	0,08	1	0,03
6.	Muara Harus	37.577	1	0,14	0	0	1	0,14
7.	Muara Uya	58.451	2	0.08	0	0	2	0,08
8.	Murung Pudak	24.567	2	0.03	19	0,33	1	0,02
9.	Pugaan	9.638	1	0,13	0	0	1	0,13
10.	Tanjung	7.776	2	0,05	3	0,08	9	0,24
11.	Tanta	24.771	1	0,04	1	0,04	0	0
12.	Upau	15.835	1	0,12	0	0	1	0,12
Jumlah		**264.694**	**18**	**0.07**	**26**	**0,1**	**22**	**0.08**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 2024
* DKBS Disdukcapil

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk menggambarkan ketersediaan dan cakupan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan bagi masyakarat. Di Kabupaten Tabalong hingga tahun 2024 terdapat 2 (dua) buah rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Kasim (Kelas C) dan Rumah Sakit Umum yang dimiliki oleh PT. Pertamina (Kelas C). Ratio rumah sakit terhadap 10.000 penduduk pada tahun 2024 adalah 0,8. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.88
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	2	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0	0	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0	0	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	1	1	1	1	1
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	2	2	2	3	2
6.	Jumlah Penduduk	253.305	256.903	261.353	260.555	264.694
7.	Rasio per 10.000 penduduk	0,08	0,08	0,08	0,11	0,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 2024

5. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk, atau dengan kata lain 40 orang per 100.000 orang penduduk.

Jumlah tenaga dokter dan tenaga medis serta rasionya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89
Jumlah Dokter Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023*	2024
1.	Jumlah Dokter (Umum)	53	92	90	69	66
2.	Jumlah Penduduk	253.305	256.903	261.353	260.555	264.694
3.	Rasio	0,25 : 1.000	0,36 : 1.000	0.34 : 1.000	0.26 : 1.000	0,25 : 1.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong,2023

Rasio dokter umum yang disyaratkan adalah 21,56 per 100.000 orang penduduk atau 1 (satu) orang dokter melayani 4.638,22

orang penduduk, maka dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 sebanyak 264.694 orang, seharusnya minimal ada dokter sebanyak ±56 orang. Jadi dengan jumlah dokter umum pada tahun 2024 mencapai 67 orang berarti sudah melebihi jumlah minimal dokter yang dibutuhkan. Jumlah dokter umum terbanyak pada tahun 2024 ada di Kecamatan Murung Pudak yaitu sebanyak 26 orang dokter. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1.	Banua Lawas	21.220	3	0,14
2.	Bintang Ara	7.819	3	0,32
3.	Haruai	25.818	4	0,16
4.	Jaro	7.209	2	0,13
5.	Kelua	24.013	6	0,23
6.	Muara Harus	37.577	1	0,14
7.	Muara Uya	58.451	4	0,16
8.	Murung Pudak	24.567	33	0,57
9.	Pugaan	9.638	1	0,13
10.	Tanjung	7.776	5	0,13
11.	Tanta	24.771	3	0,13
12.	Upau	15.835	1	0,13
Jumlah		**264.694**	**66**	**0,25**

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

6. Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan tersebut terdiri dari: Tenaga medis (dokter dan dokter gigi), tenaga keperawatan (perawat dan bidan), tenaga kefarmasian (apoteker, analis farmasi, asisten apoteker), tenaga kesehatan masyarakat (epidemiologi kesehatan, entomologi kesehatan, mikrobiolog kesehatan, administrator

kesehatan, dan sanitarian), tenaga gizi (nutrisionis dan dietisien), tenaga keterapian fisik (fisioterapi, okupasiterapis, terapis wicara), tenaga keteknisan medis (radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis).

Rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Tabalong mengalami Perkembangan yang fluktuatif. Hal ini dikarenakan pertambahan jumlah penduduk diimbangi dengan penambahan jumlah tenaga medis untuk memberikan pelayanan kepada penduduk. Berikut adalah tabel perkenbangan jumlah tenaga medis di Kabupaten Tabalong dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.91
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Tenaga Medis	794	139	137	952	203
2.	Jumlah Penduduk	253.305	256.903	261.353	260.555	264.694
3.	Rasio	3,13	0,54	0,52	3,62	0,77

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

7. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi persalinan yang ditangani diperhitungkan dengan target/asumsi bahwa 20% kehamilan, melahirkan dan nifas mengalami penyulit atau komplikasi. Berikut ini disajikan tabel cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani tahun 2020-2024.

Tabel 2.92
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani(%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong,2023

8. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan capaian pada tahun 2020 dan 2021 namun mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu mencapai 98,1%. Pada tahun 2024 capaian meningkat kembali hingga 99,8%. Namun demikian fakta bahwa masih ada pertolongan persalinan yang tidak ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompetensi kebidanan tetap perlu mendapatkan perhatian mengingat resiko yang mungkin terjadi terhadap Ibu dan Bayinya ketika pertolongan persalinan dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten.

Berikut disajikan tabel Cakupan Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024.

Tabel 2.93
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	83,4	98,2	98,1	98,1	99,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong,2024

9. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

Jika melihat capaian cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) pada tahun 2020 hingga 2024 capaian cenderung menurun. Tahun 2020 merupakan tahun dengan capaian tertinggi,

yakni 89,9%. Kemudian capaian terus menurun hingga pada tahun 2024 menjadi 39,7%. Data cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) per tahun disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.94
Cakupan Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization* di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (%)	89,9	60,3	67,9	40,5	39,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

10. Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan

Balita adalah anak usia di bawah 5 tahun (anak usia 0 s/d 4 tahun 11 bulan) yang ada di kabupaten/kota. Gizi buruk adalah status gizi menurut berat badan (BB) dan tinggi badan (TB) dengan Z-score ≤3 dan atau dengan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor.

Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan di Kabupaten Tabalong mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 mendapatkan perawatan yaitu telah mencapai 100%.

Tabel 2.95
Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapatkan Perawatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus yang ditemukan	1	1	1	1	3
Kasus yang ditangani	1	1	1	1	3
Cakupan Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

11. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Cakupan penemuan penderita penyakit TBC BTA positif di Kabupaten Tabalong semua kasus telah ditangani. Berikut ini disajikan Tabel Cakupan Penemuan Penderita Penyakit TBC BTA tahun 2020 sampai dengan 2024.

Tabel 2.96
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus yang ditemukan	161	231	266	266	266
Kasus yang ditangani	161	231	266	266	266
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA sejak tahun 2020 sampai 2024 adalah 100%, ini berarti seluruh kasus yang ditemukan seluruhnya telah tertangani.

12. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 (satu) tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Sejak tahun 2020 semua penderita DBD yang ditemukan telah mendapatkan pelayanan sesuai standar. Dibandingkan tahun – tahun lainnya jumlah kasus DBD yang ditemukan pada tahun 2021 merupakan tahun dengan kasus paling sedikit, yaitu hanya 3 kasus. Pada tahun 2024 kasus DBD di Kabupaten Tabalong mencapai 35 kasus, meningkat dari tahun 2023 yang hanya 15 kasus. Meski begitu, di setiap tahunnya seluruh kasus DBD ynag ditemukan telah tertangani.

Tabel 2.97
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus yang ditemukan	39	3	133	15	35
Kasus yang ditangani	39	3	133	15	35
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

13. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 sampai dengan 2024 telah mencapai 100%. Berikut ini disajikan tabel cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin tahun 2020–2024.

Tabel 2.98
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong, 2024

14. Cakupan Kunjungan/Pelayanan Kesehatan Bayi

Berdasarkan Petunjuk Teknis Penyusunan Profil Kesehatan maka yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan Bayi adalah Pelayanan kesehatan pada bayi minimal 4 kali yaitu satu kali pada umur 29 hari-2 bulan, 1 kali pada umur 3-5 bulan, 1 kali pada umur 6-8 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, Campak), pemantauan pertumbuhan, Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian vitamin A pada bayi umur 6-11 bulan, penyuluhan pemberian ASI eksklusif dan Makanan Pendamping ASI (MP ASI). Berikut disajikan tabel cakupan pelayanan kesehatan bayi di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024.

Tabel 2.99
Cakupan Kunjungan/Pelayanan Kesehatan Bayi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan kunjungan/pelayanan kesehatan bayi (%)	84,0	99,1	99,1	99,1	98,7

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong 2024

15. Persentase Faskes dengan Ketersediaan Obat Esensial

Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial di Kabupaten Tabalong pada tahun 2022 yaitu sebesar 90% mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 95% lalu mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 93%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.100
Persentase Faskes dengan Ketersediaan Obat Esensial di Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024

Uraian	Tahun		
	2022	2023	2024
Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial	90%	95%	93%

Sumber: Lakip Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2022-2024

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Tabalong juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan. Semakin meningkatnya usaha pembangunan dan berkembangnya suatu wilayah, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk serta memperlancar lalu lintas barang dari suatu daerah ke daerah lain.

Jaringan jalan dalam kondisi baik di Tabalong selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Persentase jalan negara dan jalan provinsi dari tahun 2020 sampai 2024 yang dalam kondisi baik sudah sangat bagus, sedangkan untuk jalan Kabupaten yang dalam kondisi baik cenderung mengalami penurunan, dari 371,49 km pada tahun 2020, menurun menjadi hanya 136,416 Km di tahun 2024 dari total panjang

jalan kabupaten pada tahun 2013 yaitu sepanjang 904,13 km. Adapun penyebab masih menurunnya panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah karena (1) Besarnya panjang jalan yang harus dipelihara; (2) Pengawasan yang kurang; (3) Kualitas pembangunan jalan yang buruk; (4) Kondisi fisik/tanah yang labil; (5) Terbatasnya biaya pemeliharaan jalan; dan (6) Seringnya terjadi genangan air di jalan akibat hujan yang dapat merusak jalan.

Tabel 2.101
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2020-2024

Status	Jalan Kondisi Baik (Km)					Panjang Jalan Di Kabupaten Tabalong (Km)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jalan Negara	40,43	39,63	39,63	43,10	43,10	124,47	124,21	124,23	124,06	124,06
Jalan Provinsi	49,82	31,59	31,59	18,18	18,18	65,29	65,29	65,29	60,32	60,32
Jalan Kabupaten	371,49	372,988	363,592	136,416	136,416	904,13	904,13	904,126	904,13	904,13
Total	**461,74**	**444,208**	**434,812**	**197,696**	**197,696**	**1.093,89**	**1.093,63**	**1.093,65**	**1.088,50**	**1.088,50**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, 2024

Tabel 2.102
Jenis dan Panjang Jalan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Keadaan Jalan	2020			2021			2022			2023			2024		
	Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)			Panjang Jalan (Km)		
	Negara	Provinsi	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten	Negara	Provinsi	Kabupaten
Jenis Permukaan															
Aspal		-	592,195	122,71	65,29	562,616	124,23	64,99	730,245	124,23	64,99	622,867	122,240	60,020	542,285
Beton		-	8,046	1,50	-	14,026	-	-	30,019	0	0	51,678	1,820	0,300	35,859
Kerikil		-	222,916	-	-	242,102		0,30	82,417	0	0,30	153,527	-	-	186,742
Tanah		-	80,969	-	-	67,415			61,445	0	0	17,147	-	-	80,333
Tidak Diperinci				-	-	17,967				0	0	0	-	-	-
Kondisi Jalan															
Baik/ Mantap		-	419,163	39,63	31,59	372,988	43,10	18,18	363,592	15,690	27,200	261,716	34,030	25,000	261,716
Sedang		-	280,437	80,98	17,20	333,551	79,23	17,10	347,503	106,760	15,000	190,501	87,120	19,820	190,501
Rusak Ringan		-	88,925	3,50	10,80	87,323	1,90	17,80	41,319	1,600	15,620	50,063	2,910	15,300	50,063
Rusak Berat		-	114,801	0,10	5,70	110,264	0,00	12,21	151,712	0,00	2,500	342,939	0,000	0,200	342,939

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong, 2024

2. Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pertanian. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, tersier. Hal ini mengindikasikan ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian. Dari tabel di bawah diketahui bahwa Persentase sarana dan prasarana pengairan dalam kondisi baik sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 terus mengalami peningkatan, dari 71,18% di tahun 2020, meningkat menjadi 75,23% pada tahun 2024.

Tabel 2.103
Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan (m)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jaringan Primer	190	190	190	190	190
2.	Jaringan sekunder	71.439	97.000	97.119	-	104.084
3.	Jaringan tersier	7.556	7.556	7.556	-	7.556
4.	Persentase saranadan prasarana pengairan dalam kondisi baik	71,18	72,86	73,94	75,11	75,23

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Tabalong, 2024

Tabel 2.104
Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Jenis Sarana Irigasi	2020			2021			2022			2023			2024		
	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak	Baik	Sedang	Rusak
Saluran Pasangan Batu (m)	72.439,72	12.169,00	6.931,91	88.158,91	12.169	6.931,91	88.276,91	12.169	6.813,91	88.276,91	12.169	6.813,91	83,03	10,88	6,09
Bendung (unit)	16	6	3	18	5	2	19	5	1	19	5	1	76	20	4
Pintu Air (unit)	98	37	3	100	37	3	107	33	2	107	33	2	79,87	18,79	1,34
Jalan Inspeksi (m)	141.378,25	1.950,00	1.248,00	143.795,45	1.950	1.248	146.128,45	1.950	863	N.a	N/a	N/a	N.a	N/a	N/a
Saluran Pembuang (m)	49.123	24.711	16.350	49.123	24.711	16.350	50.023	24.711	15.450	N/a	N.a	N/a	N/a	N.a	N/a
Box Pembagi (unit)	39	39	4	39	39	4	39	39	4	39	39	4	47,56	47,56	4,88
Polder (m)	27.238	3.195	1.892	27.238	3.195	1.892	28.872	3.195	1.671	28.872	3.195	1.671	86,32	8,98	4,70

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, 2024

Sedangkan rasio jaringan irigasi secara perwilayahan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi	Luas Lahan Budidaya	Rasio
		Primer	Sekunder	Tersier			
1	Kec. Jaro	50	44.487	1.856	46.3937	1.523	30,46
2	Kec. Muara Uya	0	7.448	550	7.998	765	10,45
3	Kec. Haruai	0	10.857	300	11.157	1.230	9,07
4	Kec. Tanjung	0	12.286	4.850	17.136	1.034	16,57
5	Kec. Murung Pudak	0	1.648	0	1.648	200	8,24
6	Kec. Tanta	100	2.655	0	2.755	1.100	2,50
7	Kec. Upau	40	8.597	0	8.637	1.350	6,40
8	Kec. Muara Harus	0	2.267	0	2.267	1.380	1,64
9	Kec. Kelua	0	3.747	0	3.747	2.538	1,48
10	Kec. Banua Lawas	0	7.993	0	7.993	4.047	1,98
11	Kec. Pugaan	0	1.518	0	1.518	1.280	1,19
12	Kec. Bintang Ara	0	581	0	581	193	3,01
Jumlah		**190**	**104.084**	**7.556**	**111.830**	**16.640**	**6,72**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, 2024

Selain itu, berikut disajikan juga capaian indikator kinerja lainnya pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.106
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Kawasan permukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	3,05	1,53	n.a	n.a	n.a
2	Persentase desa yang dapat diakses dengan mudah	n.a	n.a	97,52	98,35	98,35
3	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air	50,32	50,32	n.a	n.a	n.a
4	Persentase penduduk berakses air minum	82,38	86,77	80,85	82,41	85,36
5	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,89	91,77	95,39	94,58	95,05

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
6	Cakupan bangunan/fasilitas publik yang laik fungsi	50	75	89,28	100	100
7	Persentase bangunan fasilitas publik yang terpelihara	n.a	n.a	78,08	100	100
8	Rasio jaringan irigasi	6,32	5,92	6,25	6,39	6,72
9	Persentase kawasan yang terbangun	79,71	90	1,91	1,91	2,07
10	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100	100
11	Persentase tersedianya layanan SIPJAKTI	35	25	n.a	n.a	n.a
12	Persentase penerapan manajemen mutu kontruksi	100	100	100	100	100
13	Nilai AKIP	BB	n.a	n.a	n.a	n.a

Sumber: Lakip Dinas PUPR Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2023 dan LPPD Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 yaitu sebesar 82,38% dan mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 86,77%. Pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 80,85%, namun meningkat kembali pada tahun berikutnya hingga menjadi 85,36% pada tahun 2024. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu sebesar 95,05% atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang mencapai 94,58%. Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 yaitu mencapai 6,32 dan turun di tahun 2021 menjadi 5,92, namun terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 6,72.

D. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Rumah sehat adalah bangunan rumah tinggal yang memenuhi syarat kesehatan yaitu rumah yang memiliki jamban sehat, sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, sarana pembuangan air limbah, ventilasi rumah yang baik, kepadatan hunian rumah yang sesuai dan lantai rumah yang terbuat bukan dari tanah. Jumlah rumah layak huni dari tahun 2020 hingga tahun 2022 meningkat, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan sarana

sanitasi dan air bersih yang baik. Pada tahun 2020 jumlah rumah layak huni sebesar 46.043 rumah, kemudian terus meningkat sehinnga pada tahun 2024 jumlah rumah layak huni menjadi 48.533 buah.

Tabel 2.107
Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Rumah(buah)	Jumlah Rumah Layak Huni/Rumah Kategori Sehat (buah)
1	2020	80.611	46.043
2	2021	81.417	46.193
3	2022	82.231	46.483
4	2023	83.054	47.402
5	2024	83.469	48.533

Sumber: Data Dinas Perumahan, Permukinan dan Pertanahan Kabupaten Tabalong, 2024

Sedangkan untuk rasio rumah layak huni di kabupaten Tabalong pada tahun 2021 yaitu sebesar 1:2,41 dan meningkat di tahun 2024 menjadi 1:3,77. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.108
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio rumah layak huni	n.a.	1:2,41	1:2,04	1:3,78	1:3,77

Sumber: Lakip Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024

2. Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Rumah tangga pengguna air bersih adalah rumah tangga yang memanfaatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota rumah tangga. Ketersediaan dalam jumlah cukup terutama untuk keperluan minum dan masak merupakan tujuan utama dari program penyediaan air bersih yang terus diupayakan oleh pemerintah.

Kebutuhan air bersih di Kabupaten Tabalong masih sangatlah penting dalam rangka mendukung program masyarakat yang sehat, khususnya di pedesaan. Adapun Persentase rumah tangga pengguna air bersih di Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	92,52	86,77	80,85	81,02	85,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong, 2024

Berdasarkan tabel di atas, rumah tangga pengguna air di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 92,52% mengalami penurunan menjadi menjadi 86,77% pada tahun 2021, dan tahun 2024 persentase rumah tangga pengguna air bersih menjadi 85,36%. Dapat dijelaskan, bahwa penurunan persentase rumah tangga pengguna air bersih ini disebabkan bertambahnya data terkait jumlah rumah tangga baru karena tumbuhnya pemukiman atau perumahan yang semakin bertambah pula. Pada tahun-tahun mendatang target jumlah rumah tangga pengguna air bersih diprediksikan akan menurun kembali, karena semakin banyaknya rumah tangga baru yang belum mampu dijangkau sehubungan dengan keterbatasan kemampuan membangun instalasi dan sambungan rumah baru.

3. Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan rumah tangga maupun industri baik untuk penerangan maupun penunjang berbagai peralatan elektronik dan mesin-mesin. Menurut kelompok pelanggan, pengguna listrik terdiri dari pelanggan rumah tangga, industri, badan sosial, usaha dan pemerintah. Rumah tangga pengguna listrik adalah rumah tangga yang memanfaatkan listrik sebagai penerangannya. Persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Rumah Tangga Pengguna Listrik
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik (%)	100	100	100	99,90	99,95

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong tahun, 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persentase rumah tangga pengguna listrik di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sudah mencapai 100%, sedangkan di tahun 2023-2024 menurun menjadi 99,90 dan 99,95%.

4. Rumah Tangga Bersanitasi

Berdasarkan Permen PU Nomor 1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dijelaskan bahwa sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan air limbah, air hujan atau drainase, dan sampah. Rumah tangga bersanitasi adalah indikator untuk mengukur jumlah rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tabalong. Indikator ini dihitung dengan rumus jumlah rumah tangga bersanitasi dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga yang ada dan dikalikan 100%. Rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.111
Rumah Tangga Bersanitasi Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Bersanitasi (%)	99,98	91,77	95,39	95,48	95,05

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Tabalong, 2024

Berdasarkan tabel di atas, rumah tangga bersanitasi di Kabupaten Tabalong sejak tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung menurun, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,98% dan mengalami peningkatan serta penurunan pada

tahun berikutnya hingga menjadi 95,05% di tahun 2024. Turunnya capaian realisasi secara umum disebabkan karena sistem penataan permukiman pada lingkungan baru belum dapat dilaksanakan secara maksimal akibat beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penataan lingkungan tersebut tidak dikerjakan karena anggarannya dialihkan untuk penanganan dampak pandemi *COVID-19.*

5. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik (taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/mata air, dan Pemakaman) dan RTH privat (pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; taman atap bangunan).

Indikator rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB di Kabupaten Tabalong diperoleh dari:

a. Kawasan hutan kota seluas kurang lebih 4 (empat) hektar yang berada di Bataman Kelurahan Belimbing Raya Kecamatan Murung Pudak.
b. Kawasan taman kota, taman lingkungan kantor Pemerintah Daerah dan gedung Sarabakawa seluas kurang lebih 2 (dua) hektar yang berada di Kelurahan Tanjung.
c. Kawasan taman kota seluas kurang lebih 0,5 (setengah) hektar yang berada di komplek Pertamina Kelurahan Belimbing Kecamatan Murung Pudak.
d. Lapangan golf Murung Pudak seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar di Kecamatan Murung Pudak.
e. Pembangunan Tanjung City Centre (TCC) seluas kurang lebih 2 (dua) hektar di Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak.
f. Taman terminal regional seluas kurang lebih 1 (satu) hektar di

Kelurahan Mabuun Kecamatan Murung Pudak.

g. Taman lingkungan Islamic Centre di Maburai Kecamatan Murung Pudak seluas 6 (enam) Hektar.
h. Kawasan tempat wisata Danau Tanjung Puri seluas kurang lebih 8 (delapan) hektar di Kecamatan Murung Pudak.
i. Kawasan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Taman Makam Pahlawan (TMP) seluas kurang lebih 4 (empat) hektar di Kelurahan Tanjung dan Jangkung Kecamatan Tanjung dan Kelurahan Belimbing, Belimbing Raya, Mabuun Kecamatan Murung Pudak.
j. Taman di lingkungan rumah jabatan bupati, GOR dan stadion Pembataan seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar.
k. Penanaman pohon-pohon yang diwajibkan pada komplek- komplek perumahan dengan luas total kuang lebih 7 (tujuh) hektar.

Tabel 2.112
Rasio Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Ruang Terbuka Hijau	159,50
2	Luas wilayah Perkotaan	4.814
3	Rasio	1:30,182

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong, 2024

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh)% dari luas wilayah kota. Jadi ruang terbuka hijau yang harus ada di luas wilayah perkotaan Kabupaten Tabalong adalah 962,8 hektar sedangkan rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Tabalong yaitu 1:30,182.

6. Persentase pemukiman yang tertata

Persentase pemukiman yang tertata di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 yaitu sebesar 82,99% dan mengalami kenaikan di tahun 2024 menjadi 84,12%. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.113
Persentase Pemukiman Yang Tertata di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemukiman yang tertata	n.a	14,5	40	82,99	84,12

Sumber: Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

7. Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani

Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu sebesar 87,57% atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 di angka 48,58%.

Tabel 2.114
Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	n.a	40	55	48,58	87,57

Sumber: Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

8. Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU

Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 yaitu sebesar 46% dan mengalami penurunan di tahun 2022 menjadi hanya 40%, namun pada tahun 2023-2024 kembali mengalami peningkatan hingga menjadi 52,27% dan 65%.

Tabel 2.115
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU	n.a	46	40	52,27	65

Sumber: Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2024

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah seluruh petugas Linmas dengan per 10.000 jumlah penduduk. Kabupaten Tabalong merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang memiliki sifat heterogenitas. Banyaknya perbedaan etnis, budaya, bahasa dan kepentingan semakin memantik kemungkinan terjadinya friksi antara satu dengan lainnya. Dalam kondisi tertentu gesekan antar kelompok maupun komunitas dimungkinkan dapat terjadi. Untuk menjaga stabilitas keadaan maka diperlukan peran Linmas dalam perlindungan dan pengendalian masyarakat, dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan, seperti kerusuhan, bentrok, maupun konflik lain. Satuan ini memiliki peran yang cukup krusial dalam menciptakan trantibmas secara luas.

Dari data yang disajikan pada tabel di bawah, dapat dilihat bahwa jumlah linmas pada tahun 2022 meningkat sebanyak 3.026 orang petugas Linmas jika dibandingkan tahun 2021 dengan rasio 30,26 petugas terhadap 10.000 penduduk pada tahun 2022. Rasio jumlah Linmas di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.116
Rasio Jumlah Linmas Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Linmas	1.310	1.716	3.026	n.a	n.a
2	Jumlah penduduk	253.305	256.903	261.353	262.631	264.694
3	Rasio Linmas per 10.000 penduduk	51,72	66,80	115,78	n.a	n.a

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong, 2024

2. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka yang disebut Polisi Pamong Praja (Pol PP) adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sertaketenteraman masyarakat sedangkan jumlah polisi pamong praja adalah jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di luar tenaga administrasi/kesekretariatan.

Rasio Pol PP dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Tabalong perlu diketahui sehingga kapasitas pelayanan dapat dinilai. Rasio jumlah Pol PP per 10.000 penduduk merupakan perhitungan dari perbandingan antara jumlah Pol PP dengan jumlah penduduk. Dengan mengetahui jumlah beban kerja baik pada level individu Pol PP maupun level kelembagaan Satpol PP, maka dapat dilihat potensi SDM dibandingkan dengan kebutuhan pelayanan.

Rasio jumlah polisi pamong praja pada tahun 2020 adalah 5,25 per 10.000 penduduk dan pada 2021 dan 2022 turun menjadi 3,85 dan 3,18 per 10.000 penduduk. Kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 4,45 per 10.000 penduduk, dan turun menjadi 2,24 pada tahun 2024. Jika mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja maka di Kabupaten Tabalong diperlukan > 150 orang Pol PP.

Tabel 2.117
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah polisipamong praja	133	99	83	117	60
2	Jumlah penduduk	253.305	256.903	261.353	262.631	264.694
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	5,25	3,85	3,18	4,45	2,24

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong, 2024

3. Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Indikator Rasio pos siskamling digunakan untuk melihat perkembangan sejumlah pusat pengamanan sosial masyarakat. Pos Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan) merupakan tempat atau wadah masyarakat untuk melakukan aktivitas pengamanan lingkungan yang dikoordinasi secara mandiri. Berdasarkan data, dapat diketahui rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan di Tabalong pada tahun 2022-2024 adalah 6,78% atau dapat diartikan bahwa di tiap desa/kelurahan terdapat rata – rata 6 sampai 7 buah pos kamling. Rasio pos kamling pada tahun 2022-2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan rasio pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,09%.

Tabel 2.118
Rasio Pos Kamling Per Jumlah Desa/Kelurahan
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Poskamling	889	536	889	889	889
2	Jumlah Desa/Kelurahan	131	131	131	131	131
3	Rasio Pos Kamling per jumlah Desa/Kelurahan	6,7	4,09	6,78	6,78	6,78

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong, 2024

Untuk capaian indikator kinerja lainnya pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.119
Capaian Kinerja Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	90%	90%	100%	100%	100%
Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	0%	6,88%	2,47%	2,47%	2,5%
Persentase warna negara yang mendapat peralatan perlindungan	76,67%	76,67%	100%	100%	100%
Persentase aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	0%	23,53%	100%	100%	100%
Persentase warga negara yang ikut pelatihan Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	0%	0,60%	0,88%	100%	100%
Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	N.A	N.A	100%	100%
Persentase jumlah petugas aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	0%	100%	100%	100%
Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase jumlah warga negara yang mendapat penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase penegakan perda	75%	N.A	N.A	N.A	N.A
Persentase Penyelesaian K3 (Keamanan ketertiban dan ketentraman)	80%	80%	90%	95%	96%
Persentase pencegahan penanggulangan kebakaran (Respon cepat darurat bencana kebakaran)	N.A	81%	87%	96%	97%

Sumber: Lakip Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

F. Sosial

1. Jumlah PPKS Yang Memperoleh Bantuan

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, Lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Jumlah PPKS pada tahun 2022 adalah 70.091, meningkat sebanyak 41.318 jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya 28.773. Jumlah PPKS pada tahun 2022 merupakan jumlah tertinggi pada rentang waktu 2020-2024. Perkembangan jumlah PPKS di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.120
Perkembangan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Balita Terlantar (0-4 th)	-		144	-	1056
2	Anak Terlantar(5-18 th)	555	668	1.027	-	6218
3	Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	2	4	-	-	-
4	Anak Nakal	10	-	-	-	-
5	Anak Jalanan	-	-	1	-	-
6	Anak Cacat (0-18 tahun)	83	-	27	-	43
7	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	767	767	15	-	1391
8	Wanita Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	42	-	1
9	Lanjut Usia Terlantar (60th ke atas)	810	645	558	-	3061
10	Lanjut Usia Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah	-	-	-	-	-
11	Penyandang Cacat (19 th keatas)	564	252	103	-	561

No	Jenis PPKS	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
12	Penyandang Cacat Eks. Penderita Kronis (19 th ke atas)	-	-	59	-	-
13	Tuna Susila	-		-	-	-
14	Pengemis/orang terlantar	-	39	31	-	-
15	Gelandangan	-	13	2	-	-
16	Bekas Narapidana	26	19	26	-	24
17	Korban Penyalahgunaan Napza/HIV Aids	-	-	34	-	4
19	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni	-	1.887	140	570	234
20	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	11	-	10
21	Komunitas Adat Terpencil	-		246	-	69
22	Masyarakat yang Tinggal di Daerah RawanBencana	3.662	3.662	1.154	-	-
23	Korban Bencana Alam	5.261	3.924	36	-	5
24	Korban Bencana Sosial/ Pengungsi	83	26	14	-	1
25	Pekerja Migran Terlantar	-	-	-	-	-
26	Keluarga Rentan	-	-	66.421	-	-
27	Keluarga Fakir Miskin	17.961	18.734	-	-	21.583
JUMLAH TOTAL		**29.784**	**28.773**	**70.091**	**570**	**34.261**

Sumber: Dinas Sosial Kab, Tabalong, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, jumlah PPKS tertinggi adalah keluarga Rentan yaitu berjumlah 66.421, Masyarakat tinggal di daerah rawan sebanyak 1.154 Jiwa dan anak terlantar yang berusia 5-18 Tahun 1.027 Jiwa.

2. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan pemerlu masalah kesejahteraan sosial dihitung dari jumlah PPKS yang telah mendapatkan penanganan baik berupa bantuan sosial, jaminan sosial dan lainnya dibagi dengan PPKS seluruhnya dikalikan 100. Persentase Penanganan PPKS di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.121
Persentase Penanganan PPKS
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	69,36	74,05	88,79	96,30	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, 2024 dan LPPD Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 yaitu sebesar 69,36% dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 100%.

3. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi

Sarana sosial adalah sarana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun swasta/pribadi dalam rangka memenuhi kebutuhan sosial. Sarana sosial saat ini banyak disediakan oleh pribadi yang dilatarbelakangi oleh alasan kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama. Terdapat berbagai macam sarana sosial, seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi. Persentase Sarana Sosial di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.122
Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti Rehabilitasi	10	10	10	10	10

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, 2024

Berdasarkan tabel di atas, sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebanyak 10.

G. Tenaga Kerja

1. Profil Ketenagakerjaan

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (0-14 tahun). Penduduk usia kerja juga dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja adalah penduduk yang beraktivitas sekolah, mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sudah tidak mampu bekerja, baik karena alas an kesehatan atau usia (misalnya pensiunan dan penerima pendapatan). Sedangkan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja) dan penduduk yang ingin terlibat aktif secara ekonomi atau berusaha mencari pekerjaan (pengangguran).

Tabel 2.123
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun keatas
Menurut Kegiatan Utama Tahun 2020-2024

Kegiatan Utama	Tahun								
	2020*			2021*			2022	2023	2024
	L	P	T	L	P	T	Total	Total	Total
Angkatan Kerja	81,07	57,28	69,27	83,01	59,82	71,49	139.542	140.493	145.224
- Bekerja	96,21	97,97	96,93	97,31	95,54	96,57	133.323	135.441	140.224
- Pengangguran	3,79	2,03	3.07	2,69	4,46	3,43	4,46	5.052	5.000
Bukan Angkatan Kerja	18,93	42,72	30,73	16,99	40,18	28,51		52.133	50.577
- Sekolah	44,73	20,44	27,98					15.827	-
- Mengurus RT	16,46	74,67	56,60					28.701	-
- Lainnya	38,81	4,89	15,42					7.605	-

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024

Capaian indikator kinerja lainnya pada urusan Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.124
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, keterampilan dan produktivitas kerja (orang)	81	218	N.A	N.A	N.A
2	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja terhadap pencari kerja (%)	100	79,42	N.A	N.A	N.A
3	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kesempatan kerja dan WUB (orang)	16	64	N.A	N.A	N.A
4	Persentase penyelesaian kasus perselisihan HI (%)	100	88,57	N.A	N.A	N.A
5	Persentase peningkatan kelembagaan HI dan Pengupahan (%)	100	94	N.A	N.A	N.A
6	Jumlah pekerja yang meningkat produktivitasnya (orang)	N.A	N.A	100	90	95
7	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan pemagangan dalam negeri (orang)	N.A	N.A	138	93	100
8	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak PP/PKB, LKS Biparti, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan (%)	N.A	N.A	76,33	76,14	76,55

Lakip Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, keterampilan dan produktivitas kerja pada tahun 2020 yaitu sebanyak 81 orang dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 218 orang. Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja terhadap pencari kerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 79,42% atau turun dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020 yang mencapai 100%. Begitu juga dengan Persentase penyelesaian kasus perselisihan HI dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 100% dan pada tahun 2021 turun menjadi 88,57%.

2. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat

pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Analisis peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan memperhatikan terhadap tingkat kelulusan pada S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk yang tidak produktif terhadap penduduk yang berusia produktif. Berdasarkan tabel di bawah ini, maka dapat diartikan dalam 10.000 penduduk Kabupaten Tabalong pada tahun 2021, terdapat 656 orang yang merupakan lulusan S1/S2/S3.

Tabel 2.125
Rasio Lulusan Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2024	2024
≤SD	N/A	63.996	100,00	100,00	100,00
SMTP	N/A	46.610	100,00	100,00	100,00
SMTA Umum	N/A	38.128	100,00	100,00	100,00
SMTA Kejuruan	N/A	21.728	99,60	99,60	99,80
DIPLOMA I/II/III/AKADEMI	N/A	3.405	-	-	-
UNIVERSITAS	N/A	16.409	12.717	12.717	12.986
JUMLAH PENDUDUK	N/A	256.903	261.353	261.353	264.694
RASIO PUK Berpendidikan S1/S2/S3 PER 10.000 Penduduk	336	656	-	-	-

Sumber: Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2024

H. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong, perempuan yang bekerja pada lembaga Pemerintah Daerah pada tahun 2024 sebanyak 3.056 orang dari 4.893 jumlah PNS di Tabalong. Persentase partisipasi perempuan di Lembaga pemerintahan pada tahun 2024 adalah 59,65% mengalami peningkatan sebesar 2,1% jika dibandingkan tahun 2023. Perkembangan jumlah dan persentase pekerja perempuan di lingkungan pemerintahan daerah tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.126
Jumlah Pekerja Perempuan Lingkungan Pemerintah Daerah (PNS) di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Instansi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PNS Struktural dan Staf	517	427	427	427	451
2	Medis dan Paramedis	479	390	320	319	402
3	PPL dan PPS	-	-	-	-	50
4	Instruktur BPK, Auditor, Funsional Kehutanan, Penyuluh KB dan Fungsional lainnya	68	275	275	275	260
5	Guru TK	170	170	170	170	170
6	Guru SD	770	824	824	824	824
7	Guru SLTP	300	313	313	313	313
8	Guru SLTA	Kewenangan Provinsi				
9	Penjaga Sekolah	0	0	0	0	0
10	Tata Usaha SLTP	21	0	0	0	0
11	Tata Usaha SLTA	Kewenangan Provinsi				
Jumlah		**2.325**	**2.399**	**2.329**	**2.255**	**2.470**
Jumlah PNS Seluruhnya		**4.266**	**4.307**	**4.088**	**3.918**	**3.688**
Persentase Partisipasi Perempuan diLembaga Pemerintah		**54,50**	**55,70**	**56,97**	**57,55**	**58,65**

Sumber: Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tabalong, Tahun 2024

2. Rasio KDRT

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, pada tahun 2020 terjadi 4 kasus KDRT dan mengalami peningkatan serta penurunan di tahun berikutnya hingga menjadi 11 kasus KDRT di tahun 2024. Kasus KDRT tersebut adalah kasus yang ditangani pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Tabalong. Salah satu sebab meningkatnya kasus KDRT yang ditangani oleh UPTD PPA ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang KDRT dan adanya UPTD PPA yang memberikan bantuan pelayanan bagi korban KDRT. Adapun Kasus KDRT pada tahun 2020-2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127
Rasio KDRT di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KDRT	4	8	13	10	11
2	Jumlah RumahTangga	71.716	80,403	80.994	72.880	73.124
3	Rasio KDRT	0,005	0,009	0,016	0,014	0,015

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong, 2024

3. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk perempuan usia kerja. Pada tabel di bawah dapat dilihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Tabalong dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.128
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan(%)	69,27	57,28	59,04	59,03	63,08

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong, 2024

TPAK Perempuan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 – 2024 berfluktuasi dan terakhir pada tahun 2024 adalah 63,08% artinya 63,08% penduduk usia kerja perempuan termasuk dalam Angkatan kerja perempuan, sudah bekerja atau ingin bekerja.

4. Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya Pada Unit Pelayanan Terpadu

Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yaitu sudah mencapai 100%.

Tabel 2.129
Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Terselesaikan Penanganannya pada Unit Pelayanan Terpadu di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Perempuan dan anak korban kekerasan yang terselesaikan penanganannya pada unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100

Sumber: Lakip Dinas PPPAPPKB Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

I. Pangan

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang menjadi isu penting dalam setiap pembangunan. Ketahanan pangan merupakan hal yang harus bisa diwujudkan. Beberapa indikator yang menjadi acuannya adalah rasio ketersediaan pangan, skor pola pangan harapan dan penguatan cadangan pangan. Berikut adalah data perkembangan indikator pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024.

Tabel 2.130
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan energi(orang/hari)						
	- energi (kkl)	4.310	4.352	4.100	3.017	2.140,97	7.822,65
	- Protein (gr)	149	153	150	91,71	64,30	861,07
2	Ketersediaan Pangan utama (ton)	60.753	59.573	63.876,8	88.439,67	36.207,36	46.262,9
3	Penguatan Cadangan Pangan (%)	10%	30%	41,5%	47,80%	-	-
4	Skor Pola Pangan Harapan	88,4	91,2	91,8	59,67	82,79	92,65
5	Penanganan daerah rawan pangan (%)	74	90,07	125	96,18	-	-
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	85	86	87,5	88	-	-

No	Indikator	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
7	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten	N.A	80,6	81,82	82,12	79,79	85,94
8	Jumlah Cadangan Beras Pemerintah	N.A	30 Ton	N.A	N.A	215,515	182,85
9	Jumlah Desa Rentan/Rawan Pangan Menjadi Tahan Pangan	N.A	4 Desa	N.A	N.A	3 Desa	0
10	Persentase Desa Tahan Pangan (%)	N.A	N.A	N.A	96,80	97,71	100
11	Tingkat keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (%)	N.A	N.A	N.A	92,70	100	90
12	Prevalensi Ketidakcukupan Pangan	2,32	2,05	2,26	3,21	4,15	3,06

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 2024, LkjIP Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dan BPS RI Tahun 2025

Ketersediaan energi yang ada di Kabupaten Tabalong sudah memenuhi standar kecukupan, dimana kebutuhan per hari sebesar 2.250 kilo kalori/orang, sedangkan ketersediaan energi Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 2.140,97 kilo kalori/orang/per hari. Di samping itu, kebutuhan protein pun telah memenuhi kebutuhan minimal (64,30 gr/hari).

Skor pola pangan harapan yang merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan daerah, dimana pada tahun 2024 skor pola pangan harapan Kabupaten Tabalong sebesar 92,65%. Angka ini masih berada dibawah skor maksimal, yaitu 100. Ada kelompok bahan makanan yang masih perlu ditingkatkan kesediaannya, yaitu kelompok pangan hewani, kacang-kacangan, sayuran dan buah-buahan.

Dari segi ketersediaan pangan, meskipun secara jumlah mengalami surplus, pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Tabalong telah menangani 125% desa yang rentan pangan. Desa rentan pangan tersebut diindikasikan dengan penduduk dengan status kesejahteraan yang rendah, yaitu desa-desa di Kecamatan Banua Lawas, Pugaan, Muara Harus, Tanta, Bintang Ara dan Muara Uya.

Sedangkan pengawasan keamanan pangan, pada tahun 2020 telah dilakukan uji pestisida pada 8 (delapan) pangan segar asal tumbuhan, yaitu tomat, cabe besar, cabe kecil, terong, bayam, kangkung, sawi dan kacang panjang. Hasil uji tersebut menunjukkan bahwa komoditas tersebut mengandung pestisida sebanyak 12,5%. Untuk keamanan pangan perlunya pengawasan terhadap pangan segar asal tumbuh mulai dari tempat produksi.

Indeks ketahanan pangan pada tahun 2024 yaitu sebesar 85,94 atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya sebesar 79,79. Jumlah cadangan beras pemerintah pada tahun 2020 sebanyak 30 Ton. Sedangkan Jumlah Desa Rentan/Rawan Pangan Menjadi Tahan Pangan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 3 Desa.

Sementara indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) merupakan estimasi proporsi konsumsi energi seseorang sehari-hari dari makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, altif dan sehat. Data selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kecenderungan peningkatan angka prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada tahun 2023 mencapai 4,15 yang berarti meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berada di bawah angka 4. Semakin tinggi prevalensi ketidakcukupan pangan maka makin tinggi persentase penduduk yang mengonsumsi makanan tapi kurang dari kebutuhan energinya. Namun kondisi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan menjadi hanya 3,06.

J. Pertanahan

Penyelesaian kasus tanah yang tertangani pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 4 kasus. Persentase luas lahan bersertifikat pada tahun 2021 yaitu sebesar 100% dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 106%, namun pada tahun 2023 dan 2024 kembali menurun menjadi 100%. Secara lengkap untuk capaian kinerja

Urusan Pertanahan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.131
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelesaian kasus tanah yang tertangani	N.A	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus
Persentase luas lahan bersetifikat (tanah aset pemda)	N.A	100	106	100	100
Luas Tanah Kosong Terkelola	N.A	7,6 Ha	5,9 Ha	5 Ha	N.A
Jlh Kasus pertanahan yang tertangani	2 kasus	N.A	N.A	N.A	N.A

Lakip Dinas Perumahan, Permukinan dan Pertanahan Kabupaten Tabalong, 2020-2024

K. Lingkungan Hidup

Aspek lingkungan menjadi hal penting dan harus menjadi perhatian dalam pembangunan daerah, sehingga kebijakan/ rencana/program harus mempertimbangkan aspek lingkungan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi di dalamnya. Beberapa hal yang biasanya terkait dengan masalah lingkungan hidup adalah penanganan sampah, ketersediaan untuk mengakses air minum, tingkat kualitas air, tingkat kualitas udara dan tutupan lahan.

E. Persentase Penanganan Sampah

Pelayanan pengelolaan persampahan saat ini sebagian besar baru wilayah perkotaan yang terlayani secara kontinue yang meliputi kecamatan Tanjung dan Murung Pudak, dengan sumber dari sampah pemukiman, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah perkantoran dan sampah hasil penyapuan jalan.

Penangangan sampah di wilayah utara dan selatan yang baru ditangani adalah sampah pasar. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia, dana dan armada angkutan yang sangat minim dibandingkan volume timbulan sampah yang dihasilkan setiap hari yang jumlahnya begitu besar. Di samping itu masih sangat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik dan

benar. Sedangkan jumlah volume sampah dan produksi sampah di Kabupaten Tabalong dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Persentase penanganan sampah sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 yaitu sebesar 75,02% dan menurun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 59,27% dan kemudian meningkat kembali hingga tahun 2024 mencapai 96,43%.

Tabel 2.132
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah sampah yang ditangani (m^3/hari)	166,36	181,97	222,48	36.112 ton	37.354
2.	Jumlah volume produksi sampah (m^3/hari)	299,9	307,04	311,39	36.124,5 ton	37.567
3.	Persentase penanganan sampah	75,02	59,27	71,45	94,64	96,43

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2024

Tempat pembuangan sampah menjadi hal yang penting dalam urusan lingkungan. Rasio fasilitas tempat pembuangan sampah per satuan penduduk dan secara kewilayahan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.133
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2020-2024 di Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah TPS	47	81	47	n.a	85
2.	Jumlah Daya Tampung TPS	282	486	486	486	510
3.	Jumlah Penduduk	253.305	256.903	261.353	262.631	264.694
4.	Rasio Daya Tampung TPS thd Jumlah Penduduk	1:898	1:529	1:538	1:540	0,52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2024

Bila ditinjau menurut kecamatan, maka data tahun 2024 menunjukkan bahwa Kecamatan Banua Lawas dan Kelua merupakan kecamatan yang paling banyak memiliki TPS.

Tabel 2.134
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio
			Jumlah (unit)	Daya Tampung (m^3)	
1.	Banua Lawas	21.220	10	60	0,35
2.	Bintang Ara	9.638	4	24	0,4
3.	Haruai	24.567	8	48	0,51
4.	Jaro	15.835	6	36	0,44
5.	Kelua	25.818	9	54	0,48
6.	Muara Harus	7.209	7	42	0,17
7.	Muara Uya	24.771	7	42	0,59
8.	Murung Pudak	58.451	8	48	1,22
9.	Pugaan	7.819	6	36	0,22
10.	Tanjung	37.577	8	48	0,78
11.	Tanta	24.013	10	60	0,4
12.	Upau	7.776	2	12	0,65
Jumlah		**264.694**	**85**	**510**	**0,52**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong 2023

F. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Akses air minum merupakan kebutuhan primer masyarakat. Semakin tinggi akses penduduk terhadap air minum maka semakin baik tingkat pelayanan daerah terhadap kebutuhan primer masyarakat. Berikut adalah data persentase penduduk berakses air minum di Tabalong.

Tabel 2.135
Persentase Penduduk Berakses Air Minum
Tahun 2020-2024 di Kabupaten Tabalong

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase penduduk berakses air minum	93,05	86,77	80,85	82,41	85,36

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan website Kabupaten Tabalong 2024 dan BPS Kabupaten Tabalong, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat persentase penduduk berakses air minum pada tahun 2020 sebesar 93,05% hingga tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 86,77% hingga tahun 2024 menjadi 85,36%. Oleh karena itu akses penduduk terhadap air minum ini harus terus ditingkatkan karena berkaitan erat dengan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.136
Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum yang digunakan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Sumber Air Minum	Persentase				
	2020	2021	2022	2023	2024
Air kemasan/IsiUlang	38,96	0,05	0,37	0,33	0,38
Leding	24,77	37,2	39,61	33,08	34,08
Pompa	5,69	12,5	12,24	2,33	3,33
Sumur terlindung	10,62	18,2	19,03	11,3	12,3
Sumur tak terlindung	15,55	13,3	15,03	8,60	9,60
Mata air	2,20	3,1	19,03	3,68	5,68
Air sungai danlainnya	2,22	15,6	13,72	4,68	4,98
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024

G. Kinerja Lingkungan Hidup

Persentase Pengurangan Sampah pada tahun 2020 yaitu sebesar 10,26% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 menjadi 28%. Konservasi Sumber sumber air juga demikian, dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 63,64% dan pada tahun 2024 angkanya naik menjadi 93,54%. Secara lengkap capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.137
Perkembangan Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pengurangan sampah	10,26	12,73	22,35	24	16,76
3	Penanganan Sampah	75,05	59,26	71,45	94,67	73,96
4	Indeks kualitas tutupan lahan	65,84	66,23	66,53	69,85	69,08
5	Persentase pelaku usaha kegiatan yang taat terhadap kebijakan dan peraturan lingkungan	53,06	70	80,30	100	90,30
6	Indeks kualitas air	56,94	51,87	51,70	55,19	52,26
7	Indeks Kualitas Udara	88,97	87,69	89,05	93,79	96,78
8	Dokumen Perencanaan LH yang Updating	2	2	1	3	3
9	Persentase Jumlah Pengaduan Lingkungan yang di tindaklanjuti	100	100	100	100	100
10	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	53,06	70	80,30	100	100
11	Penetapan pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal dan hak MHA terkait PPLH	1	1	1	1	1
12	Persentase sekolah yang berwawasan lingkungan (Adiwiyata)	56,67	65,55	79,36	86,8	100
13	Tingkat Ketaatan pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Limbah B 3		95	55	60	70
14	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota atau perkotaan	159,5	279,189	774,65	825,45	829,33
15	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	1:0,0079	11,55	53,95	67	76,97

Sumber: Lakip Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Penduduk yang Memiliki KTP

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing Yang Memiliki Izin Tinggal Tetap Yang Telah Berumur 17 (Tujuh Belas) Tahun atau Telah Kawin atau Pernah Kawin Wajib Memiliki KTP.

Persentase Kepemilikan KTP didapatkan dari rumus jumlah penduduk usia ≥17 tahun yang ber-KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia ≥17 atau telah/pernah menikah. Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.138
Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kepemilikan KTP	99,05	99,05	99,26	99,97	99,42

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Persentase Kepemilikan KTP pada tahun 2020-2024 relatif meningkat dan pada tahun 2024 adalah 99,42% menurun dari tahun 2023 sebesar 99,97%. Sisa sebesar 0,58% penduduk yang seharusnya sudah mempunyai KTP namun belum ber-KTP adalah penduduk di daerah sangat terpencil, sakit keras dan penduduk disabilitas yang belum bisa dijangkau serta penduduk yang baru saja mencapai usia 17 tahun yang belum melakukan perekaman.

2. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Aturan pemerintah pusat mulai menyeragamkan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) adalah mengacu pada penerapan KTP berbasis NIK sesuai dengan pasal 6 Perpres No. 26 Tahun 2009. Aturan ini pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan mengidentifikasi dan menghindari pemalsuan data maupun data ganda. Kartu Tanda Penduduk berbasis NIK adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan sistem pengamanan khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Semua kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan KTP Nasional berbasis NIK, sehingga hal ini diharapkan akan memudahkan dalam proses administrasi kependudukan secara nasional. Untuk penerapan KTP Nasional berbasis NIK di Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun berstatus "Sudah".

3. Penduduk Berakte Kelahiran

Kutipan Akta kelahiran adalah kutipan akta yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari sejak kelahiran. Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran per satuan penduduk di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2024 berfluktuasi. Berdasarkan tabel di bawah dapat dilihat kepemilikan akta kelahiran atau kutipan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2024 adalah 99,1% meningkat jika dibandingkan tahun 2023. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.139
Status Kepemilikan Akte Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Kepemilikan akta kelahiran/kutipan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	53,33	54,62	60,09	98,86	99,1

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, 2024

Selain itu, berikut disajikan juga capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024:

Tabel 2.140
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase kepemilikan kartu keluarga	99,52	99,6	89,21	100	99,64%
2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	23,73	44,97	60,44	70,27	78,90%
3	Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-17 tahun	92,48	93,28	97,38	98,67	99,11%
4	Persentase kepemilikan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100	100	100	100	100
5	Persentase kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	44,08	100	100	100	100
6	Persentase kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100	100	100	100	100
7	Persentase validitas database kependudukan	97,45	99,2	99,84	100	100
8	Ketersediaan database skala kabupaten	ada	ada	ada	ada	ada
9	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Puas (80,66)	Sangat Puas (83,43)	Sangat Puas (90,02)	Sangat Puas (91,58)	Sangat Puas (100,29)
10	Cakupan perangkat daerah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data	100	100	11,11% (3 SKPD)	22,22% (6 SKPD)	26,83%
11	Nilai evaluasi AKIP	BB (77,28)	BB (77,45)	BB (77,57)	B (67,48)	A (80,40)

Sumber: Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase kepemilikan kartu keluarga pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,52% dan mengalami peningkatan di tahun 2024 menjadi 99,64%. Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak pada tahun 2020 yaitu sebesar 23,73% dan terus mengalami peningkatan hingga menjadi 78,90% di tahun 2024. Untuk Persentase kepemilikan akta kelahiran anak 0-17 tahun persentasenya juga terus meningkat, dari 92,48% di tahun 2020, naik menjadi 99,11% pada tahun 2024.

M. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pengangguran. Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Tabalong periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 stabil yakni berjumlah 131 kelompok.

Tabel 2.141
Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Binaan LPM	131	131	131	131	131

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, 2024

2. Jumlah PKK dan Kelompok Binaan PKK

Jumlah PKK yang ada di Kabupaten Tabalong mulai awal periode tahun 2020 sampai dengan akhir periode tahun 2024 berjumlah 144 PKK. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.142
Capaian Kinerja PKK di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah PKK	144	144	144	144	144
Jumlah Kelompok Binaan PKK	3.592	3.736	3.818	3.933	3.933

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong, 2024

Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma atau sejenis lainnya. Tim Penggerak PKK beranggotakan warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik,

lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali gerakan PKK. Jumlah kelompok binaan PKK yang ada di Kabupaten Tabalong dari tahun 2020 yaitu sebanyak 3.592 kelompok binaan dan terus meningkat hingga tahun 2024 menjadi 3.933 kelompok binaan.

3. Jumlah LSM Yang Aktif

Jumlah LSM yang aktif di Kabupaten Tabalong sampai tahun 2024 berjumlah 35 LSM. Data perkembangannya disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.143
Jumlah LSM yang Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah LSM Yang Aktif	42	42	42	42	35

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong, 2024

Selain itu, berikut disajikan juga Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024. Berdasarkan data pada tabel di bawah, diketahui bahwa jumlah BUM Desa yang terbentuk mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 106 pada tahun 2020, naik menjadi 121 di tahun 2022-2024. Persentase BUM Desa yang berkembang juga demikian, dimana pada tahun 2020 hanya sebesar 45%, namun pada tahun 2024 naik menjadi 75%. Namun Persentase BUM Desa yang aktif mengalami penurunan, persentasenya yang mencapai 70% di tahun 2023 turun menjadi 46% di tahun 2024.

Tabel 2.144
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah BUM Desa yang terbentuk	106	110	121	121	121
2	Persentase BUM Desa yang aktif	51	55	65	70	46
3	Persentase BUM Desa yang berkembang	45	50	60	65	75
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan LPM	5	5	5	5	5
5	Persentase LPM Aktif	10	15	20	25	30
6	Persentase LPM Berprestasi	1	1	1	1	1

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
7	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	4	4	4	4	4
8	Persentase PKK yang aktif	100	100	100	100	100
9	Persentase Posyandu Aktif	100	100	100	100	100
10	Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	25	73	100	100	100
11	Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	25	100	100	100	100
12	Jumlah sarana transportasi desa yang dibangun	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah
13	Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk	-	1	-	-	1
14	Persentase desa dengan perencanaan desa yang baik	47	55	55	80	90
15	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan dan asset yang baik	45,33	60	68	80	90
16	Persentase desa dengan administrasi umum desa yang baik	48	60	60	80	90
17	Persentase desa yang menyelenggarakan pemerintahan dengan baik	41	60	60	80	90
18	Persentase cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100	100	100
19	Jumlah desa yang telah ditetapkan batas wilayahnya	100	-	114	114	121
20	Jumlah kerjasama desa yang dibuat	-	5	-	-	1

Sumber: Lakip Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Peserta KB aktif adalah pasangan usia subur yang salah satu pasangannya masih menggunakan alat kontrasepsi dan terlindungi oleh alat kontrasepsi tersebut. Pasangan usia subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berusia 15-49 tahun. Angka cakupan peserta KB aktif menunjukkan tingkat pemanfaatan kontrasepsi di antara para PUS. Data Cakupan peserta KB Aktif di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.145
Cakupan Peserta KB Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2022	2024
Jumlah Pasangan Usia Subur	47.811	47.826	43.008	46.234	47.257
Jumlah Peserta KB aktif	38.676	37.839	32.523	35.922	37.484
Cakupan Peserta KB Aktif (%)	80,89	79,12	79,22	79,3	79,32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong, 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan peserta KB aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 berfluktuasi. Cakupan pada tahun 2024 adalah 79,32% mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2023 yaitu 79,3%.

Selanjutnya, untuk capaian kinerja lainnya pada urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.146
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pencapaian peserta KB MKJP (%)	13,92	13,07	13,25	13,50	13,58
2	Cakupan anggota bina keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, dan BKL) (%)	84	81,83	94,32	78,65	89,61
3	Cakupan anggota UPPKS yang ber-KB (%)	91,41	89,7	71,49	91,89	92,02
4	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,5	1,45	1,42	1,37	1,32

Sumber: Lakip Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Persentase pencapaian peserta KB MKJP pada tahun 2024 mencapai 13,58%, atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya 13,50%. Cakupan anggota bina keluarga yang ber-KB (BKB, BKR, dan BKL) pada tahun 2020 hanya sebesar 84%, cenderung meningkat pada tahun berikutnya hingga menjadi 89,61% pada tahun 2024. Sedangkan Cakupan anggota UPPKS yang ber-KB (%) sedikit meningkat dari 91,41% di tahun 2020 menjadi 92,02% di tahun 2024.

O. Perhubungan

1. Jumlah Angkutan Umum

Sarana dan prasarana merupakan aspek yang sangat penting dalam mengelola suatu kawasan perkotaan. Ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan sangat menentukan dalam pengembangan suatu kota. Sarana perkotaan meliputi infrastuktur jalan, jaringan listrik, air bersih, serta jaringan utilitas lainnya. Kondisi sarana dan prasarana di Kabupaten Tabalong saat ini masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing Kabupaten.

Dari sisi transportasi jalan raya, akses dari dan ke wilayah Kabupaten Tabalong dengan menggunakan jaringan transportasi darat dapat dilalui dari tiga arah yaitu; (1) dari arah selatan yang merupakan lalu-lintas dari Kota Banjarmasin dan wilayah sekitarnya; (2) dari arah Barat yang merupakan lalu-lintas dari Kota Amuntai dan Kota Tamiyang Provinsi Kalimantan Tengah; (3) dari arah utara yang merupakan lalu-lintas dari Kota Balikpapan dan Tanah Grogot Provinsi Kalimantan Timur.

Pelayanan angkutan umum di Kabupaten Tabalong meliputi jaringan pelayanan angkutan bertrayek tetap antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, angkutan pedesaan dan angkutan tidak dalam trayek. Pelayanan angkutan umum ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.147
Pelayanan Angkutan Umum Di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

Jenis Angkutan Umum (Unit)	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
AKDP	35	47	57	57	15
Angkutan Kota	35	45	51	55	42
Angkutan Perbatasan	0	0	0	0	0
AKAP	76	76	42	42	0
Angkutan Desa	0	0	0	0	0
JUMLAH	**144**	**168**	**150**	**154**	**57**

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah armada di Kabupaten Tabalong tahun 2020 sampai 2024 berfluktuatif dari 144 armada pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi

168 armada dan pada tahun 2022-2024 kembali mengalami penurunan menjadi 57 armada pada tahun 2024.

Capaian Kinerja lainnya pada Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.148
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase layanan angkutan multimoda	31	78	89	85	100
2	Jumlah penumpang/barang yang melalui bandara pertahun	826/ 4.768	0	100 700	200 orang/ 1400 Kg	81 orang/ 465Kg
3	Menurunnya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas	31 laka 3.024 tilang	35 laka 1.081 tilang	53 laka 1.700 tilang	54 laka 1.063 tilang	31 laka 3.024 tilang
4	Meningkatnya kelaikan operasional kendaraan umum/pribadi di jalan raya	5.192 KBWU	5937 KBWU	4.858 KBWU	4.058 KBWU	4.320 KBWU
5	Persentase layanan jasa sarana dan prasarana perhubungan	33	46	53	57	100

Sumber: Lakip Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

P. Komunikasi dan Informatika

Jumlah berita yang dipublikasikan oleh mitra media online pada tahun 2021 yaitu sebanyak 5.273 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 2.340, lalu pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 3.349. Ranking/Level pemeringkatan *e-Government*/SPBE pada tahun 2022 yaitu 2 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 3,70. Secara lengkap capaian kinerja lainnya pada Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.149
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah informasi publik yang dipublikasikan	N.A	3.051 berita: TV = 988 berita, dan Radio: 2.063 berita	5.525	2.880	3.349
2	Jumlah berita yang dipublikasikan oleh mitra media online	N.A	5.273 viewer	2.340	3.176	3176
3	Nilai SPBE	2,29	2,48	2,0	3,21	3,8
4	Ranking/Level pemeringkatan *e-Government* /SPBE	N.A	N.A	2	3,21	3,70
5	Litbang Aplikasi untuk mendukung pelaksanaan SPBE	N.A	N.A	20%	9 Aplikasi	20
6	Meningkatnya Kualitas E-Government di Kabupaten Tabalong	N.A	N.A	20%		
7	Cakupan layanan komunikasi	N.A	N.A	90	20	20
8	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan Data Center dibagi jumlah SKPD dikali 100%	N.A	30 SKPD	N.A		
9	Jumlah SKPD Yang Mengelola Aplikasi Terintegrasi (Web)	N.A	24 SKPD	N.A		
10	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Akses Komunikasi	N.A	128 Desa	N.A		
11	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	N.A	N.A	40		

Sumber: Lakip Diskominfo Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Q. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Koperasi

Perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu tahun 2020 hingga tahun 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 sebanyak 103 unit dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 104 unit, namun pada tahun 2022 hingga 2024 kembali menurun menjadi hanya 100 unit. Adapun Perkembangan Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.150
Perkembangan Jumlah Koperasi dan Persentase Koperasi Aktif Di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah koperasi Aktif(unit)	63	61	53	59	53
2	Jumlah koperasi (unit)	103	104	100	100	100
3	Persentase KoperasiAktif (%)	61,76	58,65	53	59	53

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2024 dan LPPD Tahun 2024

2. Usaha Mikro dan Kecil

Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. UKM merupakan salah satu pelaku usaha yang ada di Kabupaten Tabalong berperan besar dalam menopang pondasi perekonomian daerah sehingga UKM perlu dibina dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Perkembangan UKM di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.151
Jumlah UKM non BPR/LKM Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah seluruh UKM	18.720	18,771	18.990	19.070*	19.124
2.	Jumlah BPR/LKM	1/-	1/-	3/-	3/-	3/-
3.	Jumlah UKM non BPR/LKM	18.056	18.770	18.893	19.067*	19.121
4.	Pertumbuhan UKM	-71,13	0,27	1,15	0,98	0,98

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, 2024

Jumlah pertumbuhan UKM pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat drastis menjadi 18.720 unit dari 64.845 atau turun -71,13% walaupun hingga tahun 2021 kembali meningkat

menjadi 18.771 unit dan tahun 2024 menjadi 19.121 unit, sebagian besar adalah UKM non BPR/LKM. Pada tahun 2020, jumlah BPR yang semula berjumlah 3 unit, yaitu BPR Haruai, BPR Kelua dan BPR Bersinar digabung menjadi Bank BPR Tabalong Bersinar. Dan sejak tahun 2 BPR diaktifkan kembali sebagai unit dari Bank BPR Tabalong Bersinar.

R. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Jumlah investasi di suatu daerah seringkali menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan perekonomian secara makro. Terdapat dua jenis investasi menurut sumbernya, yaitu investasi dalam negeri dan investasi luar negeri/asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan bentuk investasi skala nasional yang menjadi penyumbang pendapatan daerah yang besar. Di Kabupaten Tabalong hanya ada 3 (tiga) investor Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang sudah beroperasi yaitu industri *crumb rubber*, perkebunan karet, dan perkebunan kelapa sawit.Berikut jumlah investor berskala nasional di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.152
Jumlah Investor Berskala Nasional
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah investor berskala nasional PMDN	108	129	143	150	160
2	Jumlah investor berskala nasional PMA	14	14	14	14	14

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, 2024

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Besaran nilai investasi menggambarkan lebih nyata dan spesifik perkembangan investasi di suatu wilayah. Jumlah PMDN/PMA maupun proyek yang disetujui tidak dapat menjadi tolok ukur untuk menghitung kontribusi penanaman investasi terhadap perekonomian

daerah. Jumlah dan nilai realisasi proyeklah yang menjadi ukuran fisik keberhasilan daerah dalam memfasilitasi PMDN/PMA dalam merealisasikan proyek. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Berikut besaran investasi PMDN/PMA di Kabupaten Tabalong.

Semakin banyaknya nilai investasi maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasi di daerah. Semakin banyak realisasi proyek maka akan menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberikan fasilitas penunjang bagi investor untuk memberikan investasi yang telah direncanakan. Nilai Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dari tahun 2020 sebesar Rp.4.095.039.363.582 mengalami peningkatan menjadi Rp.4.645.449.937.862 pada tahun 2021, kemudian terus menurun pada tahun berikutnya hingga menjadi Rp.859.149.904.332 pada tahun 2024. Penanaman Modal Asing (PMA) U$531.833.587 pada tahun 2020 meningkat pada tahun 2021 menjadi U$5.748.881.000 dan sangat signifikan peningkatannya pada tahun 2023 menjadi U$500.350.000.000,-. Pada tahun 2024 jumlah investasi internasional mengalami penurunan menjadi U$445.519.338.566,-.

Tabel 2.153
Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN (Rp.)	4.095.039.363..582	4.645.449.937.862	2.997.098.500.000	1.819.240.000.000	859.149.904.332
2	Jumlah nilai investasi berskala internasional PMA (U$)	531.833.587	5.748.881.000	207.086.310.000	500.350.000.000	445.519.338.566

Sumber: Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong, Tahun 2024

Investasi yang diperlukan berasal dari sektor pemerintah maupun sektor swasta. Investasi sektor pemerintah dilakukan dan dibiayai melalui APBD, sedangkan investasi sektor swasta bisa berupa Penanaman Modal Asing maupun penanaman Modal dalam Negeri (PMDN). Dalam perkembangannya investasi lebih banyak dipenuhi dari sektor swasta sedangkan sektor Pemerintah bertindak sebagai penyedia sarana dan prasarana bagi tumbuhnya investasi swasta tersebut. Dalam upaya mendorong pengembangan ekonomi suatu daerah maka diperlukan adanya investasi memadai dan berkelanjutan dalam jumlah yang cukup besar hingga mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan.

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dihitung dari banyaknya tenaga kerja yang bekerja pada investasi PMA/PMDN yang terealisasi pada suatu tahun.

Adapun untuk rasio daya serap tenaga kerja dari tahun 2020

sampai tahun 2024 mengalami fluktuasi, yaitu 11,23 pada tahun 2021 kemudian terus berubah hingga menjadi 8,60 pada tahun 2024. Daya serap tenaga kerja pada PMDN dan PMA dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.154
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Pada PMDN dan PMA di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Tenaga KerjaYang Bekerja Pada Perusahaan PMDN dan PMA		3.885	20.907	20.476	22.055
2	Jumlah Seluruh PMDN danPMA		346	1.411	2.542	2.564
3	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja(Rumus : Jumlah TK yang Bekerja Pada PMDN & PMA/Jumlah Seluruh PMDN & PMA)		11,23	14,82	8,05	8,60

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong, 2024

S. Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, pada tahun 2024 jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Tabalong adalah 123 lembaga, mengalami penambahan sebanyak 5 lembaga jika dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah organisasi olahraga yang cukup banyak tersebut menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Data perkembangan organisasi olahraga di Kabupaten Tabalong tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.155
Perkembangan Organisasi Olahraga di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	Jumlah Organisasi Olah Raga				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jaro	2	2	2	2	9
2	Muara Uya	2	3	3	3	14
3	Haruai	4	5	5	5	13
4	Upau	2	2	2	2	9

No	Kecamatan	Jumlah Organisasi Olah Raga				
		2020	2021	2022	2023	2024
5	Bintang Ara	2	2	2	2	9
6	Tanjung	20	21	21	21	75
7	Murung Pudak	52	54	54	54	100
8	Tanta	5	5	5	5	14
9	Muara Harus	12	12	12	12	14
10	Kelua	9	9	9	9	36
11	Banua Lawas	4	4	4	4	30
12	Pugaan	4	4	4	4	14
JUMLAH		**118**	**123**	**123**	**123**	**337**

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, 2024

Capaian Kinerja lainnya pada Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.156
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	90,57	88	91	96	96
2	Jumlah Atlet Berprestasi	23 orang	68 orang	45 Orang	98 Orang	98 Orang
3	Persentase peningkatan kapasitas dan peran aktif kepramukaan	N.A	88	93	96	96

Sumber: Lakip Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

T. Statistik

1. Buku Kabupaten Dalam Angka

Pada periode 2020 sampai 2024 disediakan berbagai data statistik sektoral, termasuk Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten. Untuk Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 terdapat 7 Buku dan mengalami penurunan di tahun 2024 menjadi hanya 5 Buku.

Tabel 2.157
Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Laporan Data Statistik Sektoral Daerah	N.A	7 Buku	5 Buku	5 Buku	5 Buku

Sumber: Diskominfo Kabupaten Tabalong, 2024

U. Persandian

Jumlah Informasi Yang diamankan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 35 dokumen dan mengalami peningkatan di tahun 2022 hingga 2024 menjadi 50 dokumen. Sedangkan Jumlah Dokumen Yang Diterima dan Diamankan Melalui Email pada tahun 2024 yaitu berjumlah 50 Dokumen.

Tabel 2.158
Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Informasi Yang diamankan	35 Dok	50 Dok	50 Dok	50 Dok
2	Jumlah Dokumen Yang Diterima Dan Diamankan Melalui Email	N.A	50 Dok	50 Dok	50 Dok

Sumber: Diskominfo Kabupaten Tabalong, 2024

V. Kebudayaan

1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Keragaman budaya yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong dimanfaatkan oleh kalangan seniman yang terdapat di Kabupaten Tabalong untuk memelihara budaya yang ada. Para pekerja seni yang ada di Kabupaten Tabalong umumnya mendirikan sanggar– sanggar seni sebagai wadah mengasah kemampuan seninya. Untuk menampung para pekerja seni tersebut, pemda Kabupaten Tabalong melaksanakan dan ikut serta sejumlah pagelaran seni. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	5	9	5	5	5

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong, 2024

2. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

Berdasarkan data, selama periode tahun 2020 sampai dengan 2024 terdapat 3 buah sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Tabalong yaitu (1) Tabalong Expo Center; (2) Gedung Saraba Kawa; (3) Gedung Informasi.

3. Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan

Jumlah situs cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2021 dan 2022 yaitu sebanyak 9.

W. Perpustakaan

1. Jumlah Perpustakaan

Di Kabupaten Tabalong jumlah perpustakaan yang dimiliki pemerintah daerah sampai dengan tahun 2024 sebanyak 4 buah. Sedangkan jumlah perpustakaan milik swasta mengalami perkembangan fluktuatif. Tahun 2020 berjumlah 483 buah, tahun 2021 meningkat menjadi 489 buah. Selanjutnya, pada tahun 2024 meningkat menjadi 498 buah perpustakaan. Data yang lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.160
Jumlah Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	4	4	4	4	4
2	Jumlah Perpustakaan milik non Pemda	483	489	494	494	494
3	Total Perpustakaan (1+2)	487	493	498	498	498

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, 2024

Perpustakaan milik pemerintah daerah tersebut berlokasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; Unit Layanan Kecamatan Kelua; Unit Layanan Kecamatan Haruai; dan Unit Layanan Kecamatan Muara Uya. Sedangkan untuk perpustakaan milik non pemda terdiri dari antara lain perpustakaan desa, perpustakaan kecamatan, perpustakaan sekolah, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan perguruan tinggi dan lain lain. Dari sejumlah 494 buah perpustakaan tersebut, sampai dengan tahun 2024 baru 8 buah perpustakaan yang terakreditasi.

2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam 1 (satu) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Saat ini pengunjung perpustakaan tidak hanya untuk mencari bahan pustaka tapi banyak juga yang berkunjung ke perpustakaan untuk memperoleh akses internet gratis terutama untuk mahasiswa dan pelajar. Berikut adalah jumlah pengunjung perpustakaan pada rentang waktu 2020-2024 di Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.161
Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik Pemerintah Daerah (Pemda)	43.622	65.726	79,757	79,757	96,386
2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan milik non Pemda	3.200	18.649	9.961	n.a	N/a
3	Total Pengunjung Perpustakaan (1+2)	46.822	88.480	89.718	79,757	96,386

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, 2024

Selain koleksi buku yang berwujud fisik, saat ini perpustakaan milik pemerintah daerah kabupaten Tabalong juga telah memiliki koleksi buku online yang bisa diakses melalui aplikasi e-pusda Kabupaten Tabalong yang bisa didownload gratis.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa total pengunjung perpustakaan yang ada di Kabupaten Tabalong dari awal tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 selalu mengalami perkembangan yang berfluktuatif. Di tahun 2020 berjumlah 46.822 pengunjung sedangkan di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 96.386 pengunjung.

Selain menyediakan bahan pustaka, saat ini juga dikembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial khususnya di perpustakaan-perpustakaan desa. Perpustakaan berbasis Inklusi Sosial adalah pendekatan berbasis sistem sosial yang memandang perpustakaan sebagai sub sistem sosial dalam sistem kemasyarakatan. Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah transformasi layanan perpustakaan dengan melakukan pendekatan pelayanan perpustakaan yang ber-komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Dengan pendekatan ini maka layanan perpustakaan tidak lagi bersifat pasif namun secara langsung terlibat dalam pembangunan ekonomi masyarakat misalnya dengan menyediakan pelatihan–pelatihan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat desa.

Selain itu, berikut disajikan capaian kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024:

Tabel 2.162
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan	77.655	66.903	68.849	70.153	70.255
2	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun	6.643	3.520	4.775	4.689	4.697
4	Jumlah Koleksi Judul Buku Perpustakaan	43.376	34.879	35.879	36.668	36.787
5	Jumlah Pustakawan tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	4	4	4	4	4
6	Nilai AKIP	BB (75,98)	BB (75,98)	BB (76,85)	BB (77,80)	BB (77,95)

Sumber: Lakip Dinas Perpustakaan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Jumlah Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan pada tahun 2024 yaitu mencapai 70.255 buku atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2023 yang hanya 70.153 buku. Rasio perpustakaan per satuan penduduk pada tahun 2020-2024 yaitu 0,02 dan Jumlah Pustakawan tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat selama kurun waktu tahun 2020-2024 yaitu sebanyak 4.

X. Kearsipan

1. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip Dinamis

Arsip merupakan dokumen penting yang diperlukan sebagai sumber informasi hukum, historis, dan perkembangan kekinian. Untuk itu sistem informasi kearsipan mestinya tersedia agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan kearsipan ini. Indikator ini digunakan untuk melihat sejumlah perkembangan aktivitas kegiatan pengelolaan arsip secara baku di perangkat daerah. Sedangkan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Jumlah penataan arsip dinamis tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.163
Jumlah Penataan Arsip Dinamis Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah SKPD yang telah dilakukan Penataan Arsip Dinamis	10	7	33	40	40
2	Jumlah Kecamatan Yang Telah dilakukan penataan arsip dinamis	-	11	7	7	12
3	Jumlah Kelurahan Yang telah dilakukan penataan arsip dinamis	-	7	9	9	9
4	Jumlah desa yang telah dilakukan penataan arsip dinamis	19	40	67	67	67

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, 2024

2. Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu sebesar 49% atau mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya sebesar 45%.

Tabel 2.164
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku Tahun 2021-2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	25,58	36,58	45	49

Sumber: Lakip Dinas Perpustakaan Kabupaten Tabalong Tahun 2021-2024

3. Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan

Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 yaitu sebanyak 42 kegiatan atau mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 34 kegiatan.

Tabel 2.165
Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Peningkatan SDM Pengelolaan Kearsipan	11 kegiatan	26 kegiatan	34 kegiatan	42 kegiatan

Sumber: Lakip Dinas Perpustakaan Kabupaten Tabalong 2020-2024

2.1.5.5. Layanan Urusan Pilihan

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

A. Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Tabalong hingga tahun 2024 meningkat dengan capaian produksi sebesar 18.075,82 Ton. Pencapaian ini menjadikan Kabupaten surplus terhadap produksi perikanan, sehingga dapat menyuplai kebutuhan kabupaten di sekitarnya. Namun dilihat dari sisi angka konsumsi ikan (AKI) Kabupaten Tabalong yang terus meningkat, pencapaian ini belum menunjukkan peringkat yang baik. Angka konsumsi ikan Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 sebesar 61,76 masih berada di bawah angka konsumsi ikan Provinsi Kalimantan Selatan (AKI tahun 2021 dan 2024 masih belum rilis).

Dalam produksi perikanan, Kabupaten Tabalong juga mengembangkan usaha budidaya sampingan dari usaha utama bercocok tanam padi di sawah atau yang dikenal dengan istilah minapadi. Eksistensi budidaya minapadi sangat tergantung pada ketersediaan lahan dan air dari usaha utama bercocok tanam padi. Seluruh kegiatan minapadi ada di Kecamatan Jaro sehingga produktivitas minapadi ini seluruhnya berasal dari Kecamatan Jaro. Selanjutnya, dalam rangka pelestarian habitat lokal, Kabupaten Tabalong juga telah mengembangkan pembenihan ikan lokal, seperti gabus, bethuk, sepat siam, sepat rawa, toman, seluang, baung, biawan, kapar dan ikan bancir.

Di samping itu, untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor perikanan, Kabupaten Tabalong juga melakukan pengolahan hasil perikanan. Terdapat 8 kelompok pengolah yang menggunakan bahan baku ikan. Realisasi sektor perikanan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.166
Perkembangan Sektor Perikanan di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	Tahun			
		2020	2021	2023	2024
1.	Produksi perikanan (ton)	15.378,95	16.160,51	17.124,22	18.075,82
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	28,57	57,90	86,96	90,2
3.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologi yang aman (%)	77,73	79,37	83,76	90%
4.	rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	0,45	0,80	0,80	0,82
5.	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	22,40	24,70	25,3	25,60
6.	Nilai tukar nelayan	112,5	112,40	112,7	112,85
7.	Produksi budidaya minapadi (ton)	57 (Budidaya)	61	64,6	63,815
8.	Jumlah kelompok pengolah hasil perikanan	8	8	10	15
9.	Jumlah ikan lokal yang dibudidaya	3	7	10	7
10.	Produksi ikan gabus (Ton)	250,4	255,8	275,90	270,403
11	Angka Konsumsi Ikan	61,76	n.a	n.a	67,80
12	Jumlah kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan	3 Kali	2 Kali	7 Kali	18.075,82
13	Jurnlah produksi pengolahan hasil perikanan	31 Ton	32,88 Ton	33,4 Ton	90,2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong 2024

B. Pariwisata

Pembangunan dan pengembangan kepariwisataan diarahkan untuk menggalakkan kegiatan perekonomian sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan melestarikan seni budaya daerah. Obyek wisata yang ada di Kabupaten Tabalong, terbagi dalam tiga kategori yaitu Obyek wisata alam, obyek

wisata buatan dan rekreasi budaya. Sampai tahun 2022 tercatat 59 potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Tabalong.

Obyek wisata alam seperti air terjun dan riam Kinarum di Kecamatan Upau, air terjun Mambanin di Kecamatan Haruai, air terjun di Lano, air terjun Tabur Berangin dan Melor di Kecamatan Jaro, air terjun Katingkang di Kecamatan Upau, Danau Undan di Kecamatan Banua Lawas, air panas di desa Tamiyang Kecamatan Tanta, arung jeram sungai Salikung di Kecamatan Muara Uya, batu pujung di Kecamatan Bintang Ara, air terjun tangkung dan riam tampalingun di desa Panaan kecamatan Bintang Ara, sumber air panas luyuh di Kecamatan Tanta, gua Liang Kantin di Kecamatan Jaro dan Muara Uya dan gua Batu Babi gunung Batu Buli di Kecamatan Muara Uya.

Obyek wisata buatan seperti Tanjung Puri, danau dan sirkuit Marido, Islamic Centre dan Tanjung City Centre (TCC) di Kecamatan Murung Pudak, agro wisata dan danau sempalang jaya Desa Nalui Kecamatan Jaro serta tempat hiburan atau rekreasi budaya/religi seperti Masjid Pusaka Banua Lawas di Kecamatan Banua Lawas, Makam Syech Nafis di Kecamatan Kelua, Masjid Puain Kanan dan Makam Datu Puain di Kecamatan Tanta, Makam Datu Harung di Kecamatan Murung Pudak, Makam Datu Abi (Datu Buaya) di Kecamatan Pugaan, Makam Gusti Buasan di Kecamatan Haruai, dan etnis Dayak Ma'anyan di desa Warukin Kecamatan Tanta.

Sampai saat ini, obyek wisata tersebut masih belum menjadi sumber pendapatan asli daerah, namun masyarakat di sekitar lokasi wisata atau pihak yang mengelola obyek wisata tersebut telah bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan obyek wisata tersebut misalnya melalui penjualan karcis masuk, parkir, penjualan makanan minuman dan oleh–oleh khas masing–masing obyek wisata dan lainnya.

C. Pertanian

1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya

Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Perhektar adalah membandingkan antara produksi tanaman padi/bahan utama lokal lainnya (ton) dengan luas areal tanaman padi bahan pangan utama lokal lainnya (ha) dikalikan 100.

Berdasarkan data, luas panen padi dari tahun 2020 sampai dengan 2024 memiliki perkembangan yang fluktuatif. Hal ini disebabkan anomali iklim sehingga banyak areal pertanian yang tidak dapat ditanami karena tingginya genangan air. Dengan demikian apabila ingin mempertahankan dan meningkatkan luasan panen padi maka perlu diupayakan adanya tata air yang bagus terhadap lahan pertanian. Tanaman palawija yang terdiri dari kacang tanah, jagung, Ubi jalar, ubi kayu, kedelai, dan kacang hijau pada umumnya ditanam setelah musim panen padi atau saat air sawah kering, sehingga tanah dapat menunjang sistem perakaran yang tidak tahan genangan. Luas panen tanaman palawija secara umum fluktuatif dari tahun ke tahun. Luas panen terbesar setelah padi adalah jagung, ubi kayu dan kacang tanah.

Tabel 2.167
Perkembangan Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lainnya perhektar di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Komoditas	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Padi						
Produksi	Ton	133.129	92.713,6	55.001,55	40.415	48.154
Luas Areal	Ha	22.261	20.210	55.022	7.217	10.177
Produktivitas	Ton/Ha	4.6	39,97	4,75	5,6	5,6
Jagung						
Produksi	Ton	7.596,10	4.192,1	364	231	20
Luas Areal	Ha	2.053	1.133		55	5
Produktivitas	Ton/Ha	3.7	3,7	3,95	4,2	4
Ubi kayu						
Produksi	Ton	623,50	536,5	580	581	
Luas Areal	Ha	64	28	37	39	
Produktivitas	Ton/Ha	14,50	14,5	14,7	14,90	
Ubi Jalar						

Komoditas	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Produksi	Ton	52,25	41,8	118	114	
Luas Areal	Ha	6	5	5	5	
Produktivitas	Ton/Ha	10,45	10,45	10,45	10,45	
Kacang Tanah						
Produksi	Ton	83,20	27,3	8	225	
Luas Areal	Ha	38	20	23	45	
Produktivitas	Ton/Ha	1,30	1,3	1,30	5	
Kedelai						
Produksi	Ton	11,52	0	0	30,24	
Luas Areal	Ha	509	503	504	27	
Produktivitas	Ton/Ha	1,28	0	1,10	1,12	
Kacang Hijau						
Produksi	Ton	18	4,8	5,5	12	
Luas Areal	Ha	15	5	5	8	
Produktivitas	Ton/Ha	1,20	1,2	1,30	1,50	

Sumber: Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas KP2TPH, Kabupaten Tabalong Dalam Angka Tahun 2020 - 2024.

Produksi padi pada tahun 2020 yaitu 133.129 ton dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2024 menjadi hanya 48.154 ton. Begitu pula dengan produksi jagung sejak tahun 2020 sampai 2024 terus menurun, dari 7.596,10 ton pada tahun 2020 menjadi hanya 20 ton di tahun 2024. Secara umum tanaman jagung di Kabupaten Tabalong ditanam pada lahan sekitar persawahan maupun lahan persawahan (setelah dilakukan pemanenan padi) serta pada lahan karet yang baru dibuka.

Untuk tanaman ubi kayu dan ubi jalar pola tanamnya sama seperti tanaman jagung, tetapi produktivitasnya tidak terlalu signifikan untuk kenaikan maupun penurunannya. Hal ini disebabkan kebutuhan pasar terhadap ubi kayu dan ubi jalar cenderung tetap setiap tahunnya.

Tanaman kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau secara umum ditanam masyarakat pada areal persawahan saat pra tanam dan pasca panen, pada lahan untuk perkebunan karet yang baru dibuka dan di lokasi pinggiran sungai. Ketiga tanaman kacang-kacangan ini selain diambil hasilnya juga bermanfaat untuk menyuburkan lahan. Produktivitas ketiga tanaman ini selama tahun 2019-2022 tidak terlalu

signifikan kenaikan maupun penurunannya, hal ini disebabkan oleh kebutuhan pasar yang cenderung tetap dari tahun ke tahun.

Semua komoditas pertanian di atas ketersediaannya selain oleh produksi dalam Kabupaten Tabalong sendiri juga berasal dari luar Kabupaten. Hal ini disebabkan karena semua komoditas di atas (selain padi) bukan tanaman pokok di Kabupaten Tabalong.

2. Kontribusi Sektor Tanaman Pertanian

Sektor Pertanian didukung oleh 3 (tiga) sub kategori lapangan usaha, yaitu (1) Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian yang terdiri atas Tanaman Pangan, Tanaman Hortikultura, Tanaman Perkebunan, Peternakan, dan Jasa Pertanian dan Perburuan. (2) Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan (3) Perikanan. Pada tahun 2024 Kategori Pertanian, memberi kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 7,76% atau penyumbang perekonomian terbesar kedua di Kabupaten Tabalong. Dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2020, kategori tumbuh hingga 11,05%. Namun pada tahun 2024, pertumbuhan kategori ini mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi hanya 7,76%.

Pada tahun 2022, sekitar 81,90% kategori ini disumbang oleh sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian. Kemudian diikuti oleh sub kategori perkebunan sekitar 40,02% dan sub kategori tanaman pangan (Holtikultura) sekitar 30,71%. Selama periode tahun 2020-2022 terlihat bahwa peranan sub kategori perkebunan cenderung menurun, sedangkan perikanan dan peternakan memiliki kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun.

Jika dilihat lebih dalam, ternyata penurunan peranan sub kategori Pertanian cenderung disebabkan oleh penurunan peranan sub kategori Perkebunan. Peranan sub kategori Perkebunan mengalami penurunan dari 42,89% di tahun 2020 menjadi 40,02% di tahun 2022. Perlambatan kinerja lapangan usaha perkebunan selama kurun waktu tersebut disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan produksi kelapa

sawit dan karet, karena banyaknya tanaman tua yang perlu peremajaan dan penurunan produksi akibat penyakit gugur daun.

Sementara itu, kinerja sub kategori usaha pertanian tanaman pangan memberikan kontribusi terbesar kedua setelah perkebunan. Subkategori ini sebagian besar ditopang oleh produksi tanaman padi sawah. Padi sawah memiliki produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi padi ladang. Secara umum, kinerja produksi tanaman pangan masih terpengaruh oleh iklim.

Selain itu, pembentuk kinerja pertanian Kabupaten Tabalong yang menunjukkan pertumbuhan positif adalah perikanan dan peternakan. Kebutuhan protein hewani yang besar menyebabkan produksi cukup berlimpah pada tahun 2022. Hal ini menjadi keuntungan bagi pengembangan perekonomian Kabupaten Tabalong dari aspek keberlanjutan.

Tabel 2.168
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Konstribusi Pertanian terhadap PDRB		11,05	10,46	7,73	7,71	7,76
Peranan sektor:						
1	a. Pertanian, Peternakan, Perburuan, Jasa Pertanian	85,54	85,20	81,90	78,6	75,3
	b. Tanaman Pangan	30,76	30,28	30,71	31,14	31,57
	c. Tanaman Hortikultura	1,16	1,16	1,15	1,14	1,13
	d. Tanaman Perkebunan	42,89	41,08	40,02	38,96	37,9
	e. Peternakan	8,34	8,91	8,85	8,79	8,73
	f. Jasa Pertanian danPerburuan	2,38	2,42	2,51	2,6	2,69
2	Kehutanan dan Penebangan Kayu	1,83	1,82	1,89	1,96	2,03
3	Perikanan	12,64	11,04	11,50	11,96	12,42

Sumber: BPS Kabupaten Tabalong, 2025 dan PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

3. Perkebunan

Pertumbuhan nilai tambah bruto subkategori perkebunan mengalami perlambatan sekitar 0,17% dari tahun 2019. Perlambatan kinerja lapangan usaha perkebunan selama kurun waktu tersebut

disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan produksi kelapa sawit dan karet. Pertumbuhan ini tetap didukung oleh upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu dari tanaman karet melalui Program Gemas Mekar supaya harga karet dapat meningkat.

Realisasi produksi dan produktivitas perkebunan di Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.169
Produksi dan Produktivitas Perkebunan Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	**Karet**						
	Produksi	Ton	62.574	57.450,14	52.119,38	58.119,21	61.217,63
	Luas Areal	Ha	68.695	69.543	53.401,52	53.379,52	53.348,70
	Produktivitas	Ton/Ha	1,269	1,191	0,86	1,04175	1,1475
2	**Lada**						
	Produksi	Ton	5	5	21,25	1.034,53	23,75
	Luas Areal	Ha	64	-	61,2	60,4	37,30
	Produktivitas	Ton/Ha	0,2	386	-	N/A	0,637
3	**Kelapa Sawit**						
	Produksi	Ton	561	19.497	378,05	10.072,4	370,78
	Luas Areal	Ha	205	4.380	132	169	150
	Produktivitas	Ton/Ha	3,1	N/A	4,42	N/A	3,351

Sumber Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Tabalong (diolah), 2023 dan BPS Kabupaten Tabalong, 2024

4. Peternakan

Kinerja pertanian Kabupaten Tabalong juga ditopang oleh subkategori Peternakan. Populasi sapi pada tahun 2024 sebesar 3.566 ekor atau mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi pada tahun sebelumnya yang mencapai 3.622 ekor, begitu pula dengan populasi kambing dimana pada tahun 2024 sebesar 2.371 ekor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 2.495 ekor. Kinerja peternakan disokong oleh produksi ternak yang cukup besar dengan produksi peternakan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.170
Produksi dan Produktivitas Peternakan Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Populasi ternak:					
	Sapi	3.478	3.767	3.428	3.622	3.566
	Kambing	2.457	2.731	2.411	2.495	2.371
	Babi	233	332	137	233	396
	Itik	80.782	97.062	124.717	99.277	108.134
	Ayam ras petelur	33.200	35.000	52.057	20.923	62.658
	Ayam ras pedaging	4.768	7.058.020	8.354.420	8.394.715	10.724.065
	Ayam kampung	165.288	140.038	162.069	128.903	103.429
2	Produksi ternak yang dipotong:					
	Sapi	752.440	800.360	761.153	815.849	819.480
	Kambing	73.269	73.863	171.534	169.637	170.168
	Babi	14.636	9.307	14.363	15.799	16.143
	Itik	27.202	37.354	58.055	58.905	59.982
	Ayam ras petelur	103.989	84.645	289.445	307.166	490.274
	Ayam ras pedaging	2.789.280	3.288.285	3.715.335	4.341.016	5.039.334
	Ayam kampung	203.769	115.346	159.687	160.960	162.978
3	Produksi telor:					
	Itik	647.312	722.707	881.638	795.514	842.932
	Ayam ras petelur	249.996	263.550	391.989	157.550	411.986
	Ayam kampung	135.222	114.565	132.589	105.456	91.268

Sumber Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab Tabalong (diolah), 2024

D. Perdagangan

Perdagangan adalah proses tukar menukar barang dan jasa dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Peningkatan usaha perdagangan yang legal dapat tergambar dari penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) sesuai dengan golongan usaha. Perkembangan usaha perdagangan ditinjau dari NIB dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.171
Perkembangan Penerbitan NIB di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020 - 2024

No.	Golongan Usaha	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Usaha Mikro	N/a	252	1128	2400	2301
2.	Usaha Kecil	N/a	24	64	67	43
3.	Usaha Menengah	N/a	7	7	3	3
4.	Usaha Besar	N/a	1	4	0	7
Jumlah		N/a	**284**	**1203**	**2470**	**2354**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, 2023

Salah satu kegiatan pembinaan dan pelayanan legalisasi usaha perdagangan adalah dengan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Perkembangan Penerbitan TDP sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2020 yaitu sebanyak 76 dan meningkat di tahun 2021 menjadi hanya 213, pada tahun 2022 menurun menjadi 194, lalu pada tahun berikutnya kembali menurun hingga menjadi 193 pada tahun 2024. Data perkembangan penerbitan TDP dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.172
Perkembangan Penerbitan TDP di Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No.	Bentuk Perusahaan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	PT	30	41	41	42	42
2.	Koperasi	1	1	1	1	1
3.	CV	86	89	89	89	89
4.	FA	-	-	-	-	-
5.	PO	58	61	61	61	61
6.	BUL	-	-	-	-	-
Jumlah		**76**	**213**	**194**	**193**	**193**

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, 2024

Selanjutnya berikut disajikan capaian kinerja urusan perdagangan di Kabupaten Tabalong selama kurun waktu tahun 2020-2024 yaitu:

Tabel 2.173
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase konstribusi Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi terhadap PDRB	8,98	8,81	6,86	7,51	N.A
2	Prosentase ketersediaan dan kelancaran bahan pokok dan penting	100	N.A	N.A	N.A	N.A
3	Prosentase alat UTTP yang bertanda tera/pasar/daerah tertib ukur	100	N.A	N.A	N.A	N.A
4	Prosentase peningkatan PAD dan terpeliharanya serta tertatanya para pelaku usaha dagang	85,76	N.A	N.A	N.A	N.A

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera ulang	N.A	56	59	70	69,27
6	Persentase rekomendasi perizinan yang dikeluarkan	N.A	70	25	85	50
7	Persentase pemenuhan indikator pasar Tipe A kriteria SNI 8152:2015	N.A	47,38	56,64	84,17	90
8	Terkendalinya inflasi harga kebutuhan Bapokting	N.A	2,43		2,93	2,24
9	Jumlah produk unggulan daerah yang siap ekspor	N.A	35%	40%	60%	N.A

Sumber: Lakip Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, BPS Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Persentase konstribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2020 yaitu mencapai 8,98% dan mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 6,86%, namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 7,51%. Persentase jumlah alat UTTP dipasar dan SPBU yang ditera ulang pada tahun 2024 yaitu mencapai 69,27% atau naik dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2021 yang hanya 56%.

1. Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan berbagi dengan jumlah total PDRB dikalikan 100%. Adapun kegiatan sektor perdagangan meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan.

Tabel 2.174
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Perdagangan Terhadap PDRB	8,98	8,81	6,86	7,51	7,61

Sumber: PDRB Kabupaten Tabalong Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong memiliki perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun pada periode 2020 sampai dengan 2024. Pada awal periode tahun 2020 yaitu sebesar 8,98% dan mengalami penurunan pada tahun berikutnya hingga menjadi 6,86% di tahun 2022. Namun pada tahun 2023 kembali meningkat menjadi 7,51% dan pada tahun 2024 kembali meningkat menjadi 7,61%.

E. Perindustrian

Pembangunan di sektor industri adalah merupakan upaya dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan usaha, memperoleh kesempatan kerja, menyediakan barang dan jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing di dalam negeri maupun luar negeri, meningkatkan ekspor guna menunjang pembangunan daerah dan sektor-sektor pembangunan lainnya serta mengembangkan kemampuan teknologi.

Bila dilihat dari unit usaha menurut kelompok industri pada tahun 2024, maka industri pangan merupakan kelompok industri Pangan terbesar dengan jumlah mencapai 155 unit. Kelompok industri terbesar berikutnya adalah industri Sandang sebanyak 18 unit dan industri Logam dan Elektro sebanyak 13 unit. Hal ini menunjukkan bahwa industri yang berkembang di Kabupaten Tabalong adalah industri pangan, industri sandang, dan industri logam dan elektro. Untuk itu perlu pembinaan yang lebih baik lagi agar industri ini lebih berkembang dari hulu hingga hilirnya guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan perekonomian daerah.

Tabel 2.175
Jumlah Unit Usaha Menurut Kelompok Industri di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Kelompok Industri	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pangan	81	45	180	200	155
2	Industri Sandang	35	10	17	17	18
3	Industri Kimia Bahan Bangunan	31	-	15	15	1
4	Industri Logam dan Elektro	52	15	40	50	13
5	Industri Kerajinan	23	3	23	23	4

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong, 2024

Persentase konstribusi sektor Industri terhadap PDRB di Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 yaitu sebesar 8,95% dan mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 5,91%. Pertambahan Industri Baru pada tahun 2021 yaitu sebesar 44 WUB dan pada tahun 2022 turun menjadi 33 WUB, namun pada tahun berikutnya kembali meningkat menjadi 35 WUB pada tahun 2023 dan 40 WUB pada tahun 2024. Secara lengkap untuk capaian kinerja urusan Perindustrian Kabupaten Tabalong disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.176
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase cakupan industri kecil, menengah dan kreatif yang terbina	100	N.A	N.A	N.A	N.A
2	Prosentase konstribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	8,95%	8,65%	6,33%	5,91%	N.A
3	Pertambahan Industri baru	N.A	44 WUB	33 WUB	35 WUB	40 WUB
4	Persentase jumlah perizinan berusaha industri yang difasilitasi dengan yang dikeluarkan oleh instansi terkait secara elektronik	N.A	46%	54%	60%	70%
5	Tersedianya informasi industri	N.A	100%	100%	100%	100%

Sumber: Lakip Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

2.1.5.6. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

F. Nilai SAKIP dan LPPD

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022, Predikat SAKIP dengan capaian kinerja B untuk tahun 2023 capaian kinerja B, untuk nilai ada penurunan dari tahun 2022 sebesar 68,37 sedangkan di tahun 2023 sebesar 67,48. Pada tahun 2024 nilai kembali turun menjadi 67,10. Adapun Rincian Penilaian SAKIP Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.177
Rincian Penilaian SAKIP Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Komponen yang di Nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023	Nilai 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	23,37	-	22,58	22,34	21,97
2	Pengukuran Kinerja	25	16,52	-	20,10	19,14	19,01
3	Pelaporan Kinerja	15	10,45	-	10,54	10,71	10,83
4	Evaluasi Internal	10	5,95	-	15,15	15,29	15,29
5	Capaian Kinerja	20	11,76	-	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**68,05**	**68,13**	**68,37**	**67,48**	**67,10**
Tingkat Akuntabilitas			**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

Sumber: Setda Kabupaten Tabalong 2023 (diolah) dan LkjIP Kabupaten Tabalong, 2024 dan LPPD Tahun 2024

Selain nilai SAKIP, indikator penyelenggaran pemerintah daerah juga dapat digambarkan dengan nilai LPPD. Kementerian Dalam Negeri setiap tahun melaksanakan penilaian peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional. Peringkat dan status kinerja diperoleh berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahun yang diserahkan pemda (provinsi/kabupaten/kota) se Indonesia ke Kementerian Dalam Negeri. Hasil penilaian LPPD Pemda Kabupaten Tabalong menunjukkan perkembangan yang menggembirakan sebab terus meningkat. Nilai LPPD Tabalong pada tahun 2019 adalah 3,7628 dengan kategori predikat Tinggi, hal ini disebabkan ada perubahan kategori dalam penilaian LPPD, serta perubahan regulasi dalam

penilaian kinerja pemerintah Daerah dan dengan nilai ini Tabalong mendapatkan peringkat nomor 2 di Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk penilaian pada tahun 2020 hingga tahun 2024 masih belum rilis dalam verifikasi pusat.

Tabel 2.178
Nilai SAKIP dan Nilai LPPD Pemda Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai SAKIP	B (68,04)	B (68,13)	B (68,37)	B (67,48)	B
2	Nilai LPPD	Belum Rilis	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis	Belum rilis

Sumber: Setda Kabupaten Tabalong, 2023, LkjIP Kabupaten Tabalong, 2024 dan LPPD Tahun 2024

B. Sekretariat DPRD

Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 adalah 96,25%. Adapun capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.179
Capaian Kinerja Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	2024
1	Persentase Tingkat Pelayanan Anggaran	96,25
2	Persentase Perda yang terselesaikan tepat waktu	N/A

Sumber: LkjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2025

2.1.5.7. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

1. Penetapan Rencana Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah kewenangan pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Daerah seperti yang tertuang pada Pasal 260 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rencana Pembangunan Daerah sendiri dilaksanakan melalui tiga jangka waktu

perencanaan, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang untuk perencanaan 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk perencanaan 5 tahunan, dan Rencana Pembangunan Tahunan. Adapun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025.

Ketersediaan RPJMD merupakan bentuk langkah-langkah pemerintah daerah di tiap 5 tahun untuk mencapai visi misi kepala daerah. RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah selanjutnya digunakan sebagai acuan pembangunan dalam jangka menengah. Selanjutnya, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD setiap tahun. Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

2. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran RPJMD. RKPD dibuat dengan mengacu pada RPJMD dan memperhatikan hasil evaluasi RKPD. Dengan menghitung penjabaran program RPJMD kedalam RKPD maka akan diketahui capaian RKPD terhadap RPJMD. Data selama periode 2020 sampai 2024 menunjukkan penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Tabalong mencapai 100%. Hal ini adalah sebuah prestasi dalam tata kelola pemerintahan yang perlu dipertahankan di masa mendatang.

Tabel 2.180
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, 2024

B. Keuangan

1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD

Salah satu indikator penilaian untuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah untuk keuangan, adalah ketepatan waktu penetapan APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Sesuai Pasal 312 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Setelah itu, akan dievaluasi oleh Gubernur sebelum dilakukan penetapan Perda APBD. Dalam melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tabalong selalu menetapkan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagai wujud tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Salah satu indikator yang memberikan gambaran pertanggungjawaban keuangan daerah secara transparan dan akuntabel adalah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong selama beberapa tahun terakhir menunjukkan kebaikan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.181
Opini BPK terhadap LKPD Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK terhadapLKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tabalong, 2023 dan LkjIP Kabupaten Tabalong, 2024

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Tabalong pada periode 2020-2024 berfluktuasi, terakhir pada tahun 2024 berjumlah 3.688 orang terdiri dari 1.525 laki–laki (41,35%) dan 2.163 perempuan (58,65%). Fluktuasi jumlah PNS/ASN di Kabupaten Tabalong dikarenakan adanya pengangkatan CPNS, pegawai yang pensiun dan meninggal dunia serta mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten Tabalong. Perkembangan jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan jenis kelamin dan jenis pendidikan di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.182
Perkembangan Jumlah PNS Kabupaten Tabalong
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah PNS:	4.266	4.314	4.074	3.918	3.688
	- Laki-laki	1.941	1.905 (44,16%)	1.750 (42,96%)	1.663 (42,44%)	1.525 (41,35%)
	- Perempuan	2.325	2.409 (55,84%)	2.324 (57,04%)	2.255 (57,55%)	2.163 (68,65%)
2	Pendidikan PNS:					
	- SD	50	42	39	37	33
	- SMP	64	61	52	45	42
	- SMA	52	442	413	338	277
	- DI, DII, DIII,D IV	641	868	842	821	655
	- Sarjana	2.949	2.901	2.687	2.413	2.617

Sumber: BPS, Tabalong dalam Angkat Tahun 2025

D. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Tabalong dilaksanakan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Salah satu indikator pada urusan penelitian dan pengembangan yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan, dimana pada tahun 2020 dan 2021 capaian kinerjanya telah mencapai 100%, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi hanya 40% kemudian meningkat kembali menjadi 50% untuk tahun 2023 dan meningkat lagi menjadi 60% untuk tahun 2024 Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.183
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan di Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100	40	50	60

Sumber: LkjIP Bappedalitbang Kabupaten Tabalong, 2020-2024

E. Pengawasan

a. Survey Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) tidak hanya menjadi alat untuk mengukur integritas pemerintah, tetapi juga sebagai langkah konkrit dalam memerangi korupsi yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Dengan partisipasi yang jujur dan objektif dari para responden, hasil SPI dapat memberikan gambaran yang akurat dan berarti bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bersama SPI mari cegah korupsi dari langkah kecil. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis capaian hasil SPI.

Dari data di bawah, diketahui bahwa SPI Kabupaten Tabalong masih berfluktuasi. Capaian tertinggi diperoleh pada tahun 2022 dengan nilai 79,57 masuk dalam kategori Terjaga. Nilai terendah berada di tahun 2024 yakni 72,87 dengan kategori Rentan. Perkembangan 4 (empat) tahun terakhir sebagaiaman dipublikasikan oleh KPK dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.184
Perkembangan Survey Penilaian Integritas Kabupaten Tabalong
Tahun 2021-2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Komponen Internal	79,86	81,68	82,8	78,01
Komponen Eksternal	80,97	88,16	87,9	87,63
Komponen Eksper	80,47	80,42	63,27	67,21
Faktor Koreksi			2,50	4,34
Skor	**74,52**	**79,57**	**74,8**	**72,87**
	Waspada	Terjaga	Waspada	Rentan

Sumber: KPK, 2025

Penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong dicerminkan melalui berbagai indikator. Indikator tersebut adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK memberi gambaran kinerja urusan pemerintahan daerah dan beberapa indikator penting lainnya. Realisasi IKK Kabupaten Tabalong Tahun 2020 sampai 2029 disajikan pada tabel di bawah.

Secara umum, capaian IKK Kabupaten Tabalong pada periode tersebut menunjukkan hasil:

- Sekitar 40% urusan menunjukkan peningkatan kinerja secara konsisten.
- Sekitar 45% urusan mengalami fluktuasi tahunan yang cukup besar.
- Sisanya menunjukkan penurunan atau stagnasi pada akhir periode.

Beberapa urusan, seperti Urusan Kearsipan dan Urusan Kebudayaan, menunjukkan kinerja yang sangat stabil dan optimal dengan capaian 100% secara konsisten sejak tahun 2021. Hal ini mengindikasikan tata kelola yang efektif, perencanaan program yang matang, serta pelaksanaan yang sesuai target. Urusan seperti Kesehatan dan Urusan Komunikasi dan Informatika juga mencatat capaian rata-rata di atas 80% pada sebagian besar tahun, meskipun terdapat sedikit fluktuasi yang perlu diantisipasi.

Di sisi lain, terdapat sejumlah urusan yang mengalami fluktuasi capaian yang cukup besar antar tahun, seperti Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Urusan Kepegawaian, Urusan Kepemudaan dan Olahraga, serta Urusan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pola ini menunjukkan bahwa capaian kinerja belum sepenuhnya merata dan masih dipengaruhi oleh kendala teknis maupun non-teknis, termasuk keterbatasan sumber daya, perencanaan program yang belum optimal, atau faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Selain itu, pada beberapa urusan, seperti Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, ditemukan capaian yang sangat tinggi di awal periode, bahkan mencapai ribuan persen. Nilai yang tidak wajar ini disebabkan oleh target yang terlalu rendah dibandingkan realisasi, sehingga distorsi capaian tidak dapat dijadikan tolok ukur kinerja yang akurat. Setelah dilakukan penyesuaian target pada tahun-tahun berikutnya, capaian kedua urusan tersebut kembali berada pada kisaran 90–100%.

Analisis juga mengidentifikasi adanya indikator dengan capaian sangat rendah, bahkan di bawah 5%, pada urusan Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Kesehatan, serta Urusan Koperasi dan UMKM. Kondisi ini memerlukan intervensi kebijakan yang lebih spesifik, mulai dari peninjauan kembali indikator dan target, peningkatan kapasitas pelaksana, hingga optimalisasi koordinasi antar perangkat daerah. Secara keseluruhan, sekitar 40% urusan menunjukkan tren peningkatan capaian kinerja secara konsisten, 45% mengalami fluktuasi yang signifikan, dan sisanya stagnan atau menurun di akhir periode.

Tabel 2.185
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	PENDIDIKAN							
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	99,927	114,372	99,196	96,03	95,42	Disdikbud
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,406	105,15	98,837	102,41	101,04	Disdikbud
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	89,162	115,33	85,911	104,17	91,22	Disdikbud
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	72,575	92,975	97,322	154,85	91,26	Disdikbud
	KESEHATAN							
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Persen	0,09	0,078	1,184	1,165	1,37	Dinkes
2	Persentasi RS rujukan tingkat kabupaten/kota terakreditasi	Persen	100	50	100	100	100	Dinkes
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	86,855	91,134	81,17	100	Dinkes
4	Persentase ibu hamil bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	99,076	98,18	98,17	100	99,77	Dinkes

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	98,985	100	100	100	96,35	Dinkes
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	93,517	87,833	92,869	87,98	90,09	Dinkes
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	86,315	91,659	100	100	99,42	Dinkes
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	45,07	62,286	85,108	75,86	96,62	Dinkes
9	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	64,807	61,902	100	80,32	83,60	Dinkes
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	77,58	100,05	Dinkes
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	100	100,15	Dinkes
12	Persentasi ODGJ yang berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	90,625	87,29	83,15	Dinkes
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standa	Persen	92,57	100	100	100	60,61	Dinkes
14	Persentasi orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100	61,54	Dinkes

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastuktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	Persen	71,376	73,69	100	0	0	Dinas PUPR
2	Rasio luas kawasan pemukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infraktuktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	Persen	100	100	100	0	0	Dinas PUPR
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	85,077	79,001	76,184	76,62	76,88	Dinas PUPR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan pepipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kabupaten/kota	Persen	90,957	86,767	83,795	82,41	85,36	Dinas PUPR
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh pengolahan air limbah domestik	Persen	95,856	91,768	97,699	94,58	95,05	Dinas PUPR
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Persen	100	100	100	100	100	Dinas PUPR
7	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	78,02	78,146	80,18	80,59	80,91	Dinas PUPR
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	100	100	50	100	82,71	Dinas PUPR

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kontruksi	Persen	0	100	100	100	100	Dinas PUPR
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100	100	Disperkimtan
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdapat relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Persen	100	2,817	100	100	100	Disperkimtan
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	82,299	82,299	87,467	60,88	17,00	Disperkimtan
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	5,987	3,952	100	4,09	4,14	Disperkimtan
5	Jumlah perumahan yang dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	84,884	89,845	15,33	0,05	Disperkimtan
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
1	Persentasi gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
2	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	245.765	256.903	100	100	100	BPBD

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	245.765	256.903	100	100	100	BPBD
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	100	17.435	100	100	100	BPBD
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	Satpol PP & Damkar
7	Waktu tanggap (Response time) penanganan kebakaran	Menit	14	13	13	12	12,44	Satpol PP & Damkar
	SOSIAL							
1	Tingkat Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	100	100	Dinsos
2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	100	100	Dinsos
	TENAGA KERJA							
1	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persen	100	100	100	100	100	Disnaker
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	60,02	55,343	65,167	71,46	0,27	Disnaker

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah/orang	12	14.041.465.613	14.326.642.950	119.060.897	92.387.401.323	Disnaker
4	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	79,909	48,945	76,329	76,14	78,89	Disnaker
5	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan (Dalam dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	40,520	79,417	84,016	82,58	43,76	Disnaker
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	27,856	7,513	3,407	17,59	52,38	DP3AP2KB
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Persen	0,021	0,028	0,056	0,06	100	DP3AP2KB
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	7,488	7,9	16,301	18,24	100	DP3AP2KB
	PANGAN							
1	Persentase Ketersedian Pangan (Tersedianya cadangan beras dan atau jagung sesuai kebutuhan)	Persen	198,556	259,972	110,412	431,03	373,08333	DKP2TPH
	PERTANAHAN							

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Pemanfaatan Tanah yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Di atas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi yang Diterbitkan	Persen	100	100	100	100	100	Disperkimtan
2	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	Persen	100	100	100	66,67	100	Disperkimtan
3	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	Persen	100	100	100	100	0	Disperkimtan
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimun dan Tanah Absentee	Persen	100	100	100	100	45,565749	Disperkimtan
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Persen	100	100	100	0	0	Disperkimtan
6	Penanganan Sengketa Tanah Garapan yang Dilakukan Melalui Medias	Persen	100	100	100	100	100	Disperkimtan
	LINGKUNGAN HIDUP							
1	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) Kab/Kota	Persen	70,11	69	70,08	74,03	73,98	DLH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kab/kota	Persen	75,022	87,938	93,793	94,673	90,723297	DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	0	0	0	0	9,3023256	DLH

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	Perekaman KTP Elektronik	Persen	99,056	99,046	98,034	99,279	99,747	Disdukcapil
2	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari yang Memiliki KIA	Persen	23,73	45,966	64,221	70,275	78,901	Disdukcapil
3	Kepemilikan Akta Kelahiran	Persen	92,49	93,276	98,024	98,670	99,109	Disdukcapil
4	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	OPD	100	100	100	22,222	26,829	Disdukcapil
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Persen	45,455	20	100	100	0	DPMD
2	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	0	1,176	59,091	186,36364	20	DPMD
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,46	2,46	2,37	2,23	308,3	DP3AP2KB
2	Presentase pemakaian kontrasepsi modern(Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	Persen	86,212	79,118	79,222	79,26	79,61	DP3AP2KB
3	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	8,46	9,932	9,774	7,58	4,79	DP3AP2KB
	PERHUBUNGAN							

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	Angka	15	78	0,818	0,643	0,857	Dishub
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Angka	0,29	0,32	0,339	0,357	0,5052947	Dishub
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD)) yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	76,19	70	100	100	100	Diskominfo
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan teritegrasi	Persen	100	73,333	100	62,068966	79,310345	Diskominfo
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	100	77,736	90,557	68,189839	124,33687	Diskominfo
	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH							
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	86,667	92,553	30	24	90	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Persen	79,009	79,009	72,84	73,11	0,99	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
	PENANAMAN MODAL							
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/Kota	Persen	-152,951	165,5	-7,662	-22,75	-50,75	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	40,438	39,464	82,216	0,608	0,144	Diskeporapar
2	Tingkat partisaipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	92,558	93,913	81,912	121,080	117,183	Diskeporapar
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	17	7	5	8	4	Diskeporapar
	STATISTIK							
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	Diskominfo
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100	100	Diskominfo
	PERSANDIAN							
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	100	100	100	100	52,25	Diskominfo
	KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	100	100	100	100	100	Disdikbud
	PERPUSTAKAAN							
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Persen	58,36	64,68	71,12	81,76	67,04	Dispusip
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persen	51,59	54,51	86,34	87,29	87,66	Dispusip

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
	KEARSIPAN							
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	100	100	100	100	100	Dispusip
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	86,2	100	100	100	100	Dispusip
	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	15.829,90	17.244,40	99,458	100,012	100,112	DKP2TPH
	PARIWISATA							
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-61,769	379,759	198,898	0,35	4,52	Diskeporapar
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Persen	-31,887	351,964	-4,168	24,54	1,25	Diskeporapar
3	Tingkat Hunian Akomodas	Persen	14,468	13	13,502	9	29,03	Diskeporapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen		1,8	2	1,37	1,42	Diskeporapar & BPS

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen		9,46	8	31,75	25,15	Diskeporapar
	PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Ton/ha	460,001	560	468,725	471,28	502,01	DKP2TPH
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular/Persentase kasus zoonosis kab/kota	Persen	-125	-183,333	1.300	-66,667	29,22	Disbunak
	PERDAGANGAN							
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP) Toko Swalayan	Persen	100	100	100	61,01	14,63	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	91,129	30,397	12,24	44,65	49,43	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
3	Persentase alat-alat ukut, takar, timbang dan perlengkapannya (UTPP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	100	52,722	56,798	74,05	86,50	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
	PERINDUSTRIAN							
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	39,189	13,748	290,411	1,57	14,85	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Persen	0,82	3,71	3,97	4,27	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	100	100	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	100	0	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	0	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
6	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap	Persen	100	95	100	100	100	Dinas Koperasi, UKM dan Perindag
	PERENCANAAN KEUANGAN							
1	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	10,848	11,167	9,534	9,36	9,50	BPKAD
2	Rasio PAD	Persen	0,972	0,966	11,993	115,87	9,28	BPKAD
3	Maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3,000	3,099	3	Inspektorat

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
4	Peningkatan kapabilitas Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	2	2	2	3	3	Inspektorat
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	72,584	86,438	64,113	53,84	52,44	BPKAD
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
	PENGADAAN							
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0,201	0,274	0	0	Bag. PBJ Sekretariat Daerah
2	Persentase jumlah pengadaan yang di lakukan dengan metode kompetitif	Persen	10,628	26,908	39,579	14,54	82,72	Bag. PBJ Sekretariat Daerah
3	Rasio nilai belanja yang di lakukan melalui pengadaan	Persen	99,11	100	61,697	71,75	74,61	Bag. PBJ Sekretariat Daerah & BPKAD
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	0	127,508	135,208	48,06	26,86	Bag. PBJ Sekretariat Daerah
	KEPEGAWAIAN							
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	68,251	71,245	73,302	75,07	76,97	BKPSDM
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	10,915	25,996	21,904	23,47	23,40	BKPSDM

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI					PERANGKAT DAERAH
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompentensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	100	25	34,65	100	100	BKPSDM
	MANAJEMEN KEUANGAN							
1	Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	19,349	86,219	12,354	13,02	16,11	BPKAD
2	Revenue mobilization : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	8,706	99,402	23,329	15,87	6,88	BPKAD
3	Assets Management	Persen	4	4,000	100	100	100	BPKAD
4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun sebelumnya	Persen	18,661	10,048	28,847	29,53	32,11	BPKAD
	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK							
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (information on resources available to frontline service delivery units)	Persen	123,991	80,613	86,576	84,07	84,43	BPKAD
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah(Public access to fiscal information)	Persen	100	8,333	100	100	100	BPKAD

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2020 sampai tahun 2024

2.1.6. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Dalam pemberian pelayanan dasar, diterapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan dan pencapaian SPM dilakukan melalui program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah pengampu urusan wajib terkait pelayanan dasar. Pencapaian SPM Kabupaten Tabalong pada tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah.

2.1.6.1. Bidang Urusan Pendidikan

Capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang Pendidikan Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

A. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

1. APS APUD

URAIAN		REALISASI	
B.10 Indikator PAUD Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 tahun	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	8.877	95,42%
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini (PAUD)	9.303	

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

2. APS Pendidikan Dasar

URAIAN		REALISASI	
B.13 Indikator Dasmen Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia	Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	42.830	97,75%
	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang berpartisipasi pada pendidikan dasar	43.814	

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

3. APS Pendidikan Kesetaraan

URAIAN		REALISASI	
B.15 Indikator Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 7-18 Kesetaraan	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (*)	1.013	91,26%
	Jumlah warga negara 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada Kabupaten Tabalong	1.110	

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

B. Kemampuan Literasi

URAIAN		CAPAIAN	SKOR
A.1 Kemampuan Literasi	Rerata kemampuan literasi sekolah dasar (SD) berdasarkan Asesmen Nasional	Baik	71,81
	Rerata kompetensi literasi sekolah menengah pertama	Baik	77,15

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

C. Kemampuan Numerasi

URAIAN		CAPAIAN	SKOR
A.2 Kemampuan Numerasi	Rerata kemampuan numerasi sekolah dasar (SD)	Sedang	60,86
	Rerata kompetensi numerasi sekolah menengah pertama (SMP) erdasarkan Asesmen Nasional	Baik	70,03

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

D. Proporsi Jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B

URAIAN		REALISAS
B.8 Indikator PAUD Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	32,88%

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

E. Tingkat Pertumbuhan Pendidik PAUD S1 dan D IV

URAIAN		REALISASI	
C.1 Indikator PAUD Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	Jumlah Pendidik PAUD yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1)	771	68,35%
	Jumlah Pendidik PAUD	1.128	

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

F. Iklim Keamanan

URAIAN		CAPAIAN	SKOR
D.4 Indikator Dasmen Iklim Keamanan	Indeks Iklim Keamanan SD	Baik	71,32
	Indeks Iklim Keamanan SMP	Baik	72,34

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

G. Iklim Kebhinekaan

		CAPAIAN	SKOR
D.8 Iklim Kebinekaan	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Baik	71,50
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Baik	74,54

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

H. Iklim Inklusivitas

		CAPAIAN	SKOR
D.10 Iklim	Indeks Iklim Inklusivitas SD	Baik	54,34
	Indeks Iklim Inklusivitas SMP	Baik	58,07

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

2.1.6.2. Bidang Urusan Kesehatan

Capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang Kesehatan Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.186
Capaian Pelaksanaan untuk Pelayanan Dasar Kesehatan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar			Pendanaan			
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran	Sumber Dana
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.561	3.561	100,00	608.110.926	531.756.400	87,44	APBD
2	Pelayanan Kesehatan Ibu	3100	3.093	99,77	255.464.552	229.786.000	89,95	APBD
3	Pelayanan Kesehatan Bayi	3.100	2.987	96,35	334.867.656	160.780.200	48,01	APBD
4	Pelayanan	18.551	16.712	90,09	173.109.920	153.932.348	88,92	APBD
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan dasar	43.561	43.561	100,00	896.907.034	833.252.000	92,90	APBD
6	Pelayanan Kesehatan Pada	173.120	171.383	99,00	92.712.000	76.644.000	82,67	APBD
7	Pelayanan Kesehatan Pada	19.000	18.591	97,85	148.865.325	136.930.000	91,98	APBD
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16.943	16.951	100,05	73.952.000	56.712.200	76,69	APBD
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3.424	3.429	100,15	339.332.000	283.251.200	83,47	APBD
10	Pelayanan Kesehatan Orang Gangguan Jiwa Berat	368	306	83,15	18.436.000	10.460.000	56,74	APBD
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4.166	2.525	60,61	490.716.192	451.678.200	92,04	APBD
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	6.445	3.966	61,54	125.707.000	75.912.400	60,39	APBD

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Tabel 2.187
Rekapitulasi Capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3561	3561	80,00	677447	676282	19,44	99,44
2	Pelayanan Kesehatan Ibu	3100	3093	79,82	14146	14146	20,00	99,82
3	Pelayanan Kesehatan Bayi	3100	2987	77,08	21604	17686	18,38	95,46
4	Pelayanan Kesehatan Balita	18551	16712	72,07	232554	175548	17,62	89,69
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	43561	43561	80,00	168498	162613	19,55	99,55
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	173120	171383	79,20	5047	4241	19,68	98,88
7	Pelayanan Kesehatan Pada	19000	18591	78,28	53906	34652	17,99	96,27

No	Jenis Pelayanan Dasar (SPM	Penerima Layanan Dasar			Penyediaan Mutu Layanan Dasar			Capaian SPM
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	16943	16951	80,04	6099732	88893	18,36	98,40
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	3424	3429	80,12	246863	33774	17,84	97,96
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai	368	306	66,52	392	392	20,00	86,52
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	4166	2525	48,49	6527	8035	19,77	68,26
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	6445	3966	49,23	11115	14442	20,00	69,23

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

2.1.6.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Secara kumulatif pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pelayanan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari sampai dengan Tahun 2024 adalah 82,41% dimana melayani 74965 KK dari jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 87826 KK, hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong sehingga persentase capaian belum mencapai 100%. Namun untuk tahun 2024 sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum memiliki target tahunan 1500 SR terpasang dan telah terealisasi sebanyak 2434 SR yang berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenTabalong telah melebihi target tahun 2024 tersebut. Untuk tahun-tahun ke depan kinerja pelayanan kebutuhan pokok air minum akan terus ditingkatkan agar target 100% akses air minum tercapai.

Tabel 2.188
Rekapitulasi Capaian Layanan Air Minum
Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Jenis Layanan	Total Rumah	Realisasi		
		Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	85.821	70.729	15.092	82,41%

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Secara kumulatif pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam hal pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik sampai dengan Tahun 2024 adalah 95,05% dimana melayani 83483 KK dari jumlah rumah tangga di Kabupaten sebanyak 87826 KK, hal ini dikarenakan pesatnya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tabalong sehingga persentase capaian belum mencapai 100%. Namun untuk tahun 2024 sendiri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sub Kegiatan Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat memiliki target tahunan 1 unit tangki septik terpasang dimana mampu melayani 1 KK secara individual dan telah terealisasi sebanyak 682 unit tangki septik individual dimana melayani 682 KK, yang berarti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang KabupatenTabalong telah melebihi target tahun 2024 tersebut. Untuk tahun-tahun ke depan kinerja pelayanan penyediaan pengolahan air limbah domestik akan terus ditingkatkan agar target 100% akses sanitasi tercapai.

Tabel 2.189
Rekapitulasi Capaian Layanan Air Minum dan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Tabalong Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Total Rumah di Kabupaten/Kota	Realisasi		
			Sudah Terlayani	Belum Terlayani	Persentase Capaian (%)
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-	87826	74965	12861	85,36
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah	87826	83483	4343	95,05

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

2.1.6.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Adapun capaian SPM Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana yang telah direalisasikan pada tahun 2024 sebanyak 16 (enam belas) unit rumah, sedangkan target yang ditetapkan pada tahun 2024 ada sebanyak 16 (enam belas) unit rumah, oleh karena itu kegiatan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni berbagi korban bencana berjalan dengan sesuai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100%.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) unit. Dimana pada kegiatan RTLH terbangun dengan target 40 (empat puluh satu) unit pada Tahun 2024. Kegiatan RTLH terbangun dan tertangani sesuai dengan target yang ditentukan yaitu sebesar 95%. Oleh karena itu total fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten dilaksanakan 38 (tiga puluh delapan) unit.

Capaian pelaksanaan penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut:

Tabel 2.190
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	16 Unit	16 Unit
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	40 Unit	38 Unit

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

2.1.6.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan kegiatan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong pada tahun 2024, tidak terdapat warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada.

Tabel 2.191
Realisasi Capaian untuk SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target SPM 2024	Realisasi SPM 2024
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Capaian pelaksanaan penerapan SPM Kebencanaan Tahun 2024 di Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

Tabel 2.192
Capaian Pelayanan Informasi Rawan Bencana Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Realisasi	
			Jumlah	%
1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Tersedianya data/informasi tentang jenis dan risiko bencana dalam bentuk dokumen yang sah/legal	1	100%
2	Komunikas, Informasi dan Edukasi rawan bencana	Terselenggaranya komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana kepada masyarakat per jenis ancaman bencana	1.800	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Tabel 2.193
Capaian Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Realisasi Pencapaian	
			Jumlah	%
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Tersedianya data/informasi tentang rencana penanggulangan bencana dalam bentuk dokumen resmi	1	100%
2	Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Tersedianya data/informasi tentang rencana kontinjensi dalam bentuk dokumen resmi	1	100%
3	Pelatihan pencegahan dan mitigasi	Terlatihnya aparatur yang menangani sub- urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana	41	100%
5	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana	Tersedianya layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	265.820	100%
6	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Tersedianya peralatan perlindungan terhadap bencana	1.800	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

Tabel 2.194
Capaian Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Tahun 2024

No	Sub Kegiatan	Sasaran	Realisasi	
			Jumlah	%
1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam	0	0%
2	Respon cepat darurat bencana	Terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status darurat bencana kurang dari 24 jam	150	100%
3	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana	24	100%
4	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	Terlaksana pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	11	100%

Sumber: LPPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

2.1.6.6. Bidang Urusan Sosial

Analisa capaian realisasi SPM bidang Sosial pada tahun 2024 dapat diuraikan dengan lebih ringkas sebagai berikut:

1. Jumlah Layanan Data dan Pengaduan yang dimiliki.

   Dinas Sosial Kabupaten Tabalong memiliki 1 Layanan Data satu pintu yang bernama BAHTERA SOSIAL (Bantuan Kesejahteraan Sosial), yang mana didalamnya berisi 3 Layanan, yaitu:

   - Data Kemiskinan. Data ini berfungsi sebagai data dasar pelaksanakan penerapan SPM.
   - Layanan Pengaduan Online melalui https://bahtera.tabalongKabupatengo.id
   - Layanan Pengaduan Offline melalui:
     a) Fasilitator Desa atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang tersebar di 12 Kecamatan dan Desa di Wilayah Kabupaten Tabalong.
     b) Unit SLRT SERASI yang bertempat di Kantor Dinas Sosial Kabupaten

Tabalong atau di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tabalong.

2. Dalam rangka Kesiapsiagaan Penanganan Bencana pada Tahun Anggaran 2024, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah menyiapkan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Bantuan Sosial lainnya antara lain sebagai berikut:
   a. TAGANA, Sahabat TAGANA DAN Tim Reaksi Cepat.
      Jumlah Personil untuk TAGANA (Taruna Siaga Bencana) sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
   b. Kampung Siaga Bencana.
      Kampung Siaga Bencana yang sudah terbentuk ada pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu di Kecamatan Bintang Ara, Kecamatan Haruai dan Kecamatan Banua Lawas.
   c. Kendaraan Siaga Bencana.
      Kendaraan Siaga Bencana yang dimiliki untuk Operasioanal Penanganan Bencana sebanyak 5 (lima) unit yaitu 1 (satu) unit RTU,
      4 (empat) unit Sepeda trail, 1 (satu) unit Truck Barang, 1 (satu) unit
      Truck Dapur Umum dan 1 (satu) unit VIAR.
   d. Alat Evakuasi.
      Alat Evakuasi yang dimiliki untuk Operasional Penanganan Bencana ada 4 (empat) unit perahu yaitu 1 (satu) unit Perahu Karet, 1 (satu)
      unit perahu fiber, 1 (satu) unit perahu floating dan 1 (satu) unit perahu dolphin dan tenda sebanyak 31 (tiga puluh satu) buah.
   e. Sistem Komunikasi.
      Sistem Komunikasi yang dimiliki untuk Operasioanal Penanganan Bencana ada 10 (sepuluh) unit HT, 1 (satu) unit radio reg.
   f. Mitra Kerja dengan BPBD dan DAMKAR.
   g. Gudang.
      Gudang yang dimiliki untuk penyimpanan persediaan

permakanan dan persediaan sandang dalam rangka ketersediaan buffer stock saat bencana ada 1 (satu) buah.

h. Bantuan untuk Santunan Bencana.

Penerima bantuan santunan bencana sebanyak 476 (empat ratus tujuh puluh enam) keluarga. Penerima bantuan makanan dan sandang korban bencana sebanyak 48 (empat puluh delapan) keluarga. Penyediaan Permakanan untuk korban banjir sebanyak 838 (delapan ratus tiga puluh delapan) keluarga didaerah banyu tajun dan binturu.

3. Penerapan SPM untuk pelayanan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penyandang Disabilitas Terlantar

Penyandang Disabilitas Terlantar di Kabupaten Tabalong yang mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp. 300.000,- per orang per bulan sebanyak 95 (sembilan puluh llima) orang. Bantuan tunai tersebut digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan permakanan, sandang dan perbekalan kesehatan nya.

b. Lanjut Usia Terlantar.

Lanjut Usia Terlantar di Kabupaten Tabalong yang mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp. 250.000,- per orang per bulan sebanyak 694 (enam ratus sembilan puluh empat) orang. Bantuan tunai tersebut digunakan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan permakanan, sandang dan perbekalan kesehatannya.

c. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan Pengemis yang ditangani oleh Dinas Sosial mendapatkan layanan bantuan permakanan, sandang, cek kesehatan dan transportasi untuk kembali ke tempat asalnya sebanyak 22 (dua puluh dua) orang. Gelandangan dan Pengemis tersebut sebagian adalah warga Kabupaten Tabalong dan bukan warga Kabupaten Tabalong.

4. Rumah Singgah yang tersedia berada di Jl. Tanjung Selatan RT. 07. Kamar yang tersedia sebanyak 12 (dua belas) kamar, Ruang Tamu sebanyak 1 (satu) buah dan Dapur sebanyak 1 (satu) buah. Petugas Kesehatan yang disediakan 1 (satu) orang.
5. Alat bantu yang tersedia di rumah singgah berupa Kursi Roda sebanyak 1 (satu) buah, Tongkat Walker sebanyak 1 (satu) buah dan Alat Bantu Dengar sebanyak 1 (satu) buah.
6. Penerima Bantuan yang memanfaatkan alat bantu sebanyak 1 (satu) orang.

2.1.7. Kerjasama Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Sementara Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan Pihak Ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong telah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik unsur pemerintah maupun non pemerintah/pihak ketiga. Adapun daftar kerjasama yang dilakukan beberapa tahun terakhir dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.195
Rekapitulasi Kerjasama Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
1	Pemerintah Kota Palangka Raya	Pemerintah Kabupaten Tabalong		13/KB-KSD/PLK/2024	100.3.7.1/17/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	01/TKKSD/PEM-TAB/2024	Jum'at, 01 Maret 2024	Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	29/04/2024	29/04/2029	2024	Kesepakatan Bersama
2	Pemerintah Kabupaten Tabalong (BKPSDM)	Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan		400.1/734/IPDN	100.3.7.1/15/NKRK/PEM-TAB/2024	02/TKKSD/PEM-TAB/2024	Jum'at, 01 Maret 2024	Penyelenggaraan Tri Dharma Pengurus Tinggi dan Pembangunan di Kabupaten Tabalong	01/08/2024	01/08/2029	2024	Nota Kesepakatan
3	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang	Pemerintah Kabupaten Tabalong (BKPSDM)				03/TKKSD/PEM-TAB/2024	Jum'at, 01 Maret 2024	Penyelenggaraan Proses Kegiatan Belajar Mengajar, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat			2024	Nota Kesepahaman
4	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bapeda)	Universitas Gajah Mada				04/TKKSD/PEM-TAB/2024	Jum'at, 01 Maret 2024	Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat		5 Tahun	2024	Kesepakatan Bersama
5	Pemerintah Kabupaten Tabalong (BKPSDM)	Kementerian Keuangan				05/TKKSD/PEM-TAB/2024	Kamis, 18 April 2024	Nota Kesepahaman Pengembangan SDM di Bidang Keuangan Daerah			2024	Nota Kesepahaman
6	Universitas Cahaya Bangsa	Pemerintah Kabupaten Tabalong		142/UCB.R/HK/2024	06/TKKSD/PEM-TAB/2024	06/TKKSD/PEM-TAB/2024	Rabu, 03 April 2024	Pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi	03/04/2024	03/04/2029	2024	Kesepakatan Bersama
7	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Dinas Lingkungan Hidup	PT. Makmur Sejahtera Wisesa	PT. Tanjung Power Indonesia	07/TKKSD/PEM-TAB/2024	MSW/6/NEC/-G/V/2024	047/TPI/CTR/V/2024	Kamis, 30 Maret 2024	Kerjasama Pengolahan Sampah Organik Menjadi Bahan Bakar Jumputan Padat Untuk CO-FIRING Pembangkit Listrik Tenaga Uap PT. Makmur Sejahtera Wisesa	28/05/2024	28/05/2029	2024	Kesepakatan Bersama

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
8	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bapenda)	PT. PLN Persero				100.3.7.1/09/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	Selasa, 25 Juni 2024	Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dan PT. PLN (Persero) Unit Induk Obtribusi Kalimatan Selatan dan Kalimatan Tengah Unit Pelayanan Pelanggan Barabai tentang Pemungut dan Penyetoran Pajak Barang Jasa Atas Tenaga Listrik, Pengelolaan Ketenagakerjaan dan Penerangan Jalan Umum dan Pembayaran Rekening Listrik Pemerintah Kabupaten Tabalong.			2024	Kesepakatan Bersama
9	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bapenda)	PT. PLN UP3 Barbai				100.3.7.10/PKS/PEM/TAB/2024	Selasa, 25 Juni 2024	Perjanjian Kerjasama Antara PT. PLN (Persero) Up3 Barabai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong			2024	Perjanjian Kerjasama
10	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Tabalong		001/HK.02.00/K.KS-08/07/2024	100.3.7.1/II/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	100.3.7.1/II/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	Rabu, 17 Juli 2024	Kesepakatan Bersama	06/07/2024	06 Desember 2024	2024	Kesepakatan Bersama
11	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Rs. Pertamina Tanjung		100.3.7.1/13/KSB/TKKSD/PEM/TAB/2024	288/F00000/2024-S0	100.3.7.1/13/KSB/TKKSD/PEM/TAB/2024	Rabu, 24 Juli 2024	Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Tabalong	24/07/2024	24/07/2025	2024	Kesepakatan Bersama

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
12	Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Dinas Pendidikan)			100.3.7.1/14/KSB/TKKSD/PEM/-TAB/2024	100.3.7.1/14/KSB/TKKSD/PEM/-TAB/2024	Jum'at, 26 Juli 2024	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pembangunan Daerah	26/07/2024	26/07/2029	2024	Kesepakatan Bersama
13	Institut Pemerintahan Dalam Negeri	Pemerintah Kabupaten Tabalong (BKPSDM)			100.3.7.1/15/NKRK/PEM-TAB/2024	100.3.7.1/15/NKRK/PEM-TAB/2024	Senin, 05 Agustus 2024	Penyelenggaran Tridharma Perguruan Tinggi	05/08/2024	05/08/2029	2024	Nota Kesepahaman
14	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bidang Pariwisata)		100.3.7.1//PKS-A/PEM.OTDA/2024	100.3.7.1/16/PKS/PEM-TAB/2024	100.3.7.1/16/PKS/PEM-TAB/2024	Rabu, 14 Agustus 2024	Penyediaan, Pemanfaatan, Pengembangan Data dan Informasi Statistik Bidang Pariwisata di Kalimantan Selatan Pengembangan dan Pengelolaan Pariwisata	14/08/2024	14/08/2027	2024	Perjanjian Kerjasama
15	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Setwan)	Pemerintah Daerah Provinsi Kalimatan Selatan		100..3.7.1/18/PKS/PEM-TAB/2024		100..3.7.1/18/PKS/PEM-TAB/2024	Rabu, 11 September 2024	Penyelenggaran Orientasi Bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Tabalong	11/09/2024	31/12/2024	2024	Perjanjian Kerjasama
16	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Inspektorat)	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan		100.3.7.1/19/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024		100.3.7.1/19/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	Rabu, 18 September 2024	Kerja Sama Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Dan Pembangunan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong	18/09/2024	18/09/2026	2024	Kesepakatan Bersama
17	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bapperida)	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		100.3.7.1/21/PKS/PEM-TAB/2024		100.3.7.1/21/PKS	Rabu, 18 September 2024	Perjanjina Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Tabalong tentang Kapasitas Kelembagaan Kelitbang Melalui Riset dan Inovasi Daerah	18/09/2024	18/09/2027	2024	Perjanjian Kerjasama

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
18	Pemerintah Kabupaten Tabalong (BKPSDM)	Politeknik Keuangan STAN		100.3.7.1/21/PKS/PEM-TAB/2024	PRJ-/PKN/2024	100.3.7.1/21/PKS/PEM-TAB/2024	Senin, 07 Oktober 2024	Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara Di Bidang Keuangan Negara Melalui Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Keuangan Negara Dan Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Angkatan 2024 Di Politeknik Keuangan Negara Stan	07/10/2024	07/04/2029	2024	Perjanjian Kerjasama
19	Politeknik Keuangan STAN	Pemerintah Kabupaten Tabalong (BKPSDM)		NK-13/PKN/2024	05/TKKSD/PEM/-TAB/2024	100.3.7.1/21/PKS/PEM-TAB/2024	Kamis, 18 April 2024	Program Pembibitan Calon Aparatur Sipil Negara Di Bidang Keuangan Negara Melalui Penyelenggaraan Program Studi Manajemen Keuangan Negara Dan Program Studi Manajemen Aset Publik Program Sarjana Terapan Angkatan 2024 Di Politeknik Keuangan Negara Stan	18/04/2024	18/04/2029	2024	Nota Kesepahaman
20	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Amuntai	Pemerintah Kabupaten Tabalong		015/MoU/STIPER-Amt.K/VIII/2024	100.3.7/22/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	100.3.7/22/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	Jum'at, 13 September 2024	Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Masyarakat	13/09/2024	13/09/2029	2024	Perjanjian Kerjasama
21	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Amuntai	Pemerintah Kabupaten Tabalong		016/MoU/STIPER-Amt.K/VIII/2024	100.3.7/23/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	100.3.7/23/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	Jum'at, 13 September 2024	Kegiatan MBKM Mandiri Program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting)	13/09/2024	13/09/2029	2024	Perjanjian Kerjasama
22	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (Stiper) Amuntai	Pemerintah Kabupaten Tabalong		017/MoU/STIPER-Amt.K/VIII/2024	100.3.7/24/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	100.3.7/24/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2024	Jum'at, 13 September 2024	Kegiatan MBKM Mandiri Program Mahasiswa Peduli Stunting (Mahasiswa Penting)	13/09/2024	13/09/2029	2024	Perjanjian Kerjasama

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
23	Pemerintah Kabupaten Tabalong (BKPSDM)	Kepolisian Negara Republik Indonesia		100.3.7/25 /NK/PEM-TAB/2024	NK/ /X/2024	100.3.7/25/NK/PEM-TAB/2024		Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong		2 Tahun	2024	Nota Kesepakatan
24	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bupati Tabalong)	Politehnik Negeri Banjarmasin		08/TKKSD /PAEM/TAB/2023	1947/PL18/ KS/2023	08/TKKSD/PEM/TAB/2023	Jum,at, 28 Juli 2023	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	28 July 2023	28/07/2028	2023	Nota Kesepakatan
25	UnIversitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin	Pemerintah Kabupaten Tabalong		38/UNISKA/A.10/2023	021/TKKSD/ PEM-TAB/2023	021/TKKSD/PEM-TAB/2023	Senin, 06 Maret 2023	Kerjasama Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Perencanaan dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Tabalong	06/03/2023	06/03/2026	2023	Nota Kesepakatan
26	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bupati Tabalong)	Kejaksaan Negeri Tabalong		09/TKKSD /PEM/TAB /2023	B-03/0.3.16/Gs/07/2023	09/TKKSD/PEM/TAB/2023	Kamis, 13 Juli 2023	Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara	13/07/2023	13/07/2025	2023	Nota Kesepakatan
27	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Baperida)		03/KSB-PEMOTDA /2023	01/TKKSD/PEM-TAB/2023	01/TKKSD/PEM-TAB/2023	Selasa, 07 Pebruari 2023	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Publik	07/02/2023	07/02/2028	2023	Nota Kesepakatan
28	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bupati Tabalong)	STIA Bina Banua Banjarmasin		09/Tahhun 2022	../STIA-YPBB/KSI/II /2022	09/Tahhun 2022	Selasa, 22 Maret 2022	Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	22/03/2022		2022	Nota Kesepakatan

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
29	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Kementerian Agama Kabupaten Tabalong		197/KK.17.09-/HM.01/02/2022	B-129/DP3AP2KB/SET/800/02/2022			Pelaksanaan Layanan Penjangkauan Melalui Konseling Psikologis Pranikah Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak, Tanjung, dan Tanta di Kabupaten Tabalong	18/02/2022	18/02/2025	2022	Perjanjian Kerjasama
30	PT Jasa Raharja Cabang Banjarmasin	Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong		P/16/SP/2022	B-047/DISHUB/AKM/551/11/2022			Pelaksanaan Penyetoran Iuran Wajib Penumpang Umum Angkutan Masyarakat dan Anak Sekolah	10/09/2022	10/09/2023	2022	Perjanjian Kerjasama
31	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bupati Tabalong)	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia Banjarmasin						Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi Mukadimah		5 Tahun	2022	Perjanjian Kerjasama
32	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bupati Tabalong)	Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong		06 Tahun 2021	B-06/BPS/63091/IV/2021	06 Tahun 2021	Selasa, 20 April 2021	Kerja sama Penyusunan Data Pembangunan Kabupaten Tabalong	20/04/2021	20/04/2026	2021	Perjanjian Kerjasama
33	Pemerintah Kabupaten Paser Propinsi Kaltim	Pemerintah Kabupaten Tabalong Propinsi Kalsel		019.8/3089/KS/2020	28 Tahun 2020	28 Tahun 2020	Senin, 14 Desember 2020	Pembangunan Antar Daerah	14/12/2020	14/12/2021	2020	Perjanjian Kerjasama

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
34	Pemerintah Kabupaten Tabalong	PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Banjarmasin		26 Tahun 2020	MOU-003/C.1.8/12/2020	26 Tahun 2020	Selasa, 01 Desember 2020	Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	01/12/2020	01/12/2020	2020	Perjanjian Kerjasama
35	Pemerintah Kabupaten Tabalong	PT Brilliant Ecommerce Berjaya		27 Tahun 2020	008/MM-BEB/XII/2020		Senin, 14 Desember 2020	Pemanfaatan Platform E-Marketplace Untuk Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabalong	14/12/2020	12/12/2023	2020	Perjanjian Kerjasama
36	Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong	Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tabalong		19 Tahun 2020	B/847/HUK.8.1.1/IX/2020	19 Tahun 2020	Rabu, 09 September 2020	Program Pengembangan Pendidikan Berlalu Lintas	09/09/2020	09/09/2022	2020	Perjanjian Kerjasama
37	Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Tabalong	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabalong		633/Org/Kab-Tab/XXI/2020	B.638/DP3AP2KB/PP-263/12/2020			Pelaksanaan Pendidikan yang Responsif Gender dan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	23/12/2020	23/12/2020	2020	Perjanjian Kerjasama
38	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Kepolisian Resor Tabalong		18 Tahun 2020	B/846/HUK.8.1.1/IX/2020	18 Tahun 2020	Rabu, 09 September 2020	Peningkatan Sinergitas Antara Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan kepolisian Resor Tabalong	09/09/2020	09/09/2023	2020	Perjanjian Kerjasama
39	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong		13 tahun 2020	52/KEP-63.09/III/2020	13 Tahun 2020	Selasa,17 Maret 2020	Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan retribusi Tanah di Kabupaten Tabalong	17/03/2020	17/12/2020	2020	Perjanjian Kerjasama

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
40	Pengadilan Agama Tanjung	Pemerintah Kabupaten Tabalong		W15-A10/1383/HK.03.4/X/2020	20 Tahun 2020	20 Tahun 2020	Rabu, 21 Oktober 2020	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah dan penegakan Hukum Serta Keadilan Bagi Rakyat Pencari Keadilan Perkara tertentu	21/10/2020	21/10/2023	2020	Nota Kesepakatan
41	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong		12 Tahun 2019	210/PK-63.09/VII/2019	12 Tahun 2019	Selasa, 30 Juli 2019	Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	30/07/2019	30/07/2024	2019	Nota Kesepakatan
42	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Kejaksaan Negeri Tabalong		11 Tahun 2019	B-03/0.3.16/GS/07/2019	11 Tahun 2019	Rabu, 17 Juli 2019	Kesepakatan bersamaBidang Hukum dan Tata Usaha Negara	17/07/2019	17/07/2021	2019	Nota Kesepakatan
43	Pemerintah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel	Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur		12 Tahun 2019	134.4/984/PEM.3	12 Tahun 2019	Senin, 09 Desember 2019	Pembangunan Antar Daerah	09/12/2019	09/12/2020	2019	Nota Kesepakatan
44	Pemerintah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel	Pemerintah Kabupaten Tabalong		12/KSB-PEM/2019	19 Tahun 2019	19 Tahun 2019	Kamis, 10 Oktober 2019	Kerjasama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan	10/10/2019	10/10/2020	2019	Nota Kesepakatan
45	Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalsel		134.4/1041/PEM.3/2018	19 Tahun 2018	19 Tahun 2018	Sabtu, 29 Desember 2018	Pembangunan Antar Daerah	29/12/2018	29/12/2019	2018	Nota Kesepakatan
46	Dinas Kesehatan Kabupaten Paser Provinsi	Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tabalong		443.41/3699/P2PM/XII/2018	332 Tahun 2018	332 Tahun 2018	Sabtu, 29 Desember 2018	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Daerah Perbatasan	29/12/2018	29/12/2021	2018	Nota Kesepakatan

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
	Kalimantan Selatan	Provinsi Kalsel										
47	Universitas PGRI Kalimantan	Pemerintah Kabupaten Tabalong		100.3.7.1/ /KSB/PEM-TAB/2025	010/PKS/R/ UPK/11/2024			Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Kepada Masyarakat, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Belum di tetapkan	5 Taun	2025	Kesepakatan Bersama
48	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Politeknik Statistika STIS		100.3.7.1/ 01/NK/PEM/-TAB/2025	B-42/02700/HK.610/2025	100.3.7.1/01/ NK/PEM/-TAB/2025	Kamis, 30 Januari 2025	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Penembangan SDM	30/01/2025	30/01/2030	2025	Nota Kesepakatan
49	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Dinsos)	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung		100.3.7.1/ 02/NKRK/ TKKSD/PEM-TAB/2025	0210/9.7/PR .02/01/2025	100.3.7.1/02/ NKRK/TKKSD /PEM-TAB/2025	Rabu, 22 Januarari 2025	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	22/01/2025	22/01/2030	2025	Nota Kesepakatan
50	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Universitas Lambung Mangkurat		02/TKKSD /PEM.TAB /2023	197/UN8/KS /2023	02/TKKSD/PEM.TAB/2023	Rabu, 01 Maret 2023	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruna Tinggi dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tabalong	01/03/2023	01/03/2028	2023	Nota Kesepahaman
53	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bapperida)	Universitas Lambung Mangkurat		100.3.7.1/ 11/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025	026/UN8/KS .01/2025	100.3.7.1/11/ KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025	Rabu, 12 Maret 2025	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tabalong	26/03/2025	26/03/2030	2025	Kesepakatan Bersama
54	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bapperida)	Universitas Lambung Mangkurat		100.3.7.1/ 12/PKS/TKKSD/PEM-TAB/2025	080/UN8/KS .01/2025	100.3.7.1/11/ KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025	Rabu, 12 Maret 2025	Kerjasama di Bidang Pembinaan Lembaga Pendidikan dan Program Beasiswa	26/03/2025	26/03/2030	2025	Perjanjian Kerjasama
55	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bapperida)	Pemerintah Kabupaten Hulu		100.3.7.1/ 14/PKS/TKKSD/PE	100.3.7.1/02 /KB/PEM/HSS/2025	100.3.7.1/14/ PKS/TKKSD/PEM-TAB/2025	Rabu, 12 Maret 2025	Penggunaan dan pengelolaan aplikasi elektronik akuntabilitas	10/02/2025	10/02/2027	2025	Perjanjian Kerjasama

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
		Sungai Selatan		M-TAB/2025				kinerja instansi pemerintah (E-Sikap)				
56	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Diskominfo)	Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber Dan Sandi Negara		B-1/DISKOMINFO/000.4.7.2/03/2025	PERJ.138/BSSN/BS/KJ.01.02/03/2025			Pemanfaatan Sertifikat Elektronik Pada Sistem Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong	17/03/2025	17/03/2029	2025	Perjanjian Kerjasama
57	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Baperida)	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta		100.3.7.1/15/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025	013/UN62/HK.07.00/PKS/2025	100.3.7.1/15/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025	Rabu, 19 Maret 2025	Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi	19/03/2025	19/03/2030	2025	Kesepakatan Bersama
58	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bappenda)	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Tanjung Tabalong		100.3.7.1/18/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025		100.3.7.1/18/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025	Kamis, 10 April 2025	Penggunaan Fasilitas Layanan Jasa Perbankan Dan Dukungan Program Smart City		3 tahun	2025	Kesepakatan Bersama
59	Pemerintah Kabupaten Tabalong	PT. CONCH		100.3.7.1/16/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025	NO07-CSKC-2025-4	100.3.7.1/16/KSB/TKKSD/PEM-TAB/2025	Rabu, 09 April 2025	Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong	09/04/2025	09/04/2030	2025	Kesepakatan Bersama
60	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Institut Pertanian Bogor		100.3.7.1/19/KSB/PEM-TAB/2025	8/IT3/HK.07.00-2/P/B/2025	100.3.7.1/19/KSB/PEM-TAB/2025	Tuesday, 22 April 2025	Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat	22/04/2025	22/04/2030	2025	Kesepakatan Bersama
61	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Univeristas Brawijaya						Pendidikan, Penelitan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat			2025	Kesepakatan Bersama

NO.	MITRA KERJA			NOMOR KERJASAMA		NOMOR REGISTER	TANGGAL REGISTER	URAIAN KERJASAMA	TANGGAL PENGESAHAN	MASA BERLAKU	TAHUN	TYPE
	Pihak 1	Pihak 2	Pihak 3	Pihak 1	Pihak 2							
62	Pemerintah Kabupaten Tabalong	Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur						Kerjasama Pembangunan Antar Daerah			2025	Kesepakatan Bersama
63	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Baperida)			100.3.7.1/20 PKS/TKKSD /PEM-TAB/2025	100.3.7.1/20P KS/TKKSD/PE M-TAB/2025		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelitbangan Melalui Riset dan Inovasi Daerah			2025	Perjanjian Kerjasama
64	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Dinas Lingkungan Hidup)	PT. CONCH						Pengelolaan Sampah Tidak Layak Daur Ulang Menjadi Sampah RDF Untuk Substitusi Bahan Bakar Rotary Klin PT. Conch Kalimantan Cement			2025	Kesepakatan Bersama
65	Pemerintah Kabupaten Tabalong (Baperida)	Provinsi Kalimantan Selatan						Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Batalyon Infantri Teritorial Pembangunan 828 di Kabupaten Tanah Bumbu			2025	Kesepakatan Bersama
66	Pemerihtah Kabupaten Tabalong (Bag. Hukum)	Kejaksaan Negeri Tabalong						Kesepakatan Bersama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara			2025	Ksepakatan Bersama

Sumber: hasil analisis, 2025

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1. Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Keuangan daerah merupakan segala hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk menyelenggarakan pemerintah daerah, hal ini menandakan bahwa keuangan daerah menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya. Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan dilaksanakan secara optimal apabila dalam pelaksanaan urusan pemerintahan diikuti dengan diterimanya sumber pendapatan yang cukup untuk membiayai sektor pembangunan.

Menyadari hal tersebut, maka diperlukannya analisis kinerja keuangan masa lalu daerah. Kinerja keuangan masa lalu daerah menjadi bagian yang penting karena kinerja keuangan masa lalu dapat memberikan gambaran tentang bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan. Analisis kinerja keuangan masa lalu merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan mereka di masa lalu. Pada dasarnya analisis kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah untuk mendanai penyelenggaraan Pembangunan daerah, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam satu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), maka analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah yang berisikan realisasi capaian kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kebelakang. Adapun penjabaran terkait kinerja keuangan masa lalu Kabupaten Tabalong sebagai berikut:

2.2.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah dimulai dari perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD menjadi komponen terpenting bagi pemerintah daerah karena sebagai prosedur utama dalam menentukan jumlah pengeluaran serta pendapatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan umum di daerah tersebut. Kinerja pelaksanaan APBD merupakan evaluasi bagaimana pemerintah daerah mengimplementasikan rencana keuangan yang telah ditetapkan dalam APBD. Pelaksanaan APBD ini terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan. Komponen Pendapatan Daerah pada APBD dibagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Realisasi pendapatan daerah dari tahun 2020 hingga 2024 memiliki rata-rata pertumbuhan setiap tahun sebesar 18,75%. Jumlah pendapatan tertinggi berada di tahun 2024 yaitu Rp2.876.477.831.929,71dan terendah berada di tahun 2021 dengan jumlah Rp1.398.726.755.459. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 11,38% dengan total PAD tertinggi berada di tahun 2024 yakni Rp263.720.887.508,71 dan terendah berada di tahun 2020 dengan jumlah Rp172.526.066.734. Selanjutnya, komponen PAD yang terjadi kenaikan yang signifikan yaitu pada Pendapatan retribusi daerah, kenaikan tersebut disebabkan pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp12.683.547.095.

Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Transfer lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 21,19%. Pendapatan transfer tertinggi berada di tahun 2024 dengan jumlah

Rp2.612.756.944.421 dan terendah berada di tahun 2021 dengan jumlah Rp1.172.798.031.637. Sementara itu, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan realisasi rata-rata pertumbuhannya sebesar -67,76%. Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah Tertinggi berada di tahun 2020 dengan jumlah Rp61.065.562.615, dan terendah berada di tahun 2023 dengan jumlah Rp3.962.209.421,00. Berikut tabel yang memuat penjabaran Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong:

Tabel 2.196
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	**PENDAPATAN**						
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**						
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	67.418.267.761	69.633.812.027	74.691.980.857	92.607.474.468	89.782.594.985	7,87%
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	7.311.749.027	7.299.173.300	6.767.342.267	6.124.300.181	18.807.847.276	47,54%
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	8.929.874.278	12.799.098.756	13.858.210.657	14.804.871.371	14.735.829.206	14,49%
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	88.866.175.667	96.224.943.367	122.145.081.571	143.268.206.356	140.394.616.041,71	12,63%
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	**172.526.066.734**	**185.957.027.450**	**217.462.615.352**	**256.804.852.376**	**263.720.887.508,71**	11,38%
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER**						
1.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan**	984.189.777.356	914.033.060.244	1.248.091.273.959	1.781.162.367.410	2.273.815.720.192	24,95%
	Jumlah Pendapatan Tranfser Dana Perimbangan	**984.189.777.356**	**914.033.060.244**	**1.248.091.273.959**	**1.781.162.367.410**	**2.273.815.720.192**	24,95%
1.2.2	**Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat – Lainnya**						
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	42.691.528.000	36.539.612.000	42.449.877.000	-	0,88%
	Dana Desa	-	109.057.503.000	98.556.423.000	101.081.537.000	102.226.677.000	-3,53%
	Dana Penyesuaian	167.914.861.000	-	-	-		
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**167.914.861.000**	**151.749.031.000**	**135.096.035.000**	**143.531.414.000**	**102.226.677.000**	-4,79%

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.3	**Transfer antar Daerah**						
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	115.880.485.294	107.015.940.393	198.346.714.093	217.568.838.115	210.024.205.229	20,98%
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-	-		
	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi	115.880.485.294	107.015.940.393	198.346.714.093	217.568.838.115	210.024.205.229	20,98%
	Total Pendapatan Transfer	**1.267.985.123.650**	**1.172.798.031.637**	**1.581.534.023.052**	**2.142.262.619.525**	**2.612.756.944.421**	**21,19%**
	_						
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**						
	Pendapatan Hibah	61.065.542.615	9.054.710.373	14.165.075.079	3.962.209.421	0	-50,19%
	Pendapatan lainnya	0	30.916.986.000	139.797.000	-	0	
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	**61.065.542.615**	**39.971.696.373**	**14.304.872.079**	**3.962.209.421**	**0**	-67,76%
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.501.576.732.999**	**1.398.726.755.460**	**1.813.301.510.483**	**2.403.029.681.322**	**2.876.477.831.929,71**	**18,75%**

Sumber: LRA Tahun 2020-2024 Kabupaten Tabalong

B. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Secara umum analisis kinerja belanja terkait dengan pelaksanaan anggaran pemerintah Kabupaten Tabalong periode 2020-2024 dilakukan dengan melihat realisasi rata-rata pertumbuhan belanja yang bersumber dari data realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong tahun anggaran 2020-2024.

Dari tabel dibawah ini, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Tabalong dari tahun 2020 hingga 2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Dengan persentase rata-rata pertumbuhan belanjanya sebesar 24,76%, adapun jumlah belanja tertinggi berada pada tahun 2024 dengan total belanja sebesar Rp 2.864.167.686.968 dan terendah berada di tahun 2020 dengan total belanja sebesar Rp 1.182.383.787.733. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, dengan persentase rata-rata pertumbuhannya sebesar 18,25%, lalu diikuti dengan belanja modal yang mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun dengan jumlah rata-rata pertumbuhannya sebesar 49,92%. Terakhir belanja tak terduga yang mengalami penurunan sebesar 33,83%. Jumlah tertinggi belanja tak terduga berada di tahun 2020 sebesar Rp58.166.310.158,00. Tabel di bawah memuat rata-rata pertumbuhan belanja dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tabel 2.197
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
2	**BELANJA**						
2.1	**BELANJA OPERASI**						
2.1.1	Belanja Pegawai	467.412.305.011	492.449.302.089	493.947.645.587	579.068.238.882	825.804.659.096	15,29%
2.1.2	Belanja Barang	399.146.435.088	473.862.176.661	495.520.144.244	658.935.405.303	843.359.844.543	20,56%
	Belanja Subsidi	-	-	748.623.240	276.630.000	6.349.580.000	191,23%
5.1.3	Belanja Bunga	-	-	3.833.967.372	5.627.370.152	723.370.000	-56,56%
2.1.3	Belanja Hibah	33.792.522.201	34.203.166.071	17.310.020.179	67.523.402.046	74.485.739.505	21,85%
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	12.336.711.851	16.272.400.000	18.925.220.000	27.324.100.000	33.725.450.000	28,58%
	Jumlah Belanja Operasi	**912.687.974.151**	**1.016.787.044.821**	**1.030.285.620.622**	**1.338.755.146.383**	**1.784.448.643.144**	**18,25%**
2.2	**BELANJA MODAL**						
2.2.1	Belanja Tanah	7.655.068.000	16.711.207.950	8.990.906.532	42.213.476.517	51.871.893.222	61,34%
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	58.419.568.964	46.526.302.430	40.788.229.662	153.302.712.171	128.281.067.573	21,73%
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	66.668.678.757	49.348.788.758	45.146.224.974	101.181.296.253	214.678.336.134	33,96%
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.694.272.796	140.005.754.707	219.980.565.988	375.548.173.127	666.521.821.413	77,14%
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	10.106.689.290	2.230.080.670	2.039.181.465	8.391.939.750	4.499.381.776	-18,32%
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	985.225.617	-	-	1.051.001.702	2.715.400.000	28,85%
	Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-	-
	Belanja Modal Dana BOS	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	**211.529.503.424**	**254.822.134.515**	**316.945.108.621**	**681.688.599.520**	**1.068.567.900.118**	**49,92%**

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**						
2.3.1	Belanja Tak Terduga	58.166.310.158	14.739.209.871	1.667.695.520	1.624.000.000	11.151.143.706	-33,83%
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**58.166.310.158**	**14.739.209.871**	**1.667.695.520**	**1.624.000.000**	**11.151.143.706**	**-33,83%**
	JUMLAH BELANJA	**1.182.383.787.733**	**1.286.348.389.207**	**1.348.898.424.763**	**2.022.067.745.903**	**2.864.167.686.968**	**24,76%**
2.4	**TRANSFER**						
2.4.1	**Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa**						
	Bagi Hasil Pajak Daerah	7.378.000.000	7.073.000.000	7.395.000.000	8.116.500.002	20.968.300.000	29,84%
	Bagi Hasil Retribusi	962.000.000	881.000.000	657.000.000	592.499.998	-	-35,92%
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-	-		
	Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke Desa	**8.340.000.000**	**7.954.000.000**	**8.052.000.000**	**8.709.000.000**	**20.968.300.000**	**25,92%**
	Transfer Bantuan Keuangan						
	Bantuan Keuangan ke Desa	189.538.298.000	184.583.511.323	186.349.392.988	265.593.402.820	298.031.192.800	11,98%
	Bantuan Keuangan Lainnya	644.871.000	1.724.182.500	-	-	-	-
	Jumlah Trasnfer Bantuan Keuangan	**190.183.169.000**	**186.307.693.823**	**186.349.392.988**	**265.593.402.820**	**298.031.192.800**	**11,89%**
	JUMLAH TRANSFER	**198.523.169.000**	**194.261.693.823**	**194.401.392.988**	**274.302.402.820**	**318.999.492.800**	**12,59%**
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	**1.380.906.956.733**	**1.480.610.083.030**	**1.543.299.817.751**	**2.296.370.148.723**	**3.183.167.179.768**	**23,22%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 tersebut dapat ditentukan kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan Permendagri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional menyebutkan bahwa penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Rincian Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024 dimuat pada tabel di bawah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 memiliki kemampuan keuangan sebesar Rp590.034.484.974. Nilai tersebut masuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Pada tahun 2024 jumlah kemampuan keuangan daerahnya sebesar Rp1.199.301.395.748, artinya nilai tersebut pun termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

Tabel 2.198
Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	20201	2022	2023	2024
A	**Pendapatan Umum Daerah**					
1	Pendapatan Asli Daerah	172.526.066.734	185.957.027.450	217.462.615.352	256.804.852.376	247.404.526.277
2	Dana Bagi Hasil	371.623.557.632	298.092.942.083	640.482.563.365	1.129.823.972.069	1.243.746.895.000
3	Dana Alokasi Umum	457.489.788.000	451.421.653.000	449.677.798.000	467.307.055.587	487.938.003.000
	Jumlah A	**1.001.639.412.366**	**935.471.622.533**	**1.307.622.976.717**	**1.853.935.880.032**	**1.979.089.424.277**
B	**Belanja Pegawai**					
1	Belanja Gaji Dan Tunjangan	367.075.229.566	492.449.302.089	493.947.645.587	579.068.238.882	519.902.793.529
2	Tambahan Penghasilan PNS	44.529.697.826	30.186.665.600	31.567.607.520	104.820.403.402	259.885.235.000
	Jumlah B	**411.604.927.392**	**522.635.967.689**	**525.515.253.107**	**683.888.642.284**	**779.788.028.529**
	Kemampuan Keuangan Daerah	**590.034.484.974**	**412.835.654.844**	**782.107.723.610**	**1.170.047.237.748**	**1.199.301.395.748**

Sumber: Laporan Kemampuan Keuangan Daerah KabupatenTabalong Tahun 2020-2024

C. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit/ memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Realisasi rata-rata pertumbuhan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dari tahun 2020 hingga 2024 cenderung mengalami peningkatan. Jumlah pembiayaan terendah berada di tahun 2020 dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp99.972.577.253 dan jumlah pembiayaan tertinggi berada di tahun 2024 dengan jumlah Rp 517.590.477.332, dengan persentase rata-rata pertumbuhan pembiayaan neto yaitu sebesar 59,56%. Penerimaan pembiayaan dari tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan penerimaan pembiayaan yaitu sebesar 59,29%. Jumlah penerimaan pembiayaan terbesar berada di tahun 2024 yaitu sebesar Rp560.285.979.793 dan jumlah penerimaan pembiayaan terendah berada di tahun 2020 yaitu sebesar Rp104.972.577.252,68. Pada tahun 2022 terdapat pinjaman dalam negeri, pinjaman tersebut didapatkan dari tambahan sebesar Rp.104.618.078.000,00 yang bersumber dari pinjaman dalam negeri dari PT.SMI melalui program PEN direncakan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Pinjaman terealisasi karena MoU mengenai peminjaman dana tersebut baru selesai di akhir tahun anggaran 2021 dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022.

Tahun 2020 pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000 dan tahun 2024 sebesar Rp42.695.502.461. Tahun 2023 penyertaan modal terjadi kenaikan, penyertaan modal tersebut ke BUMD diantaranya kepada Bank Kalsel, BPR Tabalong Bersinar, BUMD PDAM (PT. AMTB), dan Lembaga Keuangan bukan Bank-BUMN. Rata-rata pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.199
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan
		2020	2021	2022	2023	2024	
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**						
	Penggunaaan SiLPA	104.972.577.253	220.642.353.519	138.759.025.949	495.378.796.681	560.285.979.793	85,80%
	Pinjaman Dalam Negeri	-	-	104.618.078.000	-		-
	Jumlah Penerimaan	**104.972.577.253**	**220.642.353.519**	**243.377.103.949**	**495.378.796.681**	**560.285.979.793**	**59,29%**
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**						
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000	-	18.000.000.000	22.136.463.000	16.540.987.145	-
	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	19.615.886.487	26.154.515.316	-
	Jumlah Pengeluaran	5.000.000.000	-	18.000.000.000	41.752.349.487	42.695.502.461	
	PEMBIAYAAN NETTO	**99.972.577.253**	**220.642.353.519**	**225.377.103.949**	**453.626.447.194**	**517.590.477.332**	**59,56%**

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran KabupatenTabalong Tahun 2020-2024, Diolah

2.2.1.2. Neraca Daerah

Neraca juga memperlihatkan keadaan dan posisi keuangan dari pemerintah daerah. Fungsi neraca yaitu untuk menunjukkan kondisi keuangan dari suatu daerah biasanya pada tiap akhir tahun. Neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Selanjutnya, analisis neraca daerah adalah proses untuk menginterpretasikan data posisi keuangan guna memahami kondisi keuangan daerah dengan lebih mendalam. Analisis neraca ini melibatkan perbandingan angka-angka neraca dari periode ke periode, analisis rasio keuangan serta evaluasi terhadap tren keuangan daerah.

A. Aset

Total aset pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah aset pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp4.006.750.898.412,35 dan di tahun 2024 yaitu sebesar Rp6.666.804.275.829,40, dengan persentase rata-rata pertumbuhan asset sebesar 13,85%. Adapun rata-rata pertumbuhan aset lancar Kabupaten Tabalong dari tahun ke tahun berfluktuasi dan cenderung meningkat meskipun pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah aset lancar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Persentase realisasi rata-rata pertumbuhan aset lancar Kabupaten Tabalong yaitu sebesar 12,49%. Diikuti dengan total aset tetap yang cenderung mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan serta menjadi tahun dengan jumlah aset tetap terendah yaitu sebesar Rp3.344.771.226.147,94 dan tahun dengan jumlah aset tetap tertinggi berada di tahun 2024 dengan jumlah Rp4.541.130.206.059,53. Total realisasi rata-rata pertumbuhan asset tetap yaitu sebesar 8,04%. Terakhir pada aset lainnya, rata-rata pertumbuhannya berfluktuasi dengan total realisasi rata-rata pertumbuhannya sebesar 223,85%.

B. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban dibagi menjadi 2 jenis yaitu kewajiban jangka Panjang dan kewajiban jangka pendek. Berdasarkan Laporan Neraca Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan kewajiban dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan jumlah kewajiban terendahnya berada pada tahun 2021 sebesar Rp112.717.428.994,33, lalu jumlah kewajiban tertinggi berada pada tahun 2022 sebesar Rp285.331.430.397,93. Adapun persentase realisasi rata-rata pertumbuhan kewajibannya sebesar 9,89%. Sedangkan rata-rata pertumbuhan kewajiban jangka pendek Kabupaten Tabalong dari tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan, dengan jumlah realisasi rata-rata pertumbuhannya sebesar minus 10,46%.

C. Ekuitas

Ekuitas yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah yang mencerminkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh daerah. Adapun jumlah ekuitas dana yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 jumlah ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 3.867.500.534.596,18 dan pada tahun 2024 jumlah ekuitas yang dimiliki sebesar Rp 6.595.264.500.315,74 dengan persentase realisasi rata-rata pertumbuhannya sebesar 14,50%. Adapun rincian rata-rata pertumbuhan Neraca Kabupaten Tabalong, sebagai berikut:

Tabel 2.200
Neraca Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
1	**ASET**						
2	**ASET LANCAR**						
3	Kas di Kas Daerah	200.288.579.590,57	117.192.188.789,40	455.880.130.473,90	531.295.673.173,58	653.424.152.504,20	71,76%
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	3.100.928,17	155.933.982,00	-	0,32	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	220.435.500,00	-	-	-	-	
6	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	18.950.535.500,64	21.463.944.340,20	39.256.353.462,00	26.261.346.843,85	19.066.546.565,16	8,91%
8	Kas Dana Kapitasi Pada FKTP	1.061.529.837,00	-	-	-	-	
	Kas Dana BOS	121.273.090,33	99.791.890,82	87.306.141,96	118.893.061,22	61.660.805,98	-10,55%
	Kas Dana BOK Puskesmas	-	-	-	2.610.066.714,00	3.648.241.593,00	39,78%
9	Kas Lainnya	350.352.778,00	14.083.181,00	568.000,00	-	-	-95,97%
10	Setara Kas	-	-	-	-	-	
11	Piutang Pajak	27.740.587.001,00	30.765.860.596,61	33.399.861.780,61	36.231.597.223,41	41.234.627.058,93	10,44%
12	Penyisihan Piutang Pajak	(17.167.670.839,62)	(20.102.304.681,96)	(23.073.504.688,96)	(22.880.922.481,27)	26.364.886.738,76	-46,05%
13	Piutang Retribusi	3.052.402.150,00	3.138.891.300,00	3.368.339.650,00	3.399.135.250,00	3.397.233.100,00	2,75%
15	Penyisihan Piutang Retribusi	(1.877.456.554,50)	(2.149.291.905,00)	(2.386.431.774,25)	(2.301.900.933,75)	2.435.475.907,00	-45,96%

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
14	Piutang lain-lain PAD yang sah	10.056.768.312,00	26.328.932.104,00	9.774.314.048,81	6.919.787.216,00	8.654.398.693,55	23,70%
	Penyisihan Pitang Lain-lain PAD yang Sah	(199.259.588,44)	(165.726.095,58)	(51.259.421,78)	(41.933.511,09)	- 59.499.189,39	-15,55%
16	Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	22.822.961.312,88	21.303.299.625,65	64.832.346.473,25	67.959.717.451,28	50.792.137.117,28	44,31%
18	Piutang transfer pemerintah pusat - dana perimbangan	35.123.769.382,00	19.925.432.593,00	25.265.511.426,00	4.845,00	695.763.836.000,00	
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	-	-	-	-	-	
19	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan	-	-	-	-	-	
20	Piutang TP/TGR	1.690.002.836,02	1.690.002.836,02	1.690.002.836,02	1.690.002.836,02	1.690.002.836,02	0,00%
21	Penyisihan Piutang TP/TGR	(893.431.334,60)	(1.247.463.113,01)	(1.690.002.836,02)	(1.690.002.836,02)	893.431.334,60	-19,44%
	Piutang Lainnya	-	15.499.480,00	-	-	7.550.353.539,98	
	Persediaan	17.247.574.416,75	18.134.237.744,63	18.821.391.151,20	22.616.417.120,72	6.783.447.957,86	-10,23%
23	**Jumlah Aset Lancar**	**318.588.953.390,03**	**236.410.479.613,95**	**625.330.860.704,74**	**672.187.881.972,95**	25.202.567.828,13	12,49%

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
25	**INVESTASI JANGKA PANJANG**						
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	237.649.511.583,74	383.778.009.235,29	400.390.162.237,67	425.277.092.553,76	473.326.348.887,34	20,83%
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang	**237.649.511.583,74**	**383.778.009.235,29**	**400.390.162.237,67**	**425.277.092.553,76**	**473.326.348.887,34**	20,83%
33	**ASET TETAP**						
34	Tanah	1.186.951.337.134,00	1.262.642.491.996,00	1.270.625.686.087,00	1.316.852.116.832,00	1.358.111.676.933,00	3,45%
35	Peralatan dan Mesin	528.088.470.046,28	575.172.189.418,28	628.561.935.340,28	769.592.413.724,08	873.219.953.622,08	13,53%
36	Gedung dan Bangunan	1.043.117.442.864,96	1.091.332.479.937,96	1.133.265.748.092,96	1.209.384.597.934,96	1.362.249.259.733,88	6,96%
37	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.096.951.866.831,72	2.232.587.879.275,72	2.411.052.284.219,88	2.825.039.795.456,28	3.359.547.294.793,28	12,64%
38	Aset Tetap Lainnya	80.625.866.703,44	83.556.856.478,44	86.117.044.892,44	96.372.030.573,44	106.997.035.595,40	7,41%
39	Konstruksi dalam Pengerjaan	15.016.548.270,00	25.180.496.637,00	100.831.314.366,23	96.827.225.874,00	84.511.267.856,00	87,86%
40	Akumulasi Penyusutan	(1.605.980.305.702,46)	(1.830.809.294.861,78)	(2.043.314.039.453,28)	(2.275.239.905.752,28)	2.603.506.282.474,11	-44,37%
41	**Jumlah Aset Tetap**	**3.344.771.226.147,94**	**3.439.663.098.881,62**	**3.587.139.973.545,51**	**4.038.828.274.642,48**	**4.541.130.206.059,53**	8,04%
42	**DANA CADANGAN**						
43	Dana Cadangan			-	-		
44	**Jumlah Dana Cadangan**			-	**-**		

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
45	**ASET LAINNYA**						
46	Tagihan Penjualan Angsuran	32.593.860,00	17.447.500,00	17.447.500,00	17.447.500,00	1.577.668.500,00	2223,98%
49	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	100.051.275.214,00	27.054.000.000,00	27.054.000.000,00	27.054.000.000,00		-43,24%
51	Aset Tak Berwujud	7.058.452.920,00	7.333.482.920,00	7.913.757.932,00	9.458.731.676,00	11.466.135.089,00	13,14%
52	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.277.476.005,00)	(2.985.732.129,14)	(3.715.928.720,00)	(4.486.828.553,87)	22.733.585.260,94	-132,59%
53	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(8.316.982.688,36)	(8.424.926.987,80)	(8.587.438.405,02)	(18.219.690.764,53)	1.438.817.316,67	1,87%
54	Aset Lain-Lain	9.193.343.990,00	9.147.406.657,00	9.376.246.227,00	18.671.150.343,20	19.176.008.356,20	25,96%
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)			324.031.663.069,00	368.764.124.000,00	170.351.295.000,00	-20,00%
55	**Jumlah Aset Lainnya**	**105.741.207.290,64**	**32.141.677.960,06**	**356.089.747.602,98**	**401.258.934.200,80**	**178.398.704.367,59**	223,85%
56	**JUMLAH ASET**	**4.006.750.898.412,35**	**4.091.993.265.690,92**	**4.968.950.744.090,90**	**5.537.552.183.369,99**	**6.666.804.275.829,40**	13,85%
57	**KEWAJIBAN**						
58	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**						
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				26.154.515.316,00	26.154.515.316,00	

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
59	Pendapatan Diterima dimuka	440.629.887,02	335.081.566,33	301.646.820,70	162.491.527,22	334.976.594,72	6,52%
60	Utang Beban	10.042.361.473,15	10.763.997.147,00	27.022.412.016,00	2.590.643.359,00	18.049.165.642,00	166,13%
61	Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat	128.767.372.456,00	101.618.350.281,00	149.463.150.347,00	34.676.930.054,00	-	
63	Utang jk Pendek kpd Pihak Ketiga			927.379,00		-	
65	Utang kjk Pendek Lainnya			23.541.102.322,23	5.179.928.864,00	269.643.530,00	
66	**Jumlah Kewajiban Jangka Pendek**	**139.250.363.816,17**	**112.717.428.994,33**	**200.329.238.884,93**	**68.764.509.120,22**	**44.808.301.082,72**	-10,46%
67	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**						
68	Utang Jangka Panjang Lainnya			85.002.191.513,00	58.847.676.197,00	32.693.160.881,00	
70	**Jumlah Kewajiban Jangka Panjang**	-	-	**85.002.191.513,00**	**58.847.676.197,00**	**32.693.160.881,00**	
71	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**139.250.363.816,17**	**112.717.428.994,33**	**285.331.430.397,93**	**127.612.185.317,22**	**77.501.461.963,72**	9,89%
72	**EKUITAS DANA**						
73	EKUITAS	3.867.500.534.596,18	3.979.275.836.696,59	4.683.619.313.692,97	5.409.939.998.052,77	6.595.264.500.315,74	14,50%
74	**JUMLAH EKUITAS DANA**	**3.867.500.534.596,18**	**3.979.275.836.696,59**	**4.683.619.313.692,97**	**5.409.939.998.052,77**	**6.595.264.500.315,74**	14,50%

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024	Rata -Rata Pertumbuhan
75	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**4.006.750.898.412,35**	**4.091.993.265.690,92**	**4.968.950.744.090,90**	**5.537.552.183.369,99**	**6.672.765.962.279,46**	13,88%

Sumber: Laporan Neraca Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2023

Selanjutnya, berdasarkan data yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat dilakukan perhitungan rasio keuangan daerah yaitu dengan dilakukannya perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.201
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Lancar (*current ratio*)	2,29	2,10	3,12	9,78	33,03
2	Rasio Cepat (*quick ratio*)	2,16	1,94	3,03	9,45	32,47
3	Rasio Total Utang Terhadap Total Asset	0,0348	0,0275	0,0574	0,0230	0,0116
4	Rasio Utang Terhadap Modal	0,0360	0,0283	0,0609	0,0236	0,0118

Sumber: Hasil Perhitungan, Tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan rasio keuangan daerah diatas, dapat dilihat bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tabalong dalam kondisi sehat. Hal ini ditunjukannya nilai capaian kedua rasio tersebut yang positif. Adapun penjabaran dari kedua rasio tersebut sebagai berikut:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio Lancar adalah rasio yang mengukur kemampuan daerah dalam membayar utang jangka pendeknya, atau utang yang wajib dibayar dalam waktu satu tahun. Dilihat dari Tabel 2.201, diketahui bahwa jumlah rasio lancar yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat yang menandakan bahwa daerah tersebut memiliki kemampuan finansial untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Tahun 2020 jumlah rasio lancarnya sebesar 2,29% dan tahun 2024 sebesar 33,03%.

2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan daerah agar dapat melunasi kewajiban lancarnya dengan aset cepat atau aset yang paling likuid. Kondisi keuangan daerah akan dinyatakan sehat apabila memiliki nilai *quick ratio* lebih dari sama dengan 1 (satu), hal ini mengartikan bahwa aset

daerah setelah dikurangi persediaan akan lebih besar dari kewajiban bayarnya. Berdasarkan analisis rasio cepat yang dilakukan pada Kabupaten Tabalong dari tahun 2020-2024, diketahui bahwa kondisi keuangan daerah dinyatakan dalam kondisi sehat dengan jumlah *quick ratio* terendah berada di tahun 2020 dengan jumlah 2,16 dan tertinggi di tahun 2024 dengan jumlah 32,47.

3. Rasio Total Utang terhadap Total Asset

Rasio total utang terhadap total aset digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva suatu daerah dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang daerah berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Besar rasio total utang terhadap total asset yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong pada tahun 2020 yaitu sebesar 0,0348 dan di tahun 2024 sebesar 0,0116. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

4. Rasio Utang terhadap Modal

Rasio Utang terhadap Modal yaitu rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini menunjukkan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri dan tidak bergantung pada pembiayaan pihak lain. Berdasarkan Tabel 2.201, diketahui bahwa pada tahun 2020 total rasio utang terhadap modalnya sebesar 0,0360 dan tahun 2024 sebesar 0,0118 yang mengartikan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tabalong semakin mandiri serta tidak bergantung pada utangnya.

2.2.1.3. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah kebijakan yang telah ditentukan dan mengakomodir berbagai aspek dari APBD yaitu dengan tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah agar dapat mendanai

belanja daerah dengan cara yang efektif dan efisien. Kebijakan pengelolaan APBD Kabupaten Tabalong dapat jabarkan sebagai berikut:

A. Kebijakan Pendapatan

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Tabalong juga bergantung pada sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Untuk mewujudkan optimalisasi pendapatan daerah Kabupaten Tabalong dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi.
2. Berupaya meningkatkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat khususnya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan Dana Insenstif Daerah (DID).
3. Peluang pembiayaan pembangunan melalui DAK Fisik harus dioptimalkan. SKPD harus meningkatkan koordinasi dengan SKPD ditingkat Provinsi dan menyiapkan kelengkapan yang diperlukan sebagai syarat untuk memperoleh DAK Fisik.
4. DID diberikan untuk Daerah yang berprestasi, oleh karenanya setiap SKPD yang berpeluang untuk mendapatkan DID didorong terus melakukan inovasi.
5. Penyempurnaan dan penguatan paket kebijakan keuangan di Daerah sebagai tindak lanjut UU Nomor 1 tahun 2022. Melalui penguatan paket kebijakan keuangan daerah diharapkan mampu memperluas peluang peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Kebijakan Belanja

Belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, maka kebijakan belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut

1 Pemenuhan *Mandatory Spending.*

2 Fokus pada Upaya Pencapaian Sasaran dan Prioritas Daerah.
Untuk itu dilakukan optimalisasi belanja melalui:

a. Tidak diperkenankan mengalokasikan anggaran belanja untuk membayar gaji tenaga kontrak/tenaga honorarium baru (pegawai non-PPPK) sebagaimana telah diatur dalam pasal 96 PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
b. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan Perundang-undangan serta memperhitungkan gaji 14 bulan dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai kebutuhan;
c. Sumber dana yang berasal dari DBH dan PAD untuk belanja Tambahan Penghasilan PNS (TPP) diperuntukkan untuk belanja urusan wajib bukan pelayanan dasar dan belanja untuk urusan pemerintahan pilihan, belanja untuk urusan pemerintahan, belanja untuk penunjang urusan pemerintahan, belanja untuk urusan pengawasan urusan pemerintahan umum;
d. Merasionalisasikan anggaran perjalanan dinas, belanja makan minum rapat/aktivitas lapangan/tamu, pemeliharaan kendaraan (suku cadang, biaya servis, BBM), pemeliharaan gedung dan peralatan kantor, alat tulis kantor dan belanja modal yang kurang prioritas;
e. Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang agar dilakukan secara selektif sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan

Barang Milik Daerah (RKPBMD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pemerintah;

f. Belanja pengadaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 dapat dianggarkan hanya untuk mengganti kendaraan dinas yang sudak tidak layak pakai, kecuali yang bersifat khusus;
g. Belanja langganan internet hanya 1 titik dengan kecepatan maksimal 50 Mbps;
h. Honor penyelenggara diklat hanya dapat diberikan untuk perangkat daerah yang mempunyai tupoksi menyelenggarakan diklat;
i. Narasumber, moderator, pembawa acara, dirigen dan pembaca doa tidak diperkenankan diberikan honor untuk kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah yang bersangkutan, kecuali jika berasal dari luar perangkat daerah tersebut;
j. Belanja ATK, peralatan dan perlengkapan kantor, penggandaan dan lain-lainnya yang berkenaan dengan pelayanan perkantoran dipindahkan ke program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang dikelola oleh sekretariat;
k. Belanja Pengadaan Pakaian bagi ASN (PDH, Batik dan Olahraga) hanya dianggarkan untuk 1 (satu) jenis dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali yang bersifat khusus; dan
l. Belanja wajib mengikat harus dianggarkan penuh untuk 1 tahun.

3 Menyiapkan belanja tak terduga untuk keperluan belanja daerah yang bersifat tidak biasa atau tidak berulang seperti penanggulangan penanganan pandemi, penanggulangan bencana sosial, pendampingan kegiatan yang didanai APBN dan untuk keperluan tak terduga lainnya yang bersifat darurat dan mendesak sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah secara cermat dan terukur.

4 Memberikan bentuk penghargaan kepada ASN sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik atas tugas-tugas yang diembannya melalui Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP). TPP diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ASN sehingga produktifitas, motivasi, disiplin, dan kinerja meningkat. TPP juga diberikan kepada ASN berdasarkan kriteria, beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, tempat bertugas, kelas dan nilai jabatan.

2.2.1.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Tujuan dari analisis proporsi realisasi terhadap anggaran pemerintah daerah Kabupaten Tabalong yaitu untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tabalong pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

A. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja

Pada tabel dibawah ini terlihat perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan anggarannya. Realisasi rata–rata pertumbuhan Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja tahun 2020–2024 terjadi kenaikan sebesar 0,74%.

Gambar 2.36
Realisasi Anggaran Belanja Tabalong Tahun 2020-2024

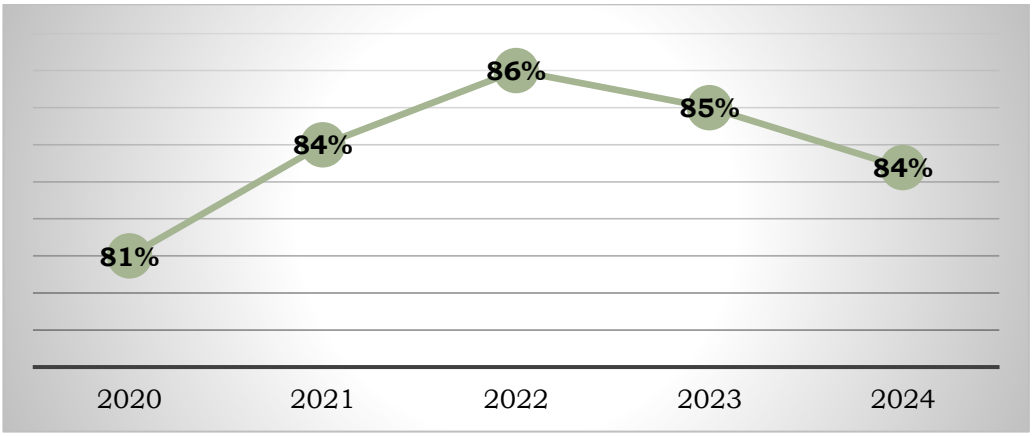

Sumber: LRA 2020-2024, Diolah

Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir pada 31 desember 2024 adalah sebesar Rp 2.398.899.486.593 atau mencapai 84% dari anggaran sebesar Rp 2.864.167.686.968. Realisasi Belanja Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 376.831.740.690 atau 18,63% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 2.022.067.745.903. Lebih lanjut, rata-rata penyerapan anggaran belanja dan transfer sebesar 84%, penyerapan tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 86%.

Tabel 2.202
Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
2	**BELANJA**									
2.1	**BELANJA OPERASI**									
5.1.01	Belanja Pegawai	512.807.473.300	467.412.305.011	91%	553.258.492.123	492.449.302.089	89%	568.649.112.942	493.947.645.587	87%
5.1.02	Belanja Barang	452.272.968.213	399.146.435.088	88%	552.052.188.220	473.862.176.661	86%	550.742.374.124	495.520.144.244	90%
5.1.03	Belanja Bunga	2.262.500.000	-		-	-		4.453.272.616	3.833.967.372	86%
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-		-	-		3.265.000.000	748.623.240	23%
5.1.05	Belanja Hibah	45.099.490.000	33.792.522.201	75%	39.588.370.800	34.203.166.071	86%	18.113.456.317	17.310.020.179	96%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.894.601.000	12.336.711.851	59%	17.602.300.000	16.272.400.000	92%	22.763.900.000	18.925.220.000	83%
	Jumlah Belanja Operasi	**1.033.337.032.513**	**912.687.974.151**	**88%**	**1.162.501.351.143**	**1.016.787.044.821**	**87%**	**1.167.987.115.999**	**1.030.285.620.622**	**88%**
5.2	**BELANJA MODAL**									
5.2.01	Belanja Modal Tanah	15.487.000.000	7.655.068.000	49%	19.239.433.593	16.711.207.950	87%	12.168.847.125	8.990.906.532	74%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.292.357.131	58.419.568.964	86%	64.065.366.098	46.526.302.430	73%	55.348.185.075	40.788.229.662	74%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	133.138.093.877	66.668.678.757	50%	61.811.781.573	49.348.788.758	80%	56.029.173.299	45.146.224.974	81%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.248.830.530	67.694.272.796	88%	192.648.290.119	140.005.754.707	73%	266.904.976.062	219.980.565.988	82%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.713.640.048	10.106.689.290	94%	2.882.042.878	2.230.080.670	77%	2.571.701.788	2.039.181.465	79%

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.033.002.000	985.225.617	95%	-	-		-	-	-
	Belanja Modal BLUD	-	-		-	-		-	-	-
	Belanja Modal Dana BOS	-	-	-	-	-		-	-	-
	Jumlah Belanja Modal	**305.912.923.586**	**211.529.503.424**	**69%**	**340.646.914.261**	**254.822.134.515**	**75%**	**393.022.883.349**	**316.945.108.621**	**81%**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**									
5.3.01	Belanja Tak Terduga	126.802.008.292	58.166.310.158	46%	19.844.653.750	14.739.209.871	74%	5.412.283.529	1.667.695.520	31%
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**126.802.008.292**	**58.166.310.158**	**46%**	**19.844.653.750**	**14.739.209.871**	**74%**	**5.412.283.529**	**1.667.695.520**	**31%**
	JUMLAH BELANJA	**1.466.051.964.391**	**1.182.383.787.733**	**81%**	**1.522.992.919.154**	**1.286.348.389.207**	**84%**	**1.566.422.282.877**	**1.348.898.424.763**	**86%**
5.4	**TRANSFER**									
5.4.01	**Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa**									
	Bagi Hasil Pajak Daerah	7.378.000.000	7.378.000.000	100%	7.073.000.000	7.073.000.000	100%	7.395.000.000	7.395.000.000	100%
	Bagi Hasil Retribusi	962.000.000	962.000.000	100%	881.000.000	881.000.000	100%	657.000.000	657.000.000	100%
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya							-	-	-
	Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke Desa	**8.340.000.000**	**8.340.000.000**	**100 %**	**7.954.000.000**	**7.954.000.000**	**100 %**	**8.052.000.000**	**8.052.000.000**	**100 %**
	Transfer Bantuan Keuangan									

No	Uraian	2020		(%)	2021		(%)	2022		(%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	
	Bantuan Keuangan ke Desa	189.538.298.000	189.538.298.000	100%	184.584.503.000	184.583.511.323	100%	186.349.423.000	186.349.392.988	100%
	Bantuan Keuangan Lainnya	645.395.778	644.871.000	100%	1.724.182.500	1.724.182.500	100%	-	-	-
	Jumlah Trasnfer Bantuan Keuangan	**190.183.693.778**	**190.183.169.000**	**100 %**	**186.308.685.500**	**186.307.693.823**	**100 %**	**186.349.423.000**	**186.349.392.988**	**100 %**
	JUMLAH TRANSFER	**198.523.693.778**	**198.523.169.000**	**100 %**	**194.262.685.500**	**194.261.693.823**	**100 %**	**194.401.423.000**	**194.401.392.988**	**100 %**
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	**1.664.575.658.169**	**1.380.906.956.733**	**83%**	**1.717.255.604.654**	**1.40.610.083.029,51**	**86%**	**1.760.823.705.877**	**1.543.299.817.751**	**88%**

Lanjutan..

No	Uraian	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi			
2	**BELANJA**								
2.1	**BELANJA OPERASI**								
5.1.01	Belanja Pegawai	674.015.250.755	579.068.238.882	86%	825.804.659.096	729.838.937.687	88%	-0,71%	88%
5.1.02	Belanja Barang	762.211.599.550	658.935.405.303	86%	843.359.844.543	709.298.756.155	84%	-1,07%	87%
5.1.03	Belanja Bunga	6.529.955.000	5.627.370.152	86%	6.349.580.000	4.359.106.254	69%		48%
5.1.04	Belanja Subsidi	1.370.000.000	276.630.000	20%	723.370.000		0%		9%
5.1.05	Belanja Hibah	68.342.904.980	67.523.402.046	99%	74.485.739.505	73.599.878.139	99%	7,31%	91%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	28.634.319.000	27.324.100.000	95%	33.725.450.000	33.049.730.000	98%	15,94%	85%
	Jumlah Belanja Operasi	**1.541.104.029.285**	**1.338.755.146.383**	**87%**	**1.784.448.643.144**	**1.550.146.408.235**	**87%**	**-0,32%**	**87%**
5.2	**BELANJA MODAL**								
5.2.01	Belanja Modal Tanah	67.156.766.985	42.213.476.517	63%	51.871.893.222	42.619.692.957	82%	19,54%	71%
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.869.386.553	153.302.712.171	90%	128.281.067.573	108.040.736.647	84%	0,36%	81%
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	117.134.607.684	101.181.296.253	86%	214.678.336.134	152.095.305.225	71%	12,45%	74%
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	449.850.467.585	375.548.173.127	83%	666.521.821.413	537.467.651.823	81%	-1,59%	81%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.846.419.392	8.391.939.750	95%	4.499.381.776	4.355.098.455	97%	1,66%	88%
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.269.900.000	1.051.001.702	83%	2.715.400.000	2.189.593.251	81%		
	Belanja Modal BLUD	-	-	-					

No	Uraian	2023		(%)	2024		(%)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi			
	Belanja Modal Dana BOS	-	-	-					
	Jumlah Belanja Modal	**814.127.548.199**	**681.688.599.520**	**84%**	**1.068.567.900.118**	**846.768.078.358**	**79%**	**3,68%**	**78%**
5.3	**BELANJA TAK TERDUGA**								
5.3.01	Belanja Tak Terduga	11.327.774.776	1.624.000.000	14%	11.151.143.706	1.985.000.000	18%	-6,23%	37%
	Jumlah Belanja Tak Terduga	**11.327.774.776**	**1.624.000.000**	**14%**	**11.151.143.706**	**1.985.000.000**	**18%**	**-6,23%**	**37%**
	JUMLAH BELANJA	**2.366.559.352.260**	**2.022.067.745.903**	**85%**	**2.864.167.686.968**	**2.398.899.486.593**	**84%**	**0,86%**	**84%**
5.4	**TRANSFER**								
5.4.01	**Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa**								
	Bagi Hasil Pajak Daerah	8.116.500.002	8.116.500.002	100%	20.968.300.000	20.968.300.000	100%	0,00%	100%
	Bagi Hasil Retribusi	592.499.998	592.499.998	100%					
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-	-	-					
	Jumlah Transfer /Bagi Hasil ke Desa	**8.709.000.000**	**8.709.000.000**	**100%**	**20.968.300.000**	**20.968.300.000**	**100%**	**0,00%**	**100%**
	Transfer Bantuan Keuangan								
	Bantuan Keuangan ke Desa	265.593.537.000	265.593.402.820	100%	298.031.192.800	298.031.192.800	100%	0,00%	100%
	Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-					

No	Uraian	2023		(%)	2024			Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Rata-Rata Penyerapan Anggaran (%)
		Anggaran	Realisasi		Anggaran	Realisasi	(%)		
	Jumlah Trasnfer Bantuan Keuangan	**265.593.537.000**	**265.593.402.820**	**100%**	**298.031.192.800**	**298.031.192.800,00**	**100%**	**0,00%**	**100%**
	JUMLAH TRANSFER	**274.302.537.000**	**274.302.402.820**	**100%**	**318.999.492.800**	**318.999.492.800,00**	**100%**	**0,00%**	**100%**
	JUMLAH BELANJA & TRANSFER	**2.640.861.889.260**	**2.296.370.148.723**	**87%**	**3.183.167.179.768**	**2.717.898.979.393**	**85%**	**0,74%**	**86%**

Sumber: LRA Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024, diolah

B. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Penyajian informasi tentang belanja daerah yang menjelaskan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, menyajikan realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2020-2024 yang mengalami fluktuasi (kenaikan dan penurunan) yang dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.203
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	367.075.229.566,00	296.653.066.566,00	305.425.593.605,00	313.580.838.297,00	367.638.457.942,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	83.186.372.101,00	83.023.328.352,00	82.913.533.215,00	155.227.558.626,00	237.086.399.613,28
3	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	3.175.661.344,00	2.806.196.994,00	1.470.597.379,00	0,00	383.350.367,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi	292.004.555,00	297.404.947,00	297.404.947,00	297.404.947,00	51.500.000,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	7.170.900.000,00	912.480.000,00	912.480.000,00	761.600.000,00	18.982.682.882,00
7	Belanja Pegawai BLUD	53.813.721.190,00	64.755.210.623,00	10.422.047.083,00	11.227.331.570,00	12.622.503.390,98
8	Belanja Honorarium PNS	16.115.221.875,00	0,00	0,00	0,00	92.247.681.972,00
9	Honorarium Non PNS	57.405.732.500,00	0,00	0,00	0,00	-
10	Belanja Uang Lembur		0,00	0,00	0,00	-
11	Uang Jahit Pakaian		0,00	0,00	0,00	-
12	Belanja Premi Asuransi	523.784.040,00	0,00	0,00	0,00	22.428.550.405,00
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	712.311.320,00	0,00	0,00	0,00	822.883.415,00
14	Belanja Pakaian Kerja	990.491.254,00	0,00	0,00	0,00	1.261.299.880,00
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	1.186.881.453,00	0,00	0,00	0,00	3.166.569.502,00
16	Belanja Perjalanan Dinas	36.446.205.808,00	34.306.444.245,00	0,00	0,00	104.604.413.846,00
17	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	694.875.000,00	694.875.000,00	894.875.000,00	698.003.500,00	-
18	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	3.059.152.293,00	0,00	2.107.432.342,00	3.627.564.276,00	9.759.735.343,00
TOTAL		**631.848.544.299**	**483.449.006.727**	**404.443.963.571**	**485.420.301.216**	**871.056.028.558**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024, diolah

Berdasarkan Tabel 2.203 diatas, alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur relatif fluktuatif diantaranya pada tahun 2020 sebesar 53,21%, kemudian turun pada tahun 2021-2023 dan kemudian mengalami kenaikan kembali sebesar 31,55% pada tahun 2024. Selanjutnya, berdasarkan data lima tahun terakhir yang disajikan pada Tabel 2.204, diketahui Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur cenderung menurun dari tahun ke tahun kecuali pada tahun 2023 dan 2024 yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan Total Pengeluaran, maka persentase tertinggi terjadi pada tahun 2024. Lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.204
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1	2020	631.848.544.299	1.187.383.787.733	53,21
2	2021	483.449.006.727	1.286.348.389.207	37,58
3	2022	404.443.963.571	1.366.898.424.763	29,59
4	2023	485.420.301.216	2.063.820.095.390	23,52
5	2024	871.056.028.558	2.760.663.210.454	31,55

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024, diolah

C. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

Selain belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, terdapat pula analisis pengeluaran wajib dan mengikat yang ditujukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan dan pengeluaran pembiayaan yang dapat dihindari atau harus dibayarkan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan Tabel 2.205 dibawah dapat dikatakan bahwa rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat selama kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2020-2024 berfluktuasi. Jumlah belanja wajib mengikat tertinggi berada di tahun 2024 sebesar Rp 1.990.033.574.377,54 dengan persentase sebesar 72,09%, dan tahun terendahnya yaitu di tahun 2020 sebesar Rp. 916.635.491.339,67 dengan persentasenya sebesar 66,78%.

Tabel 2.205
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi									
		2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%
A	**Belanja Mengikat**	**467.412.305.011,00**	**33,85%**	**492.449.302.089,00**	**33,26%**	**497.781.612.959,00**	**32,25%**	**584.695.609.034,00**	**25,46%**	**734.198.043.941,26**	**27,01%**
1	Belanja Pegawai	467.412.305.011,00		492.449.302.089,00		493.947.645.587,00		579.068.238.882,00		729.838.937.687,26	
2	Belanja Bunga					3.833.967.372,00		5.627.370.152,00		4.359.106.254,00	
B	**Belanja Wajib**	**444.223.186.328,67**	**32,17%**	**527.433.822.944,51**	**35,62%**	**618.068.969.596,00**	**40,05%**	**770.950.567.783,00**	**33,57%**	**1.213.140.027.975,28**	**44,64%**
1	Pendidikan	327.244.760.684,67	23,70%	340.938.329.035,51	23,03%	353.475.674.375,00	22,90%	395.145.786.966,00	17,21%	454.782.235.318,28	16,71%
2	Infrastruktur	101.622.989.838,00	7,36%	169.212.693.222,00	11,43%	247.236.973.111,00	16,02%	353.309.395.859,00	15,39%	728.224.265.573,00	26,79%
3	Peningkatan Kapasitas SDM	7.297.595.341,00	0,53%	8.416.923.759,00	0,57%	8.322.916.900,00	0,54%	10.959.536.505,00	0,48%	14.972.552.425,00	0,55%
4	Penguatan APIP	8.057.840.465,00	0,58%	8.865.876.928,00	0,60%	9.033.405.210,00	0,59%	11.535.848.453,00	0,50%	15.160.974.659,00	0,56%
C	**Pengeluaran Pembiayaan**	**5.000.000.000,00**		**0,00**		**18.000.000.000,00**		**41.752.349.487,00**		**42.695.502.461,00**	
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo							19.615.886.487,00		26.154.515.316,00	
2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00				18.000.000.000,00		22.136.463.000,00		16.540.987.145,00	
3	Pembentukan Dana Cadangan									-	
4	Pemberian Pinjaman Daerah									-	
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.									-	
	Total Belanja Wajib Mengikat	**916.635.491.339,67**	**66,38%**	**1.019.883.125.033,51**	**68,88%**	**1.133.850.582.555,00**	**73,47%**	**1.397.398.526.304,00**	**60,85%**	**1.990.033.574.377,54**	**72,09**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024, diolah

2.2.1.5. Proporsi Pembiayaan Daerah

Untuk memanfaatkan surplus dan menutupi defisit dalam penganggaran dikenal dengan pembiayaan daerah. Memuat perhitungan penutup defisit rill anggaran Kabupaten Tabalong pada tahun 2020-2024. Total Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tabalong dari Tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat. Tahun 2021 menjadi tahun dengan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran terendah yaitu sebesar Rp138.759.025.949, dan tahun 2024 menjadi tahun tertinggi dengan jumlah sisa lebih pembiayaan anggarannya sebesar Rp676.200.601.468. Adapun Gambaran terkait realisasi sisa lebih perhitungan anggaran dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.206
Penutup Defisit Rill Anggaran Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realiasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendapatan Daerah	1.501.576.732.999	1.398.726.755.460	1.813.301.510.483	2.403.029.681.322	2.876.509.103.529,71
2	Belanja Daerah	1.380.906.956.733	1.480.610.083.030	1.543.299.817.751	2.296.370.148.723	2.717.898.979.393
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.000.000.000	-	18.000.000.000	41.752.349.487	42.695.502.461
A.	Defisit Riil	115.669.776.266	-81.883.327.570	252.001.692.732	64.907.183.112	115.914.621.676,01
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	104.972.577.253	220.642.353.519	138.759.025.949	495.378.796.681	560.285.979.793
2	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	-	-	-	-	-
3	Koreksi	-	-	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	104.972.577.253	220.642.353.519	138.759.025.949	495.378.796.681	560.285.979.793
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		**220.642.353.519**	**138.759.025.949**	**390.760.718.681**	**560.285.979.793**	**676.200.601.468**

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024, diolah

Tahun 2023 terjadi kenaikan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang cukup signifikan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp560.285.979.792,65 yang berasal dari kelebihan penerimaan pendapatan, sisa anggaran belanja, dan transfer sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. Dari anggaran pendapatan sebesar Rp2.188.119.555.579,00 realisasinya sebesar Rp2.403.029.681.321,79 atau sebesar 109,82 Capaian tersebut bersumber dari capaian realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp256.804.852.375,79 atau 116,01% dari anggarannya, capaian realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.142.262.619.525,00 atau 108,92% dari anggarannya, serta capaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terealisasi sebesar Rp3.962.209.421,00 atau 0,00% dari anggaran pendapatannya.

B. Dari anggaran belanja dan transfer sebesar Rp2.640.861.889.260,00 realisasinya sebesar Rp2.296.370.148.723,00 atau 86,96%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp344.491.740.537,00. Sisa belanja tersebut terdiri atas rincian sebagai berikut: 1) Selisih kurang anggaran belanja sebesar Rp344.491.740.537,00 terdiri atas: a) Selisih kurang pencapaian realisasi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp202.348.882.902,00 yaitu dari target anggaran sebesar Rp1.541.104.029.285,00. Adapun realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp 1.338.755.146.383,00 atau sebesar 86,87%.

Tabel 2.207
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tabalong Tahun 2020-2024

URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)	Nilai	% dari SiLPA (%)
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	220.642.353.519		138.759.025.949		495.378.796.681		560.285.979.793		676.200.601.469	
Bersumber Dari:										
Pelampauan Pendapatan	-	-	-	-	292.236.830.555	59,00 %	256.804.852.375,79	45,80 %		
Penghematan Belanja	220.642.353.519	100%	138.759.025.949	100%	203.141.966.126	41,00 %	215.794.239.255,65	38,50 %		
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-	-	-	-		
Penghematan Pembiayaan Netto	-	-	-	-	-	-	-	-		

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Tabalong tahun 2020-2024, diolah

2.2.2. Proyeksi Keuangan Daerah Lima Tahun Kedepan

Analisis Kerangka Pendanaan dilakukan untuk menghitung kapasitas rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan dalam jangka menengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Analisis kerangka pendanaan dilakukan dengan proses pengidentifikasian seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada tabel sebelumnya ke pos-pos yang dialokasikan untuk sumber penerimaan tersebut. Kapasitas rill keuangan daerah merupakan total Penerimaan Daerah setelah dikurangi dengan Belanja dan Pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2.2.2.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

A. Pendapatan daerah

Berdasarkan data APBD tahun 2025 diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Tabalong ditargetkan sebesar Rp. 2.994.834.420.138. APBD Tahun 2025 ini menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan proyeksi pendapatan tahun 2026-2030. Pendapatan daerah Kabupaten Tabalong pada periode tersebut diproyeksikan akan mencatat pertumbuhan rata-rata sebesar 5,79%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan memiliki rata-rata pertumbuhan dengan jumlah 5,22%. Sementara Pendapatan Transfer diproyeksikan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,75%. Komponen pendapatan transfer antar daerah terdapat penyesuaian dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diamanatkan pada pasal 23 yaitu hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen). Namun penghitungannya atas dasar jumlah kendaraan dan bukan lagi atas konsumsi bahan bakar. Selanjutnya, untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan 122.000.000.000 pada tahun 2026 sedangkan untuk tahun 2027-2030 di proyeksikan sama dengan nominal Rp140.000.000,00.

Tabel 2.208
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

Kode	Uraian	PAPBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.994.834.420.138**	**2.943.155.446.552**	**3.343.697.648.324**	**3.557.402.344.139**	**3.774.237.055.743**	**3.968.609.642.000**	**5,79%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**280.885.897.073**	***297.955.246.552***	**311.325.555.365**	**327.841.463.772**	**343.942.257.130**	***362.337.574.800,00***	**5,22%**
4.1.01	Pajak Daerah	133.936.323.000	138.377.000.000	151.543.282.629	161.196.589.732	171.464.812.498	180.635.391.700,00	6,16%
4.1.02	Retribusi Daerah	95.983.969.998	23.706.625.497	102.681.169.011	106.275.009.926	109.994.635.274	115.877.559.600,00	3,84%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.150.042.800	14.564.005.726	22.983.622.419	24.546.508.743	25.405.636.549	26.764.424.900,00	5,84%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.815.561.275	121.307.615.329	34.117.481.306	35.823.355.371	37.077.172.809	39.060.198.600,00	4,86%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.500.069.238.065**	***2.523.200.200.000***	**2.892.372.092.959**	**3.089.560.880.367**	**3.290.294.798.613**	***3.466.272.067.200***	**6,75%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pusat	2.302.119.238.065	2.385.800.200.000	2.678.269.372.959	2.866.894.051.567	3.058.966.230.173	3.222.571.182.000	6,96%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	197.950.000.000	137.400.000.000	214.102.720.000	222.666.828.800	231.328.568.440	243.700.885.200,00	4,25%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**213.879.285.000**	**122.000.000.000**	**140.000.000.000**	**140.000.000.000**	**140.000.000.000**	***140.000.000.000,00***	**-8,13%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	213.879.285.000	122.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000,00	-8,13%

Sumber: hasil proyeksi, 2025

B. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran mulai dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten.

Belanja Daerah Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 hingga tahun 2030 diproyeksikan akan mengalami peningkatan dengan persentase rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,89% setiap tahunnya. Belanja operasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,08% dan belanja modal rata-rata tumbuh sebesar 0,65%, dan belanja transfer diproyeksikan terjadi kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,51%. Sementara pada Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sama setiap tahun yakni Rp12.621.073.893.

Berdasarkan hasil proyeksi, terlihat alokasi belanja untuk Belanja Operasi memiliki porsi yang paling besar. Pada tahun 2030 Belanja Operasi diproyeksikan mencapai 2.683.376.032.540. Pengalokasian Belanja Operasi yang cukup besar termasuk di dalamnya termasuk gaji dan tunjangan. Dibawah ini dimuat penjabaran dari proyeksi Belanja Daerah dari tahun 2025-2030.

Tabel 2.209
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

Kode	KAPASITAS RIIL / BELANJA	RKPD 2025 (Perubahan)	PROYEKSI				
			2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**BELANJA DAERAH**	**3.597.627.682.731,19**	**3.089.124.282.266,48**	**3.359.086.918.000,00**	**3.661.700.396.400,00**	**3.969.892.902.900,00**	**4.274.221.530.800,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.009.006.471.335,39**	**1.939.093.655.440,72**	**2.109.103.952.700,00**	**2.297.612.658.740,00**	**2.494.267.830.920,00**	**2.683.376.032.540,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	944.946.864.665,00	950.343.223.777,00	1.033.664.693.900,00	1.126.087.751.720,00	1.222.423.483.560,00	1.309.881.583.060,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	989.213.439.180,39	935.128.946.743,72	1.017.116.503.100,00	1.108.088.696.020,00	1.202.846.358.260,00	1.298.447.052.680,00
5.1.03	Belanja Bunga	6.346.580.000,00	1.250.000.000,00	1.359.593.900,00	1.478.796.400,00	1.608.450.000,00	1.749.471.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.092.282.978,00	2.240.000.000,00	2.436.392.300,00	2.650.003.300,00	2.882.342.600,00	3.135.052.300,00
5.1.05	Belanja Hibah	54.542.123.647,00	31.590.484.920,00	34.360.184.900,00	37.372.718.700,00	40.649.376.800,00	44.213.316.300,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.865.180.865,00	18.541.000.000,00	20.166.584.600,00	21.934.692.600,00	23.857.819.700,00	25.949.557.200,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**1.205.575.390.626,61**	**885.231.626.825,76**	**962.844.428.800,00**	**1.052.651.042.760,00**	**1.137.759.874.280,00**	**1.224.234.675.260,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	33.410.126.410,00	28.066.917.802,00	30.527.688.600,00	33.204.207.800,00	36.115.391.100,00	39.281.812.800,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178.632.269.120,11	88.307.839.730,00	96.050.241.400,00	106.267.825.720,00	113.190.708.160,00	123.114.718.700,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	247.951.104.945,50	226.580.334.937,76	246.445.796.300,00	269.849.331.120,00	291.114.244.060,00	306.778.702.580,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	739.107.933.894,00	539.937.946.784,00	587.277.079.000,00	640.563.042.220,00	694.330.329.960,00	751.786.408.080,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.902.786.257,00	1.042.997.572,00	1.134.442.500,00	1.233.904.800,00	1.342.087.500,00	1.459.755.200,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.571.170.000,00	1.295.590.000,00	1.409.181.000,00	1.532.731.100,00	1.667.113.500,00	1.813.277.900,00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**12.792.339.769,19**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.792.339.769,19	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**370.253.481.000,00**	**254.799.000.000,00**	**277.138.536.500,00**	**301.436.694.900,00**	**327.865.197.700,00**	**356.610.823.000,00**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	20.446.400.000,00	16.209.000.000,00	17.630.126.200,00	19.175.849.800,00	20.857.095.000,00	22.685.743.600,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	349.807.081.000,00	238.590.000.000,00	259.508.410.300,00	282.260.845.100,00	307.008.102.700,00	333.925.079.400,00

Sumber: hasil proyeksi, 2025

2.2.2.2. Proyeksi Pembiayaan Daerah

Proyeksi pembiayaan daerah untuk lima tahun kedepan terdiri dari proyeksi Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaannya. Pembiayaan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan diproyeksikan terjadi kenaikan pada Tahun 2026 dan mengalami penurunan dari tahun 2027-2030 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar minus 2,75% per tahun.

Salah satu komponen pembentuk Penerimaan Pembiayaan adalah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. Selama kurun waktu 2025-2030, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya diproyeksikan menurun sebesar minus 2,50% rata-rata per tahun. Hal ini disebabkan adanya upaya penggunaan anggaran secara efisien dalam mencapai target pembangunan.

Pada tahun 2025 terdapat pembayaran cicilan pokok utang yaitu Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank yaitu kepada PT.SMI sebesar Rp.26.154.515.316. Pembayaran cicilan pokok utang tersebut akan berakhir pada tahun 2027 yaitu sebesar Rp.6.538.645.565. Selanjutnya, pada komponen pengeluaran pembiayaan periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2027 terdapat penyertaan modal pada BPR Tabalong Bersinar. Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.210
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

Uraian	PAPBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
PEMBIAYAAN DAERAH	**85.635.039.774**	**145.968.835.714,48**	**76.974.496.992**	**80.425.313.993**	**77.414.681.144**	**74.479.314.115**	-2,75%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**129.928.355.090**	**207.123.351.030,48**	**123.513.142.557**	**120.425.313.993**	**117.414.681.144**	**114.479.314.115**	-2,50%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.928.355.090	207.123.351.030,48	123.513.142.557	120.425.313.993	117.414.681.144	114.479.314.115	-2,50%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**44.293.315.316**	**61.154.515.316**	**46.538.645.565**	**40.000.000.000**	**40.000.000.000**	**40.000.000.000**	-2,02%
Penyertaan Modal Daerah	18.138.800.000	35.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	17,14%
Pembayaran Cicilan Pokok	26.154.515.316	26.154.515.316	6.538.645.565	0	0	0	

Sumber: hasil proyeksi, 2025

2.2.2.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

A. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Dari hasil analisis proyeksi SiLPA yang telah dilakukan berdasarkan data APBD Tahun 2025, diketahui bahwa total SiLPA dari tahun 2025 hingga 2029 mengalami penurunan. Pada tahun 2025 jumlah SiLPA sebesar Rp129.928.355.090, lalu di tahun 2029 diproyeksikan menjadi Rp117414681143, atau di proyeksikan terjadi penurunan sebesar 2,5%. Proyeksi SiLPA didasarkan pada efisiensi Pengeluaran dalam pengadaan barang/jasa, dan pelampauan target pendapatan. Adapun proyeksi SiLPA Kabupaten Tabalong dijabarkan di bawah ini:

Gambar 2.37
Proyeksi SiLPA Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

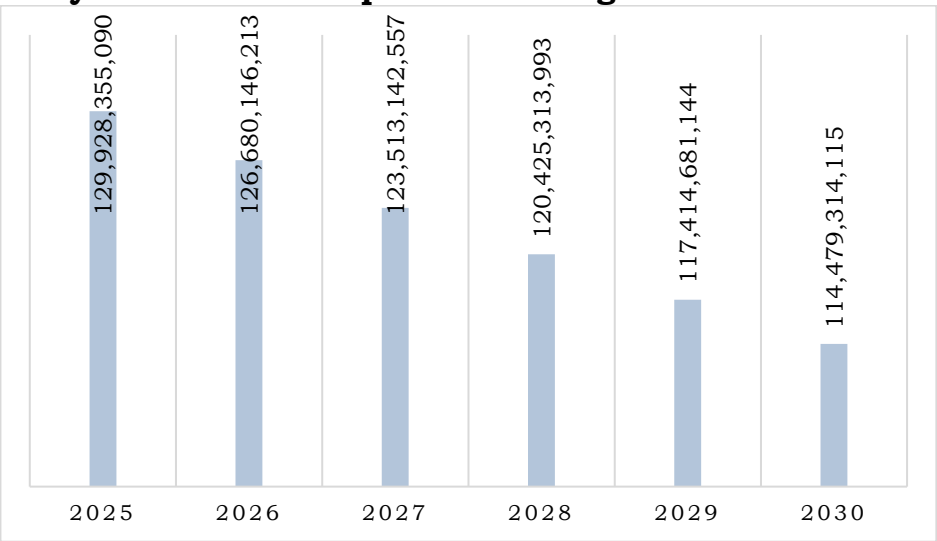

Sumber: hasil proyeksi, 2025

B. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib

Berdasarkan data APBD Tahun 2024 yang telah diproyeksikan, diketahui bahwa total belanja wajib yang dimiliki oleh Kabupaten Tabalong mengalami peningkatan dengan total belanja wajib pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.437.473.182.746 atau sebesar 51,6%. Lalu di tahun 2029 total belanja wajib diproyeksikan sebesar Rp. 1.665.239.162.926 dengan persentase sebesar 46,9%. Di bawah ini disajikan realisasi 2024

dan proyeksi kebutuhan Pengeluaran Wajib Pemerintah Kabupaten Tabalong dari tahun 2025 sampai tahun 2030.

Tabel 2.211
Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030

No	Uraian	Proyeksi									
		2026	%	2027	%	2028	%	2029	%	2030	%
A	**Belanja Wajib**	**1.420.071.456.411**	**45,58%**	**1.502.145.950.981**	**44,11%**	**1.535.628.175.938**	**42,40%**	**1.580.537.810.133**	**40,22%**	**1.665.239.162.926**	**39,39%**
1	Belanja Pegawai	854.039.661.871	27,41%	823.752.523.786	24,19%	858.158.424.490	23,69%	862.449.216.612	21,95%	866.761.462.695	20,50%
2	Pendidikan	508.611.353.900	16,33%	513.697.467.439	15,08%	518.834.442.113	14,33%	524.022.786.534	13,33%	529.263.014.400	12,52%
3	Infrastruktur	884.237.625.095	28,38%	960.676.596.587	28,21%	988.460.681.142	27,29%	1.027.608.785.689	26,15%	1.106.484.436.483	26,17%
4	Peningkatan Kapasitas SDM	11.754.115.703	0,38%	11.924.550.380	0,35%	12.097.456.361	0,33%	12.272.869.478	0,31%	12.450.826.085	0,29%
5	Penguatan APIP	15.468.361.714	0,50%	15.847.336.576	0,47%	16.235.596.322	0,45%	16.633.368.432	0,42%	17.040.885.958	0,40%
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**66.154.515.316**	**2,12%**	**46.538.645.565**	**1,37%**	**40.000.000.000**	**1,10%**	**40.000.000.000**	**1,02%**	**40.000.000.000**	**0,95%**
1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	40.000.000.000	1,28%	40.000.000.000	1,17%	40.000.000.000	1,10%	40.000.000.000	1,02%	40.000.000.000	0,95%
2	Penyertaan Modal Daerah	26.154.515.316	0,84%	6.538.645.565	-	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Wajib	**1.486.225.971.727**	**47,71%**	**1.548.684.596.546**	**45,47%**	**1.575.628.175.938**	**43,51%**	**1.620.537.810.133**	**41,24%**	**1.705.239.162.926**	**40,33%**

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

C. Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah

Perhitungan kerangka pendanaan ditujukan untuk mengetahui kapasitas rill kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaannya. Proyeksi kapasitas rill keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2025-2030 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa total penerimaan berdasarkan APBD Perubahan tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 3.124.762.775.228. Proyeksi penerimaan daerah pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan tahun 2030 mengalami peningkatan. Pada tahun 2030, total penerimaan daerah diproyeksikan mencapai Rp. 3.231.537.550.254. Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan selama 5 (lima) tahun sebesar 0,68%.

Selanjutnya, Pengeluaran Daerah tahun 2025 sampai 2030 diproyeksikan terjadi peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,68%. Pada tahun 2030, pengeluaran daerah diproyeksikan sebesar Rp4.227.781.936.000. Peningkatan tersebut diantaranya pada komponen belanja daerah dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,65% per tahun.

Tabel 2.212
Proyeksi Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

No	Uraian	PAPBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**2.994.834.420.138**	**2.943.155.446.552**	**3.343.697.648.324**	**3.557.402.344.139**	**3.774.237.055.743**	**3.968.609.642.000**	**9,08%**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**280.885.897.073**	***297.955.246.552,00***	**311.325.555.365**	**327.841.463.772**	**343.942.257.130**	***362.337.574.800,00***	**5,11%**
4.1.01	Pajak Daerah	133.936.323.000	138.377.000.000,00	151.543.282.629	161.196.589.732	171.464.812.498	180.635.391.700,00	6,37%
4.1.02	Retribusi Daerah	95.983.969.998	23.706.625.497,00	102.681.169.011	106.275.009.926	109.994.635.274	115.877.559.600,00	3,50%
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.150.042.800	14.564.005.726,00	22.983.622.419	24.546.508.743	25.405.636.549	26.764.424.900,00	5,15%
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	30.815.561.275	121.307.615.329,00	34.117.481.306	35.823.355.371	37.077.172.809	39.060.198.600,00	4,25%
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**2.500.069.238.065**	***2.523.200.200.000***	**2.892.372.092.959**	**3.089.560.880.367**	**3.290.294.798.613**	***3.466.272.067.200***	**10,03%**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pusat	2.302.119.238.065	2.385.800.200.000	2.678.269.372.959	2.866.894.051.567	3.058.966.230.173	3.222.571.182.000	10,57%
4.2.02	Transfer Antar Daerah	197.950.000.000	137.400.000.000,00	214.102.720.000	222.666.828.800	231.328.568.440	243.700.885.200,00	3,95%
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**213.879.285.000**	***122.000.000.000,00***	**140.000.000.000**	**140.000.000.000**	**140.000.000.000**	***140.000.000.000,00***	**0,00%**
4.3.01	Pendapatan Hibah	213.879.285.000	122.000.000.000,00	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000	140.000.000.000,00	0,00%
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**129.928.355.090**	**126.680.146.213**	**123.513.142.557**	**120.425.313.993**	**117.414.681.144**	**114.479.314.115**	**-2,50%**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129.928.355.090	126.680.146.213	123.513.142.557	120.425.313.993	117.414.681.144	114.479.314.115	-2,50%
	Total Penerimaan	**3.124.762.775.228**	**3.069.835.592.765**	**3.467.210.790.881**	**3.677.827.658.133**	**3.891.651.736.887**	**4.110.327.856.644**	**8,65%**

No	Uraian	PAPBD	Proyeksi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	**BELANJA DAERAH**	**3.080.469.459.912**	**3.089.124.282.266,48**	**3.359.086.918.000,00**	**3.661.700.396.700,00**	**3.969.892.903.000,00**	**4.267.781.936.000,00**	**8,90%**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.790.969.250.846**	**1.939.093.655.440,72**	**2.109.103.952.700,00**	**2.297.612.658.740,00**	**2.494.267.830.920,00**	**2.683.376.032.540,00**	**3,07%**
5.1.01	Belanja Pegawai	947.446.505.967	950.343.223.777,00	1.033.664.693.900,00	1.126.087.751.720,00	1.222.423.483.560,00	1.309.881.583.060,00	2,38%
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	791.708.620.536	935.128.946.743,72	1.017.116.503.100,00	1.108.088.696.020,00	1.202.846.358.260,00	1.298.447.052.680,00	4,32%
5.1.03	Belanja Bunga	6.349.580.000	1.250.000.000,00	1.359.593.900,00	1.478.796.400,00	1.608.450.000,00	1.749.471.000,00	
5.1.04	Belanja Subsidi	1.092.282.978	2.240.000.000,00	2.436.392.300,00	2.650.003.300,00	2.882.342.600,00	3.135.052.300,00	0,00%
5.1.05	Belanja Hibah	30.869.080.500	31.590.484.920,00	34.360.184.900,00	37.372.718.700,00	40.649.376.800,00	44.213.316.300,00	0,00%
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.503.180.865	18.541.000.000,00	20.166.584.600,00	21.934.692.600,00	23.857.819.700,00	25.949.557.200,00	0,00%
5.2	**BELANJA MODAL**	**894.945.694.162**	**885.231.626.825,76**	**962.844.428.800,00**	**1.052.651.043.060,00**	**1.137.759.874.380,00**	**1.217.795.080.460,00**	**18,14%**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**69.076.433.904**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**0,00%**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	69.076.433.904	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	125,51%
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**325.478.081.000**	**254.799.000.000,00**	**277.138.536.500,00**	**301.436.694.900,00**	**327.865.197.700,00**	**356.610.823.000,00**	**11,42%**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	22.993.000.000	16.209.000.000,00	17.630.126.200,00	19.175.849.800,00	20.857.095.000,00	22.685.743.600,00	6,30%
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	302.485.081.000	238.590.000.000,00	302.485.081.000	302.485.081.000	302.485.081.000	302.485.081.000	12,16%
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**44.293.315.316**	**26.154.515.316**	**46.538.645.565**	**40.000.000.000-**	**40.000.000.000-**	**40.000.000.000-**	**-**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.138.800.000	40.000.000.000-	40.000.000.000-	40.000.000.000-	40.000.000.000-	40.000.000.000-	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok	26.154.515.316	26.154.515.316	6.538.645.565	-	-	-	-
	Total Pengeluaran	**3.124.762.775.228**	**3.115.278.797.582**	**3.405.625.563.565**	**3.621.700.396.700**	**3.929.892.903.000**	**4.227.781.936.000**	**8,65%**

Sumber: Hasil Proyeksi, 2025

Belanja daerah juga diprioritaskan terhadap pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Pelayanan dasar menggunakan Standar Pelayanan Minimal (SPM), terhadap 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar. Dalam proyeksi belanaj daerah, telah juga dialokasikan untuk penerapan SPM mulai tahun 2025 sampai 2030. Adapun alokasinya dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.213
Proyeksi Anggaran untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Tabalong
Tahun 2025-2030

NO.	BIDANG SPM & PROGRAM	TARGET PAGU					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
I.	**BIDANG PENDIDIKAN**	**86.454.688.113**	173.379.270.131	202.605.039.100	219.228.782.500	237.216.504.000	256.680.118.000
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	77.674.359.380	163.560.397.650	191.980.528.200	207.732.530.500	224.776.984.600	243.219.936.100
2	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.780.328.733	9.818.872.481	10.624.510.900	11.496.252.000	12.439.519.400	13.460.181.900,00
II.	**BIDANG KESEHATAN**	**155.212.492.064**	**141.792.600.864**	**153.426.683.600**	**166.015.342.800**	**179.636.901.500**	**194.376.109.100**
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	150.950.818.082	138.587.977.248	149.959.120.700	162.263.266.500	175.576.967.500	189.983.057.600
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	3.539.543.740	2.949.470.000	3.191.474.000	3.453.334.400	3.736.680.400	4.043.275.000

NO.	BIDANG SPM & PROGRAM	TARGET PAGU					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	210.368.780	118.442.160	128.160.300	138.675.800	150.054.100	162.366.000
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	511.761.462	136.711.456	147.928.600	160.066.100	173.199.500	187.410.500
III	**BIDANG PEKERJAAN UMUM**	**429.291.321.797**	**667.795.432.467**	**726.191.270.000**	**785.775.263.400**	**850.248.123.300**	**920.010.981.400**
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	17.043.348.220	19.826.020.200	21.452.745.100	23.212.942.800	25.117.564.700	27.178.460.800
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25.000.000.000	40.000.000.000	43.282.000.000	46.833.288.100	50.675.959.300	54.833.921.700
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.624.524.259	-	3.603.222.600	3.898.866.900	4.218.768.800	4.564.918.700
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	3.000.000.000	0	0	0	0	0
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	65.243.380.789	110.736.082.917	119.821.978.500	129.653.371.800	140.291.430.900	151.802.342.800
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	0	0	0	0	0	0

NO.	BIDANG SPM & PROGRAM	TARGET PAGU					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	303.232.336.030	488.925.000.000	529.041.296.200	572.449.134.500	619.418.585.900	670.241.880.800
8	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.398.868.499	1.124.976.936	1.217.281.200	1.317.159.100	1.425.232.000	1.542.172.200
9	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	7.748.864.000	7.183.352.414	7.772.746.400	8.410.500.200	9.100.581.700	9.847.284.400
IV.	**BIDANG PERUMAHAN RAKYAT**	**135.486.399.832**	69.919.810.095	75.656.730.300	81.864.364.900	88.581.335.800	95.849.434.200
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2.363.665.000	576.200.000	623.477.200	674.633.500	729.987.100	789.882.500
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	14.154.338.432	7.643.215.873	8.270.341.700	8.948.923.200	9.683.182.300	10.477.687.400
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	6.486.684	5.163.828.000	5.587.520.000	6.045.976.000	6.542.048.300	7.078.823.300
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	118.961.909.716	56.536.566.222	61.175.391.400	66.194.832.200	71.626.118.100	77.503.041.000
V,	**BIDANG TRANTIBUMLINMAS**	**26.790.490.108**	**22.893.652.663**	**25.772.076.700**	**28.655.240.100**	**31.767.688.767**	**35.449.950.367**
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.670.789.168	6.193.342.310	6.701.506.000	7.251.364.500	7.846.338.900	8.490.131.000

NO.	BIDANG SPM & PROGRAM	TARGET PAGU					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	9.471.597.605	7.960.461.623	9.613.617.400	11.170.979.300	12.848.844.467	14.978.814.967
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	10.648.103.335	8.739.848.730	9.456.953.300	10.232.896.300	11.072.505.400	11.981.004.400
VI.	**BIDANG SOSIAL**	**38.747.870.005**	**40.267.504.066**	**43.571.452.500**	**47.146.490.000**	**51.014.859.200**	**55.200.628.200**
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.027.272.078	5.472.117.509	5.921.104.700	6.406.931.300	6.932.620.000	7.501.441.400
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	4.656.000.000	5.463.800.000	5.912.104.700	6.397.192.800	6.922.082.400	7.490.039.200
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	28.120.575.435	27.636.514.234	29.904.090.200	32.357.720.800	35.012.671.700	37.885.461.400
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	883.456.560	1.379.357.685	1.492.533.900	1.614.996.300	1.747.506.700	1.890.889.600
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.060.565.932	315.714.638	341.619.000	369.648.800	399.978.400	432.796.600
	JUMLAH	**871.983.261.919**	**1.116.048.270.286**	**1.227.223.252.200**	**1.328.685.483.700**	**1.438.465.412.567**	**1.557.567.221.267**

Sumber: hasil proyeksi, 2025

2.3. Permasalahan Dan Isu Strategis

2.3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Perumusan permasalahan pembangunan menjadi penting untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu. Dengan kinerja pembangunan Kabupaten Tabalong yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan pembangunan. Permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh tidak tercapaianya target atau apa yang direncanakan/diharapkan, ataupun adanya target baru yang perlu dicapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memberikan pelayanan yang lebih baik.

2.3.1.1. Permasalahan Pokok Pembangunan

Capaian pembangunan tahun-tahun sebelumnya memberikan gambaran kinerja pembangunan. Dari berbagai permasalahan daerah yang diidentifikasi, dilakukan pemeringkatan permasalahan pokok pembangunan. Berikut merupakan hasil pemeringkatan permasalahan pokok daerah Kabupaten Tabalong.

Tabel 2.214
Hasil Pemeringkatan Permasalahan Pokok Daerah
Kabupaten Tabalong

No.	Permasalahan Pokok Daerah
1	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat
2	Belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat
3	Belum optimalnya investasi di daerah
4	Belum optimalnya peran sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah
5	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat
6	Belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman layak dan berkualitas
7	Belum optimalnya kinerja dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah
8	Belum optimalnya kinerja layanan perhubungan
9	Belum optimalnya penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif
10	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku
11	Belum optimalnya peran koperasi dan UKM untuk mendukung perekonomian lokal

No.	Permasalahan Pokok Daerah
12	Belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial
13	Belum optimalnya aksesibilitas dan efisiensi layanan publik berbasis digital
14	Belum optimalnya kontribusi perikanan terhadap ketahanan pangan
15	Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah
16	Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah
17	Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga
18	Belum optimalnya tata kelola pertanahan
19	Relatif tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan
20	Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
21	Belum optimalnya pengembangan sektor industri dalam mendukung perekonomian daerah
22	Belum optimalnya daya saing kepemudaan
23	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi statistik secara terpadu dan terintegrasi
24	Belum optimalnya keamanan dan manajemen informasi digital
25	Belum optimalnya pengelolaan budaya secara terpadu untuk memperkuat identitas dan keberagaman budaya daerah
26	Belum optimalnya tingkat literasi masyarakat
27	Belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender
28	Belum optimalnya daya saing desa
29	Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender
30	Belum optimalnya kondisi wilayah yang kondusif
31	Belum optimalnya tata kelola administrasi kependudukan
32	Belum optimalnya implementasi riset yang relevan dengan kebutuhan daerah
33	Belum optimalnya peningkatan daya saing ekonomi wilayah
34	Meningkatnya kerusakan lingkungan/degradasi lingkungan

Sumber: Hasil Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong Tahun 2025, Bapperida

Lebih lanjut mengenai permasalahan kesejahteraan masyarakat terdapat dua masalah pokok, yakni pertama, **belum optimalnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat**, yang disebabkan oleh belum optimalnya ketahanan ekonomi masyarakat sebagai akibat dari relatif tingginya kemiskinan; serta belum optimalnya taraf hidup masyarakat sebagai akibat dari relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka. Permasalahan pokok yang kedua adalah **belum optimalnya peningkatan daya saing ekonomi wilayah**, yang

disebabkan oleh belum optimalnya pertumbuhan dan produktivitas ekonomi wilayah sebagai akibat dari belum optimalnya investasi dalam pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi; belum optimalnya pelaksanaan reformasi struktural, termasuk perbaikan iklim investasi, deregulasi, reformasi perpajakan, dan peningkatan efisiensi pasar; belum optimalnya kemampuan dan keterampilan masyarakat yang diperlukan untuk berkontribusi dalam ekonomi yang berkembang; belum optimalnya diversifikasi sektor ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu; serta belum optimalnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah.

2.3.1.2. Permasalahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil identifikasi permasalahan daerah berdasarkan urusan pemeritaha daerah di Kabupaten Tabalong, diuraikan sebagai berikut:

1. Pendidikan

Permasalahan pokok pada bidang urusan pendidikan adalah belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya kualitas pendidikan; (b) belum optimalnya akses yang setara dan mudah terhadap pendidikan formal; (c) belum optimalnya pendidikan inklusif; serta (d) belum optimalnya akses pendidikan nonformal. Secara lebih detail, permasalahan belum optimalnya kualitas pendidikan di Kabupaten Tabalong disebabkan oleh belum optimalnya implementasi kurikulum berbasis kompetensi; belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan; belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penunjang dan/atau fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar; serta belum optimalnya sekolah yang terakreditasi.

Selanjutnya, permasalahan belum optimalnya akses yang setara dan mudah terhadap pendidikan formal disebabkan oleh masih terdapatnya sejumlah anak putus sekolah dan anak tidak sekolah di Kabupaten Tabalong. Permasalahan belum optimalnya pendidikan

inklusif disebabkan oleh belum optimalnya penyediaan sarana prasarana dan/atau fasilitas pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif; masih terbatasnya tenaga pendidik yang terlatih dalam pendidikan inklusif; serta kurikulum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap kebutuhan beragam peserta didik. Terakhir, permasalahan belum optimalnya akses pendidikan nonformal di kabupaten ini disebabkan oleh belum optimalnya dukungan terhadap pendidikan nonformal, serta belum optimalnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengikuti program pendidikan nonformal.

2. Kesehatan

Permasalahan pokok pada bidang urusan kesehatan adalah belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan; (b) masih tingginya angka kesakitan; serta (c) relatif tingginya permasalahan gizi dan tumbuh kembang (stunting). Permasalahan belum optimalnya akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Tabalong ini sendiri disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana prasarana medis; belum optimalnya ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan; serta belum optimalnya manajemen pelayanan rumah sakit. Permasalahan masih tingginya angka kesakitan yang terjadi di Kabupaten Tabalong disebabkan oleh relatif tingginya penyakit menular dan tidak menular, serta belum optimalnya layanan kesehatan maternal dan neonatal. Selanjutnya, permasalahan relatif tingginya permasalahan gizi dan tumbuh kembang (stunting) terjadi sebagai akibat dari belum optimalnya sistem ketahanan gizi serta kesehatan ibu serta anak.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan pokok pada bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya konektivitas wilayah; (b) belum

optimalnya cakupan layanan air minum dan sanitasi yang layak; (c) belum optimalnya akses listrik yang andal dan terjangkau; (d) belum optimalnya penataan ruang wilayah; (e) belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur pengairan, terutama wilayah selatan seperti jalan usaha tani, pintu air, dan saluran irigasi; (f) belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi; (g) belum optimalnya pengawasan pembangunan gedung; serta (h) menurunnya persentase kawasan yang terbangun.

Permasalahan belum optimalnya konektivitas wilayah di Kabupaten Tabalong disebabkan oleh masih terdapatnya infrastruktur jalan dan jembatan yang belum terhubung dengan baik. Sementara itu, permasalahan belum optimalnya cakupan layanan air minum dan sanitasi yang layak, disebabkan oleh belum optimalnya akses universal terhadap layanan sumber air minum layak bagi semua rumah tangga, serta belum optimalnya sumber air baku secara berkesinambungan. Permasalahan belum optimalnya akses listrik yang andal dan terjangkau di kabupaten ini disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan tenaga angin; belum optimalnya pemerataan infrastruktur kelistrikan; serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah, PLN, dan sektor swasta dalam percepatan elektrifikasi.

Selanjutnya, permasalahan belum optimalnya penataan ruang wilayah di Kabupaten Tabalong disebabkan oleh belum optimalnya perencanaan dan pemanfaatan tata ruang; serta belum optimalnya pengendalian dan pengawasan tata ruang ruang. Adanya permasalahan terkait belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur pengairan, terutama wilayah selatan seperti jalan usaha tani, pintu air, dan saluran irigasi disebabkan oleh belum optimalnya konektivitas jaringan irigasi dan pengairan; serta belum optimalnya tata kelola sumber daya air, terutama di daerah yang membutuhkan. Permasalahan belum optimalnya penyelenggaraan jasa konstruksi di kabupaten ini

terjadi sebagai akibat dari belum optimalnya pemanfaatan dan efektivitas Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dalam mendukung pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi.

Permasalahan belum optimalnya pengawasan pembangunan gedung di Kabupaten Tabalong disebabkan oleh belum optimalnya regulasi dan standar teknis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung; serta adanya keterbatasan sumber daya pengawas baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Terakhir, permasalahan menurunnya persentase kawasan yang terbangun di kabupaten ini terjadi sebagai akibat dari belum optimalnya infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air yang memperlambat pengembangan kawasan; dan terbatasnya ketersediaan lahan yang siap bangun akibat faktor perizinan atau tata ruang.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pokok pada bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman layak dan berkualitas yang disebabkan oleh masih adanya kawasan permukiman kumuh sebagai akibat dari belum optimalnya penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang menyebabkan pertumbuhan permukiman tidak terencana; belum optimalnya akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan; serta belum optimalnya ketersediaan hunian layak dan terjangkau, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pokok pada bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat adalah belum optimalnya kondisi wilayah yang kondusif yang disebabkan oleh belum optimalnya stabilitas dan resiliensi wilayah dalam menciptakan

lingkungan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan sebagai akibat dari belum optimalnya sistem keamanan dan penegakan hukum; belum optimalnya ketahanan sosial dan perlindungan kelompok rentan; serta belum optimalnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

6. Sosial

Permasalahan pokok pada bidang urusan sosial di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial, yang disebabkan oleh belum optimalnya masyarakat miskin dan rentan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial sebagai akibat dari masih cukup banyaknya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang perlu mendapatkan penanganan bantuan dan pembinaan.

7. Tenaga Kerja

Permasalahan pokok pada bidang tenaga kerja di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya kepatuhan terhadap hukum ketenagakerjaan karena belum optimalnya pelaksanaan regulasi ketenagakerjaan; serta (b) belum optimalnya manajemen hubungan industrial karena belum optimalnya penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, dan belum optimalnya penguatan kelembagaan hubungan industrial dan pengupahan.

8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Terdapat dua permasalahan pokok terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tabalong. Permasalahan pokok pertama adalah belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender, yang disebabkan oleh (a) masih rendahnya peran perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari belum optimalnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan, manajemen, dan negosiasi; belum optimalnya peran dan keterwakilan perempuan sebagai pengambil

keputusan di lembaga eksekutif; belum optimalnya partisipasi politik perempuan; serta belum optimalnya akses perempuan terhadap peluang karir dan pendidikan; dan (b) masih terjadinya kekerasan pada perempuan, baik fisik, seksual, maupun emosional karena belum optimalnya upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan secara komprehensif.

Permasalahan pokok kedua terkait dengan bidang urusan ini adalah belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender, yang disebabkan oleh belum optimalnya sistem perlindungan anak dalam mencegah pernikahan usia dini sebagai akibat dari belum optimalnya layanan perlindungan anak yang responsif dan mudah diakses; kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak; keterbatasan akses pendidikan bagi anak perempuan; belum optimalnya pemberdayaan ekonomi keluarga dan budaya yang masih mendukung pernikahan dini; serta belum optimalnya implementasi aturan terkait batas usia pernikahan.

9. Pangan

Permasalahan pokok pada bidang urusan pangan adalah relatif tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan, yang disebabkan oleh belum optimalnya ketahanan pangan daerah sebagai akibat dari belum optimalnya kemandirian pangan daerah dan menurunnya penanganan daerah rawan pangan.

10. Pertanahan

Permasalahan pokok pada bidang urusan pertanahan di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya tata kelola pertanahan, yang disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk kepentingan publik karena menurunnya luas tanah kosong terkelola.

11. Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok pada bidang urusan lingkungan hidup di Kabupaten Tabalong adalah meningkatnya kerusakan lingkungan/degradasi lingkungan, yang disebabkan oleh belum optimalnya kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam karena belum optimalnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan pokok pada bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya tata kelola administrasi kependudukan, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya layanan kependudukan, karena belum optimalnya pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; serta (b) belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan, karena belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga terkait dalam pemanfaatan dan pengelolaan data kependudukan.

13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan pokok terkait bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya daya saing desa, yang disebabkan karena belum optimalnya pembangunan dan pengembangan desa sebagai akibat dari belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan pemerintahan desa; belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal dan pengembangan usaha desa; belum optimalnya kapasitas aparatur pemerintahan desa; belum optimalnya pengembangan kawasan perdesaan; serta belum optimalnya infrastruktur dan aksesibilitas di wilayah desa.

14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan pokok pada bidang urusan pengendalian

penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga, yang disebabkan oleh masih tingginya laju pertambahan penduduk sebagai akibat dari belum optimalnya akses, edukasi, dan pemberdayaan perempuan dalam kesehatan reproduksi dan kontrasepsi; masih adanya angka kehamilan yang tidak diinginkan; serta masih adanya pernikahan usia dini.

15. Perhubungan

Permasalahan pokok pada bidang urusan perhubungan di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya kinerja layanan perhubungan, yang disebabkan oleh belum optimalnya kualitas dan pengelolaan sistem transportasi serta keselamatan lalu lintas yang dikarenakan belum optimalnya layanan jasa sarana dan prasarana perhubungan, serta menurunnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan pokok pada bidang urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Tabalong adalah terkait dengan belum optimalnya aksesibilitas dan efisiensi layanan publik berbasis digital, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya sistem informasi, komunikasi, dan pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sebagai akibat dari belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung SPBE; belum optimalnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota; serta terbatasnya SDM belatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian; serta (b) belum optimalnya dukungan terhadap inklusi digital, sebagai akibat dari menurunnya cakupan layanan

komunikasi; serta belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang aman dan bermanfaat.

17. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan pokok terkait bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya peran koperasi dan UKM untuk mendukung perekonomian lokal, yang disebabkan oleh belum optimalnya ekosistem yang mendukung koperasi dan UKM, karena belum optimalnya kapasitas dan daya saing koperasi dan UKM; belum optimalnya akses pasar; serta belum optimalnya akses pembiayaan.

18. Penanaman Modal

Permasalahan pokok terkait bidang urusan penanaman modal di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya investasi di daerah, yang disebabkan oleh belum optimalnya ekosistem investasi dan daya tarik penanaman modal di daerah karena belum optimalnya penciptaan iklim usaha yang kondusif.

19. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan pokok pada bidang urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya daya saing kepemudaan, yang disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan kepemudaan dan prestasi olahraga karena belum optimalnya peran pemuda di daerah dan belum optimalnya pengembangan olahraga.

20. Statistik

Permasalahan pokok terkait bidang urusan statistik di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya pengelolaan data dan informasi statistik secara terpadu dan terintegrasi, yang disebabkan oleh belum optimalnya sinkronisasi dan standardisasi pengelolaan data statistik sebagai akibat dari belum optimalnya penyediaan dan kualitas

data penunjang kebijakan daerah; masih terjadinya tumpang tindih data; serta belum optimalnya validasi, pemanfaatan, pengelolaan, dan updating data statistik sektoral.

21. Persandian

Permasalahan pokok pada bidang urusan persandian di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya keamanan dan manajemen informasi digital, yang disebabkan oleh belum optimalnya penerapan kebijakan keamanan sistem informasi, karena belum optimalnya jumlah informasi yang diamankan; serta belum optimalnya jumlah dokumen yang diterima dan diamankan melalui email.

22. Kebudayaan

Permasalahan pokok pada bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya pengelolaan budaya secara terpadu untuk memperkuat identitas dan keberagaman budaya daerah, yang disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan seni dan budaya daerah, sebagai akibat dari menurunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya; belum optimalnya sarana penyelenggaraan festival seni dan budaya; serta masih rendahnya kreatifitas dan inovasi kebudayaan.

23. Perpustakaan

Permasalahan pokok pada bidang urusan perpustakaan di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya tingkat literasi masyarakat, yang disebabkan oleh (a) rendahnya minat baca masyarakat karena belum optimalnya akses terhadap sumber bacaan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membaca; serta (b) belum optimalnya pengelolaan dan layanan perpustakaan, sebagai akibat dari belum optimalnya ketersediaan dan kualitas koleksi buku; belum optimalnya kompetensi dan profesionalisme pustakawan; belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam layanan perpustakaan; belum

optimalnya strategi promosi dan inovasi layanan perpustakaan; serta belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

24. Kearsipan

Permasalahan pokok pada bidang urusan kearsipan di Kabupaten Tabalong terkait dengan belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku, yang disebabkan oleh belum optimalnya tata kelola dan sumber daya kearsipan di daerah sebagai akibat dari belum optimalnya kesadaran dan komitmen perangkat daerah dalam pengelolaan arsip; belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia arsiparis; belum optimalnya infrastruktur dan sarana kearsipan; serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan arsip.

25. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan pokok terkait bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya kontribusi perikanan terhadap ketahanan pangan, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya angka konsumsi ikan, sebagai akibat dari belum optimalnya distribusi dan akses ikan di masyarakat; kurangnya edukasi dan promosi manfaat ikan bagi kesehatan; kurang stabilnya harga ikan yang berpengaruh pada daya beli masyarakat terhadap ikan; relatif terbatasnya pilihan konsumsi ikan di masyarakat; dan relatif tingginya hasil tangkapan atau budidaya yang tidak termanfaatkan secara maksimal; serta (b) belum optimalnya produktivitas perikanan di daerah, karena masih rendahnya produksi perikanan kelompok pembudidaya dan tangkap, serta dan masih adanya praktik penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan.

26. Pariwisata

Permasalahan pokok pada bidang urusan pariwisata di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya pembangunan

kepariwisataan daerah, yang disebabkan oleh belum optimalnya penguatan ekosistem pengembangan pariwisata daerah sebagai akibat dari belum optimalnya pengelolaan destinasi dan daya tarik wisata; belum optimalnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung pariwisata; belum optimalnya strategi pemasaran dan promosi pariwisata; belum optimalnya pengembangan SDM pariwisata; serta belum optimalnya investasi dan pendanaan sektor pariwisata.

27. Pertanian

Permasalahan pokok terkait bidang urusan pertanian di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya peran sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya produktivitas pertanian dalam arti luas, baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, maupun peternakan karena belum optimalnya produksi dan mutu hasil komoditas pertanian dalam arti luas; serta (b) masih rendahnya nilai tambah hasil produk pertanian karena belum optimalnya pengelolaan hasil dan hilirisasi produk pertanian.

28. Perdagangan

Permasalahan pokok pada bidang urusan perdagangan di Kabupaten Tabalong yakni terkait dengan belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, yang disebabkan oleh belum optimalnya perkembangan dan daya saing sektor perdagangan di daerah karena belum optimalnya pengembangan dan kesiapan produk unggulan daerah untuk pasar ekspor dan belum optimalnya perluasan akses pasar.

29. Perindustrian

Permasalahan pokok pada bidang perindustrian di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya pengembangan sektor industri dalam mendukung perekonomian daerah, yang disebabkan oleh belum

optimalnya pertumbuhan dan daya saing sektor industri daerah sebagai akibat dari belum optimalnya produktivitas, inovasi, dan daya saing industri; belum optimalnya ekosistem industri untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha; belum optimalnya kapasitas industri dalam meningkatkan nilai tambah dan akses pasar; belum optimalnya dukungan terhadap industri kecil, menengah, dan manufaktur; serta belum optimalnya lingkungan industri yang kondusif bagi investasi dan inovasi.

30. Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

Permasalahan pokok pada fungsi pendukung urusan pemerintahan di Kabupaten Tabalong adalah belum optimalnya kinerja dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, yang disebabkan oleh (a) belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, sebagai akibat dari belum optimalnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah daerah; belum optimalnya sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas untuk menjalankan pelayanan publik; belum optimalnya infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk mendukung pelayanan publik yang efisien; belum optimalnya sistem pengawasan dan evaluasi layanan publik; serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelenggaraan layanan publik; dan (b) belum optimalnya kinerja sekretariat dewan, karena belum optimalnya tingkat pelayanan anggaran pada sekretariat dewan; serta belum optimalnya penetapan perda yang terselesaikan tepat waktu pada sekretariat dewan.

31. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Permasalahan pokok pada fungsi penunjang urusan pemerintahan adalah belum optimalnya implementasi riset yang relevan dengan kebutuhan daerah, yang disebabkan oleh belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan, sebagai akibat dari belum

optimalnya integrasi antara hasil riset dan kebijakan; hasil penelitian belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan pengambilan kebijakan; serta belum optimalnya kapasitas sumber daya manusia.

Lebih rinci mengenai pemilahan permasalahan-permasalahan di atas menjadi permasalahan poko, masalah, dan akar masalah disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 2.215
Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong

No.	Permasalahan Pokok Daerah
1	Belum optimalnya tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat
2	Belum optimalnya tingkat pendidikan masyarakat
3	Belum optimalnya investasi di daerah
4	Belum optimalnya peran sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah
5	Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat
6	Belum optimalnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman layak dan berkualitas
7	Belum optimalnya kinerja dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah
8	Belum optimalnya kinerja layanan perhubungan
9	Belum optimalnya penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif
10	Belum optimalnya pengelolaan kearsipan secara baku
11	Belum optimalnya peran koperasi dan UKM untuk mendukung perekonomian lokal
12	Belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial
13	Belum optimalnya aksesibilitas dan efisiensi layanan publik berbasis digital
14	Belum optimalnya kontribusi perikanan terhadap ketahanan pangan
15	Belum optimalnya ketersediaan dan pemerataan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah
16	Belum optimalnya pembangunan kepariwisataan daerah
17	Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan pembangunan keluarga
18	Belum optimalnya tata kelola pertanahan
19	Relatif tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan
20	Belum optimalnya kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah
21	Belum optimalnya pengembangan sektor industri dalam mendukung perekonomian daerah
22	Belum optimalnya daya saing kepemudaan
23	Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi statistik secara terpadu dan terintegrasi
24	Belum optimalnya keamanan dan manajemen informasi digital
25	Belum optimalnya pengelolaan budaya secara terpadu untuk memperkuat

No.	Permasalahan Pokok Daerah
	identitas dan keberagaman budaya daerah
26	Belum optimalnya tingkat literasi masyarakat
27	Belum optimalnya pencegahan pernikahan usia dini sebagai bagian dari perlindungan hak anak dan kesetaraan gender
28	Belum optimalnya daya saing desa
29	Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan gender
30	Belum optimalnya kondisi wilayah yang kondusif
31	Belum optimalnya tata kelola administrasi kependudukan
32	Belum optimalnya implementasi riset yang relevan dengan kebutuhan daerah
33	Belum optimalnya peningkatan daya saing ekonomi wilayah
34	Meningkatnya kerusakan lingkungan/degradasi lingkungan

Sumber: Hasil Kajian Isu Strategis Kabupaten Tabalong Tahun 2025, Bapperida

2.3.2. Isu Strategis Daerah

2.3.2.1. Telaahan Isu Internasional

Isu strategis internasional yang berpengaruh terhadap kondisi Indonesia kedepan yaitu berupa 10 (sepuluh) megatren global. Kesepuluh megatren global dimaksud, meliputi:

a. **Perkembangan demografi global.** Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%).
b. **Geopolitik dan geoekonomi.** Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71%.
c. **Perkembangan teknologi.** Teknologi akan mengantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini.
d. **Peningkatan urbanisasi dunia.** Penduduk perkotaan mencapai 65%; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70%.
e. **Konstelasi perdagangan global.** Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun.
f. **Tata kelola keuangan global.** Pergeseran kebijakan fiskal, *Central Bank Digital Currency* (CBDB), dan Fintech.
g. **Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*).** Jumlah middle dan upper class lebih dari 90% (8,8 miliar).

h. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan peran ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam.

i. Perubahan iklim. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana.

j. Pemanfaatan luar angkasa (*space economy*). Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan keamanan antariksa.

2.3.2.2. Telaahan Isu/Kebijakan Nasional

A. Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong sinergi dengan RPJMN Tahun 2025-2029. RPJMN Tahun 2025-2029 telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Visi dan Misi Presiden periode 2025-2029 dimuat pada gambar di bawah.

Gambar 2.38
Visi dan Misi Presiden Tahun 2025-2029

Sumber: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025

Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Isu Nasional terkait Wilayah Kalimantan sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu:

a. Masih besarnya ketergantungan perekonomian daerah pada sektor hulu disertai lambatnya proses hilirisasi dan diversifikasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam karena minimnya penciptaan lingkungan usaha industri yang kondusif, kurangnya dukungan insentif fiskal, dan rendahnya penguasaan teknologi, serta keterbatasan pasokan energi, air, dan pangan.
b. Masih kurangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Kalimantan sebagai penggerak utama perekonomian wilayah serta belum meratanya pembangunan infrastruktur dan konektivitas pendukungnya.
c. Masih minimnya ketersediaan sarana dan prasarana layanan dasar yang memenuhi standar pelayanan minimum (SPM).
d. Masih tingginya tingkat kemiskinan dan kesenjangan di kawasan perdesaan, transmigrasi, dan perbatasan negara.

e. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan disertai kondisi geografis hutan dan rawa menyebabkan masih tingginya kasus penyakit menular tropis seperti malaria (tertinggi di Kalimantan Timur).
f. Masih minimnya akses masyarakat terhadap fasilitas pendidikan serta sarana pengembangan talenta tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga menyebabkan rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia.
g. Tingginya konversi hutan menjadi lahan tidak produktif dapat mengancam kerusakan ekosistem alami seperti hutan hujan tropis Kalimantan, flora dan fauna endemik seperti orangutan dan bekantan serta warisan geologi dan keanekaragaman geologi lainnya.

B. Telaahan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Pulau Kalimantan

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pertumbuhkan ekonomi yang lebih inklusif dan merata, salah satunya dengan membangun sebuah pusat gravitasi ekonomi baru di tengah Indonesia. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan didasarkan pada beberapa pertimbangan. Lokasi yang dipilih direncanakan dapat memberikan kesempatan luas bagi daerah di luar Jawa untuk berkembang dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, serta mengurangi beban Jakarta sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional.

Wilayah Kawasan Ibu Kota Nusantara dengan luas kurang lebih 56.180 hektare terletak pada dua kabupaten eksisting, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan Ibu Kota Nusantara beririsan dengan dua kecamatan, yaitu Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Loa Kulu. Di dalam Kawasan Ibu Kota Nusantara, terdapat 13 desa/kelurahan eksisting yaitu 11 desa terdiri

dari Sungai Payang, Jonggon Desa, Argo Mulyo, Bukit Raya, Bumi Harapan, Karang Jinawi, Semoi Dua, Sukaraja, Sukomulyo, Tengin Baru, Wonosari dan 2 Kelurahan terdiri dari Pemaluan dan Sepaku.

Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) mempunyai fungsi sentral dan menjadi simbol suatu negara untuk menunjukkan jati diri bangsa dan negara. Oleh karena itu, pemindahan dan pengembangan ibu kota yang baru perlu didasarkan pada perkembangan prinsip pembangunan kota yang matang serta kebutuhan dan visi jangka panjang suatu bangsa. Paradigma perencanaan dan prinsip pengembangan IKN disusun menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan di lokasi yang baru.

Pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi Ibu Kota Negara sebagai kota dunia untuk semua yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan (*role model*) bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia dan dunia. Visi besar tersebut bertujuan untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai:

1. kota berkelanjutan di dunia, yang menciptakan kenyamanan, keselarasan dengan alam, ketangguhan melalui efisiensi penggunaan sumber daya dan rendah karbon;
2. penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, yang memberi peluang ekonomi untuk semua melalui pengembangan potensi, inovasi, dan teknologi; serta
3. simbol identitas nasional, merepresentasikan keharmonisan dalam keragaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Dalam rangka pelaksanaan Kewenangan Khusus, Otorita Ibu Kota Nusantara melaksanakan kerja sama dengan Daerah Mitra dan daerah lain berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas. Dalam rangka kerja sama, Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan dukungan pembangunan kepada Daerah Mitra sesuai Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara beserta dokumen rencana tata ruang. Daerah Mitra adalah kawasan-

kawasan tertentu di Pulau Kalimantan yang dibentuk dalam rangka pembangunan dan pengembangan superhub ekonomi Ibu Kota Nusantara, yang bekerja sama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Otorita lbu Kota Nusantara.

Posisi Kabupaten Tabalong yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang berdekatan dengan lokasi IKN. Dengan posisi strategis ini, maka besar peluang Kabupaten Tabalong untuk berperan dalam memenuhi kebutuhan pangan, jasa, dan tenaga kerja, serta peluang-peluang lainnya. Dengan posisi sebagai daerah penyangga IKN, konektivitas juga menjadi hal yang sangat penting dan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Tabalong secara khusus dan secara untuk di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.2.3. Telaahan Isu/Kebijakan Regional (Provinsi)

Pada saat RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ini disusun, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selaran juga sedang menyusun RPJMD sebagai penjawaban visi dan misi serta program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029. Adapun informasi pada Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, dijelaskan pada bagian ini.

Isu-isu strategis yang penting dan berdaya ungkit untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada periode tahun 2025-2029, yaitu:

1. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) yang Masih Rendah
2. Belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM)
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian serta Konektivitas yang Masih Terbatas
4. Fondasi Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan yang Masih Belum Kuat dan Proses Hilirisasi Masih Lambat

5. Pengelolaan Sumber Daya Alam Potensial yang Berkelanjutan dan Terintegrasi Antarwilayah Kabupaten/Kota Belum Optimal
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan Belum Dilakukan Secara Optimal
7. Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik yang Belum Optimal

Keselarasan visi gubernur dan wakil gubernur dengan visi RPJPD dan tujuan penataan ruang Provinsi Kalimantan Selatan menghasilkan rumusan visi RPJMD. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 adalah:

KALSEL BEKERJA
(BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA)
MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN

Pokok-pokok pernyataan Visi RPJMD memiliki makna sebagai berikut:

a. BEKERJA; Ikhtiar melakukan sesuatu yang melibatkan kesadaran manusia untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapannya.
b. BERKELANJUTAN; 1). melanjutkan pembangunan periode sebelumnya; dan 2). pembangunan yang seimbang antara sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan.
c. BERBUDAYA; masyarakat yang memiliki warisan budaya, norma, dan nilai-nilai yang membentuk identitas dan memiliki pikiran dan akal yang maju.
d. RELIGI; masyarakat yang memiliki kepercayaan kepada adanya Tuhan dan memiliki nilai moral serta etika.
e. SEJAHTERA; kebutuhan jasmaniah, rohani, dan rasa aman yang terpenuhi bagi masyarakat.
f. GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN; pintu keluar masuk untuk distribusi barang dan jasa keseluruh Kalimantan, mulai dari pusat produksi, pengolahan, pergudangan, dan pengiriman ke konsumen.

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Misi 1: Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia
b. Misi 2: Pembangunan Infrastruktur yang Handal
c. Misi 3: Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah
d. Misi 4: Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim
e. Misi 5: Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah & Cepat

2.3.2.4. Telaahan Isu/Kebijakan Kabupaten Tabalong

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2042. Dokumen ini menjadi pedoman penataan ruang selama 20 tahun kedepan, termasuk dalam hal perencanaan pembangunan daerah. RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2023-2042 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045.

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk **Mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai Penyangga Rencana Ibukota Negara dengan Pengembangan Pertanian, Agribisnis, Industri, Pariwisata, Penghasil Energi untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Berkelanjutan**. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang kabupaten, terdiri atas:

1. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah;

2. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten;
3. perwujudan pengembangan kawasan yang mendukung berkembangnya agribisnis;
4. pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional;
6. perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah;
7. pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan;
8. pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral;
9. pengembangan industri besar, menengah dan kecil;
10. pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi;
11. pengembangan dan penataan kawasan permukiman; dan
12. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang, ditetapkan strategi penataan ruang wilayah. Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah kabupaten yang mendukung kelancaran kegiatan sosial ekonomi dan pengembangan potensi daerah terdiri atas:

1. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya;
2. mengembangkan infrastruktur PKL, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lingkungan;
3. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada;
4. mengendalikan perkembangan kawasan pertumbuhan yang memiliki resiko bencana;
5. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi;
6. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
7. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
8. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana seperti sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan limbah B3, sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem drainase.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi yang mendukung pengembangan kawasan strategis kabupaten terdiri atas:

1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
2. meningkatkan manajemen transportasi darat; dan
3. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi serta kualitas pelayanan transportasi sesuai dengan karakteristik wilayah dan di luar wilayah risiko bencana.

Strategi perwujudan pengembangan kawasan yang

mendukung berkembangnya agribisnis terdiri atas:

1. mengembangkan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar;
2. menata dan mengembangkan kawasan dan sentra produksi secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung;
3. mengembangkan konektivitas dan infrastruktur;
4. mengembangkan usaha dan investasi;
5. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia;
6. meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan dan teknologi;
7. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;
8. mengendalikan mutu dan keamanan produk;
9. menguatkan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani; dan
10. memperkuat pengawasan pemanfaatan kegiatan peternakan, perikanan, perkebunan dan pertanian baik pertanian tanaman pangan dan hortikultura.

Strategi pemantapan kawasan lindung yang ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup serta kelestarian pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

1. melestarikan dan meningkatkan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam;

2. menetapkan kawasan berfungsi lindung dalam satu wilayah kabupaten yang disesuaikan dengan kondisi ekosistemnya;
3. mengelola secara terpadu dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan secara ketat;
4. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
5. membatasi kegiatan budidaya baik yang sudah ada maupun yang baru dalam kawasan lindung;
6. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
7. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
8. membatasi kegiatan budidaya dalam kawasan cagar budaya, kecuali kegiatan yang berhubungan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada;
9. menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung dan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung;
10. memindahkan kegiatan penduduk yang mengganggu secara bertahap keluar kawasan lindung;
11. meningkatkan dan menambah bangunan pelindung tebing sungai maupun penanaman/penghijauan dan pengelolaan di hulu dan sepanjang DAS;
12. memberi perizinan kawasan hutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
13. mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di kawasan perkotaan.

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan

dalam pengembangan perekonomian kabupaten yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian regional dan nasional terdiri atas:

1. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budidaya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
2. menciptakan iklim investasi yang kondusif;
3. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
4. mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
5. mengintensifkan promosi peluang investasi; dan
6. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

Strategi perlindungan terhadap Kawasan Pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan wilayah terdiri atas:

1. menetapkan Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan pada lahan pertanian dengan teknis;
2. mengembangkan dan meningkatkan fungsi jaringan infrastruktur untuk pengairan pertanian pangan;
3. membangun waduk dan irigasi pertanian;
4. mengoptimalkan kualitas hasil panen setiap komoditas yang ada;
5. mengembangkan kualitas hasil produksi pertanian untuk meningkatkan tingkat ekspor ke luar daerah; dan
6. melindungi keberadaan daerah fungsional irigasi.

Strategi pengembangan kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan untuk mendukung kegiatan ekonomi berkelanjutan terdiri atas:

1. mengembangkan kawasan peternakan, perikanan dan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;

2. memperkuat pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan secara terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat;
3. melakukan studi kelayakan dan kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap kegiatan perkebunan skala besar;
4. meningkatkan infrastruktur kegiatan peternakan, perikanan dan perkebunan;
5. mengembangkan industri pengolahan hasil ternak, perikanan dan perkebunan;
6. mendorong terbentuknya perusahaan pembibitan dan pakan ternak dan ikan untuk menghindari ketergantungan dari daerah luar; dan
7. melakukan pembinaan terhadap peternak dan budidaya ikan secara terpadu.

Strategi pemantapan dan penetapan kawasan pertambangan baik pertambangan minyak dan gas bumi serta pertambangan batubara dan mineral terdiri atas:

1. memetakan wilayah pertambangan mineral logam dan non logam serta batubara;
2. menetapkan wilayah pertambangan batuan;
3. mengelola dan memanfaatkan kawasan pertambangan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelestarian sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta penanganan pasca tambang;
4. meningkatkan peran serta dan keterlibatan daerah Kabupaten dalam perizinan, pengelolaan sesuai dengan kewenangan kabupaten;
5. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak; dan
6. memberikan rekomendasi pembatasan kegiatan pertambangan yang melewati daya dukung dan daya tampung lingkungan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Strategi pengembangan industri besar, menengah dan kecil terdiri atas:

1. mewujudkan keterpaduan kawasan industri besar dan menengah dengan akses transportasi;
2. mengembangkan industri berbasis sumberdaya lokal;
3. mengembangkan pasar industri kecil;
4. mengembangkan kawasan besar, menengah dan kecil berbasis daya dukung dan daya tampung;
5. melaksanakan studi kelayakan dan kajian kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan untuk setiap setiap kegiatan industri; dan
6. meningkatkan pengawasan pada wilayah yang terkena dampak.

Strategi pengembangan kebudayaan dan pariwisata yang mendukung aktivitas ekonomi terdiri atas:

1. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata;
2. melestarikan dan melindungi kebudayaan yang sudah ada melalui kegiatan – kegiatan kebudayaan;
3. mengembangkan produk pariwisata yang bertumpu pada kebudayaan, peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing;
4. meningkatkan penyelenggaraan promosi objek tujuan wisata;
5. meningkatkan dan mengembangkan objek wisata alam, budaya dan buatan;
6. mengembangkan pusat-pusat dan jaringan informasi sebagai promosi pariwisata; dan
7. meningkatkan dan mengembangkan sistem transportasi untuk mendukung kegiatan pariwisata.

Strategi pengembangan dan penataan kawasan permukiman terdiri atas:

1. menata kawasan permukiman padat di pusat kota menjadi kawasan permukiman sehat, nyaman dan layak huni;
2. peremajaan kawasan permukiman kumuh dan permukiman tepian sungai seta daerah rawan bencana;
3. menyusun peraturan mengenai tata bangunan dan lingkungan dalam kawasan permukiman;
4. mengembangkan ruang terbuka hijau; dan
5. mengembangkan permukiman baru diarahkan untuk memanfaatkan dan menghargai bentukan alam, seperti: kontur, topografi, geologi, vegetasi, rawan bencana dan lain-lain.

Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:

1. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
2. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
3. mengembangkan kawasan lindung dan/atau budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya terbangun;
4. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
5. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan negara.

Kawasan strategis di Kabupaten Tabalong terdiri atas:

1. Kawasan Strategis Provinsi

   Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas:

   a. Kawasan Rawa Batang Banyu yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

b. Kawasan Pegunungan Meratus yang merupakan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan Strategis Kabupaten terdiri atas:

a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
    1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas:
        a) kawasan perkotaan Tanjung di Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Tanta; dan
        b) Kawasan Peruntukan Industri Seradang di Kecamatan Haruai dan Kecamatan Upau.
    2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa kawasan minyak dan gas bumi di Kecamatan Tanjung, Murung Pudak dan Kecamatan Tanta.
    3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan Hulu Sungai Tabalong, terdiri atas:
        a) Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kiwa Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Bintang Ara dan Kecamatan Muara Uya; dan
        b) Kawasan sub daerah aliran sungai Tabalong Kanan Bagian Hulu Sungai Tabalong di Kecamatan Jaro dan Kecamatan Muara Uya.

B. Telaahan RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045

Dengan berakhirnya RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong telah menyusun RPJPD Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045.

Isu strategis dalam RPJPD Kabupaten Tabalong, meliputi:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
2. Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Berorientasi Kerakyatan
3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan
4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari dan Berkelanjutan
5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mendukung Perekonomian

Visi RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045, yaitu: **"TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN".** Visi ini adalah keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang semakin baik, maju, dan berdaya saing tinggi. Kemajuan yang dicapai membawa Kabupaten Tabalong menjadi daerah yang berdaya ungkit tinggi bagi keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan terutama dikaitkan dengan posisi sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan dan daerah yang berdampingan dengan IKN.

Dalam mewujudkan visi, ditetapkan 8 (delapan) misi RPJPD Kabupaten Tabalong 2025-2045, meliputi:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

4. Mewujudkan Daerah yang Tangguh dan Kondusif.
5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan dan Berketahanan Bencana.
6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata.
7. Mewujudkan Prasarana dan Sarana yang Merata dan Berkualitas.
8. Mewujudkan Pembangunan yang Berkesinambungan.

C. Telaahan KLHS RPJMD Tahun 2025-2029

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan salah satu acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tabalong, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan sebagai upaya pencapaian keseimbangan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup, sehingga dapat berfungsi secara optimal sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Tabalong. KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terdiri dari Kelompok kerja (Pokja) KLHS RPJMD, Akademisi, Camat, LSM dan para pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan telaahan terhadap KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, dapat dijabarkan secara rinci hal-hal sebagai berikut:

1. KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
2. Sistematika Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

07 Tahun 2018 dan kaidah-kaidah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016;

3. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menunjukkan bahwa terdapat 177 indikator TPB yang dirincikan sebagai berikut:
   a) indikator dengan kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) indikator;
   b) indikator dengan kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB) sebanyak 46 (empat puluh enam) indikator;
   c) indikator dengan kategori belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB) sebanyak 2 (dua) indikator; dan
   d) indikator dengan kategori tidak atau belum ada data (NIA) sebanyak 5 (lima) indikator.
4. ldentifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 telah dilakukan berdasarkan hasil sintesis isu antara isu-isu strategis lingkungan hidup, isu-isu capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), isu,RPPLH Kabupaten Tabalong Tahun 2018, isu-isu strategis kerangka kebijakan terkait yaitu KLHS RTRW Kabupaten Tabalong Tahun 2020, KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024, KLHS RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045, RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029.
5. Berdasarkan hasil identifikasi, lsu Pembangunan Berkelanjutan Strategis di Kabupaten Tabalong antara lain:
   a. Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM);
   b. Ekonomi Tidak Merata dan Kurang lnovasi;
   c. Kerusakan Lingkungan dan Risiko Bencana;
   d. Kota Tidak Berkelanjutan;
   e. Kurangnya Sinergi dan Kolaborasi; dan
   f. Belum optimalnya pengelolaan sampah.

6. Analisis capaian TPB terhadap kondisi lingkungan hidup telah dilakukan sesuai ketentuan. Dalam melakukan capaian TPB pada dasamya telah dilakukan berbagai kajian sebagai berikut:
   (1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:
      a) Ambang batas daya dukung lahan pangan di Kabupaten Tabalong mengalami penurunan. Pada tahun 2023 jumlah produksi padi mencapai 162.752 ton, jumlah penduduk 262.631 jiwa serta nilai DDL pangan 3,14 pada status surplus, sedangkan pada tahun 2042 jumlah produksi padi sebanyak 143.222 ton, jumlah penduduk 289.294 jiwa serta nilai DDL pangan 2,5 pada status surplus;
      b) Daya dukung dan daya tampung air menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 Tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional, bahwa Kabupaten Tabalong sebesar 98,06% belum melampaui dan 1,94% terlampaui;
      c) Berdasarkan hasil analisis Tahun 2024, Ketersediaan air tahun 2023 di Kabupaten Tabalong sebesar 59.899.670.569 m3/tahun dengan kebutuhan air mencapai 982.803.971 m3/tahun dengan status aman, diproyeksikan pada tahun 2029 ketersediaan air 59.899.670.569 m3/tahun dengan kebutuhan air 1.205.878.633 m3/tahun dengan status aman. Walaupun demikian, daya dukung air mengalami penurunan dari tahun ke tahun;
      d) Berdasarkan hasil analisis Tahun 2024, Daya dukung lahan pemukiman mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kabupaten Tabalong memiliki luas lahan eksisting pemukiman dengan luas 42.607 .162 m2 dengan jumlah penduduk 262.631 jiwa dan nilai DDPm 1,62 pada status

mampu. Diproyeksikan pada tahun 2029 luas lahan yang diperlukan 42.607.163 m2 dengan jumlah penduduk 289.294 jiwa dan nilai DDPm 1,49 pada status mampu.

(2) Dampak dan risiko lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:

a) Berdasarkan data lnaRISK BNPB Tahun 2023, sebaran potensi bencana banjir di Kabupaten Tabalong tersebar disemua kecamatan dengan luasan 141.315,43 Ha yang didominasi kategori potensi bencana sedang dan rendah;

b) Berdasarkan data lnaRISK BNPB Tahun 2023, sebaran potensi bencana banjir bandang di Kabupaten Tabalong tersebar di tiga kecamatan dengan total luasan 2.398,72 Ha yang didominasi kategori potensi bencana tinggi dan sedang;

c) Berdasarkan data lnaRISK BNPB Tahun 2023, sebaran potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tabalong tersebar dengan total luasan 222.380,82 Ha yang didominasi kategori potensi bencana sedang;

d) Berdasarkan data lnaRISK BNPB Tahun 2023, sebaran potensi bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Tabalong tersebar dengan total luasan 203.362, 14 Ha yang didominasi kategori potensi bencana sedang;

e) Berdasarkan data lnaRISK BNPB Tahun 2023, sebaran potensi bencana kekeringan di Kabupaten Tabalong tersebar dengan total luasan 345.097,75 Ha yang didominasi kategori potensi bencana sedang dan tinggi;

f) Berdasarkan data lnaRISK BNPB Tahun 2023, sebaran potensi bencana tanah longsor di Kabupaten Tabalong tersebar di delapan kecamatan dengan total luasan 97.989,92 Ha yang didominasi kategori potensi bencana tinggi;

g) Berdasarkan data KLHK Tahun 2022, luas lahan kritis di Kabupaten Tabalong sangat kritis seluas 15.767,13 Ha

(4,55%), kritis seluas 49.336,61 Ha (14,23%), agak kritis seluas 123.310,31 Ha (35,57%), Potensial kritis seluas 67.085,86 Ha (19,35%), dan tidak kritis 91.213,70 Ha (26,31%); dan

h) Berdasarkan data Sistem lnformasi Pengelolaan Sampah Nasional, total timbulan sampah tahun 2024 sebesar43.092,79 ton/tahun, dengan timbulan sampah domestik sebesar 0,552 kg/orang/hari dan timbulan sampah non domestik 0, 122 kg/orang/hari.

(3) Kinerja jasa ekosistem dianalisis berdasarkan Materi Teknis RPPLH Provinsi Kalimatan Selatan Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut:

a) Jasa lingkungan penyedia pangan untuk kategori sangat tinggi 2,86%, tinggi 75,77%, sedang 16,10%, rendah 5,21% dan sangat rendah 0,06%;

b) Jasa lingkungan Penyedia Air Bersih untuk kategori sangat tinggi 0,43%, tinggi 67 ,34%, sedang 25,56%, rendah 6,56% dan sangat rendah 0, 11%;

c) Jasa lingkungan Penyedia Serat untuk kategori tinggi 77,39%, sedang 13,95%, rendah 8,24% dan sangat rendah 0,42%;

d) Jasa lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik untuk kategori sangat tinggi 30,75%, tinggi 35,32%, sedang 2,62%, rendah 29,16% dan sangat rendah 2, 15%;

e) Jasa lingkungan Pengaturan Kualitas Udara untuk kategori sangat tinggi 57,99%, tinggi 18,55%, sedang 15,33%, rendah 7,87% dan sangat rendah 0,27%;

f) Jasa lingkungan Pengaturan lklim untuk kategori sangat tinggi 57,82%, tinggi 22,33%, sedang 9,05%, rendah 10,05% dan sangat rendah 0,76%;

g) Jasa lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana untuk kategori sangat tinggi 55,22%, tinggi 25,86%, sedang 11,03%, rendah 5, 13% dan sangat rendah 2,75%;
h) Jasa lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir untuk kategori sangat tinggi 58,90%, tinggi 5,05%, sedang 25,03%, rendah 11,01%, dan sangat rendah 0,01%;
i) Jasa lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah untuk kategori tinggi 49,01%, sedang 30,32%, rendah 12,72% dan sangat rendah 7,96%;
j) Jasa lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami untuk kategori sangat tinggi 56,55%, tinggi 8,36%, sedang 22,66%, rendah 7,34% dan sangat rendah 5,08%;
k) Jasa lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama untuk kategori sangat tinggi 38,98%, tinggi 22,47%, sedang 10,45%, rendah 23,24% dan sangat rendah 4,86%;
l) Jasa lingkungan Pendukung Biodiversitas untuk kategori sangat tinggi 59,40%, tinggi 7,47%, sedang 5,38%, rendah 26,65% dan sangat rendah 1,10%;
m) Jasa lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah untuk kategori sangattinggi 25,66%, tinggi 32,64%, sedang 26,65%, rendah 8,77% dan sangat rendah 7 ,29%;
n) Jasa lingkungan Produksi Primer untuk kategori sangat tinggi 58,47%, tinggi 77,52%, sedang 6,13%, rendah 20,82% dan sangat rendah 7,06%;
o) Jasa lingkungan Pendukung Siklus Hara untuk kategori sangat tinggi 56,47%, tinggi 6,81%, sedang 4,33%, rendah 25,34% dan sangat rendah 7,05%;
p) Jasa lingkungan Budaya Estetika untuk kategori sangat tinggi 7,78%, tinggi 70,38%, sedang 14,60%, rendah 3,84% dan sangat rendah 3,39%;

q) Jasa lingkungan Budaya Rekreasi untuk kategori sangat tinggi 0,71%, tinggi 43,21%, sedang 44,43%, rendah 7,28% dan sangat rendah 4,37%;

r) Jasa lingkungan Warisan Budaya untuk kategori sangat tinggi 0,53%, tinggi 58,66%, sedang 21,40%, rendah 17, 13% dan sangat rendah 2,28%.

(4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dengan hasil sebagai berikut:

a) Terdapat kawasan pertanian di Kabupaten Tabalong yang meliputi kawasan budidaya pertanian lahan basah dengan luasan 18.674 Ha dan kawasan budidaya pertanian lahan kering dengan luasan kurang lebiuh 3.914 Ha;

b) Terdapat kawasan perikanan di Kabupaten Tabalong yanag tersebar di lima Kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung, Kecamatan Banua Lawas, Kecamatan Jaro, Kecamatan Pugaan, dan Kecamatan Kelua;

c) Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, di Kabupaten Tabalong terdapat lzin Usaha Pertambangan (IUP) denqan luasan 49.978,2 Ha;

d) Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, di Kabupaten Tabalong terdapat lzin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dengan luasan 49.978,2 Ha;

e) Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023, di Kabupaten Tabalong terdapat lzin Usaha Pertambangan (IUP) batuan bukan logam dengan luasan 255,9 Ha;

f) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6642 tahun 2024 tentang Peta lndikatif dan Areal Perhutanan Sosial (Revisi IX), terdapat sebaran

perhutanan sosial di Kabupaten Tabalong dengan total luasan 11.127,79 Ha yang terbagi menjadi beberapa kriteria terdiri dari Perhutanan Kemasyarakatan (PKK) dengan luas 1.972 Ha, Pelepasan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) dengan luas 4.936 Ha, Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) dengan luas 2.876 Ha, dan Persetujuan Pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (PPHTR) dengan luas 1.343,79 Ha.

(5) Tingkat kerentanan dan adaptasi terhadap perubahan iklim dengan hasil sebagai berikut:

a) Berdasarkan data Sistem lnformasi Data lndeks Kerentanan (SIDIK) untuk wilayah Tabalong nilai lndeks Keterpaparan dan Sensitivitas (IKS) 0,45, parameter yang rendah adalah tingkat kemiskinan berada dinilai 0,1, fasilitas jamban dan topografi desa dengan nilai 0,3. Untuk nilai lndeks Kapasitas Adaptif (IKA) 0,57, parameter paling rendah adalah lingkungan dan fasilitas kesehatan dengan nilai 0,2;

b) Berdasarkan Peta Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, bahwa terdapat 18 jenis tutupan lahan di Kabupaten Tabalong dengan total luasan 489.030 Ha. Tutupan lahan paling besar adalah Hutan lahan kering sekunder dengan luas 133.337 ,98 Ha (38,46%) dan yang paling kecil adalah bandara/pelabuhan dengan luas 57,48 Ha (0,02%);

c) Berdasarkan Peta lndikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut (PIPPIB) Tahun 2023 Revisi XIV, Kabupaten Tabalong terdapat PIPPIB dengan total luasan 76.970,83 Ha yang meliputi moratorium gambut dengan luas

865,62 Ha dan moratorium kawasan hutan dengan luas 76.105,21 Ha;

d) Berdasarkan data Peta FOLU Net Sink Tahun 2024, terdapat arahan FOLU di Kabupaten Tabalong dengan total luasan 181.566,73 Ha yang tersebar di sembilan kecamatan;

e) Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut Nasional, terdapat wilayah KHG di Kabupaten Tabalong tepatnya pada Kecamatan Banua Lawas dengan luasan 12.383,84 Ha; dan

(6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati dengan hasil sebagai berikut:

a) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1240/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong terdapat kawasan hutan seluas 346.713,62 Ha yang terdiri dari Kawasan Hutan Lindung (HL) dengan luas 75.645,88 Ha (21,82%), Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 52.778,74 Ha (15,22%), Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dengan luas 90.067,71 Ha (25,98%), Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) dengan luas 3.580,73 Ha (1,03%), dan Areal Penggunaan Lain (APL) dengan luas 124.640,55 Ha (35,95%);

b) Berdasarkan Profit Keanekaragaman hayati di Kabupaten Tabalong Tahun 2021, bahwa di Kabupaten Tabalong terdapat kenakeragaman jenis fauna yang ditemukan berupa fauna akuatik Sungai Hanyar sebanyak 29 spesies, fauna akuatik Sungai Tabalong sebanyak 25 spesies, fauna akuatik Rawa Baruh sebanyak 61 spesies, fauna akuatik Danau

Undan sebanyak 24 spesies, fauna terrestrial sebanyak 84 spesies aves, 38 spesies mamalia, 12 spesies reptil dan amfibi.

(7) Alternatif Skenario dan Rekomendasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan 2 (dua) alternatif skenario, yaitu alternatif skenario tanpa upaya tambahan dan alternatif skenario dengan upaya tambahan. Alternatif Skenario dan Rekomendasi yang dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Alternatif Skenario Tanpa Upaya Tambahan

a) Alternatif skenario tanpa upaya tambahan dilakukan terhadap indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS) dan yang berdampak terhadap daya dukung dan daya tampung daerah serta isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan

b) Terdapat124 indikator TPB yang dilakukan alternatif skenario tanpa upaya tambahan.

c) Rekomendasi strategi-strategi untuk indikator TPB yang telah mencapai target nasional antara lain:

- Meningkatnya Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan;
- Meningkatnya Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
- Meningkatnya Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas;
- Menurunnya jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan;

- Meningkatnya Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan;
- Meningkatnya Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin;
- Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Ml/sederajat Persentase penduduk umur 017 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran;
- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial;
- Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial;
- Menurunnya lndeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi;
- Terlaksananya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah;
- Meningkatnya pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah;
- Menurunnya Koefisien Gini;
- Menurunnya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur;
- Menurunnya jumlah desa tertinggal;
- Meningkatnya jumlah Desa Mandiri;
- Menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah 50% dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas;

- Menurunnya Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM lnternasional;
- Meningkatnya proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan;
- Terpenuhinya Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil;
- Terdatanya Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan;
- Menurunnya Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB;
- Meningkatnya Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001;
- Meningkatnya Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister;
- Terpenuhinya Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah;
- Terpenuhinya Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- Menurunnya jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir;
- Menurunnya Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk;
- Menurunnya Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir;
- Menurunnya Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir;
- Menurunnya Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan;

- Meningkatnya Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui;
- Meningkatnya persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
- Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai lndeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
- Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
- Meningkatnya persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- Meningkatnya persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah;
- Menurunnya jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional;
- Meningkatnya total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.
- Meningkatnya proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.
- Terpenuhinya jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Sadan Usaha (KPBU);
- Meningkatnya persentase konsumen Sadan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik;

- Meningkatnya persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional;
- Meningkatnya jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem lnformasi Rujukan Statistik (SIRuSa);
- Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register);
- Meningkatnya jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website;
- Meningkatnya persentase konsumen yang puas terhadap akses data Sadan Pusat Statistik (BPS);
- Meningkatnya proporsi penduduk terlayani mobile broadband;
- Menurunnya prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment);
- Menurunnya prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan;
- Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari;
- Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita;
- Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil;
- Meningkatnya persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif;
- Menurunnya Angka Kematian lbu (AKI);
- Meningkatnya proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih;

- Meningkatnya persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan;
- Menurunnya Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup;
- Menurunnya Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup;
- Menurunnya angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hid up;
- Meningkatnya persentase kabupaten/kota · yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi;
- Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa;
- Menurunnya insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk;
- Menurunnya kejadian Malaria per 1000 orang;
- Meningkatnya jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta);
- Menurunnya persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun;
- Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi;
- Menurunnya prevalensi obesitas pada penduduk umur ≤18 tahun;
- Menurunnya Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri;
- Meningkatnya proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern;

- Meningkatnya Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin;
- Menurunnya Total Fertility Rate (TFR);
- Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan;
- Meningkatnya jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk;
- Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- Menurunnya proporsi kematian akibat keracunan;
- Menurunnya persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun;
- Meningkatnya persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas;
- Meningkatnya kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan;
- Meningkatnya proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4 (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika;
- Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B;
- Meningkatnya Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun;
- Meningkatnya proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
- Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk umur ≤15 tahun;
- Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun;

- Meningkatnya proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH);
- Meningkatnya persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik;
- Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan;
- Menurunnya proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir;
- Meningkatnya persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif;
- Meningkatnya Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun;
- Meningkatnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah;
- Meningkatnya proporsi perempuan yang berada di posisi managerial;
- Menurunnya proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi;
- Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam;

- Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau;
- Meningkatnya proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan;
- Meningkatnya proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air;
- Meningkatnya persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak;
- Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
- Meningkatnya kualitas air sungai sebagai sumber air baku;
- Terpenuhinya lnsentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri;
- Meningkatnya PDB per kapita;
- Meningkatnya Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa;
- Terpenuhinya Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum);
- Meningkatnya proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.
- Meningkatnya laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun;
- Meningkatnya proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin;

- Meningkatnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian;
- Meningkatnya persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan;
- Meningkatnya upah rata-rata per jam pekerja:
- Menurunnya tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur;
- Menurunnya tingkat setengah pengangguran;
- Meningkatnya persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET);
- Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara;
- Meningkatnya jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja;
- Meningkatnya proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur;
- Meningkatnya proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB;
- Meningkatnya proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam Proporsi individu yang menggunakan internet.

(2) Alternatif Skenario Dengan Upaya Tambahan

a) Alternatif skenario dengan upaya tambahan dilakukan terhadap indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB), indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target yang sudah ditetapkan (BB) dan Tidak atau belum ada data (NA) yang berdampak terhadap daya dukung dan daya tampung daerah serta isu strategis pembang unan berkelanjutan;

b) Terdapat 53 indikator yang terdistribusi pada TPB yang dilakukan alternatif skenario dengan upaya tambahan.

(3) Secara singkat, alternatif skenario dan rekomendasi yang dihasilkan sekaligus menjawab isu pembangunan berkelanjutan strategis KLHS RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 dijabarkan dalam bentuk pilihan program dan kegiatan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah:

Tabel 2.216
Kerusakan Lingkungan dan Risiko Bencana

1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.05.03.2.01	Pelayanan lnformasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
1.06.062.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

Tabel 2.217
Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah

Tabel 2.218
Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM)

1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan lnfrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.02	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten /Kota
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.04	Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam

	Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan, Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.02	Pemberdayaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Tabel 2.219
Ekonomi Tidak Merata dan Kurang Inovasi

1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
1.03.07.2.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
1.03.07.2.02	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui penberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2.07.02.2.01	Penyusurnan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3.26.02.2.05	Penetapan Rencana Induk Pariwisata di Kabupaten/Kota
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 2.220
Kurangnya Sinergi dan Kolaborasi

2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 2.221
Kota Tidak Berkelanjutan

X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3.26.02.2.05	Penetapan Rencana Induk Pariwisata di Kabupaten/Kota
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

D. Penetapan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tabalong 2025-2029

Isu Strategis RPJMD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 dirumuskan dengan memedomani RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan RTRW Kabupaten Tabalong, dan memperhatikan kebijakan provinsi dan RPJMN, serta KLHS RPJMD. Selain itu rumusan isu strategis juga memertimbangkan potensi dan permasalahan pembangunan

kabupaten.

Berdasarkan hasil analisis, maka diidentifikasi isu strategis RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sebagian besar merupakan isu strategis RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045, dengan beberapa penambahan isu aktual, meliputi:

1. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja**

Peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas dalam pembangunan daerah sebagai upaya menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang lebih stabil, inklusif, serta berkelanjutan. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari tingkat pendapatan, tetapi juga dari kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, mengakses layanan sosial yang berkualitas, serta mendapatkan peluang yang setara dalam dunia kerja. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, tetapi masih terdapat tantangan yang menghambat pencapaian hasil yang optimal.

Akses terhadap sumber daya ekonomi belum merata, menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dijalankan melalui bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat, namun efektivitasnya belum sepenuhnya optimal. Beberapa kelompok masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam meningkatkan taraf hidup akibat minimnya akses terhadap modal usaha, teknologi, dan pasar. Selain itu, keterbatasan sumber daya yang tersedia menyebabkan program yang dijalankan belum mampu menciptakan perubahan struktural yang berkelanjutan.

Layanan kesejahteraan sosial memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Aksesibilitas terhadap layanan masih menjadi kendala, baik dari aspek cakupan maupun kualitas. Di beberapa

wilayah, infrastruktur layanan sosial masih terbatas, sementara sinergi antarlembaga dalam penyediaan layanan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada ketidakmerataan perlindungan sosial, yang menyebabkan sebagian masyarakat belum mendapatkan manfaat secara maksimal.

Penciptaan lingkungan kerja yang lebih kondusif menjadi faktor kunci dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Ketersediaan lapangan kerja yang layak masih menjadi tantangan akibat terbatasnya investasi dan pengembangan sektor usaha produktif. Pertumbuhan ekonomi yang belum merata juga berpengaruh pada daya serap tenaga kerja, terutama bagi kelompok usia produktif. Di sisi lain, dinamika pasar kerja yang terus berkembang menuntut peningkatan kualitas tenaga kerja agar lebih berdaya saing. Kompetensi tenaga kerja menjadi faktor penting dalam menentukan daya serap di dunia industri, tetapi kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan dunia usaha masih cukup tinggi.

Percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan strategi yang lebih komprehensif melalui optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penguatan ekosistem ketenagakerjaan. Perluasan kesempatan kerja menjadi bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sementara peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi aspek fundamental dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja. Penguatan sistem perlindungan sosial juga diperlukan agar masyarakat yang berada dalam kondisi rentan dapat lebih terlindungi dan memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidup. Sinergi kebijakan antara berbagai pemangku kepentingan diperlukan dalam memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar mampu menjawab tantangan kesejahteraan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing untuk Mendukung Kemajuan Daerah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing menjadi kunci dalam mempercepat kemajuan daerah. Daya saing suatu wilayah sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakatnya dalam beradaptasi terhadap perubahan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki kesehatan yang baik sebagai modal dasar produktivitas. Keberhasilan pembangunan di berbagai sektor bergantung pada kesiapan individu dalam menghadapi tantangan global dan dinamika sosial yang terus berkembang.

Ketersediaan akses pendidikan yang memadai menjadi faktor utama dalam membangun SDM berkualitas. Tingkat literasi yang tinggi mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memahami informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, kualitas layanan kesehatan yang optimal turut berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas individu. Upaya peningkatan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak-haknya berkontribusi pada pembangunan generasi masa depan yang lebih berkualitas. Pemenuhan hak anak serta penguatan pola asuh berbasis keluarga menjadi aspek penting dalam membangun individu yang sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Pembangunan keluarga yang sejahtera juga menjadi bagian penting dalam memperkuat struktur sosial yang mendukung kemajuan daerah. Pemberdayaan kepemudaan serta peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan berperan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan kompetitif. Kesetaraan dan keadilan gender semakin relevan dalam menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh masyarakat untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Upaya penguatan kualitas SDM tidak terlepas dari kebutuhan akan sistem pendidikan yang responsif terhadap tuntutan dunia kerja serta penguatan kebijakan yang mendorong penciptaan lingkungan sosial yang kondusif bagi pertumbuhan individu dan komunitas. Program pelatihan dan peningkatan keterampilan berbasis kebutuhan industri menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing. Selain itu, pembangunan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal turut memperkuat identitas daerah dalam menghadapi tantangan global.

Sinergi antara kebijakan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas. Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan juga berperan dalam meningkatkan akses terhadap informasi dan mempercepat proses pembelajaran serta pengembangan keterampilan. Semua aspek ini menjadi fondasi utama dalam membangun daerah yang maju, adaptif, dan berdaya saing, sehingga mampu menghadapi tantangan serta peluang di masa depan dengan lebih baik.

3. Penguatan Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan yang Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan

Struktur ekonomi daerah mencerminkan dinamika berbagai sektor yang berkembang seiring dengan perubahan lingkungan global dan domestik. Keberlanjutan pertumbuhan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola potensi unggulan yang dimiliki serta memperkuat daya saing melalui inovasi dan efisiensi. Setiap sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian perlu dikelola secara lebih optimal agar dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi jangka panjang.

Daya tarik investasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis. Kehadiran ekosistem usaha yang kondusif, kepastian regulasi, serta kesiapan infrastruktur ekonomi berperan dalam menciptakan lingkungan yang menarik bagi pelaku usaha dan investor. Sektor industri, baik skala besar maupun industri kecil dan menengah, membutuhkan penguatan dalam aspek produktivitas, efisiensi rantai pasok, serta pemanfaatan teknologi agar lebih kompetitif dan berkontribusi terhadap nilai tambah ekonomi daerah.

Keberlanjutan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dengan stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Modernisasi sistem produksi, diversifikasi komoditas unggulan, serta peningkatan akses terhadap teknologi dan pasar menjadi kunci dalam meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi. Optimalisasi sumber daya lokal, peningkatan efisiensi usaha tani dan nelayan, serta penguatan kelembagaan petani dan nelayan menjadi langkah strategis dalam menjadikan sektor ini lebih adaptif terhadap tantangan dan perubahan iklim.

Pariwisata sebagai sektor unggulan memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jika dikelola secara berkelanjutan dan inovatif. Pengembangan destinasi wisata yang lebih berdaya saing memerlukan sinergi antara infrastruktur pendukung, promosi yang efektif, serta penguatan daya tarik berbasis budaya dan kearifan lokal.

Sektor ini juga berpeluang mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang mampu menciptakan nilai tambah serta memperluas peluang usaha bagi masyarakat lokal. Pengelolaan kawasan wisata yang berbasis keberlanjutan serta integrasi dengan ekosistem digital menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi sektor ini sebagai salah satu pilar utama ekonomi daerah. Sektor perdagangan memegang peran

sentral dalam menghubungkan produksi dengan pasar yang lebih luas. Efisiensi distribusi, akses terhadap jaringan pemasaran, serta penguatan sistem logistik menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan pertumbuhan sektor ini. Digitalisasi dalam perdagangan semakin menjadi kebutuhan untuk meningkatkan jangkauan produk lokal ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penguatan rantai pasok, peningkatan kualitas produk, serta pengembangan jejaring antar pelaku usaha menjadi langkah penting dalam mendorong daya saing sektor perdagangan daerah.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat berperan sebagai tulang punggung perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dukungan terhadap penguatan kapasitas UMKM, akses pembiayaan yang lebih inklusif, serta pendampingan dalam aspek manajerial dan pemasaran menjadi faktor penting dalam memperkuat daya tahan sektor ini. Pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan usaha, integrasi dengan ekosistem e-commerce, serta penguatan kolaborasi dengan sektor lain menjadi strategi yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Penguatan ekonomi daerah juga memerlukan strategi dalam meningkatkan nilai tambah produk unggulan melalui industrialisasi berbasis sumber daya lokal. Optimalisasi pemanfaatan potensi industri kreatif, industri pengolahan, serta industri berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan dapat menjadi langkah dalam meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sinergi antara pusat riset dan inovasi, pelaku industri, serta pemerintah menjadi faktor kunci dalam mempercepat transformasi ekonomi yang berbasis pada keunggulan lokal.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak hanya bertumpu pada aspek produksi dan distribusi, tetapi juga pada keseimbangan antara eksploitasi sumber daya dan pelestarian

lingkungan. Prinsip ekonomi hijau, penerapan teknologi ramah lingkungan, serta penguatan regulasi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam menjadi bagian dari strategi dalam memastikan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Transformasi ekonomi daerah yang berbasis pada penguatan sektor unggulan memerlukan dukungan dari berbagai elemen, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur penunjang, serta penerapan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Keberlanjutan pengembangan sektor-sektor unggulan tidak hanya menentukan daya saing daerah di tingkat nasional, tetapi juga membuka peluang integrasi dengan pasar global yang lebih kompetitif.

4. Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan yang Berkeadilan

Pembangunan yang berkeadilan tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada pemerataan infrastruktur yang mampu menjangkau seluruh wilayah dan mendukung kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi faktor krusial dalam menciptakan lingkungan yang lebih produktif, meningkatkan daya saing daerah, serta mendorong konektivitas antarwilayah secara lebih optimal. Infrastruktur yang terbangun dengan baik berperan dalam membuka aksesibilitas, memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan efisiensi dalam berbagai sektor pembangunan.

Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan sistem air bersih, memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan. Konektivitas yang baik mendorong pemerataan pembangunan ekonomi, mempercepat mobilitas penduduk, serta membuka peluang investasi yang lebih luas. Akses terhadap

layanan dasar yang lebih baik juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, menciptakan lingkungan yang lebih layak huni, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Keberlanjutan pembangunan infrastruktur juga berkaitan erat dengan perumahan dan kawasan permukiman yang tertata dengan baik. Hunian yang layak dan berkualitas bukan hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan permukiman, seperti akses jalan yang memadai, sistem drainase yang baik, serta fasilitas sanitasi yang memadai, menjadi elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan nyaman.

Sistem pertanahan yang tertata dengan baik juga menjadi faktor strategis dalam pembangunan daerah. Kepastian dalam pengelolaan lahan berkontribusi terhadap stabilitas investasi, efisiensi tata ruang, serta kepastian hukum dalam pemanfaatan lahan. Penguatan kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan pelestarian lingkungan menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Penyelenggaraan sistem transportasi yang efisien mendukung mobilitas penduduk dan distribusi logistik yang lebih lancar. Kualitas layanan transportasi publik yang baik tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi juga berperan dalam mengurangi kemacetan dan memperbaiki efisiensi transportasi. Integrasi antar moda, peningkatan infrastruktur perhubungan, serta penguatan sistem transportasi berbasis digital menjadi bagian dari strategi dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih adaptif dan inklusif.

Pemerataan pembangunan infrastruktur tidak hanya tentang memastikan ketersediaan sarana fisik, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penguatan infrastruktur berbasis keberlanjutan, inovasi dalam tata kelola

pembangunan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah. Infrastruktur yang berkualitas dan merata tidak hanya menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan daya saing daerah serta memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah

Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari efektivitas tata kelola pemerintahan serta kualitas layanan publik yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat. Pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang berorientasi pada kemajuan daerah. Kemampuan dalam mengelola administrasi kependudukan secara akurat, mengoptimalkan teknologi digital dalam penyelenggaraan layanan publik, serta mengembangkan sistem informasi yang terpadu menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola yang lebih modern dan inklusif.

Dalam konteks pembangunan daerah, peran desa sebagai entitas yang menopang perekonomian lokal semakin krusial. Penguatan daya saing desa tidak hanya bergantung pada peningkatan kapasitas masyarakat, tetapi juga pada keberlanjutan infrastruktur layanan dasar, sistem kelembagaan yang solid, serta akses terhadap inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian ekonomi. Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola desa juga membuka peluang untuk mempercepat transformasi pelayanan, menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih dinamis, serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan komunitas lokal.

Perkembangan digitalisasi menghadirkan peluang besar dalam

meningkatkan efektivitas layanan publik. Sistem pelayanan yang terintegrasi, kemudahan akses terhadap data yang valid, serta keamanan informasi yang terjamin menjadi faktor utama dalam menciptakan layanan publik yang lebih profesional dan efisien. Keandalan pengelolaan data dan informasi tidak hanya berperan dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penguatan sistem informasi berbasis digital perlu diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola dan mengamankan data secara profesional.

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang efektif ditandai dengan sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Reformasi birokrasi yang berkelanjutan menjadi landasan dalam menciptakan pemerintahan yang profesional dan responsif terhadap tuntutan zaman. Peningkatan efektivitas regulasi, optimalisasi peran riset dalam perumusan kebijakan, serta penguatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi elemen penting dalam mendukung tata kelola yang lebih inovatif.

Stabilitas dan keamanan wilayah juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan dalam mendorong pembangunan daerah. Lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi sangat bergantung pada efektivitas manajemen wilayah serta ketahanan terhadap berbagai tantangan sosial. Penguatan kapasitas dalam menjaga stabilitas daerah, membangun kepercayaan publik, serta meningkatkan daya adaptasi terhadap perubahan menjadi faktor penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Pemerintahan yang efektif dan layanan publik yang berkualitas menjadi pilar utama dalam meningkatkan daya saing daerah. Optimalisasi sistem administrasi, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam tata kelola pemerintahan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan

daerah yang lebih maju, inovatif, dan berdaya saing tinggi.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana untuk Menciptakan Daerah yang Tangguh dan Berkelanjutan

Keberlanjutan pembangunan daerah bergantung pada kualitas lingkungan hidup serta kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Lingkungan yang terjaga dengan baik menjadi faktor utama dalam menciptakan ekosistem yang sehat, produktif, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya konservasi menjadi tantangan dalam mencegah degradasi lingkungan yang semakin meluas.

Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta pencemaran menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan. Degradasi ekosistem, menurunnya kualitas air dan udara, serta berkurangnya tutupan vegetasi berdampak terhadap meningkatnya risiko bencana alam. Pengelolaan sumber daya alam yang lebih bijak serta penguatan regulasi lingkungan menjadi bagian dari strategi dalam menjaga keseimbangan ekologi.

Ancaman bencana semakin meningkat akibat perubahan iklim dan ketidakstabilan kondisi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kekeringan, serta bencana geologi lainnya memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi. Wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana memerlukan sistem mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif agar risiko dapat diminimalkan. Penguatan infrastruktur berbasis ketahanan bencana serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam manajemen risiko menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tangguh.

Keberlanjutan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan dalam menjaga keseimbangan ekologi serta ketangguhan

dalam menghadapi bencana. Peningkatan kesadaran akan pentingnya konservasi lingkungan, optimalisasi tata kelola sumber daya alam, serta penguatan sistem mitigasi dan adaptasi bencana menjadi elemen utama dalam membangun wilayah yang lebih resilien dan berkelanjutan. Integrasi kebijakan lingkungan dan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan daerah yang lebih tangguh menghadapi tantangan masa depan.

Isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 yang diuraikan di atas, ditetapkan dengan memperhatikan berbagai faktor. Perumusan isu strategis tersebut memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal sebagaimana dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 2.222
Perumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Kabupaten Tabalong memiliki berbagai potensi alam yang signifikan, baik di sektor pertambangan, perkebunan, maupun pertanian. Potensi utama dalam sektor pertambangan yaitu minyak bumi dan batu bara. Sumber daya alam ini menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Tabalong, yang memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan daerah serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.Selain	1. Perekonomian masih didominasi oleh Sektor Pertambangan dan Penggalian 2. Tingkat Kemiskinan yang Cukup Tinggi 3. Masih Cukup Tingginya Tingkat Pengangguran 4. Ketimpangan pendapatan masih perlu dikendalikan 5. Kondisi Perekonomian yang Rentan terhadap Perubahan Inflasi Daerah 6. Potensi penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas perekonomian dan perkembangan penduduk	Kesepakatan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB) paling Strategis dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai akar masalah yang disepakati pada Konsultasi Publik 1 yaitu: 1) Kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM); 2) Ekonomi Tidak Merata dan Kurang Inovasi; 3) Kerusakan Lingkungan dan Risiko Bencana; 4) Kota Tidak Berkelanjutan; 5) Kurangnya Sinergi dan Kolaborasi; dan	1. Perkembangan demografi global. Penduduk dunia menjadi 9,45 miliar dan porsi lansia meningkat (Asia 55%). 2. Geopolitik dan geoekonomi. Eskalasi persaingan antarnegara dan kemunculan kekuatan baru; serta kontribusi ekonomi negara berkembang mencapai 71%. 3. Perkembangan teknologi. Teknologi akan mengantikan sekitar 40% pekerjaan saat ini. 4. Peningkatan urbanisasi dunia. Penduduk perkotaan mencapai 65 persen; dan peranan Produk Domesti Bruto (PDB) mencapai 70%. 5. Konstelasi perdagangan global. Perdagangan global tumbuh 3,4% per tahun.	1. Transformasi Sosial: Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. 2. Transformasi Ekonomi: Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. 3. Transformasi Tata Kelola: Kelembagaan tepat fungsi	**Sosial**:- Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi - Pengendalian penyakit menular (TBC, malaria) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta peningkatan cakupan imunisasi - Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan) - Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian **Ekonomi** : - Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan Selatan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan - Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja - Percepatan Penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Banjarbaru-	1. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera 2. Pengembangan Ekonomi yang Inklusif dan Berorientasi Kerakyatan 3. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan 4. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lestari dan Berkelanjutan 5. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal yang Menyeluruh 6. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah yang Mendukung Perekonomian

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
sektor pertambangan, Kabupaten Tabalong juga memiliki potensi besar di sektor perkebunan, khususnya dalam komoditas karet. Keberadaan perkebunan karet ini didukung oleh kondisi tanah yang subur dan iklim tropis yang mendukung pertumbuhan tanaman karet secara optimal. Di sektor pertanian, Kabupaten Tabalong juga memiliki komoditas unggulan berupa buah-buahan tropis, yang dikenal akan kualitasnya yang baik.		6) Belum optimalnya pengelolaan sampah.	6. Tata kelola keuangan global. Pergeseran kebijakan fiskal, Central Bank Digital Currency (CBDB), dan Fintech. 7. Pertumbuhan kelas menengah (middle class). Jumlah middle dan upper class lebih dari 90% (8,8 miliar). 8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam. Peningkatan peran ekonomi Asia dan penduduk di Afrika mendorong persaingan memperebutkan sumber daya alam. 9. Perubahan iklim. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrem dan bencana. 10. Pemanfaatan luar angkasa (space economy). Ekonomi antariksa, kelestarian antariksa, dan	dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil. 4. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia: Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi sebagai landasan transformasi dan	Barito Kuala-Tanah Laut (Banjarbakula) - Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan Wilayah Metropolitan Banjarmasin dengan pembentukan lembaga pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah - Pengembangan transportasi perkotaan yang terpadu dan berkelanjutan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin -Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh - Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata Kelola - Penguatan interkoneksi ketenagalistrikan Barito – Mahakam dan persiapan interkoneksi transmisi Jawa Kalimantan - Pengembangan jalan, antara lain Jalan Trans Kalimantan Selatan, jalan akses mendukung simpul transportasi (Bandara Syamsuddin Noor dan Pelabuhan Penyebrangan Batulicin), peningkatan jalan daerah, penanganan daerah rawan kecelakaan, dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan - Pengembangan pelabuhan dan peningkatan layanan angkutan sungai dan penyebrangan perintis - Pengembangan kawasan Bandara Syamsudin Noor yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah sekitar (termasuk	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Beberapa jenis buah yang banyak dibudidayakan di daerah ini antara lain langsat, rambutan, cempedak, dan durian.			keamanan antariksa.	Pembangunan. 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi: Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.	aero city), serta optimalisasi dan peningkatan layanan dan prasarana Bandara Syamsir Alam, Bandara Tabalong, dan Batulicin Tata Kelola :- Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah - Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital **Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia** : - Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas **Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi** : - Pengembangan ekonomi budaya melalui penguatan tata kelola festival wisata budaya Pasar Terapung dan Tanglong bertaraf internasional - Pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya - Pengembangan irigasi di WS Cengal-Batulicin untuk meningkatkan ketahanan pangan - Peningkatan kapasitas tampungan air melalui pembangunan Bendungan Kusan, Riam Kiwa dan tampungan air serbaguna	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
					serta pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air - Reformasi pengelolaan persampahan dengan mengoptimalkan pengolahan sampah organik dan anorganik serta menerapkan kebijakan industri berbasis *Extended Producer Responsibility* (EPR) di Wilayah Metropolitan Banjarmasin, memanfaatkan teknologi pengolahan RDF plant dan teknologi tepat guna lainnya di berbagai lini industri khususnya di Kabupaten Tanah Laut, dan menerapkan konservasi TPA dan implementasi landill mining di kabupaten/kota yang memiliki kondisi kapasitas TPA telah penuh - Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman dengan sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik di Wilayah Metropolitan Banjarmasin - Integrasi pendekatan struktural dan nonstruktural dengan menerapkan *naturebased solution* untuk mereduksi banjir di Kota Banjarmasin	

Sumber: hasil analisis, 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

BAB III

VISI, MISI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

TABALONG SMART

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

3.1.1. Visi dan Misi

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan kondisi daerah yang diinginkan/terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong untuk periode 2025-2029 panduan bagi seluruh pemangku kepentingan, utamanya pemerintahan daerah Kabupaten Tabalong.

Visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Tabalong periode 2025-2029. Pernyataan visi ini juga selaras dan dalam rangka melaksanakan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tabalong sebagaimana termuat dalam RPJPD Kabupaten Tabalong yaitu "TABALONG TERDEPAN, MAJU, DAN BERKELANJUTAN". Visi RPJPD memiliki makna suatu keadaan yang ingin dicapai Kabupaten Tabalong untuk dapat mewujudkan kualitas kehidupan yang semakin baik, maju, dan berdaya saing tinggi. Kemajuan yang dicapai membawa Kabupaten Tabalong menjadi daerah yang berdaya ungkit tinggi bagi keberhasilan pembangunan di Kalimantan Selatan terutama dikaitkan dengan posisi sebagai gerbang logistik di Pulau Kalimantan dan daerah yang berdampingan dengan IKN.

Memedomani hal-hal yang diuraikan diatas, maka ditetapkan visi Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, adalah:

MENUJU TABALONG SMaRT

(SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)

Makna dari pernyataan visi tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Kabupaten Tabalong Sejahtera; Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil.

Kabupaten Tabalong Maju; Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

Kabupaten Tabalong Religius; Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan.

Kabupaten Tabalong Terdepan; Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek, baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, ***"MENUJU TABALONG SMaRT"*** adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama.

Kabupaten Tabalong memiliki letak strategis yang sangat penting di Kalimantan Selatan, terutama dalam konteks perkembangan logistik regional dan dukungan terhadap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kabupaten Tabalong memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan. Letak geografis Tabalong yang berada di perbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah menjadikannya

sebagai simpul penting dalam jaringan distribusi regional. Melalui pengembangan infrastruktur jalan nasional dan jalan provinsi yang menghubungkan jalur logistik lintas Kalimantan, Tabalong menjadi pintu masuk utama arus barang dan jasa dari dan menuju Kalimantan Selatan. Selain itu, upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam mendorong pertumbuhan kawasan industri, penguatan sektor transportasi darat, serta pengembangan fasilitas penunjang logistik seperti terminal barang dan pusat distribusi turut memperkuat fungsinya sebagai penopang utama sistem logistik regional. Dengan demikian, Tabalong tidak hanya berperan sebagai wilayah transit, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mendukung posisi Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan secara menyeluruh.

Visi pembangunan jangka menengah daerah diwujudkan melalui Misi. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

1. **Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera**

   Misi ini merupakan upaya untuk menciptakan kondisi di mana masyarakat Kabupaten Tabalong dapat hidup dengan kualitas yang baik, menikmati stabilitas ekonomi, sosial, dan budaya, serta memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar, layanan publik, dan peluang pengembangan diri. Fokus utama adalah menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kehidupan yang harmonis sesuai dengan nilai-nilai lokal yang religius dan inklusif.

   Langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu:

a) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
c) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
d) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

2. Mendorong Kemajuan Daerah

Misi ini melakukan berbagai upaya strategis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di Kabupaten Tabalong. Tujuan utama adalah menciptakan daerah yang maju, berdaya saing, dan mampu mengoptimalkan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan visi "**Menuju Tabalong SMaRT**" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah, yaitu:

a) meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal, inovasi, dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional;
b) membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
c) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari; dan
d) meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius

Misi ini merupakan upaya sistematis untuk membangun masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menerapkan ajaran keimanan dalam kehidupan sehari-hari, serta menciptakan harmoni sosial berbasis toleransi dan keberagaman. Hal ini bertujuan menjadikan religiusitas sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan daerah yang religius, yaitu:

a) menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama;
b) meningkatkan kemajuan budaya khususnya budaya lokal; dan
c) meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan anak dan pembangunan pemuda.

4. Menjadi Daerah yang Terdepan

Misi ini merupakan upaya untuk menjadikan Kabupaten Tabalong menjadi wilayah yang unggul dan inovatif untuk bersaing dalam berbagai aspek pembangunan di tingkat regional maupun nasional. Hal ini mencakup upaya terbaik dalam memberikan layanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur yang modern dan inklusif, serta daya saing ekonomi yang tinggi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dengan prinsip keberlanjutan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadi daerah yang terdepan, yaitu:

a) menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi; dan
b) berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

3.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029. Sementara itu, Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Masing-masing misi pembangunan jangka menengah diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran yang terukur, dengan memedomani visi RPJMD. Tujuan diturunkan (*cascading*) dari visi dan misi dan merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun, selanjutnya tujuan diturunkan ke Sasaran. *Cascading* kinerja tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Gambar 3.1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran strategis diindikasikan dengan indikator kinerja dan target per tahun selama 5 (lima) tahun, sebagaimana dimuat pada Tabel 3.2.

Gambar 3.1
***Cascading* Kinerja RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029**

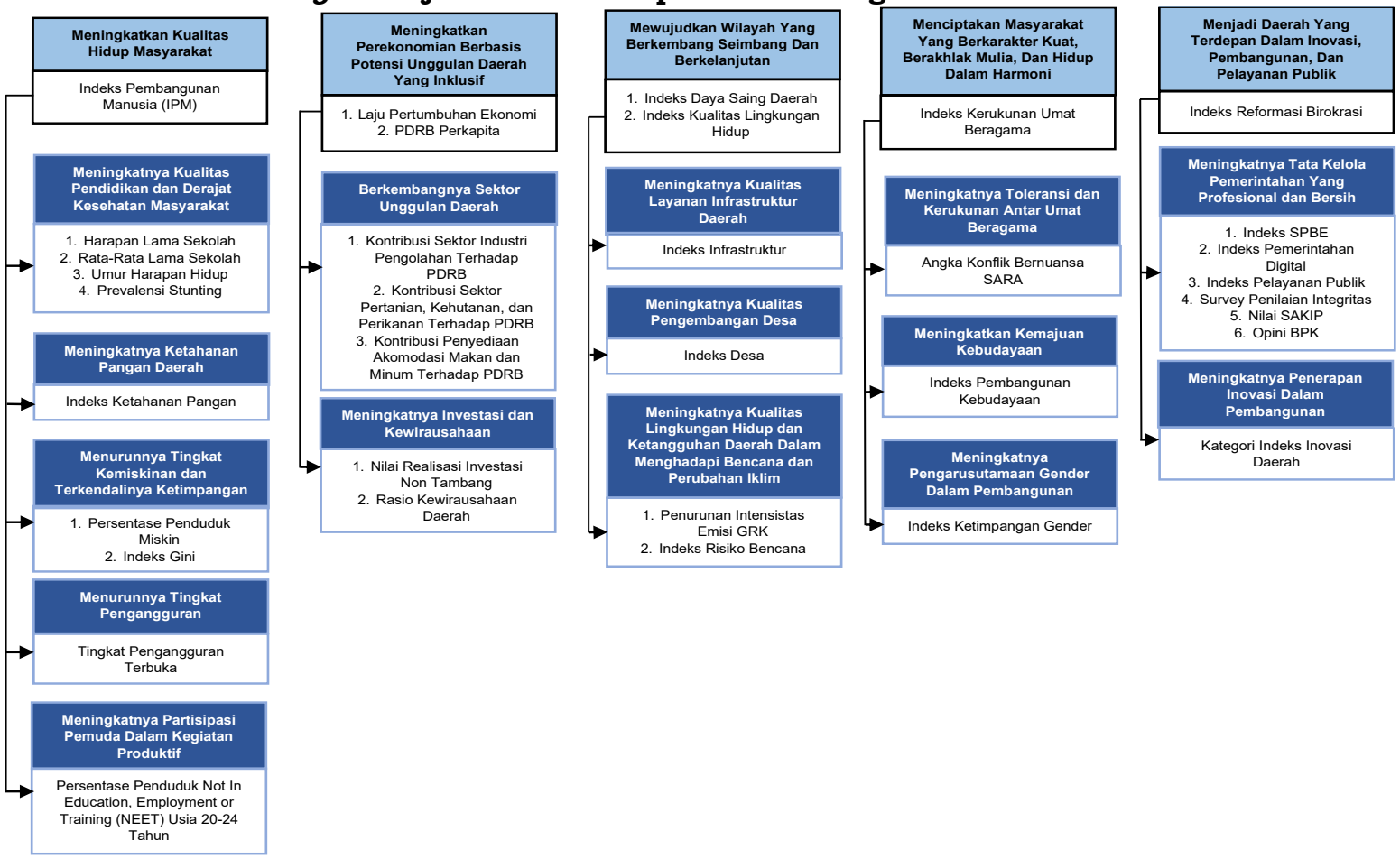

Sumber: hasil analisis, 2025

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

No	Indikator	Realisasi 2024	Target					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	5,4-5,5	5,7-6,6	5,8-7,2	6-7,8	6,2-8,1	6,4-8,4
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,64	4,48-5,44	4,74-5,24	4,20-4,73	3,87-4,19	3,48-3,87	2,97-3,47
3	Indeks Pembangunan Manusia	75,97	76,4	76,22-76,92	76,93-77,39	77,40-77,86	77,89-78,06	78,07-78,77
4	Gini Rasio	0,300	0,263-0,273	0,259-0,269	0,256-0,258	0,253-0,255	0,250-0,253	0,240-0,250
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,44	3,20-2,64	3,16-2,57	3,00-2,45	2,95-2,40	2,90-2,30	2,89-2,20
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,98	73,98	74,05	76,22	76,98	77,75	78,53

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tabalong 2025-2030

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI: MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)											
SEJAHTERA											
I	**Misi: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera**	**Meningkatkan kualitas hidup masyarakat**		**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**75,97**	**76,08-76,40**	**76,40-76,92**	**76,93-77,39**	**77,40-77,86**	**77,89-78,06**	**78,07-78,77**
			Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	a. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92	13,29	13,31	13,32	13,33	13,34	13,43
				b. Rata-Rata lama sekolah (tahun)	9,15	9,62	9,90	10,19	10,47	10,75	11,07
				c. Umur Harapan Hidup (tahun)	74,76	76,37	76,39	76,41	76,43	76,45	76,81
				d. Prevalensi Stunting (%)	23,10	22,00	21,00	20,00	19,00	17,00	15,00
			Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks ketahanan pangan	85,94	86	87	88	89	90	91
			Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan	a. Persentase penduduk miskin (%)	5,64	4,48-5,44	4,74-5,24	4,20-4,73	3,87-4,19	3,48-3,87	2,97-3,47
				b. Indeks Gini (Indeks)	0,300	0,263-0,273	0,259-0,269	0,256-0,258	0,253-0,255	0,250-0,253	0,240-0,250
			Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,44	3,20-2,64	3,16-2,57	3,00-2,45	2,95-2,40	2,90-2,30	2,89-2,20

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan produktif	Persentase penduduk *Not in Education, Employment or Training* (NEET) usia 20–24 tahun	22,07	21,00	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00
		Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Inklusif		**a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**	**4,87**	**5,4-5,5**	**5,7-6,6**	**5,8-7,2**	**6,0-7,8**	**6,2-8,1**	**6,4-8,4**
				b. PDRB perkapita (Rp. Juta)	**122,31**	**142,65**	**162,99**	**183,33**	**200,00**	**237,50**	**275,00**
			Berkembangnya sektor unggulan daerah	a. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	5,96	6,02	6,08	6,14	6,20	6,26	6,33
				b. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	7,76	7,78	7,79	7,81	7,82	7,84	7,85
				c. Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	1,42	1,47	1,53	1,60	1,66	1,72	1,78
			Meningkatnya investasi dan kewirausahaan	a. Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	606.520.463.800	636.846.486.990	668.688.811.340	702.123.251.907	772.335.577.097	849.569.134.806	934.526.048.287

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
				b. Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,76	2,03	2,16	2,28	2,40	2,53	2,65
MAJU											
II	**Misi: Mendorong Kemajuan Daerah**	**Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan**		**a. Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)**	**3,41**	**3,44**	**3,48**	**3,51**	**3,55**	**3,58**	**3,62**
				b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	**73,98**	**74,72**	**75,47**	**76,22**	**76,98**	**77,75**	**78,53**
			Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah	Indeks Infrastruktur (Indeks)	0,729	0,736	0,743	0,751	0,758	0,766	0,774
			Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa (Indeks)	N/A	81	84	86	88	91	93
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	2,36	2,31	2,16	2,02	1,87	1,68
				b. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	157,77	151,37	144,96	138,56	132,16	125,75	114,10

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
RELIGIUS											
III	**Misi: Mengembangkan Kehidupan yang Religius**	**Menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan hidup dalam harmoni**		**Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)**	**N/A**	**71**	**73**	**75**	**77**	**79**	**81**
			Meningkatnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama	Angka konflik bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0	0
			Meningkatnya kemajuan kebudayaan	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	N/A	58,89-58,91	59,67-59,75	60,46-60,58	61,24-61,42	62,02-62,25	62,80-63,09
			Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,421	0,417	0,413	0,408	0,404	0,400	0,396
TERDEPAN											
IV	**Misi: Menjadi Daerah yang Terdepan**	**Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan, dan pelayanan publik**		**Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)**	**80,76**	**80,91**	**81,06**	**81,22**	**81,37**	**81,52**	**81,68**
			Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih	a. Indeks SPBE (Indeks)	3,7	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				b. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	N/A	N/A	2,5	2,7	3	3,5	4
				c. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,49	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61
				d. Indeks Integritas	72,87	76,40	77,38	78,35	79,33	80,30	81,27
				e. Nilai SAKIP (kategori)	B	BB	BB	BB	A	A	AA
				f. Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline		Target				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan	Predikat Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber: hasil analisis, 2025

3.1.3. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2025-2029

Program prioritas ini merupakan program politik tahun 2025-2029 yang disampaikan kepada masyarakat pada saat kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Komitmen ini mencerminkan program utama yang diharapkan mampu mengkreasi lompatan kemajuan dengan mewujudkan dan mengawal lokomotif pembangunan ekonomi daerah untuk membangun Tabalong yang lebih inklusif, berdaya saing, dan berkeadilan. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta diharapkan dapat mempercepat terwujudnya visi Menuju Tabalong SMaRT.

Harapannya, pertumbuhan ekonomi bukan sekedar tinggi, melainkan juga berkelanjutan dan berkualitas. Hal ini diindikasikan dengan: 1). Pertumbuhan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, dan 2). Ketersediaan akses hasil pembangunan.

Program politik ini akan terdistribusi dan berkontribusi langsung terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi jangka menengah daerah sebagai berikut:

A. Upaya pencapaian Misi I Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu:

1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.
3) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat; dan
4) mengembangkan program-program yang mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, termasuk pemberdayaan UMKM dan pertanian.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat Tabalong yang sejahtera diperlukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya;

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.

   Peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Tabalong. Program ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti akses layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas, peningkatan mutu pendidikan, penyediaan lapangan kerja melalui pengembangan UMKM dan sektor agribisnis, serta perbaikan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sehari-hari. Selain itu, dukungan terhadap ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan komunitas lokal menjadi langkah strategis untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, mandiri, dan berdaya saing.

   Program ini bertujuan menciptakan Tabalong yang lebih sehat, terdidik, dan produktif demi masa depan yang lebih cerah, melalui pemenuhan;

   a) Akses Kesehatan: Memperluas dan meningkatkan serta membenahi kualitas layanan kesehatan pada rumah sakit dan Puskesmas, termasuk membangun dan mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan yang lebih baik di seluruh kecamatan dan desa. Program kesehatan preventif, seperti imunisasi, pemeriksaan rutin, dan edukasi kesehatan, pencegahan dan penanganan stunting.

      Upaya mewujudkan Tabalong Pasti Sehat, diantaranya dengan *Universal Health Coverage (UHC)* atau Cakupan Kesehatan Semesta mencapai 100% dan bantuan biaya bagi pendamping pasien serta layanan kesehatan langsung ke rumah untuk lansia, disabilitas dan penderita stroke ringan. Prinsip utama dari UHC adalah memberikan layanan kesehatan yang adil, berkualitas dan terjangkau bagi semua

orang, terutama dari kalangan yang kurang mampu di semua fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah (RSUD dan Puskesmas).

b) Pendidikan Berkualitas: Menyediakan akses yang merata ke pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat, termasuk meningkatkan fasilitas sekolah, kualitas guru, dan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman. Program beasiswa dan pendidikan vokasi juga diperluas untuk mendukung pengembangan keterampilan dan pendidikan lanjutan.

   Penyediaan 1.000 beasiswa bagi pemuda pemudi Tabalong bisa kuliah, memastikan tidak ada yang terhalang biaya untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

a) Pendidikan dan Pelatihan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menyediakan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Pengembangan SDM yang kompeten dan terampil adalah kunci untuk mendukung kemajuan daerah, melalui peningkatan grade Balai Latihan Kerja untuk mendukung terwujudnya 15.000 tenaga kerja terampil.

c) Program Beasiswa dan Pendidikan Vokasi: Menyediakan beasiswa untuk pendidikan lanjutan serta program pendidikan vokasi yang fokus pada keterampilan teknis yang dibutuhkan di industri-industri yang berkembang di Tabalong. Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam hal ini akan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan memberikan beasiswa bagi 1.000 orang pemuda/pemudi agar bisa melanjutkan kuliah.

d) Program Kesehatan dan Gizi: Meningkatkan program kesehatan dan gizi untuk memastikan bahwa masyarakat, terutama generasi muda, memiliki kondisi fisik dan mental

yang optimal untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

e) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Meningkatkan program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan, termasuk bantuan bagi lansia, difabel, dan keluarga kurang mampu serta jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja informal. Program ini diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi.

Meningkatkan pemberian jaminan ketenagakerjaan untuk pekerja rentan/nonformal lainnya termasuk ketua RT/RW, pelaku UMKM, kader dan tokoh agama/masyarakat serta perangkat desa dan LKD.

2. Penguatan Ekonomi Lokal

Upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi masyarakat di tingkat daerah. Fokusnya terletak pada pemberdayaan potensi lokal, seperti pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta pengembangan sektor unggulan yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Langkah ini juga mencakup peningkatan keterampilan tenaga kerja, akses pembiayaan, digitalisasi ekonomi, dan perluasan jaringan pasar, baik lokal maupun global. Dengan penguatan ekonomi lokal, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih mandiri, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Tujuan Penguatan Ekonomi Lokal adalah menciptakan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi terutama di Kabupaten Tabalong melalui optimalisasi potensi lokal. Selain itu, penguatan ekonomi lokal juga bertujuan membangun ekosistem ekonomi inklusif yang mampu mendorong inovasi,

memanfaatkan teknologi, dan mendukung pembangunan yang adil serta merata di seluruh wilayah Kabupaten Tabalong, melalui upaya;

a) Pemberdayaan UMKM: Meningkatkan akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi yang rentan.

   Program bunga 0% untuk pinjaman UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau Poktan (Kelompok Tani) di Kabupaten Tabalong dapat menjadi salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

   Pemberdayaan UMKM melalui penguatan sektor ekonomi lokal juga dilakukan dengan peningkatan kemandirian ekonomi rakyat didesa/kelurahan melalui Pengembangan koperasi merah putih.

b) Pengembangan Pertanian dan Perikanan: Mendukung petani dengan teknologi modern, penyuluhan, dan akses pasar yang lebih baik. Program ini juga mencakup pengembangan produk pertanian dan perkebunan unggulan daerah yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing pasar.

   Berupaya menginisiasi kerjasama dengan pihak dan lembaga swasta atau pemerintah provinsi/pusat untuk pembangunan prasarana pertanian dengan dukungan teknologi modern. Pertanian merupakan salah satu sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Tabalong. Untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian, dua hal yang tidak boleh diabaikan adalah jalan produksi dan sarana prasarana (Sarpras), termasuk alat dan mesin pertanian (Alsintan) serta sarana produksi pertanian

(Saprodi). Kedua elemen ini memegang peran krusial dalam menciptakan sistem pertanian yang efisien, modern, dan berkelanjutan.

c) Infrastruktur Ekonomi: Membangun dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi, seperti jalan, jembatan, pasar, dan fasilitas penunjang lainnya. Ini penting untuk memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Pengembangan Jalan Produksi pada sentra pertanian dan perkebunan untuk memudahkan distribusi hasil panen. Membangun infrastruktur pendukung pariwisata dan percepatan pengembangan kawasan industri (KI) Seradang.

3. Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan.

Pengembangan pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Tabalong merupakan bagian dari upaya menjadikannya daerah terdepan yang dikenal secara luas. Dengan kekayaan alam, sejarah, dan tradisi yang dimiliki, Tabalong berpotensi menjadi destinasi unggulan yang memadukan keindahan alam dan keunikan budaya lokal.

Pemerintah daerah berfokus pada pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan, pengembangan infrastruktur penunjang, serta promosi terpadu yang mengangkat keunikan daerah. Festival kebudayaan, pelestarian seni tradisional, dan pemberdayaan komunitas lokal menjadi langkah strategis untuk memperkuat identitas Tabalong sebagai wilayah yang kaya akan warisan budaya.

Selain itu, juga dilakukan pengembangan KPP Agrowisata Hortikultura melalui pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, pengembangan kawasan unggulan pariwisata.

Melalui kolaborasi dengan masyarakat dan berbagai pihak, pengembangan sektor pariwisata ini tidak hanya meningkatkan perekonomian lokal, tetapi juga memperkokoh posisi Tabalong

sebagai daerah yang maju, ramah, dan mampu bersaing di tingkat global.

a) Pengembangan dan Promosi Pariwisata: Mengembangkan dan mempromosikan destinasi wisata unggulan di Tabalong, seperti wisata alam, budaya, dan religi, yang dapat menarik wisatawan domestik dan internasional.
b) Penyelenggaraan Event Wisata: Mengadakan event wisata tahunan yang melibatkan budaya lokal dan daya tarik wisata untuk menarik pengunjung dan meningkatkan profil daerah.
c) Promosi Digital dan Kampanye Pariwisata: Menggunakan media digital dan kampanye online untuk mempromosikan Tabalong sebagai destinasi wisata, serta menarik minat wisatawan global.
d) Pengembangan Industri Kreatif: Mendorong industri kreatif lokal seperti seni, kerajinan tangan, kuliner, dan produk budaya lainnya untuk menjadi bagian integral dari ekonomi daerah. Dukungan terhadap industri kreatif dapat meningkatkan daya tarik daerah dan menciptakan peluang ekonomi baru.

4. Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial

Perlindungan dan pemberdayaan sosial adalah upaya terpadu untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan memberdayakan mereka agar mampu mandiri secara ekonomi, sosial, dan budaya. Perlindungan sosial mencakup berbagai program seperti bantuan sosial, jaminan sosial, dan layanan sosial untuk membantu kelompok rentan, termasuk anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin dalam wilayah Kabupaten Tabalong.

Sementara itu, pemberdayaan sosial berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, melalui pendidikan, pelatihan, dan akses terhadap sumber daya

ekonomi. Sinergi antara perlindungan dan pemberdayaan sosial bertujuan menciptakan masyarakat yang inklusif, sejahtera, dan berdaya tahan terhadap berbagai kerentanan sosial dan tantangan kehidupan, dengan berbagai upaya antara lain;

a) Perumahan Layak: Program pembangunan dan rehabilitasi perumahan untuk keluarga kurang mampu, termasuk penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang memadai. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat
b) Penguatan Jaring Pengaman Sosial: Memperkuat program jaring pengaman sosial seperti bantuan langsung tunai, asuransi kesehatan, dan program keluarga harapan (PKH) untuk memastikan bahwa masyarakat yang paling rentan tetap mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.
c) Pemberdayaan Komunitas: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan komunitas. Ini termasuk pelatihan keterampilan, dukungan untuk inisiatif lokal, dan penguatan organisasi masyarakat sipil.

B. Upaya pencapaian Misi II Mendorong Kemajuan Daerah.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mendorong kemajuan daerah, yaitu:

1) meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan potensi lokal, inovasi, dan memperluas jaringan kerjasama, baik di tingkat regional maupun nasional;
2) membangun infrastruktur yang modern dan memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
3) meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari; dan
4) meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Dalam upaya mendorong kemajuan daerah di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya;

1. Peningkatan Infrastruktur

   Peningkatan infrastruktur adalah upaya strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pemerataan pembangunan. Fokusnya mencakup pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, fasilitas transportasi, jaringan air bersih, sanitasi, serta infrastruktur digital yang mendukung konektivitas wilayah kecamatan dan desa di Kabupaten Tabalong.

   Infrastruktur yang memadai tidak hanya mempercepat mobilitas dan akses layanan, tetapi juga membuka peluang investasi dan meningkatkan daya saing wilayah. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, melalui;

   a) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan: Membangun dan memperbaiki jalan-jalan utama serta jalan penghubung di seluruh wilayah Tabalong untuk meningkatkan aksesibilitas dan memperlancar distribusi barang dan jasa. Infrastruktur jalan yang baik juga mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal.

      Melalui program prioritas Jalan dan Jembatan Mantap yang bertujuan meningkatkan dan memperbaiki seluruh jalan dan jembatan dengan dukungan PSU, rambu dan marka jalan di Kabupaten Tabalong sehingga tidak ada lagi akses yang terputus.

   b) Pengembangan Fasilitas Publik: Membangun fasilitas publik yang modern dan memadai seperti terminal, pasar, rumah sakit, dan sekolah. Fasilitas ini penting untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat dan memberikan layanan

yang lebih baik, termasuk dukungan pengembangan bandara, penyediaan angkutan gratis bagi pelajar dan masyarakat di daerah terpencil.

c) Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi: Meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang baik dengan membangun sistem distribusi air yang lebih efisien serta meningkatkan layanan pengelolaan limbah.

2. Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi.

Pemanfaatan teknologi dan inovasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan global dan mendorong transformasi di berbagai sektor di Kabupaten Tabalong. Teknologi mempercepat proses kerja, meningkatkan efisiensi, dan membuka peluang baru, sementara inovasi menghadirkan solusi kreatif untuk masalah yang kompleks.

Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti kecerdasan buatan, *Internet of Things (IoT)*, dan big data, masyarakat dan organisasi dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas layanan. Inovasi juga mendorong terciptanya produk dan layanan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Sinergi antara teknologi dan inovasi memungkinkan terciptanya ekosistem yang adaptif, kompetitif, dan berkelanjutan dengan upaya;

a) Digitalisasi Layanan Publik: Mengimplementasikan teknologi digital dalam pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Ini termasuk e-government, layanan online untuk perizinan, pembayaran, dan pengaduan masyarakat.

b) Pengembangan Infrastruktur Digital: Membangun infrastruktur digital, seperti jaringan internet berkecepatan tinggi dan pusat data, untuk mendukung layanan pemerintah, bisnis, dan pendidikan yang lebih modern dan efisien.

c) Pengembangan *Smart City*: Mengembangkan konsep kota pintar *(Smart City*) yang memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan pengelolaan kota, dari transportasi hingga manajemen sumber daya alam.

d) Inovasi Pertanian dan Industri: Mendorong penggunaan teknologi modern dalam sektor pertanian dan industri untuk meningkatkan produktivitas, kualitas produk, dan daya saing di pasar.

3. Peningkatan Daya Saing Daerah

Peningkatan daya saing daerah dalah upaya untuk memperkuat kapasitas sebuah daerah atau negara dalam bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan pengembangan sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudahan berusaha, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi.

Fokus utama terletak pada inovasi, diversifikasi ekonomi, serta peningkatan produktivitas di berbagai sektor, seperti industri, pertanian, jasa dan sektor unggulan lain sesuai potensi yang dimiliki Kabupaten Tabalong. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendukung kewirausahaan, serta mengintegrasikan pasar lokal dengan rantai nilai global, daya saing ekonomi dapat ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan cara;

a) Pengembangan Ekonomi Lokal: Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan potensi lokal, seperti sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Ini termasuk program pengembangan produk unggulan daerah yang dapat dipasarkan lebih luas.

b) Pelatihan dan Pemberdayaan Ekonomi: Program pelatihan keterampilan kerja dan pemberdayaan ekonomi untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan kapasitas mereka dan mendapatkan pekerjaan atau membuka usaha sendiri.

c) Dukungan bagi UMKM: Memberikan dukungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui akses permodalan

tanpa bunga dan biaya administrasi lainnya, pelatihan, serta pendampingan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi daerah yang penting untuk diperkuat.

d) Investasi dan Kerjasama: Meningkatkan daya tarik investasi dengan menyediakan iklim usaha yang kondusif, regulasi yang mendukung, serta fasilitas yang memadai. Selain itu, menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, swasta, dan lembaga internasional, untuk mempercepat pembangunan.

e) Pembangunan Kawasan Pertumbuhan Ekonomi: Membentuk kawasan pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur pendukung, seperti sarana dan prasarana transportasi, kawasan industri, dan fasilitas logistik untuk menarik investasi dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah, terutama memperkuat pengembangan KI Seradang.

4. Pelestarian Lingkungan Hidup

Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi saat ini dan mendatang. Langkah ini mencakup perlindungan keanekaragaman hayati, rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, serta pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi perubahan iklim.

Partisipasi aktif masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta sangat penting dalam mendukung program-program pelestarian seperti reboisasi, konservasi kawasan lindung, dan penggunaan energi terbarukan. Dengan menjaga harmoni antara aktivitas manusia dan alam, pelestarian lingkungan hidup menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan yang berkelanjutan dan berkualitas, melalui upaya;

a) Program Lingkungan Bersih dan Hijau: Mendorong pengelolaan sampah yang lebih efektif, penghijauan, dan konservasi sumber daya alam. Program ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung kesejahteraan jangka panjang.
b) Peningkatan Ketahanan Pangan dan Energi: Mengembangkan pertanian berkelanjutan dan energi terbarukan untuk memastikan ketahanan pangan dan energi di masa depan, serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang tidak terbarukan.

5. Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Tabalong berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan). Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Dalam aspek ekonomi, Kabupaten Tabalong mendorong sektor unggulan seperti pertanian, energi terbarukan, dan industri kreatif untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi sosial, pemerintah fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan melalui program yang inklusif dan berbasis masyarakat.

Kabupaten Tabalong juga memprioritaskan pelestarian lingkungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, rehabilitasi hutan, serta pengurangan emisi karbon untuk mendukung agenda global melawan perubahan iklim.

Melalui kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan mitra pembangunan, Tabalong bertujuan menjadi kabupaten yang maju dan berdaya saing, sekaligus menjaga harmoni antara

manusia dan lingkungan demi generasi mendatang. Upaya yang dilakukan antara lain;

a) Pengelolaan Lingkungan Hidup: Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap program pembangunan, termasuk konservasi sumber daya alam, pengelolaan limbah, dan upaya mitigasi perubahan iklim
b) Pengembangan Energi Terbarukan: Mendorong penggunaan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan air, untuk memenuhi kebutuhan energi daerah dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

C. Upaya pencapaian Misi III Mengembangkan Kehidupan yang Religius.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk mengembangkan kehidupan religius;

1) Menjaga dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat, serta mendorong kerukunan antar umat beragama.
2) meningkatkan kemajuan budaya khususnya budaya lokal; dan
3) meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan anak dan pembangunan pemuda.

Dalam upaya mengembangkan kehidupan yang religius di Kabupaten Tabalong perlu dilakukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya;

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan.

   Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk mendukung penguatan nilai-nilai religiusitas masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana keagamaan. Pemerintah daerah terus berupaya membangun dan merehabilitasi rumah ibadah, pusat kegiatan keagamaan, serta fasilitas pendukung lainnya yang representatif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Upaya ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mendukung kegiatan keagamaan yang mempererat kebersamaan dan toleransi antarumat beragama. Melalui kerja sama dengan masyarakat dan lembaga keagamaan, Kabupaten Tabalong memastikan bahwa fasilitas yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan spiritual masyarakat secara inklusif.

Dengan visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), penguatan sarana dan prasarana keagamaan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan rohani dan sosial.

a) Pembangunan dan Renovasi Tempat Ibadah: Membantu pembangunan dan renovasi masjid, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya agar dapat menampung lebih banyak jamaah serta memberikan lingkungan yang nyaman dan aman untuk beribadah. Bantuan lainnya untuk tempat ibadah adalah untuk biaya operasional listrik dan air, termasuk insentif bagi marbot musholla.

b) Fasilitas Pendidikan Agama: Membangun dan memperbaiki madrasah, pesantren, sekolah minggu, dan lembaga pendidikan agama lainnya. Ini termasuk penyediaan fasilitas yang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, dan asrama untuk mendukung pendidikan keagamaan yang lebih baik.

2. Program Pendidikan dan Pembinaan Agama

Kabupaten Tabalong menempatkan pendidikan dan pembinaan agama sebagai pilar penting dalam menciptakan masyarakat yang berakhlak mulia, religius, dan berdaya saing. Pemerintah daerah terus memperkuat program pendidikan agama melalui dukungan terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan, peningkatan kualitas guru agama, serta penyediaan fasilitas belajar yang memadai.

Selain itu, program pembinaan agama dijalankan untuk semua kelompok usia melalui kegiatan seperti pelatihan da'i, kajian keagamaan, pelatihan hafalan Al-Qur'an, dan pemberdayaan lembaga keagamaan di tingkat desa. Pemerintah juga aktif mendorong toleransi dan harmoni antarumat beragama untuk menciptakan lingkungan yang damai dan kondusif.

Melalui program ini, Tabalong berharap dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam nilai-nilai spiritual, sejalan dengan visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

a) Penguatan Pendidikan Agama di Sekolah: Memperkuat kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan melibatkan tokoh agama dan meningkatkan kualitas pengajaran agama. Program ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai religius sejak dini pada generasi muda.

b) Pelatihan dan Pembinaan Tokoh Agama: Menyediakan program pelatihan dan pembinaan bagi para ulama, pendeta, dan pemuka agama lainnya untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memberikan bimbingan spiritual kepada masyarakat, termasuk dukungan untuk mencetak para Da'i atau sebutan lain untuk semua keyakinan agama yang ada di Kabupaten Tabalong.

c) Kegiatan Keagamaan: Mengorganisir kegiatan keagamaan seperti pengajian, ceramah, kecamatan bershalawat, diskusi lintas agama, dan kegiatan lainnya yang memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan di masyarakat serta memfasilitasi program ziarah (wisata religi).

3. Program Kerukunan Antar umat Beragama.

Kabupaten Tabalong berkomitmen menciptakan harmoni sosial melalui program kerukunan antarumat beragama. Program ini bertujuan mempererat hubungan antar komunitas keagamaan,

mendorong toleransi, dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat.

Berbagai kegiatan dilakukan, seperti dialog lintas agama, pelatihan fasilitator kerukunan, serta perayaan bersama hari-hari besar keagamaan. Pemerintah juga membentuk forum komunikasi antarumat beragama (FKUB) yang aktif memediasi dan menyelesaikan potensi konflik dengan cara damai dan inklusif.

Selain itu, pendidikan tentang toleransi dan nilai-nilai kebersamaan diperkuat melalui kurikulum sekolah dan program komunitas. Hal ini bertujuan membangun kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.

Dengan semangat "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), Kabupaten Tabalong terus mendorong terciptanya masyarakat yang rukun, saling menghormati, dan bersatu menuju masa depan yang harmonis, antara lain:

a) Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB): Mendukung keberadaan dan aktivitas FKUB untuk memfasilitasi dialog antarumat beragama, menyelesaikan potensi konflik, dan mempromosikan kerukunan dalam masyarakat.
b) Kegiatan Sosial Lintas Agama: Mengadakan kegiatan sosial yang melibatkan berbagai komunitas agama, seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi kemanusiaan, yang dapat memperkuat solidaritas dan persatuan antarumat beragama.
c) Hari Besar Keagamaan Bersama: Merayakan hari-hari besar keagamaan dengan melibatkan semua komunitas agama dalam bentuk kegiatan bersama, seperti festival budaya, untuk memperkuat rasa persaudaraan.

4. Integrasi Nilai Religius dalam Kebijakan Publik.

Integrasi nilai religius dalam kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Tabalong mencerminkan komitmen untuk membangun masyarakat yang tidak hanya maju secara ekonomi

dan sosial, tetapi juga kuat dalam spiritualitas. Nilai religius, yang menjadi bagian dari visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), diimplementasikan melalui berbagai program dan kebijakan yang memperhatikan aspek moral, etika, dan keimanan.

Hal ini diwujudkan, misalnya, dengan mendukung pengembangan pendidikan berbasis agama, penyediaan fasilitas ibadah yang memadai, dan promosi budaya toleransi antarumat beragama. Pemerintah juga mendorong keterlibatan tokoh agama dalam proses pengambilan keputusan strategis, sehingga kebijakan yang dihasilkan selaras dengan nilai-nilai luhur masyarakat Tabalong. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan harmoni antara kemajuan pembangunan dan keseimbangan spiritual, menjadikan Tabalong sebagai kabupaten yang tidak hanya unggul secara material, tetapi juga bermartabat secara moral melalui upaya antara lain :

a) Kebijakan Pro-Rakyat Berbasis Agama: Mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kebijakan publik, seperti program pengentasan kemiskinan, bantuan sosial, dan perlindungan lingkungan yang didasari oleh prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan ajaran agama.
b) Hari Tanpa Aktivitas untuk Ibadah: Menerapkan kebijakan yang memberikan waktu khusus bagi masyarakat untuk beribadah, seperti tidak ada kegiatan sekolah atau pekerjaan pada hari-hari tertentu yang dihormati dalam agama.
c) Konseling dan Mediasi Berbasis Agama: Menyediakan layanan konseling dan mediasi berbasis agama untuk membantu menyelesaikan masalah keluarga, konflik sosial, dan permasalahan lainnya dengan pendekatan spiritual.

5. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Ekonomi Umat.

Program pemberdayaan dan peningkatan ekonomi umat di Kabupaten Tabalong merupakan upaya strategis pemerintah

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat berbasis nilai religius dan kebersamaan. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lokal, memberdayakan kelompok masyarakat, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

Berbagai inisiatif dilaksanakan, seperti pelatihan kewirausahaan berbasis syariah, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberian akses permodalan, serta pendampingan intensif bagi pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembentukan koperasi berbasis komunitas keagamaan dan mengintegrasikan zakat, infak, dan sedekah untuk mendukung kegiatan produktif.

Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat solidaritas sosial, menjadikan Tabalong sebagai kabupaten yang sejahtera secara ekonomi dan bermartabat secara spiritual melalui kegiatan:

a) Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Agama: Mendukung kegiatan ekonomi berbasis masjid, gereja, dan lembaga agama lainnya, seperti koperasi syariah, usaha bersama, atau program wakaf produktif, untuk meningkatkan kesejahteraan umat.
b) Zakat, Infaq, dan Sedekah: Mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat, infaq, dan sedekah melalui badan amil zakat yang terpercaya dan transparan untuk mendukung program-program sosial keagamaan dan membantu mereka yang membutuhkan.

6. Penghormatan terhadap Nilai-Nilai Agama dalam Kehidupan Publik.

Penghormatan terhadap nilai-nilai agama dalam kehidupan publik di Kabupaten Tabalong menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkeadaban.

Sebagai bagian dari visi "Menuju Tabalong SMaRT," pemerintah daerah senantiasa menjunjung tinggi keberagaman keyakinan serta mendorong penerapan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan.

Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan, seperti penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan secara inklusif, fasilitasi dialog antarumat beragama, serta penyediaan ruang ibadah yang memadai di tempat-tempat umum. Pemerintah juga berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, dan kebersamaan yang diajarkan dalam agama ke dalam kebijakan publik.

Dengan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan ajaran agama, Tabalong tidak hanya menjadi daerah yang maju secara fisik, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun masyarakat yang bermoral dan toleran, menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman melalui upaya;

a) Sosialisasi Nilai-Nilai Agama: Mengadakan kampanye publik dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang, yang dapat diaplikasikan dalam semua aspek kehidupan.
b) Penghargaan bagi Tokoh Agama: Memberikan penghargaan dan pengakuan kepada tokoh-tokoh agama yang berjasa dalam memajukan kehidupan keagamaan di masyarakat, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka.

7. Pemberdayaan Pemuda dan Perempuan: Mendorong keterlibatan aktif pemuda dan perempuan dalam pembangunan melalui program pemberdayaan yang meningkatkan partisipasi mereka di bidang ekonomi, sosial, dan politik.

D. Upaya pencapaian Misi IV Menjadi Daerah yang Terdepan.

Langkah-langkah yang diupayakan untuk menjadikan Kabupaten Tabalong sebagai Daerah Terdepan, yaitu:

1) menjadi pionir dalam inovasi dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan pengelolaan birokrasi daerah melalui sistem meritokrasi; dan
2) berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, dengan standar yang tinggi dalam transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas.

Dalam upaya menjadi daerah yang terdepan di perlu dilakukan langkah strategis dan program prioritas yang harus dilaksanakan, diantaranya;

1. Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan

   Kabupaten Tabalong berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui tata kelola yang baik, pemerintah daerah memastikan setiap proses pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip keterbukaan, keadilan, dan partisipasi publik.

   Transparansi diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, baik melalui platform digital maupun layanan publik. Pemerintah Kabupaten Tabalong juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan.

   Selain itu, penerapan teknologi informasi menjadi prioritas dalam meningkatkan efisiensi birokrasi dan pengawasan publik. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berbasis kinerja, guna mencegah korupsi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

   Dengan tata kelola pemerintahan yang transparan dan efektif, Kabupaten Tabalong terus bergerak menuju pembangunan yang

inklusif dan berkelanjutan, sesuai visi "Menuju Tabalong SMaRT", dengan upaya-upaya;

a) Peningkatan Akuntabilitas: Menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan
b) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan yang ketat, memperkuat peran auditor internal dan evaluasi berkala terhadap program-program pembangunan untuk memastikan bahwa mereka berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat
c) Penerapan Sistem Pengelolaan Keuangan yang Efektif: Menerapkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan, termasuk perencanaan anggaran yang strategis dan pengelolaan aset yang optimal
d) Pelatihan dan Pengembangan Kepemimpinan: Menyediakan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur pemerintah dan masyarakat untuk membangun kapasitas manajerial dan kepemimpinan yang dapat mendukung pembangunan daerah
e) Penguatan Pelayanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan yang jelas, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat termasuk penataan dan penyederhanaan kelembagaan serta birokrasi.

2. Penerapan Konsep *Smart City*.

Penerapan konsep *Smart City* di Kabupaten Tabalong merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan), konsep ini dirancang untuk mengintegrasikan teknologi, inovasi,

dan nilai-nilai lokal dalam tata kelola pemerintahan dan pembangunan.

Inisiatif ini mencakup pengembangan infrastruktur digital, seperti aplikasi layanan publik berbasis daring, sistem informasi geografis (SIG) untuk perencanaan wilayah, serta penerapan teknologi ramah lingkungan untuk mendukung keberlanjutan. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, swasta, dan akademisi, untuk memastikan implementasi yang tepat sasaran.

Dengan menerapkan *Smart City*, Kabupaten Tabalong berupaya menjadi wilayah yang adaptif terhadap perubahan zaman, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional dan global.

a) Implementasi Teknologi *Smart City*: Mengadopsi teknologi *Smart City,* seperti sistem transportasi cerdas, manajemen energi, dan pengelolaan sampah berbasis teknologi, untuk meningkatkan efisiensi layanan publik dan kualitas hidup masyarakat.

   Dukungan bagi implementasi *Smart City* ini diantaranya dengan menyediakan Wifi Gratis di seluruh Desa dan Sekolah termasuk Pesantren.

b) Pengembangan Layanan *E-Government*: Mengembangkan layanan *e-government* yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan secara online, seperti perizinan, pembayaran pajak, dan pengaduan.

c) Program Kota Bersih dan Hijau: Menerapkan program lingkungan yang berfokus pada penghijauan kota, pengelolaan sampah yang efektif, dan konservasi sumber daya alam, untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

3. Kolaborasi dan Kemitraan Strategis.

Kolaborasi dan kemitraan strategis di Kabupaten Tabalong menjadi pilar utama dalam mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan pemerintah pusat, guna mengoptimalkan potensi daerah dan mendukung visi "Menuju Tabalong SMaRT" (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan).

Melalui kemitraan strategis, berbagai program unggulan telah berhasil dilaksanakan, seperti pengembangan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya mengintegrasikan sumber daya, tetapi juga menciptakan sinergi antara inovasi dan kearifan lokal.

Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, Kabupaten Tabalong terus membangun jaringan kerja sama yang kuat untuk menciptakan peluang baru, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata.

a) Kerjasama dengan Sektor Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek strategis seperti infrastruktur, pendidikan, dan teknologi. Kerjasama ini juga mencakup program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang bermanfaat bagi masyarakat.
b) Partisipasi dalam Forum Regional dan Nasional: Aktif berpartisipasi dalam forum-forum regional dan nasional untuk mempromosikan Tabalong, menarik investor, dan belajar dari praktik terbaik daerah lain.
c) Kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat: Menjalin kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk berkolaborasi dalam rangka mendukung pembangunan daerah.

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penahapan pembangunan merupakan fokus pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.

Penentuan tahapan RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari tema pembangunan RPJPD Tahap I (2025-2029). Adapun tema RPJPD Tahap I Kabupaten Tabalong adalah PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI, sebagaimana dimuat pada tabel di bawah:

Tabel 3.3
Tema Tahap I RPJPD (2025-2029)

	TEMA TAHAP I RPJPD (2025-2029)
	PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI
Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial
Transformasi Ekonomi	Hilirisasi SDA, pengembangan agribisnis, industri, dan pariwisata, serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja
Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
Landasan & Kerangka Implementasi Transformasi	Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana

Sumber: RPJPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045

Berikut adalah tahapan pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030:

Tabel 3.4
Penahapan Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030

2026	2027	2028	2029	2030
Penguatan Fondasi dalam Mewujudkan Pembangunan Berbasis Potensi Lokal untuk Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan dengan prinsip Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Inklusif				
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Memajukan Perekonomian Berbasis Sektor Unggulan yang Berkelanjutan	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Publik serta Infrastruktur Wilayah yang Mendorong Investasi	Percepatan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	Penguatan Daya Saing Daerah yang Mendorong Kemajuan Pembangunan	Perwujudan Tabalong yang Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan

Sumber: hasil analisis, 2025

Secara infrastruktur, Kabupaten Tabalong dilintasi oleh jaringan jalan nasional yang menghubungkan Banjarmasin – Tanjung – Balikpapan, serta berdekatan dengan rencana pengembangan jalur logistik dan transportasi pendukung IKN. Jarak tempuh dari pusat Kabupaten Tabalong ke wilayah IKN di Penajam Paser Utara relatif dekat jika dibandingkan dengan pusat-pusat ekonomi lain di Kalimantan Selatan, sehingga Tabalong berpeluang besar menjadi wilayah hinterland utama dalam mendukung kebutuhan pembangunan IKN, baik dari segi penyediaan logistik, tenaga kerja, bahan konstruksi, energi, hingga suplai pangan.

Tabalong juga memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan beragam, seperti hasil pertambangan, pertanian, peternakan, dan perikanan, yang dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber pasokan logistik dan kebutuhan dasar bagi IKN. Dengan pengembangan kawasan

industri pengolahan hasil bumi, klaster pangan, serta fasilitas distribusi logistik modern (dry port, gudang terpadu, terminal barang), Tabalong dapat memainkan peran strategis sebagai simpul distribusi regional dan pusat logistik penyangga IKN.

Dengan segala keunggulan ini, Kabupaten Tabalong bukan hanya menjadi simpul transit, tetapi juga dapat tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing tinggi di Kalimantan Selatan, sekaligus memperkuat integrasi pembangunan antarprovinsi dalam kerangka percepatan pembangunan IKN. Guna mengoptimalkan potensi ini, maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang tepat.

Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD. Lebih lanjut, arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap, yang selaras dengan strategi. Arah kebijakan RPJMD yang dipilih untuk mewujudkan misi pembangunan Kabupaten Tabalong, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.5
Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029

Strategi		Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera		
1	Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik.	Program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik serta sertifikasi profesi memenuhi untuk standar nasional.
		Memberikan tunjangan dan insentif yang memadai untuk meningkatkan motivasi dan kinerja.
2	Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai.	Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan serta fasilitas sekolah terutama di daerah terpencil.
		Menyediakan akses internet, komputer, dan perangkat teknologi lainnya untuk mendukung pembelajaran digital.
		Menyediakan buku teks, alat peraga, dan bahan ajar yang berkualitas dan relevan.

Strategi		Arah Kebijakan
3	Memperkaya kurikulum yang relevan dan berbasis kebutuhan.	Pengembangan Kurikulum yang berbasis kompetensi, pendidikan karakter dan keterampilan praktis.
4	Peningkatan akses dan inklusivitas pendidikan.	Memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu.
		Menyediakan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
		Mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau daerah terpencil.
5	Peningkatan kualitas tenaga kesehatan.	Memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi.
		Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif dan tunjangan yang lebih baik.
		Memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
6	Penyediaan fasilitas Kesehatan yang memadai.	Meningkatkan semua fasilitas kesehatan memiliki peralatan medis yang lengkap dan memadai.
		Membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk menjangkau seluruh masyarakat.
		Menggunakan teknologi modern seperti telemedicine untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.
7	Program kesehatan preventif dan promotif.	Meningkatkan penyuluhan, imunisasi, vaksinasi dan skrining kesehatan berkala untuk deteksi dini penyakit.
		Meningkatkan penerapan gerakan masyarakat hidup sehat
8	Peningkatan akses layanan kesehatan.	Meningkatkan cakupan BPJS Kesehatan, layanan kesehatan gratis dan klinik keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.
9	Peningkatan kualitas obat dan alat kesehatan.	Menjaga ketersediaan obat-obatan berkualitas di semua fasilitas Kesehatan.
		Menyediakan alat kesehatan modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan pengobatan.
10	Penguatan kebijakan ekonomi yang pro masyarakat miskin	Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, di mana manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok miskin.
		Memberikan insentif dan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berkembang, termasuk akses ke modal, pelatihan, dan pasar.
		Memperluas implementasi program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja dari kalangan miskin.

Strategi		Arah Kebijakan
11	Peningkatan bantuan sosial yang melindungi.	Memperkuat sistem jaring pengaman sosial, bantuan pangan atau bantuan langsung tunai untuk keluarga miskin, lansia dan disabilitas.
		Memperluas cakupan asuransi kesehatan untuk melindungi keluarga miskin dari beban biaya kesehatan yang tinggi.
12	Pemenuhan infrastruktur dasar terutama pada kantong-kantong kemiskinan.	Membangun dan memperbaiki infrastruktur transportasi, akses air bersih dan sanitasi layak serta akses listrik dan energi yang terjangkau.
13	Peningkatan efektivitas anggaran untuk program kemiskinan.	Menyusun kebijakan anggaran yang berfokus pada program pengentasan kemiskinan
		Meningkatkan koordinasi antar-instansi pemerintah dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan.
		Melibatkan masyarakat miskin dalam proses penentuan kebijakan.
14	Penguatan monitoring dan evaluasi program kemiskinan.	Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan audit penggunaan anggaran pengentasan kemiskinan secara berkala.
15	Peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja.	Revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan ketenagakerjaan.
		Pelatihan digital bagi tenaga kerja untuk meningkatkan daya saing global.
16	Peningkatan lapangan kerja dan investasi sektor produktif.	Mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perternakan, perikanan, dan pariwisata.
		Mengembangkan industri kreatif dan ekonomi digital berbasis daerah.
17	Peningkatan akses dan kesempatan kerja.	Optimalisasi bursa kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan.
		Meningkatkan mobilitas dan akses tenaga kerja ke pasar kerja.
18	Pemberdayaan ekonomi masyarakat dan inklusifitas kerja.	Pemberdayaan UMKM dan wirausaha mandiri.
		Dukungan bagi Pekerja Rentan dan Difabel.
19	Peningkatan akses pendidikan dan keterampilan	Meningkatkan akses Pendidikan yang merata disemua wilayah.
		Menyediakan pelatihan vokasional dan keterampilan teknis bagi kelompok berpenghasilan rendah.
20	Penciptaan lapangan kerja dan upah yang layak.	Mendorong investasi di sektor-sektor yang menciptakan banyak lapangan kerja, seperti pertanian, manufaktur, dan UMKM.
		Menetapkan upah minimum yang layak untuk memastikan pekerja menerima penghasilan yang memadai.
21	Penguatan sektor pertanian dan pedesaan.	Memberikan subsidi, akses teknologi pertanian, dan pasar yang adil untuk meningkatkan pendapatan petani.

Strategi		Arah Kebijakan
		Mendorong tumbuhnya pusat ekonomi baru di pedesaan.
22	Penguatan UMKM dan kewirausahaan.	Mempermudah akses permodalan, pelatihan dan pendampingan serta penggunaan teknologi dan inovasi.
23	Perlindungan sosial dan jaminan Kesehatan.	Memperluas cakupan program jaminan sosial, bantuan langsung tunai dan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau.
24	Peningkatan infrastruktur dan konektivitas di daerah terpencil.	Membangun infrastruktur dasar dan memperluas jangkauan akses internet dan teknologi digital ke daerah terpencil.
25	Peningkatan produktivitas dan daya saing.	Mendorong penggunaan teknologi dan inovasi, penyediaan infrastruktur yang memadai dan kemudahan berusaha.
26	Pengembangan sektor unggulan daerah.	Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi unggul di daerah.
27	Diversifikasi ekonomi.	Pengembangan sektor non-tradisional untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif.
28	Pengembangan pariwisata.	Mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan serta mempromosikan budaya dan produk lokal.
29	Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan sosial	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas serta kualitas tenaga layanan sosial.
		Mengembangkan layanan sosial berbasis teknologi digital untuk mempercepat akses informasi dan pelayanan.
		Optimalisasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
30	Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.	Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak sosial dan layanan yang tersedia.
		Mendorong keterlibatan sektor swasta dan peran serta masyarakat dalam membantu sesama melalui program gotong royong dan filantropi.
31	Peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan air minum.	Peningkatan kapasitas produksi air bersih.
		Membangun dan memperluas jaringan perpipaan.
		Melakukan konservasi sumber air baku dan memanfaatkan teknologi pengolahan air yang efisien dan ramah lingkungan.
32	Pemerataan akses air minum yang terjangkau	Pemasangan sambungan rumah gratis dan tarif khusus atau subsidi bagi keluarga miskin.
33	Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Mengembangkan program air minum yang dikelola oleh masyarakat (PAMSIMAS).
34	Peningkatan produksi dan produktivitas pangan lokal.	Meningkatkan Sarpras/infrastruktur pertanian dan perkebunan.
		Mengembangkan varietas unggul dan pemanfaatan teknologi pertanian.

Strategi		Arah Kebijakan
		Mengembangkan pangan lokal (Diversifikasi sumber pangan).
35	Penguatan distribusi dan stabilitas harga pangan	Memperkuat sistem logistik dan rantai pasok pangan.
		Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga pangan.
36	Perlindungan dan pemberdayaan petani serta pelaku usaha pangan	Memberi kemudahan akses pembiayaan poktan dan asuransi pertanian.
		Penguatan kelembagaan petani dan UMKM pangan serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta melalui skema inti-plasma.
37	Penguatan cadangan dan keamanan pangan	Pembangunan lumbung pangan daerah.
		Pemetaan daerah rawan pangan dan penyusunan strategi mitigasi potensi risiko krisis pangan.
		Diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas.
38	Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.	Menerapkan penggunaan teknologi pertanian modern, benih unggul dan pupuk berkualitas ramah lingkungan.
		Pengelolaan air dan irigasi yang efektif.
39	Penguatan infrastruktur dan rantai pasok pertanian.	Mengembangkan infrastruktur pertanian modern.
		Meningkatkan digitalisasi pasar pertanian.
		Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani untuk memperlancar distribusi hasil panen.
40	Pemberdayaan petani untuk mengembangkan pertanian berkelanjutan dan ramah lingkungan.	Peningkatan kapasitas petani dan mendorong regenerasi petani muda melalui program petani milenial.
		Subsidi benih dan pupuk bagi petani kecil.
		Mengembangkan pertanian terpadu dengan konsep *zero waste agriculture* dan *agroforestry*.
41	Penguatan kemitraan dan investasi di sektor pertanian dan peternakan.	Mendorong kemitraan dengan swasta dan industri di sektor pertanian dan peternakan
		Pengembangan pariwisata pertanian (agrowisata).
42	Penguatan kapasitas dan daya saing UKM dan Koperasi.	Pengembangan kualitas produk dan inovasi.
		Peningkatan keterampilan SDM.
43	Kemudahan akses permodalan dan pembiayaan.	Mempermudah akses permodalan dan memberikan insentif atau subsidi bunga bagi UKM dan koperasi.
		Mendorong koperasi simpan pinjam sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi UKM.
		Penguatan skema kemitraan dan investasi.
44	Peningkatan akses pasar dan digitalisasi.	Mengembangkan jaringan pemasaran.
		Digitalisasi dan transformasi bisnis
45	Penguatan kelembagaan dan regulasi koperasi serta UKM.	Mendorong koperasi untuk menerapkan tata kelola yang profesional dan transparan.

Strategi		Arah Kebijakan
		Penyusunan kebijakan yang mendukung pertumbuhan UKM dan koperasi.
46	Pengembangan kawasan industri dan sentra UKM.	Membangun dan memperluas kawasan industri kecil berbasis potensi lokal.
		Meningkatan kapasitas dan efisiensi rantai pasok bahan baku dan distribusi.
47	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas destinasi wisata.
		Penguatan ekosistem pariwisata berkelanjutan.
48	Pelestarian dan penguatan budaya lokal.	Meningkatkan pengembangan dan promosi kebudayaan local.
		Menerapkan sistem digitalisasi dan dokumentasi warisan budaya local.
49	Peningkatan daya saing ekonomi kreatif.	Mengembangkan industri kreatif berbasis kearifan lokal.
		Mengembangkan marketplace digital untuk produk ekonomi kreatif lokal.
50	Penguatan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.	Meningkatkan kapasitas SDM dalam manajemen pariwisata.
		Meningkatkan kerjasama dengan Lembaga terkait dan komunitas lokal dalam riset dan inovasi pengembangan pariwisata.
51	Penyusunan kebijakan berbasis pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.	Penyusunan regulasi yang mendukung investasi di sektor pariwisata.
52	Pengelolaan destinasi wisata yang berkelanjutan.	Pengawasan terhadap dampak lingkungan dan sosial akibat perkembangan pariwisata.
53	Penguatan sektor riil untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.	Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, industri, dan jasa.
		Mengembangkan kawasan ekonomi baru.
		Mengembangkan kawasan peternakan, perikanan, dan perkebunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan.
54	Pengendalian inflasi dan stabilitas harga.	Penguatan ketersediaan dan distribusi pangan pokok.
		Pengawasan harga dan operasi pasar.
55	Peningkatan investasi dan kemudahan berusaha.	Mengintensifkan kegiatan promosi investasi untuk menarik minat investor.
		Memberikan insentif dan kemudahan perizinan bagi investor.
		Mendorong skema kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM.
56	Stabilitas fiskal dan keuangan daerah.	Meningkatkan penerimaan dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dengan kebijakan pajak yang efektif.
		Mendorong peran Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Koperasi Simpan Pinjam dalam mendukung akses permodalan.

Strategi		Arah Kebijakan
57	Peningkatan kesejahteraan dan daya beli Masyarakat.	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis industri dan digitalisasi.
		Mendorong inovasi usaha berbasis ekonomi kreatif dan digital
58	Pengembangan sumber energi terbarukan.	Mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Tenaga Air, dan Bioenergy.
		Memperluas pemanfaatan panel surya di fasilitas publik dan perkantoran pemerintah.
59	Peningkatan sektor pertanian dan industri ramah lingkungan.	Mempekuat pertanian berkelanjutan.
		Meningkatkan industri hijau dan ekonomi sirkular.
60	Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi hijau.	Meningkatkan kesadaran dan pendidikan lingkungan.
		Mengembangkan ekonomi hijau berbasis komunitas.
61	Peningkatan daya saing produk lokal dan peningkatan akses pasar global.	Mengembangkan produk unggulan daerah dan industri kreatif untuk ekspor.
		Meningkatkan promosi produk dan jasa domestik di pasar global.
62	Penguatan regulasi dan diplomasi ekonomi.	Menyelaraskan kebijakan daerah dengan perdagangan global.
		Mengembangkan strategi branding daerah sebagai pusat investasi dan perdagangan global
Misi 2. Mendorong Kemajuan Daerah		
1	Peningkatan infrastruktur jalan.	Membangun jalan dan jembatan baru antar kecamatan/desa, dan kawasan ekonomi strategis untuk mengurangi keterisolasian.
		Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk memperpanjang usia penggunaan.
		Mengalokasikan anggaran yang prporsional untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang rusak agar tidak semakin parah.
2	Optimalisasi anggaran dan pendanaan.	Meningkatkan optimalisasi sumber dana untuk proyek jalan.
		Menggandeng sektor swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk pembiayaan infrastruktur jalan.
3	Penguatan tata kelola dan regulasi.	Menyusun prioritas pembangunan transportasi berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan geografis.
		Meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengerjaan proyek jalan/jembatan untuk memastikan kualitas yang baik
4	Pemanfaatan teknologi dan inovasi.	Menggunakan teknologi Geographical Information System (GIS) untuk monitoring dan pemeliharaan jalan.

Strategi		Arah Kebijakan
		Mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas cerdas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas.
5	Integrasi dengan pengembangan wilayah.	Merencanakan akses jalan yang mendukung kawasan industri, pariwisata, pertanian, dan pusat perdagangan serta yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar seperti pasar, sekolah dan layanan kesehatan.
6	Peningkatan infrastruktur dan kualitas hunian.	Memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
		Mendorong pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR melalui program pemerintah seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
		Penyediaan akses air bersih, sanitasi, listrik, dan drainase yang baik untuk meningkatkan kualitas lingkungan hunian.
7	Penguatan regulasi dan tata kelola perumahan.	Menetapkan regulasi penerapan standar perumahan layak.
		Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konstruksi rumah yang aman dan berstandar.
		Meningkatkan pengendalian kawasan kumuh melalui regulasi tata ruang dan pembangunan infrastruktur.
		Menyediakan program pendampingan bagi warga di permukiman kumuh.
		Mendorong legalitas kepemilikan tanah dan rumah melalui percepatan sertifikasi tanah.
8	Akses pembiayaan perumahan yang lebih mudah.	Mempermudah akses masyarakat terhadap KPR bersubsidi dengan suku bunga rendah dan cicilan terjangkau.
		Memberikan bantuan kepada masyarakat (BSPS) untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara mandiri.
9	Pengembangan kawasan hunian berbasis lingkungan	Mendorong pembangunan kawasan hunian berkonsep *smart* dan *green housing*.
		Menyiapkan konektivitas dan akses transportasi yang terintegrasi dengan kawasan perumahan.
		Mendorong pembentukan kelompok masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hunian.
10	Penguatan kapasitas aparatur desa.	Pelatihan dan Pengembangan SDM (kepala desa, perangkat desa, Anggota BPD dan apparat kainnya).
		Menerapkan sistem administrasi berbasis teknologi (e-Government Desa).
		Menetapkan standar kompetensi bagi perangkat desa.

Strategi		Arah Kebijakan
11	Peningkatan tata kelola keuangan desa.	Transparansi dan akuntabilitas dana desa yang dapat diakses masyarakat.
		Mendorong pengelolaan BUMDes yang lebih professional.
		Meningkatkan kompetensi pengelola anggaran keuangan desa.
		Menyediakan tenaga pendamping profesional untuk membantu desa dalam pengelolaan anggaran dan program Pembangunan.
12	Peningkatan kualitas pelayanan publik desa.	Mengembangkan layanan administrasi pelayanan secara online dan terintegrasi dengan sistem nasional.
		Meningkatkan fasilitas yang memadai untuk pelayanan.
		Menerapkan standar pelayanan minimal.
13	Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.	Memperkuat peran organisasi desa dan semua elemen masyarakat, dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan desa.
14	Inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan desa.	Mendorong desa untuk menerapkan konsep desa pintar (*smart village*).
		Memanfaatkan platform digital sebagai sarana informasi dan komunikasi antara pemerintah desa dan Masyarakat.
15	Peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana desa.	Membangun dan memperbaiki infrastruktur desa, sarana dan prasarana desa lainnya.
16	Dukungan terhadap penguatan regulasi dan kebijakan lingkungan.	Mengoptimalkan peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup.
		Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lingkungan.
		Mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah sehingga selaras dengan prinsip keberlanjutan dan mempertimbangkan dampak lingkungan.
17	Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	Mendorong perlindungan kawasan hutan dan ekosistem alami.
		Mendorong penggunaan air secara bijak, pengembangan energi terbarukan.
		Melaksanakan kordinasi dan dukungan program perbaikan lahan yang mengalami degradasi akibat deforestasi, pertambangan, atau pertanian yang tidak ramah lingkungan
18	Peningkatan kesadaran dan partisipasi Masyarakat.	Meningkatkan pendidikan lingkungan hidup melalui kampanye pentingnya menjaga lingkungan hidup serta mendorong partisipasi aktif Masyarakat dalam pelestraian lingkungan.
19	Pengelolaan sampah dan limbah yang berbasis ekonomi sirkular.	Menerapkan kebijakan pengurangan plastik sekali pakai dan mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan.

Strategi		Arah Kebijakan
		Membangun fasilitas pengolahan sampah modern, termasuk bank sampah.
		Mendorong pelaku industri memiliki sistem pengelolaan limbah yang sesuai standar lingkungan.
20	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Mendorong industri dan transportasi untuk menggunakan teknologi rendah emisi dan energi bersih.
		Meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana lingkungan.
		Mendorong urban forestry, taman kota, serta penghijauan lahan pertanian untuk meningkatkan daya serap karbon.
21	Penguatan ketahanan keluarga	Meningkatkan program pendidikan pranikah, pengasuhan anak, dan manajemen konflik dalam keluarga.
		Memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak.
		Mengembangkan program perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan pernikahan dini, serta meningkatkan layanan kesejahteraan lansia.
22	Pemberdayaan ekonomi keluarga	Memberikan pelatihan dan akses permodalan bagi keluarga, khususnya Perempuan.
		Mendorong kebijakan cuti melahirkan, ruang laktasi, dan fleksibilitas kerja bagi ibu bekerja.
		Menyediakan bantuan bagi keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.
23	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi.
		Meningkatkan akses kesetaraan dalam pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional bagi perempuan.
		Mendorong kepemimpinan perempuan di sektor publik dan swasta.
24	Pencegahan dan penanganan kekerasan berbasis gender	Mengembangkan pusat layanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender.
		Kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender.
		Memperkuat regulasi dan sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.
25	Pemberdayaan kelompok rentan	Menyediakan infrastruktur ramah disabilitas.
		Memberikan program khusus bagi komunitas adat, minoritas, dan kelompok rentan lainnya.
		Mendorong sekolah inklusif yang menerima anak berkebutuhan khusus dengan dukungan tenaga pengajar dan fasilitas yang memadai.

Strategi		Arah Kebijakan
Misi 3. Mengembangkan Kehidupan yang Religius		
1	Memperkuat pernanan forum kerukunan umat beragama (FKUB).	Mengaktifkan dan meningkatkan peran FKUB untuk menyelesaikan konflik antarumat beragama secara damai dan mendorong dialog.
2	Integrasi nilai toleransi dalam pendidikan sebagai muatan local.	Mengintegrasikan pendidikan tentang keberagaman, toleransi, dan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan lembaga pendidikan.
		Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan penyuluh agama dengan metode pengajaran yang inklusif dan mendorong harmoni.
3	Peningkatan program dialog antar umat beragama.	Menyelenggarakan dialog rutin antarumat beragama untuk membahas isu-isu bersama.
		Menggalang kerja sama antarumat beragama dalam isu-isu sosial seperti lingkungan, kemiskinan, dan pendidikan.
		Mengadakan acara kebudayaan bersama, seperti festival seni atau bazar.
4	Penguatan kerja sama lintas agama.	Mengadakan bakti sosial, donor darah, atau kegiatan kebersihan lingkungan yang melibatkan semua agama.
		Membangun jaringan pemuda lintas agama untuk mempromosikan toleransi dan mengurangi stereotip negatif.
5	Pemanfaatan teknologi dan media dalam kampanye toleransi.	Mengembangkan konten digital seperti video, artikel, dan infografis yang mempromosikan toleransi dan kerukunan.
6	Peningkatan upaya preventif (pencegahan dini tindak kriminalitas).	Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum dan kampanye anti-kriminalitas serta sosialisasi kebijakan keamanan.
		Meningkatkan keamanan publik dengan menempatkan CCTV di titik rawan gangguan tramtibum dan optimalisasi peran Satpol PP dan Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan.
7	Penegakan peraturan yang tegas dan adil.	Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan memperkuat koordinasi dengan APH untuk penegakan peraturan yang cepat dan transparan.
8	Penerapan teknologi dalam pengawasan ketentraman dan ketertiban.	Optimalisasi aplikasi layanan pengaduan masyarakat berbasis online untuk laporan cepat gangguan tramtibum.
9	Peningkatan kerjasama program deradikalisasi dan pencegahan kejahatan berbasis ideologi.	Meningkatkan kolaborasi dengan tokoh agama dan masyarakat dalam menangkal paham yang dapat memicu kriminalitas.
10	Peningkatan kesadaran hukum	Meningkatkan kampanye publik tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan di berbagai sektor (lalu lintas, pajak, lingkungan, dll).

Strategi		Arah Kebijakan
11	Transparansi dan akses informasi yang mudah	Penyediaan layanan informasi online dan hotline untuk konsultasi terkait peraturan.
12	Penguatan peran tokoh masyarakat dan agama	Meningkatkan pelibatan tokoh agama dan masyarakat dalam menyampaikan pentingnya kepatuhan hukum melalui ceramah dan kegiatan sosial.
		Meningkatkan pemberdayaan komunitas untuk menjadi agen perubahan dalam menegakkan aturan di lingkungan sekitar.
13	Kolaborasi dengan aparat penegak hukum	Meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk bersikap tegas tetapi tetap humanis.
		Meningkatkan koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait dalam menindak pelanggaran.
14	Pemberian insentif bagi masyarakat yang taat aturan	Penghargaan bagi warga yang taat pajak, lalu lintas, dan peraturan lingkungan.
15	Promosi budaya kepatuhan sebagai identitas sosial	Mengasosiasikan kepatuhan sebagai bagian dari kebanggaan sosial dengan menetapkan identitas seperti “Kampung Tertib” atau “Zona Patuh” di tingkat RT/RW/Desa sebagai contoh kawasan yang taat hukum.
16	Pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.	Meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan dan peluang ekonomi serta kesetaraan upah.
Misi 4: Menjadi Daerah yang Terdepan		
1	Peningkatan transparansi dan keterbukaan informasi publik	Penguatan digitalisasi layanan publik.
		Meningkatkan keterbukaan data dan akuntabilitas terkait kebijakan daerah anggaran.
		Meningkatkan fungsi pengawasan internal dan mendorong peran media dalam transparansi kebijakan.
		Menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses untuk laporan penyimpangan.
2	Penguatan reformasi birokrasi, akuntabilitas dan penegakan hukum	Reformasi birokrasi yang berintegritas melalui penerapan sistem meritokrasi dan kewajiban melaporkan harta kekayaan bagi pejabat publik secara berkala sesuai aturan yang berlaku.
		Penyederhanaan birokrasi dan regulasi.
		Meningkatkan profesionalisme asn dan pengembangan kompetensi.
3	Peningkatan sistem pengawasan internal dan eksternal	Penguatan peran Inspektorat Daerah dalam audit keuangan dan kinerja instansi.
		Meningkatkan sinergi antara BPK, KPK, dan aparat penegak hukum untuk memberantas penyalahgunaan wewenang.
4	Peningkatan partisipasi publik dalam pemerintahan	Meningkatkan efektifitas keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan.

Strategi		Arah Kebijakan
		Kolaborasi dengan LSM, akademisi, dan dunia usaha dalam monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
		Mengoptimalkan istem survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah secara berkala.
5	Perluasan akses internet dan jaringan telekomunikasi yang merata dan berkualitas.	Penyediaan Wi-Fi gratis di fasilitas publik seperti sekolah, kantor desa, dan ruang terbuka hijau.
6	Digitalisasi layanan publik dan *smart government*.	Memperkuat implementasi e-Government untuk mempercepat layanan publik dan administrasi pemerintahan.
7	Pengembangan pusat data dalam mendukung penguatan SDI.	Memperkuat penerapan Satu data Indonesia (SDI) untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data pemerintahan.
		Menyiapkan dan membangun pusat data terintegrasi untuk mengoptimalkan manajemen informasi antarinstansi.
		Memperkuat cybersecurity untuk mencegah serangan siber dan kebocoran data.
8	Penguatan sumber daya manusia dan literasi digital.	Mengintegrasikan kurikulum berbasis digital di sekolah.
		Meningkatkan pelatihan bagi UMKM dan pekerja agar dapat memanfaatkan teknologi dalam operasional bisnis.
		Meningkatkan program sertifikasi dan pelatihan digital bagi ASN untuk meningkatkan layanan publik berbasis teknologi.
		Meningkatkan edukasi masyarakat tentang keamanan data pribadi, hoaks, dan etika penggunaan internet.
		Mendorong budaya digital yang produktif dan inovatif di lingkungan Masyarakat.
9	Peningkatan ekosistem digital, inovasi dan riset teknologi.	Meningkatkan program pendampingan bagi UMKM untuk masuk ke ekosistem digital (*e-commerce*, *fintech*, dll).
		Memperkuat digitalisasi sektor strategis seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan transportasi.
		Meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pengembangan dan implementasi teknologi digital.
10	Reformasi regulasi untuk mendukung transformasi digital.	Menyusun regulasi yang fleksibel untuk mendukung percepatan penerapan teknologi digital.
		Menjadikan transformasi digital sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Sumber: hasil analisis, 2025

Dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Tabalong berdasarkan pada peta jalan riset dan inovasi daerah. Peta jalan riset dan inovasi daerah dirancang untuk dijalankan selama lima tahun ke depan dan disusun sebagai arah operasional pengembangan ekosistem riset dan inovasi yang mendukung transformasi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tabalong. Dokumen ini menjadi landasan strategis dalam mengintegrasikan riset dan inovasi ke dalam berbagai sektor pembangunan, khususnya dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) serta penanganan isu-isu prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan berbasis bukti, riset dan inovasi diarahkan untuk mempercepat peningkatan daya saing produk unggulan daerah, memperkuat ketahanan ekonomi lokal, serta menjawab tantangan struktural seperti kesenjangan kesejahteraan dan dominasi sektor ekstraktif.

Transformasi menuju struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan (khususnya berbasis sumber daya agraris), menjadi salah satu orientasi utama dalam peta jalan ini. Peta jalan ini tidak hanya menjadi acuan teknis bagi pelaksanaan program dan kegiatan riset dan inovasi, tetapi juga menjadi ruang kolaborasi bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk bersinergi dalam membangun ekosistem inovasi yang adaptif, inklusif, dan berdampak luas. Dengan adanya perencanaan yang terarah selama lima tahun ke depan, diharapkan riset dan inovasi dapat menjadi salah satu pengungkit utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, mandiri, dan berbasis potensi lokal. Langkah - langkah strategis dalam mengatasi permasalahan prioritas daerah di Kabupaten Tabalong dapat dilihat pada Tabel 3.6. Sedangkan Langkah – langkah strategis dalam upaya mengembangkan sektor atau produk unggulan daerah di Kabupaten tabalong dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.6
Langkah-Langkah Strategis Permasalahan Prioritas Daerah di Kabupaten Tabalong

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Prioritas Pembangunan ke-1: Belum optimalnya transformasi ekonomi dari sektor ekstraktif menuju pengembangan sektor agraris yang berkelanjutan						
1	**Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi pendukung pengurangan ketergantungan sektor pertambangan dan pengembangan ekonomi agraris	Penyusunan regulasi daerah yang mengatur target dan langkah pengurangan ketergantungan sektor pertambangan dan pengembangan ekonomi agraris berkelanjutan	Harmonisasi regulasi pusat dan daerah untuk memperkuat payung hukum transformasi ekonomi	Integrasi kebijakan riset dan inovasi teknologi agraris dalam regulasi	Pelibatan pemangku kepentingan dalam implementasi regulasi	Evaluasi keberlanjutan dan efektivitas regulasi
b	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data pemanfaatan sumber daya alam dan dampak sektor pertambangan terhadap lahan pertanian	Pengembangan dan integrasi sistem basis data dampak pertambangan terhadap lahan pertanian	Survei dan pemantauan rutin dampak lingkungan pertambangan melibatkan akademisi dan lembaga riset lokal	Pelatihan pengelolaan basis data untuk aparat daerah	Keterbukaan data dan kolaborasi antar lembaga	Optimalisasi dan pembaruan basis data secara berkala
c	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas riset untuk teknologi pertanian berkelanjutan dan rehabilitasi lahan bekas tambang	Pembangunan pusat riset teknologi pertanian berkelanjutan dengan sarana modern	Kolaborasi riset rehabilitasi lahan bekas tambang bersama perguruan tinggi dan pelaku usaha	Program riset terapan pengembangan teknologi pertanian ramah lingkungan	Penguatan kegiatan riset dan inovasi berbasis kondisi lokal	Evaluasi dan pengembangan fasilitas riset

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		menjadi lahan agraris					
d	Pengelolaan kebun raya daerah (jika ada)	Pengembangan kebun raya sebagai wahana riset konservasi dan pengembangan tanaman agraris	Perencanaan dan pembangunan kebun raya fokus konservasi komoditas unggulan	Pengembangan program riset dan edukasi di kebun raya bersama perguruan tinggi dan komunitas	Kemitraan pengelolaan dan pendanaan kebun raya dengan swasta dan organisasi lingkungan	Pengelolaan kebun raya berkelanjutan dan optimalisasi fungsi	Evaluasi kontribusi kebun raya terhadap riset dan edukasi
e	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran khusus riset teknologi agraris dan diversifikasi ekonomi dari sektor ekstraktif ke agraris	Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk riset teknologi pertanian berkelanjutan	Fasilitasi kolaborasi riset antara pemda, perguruan tinggi, dan lembaga riset	Integrasi hasil riset ke dalam program pembangunan ekonomi daerah	Penguatan program pendanaan riset dan inovasi agraris	Evaluasi efektivitas alokasi dan penggunaan anggaran
f	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pelatihan dan perlindungan hak kekayaan intelektual terkait inovasi teknologi pertanian	Pelatihan HAKI bagi peneliti, petani inovatif, dan pelaku teknologi pertanian	Fasilitasi pendaftaran hak cipta, paten, dan perlindungan varietas tanaman	Penyusunan panduan operasional perlindungan kekayaan intelektual sektor agraris	Pendampingan dan advokasi regulasi perlindungan HAKI	Evaluasi penerapan perlindungan HAKI
2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi riset antara pemda, perguruan tinggi, dan BRIN dalam inovasi agraris	Membangun kemitraan riset agraris melalui perjanjian kerja sama	Penyelenggaraan forum riset kolaboratif berkala	Program riset kolaboratif fokus inovasi teknologi pertanian berkelanjutan	Penguatan pemanfaatan hasil riset kolaboratif	Evaluasi dan pengembangan program kolaborasi
b	Penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan	Demplot dan fasilitas pengujian teknologi pertanian berkelanjutan dan	Pembangunan dan pengoperasian demplot pertanian berkelanjutan	Fasilitas pengujian dan evaluasi teknologi pertanian yang	Kolaborasi pengembangan dan pemanfaatan sarana riset	Integrasi sarana riset dalam program rehabilitasi lahan bekas tambang	Evaluasi pemanfaatan dan pengembangan sarana riset

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	kemampuan daerah	rehabilitasi lahan bekas tambang		dapat diakses peneliti dan petani			
3	**Kemitraan Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama multi-pihak dalam riset dan inovasi pengembangan ekonomi agraris dan pengurangan sektor pertambangan	Pembentukan forum kemitraan multi-pihak fokus riset dan inovasi agraris dan pengurangan pertambangan	Program kolaboratif pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha	Pelibatan komunitas lokal dan sektor swasta dalam pengembangan solusi inovatif	Mekanisme koordinasi dan monitoring hasil riset dan inovasi	Evaluasi efektivitas kemitraan dan tindak lanjut hasil riset
b	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi pertanian berkelanjutan dan praktik baik rehabilitasi lahan pasca tambang	Program pelatihan dan workshop teknologi pertanian dan rehabilitasi lahan	Kolaborasi penyebaran teknologi dan praktik terbaik melalui lembaga riset dan perguruan tinggi	Pendirian pusat diseminasi teknologi pertanian berkelanjutan	Penguatan kapasitas penyebaran inovasi dan edukasi lapangan	Evaluasi dampak dan pengembangan program difusi inovasi
c	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Peningkatan kapasitas pelaku usaha agraris dan UMKM berbasis teknologi pertanian	Pelatihan teknologi pertanian modern dengan integrasi teknis dan bisnis	Pengembangan modul pelatihan sesuai kebutuhan pelaku usaha	Kemitraan lembaga riset, pemerintah, dan pelaku usaha	Pelaksanaan program transfer ilmu dan praktik terbaik	Evaluasi efektivitas pelatihan dan pendampingan
4	**Budaya Riset dan Inovasi**						
a	Promosi dan kampanye inovasi	Kampanye dan sosialisasi tentang pentingnya transisi ke ekonomi agraris dan pengurangan sektor pertambangan	Kampanye edukatif untuk masyarakat, pelaku usaha, dan aparat pemerintah	Pemanfaatan media massa, sosial, dan forum komunitas untuk kampanye	Pelibatan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal sebagai agen perubahan	Penguatan jaringan kampanye dan evaluasi dampak kampanye	Pengembangan dan perluasan kampanye inovasi
b	Apresiasi prestasi inovasi	Kompetisi inovasi teknologi pertanian dan	Pelaksanaan kompetisi tahunan inovasi	Pemberian penghargaan dan insentif bagi	Promosi hasil inovasi melalui	Penguatan dukungan dan pengembangan	Evaluasi dan perluasan kompetisi

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pengelolaan lahan agraris	teknologi pertanian dan pengelolaan lahan	pemenang kompetisi	media lokal dan nasional	inovasi pasca kompetisi	
c	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Inkubasi dan mentoring usaha agraris berbasis riset dan rehabilitasi lahan	Pengembangan program inkubasi usaha agraris berbasis riset	Jaringan mentoring dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan praktisi agribisnis	Pendampingan pelaku usaha dan kolaborasi akses pasar	Perluasan program inkubasi dan mentoring	Evaluasi hasil inkubasi dan pengembangan usaha pemula
d	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kodifikasi dan perlindungan teknologi pertanian dan kearifan lokal untuk ekonomi agraris	Inventarisasi teknologi dan kearifan lokal strategis	Pengembangan regulasi dan mekanisme perlindungan kekayaan intelektual	Sosialisasi dan pelatihan pemanfaatan teknologi tradisional	Pendampingan perlindungan dan pengembangan teknologi lokal	Evaluasi perlindungan dan pemanfaatan teknologi kearifan lokal
5	**Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Inisiatif riset untuk diversifikasi ekonomi agraris dan pengurangan ketergantungan pertambangan	Kolaborasi pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga riset identifikasi program riset prioritas	Penyusunan peta jalan riset dan inovasi mendukung diversifikasi agraris	Alokasi sumber daya dan anggaran untuk riset prioritas	Implementasi riset prioritas dan monitoring	Evaluasi dan pembaruan program riset
b	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Klaster inovasi produk agraris dan rehabilitasi lahan bekas tambang	Pembentukan klaster inovasi agraris dan rehabilitasi lahan multi-pihak	Penyusunan tata kelola kelembagaan klaster sebagai pusat riset dan hilirisasi produk	Integrasi klaster dengan program rehabilitasi dan pembangunan ekonomi lokal	Pengembangan kapasitas dan jaringan klaster	Evaluasi efektivitas klaster dan ekspansi
c	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan pengurangan ketergantungan pertambangan sesuai komitmen	Pembentukan forum koordinasi kebijakan pusat-daerah pengurangan ketergantungan	Harmonisasi regulasi transisi ekonomi berkelanjutan sektor agraris	Pertukaran data dan informasi kebijakan pusat-daerah	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan	Penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		nasional dan internasional	pertambangan dan pengembangan agraris				
6	**Penyelarasan dengan Perkembangan Global**						
a	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Implementasi komitmen global pengembangan ekonomi agraris dan pengurangan dampak lingkungan sektor ekstraktif	Sosialisasi dan pelatihan komitmen global dan praktik terbaik ekonomi agraris berkelanjutan	Integrasi standar internasional dalam kebijakan dan program pembangunan daerah	Kerjasama dengan lembaga internasional untuk transfer teknologi	Pendampingan pelaksanaan komitmen lingkungan	Evaluasi implementasi dan peningkatan kapasitas adaptasi isu global
b	Penguatan kerjasama internasional	Kolaborasi riset dan inovasi teknologi agraris dengan institusi internasional dan perusahaan multinasional	Membangun jejaring dan kemitraan strategis dengan institusi riset internasional dan perusahaan multinasional	Fasilitasi pertukaran pengetahuan, pelatihan, dan transfer teknologi	Integrasi hasil kolaborasi internasional dalam program inovasi agraris	Pengembangan kapasitas kolaborasi internasional	Evaluasi dan perluasan kerjasama internasional
	Prioritas Pembangunan ke-2: Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat						
1	**Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi dan program riset yang fokus pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran	Penyusunan regulasi riset untuk solusi kemiskinan dan pengangguran	Implementasi regulasi melalui program riset tematik	Monitoring efektivitas regulasi dan program	Revisi regulasi berdasarkan hasil evaluasi	Penguatan regulasi berbasis hasil riset dan best practices

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
b	Penataan basis data riset dan inovasi	Data terintegrasi terkait tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di daerah	Integrasi data awal ke dalam Satu Data Indonesia	Verifikasi dan validasi data terpadu	Pelatihan pengguna data dan penguatan analisis	Optimalisasi pemanfaatan data dalam perencanaan	Evaluasi sistem dan pembaruan data berkala
c	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas riset untuk inovasi di bidang ekonomi inklusif dan stabilisasi harga daerah	Identifikasi kebutuhan fasilitas dan perencanaan pembangunan	Pembangunan fasilitas riset inklusif	Pengoperasian awal dan uji coba riset	Integrasi hasil riset ke dalam program daerah	Replikasi dan perluasan dampak inovasi riset
d	Pengelolaan kebun raya daerah (jika ada)	Pengembangan kebun raya sebagai pusat inovasi pertanian untuk pemberdayaan ekonomi lokal	Penyusunan desain kebun raya berbasis potensi lokal	Pembangunan awal dan pengembangan kemitraan	Pengembangan program riset, pelatihan, dan edukasi	Penguatan fungsi kebun raya sebagai pusat inovasi dan agrowisata	Integrasi penuh kebun raya ke dalam program pemberdayaan ekonomi
e	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran khusus riset untuk penanganan kemiskinan dan pengangguran pasca-pandemi	Advokasi dan penganggaran riset sosial-ekonomi	Integrasi riset ke dalam program penanggulangan kemiskinan	Monitoring pemanfaatan hasil riset dalam program	Evaluasi efektivitas riset terhadap isu sosial-ekonomi	Replikasi program riset berbasis hasil Monev
f	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Perlindungan inovasi yang berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan	Penyusunan regulasi perlindungan inovasi lokal	Sosialisasi dan pelatihan HAKI kepada pelaku usaha	Fasilitasi pendaftaran HAKI untuk inovasi sosial	Pendampingan dan advokasi perlindungan HAKI	Penguatan jejaring perlindungan KI dengan lembaga terkait
2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi**						

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
a	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi riset dengan instansi ketenagakerjaan, sosial, dan ekonomi untuk menangani pengangguran dan kemiskinan	Pemetaan potensi kolaborasi dan pembentukan jejaring	Implementasi riset kolaboratif bidang sosial-ekonomi	Evaluasi dan integrasi hasil riset ke kebijakan	Forum rutin koordinasi hasil riset dan program	Penyusunan roadmap kolaborasi berkelanjutan
b	Penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana inovasi yang mendukung pelatihan kerja dan usaha mikro sebagai solusi pengangguran	Penyusunan rencana penyediaan sarana dan kebutuhan pelatihan	Pembangunan dan penyediaan sarana workshop mini	Pelatihan instruktur dan penguatan kapasitas lokal	Digitalisasi materi dan penyebaran akses pelatihan	Penguatan jejaring pelatihan kerja skala daerah
3	**Kemitraan Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan dengan perguruan tinggi dan sektor swasta untuk inovasi penyerapan tenaga kerja	Pemetaan mitra strategis dan kesepakatan awal kerja sama	Implementasi program riset bersama untuk penyerapan tenaga kerja	Pengembangan teknologi penyerapan tenaga kerja	Evaluasi dan penguatan model bisnis berbasis riset	Perluasan kemitraan dan adopsi inovasi kerja lokal
b	Peningkatan difusi inovasi	Diseminasi teknologi tepat guna bagi UMKM dan pelaku usaha mikro agar mampu bertahan dan berkembang	Pelatihan awal teknologi tepat guna bagi pelaku UMKM	Kompetisi dan promosi inovasi TTG daerah	Pengembangan jaringan diseminasi dan informasi teknologi	Peningkatan kapasitas lembaga penyuluh dan pendamping	Evaluasi adopsi TTG dan penguatan diseminasi daring
c	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Program pelatihan dan transfer pengetahuan untuk pengelolaan usaha dan pengendalian inflasi lokal	Penyusunan program pelatihan berbasis riset ekonomi lokal	Pelatihan tematik dan forum praktik baik pelaku usaha	Peningkatan peran akademisi dalam diseminasi	Dokumentasi dan publikasi praktik usaha lokal sukses	Penguatan integrasi materi pelatihan ke dalam kebijakan

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
4	**Budaya Riset dan Inovasi**						
a	Promosi dan kampanye inovasi	Kampanye inovasi untuk pengembangan usaha dan pengurangan ketimpangan ekonomi	Perancangan dan penyusunan materi kampanye inovasi	Pelaksanaan kampanye melalui media digital dan konvensional	Workshop inovasi dan pengembangan usaha	Monitoring efektivitas kampanye dan replikasi konten	Penguatan jejaring kampanye inovasi lintas sektor
b	Apresiasi prestasi inovasi	Penghargaan inovasi yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran	Perumusan indikator dan mekanisme penghargaan	Sosialisasi dan pelaksanaan kompetisi inovasi sosial-ekonomi	Evaluasi dampak dan integrasi ke kebijakan insentif	Replikasi program penghargaan berbasis dampak	Pelibatan sektor swasta dalam pemberian penghargaan inovasi
c	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Inkubasi usaha pemula dari kelompok rentan yang terdampak pandemi dan inflasi	Identifikasi kelompok rentan dan kebutuhan inkubasi	Pelaksanaan inkubasi awal dan pendampingan teknis	Akses permodalan dan kemitraan untuk usaha pemula	Evaluasi keberlanjutan dan integrasi dengan perlindungan sosial	Ekspansi program inkubasi ke wilayah baru
d	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pelestarian teknologi tradisional dan pengetahuan lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat	Inventarisasi teknologi dan pengetahuan lokal berbasis ekonomi	Pelatihan pemanfaatan pengetahuan lokal untuk usaha	Perlindungan HKI atas teknologi dan produk lokal	Promosi produk berbasis kearifan lokal	Integrasi pengetahuan lokal ke dalam klaster inovasi daerah
5	**Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Program riset prioritas pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan	Penetapan program riset prioritas sosial-ekonomi	Penguatan kapasitas lembaga riset lokal	Riset pemantauan dan analisis ekonomi daerah	Diseminasi hasil dan integrasi ke kebijakan	Evaluasi dan pengembangan riset lanjutan pasca-pandemi

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		masyarakat pasca-pandemi					
b	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Klaster inovasi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan ketimpangan pendapatan	Pemetaan dan revitalisasi klaster seperti program Mesjid Berdaya	Penguatan kapasitas pelaku klaster dan pelatihan teknis	Pengembangan model bisnis dan pemasaran produk klaster	Fasilitasi akses pasar dan kemitraan usaha	Evaluasi dan replikasi klaster inovasi di wilayah lain
c	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan pengurangan kemiskinan dan pengangguran antar tingkat pemerintahan	Forum koordinasi kebijakan pusat-daerah	Penyelarasan program lintas level pemerintahan	Integrasi perencanaan berbasis data terpadu	Evaluasi bersama kebijakan pengentasan kemiskinan	Revisi dan penguatan koordinasi antar level
6	**Penyelarasan dengan Perkembangan Global**						
a	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Adopsi standar SDGs terkait pengentasan kemiskinan dan stabilitas ekonomi daerah	Sosialisasi standar SDGs dan pelatihan pemangku kepentingan	Integrasi SDGs dalam program riset dan inovasi daerah	Kolaborasi internasional dalam pencapaian target SDGs	Evaluasi kemajuan indikator SDGs di daerah	Penguatan kebijakan daerah berbasis standar global
b	Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama internasional untuk riset inovasi pengendalian inflasi dan pengembangan ekonomi inklusif	Penjajakan jejaring dan kerja sama sister city	Implementasi kolaborasi riset internasional	Transfer teknologi dan pelatihan dari mitra global	Integrasi hasil kerja sama ke program daerah	Evaluasi dan perluasan kemitraan internasional

Tabel 3.7
Langkah-Langkah Strategis Pengembangan Sektor/Produk Unggulan Daerah di Kabupaten Tabalong

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	PUD ke-1: Pengembangan PUD Sektor Pertanian (Karet, Hortikultura, dan Padi)						
1	**Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mendukung pengembangan riset karet, hortikultura, dan padi	Menyusun rancangan regulasi daerah yang mendukung riset komoditas unggulan pertanian	Menetapkan dan mensosialisasikan regulasi; mulai mendorong kolaborasi lintas OPD, lembaga riset, perguruan tinggi, pelaku usaha	Mengembangkan mekanisme pendanaan dan insentif riset daerah; memperkuat kolaborasi dan pelaksanaan riset berbasis kebutuhan lapangan	Evaluasi dan revisi regulasi berdasarkan hasil pelaksanaan; peningkatan insentif dan pendanaan riset	Regulasi sudah efektif dan terintegrasi dalam program pembangunan; kolaborasi riset dan pendanaan berkelanjutan terjaga
b	Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya aplikasi/basis data UMKM, tenaga kerja, inventor komoditas karet, hortikultura, dan padi	Mengembangkan sistem basis data terpadu mengikuti prinsip Satu Data Indonesia; mulai integrasi data lintas perangkat daerah	Melakukan pemutakhiran data secara berkala; membuat dashboard digital yang dapat diakses OPD, lembaga riset, pelaku usaha	Menyusun SOP pengumpulan, pemrosesan, pemanfaatan data; mendorong penggunaan aplikasi digital untuk pencatatan dan monitoring data komoditas unggulan	Optimalisasi pemanfaatan basis data untuk perencanaan dan pengembangan program riset inovasi	Basis data terintegrasi berjalan efektif; data digunakan secara optimal oleh semua pemangku kepentingan
c	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pusat inovasi pertanian (karet, hortikultura, padi); Inkubator bisnis; Ruang publik kreatif	Mulai pembangunan atau pengembangan pusat inovasi pertanian di lokasi strategis selain BPP	Mendirikan inkubator bisnis pertanian untuk UMKM dan startup berbasis komoditas unggulan	Mengoptimalkan ruang publik kreatif sebagai pusat kolaborasi dan promosi produk pertanian	Memperluas dan meningkatkan fasilitas pusat inovasi dan inkubator	Infrastruktur riset dan inovasi sudah mapan dan berfungsi optimal mendukung pengembangan PUD

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
d	Pengelolaan kebun raya daerah (jika ada)	Kebun raya sebagai wahana riset tanaman hortikultura dan padi	Identifikasi lokasi potensial alternatif untuk pembangunan kebun raya	Penyusunan model kelembagaan dan skema kemitraan pengelolaan kebun raya	Mulai pembangunan dan pengembangan kebun raya sebagai sarana riset dan edukasi	Pengelolaan kebun raya berjalan sesuai model kelembagaan, fungsi edukasi dan konservasi aktif	Kebun raya berfungsi sebagai pusat riset, edukasi, konservasi plasma nutfah, dan showcase teknologi pertanian
e	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran APBD dan insentif riset komoditas pertanian	Mengalokasikan anggaran khusus APBD untuk riset dan inovasi komoditas unggulan secara berkelanjutan	Menyusun mekanisme insentif riset yang transparan dan mudah diakses	Mengoptimalkan kemitraan swasta dan program CSR sebagai sumber co-funding	Sistem monitoring dan evaluasi pemanfaatan anggaran riset diterapkan	Anggaran riset dan insentif berjalan efektif dan berkelanjutan
f	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pelatihan HKI dan fasilitas perlindungan untuk inovasi pertanian	Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi HKI bagi pelaku inovasi pertanian	Memperluas akses dan fasilitas pendaftaran HKI untuk inovasi pertanian	Membangun layanan pendampingan dan konsultasi HKI tingkat daerah	Peningkatan jumlah inovasi pertanian yang terlindungi HKI	Sistem perlindungan HKI berjalan optimal dan mendukung komersialisasi inovasi
2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerjasama dengan perguruan tinggi, BRIN, dan pelaku usaha di sektor pertanian	Mendorong pembentukan kemitraan formal antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, BRIN, dan pelaku usaha	Menyelenggarakan forum kolaborasi riset-inovasi	Mengembangkan mekanisme insentif bagi pelaku usaha yang aktif berpartisipasi	Memperluas dan memperdalam kerjasama lintas pemangku kepentingan	Kerjasama riset dan inovasi berjalan sinergis dan berdampak nyata
b	Penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan	Demplot pertanian; Website jaringan inovasi; Pengembangan produk unggulan	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas demplot pertanian	Membangun dan mengembangkan website jaringan inovasi sebagai	Mengoptimalkan pemanfaatan sarana riset untuk pengembangan produk unggulan	Penyempurnaan sarana pendukung riset sesuai kebutuhan dan	Sarana pendukung riset berfungsi optimal mendukung inovasi dan

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	kemampuan daerah			platform kolaborasi		kemampuan daerah	pengembangan produk
3	**Kemitraan Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama riset antara lembaga penghasil dan pengguna inovasi di sektor pertanian	Mendorong kolaborasi pelaksanaan riset dengan perguruan tinggi dan lembaga riset	Memperkuat jejaring dan mekanisme koordinasi antara lembaga penghasil dan pengguna inovasi	Menyelenggarakan program riset terapan dan adopsi teknologi bersama	Membuat platform informasi dan koordinasi antar lembaga	Kemitraan antar lembaga berjalan efektif dan berkelanjutan
b	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi dan pembelajaran inovasi untuk pelaku usaha pertanian	Memperluas dan meningkatkan kualitas bimtek serta pelatihan praktik inovasi	Mendorong program regenerasi pelaku usaha pertanian melalui pembinaan kader	Mengembangkan program hilirisasi produk pertanian melibatkan pelaku usaha dan Bumdes	Menguatkan pengawasan mutu dan penanganan penyakit tanaman melalui kolaborasi riset dan pelatihan teknis	Difusi inovasi berjalan efektif dengan dampak signifikan pada pelaku usaha
c	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi dan peningkatan kapasitas teknologi untuk pelaku UMKM sektor pertanian	Mengintensifkan program sosialisasi dan pelatihan teknologi tepat guna bagi pelaku UMKM	Mendorong adopsi praktik baik hasil riset melalui pendampingan teknis dan penyebaran informasi digital	Memfasilitasi akses pasar dan promosi produk lokal hasil inovasi	Peningkatan kapasitas UMKM dalam teknologi dan pemasaran produk inovasi	Praktik baik dan hasil riset tersebar luas dan diadopsi secara optimal
4	**Budaya Riset dan Inovasi**						
a	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi riset pertanian melalui media, sekolah, dan FGD pemuda	Mengembangkan kampanye promosi inovasi pertanian terpadu melalui media massa dan media sosial	Melaksanakan kegiatan di sekolah dan komunitas pemuda	Meningkatkan dukungan terhadap komunitas petani milenial dan pelaku usaha muda	Mengoptimalkan sinergi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta	Promosi dan kampanye inovasi berjalan luas dan berkelanjutan
b	Apresiasi prestasi inovasi	Lomba inovasi untuk pelajar,	Memperluas penyelenggaraan	Mendorong partisipasi aktif	Menguatkan kelembagaan	Mengintegrasikan apresiasi inovasi	Apresiasi inovasi menjadi motivasi

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		masyarakat, dan perangkat daerah di bidang pertanian	lomba inovasi dan apresiasi petani berprestasi secara rutin	pelajar, masyarakat, perangkat daerah	ekonomi petani melalui pendampingan dan pengembangan kapasitas	dalam program pengembangan pertanian daerah	dan pemicu peningkatan kualitas produk
c	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Pelatihan, mentoring, dan inkubasi UMKM bidang karet, hortikultura, dan padi	Menetapkan anggaran khusus pelatihan, mentoring, dan inkubasi UMKM	Mengembangkan program inkubasi bisnis berbasis riset bersama perguruan tinggi dan lembaga riset	Mendorong kolaborasi pelaku usaha pemula, pemerintah, dan lembaga riset	Menyediakan fasilitasi pendampingan teknis dan akses pasar bagi UMKM hasil inkubasi	Perusahaan pemula berbasis riset tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing
d	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kodifikasi teknologi/kearifan lokal pertanian dan usulan indikasi geografis	Mempercepat proses pengajuan dan penerbitan perlindungan HAKI berbasis kearifan lokal	Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan komunitas lokal dalam pengelolaan kekayaan intelektual	Mendorong kolaborasi pemerintah daerah, lembaga riset, dan pelaku usaha	Melakukan sosialisasi luas mengenai manfaat dan prosedur perlindungan indikasi geografis	Sistem perlindungan teknologi/kearifan lokal berjalan efektif dan diterima luas
5	**Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Prakarsa riset untuk pengembangan karet, hortikultura, dan padi sebagai produk unggulan	Mendorong pelaksanaan riset terapan fokus perbaikan mutu produk dan inovasi pemasaran	Menyelaraskan agenda riset dengan kebutuhan pasar dan potensi daerah melalui kolaborasi	Mengalokasikan anggaran riset memadai untuk pengembangan produk dan strategi pemasaran berbasis riset inovatif	Memfasilitasi pelatihan dan transfer teknologi kepada pelaku usaha	Riset dan inovasi berdasarkan kebutuhan daerah terintegrasi dan berdampak nyata
b	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan klaster inovasi komoditas pertanian unggulan	Membentuk klaster inovasi komoditas pertanian unggulan melibatkan OPD, perguruan tinggi,	Menyusun mekanisme kerja dan kelembagaan klaster sebagai wadah kolaborasi	Mendorong integrasi klaster inovasi dengan program pengembangan	Memperkuat peran klaster dalam pengembangan	Klaster inovasi berfungsi optimal sebagai pusat pengembangan

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			lembaga riset, pelaku usaha		kawasan, inkubasi bisnis, dan kemitraan strategis	komoditas dan hilirisasi	dan promosi produk unggulan
c	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Implementasi kebijakan pusat terkait riset pertanian di daerah	Memperluas cakupan RPKP mencakup lebih banyak desa berpotensi pertanian dan perikanan sesuai kearifan lokal dan topografi	Meningkatkan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah untuk pengembangan kawasan perdesaan	Mendorong integrasi program riset dan inovasi meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas	Memperkuat kapasitas SDM dan kelembagaan di desa mendukung penerapan teknologi dan pengembangan komoditas baru	Kebijakan pusat dan daerah selaras, mendukung pengembangan riset dan inovasi pertanian secara berkelanjutan
6	**Penyelarasan dengan Perkembangan Global**						
a	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi produk pertanian ramah lingkungan dan pelatihan terkait	Menyusun standar produk pertanian ramah lingkungan sesuai regulasi internasional dan kearifan lokal	Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi penerapan standar ramah lingkungan	Mendorong kolaborasi riset dan perguruan tinggi untuk pengembangan teknologi ramah lingkungan	Mengintegrasikan standar ramah lingkungan dalam program pengembangan kawasan dan penguatan ekosistem riset	Standarisasi produk dan pelatihan ramah lingkungan berjalan efektif dan berdampak pada produk unggulan
b	Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama riset dan bisnis multinasional di sektor pertanian	Membangun jejaring dan kemitraan dengan lembaga riset, perusahaan, dan investor multinasional	Menyelenggarakan forum dan fasilitasi pertemuan pelaku usaha lokal dengan mitra internasional	Mendorong adaptasi dan adopsi teknologi serta praktik terbaik dari kerjasama internasional	Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM untuk mengelola dan memanfaatkan kerjasama internasional	Kerjasama internasional berjalan optimal mendukung pengembangan produk unggulan dan ekosistem riset daerah
	PUD ke-2: Pengembangan PUD Sektor Perikanan						
1	**Kebijakan dan Infrastruktur**						

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Riset dan Inovasi di Daerah						
a	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi Perda/Perkada yang mendukung riset budidaya ikan, pengelolaan sumber daya laut, pengembangan teknologi alat tangkap, dan inovasi produk hasil perikanan	Memperkuat pelaksanaan dan pengawasan perda perikanan tangkap serta menyusun perda pengelolaan pembuangan limbah	Meningkatkan kapasitas aparat pengawas dan penegak hukum dalam pengawasan illegal fishing dan limbah	Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan regulasi yang terpadu	Melakukan evaluasi dan revisi regulasi berdasar hasil pengawasan dan dinamika lapangan	Memperkuat penegakan hukum dan penyempurnaan regulasi berdasarkan perkembangan kebutuhan daerah
b	Penataan basis data riset dan inovasi	Digitalisasi data produksi perikanan, inventarisasi pelaku usaha perikanan, data inovator alat tangkap dan pengolahan hasil laut, basis data investasi sektor perikanan	Mengintegrasikan data sektoral ke sistem basis data terpadu yang mudah diakses	Mengembangkan aplikasi dan platform digital pemantauan produksi dan inovasi	Melakukan pemutakhiran data secara berkala dan peningkatan fitur aplikasi	Mendorong pemanfaatan data untuk diversifikasi produksi perikanan	Menjamin keberlanjutan dan integrasi data untuk pengembangan potensi baru dan pasar
c	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pusat inovasi perikanan, fasilitas inkubasi bisnis perikanan, laboratorium riset ikan dan pengolahan hasil laut, ruang publik kreatif untuk pengembangan teknologi perikanan	Meningkatkan sarana Balai Benih Ikan (BBI) dan laboratorium riset	Mengembangkan fasilitas inkubasi bisnis dan ruang publik kreatif	Mengoptimalkan kolaborasi inovator dan pelaku usaha melalui ruang publik kreatif	Memperkuat akses pasar produk perikanan melalui kemitraan	Meninjau dan memperluas pengembangan sarana riset dan inkubasi sesuai kebutuhan dan teknologi terkini

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
d	Pengelolaan kebun raya daerah (jika ada)	Pengembangan kebun raya khusus sumber daya hayati laut (misal taman ekosistem pesisir dan laut sebagai wahana riset)	Menyusun rencana dan konsep pengembangan wahana riset dan konservasi laut	Membangun fasilitas dan infrastruktur pendukung wahana riset laut	Menggalang kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan masyarakat	Melaksanakan sosialisasi dan edukasi pelestarian ekosistem laut	Memastikan pengelolaan wahana riset berkelanjutan dan terintegrasi dengan program riset lain
e	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi APBD untuk pengembangan riset perikanan, dana insentif bagi inovator alat tangkap ramah lingkungan dan teknologi pengolahan ikan	Meningkatkan alokasi APBD khusus untuk riset pengayaan pakan lokal dan teknologi ramah lingkungan	Menyediakan dana insentif bagi inovator alat tangkap dan pengolahan hasil perikanan	Mendorong kolaborasi pendanaan antara pemerintah, lembaga riset, dan pelaku usaha	Mengembangkan mekanisme pendanaan inovasi yang transparan dan berkelanjutan	Melakukan evaluasi efektivitas alokasi anggaran dan pengembangan skema insentif yang optimal
f	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pelatihan hak paten teknologi alat tangkap inovatif dan produk olahan ikan khas daerah, fasilitasi pendaftaran merek dagang dan hak cipta	Menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi terkait hak paten, hak cipta, dan pendaftaran merek dagang	Memfasilitasi proses pendaftaran kekayaan intelektual	Membangun kemitraan dengan lembaga terkait untuk perlindungan kekayaan intelektual	Meningkatkan akses dan layanan pendampingan perlindungan HKI di tingkat daerah	Meninjau dan memperluas cakupan perlindungan HKI dan advokasi bagi pelaku inovasi
2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan	Kerjasama pemda dengan perguruan tinggi perikanan, BRIN, asosiasi nelayan dan	Membangun kemitraan formal dengan asosiasi nelayan dan pelaku usaha budidaya ikan	Mengintensifkan koordinasi dan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, BRIN, dan	Menyelenggarakan forum komunikasi rutin antara pemangku kepentingan	Mengintegrasikan hasil kolaborasi dalam program pembangunan perikanan	Menguatkan jejaring dan memperluas kolaborasi di

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pemangku kepentingan	pelaku usaha budidaya ikan, lembaga konservasi laut		lembaga konservasi			tingkat regional dan internasional
b	Penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Demplot budidaya ikan unggulan, fasilitas uji coba teknologi alat tangkap ramah lingkungan, website pusat informasi dan inovasi perikanan daerah	Mengembangkan demplot budidaya ikan unggulan sesuai karakteristik daerah	Meningkatkan fasilitas uji coba teknologi alat tangkap ramah lingkungan	Mengoptimalkan website pusat informasi dan inovasi sebagai media edukasi dan promosi	Mendorong integrasi sarana pendukung dengan pelaku usaha dan lembaga riset	Menilai dan menyesuaikan sarana pendukung sesuai kebutuhan perkembangan teknologi dan pasar
3	**Kemitraan Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Sinergi riset antara lembaga riset, asosiasi nelayan, koperasi budidaya ikan, dan pelaku usaha pengolahan hasil laut	Mengembangkan jejaring kemitraan dengan lembaga riset, asosiasi nelayan, koperasi, dan pelaku usaha	Mendorong kolaborasi riset dan inovasi melalui program bersama	Menyelenggarakan forum komunikasi dan koordinasi rutin antar mitra	Menguatkan sinergi dan mengatasi kendala secara bersama	Memperluas jaringan kemitraan dan kolaborasi di tingkat nasional dan internasional
b	Peningkatan difusi inovasi	Program pelatihan teknologi budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan pemasaran produk perikanan kepada masyarakat dan pelaku usaha	Mengembangkan program pelatihan terpadu untuk subsektor perikanan	Memanfaatkan platform digital sebagai media pembelajaran dan informasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan melalui kerja sama perguruan tinggi dan sektor swasta	Memperluas cakupan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dan pelaku usaha	Menilai dampak pelatihan dan menyempurnakan metode difusi inovasi
c	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Pendampingan usaha budidaya dan pengolahan hasil laut berbasis teknologi tepat guna, penyebaran	Memperluas program pendampingan budidaya dan pengolahan hasil laut berbasis teknologi tepat guna	Mendorong adopsi prototipe alat tangkap efisien di kalangan pelaku usaha	Mendukung pengembangan dan produksi pakan lokal berkualitas	Memfasilitasi akses teknologi dan informasi terbaru bagi pelaku usaha	Mengintegrasikan praktik baik ke dalam kebijakan dan program pengembangan sektor perikanan

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		prototipe alat tangkap efisien			melalui riset dan inovasi		
4	**Budaya Riset dan Inovasi**						
a	Promosi dan kampanye inovasi	Kampanye inovasi alat tangkap ramah lingkungan dan produk olahan hasil laut, edukasi riset di sekolah dan komunitas nelayan	Mengembangkan kampanye inovasi produk perikanan kreatif dan menarik	Memperluas edukasi riset di sekolah dan komunitas nelayan secara interaktif	Mendukung pelatihan dan bantuan teknis bagi pembudidaya dengan modal minimal	Mendorong distribusi bibit unggul dari penangkaran lokal	Memfasilitasi pemasaran produk inovatif hingga ke pasar luar daerah
b	Apresiasi prestasi inovasi	Kompetisi inovasi teknologi perikanan untuk pelajar, mahasiswa, dan masyarakat nelayan	Menyelenggarakan kompetisi inovasi teknologi perikanan rutin melibatkan pelajar, mahasiswa, dan nelayan	Memberikan apresiasi dan penghargaan untuk meningkatkan motivasi inovator	Mengintegrasikan hasil kompetisi dalam program pengembangan PUD sektor perikanan	Mendorong pelibatan peserta kompetisi dalam program riset dan inovasi	Menyebarluaskan hasil kompetisi untuk adopsi dan pengembangan lebih luas
c	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Inkubasi dan pelatihan wirausaha perikanan berbasis teknologi budidaya dan pengolahan hasil laut	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan wirausaha perikanan berbasis riset	Mengembangkan program inkubasi startup perikanan terintegrasi dengan pelatihan	Mendorong kemitraan dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta	Memfasilitasi akses pasar dan pendampingan untuk UMKM hasil inkubasi	Menilai keberlanjutan dan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset
d	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendokumentasian teknologi tradisional alat tangkap dan pengolahan ikan, pengusulan indikasi geografis produk perikanan khas daerah	Melakukan pendataan dan dokumentasi teknologi tradisional alat tangkap dan pengolahan ikan	Mengajukan perlindungan HAKI dan indikasi geografis untuk produk perikanan khas	Meningkatkan sosialisasi dan pendampingan mengenai perlindungan kekayaan intelektual	Memperkuat kolaborasi antara pemda, lembaga riset, dan pelaku usaha	Menjaga keberlanjutan perlindungan pengetahuan dan teknologi masyarakat
5	**Keterpaduan Riset dan**						

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Inovasi di Daerah						
a	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Inovasi pengelolaan sumber daya laut untuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk perikanan daerah	Mendorong proses sertifikasi halal dan izin edar produk perikanan unggulan daerah	Mengembangkan standar informasi nilai gizi produk perikanan sebagai bahan edukasi dan pemasaran	Mengintegrasikan riset dan inovasi dalam pengembangan produk perikanan sesuai kebutuhan pasar	Mengoptimalkan pelatihan dan transfer teknologi kepada pelaku usaha	Memastikan inovasi berkelanjutan dan beradaptasi dengan perubahan regulasi dan pasar
b	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan klaster inovasi budidaya ikan dan pengolahan hasil laut	Membentuk klaster inovasi budidaya ikan dan pengolahan hasil laut melibatkan berbagai pemangku kepentingan	Menyusun mekanisme kerja dan kelembagaan klaster formal sebagai wadah kolaborasi	Mendorong integrasi klaster inovasi dengan program pengembangan kawasan dan kemitraan strategis	Menguatkan fungsi klaster sebagai pusat riset, pengembangan, dan promosi produk unggulan	Memperluas cakupan dan dampak klaster inovasi di tingkat regional dan nasional
c	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan perikanan nasional dan daerah dalam pengembangan riset dan inovasi	Mengharmonisasikan kebijakan perikanan pusat dan daerah melalui koordinasi antar lembaga	Mendorong penerapan praktik budidaya ramah lingkungan sesuai standar nasional dan daerah	Memperkuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perikanan pendukung budidaya dan distribusi	Memantau implementasi kebijakan dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil evaluasi	Menjamin kesinambungan dan sinergi kebijakan pusat-daerah dalam pengembangan perikanan
6	**Penyelarasan dengan Perkembangan Global**						
a	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset	Pemahaman isu kelestarian sumber daya laut global, dampak perubahan iklim pada sektor perikanan	Mengintegrasikan isu perubahan iklim dan ketahanan pangan dalam perencanaan dan kebijakan sektor perikanan	Menyelenggarakan forum dan diskusi publik terkait dampak isu global terhadap sumber daya laut	Mendorong riset lokal untuk adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan	Meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan dalam menghadapi isu internasional	Mengukuhkan strategi jangka panjang pengelolaan isu internasional dalam sektor perikanan

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	dan inovasi di daerah						
b	Penguatan kerjasama internasional	Kolaborasi riset dan bisnis dengan lembaga riset perikanan dan perusahaan multinasional di bidang teknologi kelautan	Menjalin kerjasama riset dan bisnis dengan mitra internasional melalui forum dan jaringan riset global	Mendorong keterlibatan perguruan tinggi dan pelaku usaha lokal dalam kolaborasi internasional	Memfasilitasi pemanfaatan teknologi kelautan dari mitra internasional untuk efisiensi budidaya	Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM mengelola kerjasama internasional	Menilai dan mengembangkan strategi kolaborasi internasional yang berkelanjutan
	PUD ke-3: Pengembangan PUD Sektor Pariwisata						
1	**Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi terkait pengembangan riset dan inovasi di sektor pariwisata (Perda, Perkada, regulasi lain yang mendukung promosi, pengembangan destinasi, dan inovasi wisata)	Menyusun draft Perda/Perkada riset dan inovasi sektor pariwisata	Mengesahkan Perda/Perkada dan sosialisasi kepada pelaku usaha serta pemangku kepentingan	Memperkuat pembinaan dan monitoring implementasi regulasi	Evaluasi dan revisi regulasi berdasarkan masukan pelaku usaha dan stakeholder	Pengembangan regulasi lanjutan untuk mendukung inovasi spesifik dan promosi wisata
b	Penataan basis data riset dan inovasi	Infrastruktur digital untuk data pariwisata: platform digital untuk promosi destinasi, database pelaku usaha pariwisata, data kunjungan wisatawan, data	Merancang dan memulai pembangunan platform digital terpadu	Pelaksanaan pendataan dan pengisian database pariwisata	Pelatihan SDM pengelola dan pemanfaatan data digital	Pembaruan dan optimalisasi platform serta database secara berkala	Integrasi platform dengan sistem promosi dan riset yang lebih luas

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		inovasi produk wisata					
c	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas riset dan inkubasi inovasi di bidang pariwisata, ruang kreatif pengembangan produk wisata, pusat pelatihan SDM pariwisata	Penyusunan anggaran dan perencanaan pembangunan fasilitas	Pembangunan dan pengoperasian awal fasilitas riset dan pelatihan	Pelaksanaan program pelatihan dan inkubasi inovasi secara berkala	Pengembangan kapasitas dan kemitraan pengelolaan fasilitas	Evaluasi dan ekspansi fasilitas sesuai kebutuhan pengembangan sektor
d	Pengelolaan kebun raya daerah (jika ada)	(Jika relevan) Pengembangan kawasan konservasi alam dan taman wisata alam sebagai lokasi riset dan wisata	Penyusunan rencana pengelolaan konservasi dan wisata alam	Penguatan kapasitas Pokdarwis dan pengelola kawasan konservasi	Pelaksanaan program konservasi dan pengembangan taman wisata	Upaya pengakuan geopark oleh UNESCO dan promosi destinasi	Integrasi dan pengembangan destinasi berbasis konservasi secara berkelanjutan
e	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi APBD khusus untuk riset dan inovasi sektor pariwisata, insentif untuk pelaku inovasi wisata	Penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan penganggaran	Pengalokasian anggaran khusus dalam APBD	Pelaksanaan pemberian insentif dan pendanaan inovasi	Monitoring dan evaluasi penggunaan anggaran	Optimalisasi pendanaan dengan melibatkan mitra strategis
f	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pelatihan hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha wisata, perlindungan hak cipta produk budaya dan kerajinan wisata	Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis HAKI	Fasilitasi pendaftaran hak cipta dan merek dagang	Pengembangan layanan pendampingan hukum HAKI	Sosialisasi berkelanjutan kepada pelaku usaha	Penguatan jejaring dan kemitraan layanan perlindungan HAKI
2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya**						

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Dukung Riset dan Inovasi						
a	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha pariwisata untuk riset dan inovasi	Pembentukan forum kolaborasi riset dan inovasi pariwisata	Pelaksanaan riset kolaboratif dan program inovasi	Workshop dan publikasi hasil riset kepada pelaku usaha	Penguatan jejaring dan koordinasi rutin	Evaluasi dan pengembangan program kolaborasi berbasis hasil riset
b	Penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Fasilitas uji coba produk wisata baru, platform informasi inovasi pariwisata, pengembangan klaster produk wisata unggulan	Pengembangan fasilitas uji coba produk wisata	Pembangunan dan pengelolaan platform informasi inovasi	Inisiasi pembentukan klaster produk wisata unggulan	Penguatan kelembagaan dan pengembangan klaster	Ekspansi klaster dan integrasi dengan promosi produk wisata
3	**Kemitraan Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama riset dan pengembangan pariwisata antara berbagai pemangku kepentingan di daerah dan pusat	Menjalin perjanjian kemitraan formal dengan pemangku kepentingan	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha	Forum koordinasi dan kolaborasi program pengembangan pariwisata	Penguatan kemitraan untuk sinergi program dan promosi	Evaluasi sinergi dan pengembangan kerjasama multi-pihak
b	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi dan praktik terbaik dalam pengelolaan destinasi dan pelayanan wisata	Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi Pokdarwis dan pelaku wisata	Pengembangan modul pelatihan berbasis teknologi dan praktik terbaik	Pembentukan komunitas belajar dan sharing inovasi	Penguatan jejaring komunitas inovasi wisata	Evaluasi dampak difusi inovasi dan pembaruan program pelatihan
c	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi	Pelatihan dan pendampingan inovasi layanan dan produk wisata	Workshop inovasi produk wisata secara rutin	Program pendampingan intensif pelaku usaha wisata	Pengembangan jaringan komunikasi hasil riset dan inovasi	Penguatan jejaring dan dukungan kolaborasi	Evaluasi hasil pendampingan dan pengembangan jaringan

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	kepada pelaku inovasi	kepada pelaku usaha					
4	**Budaya Riset dan Inovasi**						
a	Promosi dan kampanye inovasi	Kampanye inovasi pariwisata di media, sekolah, dan komunitas	Pengembangan program edukasi pariwisata inovatif	Pelibatan pelajar dan komunitas dalam promosi dan pengembangan	Pendampingan komunitas kreatif dalam produksi konten	Kemitraan dengan media lokal dan platform digital	Evaluasi efektivitas kampanye dan pengembangan konten kreatif
b	Apresiasi prestasi inovasi	Kompetisi inovasi pariwisata di tingkat lokal, penghargaan bagi inovator dan pelaku wisata kreatif	Penyusunan dan pelaksanaan lomba inovasi pariwisata	Penilaian dan pemberian penghargaan tahunan	Keterlibatan perguruan tinggi dan komunitas kreatif sebagai juri	Integrasi hasil inovasi ke program pengembangan pariwisata	Pengembangan dan peningkatan skala kompetisi
c	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Inkubasi bisnis wisata baru, pelatihan manajemen dan teknologi bagi pelaku usaha pariwisata	Penyusunan program inkubasi dan pelatihan manajemen usaha	Pelaksanaan pelatihan dan inkubasi bisnis wisata	Fasilitasi kolaborasi startup dengan pelaku usaha mapan	Pengembangan komunitas wirausaha pariwisata	Evaluasi dan pengembangan program inkubasi dan jejaring
d	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan pelestarian budaya lokal, atraksi tradisional sebagai bagian dari produk wisata	Penyusunan database pariwisata dan budaya lokal	Program pelestarian atraksi tradisional dan pengembangan kapasitas komunitas	Kolaborasi pemerintah, akademisi, dan pelaku wisata	Integrasi hasil inventarisasi dalam promosi dan pengembangan destinasi	Monitoring dan pengembangan pelestarian budaya secara berkelanjutan
5	**Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah	Program inovasi pariwisata berbasis potensi lokal untuk	Dukungan riset pengembangan produk wisata	Pendampingan pelaku usaha dalam	Kolaborasi riset antara pemerintah,	Evaluasi dan perluasan program inovasi	Penguatan inovasi berbasis pasar dan kebutuhan daerah

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	berdasarkan kebutuhan daerah	meningkatkan daya tarik wisata	berbasis kearifan lokal	pengembangan produk inovatif	perguruan tinggi, dan masyarakat		
b	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan klaster inovasi pariwisata dengan fokus destinasi dan produk unggulan	Koordinasi awal antar pemangku kepentingan klaster inovasi	Penetapan mekanisme kelembagaan klaster	Pengembangan fasilitas dan platform pendukung klaster	Integrasi klaster dengan program pengembangan kawasan wisata	Evaluasi dan perluasan klaster serta sinergi antar wilayah
c	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi regulasi dan program pusat dengan kebijakan daerah dalam pengembangan pariwisata	Koordinasi rutin dengan Kemenpar dan instansi pusat	Penyusunan regulasi daerah yang sesuai kebijakan nasional	Integrasi RIPPARDA dengan RIPARNAS dan rencana strategis terkait	Monitoring keselarasan kebijakan pusat-daerah	Penyesuaian kebijakan berdasarkan evaluasi bersama
6	**Penyelarasan dengan Perkembangan Global**						
a	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Adaptasi tren wisata global, isu keberlanjutan dan ekowisata	Integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengembangan destinasi	Pelatihan dan sosialisasi isu ekowisata	Pengembangan destinasi wisata berorientasi ekowisata	Penguatan kolaborasi dan advokasi isu keberlanjutan	Evaluasi dan peningkatan kesadaran isu global
b	Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama riset dan promosi wisata dengan lembaga internasional dan perusahaan multinasional	Menjalin kemitraan dengan lembaga riset internasional dan perusahaan global	Fasilitasi partisipasi daerah dalam forum dan pameran internasional	Pengembangan program promosi wisata terintegrasi jaringan global	Penguatan kolaborasi dan pengembangan jejaring internasional	Evaluasi dan ekspansi kerjasama internasional
	PUD ke-4: Pengembangan PUD Sektor Industri Kreatif						

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
1	**Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi terkait pengembangan riset dan inovasi di sektor industri kreatif (Perda, Perkada, regulasi yang mendukung hak cipta, perlindungan karya, dan pengembangan ekosistem kreatif)	Penyusunan dan konsultasi draft Perda/Perkada terkait riset, inovasi, dan perlindungan karya industri kreatif	Penetapan Perda/Perkada dan sosialisasi kepada pelaku kreatif dan OPD terkait	Koordinasi lintas OPD untuk integrasi kebijakan dan pembentukan forum komunikasi kebijakan	Penguatan pembinaan dan monitoring implementasi regulasi	Evaluasi dan penyempurnaan regulasi berdasar masukan stakeholder
b	Penataan basis data riset dan inovasi	Platform digital untuk database pelaku industri kreatif, karya, pasar, dan inovasi produk kreatif	Perancangan dan pengembangan platform digital database industri kreatif	Integrasi data dari berbagai sumber ke dalam platform terpadu	Pelatihan penggunaan platform dan sosialisasi ke pelaku industri kreatif	Pengembangan fitur analisis data untuk perencanaan dan kebijakan	Optimalisasi platform dan pembaruan data secara berkala
c	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas inkubasi dan coworking space untuk pelaku industri kreatif, ruang kreatif, pusat pelatihan keterampilan digital dan seni	Pembangunan Ruang Kreatif dan pusat pelatihan serta fasilitas inkubasi	Pengoperasian fasilitas dan pelaksanaan pelatihan keterampilan digital dan seni	Pengembangan program kolaborasi inovasi antar pelaku usaha, komunitas, dan akademisi	Fasilitasi event, pameran, dan pengembangan jejaring ekosistem kreatif	Evaluasi dan pengembangan fasilitas dan program berkelanjutan
d	Pengelolaan kebun raya daerah (jika ada)	(Jika relevan) Pengembangan ruang terbuka atau taman budaya untuk	Perencanaan dan pembangunan taman budaya atau ruang terbuka kreatif	Pelibatan komunitas seni dan pelaku kreatif dalam pengelolaan ruang	Pelaksanaan program festival seni, pameran karya, dan workshop rutin	Integrasi taman budaya dengan tata ruang kota dan pengembangan pariwisata	Pengembangan fungsi ruang publik dan destinasi wisata secara berkelanjutan

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		riset dan pameran karya kreatif					
e	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi dana APBD untuk riset, pengembangan produk, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di industri kreatif	Penyusunan dan peningkatan alokasi anggaran APBD khusus riset dan pengembangan produk kreatif	Perluasan fasilitasi perlindungan HKI (hak cipta, paten, desain industri)	Sinergi antar OPD terkait untuk penggunaan dana riset dan HKI secara efektif	Pelaksanaan program pendampingan dan pelatihan pengelolaan HKI	Evaluasi penggunaan anggaran dan optimalisasi program pendanaan
f	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pelatihan dan layanan pendaftaran hak cipta, merek, paten, dan desain industri	Pelatihan dan sosialisasi perlindungan kekayaan intelektual bagi subsektor kreatif	Fasilitasi layanan pendaftaran HAKI yang mudah diakses	Kerjasama dengan DJKI dan perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas pelaku usaha	Pengembangan layanan pendampingan pengelolaan HAKI di daerah	Monitoring dan evaluasi efektifitas layanan HAKI
2	**Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerjasama antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku industri kreatif untuk pengembangan produk dan teknologi baru	Penyusunan regulasi dan kebijakan pendukung kolaborasi riset dan inovasi	Pembentukan forum/platform kolaborasi riset dan pengembangan produk baru	Pelaksanaan riset bersama fokus potensi ekonomi kreatif daerah	Penguatan jejaring dan fasilitasi transfer teknologi	Evaluasi dan pengembangan program riset bersama
b	Penyediaan sarana pendukung riset yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Fasilitas prototyping, laboratorium kreatif, platform pemasaran dan distribusi produk kreatif	Peningkatan fasilitas laboratorium kreatif dan peralatan prototyping	Pengembangan platform pemasaran dan distribusi digital produk kreatif	Pelatihan pemanfaatan sarana riset dan pemasaran digital	Optimalisasi sarana dan platform pendukung pengembangan produk	Evaluasi sarana dan peningkatan kapasitas pelaku usaha

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
3	**Kemitraan Riset dan Inovasi**						
a	Penguatan kemitraan antar kelembagaan	Kerjasama riset dan inovasi lintas sektor, termasuk dengan lembaga seni, teknologi, dan bisnis	Pembentukan forum kolaborasi rutin antar pemangku kepentingan sektor kreatif, seni, teknologi, bisnis	Pengembangan kemitraan strategis untuk pengembangan produk inovatif	Fasilitasi proyek kolaborasi integrasi seni, teknologi, dan bisnis	Penguatan sinergi ekosistem ekonomi kreatif	Evaluasi kemitraan dan pengembangan jaringan kolaborasi
b	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi dan praktik terbaik dalam produksi dan pemasaran produk kreatif	Pelatihan dan pendampingan intensif oleh pakar dan praktisi profesional	Workshop dan seminar teknologi dan praktik terbaik produksi dan pemasaran	Pengembangan jaringan komunikasi dan platform berbagi pengetahuan	Penguatan komunitas penyebar inovasi	Evaluasi dampak difusi inovasi dan pembaruan program pelatihan
c	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Workshop, seminar, dan pelatihan bagi pelaku industri kreatif	Pengembangan program pelatihan dan pendampingan inovasi untuk subsektor kurang terlayani	Kolaborasi lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha kreatif	Pelaksanaan workshop dan seminar rutin	Memfasilitasi akses program pendampingan berkelanjutan	Evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan program
4	**Budaya Riset dan Inovasi**						
a	Promosi dan kampanye inovasi	Kampanye kreatif di media dan komunitas, pameran seni dan teknologi kreatif	Pembentukan komunitas kampanye kreatif dan pelibatan media	Pengembangan konten kampanye inovatif di berbagai platform	Penyelenggaraan pameran seni dan teknologi kreatif secara berkala	Penguatan jejaring komunitas kreatif dan media	Evaluasi efektivitas kampanye dan pengembangan konten
b	Apresiasi prestasi inovasi	Kompetisi karya seni, desain, teknologi kreatif tingkat lokal dan regional	Pelaksanaan kompetisi inovasi kreatif tahunan	Kemitraan dengan lembaga pendidikan dan komunitas seni	Pemberian penghargaan dan fasilitasi pengembangan bagi pemenang	Pendampingan pemenang kompetisi dan promosi karya	Evaluasi dan perluasan kompetisi inovasi
c	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Inkubasi startup kreatif, pelatihan bisnis dan teknologi bagi wirausaha kreatif	Pengembangan kemitraan dengan perusahaan swasta, inkubator, komunitas	Pelaksanaan program inkubasi dan pelatihan bisnis dan teknologi	Fasilitasi akses pasar, modal, dan pendampingan startup kreatif	Pengembangan komunitas wirausaha kreatif	Evaluasi dan peningkatan program inkubasi

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
d	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Dokumentasi dan pelestarian seni tradisional dan budaya lokal sebagai sumber inspirasi produk kreatif	Pengembangan platform digital dokumentasi seni dan budaya lokal	Penyelenggaraan event, pertunjukan, dan pameran budaya rutin	Kolaborasi pelaku kreatif, akademisi, dan komunitas budaya	Pelatihan regenerasi seni tradisional dan inovasi berbasis budaya	Evaluasi pelestarian dan pengembangan produk kreatif berbasis budaya
5	**Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah**						
a	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah	Program inovasi untuk pengembangan produk kreatif unggulan berbasis potensi lokal	Inisiasi program inovasi berbasis potensi lokal	Kolaborasi pelaku usaha, komunitas, dan institusi riset	Pelatihan dan pendampingan teknis inovasi dan kewirausahaan	Evaluasi dan perluasan program inovasi	Penguatan inovasi berbasis pasar dan keberlanjutan
b	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan klaster industri kreatif untuk kolaborasi dan pengembangan produk	Integrasi klaster industri kreatif menjadi ekosistem kolaboratif	Adopsi teknologi inovatif dalam produksi dan distribusi produk	Fasilitasi pengembangan jejaring pemasaran klaster	Penguatan sinergi klaster dan pengembangan pasar	Evaluasi dan ekspansi klaster serta sinergi antar wilayah
c	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah terkait pengembangan industri kreatif	Penyusunan dan penguatan regulasi bersama pusat dan daerah	Pembentukan forum komunikasi dan koordinasi rutin pusat-daerah	Pengembangan sistem informasi terpadu data pengambilan keputusan	Monitoring dan evaluasi sinkronisasi kebijakan	Penyesuaian kebijakan berdasar hasil evaluasi
6	**Penyelarasan dengan Perkembangan Global**						
a	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi	Adaptasi tren global di bidang kreatif, perlindungan hak cipta	Pelatihan dan sosialisasi perkembangan inovasi kreatif global	Pendampingan hukum terkait hak kekayaan intelektual	Kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional	Integrasi isu internasional dalam kebijakan daerah	Evaluasi dan peningkatan kapasitas adaptasi isu global

No	Sub Elemen	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	internasional, dan inovasi digital					
b	Penguatan kerjasama internasional	Kerjasama riset, pertukaran budaya, dan pemasaran produk kreatif di pasar global	Pembentukan kemitraan strategis dengan lembaga dan komunitas internasional	Fasilitasi program pertukaran budaya dan pelatihan lintas negara	Pengembangan platform pemasaran produk kreatif di pasar global	Integrasi isu perubahan iklim dan teknologi disruptif dalam riset internasional	Evaluasi dan pengembangan kerjasama internasional

Disamping kebijakan tersebut, juga telah disusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang periodenya disesuaikan dengan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Didalam penjabarannya dilakukan sesuai dengan tahapan selama empat periode perencanaan jangka menengah. Program pembangunan destinasi pariwisata merupakan serangkaian langkah yang dirancang untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam kurun waktu tertentu dan secara bertahap. Program ini disusun sebagai bentuk implementasi dari strategi pembangunan destinasi pariwisata dan rencana pengembangan kawasan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu sebagai dasar dalam merancang kegiatan pembangunan yang lebih rinci di destinasi pariwisata, acuan pelaksanaan strategi pengembangan wilayah dan produk pariwisata, serta pedoman dalam pelibatan masyarakat dan penguatan investasi di sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam upaya meningkatkan perekonomian diluar kontribusi sektor pertambangan.

Penyusunan program pembangunan destinasi pariwisata didasarkan pada strategi pembangunan yang telah dirumuskan, rencana pembangunan wilayah pariwisata, serta tugas pokok dan fungsi lembaga-lembaga terkait. Secara umum, komponen yang termuat dalam program ini mencakup judul program yang relevan dengan strategi pembangunan pariwisata di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, daftar kegiatan yang akan dilakukan, waktu pelaksanaan, serta identifikasi pihak penanggung jawab dan pendukung pelaksanaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan program pembangunan destinasi dapat dijalankan secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang terbagi menjadi 4 program pembangunan kepariwisataan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Indikasi Program Destinasi Parawisata

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Identifikasi potensi pariwisata alam, budaya, dan buatan	Pemetaan dan penetapan peta potensi alam, budaya, dan buatan di seluruh wilayah	Disporapar
	Identifikasi dan penetapan destinasi wisata unggulan, berkembang, dan rintisan berdasarkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Permen Parekraf Nomor 2 Tahun 2024)	Disporapar, Bapperida, Disdikbud
Memperkuat potensi dan diversifikasi atraksi setiap destinasi wisata di setiap kecamatan	Penyusunan masterplan pengembangan Daya Tarik Wisata	Disporapar, Bapperida
	Penyusunan masterplan pengembangan Destinasi Wisata berbasis desa wisata	Disporapar, Bapperida
	Diversifikasi atraksi dan aktivitas khususnya pada DTW yang bersifat musiman	Disporapar, Dinas LH
Mengintegrasikan potensi keragaman kuliner dengan aktivitas pariwisata	Pengembangan wisata kuliner khas Tabalong	Disporapar, Diskopukmperindag
	Pengembangan festival kuliner rutin	Disporapar, Diskopukmperindag
	Integrasi wisata kuliner dalam paket perjalanan wisata tematik	Disporapar, Diskopukmperindag

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Menegakkan perizinan dan pertimbangan legalisasi destinasi wisata berdasarkan dampak bagi sekitar	Penyelarasan destinasi wisata dengan dokumen perencanaan RTRW dan RDTR pada kawasan terkait	Disporapar, Bapperida, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH
	Penegakan aturan terhadap dampak lalu lintas bagi destinasi wisata potensial	Disporapar, Bapperida, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH
	Peningkatan peran destinasi wisata yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup melalui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)	Disporapar, Bapperida, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH
	Penguatan destinasi wisata terhadap *legal standing* kepemilikan lahan dan kesiapan tempat	Disporapar, Dinas PUPR, DPMPTSP, Dinas LH
Menetapkan kelompok paket wisata berdasarkan kedekatan geografis dan tema utama	Pengembangan paket wisata terintegrasi berdasarkan Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP)	Disporapar, Bapperida

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pembangunan hubungan kerja sama/mitra dengan agen perjalanan dan pengelola DTW dalam penyediaan paket perjalanan wisata	Disporapar, DPMPTSP
Mengintegrasikan unsur edukasi dalam aktivitas kepariwisataan	Peningkatan peran media informasi (papan informasi, media sosial, media cetak, media elektronik) untuk kegiatan edukasi pariwisata	Disporapar, Diskominfo
Mengembangkan inovasi atraksi yang mendukung peningkatan massa	Pengembangan inovasi atraksi berbasis *event* kegiatan tematik dan insidental	Disporapar, Dishub
	Pengembangan dan penyelenggaraan *event-event* besar kepariwisataan berskala lokal hingga nasional yang mendatangkan massa secara rutin	Disporapar, Dishub, DPMPTSP
	Penjaringan dan pembinaan komunitas pendukung dan komunitas penampil *event kepariwisataan*	Disporapar, Disdikbud
	Pemberian dukungan terhadap kegiatan-kegiatan adat dan festival budaya lokal	Disporapar, Disdikbud
Meningkatkan kualitas fasilitas pada setiap destinasi wisata	Penetapan standar fasilitas minimum pada setiap pelayanan KPP	Disporapar,

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatkan pantauan dan evaluasi pemelihataan fasilitas wisata	Pemantauan dan evaluasi rutin destinasi wisata unggulan, berkembang, dan rintisan berdasarkan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Permen Parekraf Nomor 2 Tahun 2024)	Disporapar

Tabel 3.9
Indikasi Program Industri Pariwisata

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Pengikutsertaan elemen masyarakat lokal dalam kegiatan pelayanan kepariwisataan	Peningkatan peran masyarakat lokal melalui rekruitmen sebagai petugas lapangan aktivitas pariwisata	Disporapar
	Pemberdayaan Pokdarwis dalam menyusun konsep SOP layanan pariwisata per DTW dengan memasukkan kearifan lokal	Disporapar
Mengoptimalkan aplikasi Sapta Pesona untuk wisata di seluruh daerah	Penetapan SOP pelayanan pariwisata	Disporapar
	Penyebarluasan SOP pelayanan pariwisata	Disporapar
	Implementasi SOP pelayanan pariwisata	Disporapar
	Pemantauan dan evaluasi implementasi SOP pelayanan pariwisata	Disporapar
Mendorong apresiasi pada destinasi dengan pelayanan terbaik	Pelaksanaan lomba dan pemberian penghargaan terhadap DTW unggul	Disporapar, Bapperida

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Penyusunan dan penetapan regulasi/standar perhotelan	Menetapkan standar pelayanan akomodasi minimum pada setiap pusat pelayanan KPP	Disporapar, Bapperida
Meningkatkan kemudahan perizinan dan dukungan modal untuk sarana makan minum berbasis masyarakat	Penyederhanaan proses perizinan pelaku usaha kuliner di destinasi wisata	Disporapar, Diskopukmperindag, DPMPTSP
Mewajibkan standar higienitas bagi usaha makan-minum wisata	Uji higienitas pada sarana makan minum yang didaftarkan pada OSS	Disporapar, Dinas Kesehatan
	Pemantauan dan evaluasi implementasi standar higienitas	Disporapar, Dinas Kesehatan
Meningkatkan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi yang transparan	Pelaksanaan forum evaluasi dan perbaikan rutin	Disporapar, Bapperida
Pendataan pelaku ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata	Pemetaan pelaku ekonomi kreatif lokal yang mendukung pariwisata	Disporapar, Diskopukmperindag
	Akselerasi pelaku ekonomi kreatif berizin dalam sektor pariwisata	Disporapar,
Meningkatkan visibilitas produk-produk UMKM pariwisata	Peningkatan promosi digital dan pameran produk lokal dalam mendukung produk khas daaerah	Disporapar, Diskopukmperindag, Diskominfo
Pengadaan sarana transportasi umum dari luar wilayah menuju Kabupaten Tabalong	Aktivasi kembali Bandara Warukin untuk pelayanan penerbangan umum	Dishub

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mengembangkan pelayanan transportasi pariwisata	Penyusunan rute angkutan umum untuk tujuan ke wisata unggulan daerah	Dishub, Disporapar
	Peningkatan peran agen perjalanan dalam mengembangkan paket wisata daerah	Dishub, Disporapar
	Pengadaan layanan antar-jemput antar Pusat-Pusat Pelayanan Pariwisata dengan mitra pelaku agen transportasi	Dishub, Disporapar

Tabel 3.10
Indikasi Program Pasar Pariwisata

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Melaksanakan kampanye citra	Penciptaan *branding* berdasarkan analisis potensi dan pasar	Disporapar
	Penyusunan identitas visual dan narasi destinasi yang khas dan mudah dikenali secara nasional	Disporapar
	Penyusunan pedoman segmentasi pasar dan brand book Tabalong	Disporapar
Membentuk tim atau unit pelayanan informasi pariwisata yang responsif dan ramah terhadap wisatawan	Pembentukan pusat layanan informasi pariwisata terpadu tingkat kabupaten	Disporapar, diskominfo

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mendorong penegakkan penggunaan brand identity pada kegiatan pemerintah, swasta, dan masyarakat	Pengembangan *storybank* narasi budaya & sejarah lokal	Disporapar, Disdikbud
Meningkatkan keterlibatan dan jangkauan promosi digital destinasi pariwisata	Peningkatan promosi sektor pariwisata melalui media cetak dan elektronik	Disporapar, Diskominfo
	Optimalisasi penggunaan media sosial pemerintah dengan meningkatkan jumlah postingan rutin mengenai destinasi pariwisata dan informasi kepariwisataan lainnya	Disporapar, Diskominfo
	Pemajuan penggunaan pemasaran wisata dengan pemasaran media elektronik dan cetak untuk setiap destinasi yang ada di kabupaten	Disporapar, Diskominfo
Mengoptimalkan publikasi atau liputan positif tentang pariwisata Tabalong	Pemajuan penggunaan teknologi pemasaran dengan berbagai pihak media	Disporapar, Diskominfo
	Penguatan narasi *branding* destinasi melalui kanal digital resmi pemerintah	Disporapar, Diskominfo

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Penyusunan kalender konten promosi destinasi wisata	Disporapar
	Pelaksanaan kampanye digital "Visit Tabalong" melalui media sosial dan situs pariwisata	Disporapar, Diskominfo
Meningkatkan kerjasama liputan pariwisata dengan media daerah dan nasional	Pembangunan kerja sama dengan media dalam promosi pariwisata	Disporapar, Diskominfo
	Perluasan pemasaran wisata dengan memanfaatkan industri kreatif dan teknologi informasi	Disporapar, Diskopukmperindag Diskominfo
	Penyediaan paket informasi destinasi wisata untuk media partner dan agen perjalanan atau pelaku usaha wisata	Disporapar
Mendorong partisipasi publik dalam promosi destinasi dan kegiatan pariwisata	Pengadaan kegiatan promosi wisata yang melibatkan masyarakat lokal	Disporapar
	Pelaksanaan lomba dan kompetisi konten pariwisata dalam meningkatkan partisipasi publik	Disporapar
	Penyediaan ruang promosi komunitas di acara atau festival pariwisata	Disporapar

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mengintegrasikan hasil karya publik ke dalam publikasi pemerintah	Pengembangan kurasi karya visual, fotografi, dan narasi publik untuk materi promosi	Disporapar, Disdikbud
	Pelaksanaan kolaborasi konten dengan komunitas kreatif untuk kampanye promosi tematik	Disporapar, Disdikbud, Diskominfo
Mendorong kolaborasi antara desinasi wisata dan pelaku kreatif daerah	Penguatan fasilitasi *co-branding* antara destinasi wisata dan produk kreatif lokal	Disporapar, Diskopukmperindag
	Pendampingan kemitraan antara pengelola destinasi dan komunitas seni budaya	Disporapar, Disdikbud
	Penyelenggaraan festival kolaboratif antara desa wisata dan pelaku industri kreatif	Disporapar, Diskopukmperindag
Meningkatkan transparansi perizinan dan pelaporan kemajuan proyek wisata kepada investor	Pengembangan mekanisme perizinan untuk kemudahan investasi bidang pariwisata	Disporapar, DPMPTSP
	Optimalisasi sistem perizinan berbasis teknologi digital/OSS	Disporapar, DPMPTSP, Diskominfo
	Penguatan *monitoring* dan evaluasi dalam manajemen pelaporan investasi	Disporapar, DPMPTSP

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mendorong peningkatan pengadaan aset wisata daerah untuk penawaran pada investor	Peningkatan pengadaan dokumen pendukung investasi bidang pariwisata	Disporapar, DPMPTSP
	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	Disporapar, DPMPTSP
	Pemetaan destinasi wisata unggulan yang memiliki potensi investasi tinggi	Disporapar, DPMPTSP
	Perluasan potensi investasi wisata ke *stakeholders* potensial dengan pengajuan pada pemerintah pusat dan swasta	Disporapar, DPMPTSP
Optimalisasi insentif dan bantuan pendanaan untuk destinasi wisata secara merata	Peningkatan bantuan anggaran wisata melalui investasi wisata	Disporapar, DPMPTSP
	Penyediaan informasi profil investasi wisata	Disporapar, DPMPTSP

Tabel 3.11
Indikasi Program Kelembagaan Pariwisata

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Meningkatkan kapasitas dan mendorong sertifikasi kompetensi pemandu wisata	Penetapan standardiasi kompetensi dan profesionalisme pengelolaan destinasi	Disporapar, Disnaker

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mendorong pemuda berketerampilan pariwisata sebagai pelopor pariwisata	Penjaringan pemuda berketerampilan pariwisata bekerja sama dengan sekolah/lembaga belajar bidang pariwisata	Disporapar, Disnaker, Disdikbud
	Pelibatan masyarakat lokal alumni sekolah/perguruan tinggi wisata dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata	Disporapar, Disnaker, Disdikbud
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengelola pariwisata (pokdarwis)	Penyelenggaraan program pelatihan terpadu bagi pokdarwis dengan modul dan kurikulum yang terintegrasi	Disporapar, Disnaker
	Peningkatan keterampilan pokdarwis dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata melalui pelatihan	Disporapar, Disnaker
Meningkatkan sosialisasi dan dukungan kelembagaan	Pelaksanaan kampanye *brand* untuk setiap destinasi secara merata	Disporapar, Diskominfo

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
pariwisata berbasis masyarakat	Penyusunan dan pelatihan standar operasional, tata kelola keuangan, dan advokasi kepada setiap destinasi wisata	Disporapar, Disnaker
	Penguatan sosialisasi pengembangan sumber daya sektor pariwisata	Disporapar, Disnaker
Meningkatkan modal pengelolaan dan pengembangan pariwisata	Identifikasi dan penjaringan destinasi wisata siap investasi	Disporapar, DPMPTSP
	Perencanaan optimalisasi alokasi anggaran wisata dari CSR	Disporapar, DPMPTSP
Meningkatkan akses modal atau pendanaan bagi yang potensial di setiap kecamatan	Identifikasi dan penjaringan UMKM potensial	Disporapar, Diskopukmperindag
	Peningkatan sosialisasi akses permodalan bagi UMKM	Disporapar, DPMPTSP,
	Mengembangkan jaringan dan kemitraan antara wirausaha muda dan pengusaha mapan atau mentor wirausaha di sektor pariwisata	Disporapar, DPMPTSP,

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Menguatkan perlindungan legal formal kelembagaan pariwisata	Percepatan pembentukan dan peresmian pokdarwis dan forum pelaksana kegiatan pariwisata dengan Surat Keputusan (SK)	Disporapar
Mendorong pemberian insentif bagi pokdarwis yang aktif	Pengembangan skema hibah kinerja pokdarwis melalui bantuan operasional maupun bonus berbasis capaian	Disporapar, DPMPTSP
Memfasilitasi kemitraan BUMDes dengan pokdarwis dalam pengelolaan wisata	Penyusunan kolaborasi BUMDes dengan pokdarwis dalam satuan kelompok	Disporapar, DPMPD
	Pengembangan skema paket kerjasama dalam bentuk modal usaha, pelatihan, dan manajemen usaha	Disporapar, DPMPD, DPMPTSP
Mengembangkan *mentorship* antar Pokdarwis dan pelaku sukses	Penyusunan *framework* dan modul destinasi pariwisata mandiri	Disporapar, DPMPD
	Pelaksanaan skema *pairing* destinasi wisata rintisan dengan destinasi wisata unggulan	Disporapar, DPMPD

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Menetapkan forum koordinasi pariwisata resmi	Penetapan pembentukan Forum Koordinasi Pariwisata Daerah dalam bentuk regulasi resmi melalui Peraturan Kepala Daerah	Disporapar, Bapperida, Setda
	Penetapan mekanisme keanggotaan lintas Perangkat Daerah, pelaku usaha, komunitas, dan akademisi	Disporapar, Bapperida, Diskopukmperindag, Setda
Mendorong penyelenggaraan koordinasi dan rencana aksi kolaboratif secara berkala	Penyusunan rencana aksi koordinasi kolaborasi multipihak	Disporapar, Bapperida
	Pengembangan mekanisme monitoring dan tindak lanjut hasil aksi	Disporapar
Mendorong penyusunan skema pendanaan co-funding untuk pariwisata kolaboratif	Pembentukan unit pengelola keuangan kolaboratif di dinas pariwisata	Disporapar, BPKAD
	Pembinaan terkait manajemen dan keuangan pengelola destinasi pariwisata untuk memastikan keberlanjutan	Disporapar, BPKAD
Membangun sinergi dan dokungan terhadap	Penyelenggaraan kerja sama dalam program desa	Disporapar, Perguruan Tinggi,

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
pariwisata dengan pelaku bisnis dan akademisi	pariwisata binaan	CSR
	Penyelenggaraan kerjasama riset dan pelatihan bagi pelaku usaha dari pihak akademisi	Disporapar, Perguruan Tinggi
	Penguatan pendanaan pariwisata dengan swasta dan CSR	Disporapar, CSR
Mendorong integrasi *database* desa wisata, sektor swasta, dan kegiatan pendukung pariwisata	Penyusunan dan publikasi laporan pengelolaan pariwisata berkala	Disporapar, Diskominfo,
Mengembangkan portal terpadu terkait data destinasi dan pelaku usaha	Pemajuan sistem informasi dan data pariwisata Tabalong	Disporapar, Diskominfo, Bapperida
	Penyediaan *dashboard* analitik kinerja destinasi	Disporapar, Diskominfo, Bapperida
	Perancangan *platform* interaktif berbasis GIS untuk pemetaan destinasi dan pelaku usaha pendukung pariwisata	Disporapar, Diskominfo, DPUPR, Bapperida
	Penguatan sistem pendataan status lahan bagi setiap destinasi yang terdaftar	Disporapar, Kantor Pertanahan

Arah Kebijakan	Indikasi Program	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
Mendorong integrasi *database* desa wisata, sektor swasta, dan kegiatan pendukung pariwisata	Pengembangan kerjasama terpadu antar destinasi dengan desa	Disporapar, Bapperida, DPMD
	Optimalisasi penggunaan data terintegrasi dalam perencanaan program	Disporapar, Bapperida
	Penyiapan standardiasi kompetensi dan profesionalisme pengelolaan destinasi	Disporapar, LSP, Disnaker
Meningkatkan pelaksanakan evaluasi dan perbaikan kebijakan pariwisata multipihak	Pelaksanaan evaluasi	Disporapar,
	kebijakan multipihak setiap semester	Bapperida, Inspektorat
	Penyusunan rekomendasi perbaikan berdasar hasil evaluasi	Disporapar, Bapperida
	Perkuatan tim monitoring independen pemerintah maupun kelompok pelaku pariwisata	Disporapar, inspektorat

Dalam mewujudkan sinergi pembangunan sektoral dan spasial, maka rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong disusun selaras dengan rancangan RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Pada aspek spasial, Kabupaten Tabalong menjadi bagian dari Klaster Banua Anam. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan wilayah kedalam 3 (tiga) klaster. Ketiga klaster wilayah tersebut, yaitu:

1. **Klaster Banjarbakula**, meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
2. **Klaster Banua Anam**, meliputi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
3. **Klaster Saijaan Bersujud**, meliputi Kabupaten Tanah Bumu dan Kabupaten Kotabaru.

Adapun arahan Pemerintan Provinsi Kalimantan Selatan untuk pengembangan Banua Anam, dimana Kabupaten Tabalong sebagai salah bagian di dalamnya, dijelaskan sebagai berikut:

a. Arah Pengembangan Kawasan

Klaster Banua Anam merupakan wilayah yang memiliki kondisi hamparan wilayah yang cukup heterogen yang terdiri dari hamparan pegunungan sampai dataran rawa dan memberikan nilai strategis yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Rawa Batang Banyu dan KSP Pegunungan Meratus. KSP Rawa Batang Banyu diarahkan untuk pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan. Adapun KSP Pegunungan Meratus bertujuan sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Arah pengembangan kawasan pada Klaster Banua Anam sebagai berikut:

1) Mendorong pengembangan "Sentra Pangan Lestari", dengan menjadikan kawasan-kawasan potensial menjadi pusat-pusat produksi pertanian, intervensi cetak sawah, dan meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kelestarian dan alih fungsi lahan pertanian.
2) Pengembangan hilirisasi industri hasil pertanian terutama komoditas padi, tanaman holtikultura, dan perkebunan karet serta pengolahan produk turunannya.

3) Pengembangan kawasan transit, simpul transportasi dan perdagangan dalam pengembangan sistem logistik untuk menunjang distribusi logistik dan angkutan penumpang dengan memperhatikan potensi interaksinya terhadap Ibukota Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, terutama pada kawasan perbatasan antar provinsi.
4) Sebagai salah satu kawasan bernilai konservasi tinggi dan memiliki kekayaan geologi bernilai internasional, Klaster Banua Anam berpotensi dikembangkan sebagai kawasan konservasi, kawasan pariwisata dan peningkatan ekonomi kreatif dengan skala global.
5) Pengembangan geosite dan kawasan sekitarnya dalam mendukung pengembangan UNESCO Global Geopark Meratus.
6) Perwujudan Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Agrowisata Hortikultura di Kabupaten Tabalong.
7) Terkait pengelolaan sampah untuk dapat memaksimalkan penerapan Prinsip 5R (*Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, Rot*).
8) Meminimalkan sampah hingga menjadi residu sekecil mungkin.

b. Arah Pengembangan Infrastruktur

1) Peningkatan layanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan dalam mengintegrasikan pusat produksi dan pusat distribusi, salah satunya melalui pembangunan dan pengembangan jalan lintas.
2) Pengembangan infrastruktur dalam mendukung peningkatan produksi dan nilai tambah pertanian dan ketahanan pangan melalui pembangunan dan pengembangan daerah irigasi permukaan/rawa serta pembangunan tampungan air (bendung/bendungan).
3) Peningkatan layanan prasarana dan sarana yang mendukung UNESCO Global Geopark Meratus dan pariwisata unggulan, seperti pengembangan/penataan kawasan pariwisata dan sekitarnya, penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta peningkatan amenitas pariwisata seperti penyediaan akomodasi, tempat makan dan minum, tempat ibadah, toilet umum, tempat parkir dan area

peristirahatan, dan fasilitas lainnya yang memudahkan aktivitas wisatawan.

4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, salah satunya pengembangan pemenuhan dan pelayanan air minum pada Klaster Banua Anam.
5) Pengembangan transportasi publik baik angkutan umum massal maupun non massal yang terintegrasi sampai ke pelosok.
6) Mendorong pembangunan infrastruktur untuk penanggulangan banjir.
7) Pengembangan prasarana pendukung ketahanan pangan dan energi yaitu pembangunan lumbung pangan dan pembangunan sarana prasarana energi berkelanjutan.

c. Arahan dan Indikasi Intervensi Pengembangan Kabupaten Tabalong

1) Pengembangan kawasan dan sektor unggulan, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan perekonomian
   - Pengembangan KPP Agrowisata Hortikultura melalui pengembangan dan diversifikasi ekonomi lokal, pengembangan kawasan unggulan pariwisata.
   - Pengembangan industri pengolahan (hilirisasi) pada Kawasan Peruntukan Industri Seradang dan sekitarnya yang berbasis pada sumber daya alam berkelanjutan.
   - Pengembangan kawasan transit dan simpul transportasi pada Terminal Mabuun dan kawasan Gerbang Babussalam sebagai koridor ekonomi Utara–Tengah Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur-Kalimantan Tengah.
   - Revitalisasi Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan dengan prioritas pengembangan rantai nilai dan klaster pertanian terpadu, modernisasi sistem irigasi, alat dan mesin pertanian, dan pemasaran digital hasil pertanian.
   - Pengembangan pariwisata alam, geologi dan budaya lokal dengan prioritas penataan destinasi wisata seperti wisata budaya Dayak

dan situs geologi Air Rerjun Lano dan Goa Liang Tapah, serta wisata lintas provinsi dengan pelibatan mitra lokal, penguatan amenitas, dan SDM pariwisata.

- Penyediaan layanan dasar skala desa dan perdesaan (kesehatan, pendidikan, air minum, dan sanitasi).
- Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri.
- Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif.
- Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan.

2) Peningkatan daya saing sumber daya manusia dan tata kelola pelayanan publik dengan prioritas:

- Peningkatan keterampilan dan kualitas sumberdaya manusia lokal pada sektor industri, konstruksi, dan jasa modern, serta peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional untuk industri.
- Pengembangan SDM Unggul dan Vokasi Berbasis Industri dengan prioritas: Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), SMK berbasis industri, dan pelatihan UMKM. Perluasan kerjasama dengan perusahaan tambang dan swasta dalam peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
- Pemberdayaan Masyarakat dan UMKM, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan prioritas: Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan UMKM melalui pelatihan, akses permodalan (KUR), dan pemasaran digital. Promosi produk lokal melalui pameran, festival budaya, dan jejaring perdagangan (*e-commerce*).

3) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penguatan Ketahanan Bencana

- Rehabilitasi lingkungan dan tata kelola tambang dengan prioritas rehabilitasi dan reklamasi bekas tambang untuk kehutanan rakyat, agroforestri, dan wisata edukasi.

- Mendorong pembangunan infrastruktur bendungan untuk penanggulangan banjir.
- Pengurangan sampah dari sumbernya melalui pengelolaan sampah mandiri.
- Pengelolaan Sampah Organik yang Efektif.
- Memaksimalkan Pelestarian Lingkungan dalam Alih Fungsi Lahan.

3.2.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, terdapat 7 (tujuh) program prioritas utama bupati dan wakil bupati yang merupakan janji kepada masyarakat Tabalong. Guna mengimplementasikan janji tersebut, maka ketujuh program tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan yang nomenklaturnya sesuai dengan yang termuat dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Penjabaran Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati kedalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong dimuat pada tabel di bawah.

Tabel 3.12
Penjabaran Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati kedalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
SATU DESA SATU WIFI GRATIS	2.16.03 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.13.02 Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	7.01.06 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan
SATU DESA SATU DA'I	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
TABALONG PASTI SEHAT	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1.02.05 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
	1.02.04 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	2.07.05 Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	1.03.03 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
	1.03.05 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
MENCETAK 15.000 TENAGA TERAMPIL	2.07.02 Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
	2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	
	3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP2TPH
	3.25.03 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	3.25.06 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
	3.27.07 Program Penyuluhan Pertanian	Disbunnak
	2.13.05 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.08.02 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	
	3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
1.000 BEASISWA SARJANA	2.19.02 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	4.01.02 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
JALAN DAN JEMBATAN MANTAP	1.04.05 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	3.27.03 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas KP2TPH dan Disbunnak
KREDIT MODAL UNTUK UMKM DAN PETANI	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	2.17.08 Program Pengembangan UMKM	
	5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD

Sumber: hasil analisis, 2025

Program Prioritas Pembangunan Daerah adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dimuat oada tabel di atas, menjadi bagian dalam Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030.

Berdasarkan tujuan dan sasaran, maka diturunkan ke kondisi outcome yang dibutuhkan untuk memilih program prioritas pembangunan daerah. Program prioritas merupakan program perangkat daerah yang diseleksi., dan disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.13
Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)						
Misi I: Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera						
	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat			**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**		
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat		**a. Harapan Lama Sekolah (tahun)**		
				b. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		
				c. Usia Harapan Hidup (tahun)		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				pendidikan menengah pertama		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	lndeks Pemerataan Guru	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
				Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik		
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
				Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan		
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar		
			Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Angka Kematian Ibu (AKI)		
				Persentase Pemenuhan SPM Rumah Sakit		Dinas Kesehatan dan RSUD H. Badarudin

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik		
				Akreditasi Rumah Sakit		
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kompetensi SDM Bidang Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat di kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive* (mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
						Penduduk dan Keluarga Berencana
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern		
				Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Peningkatan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		
		Meningkatnya ketahanan pangan daerah		**Indeks ketahanan pangan**		
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa Tahan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap		
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Perindustrian, Perdagaangan, Koperasi dan UMKM
		Menurunnya tingkat kemiskinan dan terkendalinya ketimpangan		**a. Persentase penduduk miskin (%)**		
				b. Indeks Gini (Indeks)		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial		
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar		
				Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial		
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya		
				lndeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas		
				Indeks Peranan Sosial		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
				Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin		
				Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar		
				Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi		
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi		
				Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagaangan, Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Perindustrian, Perdagaangan, Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sektor perikanan, tanaman pangan & hortikultura	Persentase peningkatan Produksi Hortikultura	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
				Persentase peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian sektor perikanan, tanaman pangan & hortikultura	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan Produksi Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Persentase peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase cakupan pelayanan prasarana jalan produksi dan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Menurunnya tingkat penganggura n		**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Jumlah Pekerja pada Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagaangan, Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan Produksi Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Persentase peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam		**Persentase penduduk *Not in Education, Employment or Training* (NEET) usia 20–24 tahun**		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		kegiatan produktif				
			Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Peningkatan Prestasi Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
				Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagaangan, Koperasi dan UMKM
	Meningkatkan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Daerah yang Inklusif			**a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**		
				b. PDRB perkapita (Rp. Juta)		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Berkembangnya sektor unggulan daerah		**a. Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)**		
				b. Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)		
				c. Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Persentase peningkatan Produksi Perkebunan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sektor	Persentase peningkatan Produksi Hortikultura		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			perikanan, tanaman pangan & hortikultura			
				Persentase peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase cakupan pelayanan prasarana jalan produksi dan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian sektor perikanan, tanaman pangan & hortikultura	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase cakupan vaksinasi untuk menekan penyakit zoonosis	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Dinas Perkebunan dan Peternakan
				Persentase penurunan angka mortalitas hewan strategis		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase Penanganan Bencana Pertanian sektor perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sektor perikanan,	Persentase Penanganan Bencana Pertanian		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			tanaman pangan & hortikultura			
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan sektor perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian sektor perikanan, tanaman pangan & hortikultura	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan		Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang/Jasa		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya penerapan sistern informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat HukumAdat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
		Meningkatnya investasi dan kewirausahaan		**a. Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Miliar Rupiah)**		
				b. Rasio Kewirausahaan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Meningkatnya Pelaku usaha yang berorientasi ekspor		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya daya saing UMKM		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
			Meningkatnya penerapan sistern informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital		
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
Misi II: Mendorong Kemajuan Daerah						

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
	Mewujudkan wilayah yang berkembang seimbang dan berkelanjutan			**Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)**		
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur daerah		**Indeks Infrastruktur (Indeks)**		
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	DPUPR
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase penduduk berakses air minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DPUPR
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	DPUPR
				Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap		
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	DPUPR
			Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	DPUPR
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	DPUPR
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Pemanfaatan Tata Ruang yang sesuai Peruntukkannya	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	DPUPR
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat di kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian sektor perikanan, tanaman pangan & hortikultura	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hotrikultura
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase cakupan pelayanan prasarana jalan produksi dan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan peternakan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan dan Peternakan
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
				Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		Meningkatnya kualitas pembangunan desa		**Indeks Desa (Indeks)**		
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat HukumAdat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec Murung Pudak

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		Kec.Muara Harus
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll)		Kecamatan Banua Lawas
				Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan		Kecamatan Kelua
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		Kecamatan Pugaan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		Kecamatan Jaro

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan			
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		Kecamatan Muara Uya
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		Kecamatan Haruai
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		Kecamatan Upau
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		Bintang Ara
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll)		Kecamatan Tanjung

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan			
				Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat		Kecamatan Tanta
				Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll)		
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec Murung Pudak
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Kec.Muara Harus

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Kecamatan Banua Lawas
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan			Kecamatan Kelua
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Kecamatan Pugaan
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Kecamatan Jaro
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Kecamatan Muara Uya

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Kecamatan Haruai
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Kecamatan Upau
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Bintang Ara
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Jumlah kegiatan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan		Kecamatan Tanjung
			Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala		Kecamatan Tanta

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita		
				Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk		
				Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi		
				Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		
				Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar		
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		
				Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				pendidikan menengah pertama		
				Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan		
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Minum	Persentase Rumah Tangga Berakses Air Minum	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim		**a. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)**		
				b. Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Indeks kualitas air	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks kualitas udara		
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			dan hakMHAyang terkait dengan PPLH		HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penanganan pra bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana		
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana		
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Satuan Polisi Pamong Praja

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dinas Sosial
				Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		
				Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial		
Misi III: Mengembangkan Kehidupan yang Religius						
	Menciptakan masyarakat yang berkarakter kuat, berakhlak mulia, dan hidup dalam harmoni			**Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)**		
		Meningkatnya toleransi dan kerukunan		**Angka konflik bernuansa SARA**		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
		antarumat beragama				
			Meningkatnyakualitas kebijakan pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan rakyat dan produk yang dihasilkan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Kesbangpol
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Kesbangpol
			Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kesbangpol
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Kesbangpol

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Kesbangpol
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada			
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas		
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec Murung Pudak

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kec.Muara Harus
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kecamatan Banua Lawas
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan			Kecamatan Kelua
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kecamatan Pugaan
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kecamatan Jaro

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kecamatan Muara Uya
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kecamatan Haruai
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kecamatan Upau
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Bintang Ara
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kecamatan Tanjung

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Persentase laporan gangguan ketertiban yang ditindaklanjuti dalam â‰¤ 2 hari		
			Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah		Kecamatan Tanta
		Meningkatnya kemajuan kebudayaan		**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)**		
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat HukumAdat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
				Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll)		
		Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan		**Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)**		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)		
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan		
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)		
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja		
				Indeks Lansia Berdaya		
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (*Age Specific Fertility Rate*/ASFR 15- 19)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
						Keluarga Berencana
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)		
				Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dinas Perindustrian, Perdagaangan, Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Dinas Tenaga Kerja
				Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan
				Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll)		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
Misi IV: Menjadi Daerah yang Terdepan						
Menjadi Daerah yang Terdepan	**Menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi, pembangunan, dan pelayanan publik**					
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan bersih		**a. Indeks SPBE (Indeks)**		
				b. Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)		
				c. Indeks Pelayanan Publik (Indeks)		
				d. Survey Penilaian Integritas (Poin)		
				e. Nilai SAKIP (kategori)		
				f. Opini BPK (opini)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah
				Predikat Nilai AKIP Perangkat Daerah		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			
			Meningkatnya Kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
				Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan		
			Meningkatnya kompetensi petugas pelayanan		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pelayanan			

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya minat pemanfaatan data oleh mitra kerja			
			Meningkatnya minat pemanfaatan data oleh perangkat daerah			
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan		
			Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD		
				Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		
				Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD		
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA		
				Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas penilaian kineria ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya		
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya		
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis		
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi		
			Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah
			Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah		
				Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Irjen Kemendagri		
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi		
				Persentase Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Manajemen Risiko		
				Persentase Penyelesaian TP/TGR		
				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh BPK RI		
			Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat
				Persentase capaian dan ketepatan waktu Pemenuhan Kewajiban penyampaian LHKPN		
				Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		
				Persentase Capaian Tindak Lanjut Pelimpahan Pengaduan Masyarakat dari		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Inspektorat Jenderal Kemendagri		
				Persentase Pemenuhan dan Ketepatan Laporan Rutin dan Insidental kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri		
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
				Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Sekretariat DPRD
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyaraka	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat		
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan		
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec Murung Pudak
				Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		Kec.Muara Harus
				Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		Kecamatan Banua Lawas

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		Kecamatan Kelua
				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan		
				Persentase laporan kecamatan yang disampaikan tepat waktu (LPPK, LPPD, laporan bulanan)		
				Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		Kecamatan Pugaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
				Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		Kecamatan Jaro
				Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		Kecamatan Muara Uya
				Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		Kecamatan Haruai

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan			
				Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		Kecamatan Upau
				Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		Bintang Ara
				Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		Kecamatan Tanjung
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu		Kecamatan Tanta
				Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Dinas Komunikasi dan Informatika

Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator Kinerja	Program Prioritas	Perangkat Daerah
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan		**Kategori Indeks Inovasi Daerah (kategori)**		
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah

Sumber: hasil analisis, 2025

3.2.3. Pelaksanaan Program Strategis Nasional

Dengan ditetapkannya RPJMN Tahun 2025-2029, maka dilakukan penyelarasan rencana pambangunan daerah dengan nasional. Penyelarasan perlu dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional dan visi pembangunan daerah.

Salah satu hal yang perlu diselaraskan dan didukung oleh pemerintah daerah selain kebijakan yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, yaitu pelaksanaan Program Strategis Nasional. Program Strategis Nasional adalah penerjemahan program/proyek yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang mencakup Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), Proyek Prioritas (ProP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki sifat strategis dan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan produktivitas sumber daya manusia serta menjaga keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Strategis Nasional, meliputi:

a. Penanggulangan Kemiskinan dengan proyek/kegiatan:
   1) Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan
   2) Kemiskinan Ekstrem;
   3) Sekolah Rakyat; dan
   4) Pembangunan 3 Juta Rumah.
b. Ketahanan Pangan dengan proyek/kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.
c. Kesehatan Untuk Semua dengan proyek/kegiatan:
   1) Jaminan Kesehatan Nasional; dan
   2) Makan Bergizi Gratis.

d. Perluasan Akses Pendidikan dengan proyek/kegiatan Pembangunan dan Revitalisasi Pendidikan Dasar dan Menengah.
e. Pertumbuhan Ekonomi dengan proyek/kegiatan:
    1) Pengendalian Inflasi;
    2) Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; dan
    3) Kemudahan perizinan di daerah.
f. Program Strategis Nasional dengan proyek/kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh Presiden.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong akan melaksanakan Program Strategis Nasional sesuai dengan kewenangan dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Dukungan pelaksanaan tersebut masuk kedalam perencanaan dan penganggaran baik jangka menengah maupun tahunan. Program perangkat daerah yang mendukung PSN bersifat indikatif dan dapat berubah dan disesuaikan berdasarkan arahan pemerintah pusat pada penyusunan RKPD dan APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

TABALONG SMART

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai target sasaran strategis RPJMD, dibutuhkan beberapa kondisi berupa kinerja yang harus dicapai. Kinerja berorientasi hasil (outcome) dibutuhkan untuk mencapai sasaran strategis. Outcome yang akan dicapai memerlukan alat ukur berupa indikator kinerja. Selanjutnya, berdasarkan outcome yang akan dicapai, maka dipilih nomenklatur program yang sesuai sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Program merupakan penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD dan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Tabalong, maka ditetapkan program perangkat daerah Kabupaten Tabalong untuk periode pembangunan 2026-2030.

Pelaksanaan program membutuhkan dukungan pendanaan yang memadai. Untuk itu pemerintah daerah selain menggunakan sumber pendanaan dari APBD kabupaten, juga mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah. Adapun rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong pada tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah. Selanjutnya, program tersebut akan dirinci ke dalam kegiatan dan sub kegiatan di Renstra Perangkat Daerah.

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					594.773.802.596,00		658.574.992.800,00		712.611.070.800,00		771.080.808.900,00		834.347.989.000,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					421.237.325.315,00		455.799.847.800,00		493.198.225.300,00		533.665.139.600,00		577.452.364.300,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	421.237.325.315,00	100	455.799.847.800,00	100	493.198.225.300,00	100	533.665.139.600,00	100	577.452.364.300,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					163.560.397.650,00		191.980.528.200,00		207.732.530.500,00		224.776.984.600,00		243.219.936.100,00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	95,42	95,92	96,42	163.560.397.650,00	96,92	191.980.528.200,00	97,42	207.732.530.500,00	97,92	224.776.984.600,00	98,42	243.219.936.100,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama (%)	91,21	91,71	92,21		92,71		93,21		93,71		94,21		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	91,26	91,76	92,26		92,76		93,26		93,76		94,26		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					43.529.150,00		47.100.700,00		50.965.300,00		55.147.000,00		59.671.800,00	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (%)	62	65	68	43.529.150,00	70	47.100.700,00	72	50.965.300,00	75	55.147.000,00	78	59.671.800,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					9.818.872.481,00		10.624.510.900,00		11.496.252.000,00		12.439.519.400,00		13.460.181.900,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	lndeks Pemerataan Guru (Indeks)	0,5	0,57	0,62	9.818.872.481,00	0,65	10.624.510.900,00	0,67	11.496.252.000,00	0,69	12.439.519.400,00	0,70	13.460.181.900,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (%)	100	95	95,95		96,9		97,85		98,8		99,75		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					14.226.000,00		15.393.200,00		16.656.200,00		18.022.800,00		19.501.500,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang	23	28	30	14.226.000,00	33	15.393.200,00	36	16.656.200,00	40	18.022.800,00	42	19.501.500,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
institusi pendidikan	Diterbitkan/Diperbarui (%)													DAN KEBUDAYAAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					99.452.000,00		107.612.000,00		116.441.500,00		125.995.500,00		136.333.400,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	37	40	42	99.452.000,00	45	107.612.000,00	47	116.441.500,00	49	125.995.500,00	52	136.333.400,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					406.227.290.158,00		439.558.239.100,00		475.623.992.400,00		514.648.940.700,00		556.875.886.100,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					264.434.689.294,00		286.131.555.500,00		309.608.649.600,00		335.012.039.200,00		362.499.777.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	140.462.021.240,00	100	151.986.930.100,00	100	164.457.457.700,00	100	177.951.192.100,00	100	192.552.087.400,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	123.972.668.054,00	100	134.144.625.400,00	100	145.151.191.900,00	100	157.060.847.100,00	100	169.947.689.600,00	1.02.0.00.0.00.01.0001 - BLUD RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					138.587.977.248,00		149.959.120.700,00		162.263.266.500,00		175.576.967.500,00		189.983.057.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	161	150	140	118.575.728.302,00	130	128.304.866.800,00	120	138.832.281.100,00	110	150.223.469.800,00	100	162.549.305.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)	23,10	22	21		20		19		17		15		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk (%)	139,36	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan (%)	99,77	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (%)	98,81	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (%)	90,1	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelay	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	anan kesehatan sesuai standar (%)													
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar (%)	97,8	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	83,15	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100,1	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	60,6	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	61,5	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan	99	100	100		100		100		100		100		1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	skrining kesehatan sesuai standar (%)													
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai tipe Rumah Sakit (%)	-	80	80	15.012.248.946,00	85	16.244.003.900,00	90	17.576.824.400,00	95	19.019.002.800,00	100	20.579.511.900,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0001 - BLUD RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG
Meningkatnya pemenuhan obat dan BMHP	Persentase pemenuhan obat dan BMHP sesuai Fornas (%)	-	-	92	5.000.000.000,00	94	5.410.250.000,00	96	5.854.161.000,00	98	6.334.494.900,00	100	6.854.240.200,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0001 - BLUD RUMAH SAKIT H. BADARUDDIN KASIM TANJUNG
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.949.470.000,00		3.191.474.000,00		3.453.334.400,00		3.736.680.400,00		4.043.275.000,00	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	15	15	20	2.949.470.000,00	25	3.191.474.000,00	30	3.453.334.400,00	35	3.736.680.400,00	40	4.043.275.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					118.442.160,00		128.160.300,00		138.675.800,00		150.054.100,00		162.366.000,00	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	90	85	88	118.442.160,00	90	128.160.300,00	93	138.675.800,00	95	150.054.100,00	95	162.366.000,00	1.02.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS KESEHATAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					136.711.456,00		147.928.600,00		160.066.100,00		173.199.500,00		187.410.500,00	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	100	60	62	136.711.456,00	64	147.928.600,00	66	160.066.100,00	68	173.199.500,00	70	187.410.500,00	1.02.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					692.872.818.206,00		749.723.032.500,00		811.237.807.000,00		877.799.868.600,00		949.823.347.400,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					21.747.389.289,00		23.531.762.500,00		25.462.543.600,00		27.551.745.300,00		29.812.366.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	21.747.389.289,00	100	23.531.762.500,00	100	25.462.543.600,00	100	27.551.745.300,00	100	29.812.366.000,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					19.826.020.200,00		21.452.745.100,00		23.212.942.800,00		25.117.564.700,00		27.178.460.800,00	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Pengairan	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	76,88	77,00	77,12	19.826.020.200,00	77,24	21.452.745.100,00	77,36	23.212.942.800,00	77,48	25.117.564.700,00	77,60	27.178.460.800,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					40.000.000.000,00		43.282.000.000,00		46.833.288.100,00		50.675.959.300,00		54.833.921.700,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum (%)	85,36	86,00	100,00	40.000.000.000,00	100,00	43.282.000.000,00	100,00	46.833.288.100,00	100,00	50.675.959.300,00	100,00	54.833.921.700,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (%)	50,40	51,00	51,50		52,00		52,50		53,00		53,50		1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					0,00		3.603.222.600,00		3.898.866.900,00		4.218.768.800,00		4.564.918.700,00	
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	95,05	-	-	0,00	96,75	3.603.222.600,00	97,00	3.898.866.900,00	97,25	4.218.768.800,00	97,50	4.564.918.700,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					3.329.996.450,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	-	96,00	96,50	3.329.996.450,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	1.03.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					110.736.082.917,00		119.821.978.500,00		129.653.371.800,00		140.291.430.900,00		151.802.342.800,00	
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintah	Persentase bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik (%)	-	85,00	88,00	110.736.082.917,00	89,50	119.821.978.500,00	91,00	129.653.371.800,00	92,50	140.291.430.900,00	94,00	151.802.342.800,00	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					488.925.000.000,00		529.041.296.200,00		572.449.134.500,00		619.418.585.900,00		670.241.880.800,00	
Peningkatan Akses, Mobilitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan secara Merata	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap (%)	53,00	65,00	73,00	488.925.000.000,00	82,00	529.041.296.200,00	91,00	572.449.134.500,00	100,00	619.418.585.900,00	100,00	670.241.880.800,00	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap (%)	86,00	89,70	92,28		94,86		97,44		100,00		100,00		1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					1.124.976.936,00		1.217.281.200,00		1.317.159.100,00		1.425.232.000,00		1.542.172.200,00	
Meningkatnya Kualitas Pelaku Jasa Konstruksi	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Tertib Penyelenggaraan (%)	-	65,00	68,00	1.124.976.936,00	71,00	1.217.281.200,00	74,00	1.317.159.100,00	77,00	1.425.232.000,00	80,00	1.542.172.200,00	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					7.183.352.414,00		7.772.746.400,00		8.410.500.200,00		9.100.581.700,00		9.847.284.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Ketaatan Tata Ruang (%)	15,63	75,00	82,81	7.183.352.414,00	90,63	7.772.746.400,00	95,31	8.410.500.200,00	98,44	9.100.581.700,00	100,00	9.847.284.400,00	1.03.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					83.836.626.200,00		90.715.421.100,00		98.158.621.200,00		106.212.535.800,00		114.927.274.100,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					13.916.816.105,00		15.058.690.800,00		16.294.256.300,00		17.631.200.000,00		19.077.839.900,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	13.916.816.105,00	100	15.058.690.800,00	100	16.294.256.300,00	100	17.631.200.000,00	100	19.077.839.900,00	1.04.2.10.0.00.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					576.200.000,00		623.477.200,00		674.633.500,00		729.987.100,00		789.882.500,00	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100	100	100	576.200.000,00	100	623.477.200,00	100	674.633.500,00	100	729.987.100,00	100	789.882.500,00	1.04.2.10.0.00.0 1.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	8,33	16,67	33,33		50		66,67		83,33		100		1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					7.643.215.873,00		8.270.341.700,00		8.948.923.200,00		9.683.182.300,00		10.477.687.400,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni) (%)	-	4,01	8,18	7.643.215.873,00	12,56	8.270.341.700,00	17,15	8.948.923.200,00	21,95	9.683.182.300,00	26,96	10.477.687.400,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					5.163.828.000,00		5.587.520.000,00		6.045.976.000,00		6.542.048.300,00		7.078.823.300,00	
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak, aman, dan sehat bagi masyarakat di kawasan kumuh	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	55,93	56,33	56,73	5.163.828.000,00	57,18	5.587.520.000,00	57,68	6.045.976.000,00	58,18	6.542.048.300,00	58,5	7.078.823.300,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					56.536.566.222,00		61.175.391.400,00		66.194.832.200,00		71.626.118.100,00		77.503.041.000,00	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana,	67,7	70	75	56.536.566.222,00	80	61.175.391.400,00	85	66.194.832.200,00	90	71.626.118.100,00	95	77.503.041.000,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Sarana,dan Utilitas Umum) (%)													KAWASAN PERMUKIMAN
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					56.491.496.878,00		61.126.623.900,00		66.142.063.000,00		71.569.019.300,00		77.441.257.100,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					33.597.844.215,00		35.354.547.200,00		37.486.822.900,00		39.801.330.533,00		41.991.306.733,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	21.768.126.138,00	100	23.554.200.800,00	100	25.486.822.900,00	100	27.578.016.700,00	100	29.840.792.900,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	11.829.718.077,00	100	11.800.346.400,00	100	12.000.000.000,00	100	12.223.313.833,00	100	12.150.513.833,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.193.342.310,00		6.701.506.000,00		7.251.364.500,00		7.846.338.900,00		8.490.131.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan (%)	-	75	80	1.167.901.500,00	85	1.263.728.000,00	90	1.367.416.900,00	95	1.479.613.500,00	100	1.601.015.900,00	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	-	75	80	4.814.196.810,00	85	5.209.201.500,00	90	5.636.616.400,00	95	6.099.100.700,00	100	6.599.531.800,00	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	-	75	80		85		90		95		100		1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	-	75	80	211.244.000,00	85	228.576.500,00	90	247.331.200,00	95	267.624.700,00	100	289.583.300,00	1.05.0.00.0.00.0 1.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					7.960.461.623,00		9.613.617.400,00		11.170.979.300,00		12.848.844.467,00		14.978.814.967,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (Orang)	100	100	100	6.395.391.675,00	100	7.920.133.500,00	100	9.338.545.600,00	100	10.866.059.267,00	100	12.833.342.267,00	1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.0 2.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	terhadap bencana (Orang)													
	Persentase penanganan pra bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Orang)	100	100	100	997.512.977,00	100	1.079.358.900,00	100	1.167.919.800,00	100	1.263.748.000,00	100	1.367.438.500,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	567.556.971,00	100	614.125.000,00	100	664.513.900,00	100	719.037.200,00	100	778.034.200,00	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					8.739.848.730,00		9.456.953.300,00		10.232.896.300,00		11.072.505.400,00		11.981.004.400,00	
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	-	40	50	357.312.400,00	60	386.629.800,00	70	418.352.700,00	80	452.678.500,00	90	489.820.700,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	-	75	80	8.382.536.330,00	85	9.070.323.500,00	90	9.814.543.600,00	95	10.619.826.900,00	100	11.491.183.700,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					53.288.378.912,00		57.660.690.100,00		62.391.749.500,00		67.510.992.200,00		73.050.268.900,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					13.020.874.846,00		14.089.237.600,00		15.245.259.500,00		16.496.133.000,00		17.849.640.700,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	13.020.874.846,00	100	14.089.237.600,00	100	15.245.259.500,00	100	16.496.133.000,00	100	17.849.640.700,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					5.472.117.509,00		5.921.104.700,00		6.406.931.300,00		6.932.620.000,00		7.501.441.400,00	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA (%)	100	100	100	5.472.117.509,00	100	5.921.104.700,00	100	6.406.931.300,00	100	6.932.620.000,00	100	7.501.441.400,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Kabupaten pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					5.463.800.000,00		5.912.104.700,00		6.397.192.800,00		6.922.082.400,00		7.490.039.200,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (%)	100	100	100	5.463.800.000,00	100	5.912.104.700,00	100	6.397.192.800,00	100	6.922.082.400,00	100	7.490.039.200,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Indeks Peranan Sosial (Indeks)	70	75	80		85		90		95		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Indeks)	70	75	80		85		90		95		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya (%)	75	80	85		90		95		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
	Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Indeks)	70	75	80		85		90		95		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					27.636.514.234,00		29.904.090.200,00		32.357.720.800,00		35.012.671.700,00		37.885.461.400,00	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (Indeks)	70	80	90	27.636.514.234,00	100	29.904.090.200,00	100	32.357.720.800,00	100	35.012.671.700,00	100	37.885.461.400,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peningkatan Indeks Keberdayaan Ekonomi (Indeks)	70	75	80		85		90		95		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin (%)	80	90	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan (%)	70	80	90		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	70	80	90		95		100		100		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					1.379.357.685,00		1.492.533.900,00		1.614.996.300,00		1.747.506.700,00		1.890.889.600,00	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	75	78	79	1.379.357.685,00	80	1.492.533.900,00	80	1.614.996.300,00	85	1.747.506.700,00	87	1.890.889.600,00	1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL
	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang	70	75	80		85		90		95		100		1.06.0.00.0.00.0 1.0000 - DINAS SOSIAL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Meningkat Kesiapsiagaannya (%)													
	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					315.714.638,00		341.619.000,00		369.648.800,00		399.978.400,00		432.796.600,00	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	315.714.638,00	100	341.619.000,00	100	369.648.800,00	100	399.978.400,00	100	432.796.600,00	1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS SOSIAL
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					25.912.131.300,00		28.038.221.400,00		30.338.757.200,00		32.828.052.000,00		35.521.593.400,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					10.257.527.080,00		11.099.157.100,00		12.009.842.900,00		12.995.250.500,00		14.061.510.800,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	10.257.527.080,00	100	11.099.157.100,00	100	12.009.842.900,00	100	12.995.250.500,00	100	14.061.510.800,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					317.685.000,00		343.751.000,00		371.955.700,00		402.474.600,00		435.497.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	317.685.000,00	100	343.751.000,00	100	371.955.700,00	100	402.474.600,00	100	435.497.600,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					3.829.521.630,00		4.143.733.800,00		4.483.727.100,00		4.851.616.900,00		5.249.692.000,00	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	92	93	93		94		94		94		95		2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	0,27	5	6		7		8		9		10		2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					4.419.895.690,00		4.782.548.100,00		5.174.956.100,00		5.599.561.200,00		6.059.005.100,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten (%)	44	46	48	4.419.895.690,00	50	4.782.548.100,00	52	5.174.956.100,00	55	5.599.561.200,00	60	6.059.005.100,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					7.087.501.900,00		7.669.031.400,00		8.298.275.400,00		8.979.148.800,00		9.715.887.900,00	
Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan	78,89	80	81	7.087.501.900,00	82	7.669.031.400,00	83	8.298.275.400,00	84	8.979.148.800,00	85	9.715.887.900,00	2.07.0.00.0.00.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)													
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					14.856.161.697,00		16.075.109.300,00		17.394.071.800,00		18.821.255.100,00		20.365.538.700,00	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					10.430.493.403,00		11.286.315.300,00		12.212.357.400,00		13.214.381.300,00		14.298.621.200,00	
Meningkatnya Kelancaran dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	10.430.493.403,00	100	11.286.315.300,00	100	12.212.357.400,00	100	13.214.381.300,00	100	14.298.621.200,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.338.973.409,00		1.448.836.100,00		1.567.713.100,00		1.696.343.900,00		1.835.528.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,421	0,417	0,413	1.338.973.409,00	0,408	1.448.836.100,00	0,404	1.567.713.100,00	0,400	1.696.343.900,00	0,396	1.835.528.900,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	52,38	20	28		31		34		37		40		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	-	60,52	61,63		62,75		63,86		64,97		69,41		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					559.791.832,00		605.722.700,00		655.422.200,00		709.199.500,00		767.389.300,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	559.791.832,00	100	605.722.700,00	100	655.422.200,00	100	709.199.500,00	100	767.389.300,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					834.323.073,00		902.779.200,00		976.852.200,00		1.057.002.900,00		1.143.729.900,00	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar (%)	100	100	100	834.323.073,00	100	902.779.200,00	100	976.852.200,00	100	1.057.002.900,00	100	1.143.729.900,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					225.233.374,00		243.713.700,00		263.710.400,00		285.347.800,00		308.760.500,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	100	100	100	225.233.374,00	100	243.713.700,00	100	263.710.400,00	100	285.347.800,00	100	308.760.500,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					1.059.684.888,00		1.146.632.000,00		1.240.713.100,00		1.342.513.600,00		1.452.666.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	60,97	61	62	1.059.684.888,00	63	1.146.632.000,00	64	1.240.713.100,00	65	1.342.513.600,00	66	1.452.666.800,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					407.661.718,00		441.110.300,00		477.303.400,00		516.466.100,00		558.842.100,00	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	83,52	83,6	83,7	407.661.718,00	88,8	441.110.300,00	88,9	477.303.400,00	89	516.466.100,00	89,1	558.842.100,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					42.830.382.249,00		46.344.615.100,00		50.147.190.600,00		54.261.767.300,00		58.713.945.100,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					36.230.382.249,00		39.203.085.100,00		42.419.698.200,00		45.900.234.400,00		49.666.348.600,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	36.230.382.249,00	100	39.203.085.100,00	100	42.419.698.200,00	100	45.900.234.400,00	100	49.666.348.600,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					2.000.000.000,00		2.164.100.000,00		2.341.664.400,00		2.533.797.900,00		2.741.696.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)	305	100	100	2.000.000.000,00	100	2.164.100.000,00	100	2.341.664.400,00	100	2.533.797.900,00	100	2.741.696.000,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					2.300.000.000,00		2.488.715.000,00		2.692.914.000,00		2.913.867.500,00		3.152.950.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,65	93	94	2.300.000.000,00	95	2.488.715.000,00	96	2.692.914.000,00	97	2.913.867.500,00	97	3.152.950.300,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					1.500.000.000,00		1.623.075.000,00		1.756.248.300,00		1.900.348.400,00		2.056.271.900,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Desa Tahan Pangan (%)	100	100	100	1.500.000.000,00	100	1.623.075.000,00	100	1.756.248.300,00	100	1.900.348.400,00	100	2.056.271.900,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					800.000.000,00		865.640.000,00		936.665.700,00		1.013.519.100,00		1.096.678.300,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	90	100	100	800.000.000,00	100	865.640.000,00	100	936.665.700,00	100	1.013.519.100,00	100	1.096.678.300,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					17.163.373.800,00		18.571.628.400,00		20.095.430.400,00		21.744.260.300,00		23.528.376.800,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					49.872.000,00		53.963.900,00		58.391.600,00		63.182.600,00		68.366.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	100	20	40	49.872.000,00	60	53.963.900,00	80	58.391.600,00	90	63.182.600,00	100	68.366.700,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					16.881.695.800,00		18.266.838.900,00		19.765.633.000,00		21.387.403.100,00		23.142.239.500,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	100	20	40	16.881.695.800,00	60	18.266.838.900,00	80	19.765.633.000,00	90	21.387.403.100,00	100	23.142.239.500,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					231.806.000,00		250.825.600,00		271.405.800,00		293.674.600,00		317.770.600,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi (Bidang Tanah)	1.000	300	1.500	231.806.000,00	700	250.825.600,00	600	271.405.800,00	500	293.674.600,00	400	317.770.600,00	1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					66.709.178.979,00		71.682.666.700,00		77.564.229.000,00		84.678.373.500,00		90.876.233.500,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					17.247.129.992,00		18.662.257.000,00		20.193.495.100,00		21.850.371.300,00		23.643.194.200,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	17.247.129.992,00	100	18.662.257.000,00	100	20.193.495.100,00	100	21.850.371.300,00	100	23.643.194.200,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					1.224.130.992,00		824.570.900,00		892.226.900,00		1.715.434.100,00		1.106.185.400,00	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	10	10	10	1.224.130.992,00	20	824.570.900,00	30	892.226.900,00	40	1.715.434.100,00	50	1.106.185.400,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					4.613.904.761,00		4.992.475.600,00		5.402.108.200,00		5.845.351.100,00		6.324.962.100,00	
Menurunnya pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,26	69,19	69,39	4.613.904.761,00	69,59	4.992.475.600,00	69,79	5.402.108.200,00	69,99	5.845.351.100,00	70,19	6.324.962.100,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	96,78	71,39	71,69		71,99		72,29		72,59		72,89		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					9.160.104.450,00		9.911.691.000,00		10.724.945.200,00		11.604.926.900,00		12.557.111.100,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	85	87	88	9.160.104.450,00	89	9.911.691.000,00	90	10.724.945.200,00	90,50	11.604.926.900,00	90,95	12.557.111.100,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					736.406.202,00		796.828.300,00		862.208.000,00		932.952.100,00		1.009.500.800,00	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	20	20	20	736.406.202,00	20	796.828.300,00	30	862.208.000,00	40	932.952.100,00	50	1.009.500.800,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP					342.479.092,00		370.579.500,00		400.985.500,00		433.886.300,00		469.486.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)														
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH (%)	90,70	75	76	342.479.092,00	77	370.579.500,00	78	400.985.500,00	79	433.886.300,00	80	469.486.600,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					180.028.500,00		194.799.800,00		210.783.100,00		228.077.800,00		246.791.500,00	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hakMHAyang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	180.028.500,00	100	194.799.800,00	100	210.783.100,00	100	228.077.800,00	100	246.791.500,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					381.000.000,00		412.261.000,00		446.087.000,00		482.688.400,00		522.292.900,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	100	100	100	381.000.000,00	100	412.261.000,00	100	446.087.000,00	100	482.688.400,00	100	522.292.900,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)													2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					149.995.000,00		162.302.000,00		175.618.800,00		190.028.300,00		205.620.100,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	90	80	80	149.995.000,00	80	162.302.000,00	80	175.618.800,00	80	190.028.300,00	80	205.620.100,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pidana lingkungan hidup	Lingkungan Hidup (%)													
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					32.673.999.990,00		35.354.901.600,00		38.255.771.200,00		41.394.657.200,00		44.791.088.800,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (Indeks)	77	70	71	32.673.999.990,00	72	35.354.901.600,00	73	38.255.771.200,00	74	41.394.657.200,00	75	44.791.088.800,00	2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota (%)	90,72	91,45	92,18		92,90		93,63		94,36		95,08		2.11.0.00.0.00.01.0000 - DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					16.421.072.523,00		17.768.421.300,00		19.226.320.000,00		20.803.839.400,00		22.510.794.200,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					12.688.715.444,00		13.729.824.500,00		14.856.356.600,00		16.075.320.600,00		17.394.300.600,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	12.688.715.444,00	100	13.729.824.500,00	100	14.856.356.600,00	100	16.075.320.600,00	100	17.394.300.600,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					610.920.023,00		661.046.000,00		715.284.800,00		773.973.900,00		837.478.400,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	79,84	80	85	610.920.023,00	90	661.046.000,00	95	715.284.800,00	100	773.973.900,00	100	837.478.400,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (%)	2,74	5	10		15		20		25		30		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk-Elektronik (%)	99,75	99,80	99,85		99,90		99,95		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					243.928.400,00		263.942.700,00		285.599.100,00		309.032.500,00		334.388.600,00	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	99,11	100	100	243.928.400,00	100	263.942.700,00	100	285.599.100,00	100	309.032.500,00	100	334.388.600,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	63,89	75	75,38		75,76		76,14		76,52		77		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Buku Pokok Pemakaman (BPP) yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					2.606.804.656,00		2.820.692.900,00		3.052.130.700,00		3.302.558.000,00		3.573.532.800,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	26,82	36,58	39,02	2.606.804.656,00	43,90	2.820.692.900,00	48,78	3.052.130.700,00	53,65	3.302.558.000,00	53,65	3.573.532.800,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Persentase Informasi Kependudukan yang Dikelola (%)	90	92	93		95		98		100		100		2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					270.704.000,00		292.915.200,00		316.948.800,00		342.954.400,00		371.093.800,00	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	270.704.000,00	100	292.915.200,00	100	316.948.800,00	100	342.954.400,00	100	371.093.800,00	2.12.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN					20.256.171.400,00		21.918.190.000,00		23.716.577.100,00		25.662.522.000,00		27.768.131.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					8.397.742.782,00		9.086.777.500,00		9.832.347.500,00		10.639.091.600,00		11.512.029.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	8.397.742.782,00	100	9.086.777.500,00	100	9.832.347.500,00	100	10.639.091.600,00	100	11.512.029.000,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					6.984.627.000,00		7.557.715.600,00		8.177.826.100,00		8.848.816.700,00		9.574.862.100,00	
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	100	100	100	6.984.627.000,00	100	7.557.715.600,00	100	8.177.826.100,00	100	8.848.816.700,00	100	9.574.862.100,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					291.460.217,00		315.374.500,00		341.250.900,00		369.250.500,00		399.547.500,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	100	100	100	291.460.217,00	100	315.374.500,00	100	341.250.900,00	100	369.250.500,00	100	399.547.500,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					2.841.494.094,00		3.074.638.600,00		3.326.912.600,00		3.599.885.700,00		3.895.256.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	100	100	100	2.841.494.094,00	100	3.074.638.600,00	100	3.326.912.600,00	100	3.599.885.700,00	100	3.895.256.300,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik (%)	90	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					1.740.847.307,00		1.883.683.800,00		2.038.240.000,00		2.205.477.500,00		2.386.436.900,00	
Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat HukumAdat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	100	100	100	1.740.847.307,00	100	1.883.683.800,00	100	2.038.240.000,00	100	2.205.477.500,00	100	2.386.436.900,00	2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		2.13.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.020.935.803,00		3.268.803.500,00		3.537.008.700,00		3.827.220.100,00		4.141.243.300,00	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					831.377.440,00		899.591.900,00		973.403.400,00		1.053.271.100,00		1.139.691.900,00	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	10,3	10,3	10,3	831.377.440,00	10,2	899.591.900,00	10,2	973.403.400,00	10,1	1.053.271.100,00	10,1	1.139.691.900,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	14,8	14,8	14,4		14		13,6		13,2		12,8		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR) (Angka)	2,18	2,18	2,17		2,16		2,15		2,14		2,13		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.03 - PROGRAM					1.895.685.046,00		2.051.226.000,00		2.219.529.000,00		2.401.641.300,00		2.598.695.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)														
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	90,70	90,70	90,75	1.895.685.046,00	90,80	2.051.226.000,00	90,85	2.219.529.000,00	90,90	2.401.641.300,00	90,95	2.598.695.900,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive (mCPR) (Angka)	79,32	79,50	79,55		79,60		79,65		79,70		79,75		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need) (%)	4,79	4,34	3,89		3,43		2,98		2,53		2,08		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					293.873.317,00		317.985.600,00		344.076.300,00		372.307.700,00		402.855.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	67,3	67,3	67,5	293.873.317,00	67,55	317.985.600,00	67,60	344.076.300,00	67,65	372.307.700,00	67,68	402.855.500,00	2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	88,8	88,8	88,85		88,90		88,95		88,98		90,00		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.08.2.14.0.00.01.0000 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					43.508.539.165,00		47.078.414.700,00		50.941.198.500,00		55.120.923.700,00		59.643.595.400,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					22.172.337.260,00		23.991.577.500,00		25.960.086.400,00		28.090.111.400,00		30.394.905.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan	-	100	100	22.172.337.260,00	100	23.991.577.500,00	100	25.960.086.400,00	100	28.090.111.400,00	100	30.394.905.000,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Fungsi Perangkat Daerah	kesekretariatan (%)													
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					21.336.201.905,00		23.086.837.200,00		24.981.112.100,00		27.030.812.300,00		29.248.690.400,00	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Konektivitas Darat (%)	86	86	86	21.336.201.905,00	87	23.086.837.200,00	87	24.981.112.100,00	88	27.030.812.300,00	90	29.248.690.400,00	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	100	100	100		100		100		100		100		2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					29.928.683.148,00		32.384.331.400,00		35.041.465.700,00		37.916.617.900,00		41.027.676.300,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					12.254.475.473,00		13.259.955.100,00		14.347.934.400,00		15.525.182.400,00		16.799.023.600,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	12.254.475.473,00	100	13.259.955.100,00	100	14.347.934.400,00	100	15.525.182.400,00	100	16.799.023.600,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM					8.184.629.400,00		8.856.178.200,00		9.582.827.600,00		10.369.098.600,00		11.219.883.100,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK														
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	100	100	100	8.184.629.400,00	100	8.856.178.200,00	100	9.582.827.600,00	100	10.369.098.600,00	100	11.219.883.100,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					9.489.578.275,00		10.268.198.100,00		11.110.703.700,00		12.022.336.900,00		13.008.769.600,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (%)	100	100	100	9.489.578.275,00	100	10.268.198.100,00	100	11.110.703.700,00	100	12.022.336.900,00	100	13.008.769.600,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					23.486.037.686,00		25.413.066.700,00		27.498.208.500,00		29.754.436.300,00		32.195.787.400,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.265.352.367,00		24.092.224.500,00		26.068.991.500,00		28.207.952.300,00		30.522.414.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	22.265.352.367,00	100	24.092.224.500,00	100	26.068.991.500,00	100	28.207.952.300,00	100	30.522.414.800,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					48.824.907,00		52.830.900,00		57.165.600,00		61.856.000,00		66.931.200,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	50	52	54	48.824.907,00	55	52.830.900,00	56	57.165.600,00	57	61.856.000,00	58	66.931.200,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					80.548.184,00		87.157.100,00		94.308.300,00		102.046.200,00		110.419.000,00	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	56	58	60	80.548.184,00	62	87.157.100,00	64	94.308.300,00	66	102.046.200,00	70	110.419.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					234.414.638,00		253.648.300,00		274.460.100,00		296.979.500,00		321.346.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	50	55	60	234.414.638,00	65	253.648.300,00	70	274.460.100,00	75	296.979.500,00	80	321.346.600,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					121.439.900,00		131.404.000,00		142.185.600,00		153.851.900,00		166.475.400,00	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	0	10	11	121.439.900,00	12	131.404.000,00	13	142.185.600,00	14	153.851.900,00	15	166.475.400,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					252.792.166,00		273.533.700,00		295.977.100,00		320.262.000,00		346.539.400,00	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	50	52	55	252.792.166,00	58	273.533.700,00	60	295.977.100,00	62	320.262.000,00	65	346.539.400,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					482.665.524,00		522.268.200,00		565.120.300,00		611.488.400,00		661.661.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Angka)	140	150	160	482.665.524,00	165	522.268.200,00	170	565.120.300,00	175	611.488.400,00	180	661.661.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					14.334.494.900,00		15.510.639.800,00		16.783.287.400,00		18.160.355.800,00		19.650.412.699,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					10.493.338.720,00		11.354.317.100,00		12.285.938.800,00		13.294.000.000,00		14.384.772.699,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	10.493.338.720,00	100	11.354.317.100,00	100	12.285.938.800,00	100	13.294.000.000,00	100	14.384.772.699,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					608.116.120,00		658.012.000,00		712.001.800,00		770.421.500,00		833.634.500,00	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	100	100	100	608.116.120,00	100	658.012.000,00	100	712.001.800,00	100	770.421.500,00	100	833.634.500,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI					1.566.611.798,00		1.695.152.200,00		1.834.239.400,00		1.984.738.700,00		2.147.586.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
PENANAMAN MODAL														
Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	5	5	5	1.566.611.798,00	5	1.695.152.200,00	5	1.834.239.400,00	5	1.984.738.700,00	5	2.147.586.500,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					759.001.219,00		821.277.200,00		888.662.900,00		961.577.600,00		1.040.475.000,00	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	100	100	100	759.001.219,00	100	821.277.200,00	100	888.662.900,00	100	961.577.600,00	100	1.040.475.000,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					364.620.099,00		394.537.100,00		426.908.800,00		461.936.600,00		499.838.400,00	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	364.620.099,00	100	394.537.100,00	100	426.908.800,00	100	461.936.600,00	100	499.838.400,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					542.806.944,00		587.344.200,00		635.535.700,00		687.681.400,00		744.105.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	542.806.944,00	100	587.344.200,00	100	635.535.700,00	100	687.681.400,00	100	744.105.600,00	2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					34.352.476.871,00		37.171.097.400,00		40.220.985.700,00		46.521.117.400,00		57.527.777.200,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					9.599.333.949,00		10.386.959.200,00		11.239.209.200,00		12.161.386.300,00		13.159.228.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	9.599.333.949,00	100	10.386.959.200,00	100	11.239.209.200,00	100	12.161.386.300,00	100	13.159.228.000,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					8.454.168.395,00		9.147.832.900,00		9.898.412.500,00		10.710.577.200,00		11.589.380.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (%)	0,70	0,75	0,80	8.454.168.395,00	0,85	9.147.832.900,00	0,90	9.898.412.500,00	0,95	10.710.577.200,00	1,00	11.589.380.000,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (% Nilai)	0,14	0,45	0,76		1,06		1,37		1,67		1,98		2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	117,18	100	100		100		100		100		100		2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					15.093.974.527,00		16.332.435.100,00		17.672.511.300,00		22.122.540.800,00		31.127.297.500,00	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatda (%)	16	16	16	15.093.974.527,00	17	16.332.435.100,00	17	17.672.511.300,00	17,5	22.122.540.800,00	17,5	31.127.297.500,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Peningkatan Prestasi Olahraga (% Indeks)	4	8	10		12		14		16		18		2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					1.205.000.000,00		1.303.870.200,00		1.410.852.700,00		1.526.613.100,00		1.651.871.700,00	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	89	91	93	1.205.000.000,00	94	1.303.870.200,00	95	1.410.852.700,00	97	1.526.613.100,00	98	1.651.871.700,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					559.170.650,00		605.050.600,00		654.695.000,00		708.412.700,00		766.537.900,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN					559.170.650,00		605.050.600,00		654.695.000,00		708.412.700,00		766.537.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
STATISTIK SEKTORAL														
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	0	2,95	3,1	559.170.650,00	3,1	605.050.600,00	3,2	654.695.000,00	3,2	708.412.700,00	3,3	766.537.900,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					552.798.691,00		598.155.800,00		647.234.400,00		700.339.900,00		757.802.700,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					552.798.691,00		598.155.800,00		647.234.400,00		700.339.900,00		757.802.700,00	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	0	0,41	0,44	552.798.691,00	0,49	598.155.800,00	0,55	647.234.400,00	0,6	700.339.900,00	0,66	757.802.700,00	2.16.2.20.2.21.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					12.422.411.104,00		13.441.669.700,00		14.544.558.500,00		15.737.939.300,00		17.029.237.000,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					9.407.965.940,00		10.179.889.500,00		11.015.149.400,00		11.918.942.400,00		12.896.891.600,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	80	83	85	9.407.965.940,00	88	10.179.889.500,00	90	11.015.149.400,00	93	11.918.942.400,00	95	12.896.891.600,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					1.226.668.000,00		1.327.316.100,00		1.436.222.300,00		1.554.064.300,00		1.681.575.200,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	80	83	85	1.226.668.000,00	88	1.327.316.100,00	90	1.436.222.300,00	93	1.554.064.300,00	95	1.681.575.200,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	80	83	85		88		90		93		95		1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					280.202.850,00		303.193.400,00		328.070.400,00		354.988.500,00		384.115.300,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	80	83	85	280.202.850,00	88	303.193.400,00	90	328.070.400,00	93	354.988.500,00	95	384.115.300,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					1.155.074.314,00		1.249.848.100,00		1.352.398.100,00		1.463.362.300,00		1.583.431.100,00	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan (%)	80	83	85	1.155.074.314,00	88	1.249.848.100,00	90	1.352.398.100,00	93	1.463.362.300,00	95	1.583.431.100,00	1.01.2.22.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	80	83	85		88		90		93		95		1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					352.500.000,00		381.422.600,00		412.718.300,00		446.581.800,00		483.223.800,00	
Meningkatnya tata kelola museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (%)	80	83	85	352.500.000,00	88	381.422.600,00	90	412.718.300,00	93	446.581.800,00	95	483.223.800,00	1.01.2.22.0.00.0 1.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					13.572.126.019,00		14.685.718.900,00		15.890.682.100,00		17.194.512.500,00		18.605.322.200,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					10.213.986.705,00		11.052.044.300,00		11.958.864.500,00		12.940.089.300,00		14.001.823.600,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	10.213.986.705,00	100	11.052.044.300,00	100	11.958.864.500,00	100	12.940.089.300,00	100	14.001.823.600,00	2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					3.358.139.314,00		3.633.674.600,00		3.931.817.600,00		4.254.423.200,00		4.603.498.600,00	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar	Persentase Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Perpustakaan (%)	20	20	25	3.358.139.314,00	30	3.633.674.600,00	35	3.931.817.600,00	40	4.254.423.200,00	45	4.603.498.600,00	2.23.2.24.0.00.0 1.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Nasional Perpustakaan														
	Persentase Perpustakaan yang dikelola dengan Baik (%)	20	20	25		30		35		40		45		2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					1.453.509.608,00		1.572.770.000,00		1.701.815.700,00		1.841.449.600,00		1.992.540.400,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					895.042.808,00		967.637.400,00		1.047.311.500,00		1.133.563.900,00		1.226.934.300,00	
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	20	35	40	895.042.808,00	45	967.637.400,00	50	1.047.311.500,00	55	1.133.563.900,00	60	1.226.934.300,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					550.466.800,00		595.632.600,00		644.504.200,00		697.385.700,00		754.606.100,00	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	20	25	30	550.466.800,00	35	595.632.600,00	40	644.504.200,00	45	697.385.700,00	50	754.606.100,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP					8.000.000,00		9.500.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup (%)	0	2	2,5	8.000.000,00	3	9.500.000,00	3,5	10.000.000,00	4	10.500.000,00	4,5	11.000.000,00	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					7.882.633.245,00		8.529.403.200,00		9.229.240.500,00		9.986.499.500,00		10.805.891.600,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					800.000.000,00		865.640.000,00		936.665.700,00		1.013.519.100,00		1.096.678.300,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	0	7	7,5	800.000.000,00	8	865.640.000,00	8,5	936.665.700,00	9	1.013.519.100,00	9,5	1.096.678.300,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					4.656.460.245,00		5.038.522.800,00		5.451.933.500,00		5.899.264.600,00		6.383.299.200,00	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	0	7	7,5	4.656.460.245,00	8	5.038.522.800,00	8,5	5.451.933.500,00	9	5.899.264.600,00	9,5	6.383.299.200,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.000.000.000,00		1.082.050.000,00		1.170.832.200,00		1.266.898.900,00		1.370.847.900,00	
Meningkatnya kelestarian perairan (sungai & danau) dan	Persentase kepatuhan pelaku usaha. (%)	4	100	100	1.000.000.000,00	100	1.082.050.000,00	100	1.170.832.200,00	100	1.266.898.900,00	100	1.370.847.900,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
keanekaragaman hayati														PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					1.426.173.000,00		1.543.190.400,00		1.669.809.100,00		1.806.816.900,00		1.955.066.200,00	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	67,07	47,10	48,32	1.426.173.000,00	48,51	1.543.190.400,00	48,67	1.669.809.100,00	48,67	1.806.816.900,00	48,60	1.955.066.200,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.514.330.629,00		4.884.731.300,00		5.285.523.400,00		5.719.200.500,00		6.188.460.700,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.549.139.488,00		1.676.169.300,00		1.814.032.200,00		1.963.617.000,00		2.125.885.500,00	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	4,52	5,98	7,44	1.549.139.488,00	8,90	1.676.169.300,00	10,37	1.814.032.200,00	11,83	1.963.617.000,00	13,29	2.125.885.500,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota (%)	1,25	1,67	2,25		1,68		3,25		1,69		4,25		2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	2,50	3,75	5		6,25		7,5		8,75		10		2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					2.705.194.278,00		2.927.155.400,00		3.167.328.500,00		3.427.207.800,00		3.708.410.100,00	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Tingkat hunian akomodasi (%)	29,03	32,67	36,31	2.705.194.278,00	39,95	2.927.155.400,00	43,60	3.167.328.500,00	47,24	3.427.207.800,00	50,88	3.708.410.100,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	1,42	1,48	1,53		1,59		1,64		1,70		1,75		2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)	25,15	29,76	34,37		38,97		43,58		48,19		52,79		2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	20	25	50		60		70		80		90		2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya kualitas	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki	-	-	2	60.000.000,00	3	65.000.000,00	4	70.000.000,00	5	75.000.000,00	6	80.000.000,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
ekosistem kreatif	Kekayaan Intelektual (%)													OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					199.996.863,00		216.406.600,00		234.162.700,00		253.375.700,00		274.165.100,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	-	-	20	199.996.863,00	40	216.406.600,00	60	234.162.700,00	80	253.375.700,00	100	274.165.100,00	2.19.3.26.0.00.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					66.115.129.711,00		71.539.875.600,00		77.409.721.900,00		83.761.189.100,00		90.633.794.300,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					15.312.510.692,00		16.568.902.100,00		17.928.380.500,00		19.399.404.100,00		20.991.125.200,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	15.312.510.692,00	100	16.568.902.100,00	100	17.928.380.500,00	100	19.399.404.100,00	100	20.991.125.200,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					12.522.495.273,00		13.549.965.900,00		14.661.740.500,00		15.864.736.200,00		17.166.437.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sektor perikanan, tanaman pangan & hortikultura	Persentase peningkatan Produksi Hortikultura (%)	0	5	5,5	5.841.380.058,00	6	6.320.665.200,00	6,5	6.839.275.700,00	7	7.400.438.200,00	7,5	8.007.644.100,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Persentase peningkatan Produksi Tanaman Pangan (%)	0	5	5,5		6		6,5		7		7,5		2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase peningkatan Produksi Perkebunan (%)	1,4	1,5	1,6	6.681.115.215,00	1,7	7.229.300.700,00	1,8	7.822.464.800,00	1,9	8.464.298.000,00	2,0	9.158.793.600,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	Persentase peningkatan Produksi Komoditas Peternakan (%)	3	4	5		5		6		6		6		3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					30.930.628.375,00		33.468.486.400,00		36.214.575.600,00		39.185.981.400,00		42.401.191.100,00	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian sektor perikanan,	Luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Ha)	6.714	6.714	6.714	7.169.563.254,00	6.714	7.757.825.900,00	6.714	8.394.355.500,00	6.714	9.083.112.300,00	6.714	9.828.381.600,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
tanaman pangan & hortikultura														PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase cakupan pelayanan prasarana jalan produksi dan bangunan pendukung kegiatan perkebunan dan peternakan (%)	70	72	74	23.761.065.121,00	76	25.710.660.500,00	78	27.820.220.100,00	80	30.102.869.100,00	82	32.572.809.500,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					2.202.364.555,00		2.383.068.500,00		2.578.599.200,00		2.790.173.200,00		3.019.106.900,00	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Peningkatan Pengawasan Peredaran Daging ASUH (%)	75	75	77	2.202.364.555,00	78	2.383.068.500,00	79	2.578.599.200,00	80	2.790.173.200,00	81	3.019.106.900,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/Â kota (%)	0,2	0,2	0,2		0,2		0,2		0,2		0,2		3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN					2.350.997.400,00		2.543.896.600,00		2.752.623.200,00		2.978.475.800,00		3.222.859.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
BENCANA PERTANIAN														
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sektor perikanan, tanaman pangan & hortikultura	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	100	100	100	186.743.850,00	100	202.066.100,00	100	218.645.600,00	100	236.585.400,00	100	255.997.200,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase Penanganan Bencana Pertanian sektor perkebunan dan peternakan (%)	40	40	41	2.164.253.550,00	42	2.341.830.500,00	43	2.533.977.600,00	44	2.741.890.400,00	45	2.966.862.500,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN														
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian														
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					2.796.133.416,00		3.025.556.100,00		3.273.802.900,00		3.542.418.400,00		3.833.073.700,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian sektor perikanan,	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)	0	100	100	2.260.000.000,00	100	2.445.433.000,00	100	2.646.080.700,00	100	2.863.191.600,00	100	3.098.116.400,00	2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN, TANAMAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
tanaman pangan & hortikultura														PANGAN DAN HORTIKULTURA
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian sektor perkebunan dan peternakan	Persentase Peningkatan Kelembagaan Ekonomi Petani (%)	3	25	40	536.133.416,00	50	580.123.100,00	57	627.722.200,00	62,5	679.226.800,00	67	734.957.300,00	3.27.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					16.002.036.386,00		17.315.003.200,00		18.735.698.900,00		20.272.962.700,00		21.936.359.000,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					26.237.039,00		28.389.700,00		30.719.000,00		33.239.400,00		35.966.600,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi (%)	40	45	48	26.237.039,00	50	28.389.700,00	55	30.719.000,00	60	33.239.400,00	70	35.966.600,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					15.397.988.930,00		16.661.393.900,00		18.028.461.200,00		19.507.696.400,00		21.108.302.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	20	20	20	15.397.988.930,00	15	16.661.393.900,00	15	18.028.461.200,00	15	19.507.696.400,00	15	21.108.302.800,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					339.636.240,00		367.503.300,00		397.656.900,00		430.284.600,00		465.589.400,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	50	51	52	339.636.240,00	53	367.503.300,00	54	397.656.900,00	55	430.284.600,00	56	465.589.400,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					111.663.410,00		119.771.500,00		128.851.500,00		139.266.800,00		150.185.900,00	
Meningkatnya Pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Angka)	0	1	1	111.663.410,00	1	119.771.500,00	2	128.851.500,00	2	139.266.800,00	3	150.185.900,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					123.510.767,00		133.644.800,00		144.610.300,00		156.475.500,00		169.314.300,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	50	50	50	123.510.767,00	50	133.644.800,00	50	144.610.300,00	50	156.475.500,00	50	169.314.300,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					3.000.000,00		4.300.000,00		5.400.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan (%)	0	0	0	3.000.000,00	0	4.300.000,00	0	5.400.000,00	0	6.000.000,00	0	7.000.000,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.397.922.918,00		1.512.622.300,00		1.636.732.800,00		1.771.026.600,00		1.916.339.200,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					1.357.848.307,00		1.469.259.700,00		1.589.812.400,00		1.720.256.500,00		1.861.403.500,00	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Kontribusi industri terhadap PDRB (Indeks)	5,96	6,02	6,08	1.357.848.307,00	6,14	1.469.259.700,00	6,20	1.589.812.400,00	6,26	1.720.256.500,00	6,33	1.861.403.500,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					14.085.299,00		15.240.900,00		16.491.400,00		17.844.500,00		19.308.600,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	65	70	75	14.085.299,00	80	15.240.900,00	85	16.491.400,00	90	17.844.500,00	95	19.308.600,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					25.989.312,00		28.121.700,00		30.429.000,00		32.925.600,00		35.627.100,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap (Persentase)	100	100	100	25.989.312,00	100	28.121.700,00	100	30.429.000,00	100	32.925.600,00	100	35.627.100,00	2.17.3.31.3.30.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					107.420.368.100,00		118.234.209.200,00		130.935.325.900,00		145.678.569.200,00		157.631.495.700,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					50.680.030.900,00		54.838.327.400,00		59.337.812.100,00		64.206.479.500,00		69.474.621.100,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	49.862.163.900,00	100	53.946.851.400,00	100	58.380.907.100,00	100	63.175.966.500,00	100	68.354.142.100,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Perangkat Daerah														
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah daerah	Indeks Kematangan Organisasi (Indeks)	3	3	3,1	817.867.000,00	3,2	891.476.000,00	3,3	956.905.000,00	3,4	1.030.513.000,00	3,5	1.120.479.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,335	4,355	4,375		4,395		4,415		4,435		4,455		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					51.731.195.800,00		57.975.740.400,00		65.732.649.800,00		75.126.013.700,00		81.290.103.100,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan / Nilai EPPD (Nilai)	2,9	2,92	2,93	2.895.770.000,00	2,94	3.234.306.000,00	2,95	3.668.671.000,00	2,96	4.218.869.000,00	2,97	4.566.360.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya kualitas kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	100	48.234.395.800,00	100	54.074.290.400,00	100	61.306.678.800,00	100	70.035.649.700,00	100	75.780.124.100,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
Meningkatnya Kualitas Kebijakan	Indeks Kualitas Kebijakan (Nilai)	65	66	67	601.030.000,00	68	667.144.000,00	69	757.300.000,00	70	871.495.000,00	71	943.619.000,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					5.009.141.400,00		5.420.141.400,00		5.864.864.000,00		6.346.076.000,00		6.866.771.500,00	
Meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	90	90	91	1.828.773.400,00	92	2.284.998.000,00	93	2.472.144.000,00	94	2.674.476.000,00	95	2.893.837.100,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pembangunan yang lebih efektif														
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa	Indeks Tatakelola Pengadaan Barang/Jasa (Nilai)	63,33	64	65	3.180.368.000,00	66	3.135.143.400,00	67	3.392.720.000,00	68	3.671.600.000,00	69	3.972.934.400,00	4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama (%)	0	0	0		0		0		0		0		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif (%)	82,72	84,87	87,02		89,18		91,33		93,49		95,64		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (%)	26,86	28,97	31,08		33,20		35,31		37,42		39,54		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan (%)	74,61	77,46	80,31		83,17		86,02		88,88		91,73		4.01.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					97.506.504.129,00		105.506.912.700,00		114.163.754.800,00		123.530.890.800,00		133.666.600.300,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					51.446.945.040,00		55.668.166.800,00		60.235.739.800,00		65.178.082.200,00		70.525.943.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KABUPATEN/ KOTA														
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	51.446.945.040,00	100	55.668.166.800,00	100	60.235.739.800,00	100	65.178.082.200,00	100	70.525.943.800,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					46.059.559.089,00		49.838.745.900,00		53.928.015.000,00		58.352.808.600,00		63.140.656.500,00	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Angka)	100	100	100	32.383.634.409,00	100	35.040.711.600,00	100	37.915.801.900,00	100	41.026.793.400,00	100	44.393.041.700,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	13.675.924.680,00	100	14.798.034.300,00	100	16.012.213.100,00	100	17.326.015.200,00	100	18.747.614.800,00	4.02.0.00.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					18.545.599.579,00		20.067.265.900,00		21.713.784.900,00		23.495.400.800,00		25.423.198.300,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					14.122.654.344,00		15.281.418.100,00		16.535.258.400,00		17.891.976.300,00		19.360.012.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	14.122.654.344,00	100	15.281.418.100,00	100	16.535.258.400,00	100	17.891.976.300,00	100	19.360.012.900,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.013.296.874,00		2.178.487.800,00		2.357.232.700,00		2.550.643.600,00		2.759.923.900,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	100	100	100	2.013.296.874,00	100	2.178.487.800,00	100	2.357.232.700,00	100	2.550.643.600,00	100	2.759.923.900,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					2.409.648.361,00		2.607.360.000,00		2.821.293.800,00		3.052.780.900,00		3.303.261.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	100	100	100	1.353.495.450,00	100	1.464.549.700,00	100	1.584.716.000,00	100	1.714.741.900,00	100	1.855.436.400,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	100	100	100	320.532.212,00	100	346.832.000,00	100	375.289.500,00	100	406.082.000,00	100	439.401.100,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah (%)	100	100	100	735.620.699,00	100	795.978.300,00	100	861.288.300,00	100	931.957.000,00	100	1.008.424.000,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02 - KEUANGAN					337.959.252.907,00		365.688.809.300,00		395.693.575.900,00		428.160.233.600,00		463.290.780.500,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					55.439.245.266,00		59.988.035.200,00		64.910.053.400,00		70.235.923.200,00		75.998.780.600,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	32.394.840.864,00	100	35.052.837.500,00	100	37.928.922.800,00	100	41.040.990.900,00	100	44.408.404.200,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	23.044.404.402,00	100	24.935.197.700,00	100	26.981.130.600,00	100	29.194.932.300,00	100	31.590.376.400,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					271.255.469.933,00		293.511.981.200,00		317.594.639.200,00		343.653.279.300,00		371.850.030.800,00	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	23,60	30	30	1.128.658.446,00	30	1.221.264.800,00	30	1.321.469.500,00	30	1.429.896.000,00	30	1.547.218.900,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	42	40	40		40		40		40		40		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	82,79	84	84,5	269.210.699.487,00	85	291.299.437.500,00	85,5	315.200.556.400,00	86	341.062.762.100,00	86,5	369.046.961.800,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Penurunan SILPA (%)	20,69	20,25	20		19,75		19,50		19,25		19		5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	916.112.000,00	100	991.278.900,00	100	1.072.613.300,00	100	1.160.621.200,00	100	1.255.850.100,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					4.201.787.210,00		4.546.543.800,00		4.919.587.700,00		5.323.239.800,00		5.760.011.600,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	13	14	14	4.201.787.210,00	14,5	4.546.543.800,00	15	4.919.587.700,00	15,5	5.323.239.800,00	16	5.760.011.600,00	5.02.0.00.0.00.01.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					7.062.750.498,00		7.642.249.100,00		8.269.295.600,00		8.947.791.300,00		9.681.957.500,00	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	9,17	8,60	10,29	5.126.452.648,00	10,43	5.547.078.100,00	10,58	6.002.216.000,00	10,72	6.494.697.900,00	10,87	7.027.587.900,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan	Cakupan Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan (%)	100	100	100	851.446.590,00	100	921.307.700,00	100	996.900.900,00	100	1.078.696.600,00	100	1.167.203.600,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya penerapan sistern informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	100	100	100	1.084.851.260,00	100	1.173.863.300,00	100	1.270.178.700,00	100	1.374.396.800,00	100	1.487.166.000,00	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENDAPATAN DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					14.442.105.645,00		15.627.080.300,00		16.909.282.100,00		18.296.688.600,00		19.797.931.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					9.688.401.242,00		10.483.334.500,00		11.343.492.000,00		12.274.225.500,00		13.281.325.700,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	9.688.401.242,00	100	10.483.334.500,00	100	11.343.492.000,00	100	12.274.225.500,00	100	13.281.325.700,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					4.753.704.403,00		5.143.745.800,00		5.565.790.100,00		6.022.463.100,00		6.516.606.100,00	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Kebutuhan Pegawai yang terpenuhi sesuai ketentuan (%)	100	100	100	2.630.154.603,00	100	2.845.958.900,00	100	3.079.469.900,00	100	3.332.140.500,00	100	3.605.542.600,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian (Indeks)	90	90	90		91		91		92		92		5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	100	1.122.425.300,00	100	1.214.520.200,00	100	1.314.171.500,00	100	1.421.999.200,00	100	1.538.674.200,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya (%)	90	90	90	506.170.248,00	90	547.701.500,00	90	592.640.400,00	90	641.266.500,00	90	693.882.400,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas penilaian kineria ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	100	100	100	494.954.252,00	100	535.565.200,00	100	579.508.300,00	100	627.056.900,00	100	678.506.900,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					4.101.115.982,00		4.437.612.500,00		4.801.718.600,00		5.195.699.600,00		5.622.006.700,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					4.101.115.982,00		4.437.612.500,00		4.801.718.600,00		5.195.699.600,00		5.622.006.700,00	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial, dan Fungsional (%)	100	100	100	3.172.532.982,00	100	3.432.839.400,00	100	3.714.504.000,00	100	4.019.279.100,00	100	4.349.060.900,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar, serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	100	100	100	117.020.000,00	100	126.621.400,00	100	137.010.600,00	100	148.252.300,00	100	160.416.400,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	100	100	100	811.563.000,00	100	878.151.700,00	100	950.204.000,00	100	1.028.168.200,00	100	1.112.529.400,00	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					2.991.531.200,00		3.236.986.200,00		3.502.580.800,00		3.789.967.400,00		4.100.934.100,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					886.531.200,00		959.271.000,00		1.037.979.100,00		1.123.145.200,00		1.215.299.200,00	
Meningkatnya pemanfaatan kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	62	62	64	886.531.200,00	65	959.271.000,00	67	1.037.979.100,00	69	1.123.145.200,00	70	1.215.299.200,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					2.105.000.000,00		2.277.715.200,00		2.464.601.700,00		2.666.822.200,00		2.885.634.900,00	
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkam pemerintah, masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (Rasio)	1:3	1:3	1:3	2.105.000.000,00	1:3	2.277.715.200,00	1:3	2.464.601.700,00	1:3	2.666.822.200,00	1:3	2.885.634.900,00	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					26.581.874.700,00		28.762.917.400,00		31.122.914.700,00		33.676.549.700,00		36.439.710.400,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					23.179.995.226,00		25.081.913.800,00		27.139.884.800,00		29.366.712.300,00		31.776.251.000,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	23.179.995.226,00	100	25.081.913.800,00	100	27.139.884.800,00	100	29.366.712.300,00	100	31.776.251.000,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.272.232.964,00		2.458.669.600,00		2.660.403.400,00		2.878.689.400,00		3.114.885.800,00	
Menurunnya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh BPK RI (%)	87	88	88,50	2.272.232.964,00	89	2.458.669.600,00	89,50	2.660.403.400,00	90	2.878.689.400,00	90	3.114.885.800,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Irjen Kemendagri (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP (%)	33	35	40		50		60		70		70		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah (%)	91	92	93		94		94,5		95		95		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Penyelesaian TP/TGR (%)	91,80	92	92,70		93,30		94		95		95		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Perangkat Daerah yang telah Menerapkan Manajemen Risiko (%)	65	70	75		80		85		90		90		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (%)	2,00	2,00	2,50		2,70		3,00		3,50		3,50		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.129.646.510,00		1.222.334.000,00		1.322.626.500,00		1.431.148.000,00		1.548.573.600,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Indeks)	3,00	3,20	3,30	1.129.646.510,00	3,40	1.222.334.000,00	3,60	1.322.626.500,00	3,70	1.431.148.000,00	3,70	1.548.573.600,00	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase capaian dan ketepatan waktu Pemenuhan Kewajiban penyampaian LHKPN (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat (%)	94,86	95	95,50		96		97		98		98		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase CapaianTindak Lanjut Pelimpahan Pengaduan Masyarakat dari Inspektorat Jenderal Kemendagri (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Persentase Pemenuhan dan Ketepatan Laporan Rutin dan Insidental kepada Inspektorat Jenderal Kemendagri (%)	100	100	100		100		100		100		100		6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					100.851.635.591,00		109.126.508.600,00		118.080.335.000,00		127.768.823.100,00		138.252.251.900,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					78.557.581.150,00		85.003.230.000,00		91.977.744.300,00		99.524.517.600,00		107.690.503.600,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	17.494.313.164,00	100	18.929.721.500,00	100	20.482.905.100,00	100	22.163.527.400,00	100	23.982.044.800,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	16.584.886.250,00	100	17.945.676.100,00	100	19.418.118.800,00	100	21.011.375.400,00	100	22.735.358.700,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	5.167.057.749,00	100	5.591.014.800,00	100	6.049.757.500,00	100	6.546.140.100,00	100	7.083.250.800,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	4.766.680.048,00	100	5.157.786.100,00	100	5.580.982.400,00	100	6.038.902.000,00	100	6.534.393.900,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	4.406.580.062,00	100	4.768.139.900,00	100	5.159.365.700,00	100	5.582.691.600,00	100	6.040.751.400,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	5.956.292.683,00	100	6.445.006.400,00	100	6.973.819.100,00	100	7.546.020.900,00	100	8.165.171.900,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA
Meningkatnya Kelancaran	Nilai Kepuasan terhadap	-	100	100	4.065.241.242,00	100	4.398.794.200,00	100	4.759.715.200,00	100	5.150.249.800,00	100	5.572.827.700,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 -

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	pelayanan kesekretariatan (%)													KECAMATAN PUGAAN
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	3.743.032.400,00	100	4.050.148.200,00	100	4.382.462.800,00	100	4.742.043.800,00	100	5.131.128.400,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	5.276.588.429,00	100	5.709.532.500,00	100	6.177.999.600,00	100	6.684.904.400,00	100	7.233.400.800,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	3.859.620.800,00	100	4.176.302.600,00	100	4.518.968.200,00	100	4.889.749.500,00	100	5.290.953.400,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	3.641.678.088,00	100	3.940.477.700,00	100	4.263.793.800,00	100	4.613.638.000,00	100	4.992.186.900,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	-	100	100	3.595.610.235,00	100	3.890.630.000,00	100	4.209.856.100,00	100	4.555.274.700,00	100	4.929.034.900,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					3.368.311.487,00		3.644.680.900,00		3.943.726.400,00		4.267.308.500,00		4.617.440.700,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	714.597.622,00	100	773.230.300,00	100	836.673.800,00	100	905.322.800,00	100	979.604.500,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	381.300.500,00	100	412.586.200,00	100	446.438.800,00	100	483.069.100,00	100	522.704.900,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	desa/kelurahan (Kegiatan)													
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	264.916.000,00	100	286.652.300,00	100	310.172.100,00	100	335.621.700,00	100	363.159.400,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan (Skor)	0	0	85		85		85		85		85		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	283.778.672,00	100	307.062.700,00	100	332.257.100,00	100	359.518.700,00	100	389.017.200,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan														
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	227.484.000,00	100	246.149.000,00	100	266.345.500,00	100	288.199.100,00	100	311.845.800,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	492.354.584,00	100	532.752.200,00	100	576.464.500,00	100	623.763.400,00	100	674.943.100,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan														
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	12	12	12		12		12		12		12		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	240.414.099,00	100	260.140.000,00	100	281.484.400,00	100	304.580.100,00	100	329.570.800,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	12	12	12	136.248.800,00	12	147.428.000,00	12	159.524.400,00	12	172.613.300,00	12	186.776.200,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan														
	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kecamatan (Skor)	0	85	85		85		85		85		85		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	185.553.010,00	100	200.777.600,00	100	217.251.400,00	100	235.076.800,00	100	254.364.800,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	163.170.600,00	100	176.558.700,00	100	191.045.300,00	100	206.720.500,00	100	223.681.900,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	136.849.000,00	100	148.077.400,00	100	160.227.100,00	100	173.373.700,00	100	187.599.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	desa/kelurahan (Kegiatan)													
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, efektivitas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar desa/kelurahan dan ketepatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Persentase layanan administrasi masyarakat yang diselesaikan tepat waktu (%)	100	100	100	141.644.600,00	100	153.266.500,00	100	165.842.000,00	100	179.449.300,00	100	194.173.100,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					14.139.077.172,00		15.299.187.700,00		16.554.485.300,00		17.912.780.300,00		19.382.523.400,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	11	11	11	6.430.179.514,00	11	6.957.775.700,00	11	7.528.661.100,00	11	8.146.387.700,00	11	8.814.798.800,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
desa/kelurahan														
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	20	20	20		20		20		20		20		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	10	10	10	5.894.973.695,00	10	6.378.656.200,00	10	6.902.024.900,00	10	7.468.336.000,00	10	8.081.112.900,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	20	20	20		20		20		20		20		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	14	14	14	142.036.900,00	14	153.691.000,00	14	166.301.300,00	14	179.946.300,00	14	194.710.800,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	14	14	14		14		14		14		14		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	7	7	7	218.928.660,00	7	236.891.700,00	7	256.328.600,00	7	277.360.300,00	7	300.117.700,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	7	7	7		7		7		7		7		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	15	15	15	100.236.800,00	15	108.461.200,00	15	117.360.400,00	15	126.989.800,00	15	137.409.300,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM,	15	15	15		15		15		15		15		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)													
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	12	12	12	904.179.833,00	12	978.367.700,00	12	1.058.642.700,00	12	1.145.504.300,00	12	1.239.492.900,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	12	12	12		12		12		12		12		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	7	7	7	105.681.099,00	7	114.352.200,00	7	123.734.700,00	7	133.887.100,00	7	144.872.500,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	7	7	7		7		7		7		7		7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	9	9	9	77.170.800,00	9	83.502.600,00	9	90.353.900,00	9	97.767.400,00	9	105.789.200,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	9	9	9		9		9		9		9		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	14	14	14	104.705.971,00	14	113.297.000,00	14	122.593.000,00	14	132.651.700,00	14	143.535.700,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	14	14	14		14		14		14		14		7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif	13	13	13	49.440.000,00	13	53.496.500,00	13	57.885.800,00	13	62.635.300,00	13	67.774.500,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
n desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	masyarakat (Kegiatan)													
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	13	13	13		13		13		13		13		7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	6	6	6	64.295.900,00	6	69.571.300,00	6	75.279.600,00	6	81.456.200,00	6	88.139.600,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	6	6	6		6		6		6		6		7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan dan kapasitas kelembagaan	Jumlah kegiatan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Kegiatan)	9	9	9	47.248.000,00	9	51.124.600,00	9	55.319.300,00	9	59.858.200,00	9	64.769.500,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
masyarakat desa/kelurahan														
	Jumlah pelatihan dan pembinaan kelembagaan masyarakat (RT/RW, LPM, PKK, Karang Taruna, dll) (Kegiatan)	9	9	9		9		9		9		9		7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					853.812.151,00		923.867.000,00		999.669.700,00		1.081.692.000,00		1.170.444.300,00	
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	12	150.941.400,00	12	163.326.100,00	12	176.727.000,00	12	191.227.400,00	12	206.917.600,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
	Persentase laporan gangguan ketertiban yang ditindaklanjuti dalam <= 2 hari (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	12	140.153.000,00	12	151.652.500,00	12	164.095.500,00	12	177.559.500,00	12	192.128.200,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
penanganan laporan gangguan														
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	14	14	14	90.343.651,00	14	97.756.300,00	14	105.777.200,00	14	114.456.200,00	14	123.847.300,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	12	72.575.300,00	12	78.530.100,00	12	84.973.400,00	12	91.945.400,00	12	99.489.500,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	15	15	15	65.760.000,00	15	71.155.600,00	15	76.993.900,00	15	83.311.200,00	15	90.146.800,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1	32.400.000,00	1	35.058.400,00	1	37.934.900,00	1	41.047.400,00	1	44.415.300,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan														
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	7	7	7	40.320.000,00	7	43.628.200,00	7	47.207.800,00	7	51.081.100,00	7	55.272.300,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	9	9	9	56.519.600,00	9	61.157.000,00	9	66.174.900,00	9	71.604.500,00	9	77.479.600,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	12	63.229.200,00	12	68.417.100,00	12	74.030.700,00	12	80.104.900,00	12	86.677.500,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	12	40.790.000,00	12	44.136.800,00	12	47.758.200,00	12	51.676.700,00	12	55.916.700,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan														
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	12	43.300.000,00	12	46.852.700,00	12	50.696.900,00	12	54.856.500,00	12	59.357.400,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU
Meningkatnya koordinasi upaya penanganan ketentraman dan ketertiban umum serta kecepatan penanganan laporan gangguan	Jumlah kegiatan pemantauan dan koordinasi keamanan wilayah (Kegiatan)	12	12	12	57.480.000,00	12	62.196.200,00	12	67.299.300,00	12	72.821.200,00	12	78.796.100,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					3.070.903.294,00		3.322.870.300,00		3.595.511.300,00		3.890.522.500,00		4.209.739.400,00	
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	2	2	2	716.956.200,00	2	775.782.400,00	2	839.435.300,00	2	908.310.900,00	2	982.837.800,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI														
	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	201.872.000,00	4	218.435.500,00	4	236.358.100,00	4	255.751.200,00	4	276.735.500,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	195.924.000,00	4	211.999.500,00	4	229.394.000,00	4	248.215.700,00	4	268.581.700,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
keutuhan NKRI														
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	177.258.120,00	4	191.802.100,00	4	207.539.400,00	4	224.568.000,00	4	242.993.800,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	193.917.346,00	4	209.828.200,00	4	227.044.600,00	4	245.673.600,00	4	265.831.100,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
keutuhan NKRI														
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	266.788.010,00	4	288.677.900,00	4	312.363.900,00	4	337.993.300,00	4	365.725.600,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	251.637.360,00	4	272.284.200,00	4	294.625.100,00	4	318.799.000,00	4	344.956.400,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dan bela negara (Kegiatan)													
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	194.477.300,00	4	210.434.100,00	4	227.700.200,00	4	246.383.000,00	4	266.598.700,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	283.102.193,00	4	306.330.700,00	4	331.465.100,00	4	358.661.800,00	4	388.090.000,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	151.040.000,00	4	163.432.800,00	4	176.842.400,00	4	191.352.300,00	4	207.052.700,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	331.554.000,00	4	358.758.000,00	4	388.194.000,00	4	420.045.300,00	4	454.510.000,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya fasilitasi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan bela negara dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Kegiatan)	4	4	4	106.376.765,00	4	115.104.900,00	4	124.549.200,00	4	134.768.400,00	4	145.826.100,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
	Jumlah kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam forum kebangsaan dan bela negara (Kegiatan)	1	1	1		1		1		1		1		7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					861.950.337,00		932.672.700,00		1.009.198.000,00		1.092.002.200,00		1.181.600.500,00	
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ekonomi Sosial Budaya (%)	100	100	100	245.052.800,00	100	265.159.300,00	100	286.915.600,00	100	310.457.000,00	100	335.929.900,00	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dan desa (Kegiatan)													
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN TANJUNG
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	110.659.155,00	100	119.738.700,00	100	129.563.200,00	100	140.193.800,00	100	151.696.700,00	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN MURUNG PUDAK
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	66.882.600,00	100	72.370.300,00	100	78.308.200,00	100	84.733.300,00	100	91.685.600,00	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
desa dan kecamatan														
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN TANTA
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	52.212.800,00	100	56.496.800,00	100	61.132.300,00	100	66.148.200,00	100	71.575.600,00	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN MUARA HARUS
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	32.925.192,00	100	35.626.700,00	100	38.549.800,00	100	41.712.800,00	100	45.135.300,00	7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan														
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN BANUA LAWAS
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100	69.781.490,00	100	75.507.000,00	100	81.702.300,00	100	88.405.900,00	100	95.659.600,00	7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA
	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA
	Jumlah pertemuan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan antar desa/kelurahan (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.06.0000 - KECAMATAN KELUA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	47.982.800,00	100	51.919.700,00	100	56.179.700,00	100	60.789.200,00	100	65.776.900,00	7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.07.0000 - KECAMATAN PUGAAN
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	73.705.800,00	100	79.753.300,00	100	86.297.000,00	100	93.377.600,00	100	101.039.200,00	7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.08.0000 - KECAMATAN JARO
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	72.924.600,00	100	78.908.000,00	100	85.382.400,00	100	92.388.000,00	100	99.968.400,00	7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.09.0000 - KECAMATAN MUARA UYA
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	35.669.600,00	100	38.596.200,00	100	41.763.000,00	100	45.189.600,00	100	48.897.400,00	7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.10.0000 - KECAMATAN HARUAI
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	21.015.900,00	100	22.740.200,00	100	24.606.000,00	100	26.624.900,00	100	28.809.400,00	7.01.0.00.0.00.11.0000 - KECAMATAN UPAU
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa, pembinaan dan supervisi APBDes tepat waktu dan koordinasi antara pemerintah desa dan kecamatan	Persentase desa yang mendapat pembinaan administrasi pemerintahan secara berkala (%)	100	100	100	33.137.600,00	100	35.856.500,00	100	38.798.500,00	100	41.981.900,00	100	45.426.500,00	7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
	Persentase desa yang mendapat asistensi perencanaan dan pengelolaan APBDes (%)	100	100	100		100		100		100		100		7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah pertemuan koordinasi rutin antara kecamatan dan desa (Kegiatan)	4	4	4		4		4		4		4		7.01.0.00.0.00.12.0000 - KECAMATAN BINTANG ARA
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					13.982.173.000,00		15.129.410.100,00		40.371.186.000,00		43.683.641.400,00		19.427.207.700,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					8.053.636.894,00		8.714.437.800,00		9.429.457.400,00		10.203.144.300,00		11.040.312.200,00	
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan terhadap pelayanan kesekretariatan (%)	100	100	100	8.053.636.894,00	100	8.714.437.800,00	100	9.429.457.400,00	100	10.203.144.300,00	100	11.040.312.200,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					1.604.294.118,00		1.735.926.400,00		1.878.359.100,00		2.032.478.400,00		2.199.243.200,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	80	82	84	1.604.294.118,00	85	1.735.926.400,00	88	1.878.359.100,00	90	2.032.478.400,00	95	2.199.243.200,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN					2.053.571.568,00		2.222.067.100,00		26.404.795.700,00		28.571.309.100,00		3.074.908.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	80	81	83	2.053.571.568,00	84	2.222.067.100,00	85	26.404.795.700,00	88	28.571.309.100,00	90	3.074.908.800,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					476.231.000,00		515.305.700,00		557.586.500,00		603.336.400,00		652.840.100,00	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	70	71	72	476.231.000,00	73	515.305.700,00	75	557.586.500,00	78	603.336.400,00	80	652.840.100,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					634.439.420,00		686.495.100,00		742.822.000,00		803.770.500,00		869.719.800,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (%)	70	72	73	634.439.420,00	75	686.495.100,00	76	742.822.000,00	78	803.770.500,00	80	869.719.800,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					1.160.000.000,00		1.255.178.000,00		1.358.165.300,00		1.469.602.700,00		1.590.183.600,00	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	1.160.000.000,00	100	1.255.178.000,00	100	1.358.165.300,00	100	1.469.602.700,00	100	1.590.183.600,00	8.01.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					3.089.124.282.265.00		3.359.086.918.000.00		3.661.700.396.400.00		3.969.892.902.900.00		4.274.221.530.799.00	

Sumber: hasil analisis, 2025

Percepatan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka dalam bab ini dimuat perencanaan SPM. Lebih rinci mengenai rencana pencapaian masing-masing SPM dimuat pada Renstra Perangkat Daerah pengampu. Berikut ini disajikan rencana pencapaian SPM di Kabupaten Tabalong:

Tabel 4.2
Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
Penyediaan infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang memadai.	Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan serta fasilitas sekolah terutama di daerah terpencil. Menyediakan akses internet, komputer, dan perangkat teknologi lainnya untuk mendukung pembelajaran digital. Menyediakan buku teks, alat peraga, dan bahan ajar yang berkualitas dan relevan.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	• APS PAUD • APS Pendidikan Dasar • APS Pendidikan Kesetaraan • Kemampuan Literasi SD • Kemampuan Literasi SMP • Kemampuan Numerasi SD • Kemampuan Numerasi SMP • Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B • Iklim Keamanan SD • Iklim Keamanan SMP • Iklim Kebinekaan SD • Iklim Kebinekaan SMP • Iklim Inklusivitas SD • Iklim Inklusivitas SMP	% % % % % % % % % % % % % % %
Memperkaya kurikulum yang relevan dan berbasis kebutuhan.	Pengembangan Kurikulum yang berbasis kompetensi, pendidikan karakter dan keterampilan praktis.			
Peningkatan akses dan inklusivitas pendidikan.	Memberikan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu. Menyediakan pendidikan inklusif untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Mengembangkan sistem pembelajaran jarak jauh untuk menjangkau daerah terpencil.			

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
Peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidik	Program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga pendidik serta sertifikasi profesi memenuhi untuk standar nasional. Memberikan tunjangan dan insentif yang memadai untuk meningkatkan motivasi dan kinerja.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tingkat pertumbuhan pendidik Paud S1 dan D IV	%

Sumber: Rancangan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 4.3
Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
Penyediaan fasilitas Kesehatan yang memadai.	Meningkatkan semua fasilitas kesehatan memiliki peralatan medis yang lengkap dan memadai. Membangun fasilitas kesehatan di daerah terpencil untuk menjangkau seluruh masyarakat. Menggunakan teknologi modern seperti telemedicine untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	• Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil • Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin • Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir • Pelayanan Kesehatan Balita • Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar • Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif • Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut • Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	% % % % % % % %
Peningkatan akses layanan kesehatan.	Meningkatkan cakupan BPJS Kesehatan, layanan kesehatan gratis dan klinik keliling untuk menjangkau daerah-daerah terpencil.			

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
Peningkatan kualitas tenaga kesehatan.	Memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan melalui insentif dan tunjangan yang lebih baik. Memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	• Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus • Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar • Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis • Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	% % % %
Peningkatan kualitas obat dan alat kesehatan.	Menjaga ketersediaan obat-obatan berkualitas di semua fasilitas Kesehatan. Menyediakan alat kesehatan modern untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan pengobatan.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		
Program kesehatan preventif dan promotif.	Meningkatkan penyuluhan, imunisasi, vaksinasi dan skrining kesehatan berkala untuk deteksi dini penyakit	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		

Sumber: Rancangan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 4.4
Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
-	-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	-

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
Peningkatan infrastruktur dan kualitas pelayanan air minum.	Peningkatan kapasitas produksi air bersih. Membangun dan memperluas jaringan perpipaan. Melakukan konservasi sumber air baku dan memanfaatkan teknologi pengolahan air yang efisien dan ramah lingkungan.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	%
Pemerataan akses air minum yang terjangkau	Pemasangan sambungan rumah gratis dan tarif khusus atau subsidi bagi keluarga miskin.			
Peningkatan pemberdayaan masyarakat	Mengembangkan program air minum yang dikelola oleh masyarakat (PAMSIMAS).			
-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic	%
-	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-	-
-	-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-	-
-	-	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-	-

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
Peningkatan infrastruktur jalan.	Membangun jalan dan jembatan baru antar kecamatan/desa, dan kawasan ekonomi strategis untuk mengurangi keterisolasian. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan untuk memperpanjang usia penggunaan. Mengalokasikan anggaran yang prporsional untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang rusak agar tidak semakin parah.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-	-
Optimalisasi anggaran dan pendanaan.	Meningkatkan optimalisasi sumber dana untuk proyek jalan. Menggandeng sektor swasta melalui skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) untuk pembiayaan infrastruktur jalan.			
Penguatan tata kelola dan regulasi.	Menyusun prioritas pembangunan transportasi berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan geografis. Meningkatkan transparansi dan pengawasan dalam pengerjaan proyek jalan/jembatan untuk memastikan kualitas yang baik			

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
Pemanfaatan teknologi dan inovasi.	Menggunakan teknologi Geographical Information System (GIS) untuk monitoring dan pemeliharaan jalan. Mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas cerdas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas.			
-	-	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-	-
-	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-	-

Sumber: Rancangan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 4.5
Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
• Peningkatan infrastruktur dan kualitas hunian. • Penguatan regulasi dan tata kelola perumahan. • Pengembangan kawasan hunian berbasis lingkungan. • Pemberdayaan masyarakat dalam	• Memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Mendorong pembangunan rumah bersubsidi bagi MBR melalui program pemerintah seperti FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Penyediaan akses air bersih, sanitasi, listrik, dan drainase yang baik untuk meningkatkan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	• Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota • Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah	% % %

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
pengelolaan hunian.	kualitas lingkungan hunian. • Menetapkan regulasi penerapan standar perumahan layak. Meningkatkan pengendalian kawasan kumuh melalui regulasi tata ruang dan pembangunan infrastruktur.Mendorong legalitas kepemilikan tanah dan rumah melalui percepatan sertifikasi tanah. • Mempermudah akses Masyarakat terhadap KPR bersubsidi dengan suku bunga rendah dan cicilan terjangkau. Memberikan bantuan kepada masyarakat (BSPS) untuk membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara mandiri. • Mendorong pembangunan kawasan hunian berkonsep smart dan green housing.Menyiapkan konektivitas dan akses transportasi yang terintegrasi dengan Kawasan perumahan. • Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang konstruksi rumah yang aman dan berstandar. Mendorong pembentukankelompok masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan hunian. Menyediakan program pendampingan bagi warga di permukiman kumuh.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	kabupaten/kota	

Tabel 4.6
Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
(Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum)

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
• Peningkatan upaya preventi (pencegahan dini tindak kriminalitas) . • Penegakan peraturan yang tegas dan adil. • Penerapan teknologi dalam pengawasan ketentraman dan ketertiban.	• Meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum dan kampanye anti-kriminalitas serta sosialisasi kebijakan keamanan. Meningkatkan keamanan public dengan menempatkan CCTV di titik rawan gangguan tramtibum dan optimalisasi peran Satpol PP dan Linmas dalam menjaga keamanan lingkungan. • Meningkatkan kapasitas aparatur Satpol PP dan memperkuat koordinasi dengan APH untuk penegakan peraturan yang cepat dan transparan. • Optimalisasi aplikasi layanan pengaduan masyarakat berbasis online untuk laporan cepat gangguan tramtibum.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota	%

Sumber: Rancangan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 4.7
Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat
(Sub Urusan Bencana)

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
-	-	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	• Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) • Komunikas, Informasi dan Edukasi rawan bencana • Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) • Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon) • Pelatihan pencegahan dan mitigasi • Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana • Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana • Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana • Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas • Respon cepat darurat bencana • Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana • Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana	% % % % % % % % % % % %

Sumber: Rancangan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 4.8
Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
(Sub Urusan Kebakaran)

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
-	-	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%

Sumber: Rancangan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tabel 4.9
Rencana Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial

Strategi	Kebijakan	Program	Indikator	Satuan
• Penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan sosial • Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat.	• Meningkatkan kapasitas dan fasilitas serta kualitas tenaga layanan sosial. Mengembangkan layanan sosial berbasis teknologi digital untuk mempercepat akses informasi dan pelayanan. Optimalisasi sistem data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). • Mengedukasi masyarakat tentang hak-hak sosial dan layanan yang tersedia. Mendorong keterlibatan sektor swasta dan peran serta masyarakat dalam membantu sesama melalui program gotong royong dan filantropi.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	-	-
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	• Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti. • Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti. • Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di luar panti.	% % %
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar dalam dan luar panti.	%
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/kota.	%
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	-	-

Sumber: Rancangan Rencana Aksi Daerah Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja adalah capaian basil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Sementara itu, Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari ketja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan. Dalam subbab ini disajikan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah yang diindikasikan oleh indikator kinerja dengan target capaian selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Sementara indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala daerah dan diperoleh dari indikator tujuanf sasaran yang terseleksi. Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi dan pada tingkat dampak (*impact*).

Tabel 4.10
Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

No.	Indikator Kinerja	*Baseline*		Target				
		2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,97	76,08-76,40	76,4-76,92	76,93-77,39	77,40-77,86	77,89-78,06	78,07-78,77
2	Indeks ketahanan pangan	85,94	86	87	88	89	90	91
3	Persentase penduduk miskin (%)	5,64	5,44-4,48	5,24-4,74	4,73-4,20	4,19-3,87	3,87-3,48	3,47-2,97
4	Indeks Gini (Indeks)	0,300	0,273-0,263	0,269-0,259	0,258-0,256	0,255-0,253	0,253-0,250	0,250-0,240
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,44	3,20-2,64	3,16-2,57	3,00-2,45	2,95-2,40	2,90-2,30	2,89-2,20
6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,87	5,4-5,5	5,7-6,6	5,8-7,2	6-7,8	6,2-8,1	6,4-8,4
7	PDRB perkapita (Rp. Juta)	122,31	142,65	162,99	183,33	200	237,50	275,00
8	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	5,96	6,02	6,08	6,14	6,20	6,26	6,33
9	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	7,76	7,78	7,79	7,81	7,82	7,84	7,85
10	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB (%)	1,42	1,47	1,53	1,6	1,66	1,72	1,78
11	Nilai Realisasi Investasi non Tambang (Rupiah)	606.520.463.800	636.846.486.990	668.688.811.340	702.123.251.907	772.335.577.097	849.569.134.806	934.526.048.287
12	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	1,76	2,03	2,16	2,28	2,40	2,53	2,65

No.	Indikator Kinerja	*Baseline*		Target				
		2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	Indeks Daya Saing Daerah (Indeks)	3,41	3,44	3,48	3,51	3,55	3,58	3,62
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,98	74,72	75,47	76,22	76,98	77,75	78,53
15	Indeks Infrastruktur (Indeks)	0,729	0,736	0,743	0,751	0,758	0,766	0,774
16	Indeks Desa (Indeks)	N/A	81	84	86	88	91	93
17	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	N/A	2,36	2,31	2,16	2,02	1,87	1,68
18	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	157,77	151,37	144,96	138,56	132,16	125,75	114,10
19	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Indeks)	N/A	71	73	75	77	79	81
20	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,421	0,417	0,413	0,408	0,404	0,400	0,396
21	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	80,76	80,91	81,06	81,22	81,37	81,52	81,68
22	Indeks Pemerintahan Digital (Indeks)	N/A	N/A	2,5	2,7	3	3,5	4
23	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	4,49	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61
24	Indeks Integritas	72,87	76,40	77,38	78,35	79,33	80,30	81,27
25	Nilai SAKIP (kategori)	B	BB	BB	BB	A	A	AA
26	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,92	13,29	13,31	13,32	13,33	13,34	13,43
27	Rata-Rata lama sekolah (tahun)	9,15	9,62	9,9	10,19	10,47	10,75	11,07
28	Persentase penduduk Not in Education, Employment or Training (NEET) usia 20–24 tahun	22,07	21,00	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00
29	Umur Harapan Hidup (tahun)	74,76	76,37	76,39	76,41	76,43	76,45	76,81

No.	Indikator Kinerja	*Baseline*		Target				
		2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
30	Angka konflik bernuansa SARA	0	0	0	0	0	0	0
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) (Indeks)	N/A	58,89-58,91	59,67-59,75	60,46-60,58	61,24-61,42	62,02-62,25	62,80-63,09
32	Indeks SPBE (Indeks)	3,7	4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	Opini BPK (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
34	Predikat Inovasi Daerah (kategori)	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
35	Prevalensi Stunting	23,10	22	21	20	19	17	15

Sumber: hasil proyeksi, 2025

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator makro pembangunan dan indikator kinerja kunci. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Penyajian IKD dibagi menjadi 5 (lima) kelompok, yakni Aspek Geografi Dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat; Aspek Daya Saing; Aspek Pelayanan Umu; dan Indikator Kinerja Kunci. Setiap indikator dilengkapi dengan target per tahun sampai tahun 2030.

Tabel 4.11
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	73,98	74,72	75,47	76,22	76,98	77,75	78,53	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	85,94	86	87	88	89	90	91	
3	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	-	2,36	2,31	2,16	2,02	1,87	1,68	
4	Indeks Risiko Bencana	Indeks	157,77	151,37	144,96	138,56	132,16	125,75	114,10	
5	Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	74,66	74,86	75,06	75,26	75,46	75,66	75,86	
6	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	62	64,38	66,75	69,13	71,5	81	
7	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	GgCO2-e	-	676.341,17	747.828,07	841.381,57	942.264,09	1.043.228,63	1.166.273,00	
8	Penurunan Emisi GRK Tahunan	GgCO2-e	-	57.149,94	71.587,93	93.654,19	100.975,68	101.052,44	123.166,01	
9	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	3,06	3,01	2,96	2,91	2,86	2,81	2,76	
10	Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	%	-	3,00	4,1	5,19	6,29	7,38	11,76	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
11	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	95,00	95,19	95,38	95,56	95,75	96,5	
12	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	%	-	75,00	76,56	78,13	79,69	81,25	87,50	
13	Kapasitas Air Baku	m3/detik	-	0,74	0,91	1,09	1,26	1,43	2,12	
14	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Aman	%	-	64,06	66,31	68,56	70,8	73,05	82,03	
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	-	71	73	75	77	79	81	
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,97	76.08-76.40	76.40-76.92	76.93-77.39	77.40-77.86	77.89-78.06	78.07-78.77	
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4,87	5.4-5.5	5.7-6.6	5.8-7.2	6.0-7.8	6.2-8.1	6.4-8.4	
4	PDRB perkapita	Rp. Juta Per Tahun	122,31	142,65	162,99	183,33	200,00	237,50	275,00	
5	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,421	0,417	0,413	0,408	0,404	0,400	0,396	
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,44	3.20-2.64	3.16-2.57	3.00-2.45	2.95-2.40	2.90-2.30	2.89-2.20	
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,92	13,29	13,31	13,32	13,33	13,34	13,43	
8	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	%	-	58.89-58.91	59.67-59.75	60.46-60.58	61.24-61.42	62.02-62.25	62.80-63.09	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
9	Persentase Penduduk Miskin	%	5,64	5.44-4.48	5.24-4.74	4.73-4.20	4.19-3.87	3.87-3.48	3.47-2.97	
10	Indeks Gini	Indeks	0,300	0.273-0.263	0.269-0.259	0.258-0.256	0.255-0.253	0.253-0.250	0.250-0.240	
11	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,15	9,62	9,90	10,19	10,47	10,75	11,07	
12	Umur Harapan Hidup	Tahun	74,76	76,37	76,39	76,41	76,43	76,45	76,81	
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	(%)	23,10	22,00	21,00	20,00	19,00	17,00	15,00	
14	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	-	50.00-65.00	50.94-65.63	51.88-66.26	52.81-66.89	53.75-67.50	57.50-70.00	
15	Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	-	0.00-2.00	3.85-5.85	7.69-9.70	11.54-13.55	15.38-17.38	30.75-32.75	
16	Laju inflasi	%	2,24	2.00-3.50	2.00-3.50	2.00-3.00	2.00-3.00	1.88-3.75	1.88-3.75	
17	APM SMP	%	82,01	82,89	87,38	91,60	95,80	100	100	
18	Nilai dalam Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	645	650	725	750	775	800	825	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
19	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	57,65	57,95	58,25	58,55	58,85	59,15	59,45	
20	Nilai PDRB Kabupaten - ADHB	triliun rupiah	32,64	33,3	47,05	60,81	74,56	88,31	143,32	
21	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	-	65.00-75.00	65.63-75.25	66.27-75.50	66.90-75.75	67.53-76.01	70.07-77.02	
22	Angka Melek Huruf	%	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,97	99,98	
23	Persentase kecamatan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	-	16.78-18.78	20.57-22.57	24.35-26.36	28.14-30.15	31.92-33.92	47.07-49.07	
24	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	-	26	28,13	30,25	32,38	34,5	43	
25	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	-	40	60	70	80	90	95	
26	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja	%	-	61,8	62,63	63,45	64,28	65,10	68,40	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	di Bidang Keahlian Menengah Tinggi									
27	Angka kriminalitas yang tertangani	%	-	83	100	100	100	100	100	
28	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	-	90	90,75	91,50	92,25	93	96	
29	APM SD	%	98,74	99,41	99,45	99,50	99,70	100	100	
30	Indeks Zakat Nasional	Poin	0,52	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,7	
31	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	-	9.28-10.50	9.38-10.60	9.48-10.70	9.58-10.80	9.59-10.81	9.89-11.11	
32	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	-	43,83	46,40	48,98	51,55	54,12	64,42	
33	Rasio penduduk yang bekerja	%	96,56	96,92	96,95	97	97,10	97,25	97,32	
34	Persentase lulusan pelatihan yang bekerja di sektor formal dan informal	%	31	40	45	50	55	60	65	
35	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	Nilai	131,95	132,70	133,45	134,20	134,95	135,70	136,45	
36	Indeks Harmoni Indonesia (IHaI)	Indeks	6,1	6,1	6,2	6,3	6,5	6,7	7	
37	Nilai Tukar Petani (NTP) Peternakan	Nilai	106,06	109,02	109,08	109,14	109,20	109,26	109,32	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
38	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,47	86,47	86,97	87,47	87,97	88,47	88,97	
39	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	67,10	67,10	67,25	67,40	67,60	67,80	68,00	
40	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	161	150	140	130	120	110	100	
41	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	%	100	100	100	100	100	100	100	
42	Angka Kematian Balita (AKABA) / 1.000 Kelahiran Hidup	Angka	13	13	13	13	13	12	12	
43	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	%	100	100	100	100	100	100	100	
44	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	90	90	90	90	90	90	90	
45	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,80	100	100	100	100	100	100	
46	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	3,41	3,44	3,48	3,51	3,55	3,58	3,62	
2	Indeks Desa	Indeks	-	81	84	86	88	91	93	
3	Indeks Infrastruktur	Angka	0,729	0,736	0,743	0,751	0,758	0,766	0,774	
4	Nilai Realisasi Investasi non Tambang	Milyar Rupiah	606,52	636,85	668,69	702,12	772,33	849,57	934,53	
5	Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB	%	5,96	6,02	6,08	6,14	6,20	6,26	6,33	
6	Persentase penduduk yang sedang Tidak Sekolah, Bekerja atau Mengikuti Pelatihan (NEET) usia 20â€“24 tahun	%	22,07	21,00	20,00	19,00	18,00	17,00	16,00	
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	1,76	2,03	2,16	2,28	2,40	2,53	2,65	
8	Kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB	%	7,76	7,78	7,79	7,81	7,82	7,84	7,85	
9	Kontribusi Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	%	1,42	1,47	1,53	1,60	1,66	1,72	1,78	
10	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	-	72,06	72,31	72,56	72,81	73,06	73,31	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
11	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	-	2,41	2,50	2,59	2,68	2,77	3,13	
12	Rasio Ketergantungan	%	47,36	47,16	46,96	46,76	46,56	46,36	46,16	
13	Net Ekspor Barang dan Jasa	%	-	60,57	61,22	61,87	62,52	63,17	65,78	
14	Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi	Indeks	-	7,130	7,27	7,42	7,56	7,70	8,42	
15	Kontribusi Seluruh Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	-	43,11	45,11	47,12	49,12	51,12	59,13	
16	Persentase Desa Mandiri	%	74	85	87	89	90	92	94	
17	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	71	71,5	72,5	73,5	74	74,5	75	
18	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB	%	12,32	12,40	12,75	13,09	13,44	13,78	14,08	
19	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten	%	-	5,27	5,71	6,15	6,58	7,02	8,77	
20	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	-	60,52	61,63	62,75	63,86	64,97	69,41	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
21	Rasio PAD terhadap PDRB	%	0,81	0,85	0,88	0,91	0,94	0,97	1,00	
22	Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	-	1,20	1,21	1,23	1,24	1,25	1,30	
23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	1.023.390	1.500.000	1.562.500	1.625.000	1.687.500	1.750.000	2.000.000	
24	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	1,13	1,18	1,22	1,31	1,42	1,54	1,67	
25	Persentase Koperasi Aktif	Persentase	56	58	60	62	64	66	70	
26	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	57,83	60,33	62,83	65,33	67,83	70,33	72,83	
27	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	7,61	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	80,76	80,91	81,06	81,22	81,37	81,52	81,68	
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,7	4	-	-	-	-	-	
3	Jumlah Konflik Bernuansa SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	0	
4	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	-	2,5	2,7	3	3,5	4	
5	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,49	4,51	4,53	4,55	4,57	4,59	4,61	
6	Indeks Integritas	Indeks	72,87	76,40	77,38	78,35	79,33	80,30	81,27	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
7	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	
8	Nilai SAKIP	Kategori	B	BB	BB	BB	A	A	AA	
9	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,66	97.67-97.82	97.83-97.97	97.98-98.12	98.13-98.27	98.28-98.42	98.43-98.57	
10	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Predikat Inovasi Daerah	Predikat	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	
12	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,5812	4,61	4,63	4,65	4,66	4,68	4,69	
13	Angka Kriminalitas	Angka	-	10	9,93	9,86	9,78	9,71	8,50	
14	Indeks Demokrasi Indonesia	indeks	70	72	73	75	76	77	78	
15	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	76,98	77	77	78	79	80	80	
16	Persentase hasil riset yang dijadikan dasar perumusan kebijakan pemerintah daerah	%	62	62	64	65	67	69	70	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	TIngkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	95,42	95,92	96,42	96,92	97,42	97,92	98,42	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar									
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	91,21	91,71	92,21	92,71	93,21	93,71	94,21	
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	91,26	91,76	92,26	92,76	93,26	93,76	94,26	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	139,36	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan	%	99,77	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	pelayanan persalinan									
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,81	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	90,1	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkanpelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas skrining mendapatkan kesehatan sesuai standar	%	97,8	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	%	83,15	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	kesehatan jiwa sesuai standar									
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,1	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	60,6	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	61,5	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase orang usia15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	99	100	100	100	100	100	100	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	53,00	65,00	73,00	82,00	91,00	100,00	100,00	
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	76,88	77,00	77,12	77,24	77,36	77,48	77,60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	85,36	86,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-	
7	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh	%	-	-	-	-	-	-	-	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota									
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	55,93	56,33	56,73	57,18	57,68	58,18	58,5	
2	Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak Layak Huni)	%	-	4,01	8,18	12,56	17,15	21,95	26,96	
3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	8,33	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	
4	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Utilitas Umum)	%	67,7	70	75	80	85	90	95	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
2	Jumlah warga negara yang memperoleh	Orang	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana									
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	12,44	12,39	12,30	12,25	12,20	12,15	12,10	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemisyang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	panti (Indikator SPM)									
2	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	75	78	79	80	80	85	87	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	78,89	80	81	82	83	84	85	
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	92	93	93	94	94	94	95	
3	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,27	5	6	7	8	9	10	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	44	46	48	50	52	55	60	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.00 penduduk perempuan)	%	0.01:0.02	0.02:0.02	0.02:0.02	0.02:0.02	0.02:0.03	0.03:0.03	0.03:0.03	
2	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	%	52,38	20	28	31	34	37	40	
3	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase cadangan pangan	%	304,75	100	100	100	100	100	100	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	1.000	300	1.500	700	600	500	400	
2	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah	%	100	20	40	60	80	90	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi									
3	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	100	20	40	60	80	90	100	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	90,70	75	76	77	78	79	80	
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	90,72	91,45	92,18	92,90	93,63	94,36	95,08	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Kepemilikan akta kelahiran	%	65,03	75	75,38	75,76	76,14	76,52	77	
2	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	11	15	16	18	20	22	24	
3	Persentase anak usia 0-17 tahun	%	79,84	80	85	90	95	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA									
4	Perekaman KTP elektronik	%	99,75	99,80	99,85	99,90	99,95	100	100	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	20	25	30	35	40	45	50	
3	Persentase Desa yang Memiliki Administrasi Pemerintahan Desa yang Baik	%	90	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	100	100	100	100	100	100	100	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)	Angka	2,18	2,18	2,17	2,16	2,15	2,14	2,13	
2	Persentase Kebutuhan Ber- KB yang tidak Terpenuhi (Unmet Need)	%	4,79	4,34	3,89	3,43	2,98	2,53	2,08	
3	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	79,61	81,78	83,95	86,13	88,30	90,48	92,65	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	86	86	86	86	87	87	90	
2	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	%	51	51	51	51	51	51	51	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik,	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota									
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	45	45	50	55	60	65	70	
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	0,99	1,45	1,91	2,38	2,84	3,31	3,77	
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	56	56,10	56,15	56,20	56,21	56,30	56,35	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	4,15	4,5	5	6	7	8	9	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Peningkatan Prestasi Olahraga	% Indeks	4	8	10	12	14	16	18	
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	0,14	0,45	0,76	1,06	1,37	1,67	1,98	
3	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi	%	117,18	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan									
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40	41	44	49	55	60	66	
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	80	83	85	88	90	93	95	
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	87,66	87,76	87,86	87,96	88,06	88,16	88,26	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	67,04	67,25	67,50	67,75	68,00	68,25	68,50	
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	85,77	87,00	89,00	89,00	89,20	89,40	89,40	
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	85,77	87,00	89,00	89,00	89,20	89,40	89,40	
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Ton	100,11	100,30	100,50	100,70	101,00	101,30	101,50	
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Tingkat hunian akomodasi	%	29,03	32,67	36,31	39,95	43,60	47,24	50,88	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4,52	5,98	7,44	8,90	10,37	11,83	13,29	
3	Persentase Peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/kota	%	1,25	1,67	2,25	1,68	3,25	1,69	4,25	
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1,42	1,48	1,53	1,59	1,64	1,70	1,75	
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	25,15	29,76	34,37	38,97	43,58	48,19	52,79	
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/Â kota									
2	Tingkat Produktivitas Pertanian	Ton/Ha	5,02	5,04	5,06	5,08	6,00	6,02	6,04	
BB	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	74,5	74,10	74,15	74,20	74,25	74,30	74,35	
2	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	3	3	4	4	5	5	5	
3	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	49,43	54,20	58,97	63,75	68,52	73,29	78,07	
BC	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN yang Ditetapkan Dalam RPIK	%	2,00	2,01	2,31	2,61	2,91	3,21	3,51	
4	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kesil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan	%	65	65	75	80	85	90	95	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait									
6	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	2,10	2,11	2,47	2,82	3,18	3,54	3,9	
BD	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Persentase Jumlah Total Proyek Konstruksi Yang Dibawa Ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0	
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	82,72	84,87	87,02	89,18	91,33	93,49	95,64	
3	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	26,86	28,97	31,08	33,20	35,31	37,42	39,54	
4	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	74,61	77,46	80,31	83,17	86,02	88,88	91,73	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
BE	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Rasio PAD	%	9,28	9,98	10,68	11,38	12,08	12,77	13,47	
3	Manajemen Aset	Kategori	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	32,11	34,70	37,28	39,87	42,45	45,03	47,62	
5	Opini Laporan Keuangan	Indeks	10	10	10	10	10	10	10	
6	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	84,43	84,80	85,17	85,53	85,90	86,26	86,63	
7	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	6,88	7,89	8,90	9,92	10,93	11,94	12,95	
8	Rasio Belanja Urusan pemerintahan Umum (Dikurangi	%	52,44	53,89	55,34	56,80	58,25	59,70	61,15	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	transfer expenditures)									
9	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja totaldalam APBD	%	16,11	19,20	22,30	25,35	28,48	31,57	34,46	
10	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	9,50	9,64	9,78	9,92	10,06	10,20	10,35	
BF	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									
1	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	40,82	40,82	41,15	41,93	42,41	42,83	43,15	
2	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	76,90	77,12	77,87	78,24	78,86	79,53	80	
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
BG	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Indeks Maturitas SPIP	Indeks	3,075	3,100	3,200	3,300	3,400	3,500	3,600	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Indeks Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Indeks	3,00	3,20	3,30	3,40	3,60	3,70	3,70	

Sumber: hasil proyeksi, 2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

BAB V

PENUTUP

TABALONG SMART

BAB V

PENUTUP

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Pembangunan jangka menengah akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi "MENUJU TABALONG SMaRT (SEJAHTERA, MAJU, RELIGIUS DAN TERDEPAN)". Visi tersebut diwujudkan melalui misi 1). Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera; 2). Mendorong Kemajuan Daerah; 3). Mengembangkan Kehidupan yang Religius; dan 4). Menjadi Daerah yang Terdepan.

Letak strategis Tabalong, menjadikan wilayah ini sebagai gerbang logistik Kalimantan Selatan yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai simpul utama penghubung antarprovinsi dan pendukung IKN Nusantara. Dengan kesiapan SDM, penguatan infrastruktur, kebijakan investasi, dan kualitas pelayanan publik yang prima, Kabupaten Tabalong memiliki peluang besar menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Kalimantan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan, maka dibutuhkan beberapa pengaturan. Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, meliputi:

a. Bupati Tabalong wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 kepada masyarakat.
b. DPRD Kabupaten Tabalong melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029.

c. Perangkat Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun.
d. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD dengan mendorong koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi, dan media.
e. Dokumen RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 merupakan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.
f. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah. Evaluasi hasil RPJMD dilaporkan ke Bupati untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur.
g. Pemerintah Daerah membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap tahun dengan berpedoman pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
h. Pemerintah Daerah melakukan manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka menengah sesuai dengan rencana sehingga dapat mencapai sasaran pembangunan.
i. Pelaksanaan RPJMD kedalam perencanaan dan penganggaran tahunan disertai dengan pelaksanaan Program Strategis Nasional yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.
j. Pelaksanaan RPJMD membutuhkan pembiayaan yang memadai untuk memastikan perencanaan dapat berjalan dengan baik dan

mampu mencapai target kinerja. Untuk itu perlu peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan sektor non publik.

k. Perubahan RPJMD dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 berlaku selama 5 (lima) tahun ke depan. Pada saat dokumen RPJMD ini akan berakhir, maka untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah perlu disusun RPJMD periode berikutnya. Penyusunan RPJMD periode berikutnya dilakukan berdasarkan tahapan dan tata cara yang diatur oleh pemerintah pusat, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJPD Kabupaten Tabalong.

Selanjutnya, pada tahun 2029 akan dilakukan penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2030. Penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong tahun 2030 dilakukan dengan memedomani rencana tahun 2030 dalam RPJMD Kabupaten Tabalong tahun 2025-2029 serta permasalahan dan isu strategis daerah yang terkini. Mengingat RPJMD Kabupaten Tabalong periode berikutnya sedang disusun, maka RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2030 juga memedomani arah kebijakan RPJPD pada periode berkenaan, serta peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan RPJMD Periode 2025-2029 diharapkan dapat didukung oleh seluruh masyarakat dan dunia usaha. Dengan sinergi yang baik antara pemerintahan daerah dengan masyarakat dan dunia usaha, diharapkan visi **"Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius, dan Terdepan)"** dapat terwujud.

Bupati Tabalong

H. Muhammad Noor Rifani

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029

Tepat Data
Tepat Rencana
Tepat Sasaran

DATA YANG AKURAT, MELAHIRKAN PERENCANAAAN PEMBANGUNAN BERKUALITAS DAN SASARAN YANG DICAPAI AKAN BERDAMPAK LUAS BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

TABALONG SMART

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025